CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good goverment)*. Keuangan daerah harus di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomi serta bermanfaat untuk masyarakat.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang telah disesuaikan dengan susunan entitas yang ada. Rekonsiliasi telah dilakukan antara BPKD selaku SKPKD dengan SKPD terkait sebagai salah satu tahapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020. Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan serta perbaikan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5572);
u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
v. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
x. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01);
ee. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor : 9 No. Reg Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 425-9/2019)
ff. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 102);
gg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor : 7 (Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang : 177-7/2020)

hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20201 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10).
ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
nn. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMERINTAH DAERAH
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah di Tetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
- 4.1. Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
- 5.1. Rincian dari penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5.1.1 Pendapatan – LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan – LO
5.1.5 Beban
5.1.6 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana
5.2. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.
BAB VII PENUTUP

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pengukuran dari segi Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan laju inflasi merupakan Indikator ekonomi makro Pemerintah Kabupaten Lumajang. Indikator ekonomi makro tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Tahun.

Dengan mengacu pada kondisi pada akhir Tahun 2019, yang merupakan representasi kondisi awal Tahun 2020, variabel makro ekonomi Kabupaten Lumajang akhir Tahun 2020 masih berupa angka estimasi. Sehingga pada saat penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2020, kondisi makro ekonomi Kabupaten Lumajang akhir Tahun 2020 masih dalam proses penyusunan dan pendataan oleh Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan selama rentang waktu Tahun 2016-2020 dari Rp26.651.841,80 di Tahun 2016 menjadi Rp32.062.005,50 di Tahun 2020. Dengan pertumbuhan rata-rata 9,05 %. Walaupun pada Tahun 2020 dalam masa pandemi, Kabupaten Lumajang masih bisa mempertahankan PDRB ADHB berkisar Rp32.062.005,50 atau turun sedikit sekitar 1,7 %. Di setiap sektor usahanya dalam rentang waktu Tahun 2016-2020 semua mengalami tren naik, dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meraih nilai yang paling tinggi, dan diikuti industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor :

Tabel 1. PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.408.135,10	10.838.178,90	10.944.167,60	11.209.665,30	11.314.471,70
B	Pertambangan dan Penggalian	1.075.796,70	1.181.811,80	1.335.654,80	1.386.195,30	1.314.638,70
C	Industri Pengolahan	5.052.146,90	5.562.027,20	6.234.652,60	6.772.354,100	6.587.693,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.224,70	12.988,70	13.920,80	14.945,20	14.568,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.977,00	14.586,20	15.397,00	16.411,60	17.141,40
F	Konstruksi	2.038.503,70	2.225.254,60	2.417.103,50	2.611.543,90	2.465.890,20

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.446.094,90	3.776.825,80	4.215.955,00	4.572.267,40	4.288.290,90
H	Transportasi dan Pergudangan	456.342,40	510.955,90	564.894,30	628.950,00	596.864,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	314.783,70	354.012,70	394.519,90	434.875,90	392.032,90
J	Informasi dan Komunikasi	805.197,80	879.774,70	949.161,80	1.046.580,10	1.129.682,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	455.104,40	493.860,70	534.281,70	560.808,70	562.113,90
L	Real Estate	416.896,00	450.285,90	505.875,20	567.938,90	581.162,30
M,N	Jasa Perusahaan	83.893,50	91.558,90	102.348,90	111.502,30	105.811,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	809.200,20	852.955,20	962.250,00	1.057.573,10	1.087.719,70
P	Jasa Pendidikan	672.458,20	729.709,90	770.202,60	831.601,60	864.092,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	182.274,90	202.482,70	220.221,40	242.608,90	267.053,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	409.811,70	455.579,30	509.828,00	555.128,50	472.777,20
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**26.651.841,80**	**28.632.849,10**	**30.690.435,10**	**32.620.950,80**	**32.062.005,50**
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	**26.651.841,80**	**28.632.849,10**	**30.690.435,10**	**32.620.950,80**	**32.062.005,50**

Sumber data : BPS Kabupaten Lumajang

Estimasi PDRB berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan pada Tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif meskipun sedikit turun dari Tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2019 sebesar Rp32.620.950,80 dan pada akhir Tahun 2020 diestimasikan turun menjadi Rp32.062.005,50 atau mengalami sedikit pergeseran turun sebesar 1,71% dari Tahun 2019. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2019 sebesar Rp22.563.389,81 dan juga diestimasikan turun menjadi Rp21.933.792,35 pada akhir Tahun 2020, atau mengalami penurunan sebesar 2,79%.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lumajang selama tujuh Tahun terakhir dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lumajang
Tahun 2014 – 2020

Dalam Rupiah

	PDRB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
Tahun	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
2014	21.983.119,39	17.851.856,60		
2015	24.417.114,79	18.676.946,21	11,07	4,62
2016	26.651.841,83	19.555.167,96	9,15	4,70
2017	28.632.849,08	20.542.930,67	7,43	5,05
2018	30.690.435,08	21.569.780,75	7,19	5,00
2019	32.620.951,10	22.563.389,81	6,29	4,61
2020	32.062.005,43	21.933.792,35	(1,71)	(2,79)

Sumber data : BPS Kabupaten Lumajang

b. Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel dibawah terlihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan selama rentang waktu Tahun 2016 – 2020 dari Rp19.555.167,96 menjadi Rp21.933.792,35 di Tahun 2020. Dengan pertumbuhan rata-rata 5,23 %. Walaupun pada Tahun 2020 dalam masa pandemi, Kabupaten Lumajang masih bisa mempertahankan PDRB ADHK berkisar Rp21.933.792,4 atau turun sekitar 2,79 %. Seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, di setiap sektor usahanya dalam rentang waktu 2016 – 2020 semua mengalami tren naik, dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meraih nilai yang paling tinggi, dan diikuti industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Angka Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2016 -2020 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3. PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.122.609,50	7.262.153,30	7.220.049,00	7.269.200,10	7.250.662,70
B	Pertambangan dan Penggalian	787.870,20	849.022,80	915.771,10	926.924,60	864.283,90
C	Industri Pengolahan	3.829.652,10	4.099.401,80	4.490.960,20	4.801.325,60	4.650.158,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.745,00	11.069,10	11.416,10	12.062,90	11.835,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.859,90	12.175,40	12.799,30	13.347,20	13.907,00

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
F	Konstruksi	1.342.693,50	1.424.115,80	1.533.413,30	1.643.430,80	1.544.762,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.776.511,00	2.988.658,30	3.212.945,30	3.430.403,20	3.161.711,20
H	Transportasi dan Pergudangan	365.078,00	394.154,50	427.344,20	466.435,90	439.310,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	240.907,70	263.333,50	289.381,20	314.203,10	281.345,90
J	Informasi dan Komunikasi	767.381,40	823.630,50	888.145,40	967.483,50	1.040.801,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	328.263,90	344.419,70	363.220,00	378.603,60	378.807,50
L	Real Estate	326.527,60	343.964,10	372.650,70	407.456,30	414.005,40
M,N	Jasa Perusahaan	63.730,40	67.567,00	72.434,50	77.000,80	71.794,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	616.197,60	636.593,80	679.049,50	698.061,10	682.926,70
P	Jasa Pendidikan	499.911,10	529.505,90	553.991,10	590.622,70	607.497,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.435,90	149.030,60	160.582,30	173.268,30	189.160,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	324.793,10	344.134,50	365.627,70	393.560,10	330.821,30
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**19.555.167,90**	**20.542.930,60**	**21.569.780,90**	**22.563.389,80**	**21.933.792,10**
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	**19.555.167,90**	**20.542.930,60**	**21.569.780,90**	**22.563.389,80**	**21.933.792,10**

Keterangan : *) Angka Sementara**) Angka Sangat Sementara***) Angka Target / Prediksi

c. Tingkat Inflasi

Perputaran barang dan jasa di suatu kota tidak dapat terpisahkan dari hukum permintaan dan penawaran barang dimana kelangkaan (kuantitas) pada suatu komoditas akan mempengaruhi harga ataupun sebaliknya. Perubahan yang terjadi pada harga tentu saja berdampak pada perekonomian setempat baik dalam kondisi meningkat atau menurunnya harga. Hal yang menjadi perhatian utama bagi seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia tak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang adalah bagaimana menjaga harga agar senantiasa stabil yang disebabkan apabila harga (secara umum) mengalami peningkatan (biasa disebut dengan inflasi) akan mempengaruhi daya beli masyarakat setempat dan berakibat pada melemahnya perekonomian wilayah tersebut. Mengacu pada Bank Indonesia, inflasi diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen.

d. Pendapatan Regional Per Kapita

Pendapatan per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Tingkat pendapatan yang diterima masyarakat yang tinggi dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang tinggi. Sebaiknya tingkat pendapatan masyarakat yang rendah mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang rendah.

Pada umumnya pendapatan regional disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku. Karena pendapatan regional selain dipengaruhi faktor tingkat produksi juga dipengaruhi harga barang dan jasa, namun gambaran tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi, karena pengaruh inflasi sangat dominan dalam pembentukan PDRB maupun pendapatan regional per kapita.

Data statistik yang diterbitkan BPS Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama lima Tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lumajang semakin membaik.

Tabel 4. Pertumbuhan Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020

Dalam Rupiah

	ADHB			ADHK 2010		
Tahun	Pendapatan Per Kapita	Pertumbuhan	%	Pendapatan Per Kapita	Pertumbuhan	%
2016	23.993.665,47	0,00	0,00	17.604.792,99	0,00	0,00
2017	25.699.400,33	1.705.734,86	7,11	18.438.297,84	833.504,85	4,73
2018	27.467.478,06	1.768.077,73	6,88	19.304.629,53	866.331,70	4,70
2019	29.122.412,42	1.654.934,36	6,03	20.143.506,60	838.877,06	4,35
2020	28.559.766,61	(562.645,81)	1,93	19.537.891,72	(605.614,87)	(3,01)

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang semakin baik dari tahun ke tahun. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ini terlihat dari prosentase IPM sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat. Adapun IPM Kabupaten Lumajang pada tahun 2015 adalah sebesar 63,02 dan pada

tahun 2016 IPM Kabupaten Lumajang naik menjadi sebesar 63,74. Sedangkan pada tahun 2017 IPM Kabupaten Lumajang naik lagi menjadi sebesar 64,83 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 64,83. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Lumajang terus mengalami peningkatan hingga mencapai 65,33. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut masyarakat Lumajang mengalami peningkatan kualitas taraf hidup.

Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019

Dalam Rupiah

	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Pembangunan Manusia	63,02	63,74	64,23	64,83	65,33

Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia 2015 – 2019 BPS Kabupaten Lumajang

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015 - 2019

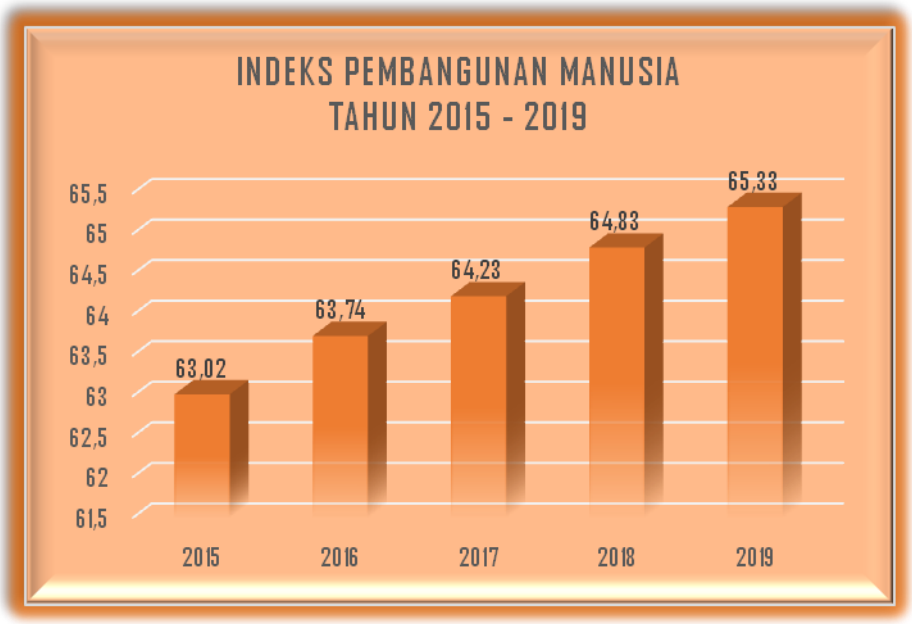

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data BPS di Kabupaten Lumajang, tingkat pengangguran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan yang relatif signifikan. Ini terlihat dari prosentase pengangguran di Kabupaten Lumajang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019

ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan. Adapun tingkat pengangguran di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar 2,91, sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,55 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan lagi hingga mencapai 2,84. Hal ini diduga akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaan.

Tabel 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2019

Dalam Rupiah

URAIAN	2017	2018	2019
Jumlah Pengangguran	2,91	2,55	2,84

Sumber Data : Jumlah Pengangguran 2017 – 2019 BPS Kabupaten Lumajang

Gambar 2. Tingkat Capaian Kinerja TPT pada tahun 2017 - 2019

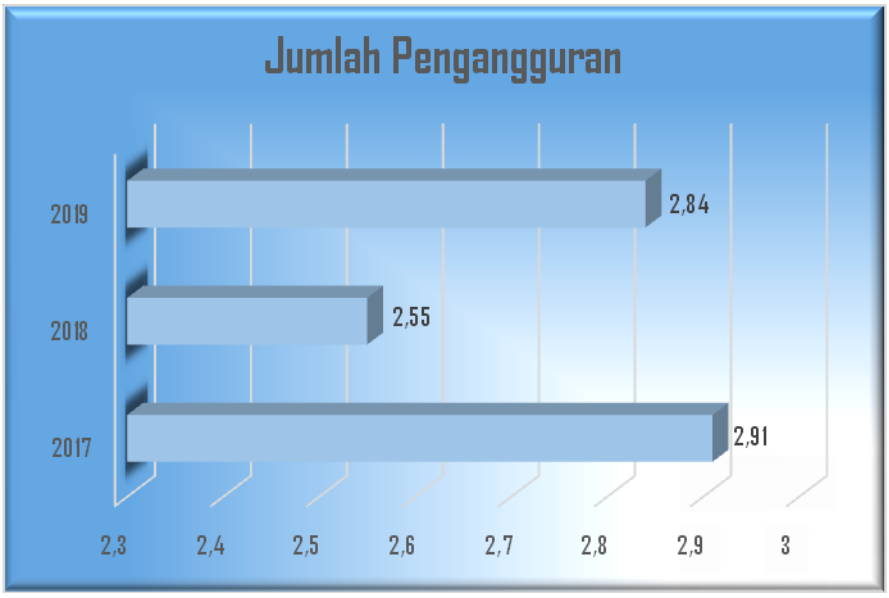

g. Indeks Gini (Gini Ratio)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Data Indeks Gini pada tahun 2018 dan 2019 pada Kabupaten Lumajang hingga saat ini belum tersedia karena data belum terpublikasikan.

Pada Tahun 2015 Indeks Gini mencapai angka 0,29 yang menunjukkan tingkat ketimpangan sedang, kemudian naik menjadi 0,35 pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 turun sebesar 0,31.

Tabel 7. Indeks Gini Rasio Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019

Dalam Rupiah

URAIAN	2015	2016	2017
Gini Rasio	0,32	0,31	0,30

Sumber Data : Gini Rasio Kabupaten Lumajang 2015 – 2017 BPS Kabupaten Lumajang

Gambar 3. Gini Ratio Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019

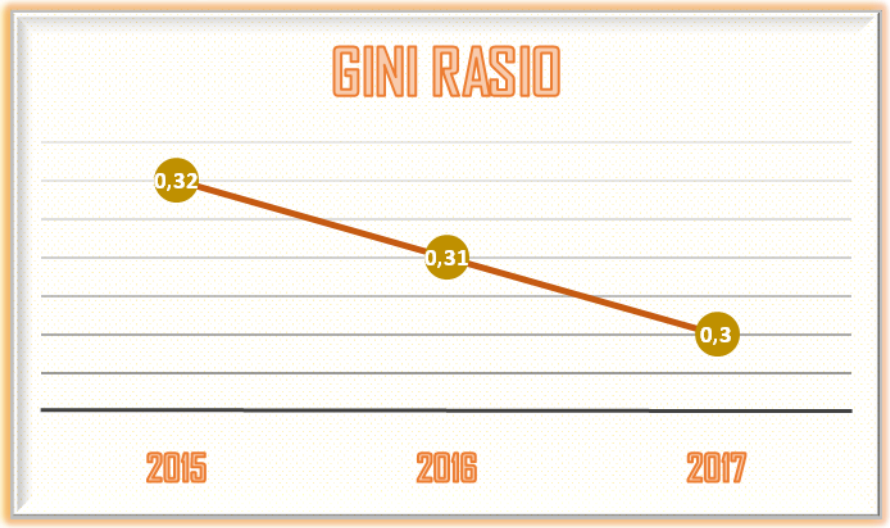

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 Tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi, gini rasio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (decille).

h. Prosentase Kemiskinan

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan Kabupaten Lumajang menurun secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari prosentase penduduk miskin yang berkurang setiap tahunnya., yaitu sebesar 11,22% pada tahun 2016; 10,87% pada tahun 2017; 9,98% pada tahun 2018; 9,49% pada tahun 2019 dan 9,17% pada tahun 2020. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin Kabupaten Lumajang yang juga menurun secara signifikan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 11.591, pada tahun 2017 sebesar 11.265, pada tahun 2018 sebesar 10.369, pada tahun 2019 sebesar 9.888. Sedangkan pada tahun 2020, meskipun prosentase penduduk miskin menurun namun jumlah penduduk miskin justru semakin bertambah menjadi 102.600 yang juga dikarenakan dampak pandemik Covid-19 yang menyebabkan sebagian penduduk kehilangan pekerjaan.

Tabel 8. Penduduk Miskin Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020

Dalam Rupiah

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Miskin	11,22	10,87	9,98	9,49	9,17

Sumber Data : Jumlah Penduduk Miskin 2015 – 2019 BPS Kabupaten Lumajang

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Lumajang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami trend positif seperti tergambar dalam (grafik 2.4) dimana secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan.

Gambar 4. Penduduk Miskin Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020

2.2.1. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal, kebijakan Pemerintah Daerah di bidang keuangan diarahkan pada upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan dalam rangka mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pada Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai pandemi (WHO, 2020). Sejak bulan Maret hingga saat ini, Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan dalam beberapa minggu terakhir, peningkatan jumlah pasien positif mencapai semakin tinggi setiap hari. Aspek kehidupan yang terdampak, seperti aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan sosial bukan tidak mungkin akan menjadi semakin tidak stabil.

Beberapa langkah telah dilakukan dalam upaya penanggulangan pandemi ini salah satu langkah awal pemerintah adalah melakukan recofusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dampak kebijakan-kebijakan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain penurunan pendapatan daerah, peningkatan belanja daerah untuk kebutuhan covid, penyesuaian pembiayaan, serta peningkatan defisit APBD. Peningkatan beban anggaran menjadi alasan dilakukannya realokasi dan refocusing belanja daerah. Pergeseran anggaran difokuskan pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, serta dunia usaha dan program pemulihan ekonomi daerah. Realokasi dan refocusing anggaran diakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

a. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah APBD Kabupaten Lumajang masih sangat tergantung kepada dana-dana transfer dari Pemerintah pusat. Namun demikian dalam upaya mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pusat, maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Lumajang juga diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Disamping upaya upaya untuk bisa mendapatkan dari sumber sumber pembiayaan pembangunan yang lain, yaitu dengan menggandeng swasta dan meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Desa maupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

Gambaran umum rencana pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang digali dari potensi yang ada di daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Secara umum besaran kontribusi PAD terhadap total pendapatan Daerah tersaji dalam tabel berikut:

Dari data beberapa Tahun terakhir kontribusi PAD terhadap postur pendapatan APBD masih relatif kecil, rata-rata berkisar 12% - 14% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat

senantiasa mendorong dan meningkatkan perolehan pendapatan dari sisi PAD dengan memperhatikan sumber potensi yang ada terutama dengan lebih mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam yang ada, kemampuan masyarakat serta ketentuan yang mengaturnya agar tidak menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya biaya ekonomi yang tinggi.

Dengan demikian kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2020 adalah meningkatkan kontribusi PAD lebih dari 12% dari total pendapatan, dengan memperhatikan potensi masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dengan demikian pada Tahun 2020 beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan pada sektor Pendapatan Asli Daerah antara lain:

a. Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi;
b. Penyempurnaan regulasi pemanfaatan kekayaaan yang tidak dipisahkan;
c. Perubahan sistem pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum;
d. Penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah, tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Indentifikasi dan Pemutakhiran data potensi PAD;
f. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi Daerah;
g. Kemudahan Investasi Daerah;
h. Pengelolaan sektor pariwisata dengan melibatkan investor (swasta).

2) PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN (TRANSFER)

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan urusan desentralisasi yang alokasinya ditetapkan setiap Tahun melalui APBN. Berikut upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka meningkatkan dana transfer dari Pemerintah Pusat, antara lain :

- Mematuhi segala peraturan perundangan terkait penyaluran dana transfer;
- Penyampaian usulan DAK seusai kebutuhan dan kebijakan pusat;
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait penyaluran, penggunaan dan pelaporan Dana Alokasi Khusus;
- Pemenuhan belanja mandatory;
- Memenuhi persyaratan memperoleh Dana Insentif Daerah.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari selain PAD dan Dana Perimbangan, seperti pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang berhubungan dengan lain-lain pendapatan yang sah ditentukan oleh pemerintah pusat/provinsi serta pihak lainnya seperti pendapatan hibah dan dana darurat. Namun demikian

Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk mensinkronkan program di daerah dengan program nasional/ provinsi dalam rangka untuk meningkatkan perolehan Dana Hibah dan Bantuan Keuangan Khusus.

b. KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta beRpedoman pada standar satuan harga/standar biaya yang berlaku di Kabupaten Lumajang. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan harga/standar biaya yang berlaku di Kabupaten Lumajang.

Belanja daerah diarahkan untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serap aspirasi masyarakat, pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dan kebijakan strategis lainnya dengan menerapkan fungsi alokasi dan distribusi pengeluaraan anggaran yang tepat, melalui kebijakan :

a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran kegiatan dengan menetapkan pencapaian tujuan dan sasaran secara jelas;
b. Anggaran disusun dengan lebih memperhatikan pola anggaran berbasis kinerja dengan menerapkan pola “Money Follow Program”;
c. Menerapkan disiplin anggaran yang didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan daya saing daerah;
d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran;
e. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2020, kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dengan demikian belanja daerah diarahkan untuk terwujudnya pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang ada di Kabupaten Lumajang.

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib, kebijakan belanja diarahkan sebagai berikut:

1) Urusan **Pendidikan,** terselenggaranya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung perluasan akses pendidikan dasar dalam program wajib belajar pendidikan dasar serta mengembangkan kegiatan strategis berupa perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana

pendidikan yang rusak terutama pada pendidikan dasar untuk meningkatkan keamanan/keselamatan, kenyamanan, dan kualitas proses pembelajaran;

2) Urusan **Kesehatan**, penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan kepada masyarakat dengan menyediakan pelayanan kesehatan gratis kepada keluarga miskin/tidak mampu dengan meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan yang mengutamakan kualitas layanan serta kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan sampai pelosok desa, khususnya daerah terpencil dan tertinggal;
3) Urusan **Pekerjaan Umum**, meningkatkan & mempertahankan infrastuktur yang diarahkan untuk:
   (a) Mempertahankan/meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan dan jembatan kabupaten dan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan dan jembatan, dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang, dan jasa, terutama untuk meningkatkan akses - akses ke daerah potensial seperti pertanian, industri, dan pariwisata, membuka daerah terisolasi dan terpencil, serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional;
   (b) Mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem jaringan irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten khususnya di daerah lumbung pangan daerah dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program ketahanan pangan; dan
   (c) Meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) dan memberikan akses pelayanan sistem penyediaan air minum dan sanitasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan kawasan kumuh perkotaan termasuk daerah pesisir dan permukiman nelayan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
4) Urusan **Perumahan**, kebijakan diarahkan untuk penataan dan perbaikan lingkungan perumahan tidak layak huni di pedesaan dan kawasan kumuh perkotaan dengan prioritas masyarakat tidak mampu dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan dan masyarakat sehat;
5) Urusan **Penataan Ruang**, kebijakan belanja diprioritaskan untuk perencanaan, pemanfatan dan pengendalian tata ruang khususnya mengantisipasi perkembangan tata ruang kota sehingga perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan;
6) Urusan **Perencanaan pembangunan**, kebijakan diarahkan untuk peningkatan program perencanaan pembangunan daerah sehingga selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;
7) Urusan **Perhubungan**, kebijakan diarahkan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perhubungan kepada masyarakat dengan penyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas serta peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;

8) Urusan **Lingkungan Hidup**, kebijakan diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah daerah dalam melakukan tindakan nyata dalam rangka peningkatan pelestarian kualitas lingkungan dan pengendalian lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan bersih terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
9) Urusan **Pertanahan**, melakukan penertiban dan penataan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah milik daerah serta memfasilitasi penyelesaian konflik(konflik pertanahan;
10) Urusan **Kependudukan**, peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil dengan melakukan penataan dan peningkatan kualitas administrasi kependudukan untuk menghasilkan informasi kependudukan yang akurat dalam rangka pengendalian dan penentuan kebijakan kependudukan oleh pemerintah daerah;
11) Urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
12) Urusan **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**, meningkatkan pelayaan KB dan KIE serta alat kontrasepsi bagi keluarga miskin melalui pelayanan KB keliling dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri melalui kelompok kegiatan masyarakat dan posyandu;
13) Urusan **Sosial**, penanggulangan masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahtaraan masyarakat secara adil dan merata melalui pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial lainnya dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan berusaha sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial;
14) Urusan **Tenaga Kerja**, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemberian perlindungan tenaga kerja serta pembinaan lembaga ketenagakerjaan;
15) Urusan **Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif serta pengembangan kewirausahaan usaha kecil dan menengah;
16) Urusan **Kebudayaan**, pengembangan, pengelolaan dan pelestarian nilai(nilai keanekaragaman budaya;
17) Urusan **Kepemudaan dan Olah Raga**, meningkatkan pembinaan dan peran kepemudaan serta pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
18) Urusan **Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri**, meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan dengan menjaga kondusifitas wilayah, peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta pendidikan politik masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam;
19) Urusan **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian,** kebijakan belanja diarahkan sebagai berikut:
    (a) Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD;
    (b) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

(c) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah serta fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
(d) Peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
(e) Penataan peraturan perundang-undangan;
(f) Peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya aparatur;
(g) Peningkatan kerja sama dan koordinasi pemerintahan.

20) Urusan **Ketahanan Pangan**, peningkatan ketahanan pangan daerah melalui pemetahan daerah rawan pangan, mengendalikan dan menjaga ketersediaan kebutuhan pangan serta menjaga kelancaran distribusi pangan daerah;
21) Urusan **Pemberdayaan Masayarakat Desa,** peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan peningkatan peran perempuan di pedesaan;
22) Urusan **Kearsipan**, peningkatan kualitas sistem administrasi kearsipan sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah sebagai salah satu sumber informasi daerah;
23) Urusan **Perpustakaan**, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang pembelajar.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan, kebijakan belanja diarahkan sebagai berikut:

1) Urusan **Pertanian**, peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan kualitas/kuantitas hasil produksi pertanian, peternakan dan perkebunan dengan menyediakan sarana, prasarana dan teknologi pertanian, pencegahan dan penanggulanan penyakit, kemudahan dalam mendapatkan pupuk, kemudahan akses distribusi pemasaran hasil produksi pertanian;
2) Urusan **Kehutanan**, pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, pembinaan dan penertiban industri hasil hutan serta pengembangan hutan;
3) Urusan **Kelautan dan Perikanan**, peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan, peningkatan dan pengembangan pemanfaatan budidaya perikanan laut dan air tawar dengan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta distribusi pemasaran hasil perikanan;
4) Urusan **Perdagangan**, peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan penyelenggaraan pasar murah untuk masyarakat miskin, peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah serta pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
5) Urusan **Perindustrian**, pengembangan industri kecil menengah dengan meningkatkan kemampuan penerapan teknologi industri serta pengembangan sentra - sentra industri potensial.

Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah di dalam APBD 2020 sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung

(a) Belanja Pegawai

(1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat tunjangan keluarga dan mutasi pegawai telah diperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).

(2) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2019 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah.

(b) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

(1) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

(2) Belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada instansi Vertikal, mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggunjawabannya memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan terkait hibah daerah;

(3) Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas; dan

(4) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

(c) Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2020, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

(d) Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah daerah menganggarkan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan

maksud Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(e) Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

2) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a) Untuk merencanakan alokasi belanja dalam APBD agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik dari pada kepentingan aparatur;

(b) Anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar mempedomani/ mempertimbangkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

(c) Belanja Pegawai

Penganggaran honorarium Non PNS hanya dapat disediakan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan.

(d) Belanja Barang dan Jasa

(1) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;

(2) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada Tahun anggaran berkenaan dialokasikan pada belanja barang dan jasa;

(3) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;

(4) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang

dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;

(5) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat agar dilaksanakan di kantor kecuali dengan alasan tertentu dapat dilaksanakan di luar kantor;

(6) Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan agar mengambil langkah (langkah dalam penyiapan dukungan program/kegiatan pengalihan (data, system, standar pengelolaan, keterampilan, dsb) atas PBB perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlaku serta penyiapan sarana dan prasarana;

(7) Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan dukungan program dan kegiatan terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut ketentuan dimaksud.

(8) Belanja Modal

(9) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah agar dalam merencanakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di daerah;

(10) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; dan

(11) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

c. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan sebagai berikut:

1) Apabila APBD diperkirakan surplus, maka kebijakan pembiayaan dalam rangka pemanfaatan surplus anggaran diarahkan untuk :
   (a) Pembentukan dana cadangan;
   (b) Pembayaran pokok utang;
   (c) Penyertaan modal (investasi) daerah dengan memilih instrumen investasi yang bebas resiko dan menguntungkan secara ekonomi dan sosial; dan
   (d) Pemberian pinjaman kepada pihak lain maupun kepada masyarakat dalam bentuk dana bergulir.

2) Apabila APBD diperkirakan defisit, maka kebijakan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran antara lain:
   (a) Penggunaan SILPA Tahun anggaran yang lalu;
   (b) Pencairan dana cadangan;
   (c) Divestasi, yaitu menjual kembali investasi pemerintah daerah/kekayaan daerah yang dipisahkan;
   (d) Melakukan pinjaman kepada pemerintah/lembaga keuangan bank/ bukan bank maupun pihak lainnya; dan
   (e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman dari pihak lain/masyarakat.

2.2.2. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD meliputi indikator pencapaian target kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

a. Indikator Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah

Indikator pencapaian target kinerja pendapatan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara keseluruhan mencapai Rp2.118.849.571.641,14. Jumlah tersebut merupakan 100,69% dari anggaran sebesar Rp2.104.300.585.569,86. Dengan demikian pencapaian target kinerja pendapatan secara total sudah memenuhi anggaran yang telah ditetapkan.

b. Indikator Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah

Indikator pencapaian target kinerja belanja berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Di dalam APBD Tahun 2020 belanja dianggarkan sebesar Rp2.191.780.123.105,47 dengan realisasi sebesar Rp2.028.732.782.607,05.

c. Indikator Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah

Indikator pencapaian target pembiayaan daerah dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2020 sebesar Rp88.542.490.226,24 dari anggaran sebesar Rp88.479.537.535,61. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Secara keseluruhan pencapaian kinerja pembiayaan 101,22% mengindikasikan pencapaian target kinerja sesuai harapan di dalam APBD.

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3. 1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. PENDAPATAN DAERAH

Pada APBD Tahun 2020, secara keseluruhan pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp2.104.300.585.569,86. Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp2.118.849.571.641,14 atau 100,69% dari anggaran. Realisasi ini mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya dimana realisasi Tahun 2019 mencapai 97,09% dari anggaran. Secara rinci pencapaian kinerja keuangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Pendapatan Daerah Tahun 2020

Dalam Rupiah

Keterangan	Anggaran	Realisasi 2020	Realisasi 2019	%	Pelampauan Target	%
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**280.977.944.540,86**	**300.263.112.642,77**	**296.467.374.174,37**	**106,86**	**19.285.168.101,91**	**6,86**
Pendapatan Pajak Daerah	70.000.000.000,00	68.659.995.181,00	74.232.832.052,00	98,09	(1.340.004.819,00)	(1,91)
Pendapatan Retribusi Daerah	50.019.898.222,00	46.060.581.317,00	58.197.444.588,18	92,08	(3.959.316.905,00)	(7,92)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.105.516.366,26	5.105.516.366,26	4.968.766.089,07	100,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.852.529.952,60	180.437.019.778,51	159.068.331.445,12	115,77	24.584.489.825,91	15,77
PENDAPATAN TRANSFER	**1.723.648.930.650,00**	**1.725.518.141.013,00**	**1.774.505.135.577,00**	**100,11**	**1.869.210.363,00**	**0,11**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**1.292.726.757.634,00**	**1.271.212.220.474,00**	**1.409.112.910.571,00**	**98,34**	**(21.514.537.160,00)**	**(1,66)**
Dana Bagi Hasil Pajak	31.886.741.114,00	23.800.062.748,00	17.345.158.115,00	74,64	(8.086.678.366,00)	(25,36)

Keterangan	Anggaran	Realisasi 2020	Realisasi 2019	%	Pelampauan Target	%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	40.836.663.648,00	44.540.332.432,00	59.160.410.819,00	109,07	3.703.668.784,00	9,07
Dana Alokasi Cukai	23.511.443.753,00	21.676.888.481,00	18.765.467.031,00	92,20	(1.834.555.272,00)	(7,80)
Dana Alokasi Umum	920.012.364.000,00	908.166.706.000,00	1.003.092.909.000,00	98,71	(11.845.658.000,00)	(1,29)
Dana Alokasi khusus	276.479.545.119,00	273.028.230.813,00	310.748.965.606,00	98,75	(3.451.314.306,00)	(1,25)
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**227.364.377.000,00**	**227.364.377.000,00**	**188.469.078.400,00**	**100,00**	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	227.364.377.000,00	227.364.377.000,00	188.469.078.400,00	100,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Provinsi	**203.557.796.016,00**	**226.941.543.539,00**	**176.923.146.606,00**	**111,49**	**23.383.747.523,00**	**11,49**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99.928.704.266,00	123.312.451.789,00	143.138.787.606,00	123,40	23.383.747.523,00	23,40
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	103.629.091.750,00	103.629.091.750,00	33.784.359.000,00	100,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**99.673.710.379,00**	**93.068.317.985,37**	**115.621.305.341,92**	**93,37**	**(6.605.392.393,63)**	**(6,63)**
Pendapatan Hibah	99.546.803.000,00	90.502.574.768,00	115.280.781.160,00	90,91	(9.044.228.232,00)	(9,09)
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	126.907.379,00	2.565.743.217,37	340.524.181,92	2.021,74	2.438.835.838,37	1.921,74
JUMLAH PENDAPATAN	**2.104.300.585.569,86**	**2.118.849.571.641,14**	**2.186.593.815.093,29**	**100,69**	**14.548.986.071,28**	**0,69**

Realisasi PAD Tahun 2020 mencapai 100,69% dari target yang telah ditetapkan di dalam APBD. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pencapaian terget periode sebelumnya, dimana pada Tahun 2019 realisasi PAD mencapai 97,09% dari target yang ditetapkan di dalam APBD Tahun 2019.

Kontribusi terbesar terhadap realisasi pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Transfer, khususnya transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah provinsi dimana besarnya realisasi pendapatan transfer dana perimbangan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penetapan besarnya dana perimbangan yang dialokasikan kepada Kabupaten Lumajang. Sehingga untuk mengukur kinerja keuangan sehubungan dengan pendapatan daerah tidak dapat dilihat dari seberapa besar total pendapatan yang diperoleh Kabupaten Lumajang. Akan sangat relevan jika kinerja tersebut dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah yang mencerminkan seberapa besar kemandirian daerah. Dengan demikian, berbagai upaya dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan PAD.

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah, hanya mencapai 14,17% dari total pendapatan sebesar Rp2.118.849.571.641,14. Angka ini mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, dimana pada Tahun 2019 kontribusi PAD terhadap total pendapatan mencapai 13,56% dari total pendapatan sebesar Rp2.186.593.815.093,29.

Demikian kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah, karena sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Lumajang masih tergantung kepada Pemerintah Pusat. Kondisi ini merupakan tugas berat bagi pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kinerjanya sehingga PAD bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah di Tahun-Tahun mendatang.

Tabel 10. Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Jenis Pendapatan	Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	300.263.112.642,77	14,17
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan	1.271.212.220.474,00	60,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	227.364.377.000,00	10,73
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi	226.941.543.539,00	10,71
5	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	93.068.317.985,37	4,39
	Jumlah Pendapatan	2.118.849.571.641,14	100,00

Gambar 5 menyajikan data tentang perbandingan antara realisasi PAD dengan total pendapatan daerah selama lima Tahun terakhir.

Gambar 5. Diagram Perbandingan Realisasi PAD dengan Total Pendapatan Tahun 2016 s/d 2020

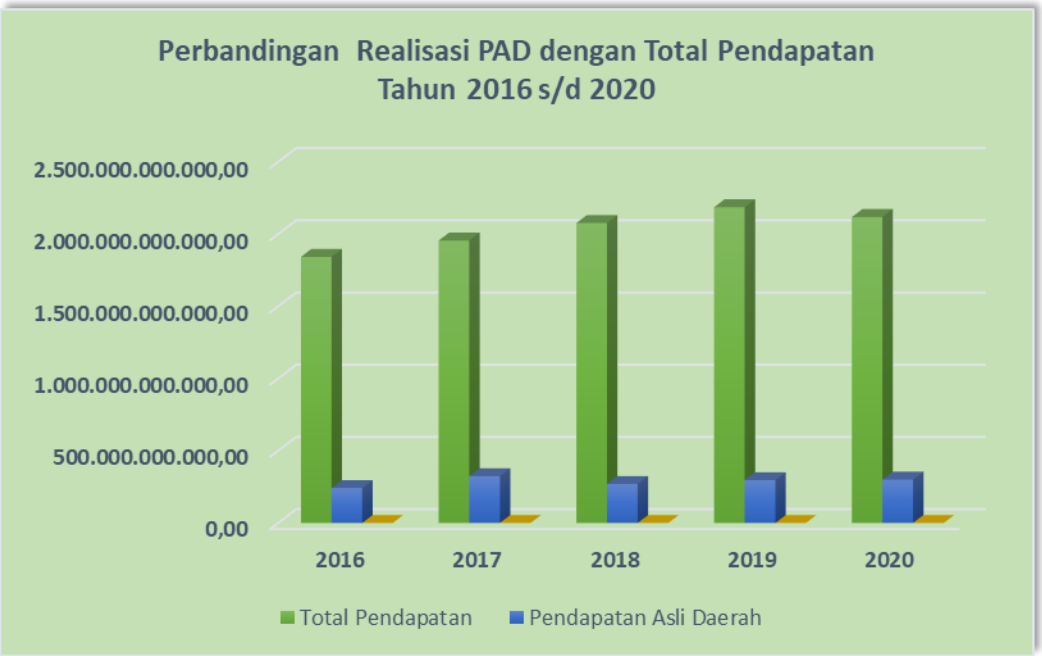

Dalam kurun waktu lima Tahun terakhir, realisasi PAD menunjukkan adanya peningkatan dari Tahun ke Tahun, akan tetapi persentase peningkatan PAD dari periode sebelumnya sempat mengalami penurunan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Realisasi PAD Tahun 2016 s/d 2020

Dalam Rupiah

Tahun	Realisasi	Kenaikan / Penurunan	%
2016	242.111.541.251,56	29.526.447.815,93	9,54
2017	324.253.671.099,01	82.142.129.847,45	33,93
2018	270.139.870.884,23	(54.113.800.214,78)	(16,69)
2019	298.467.374.174,37	28.327.503.290,14	10,49
2020	300.263.112.642,77	1.795.738.468,40	0,60

Adanya kecenderungan naik dan turunnya realisasi PAD dari Tahun 2016 s/d Tahun 2020 tidak terlepas dari berbagai kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Gambar 6. Diagram perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s/d 2020

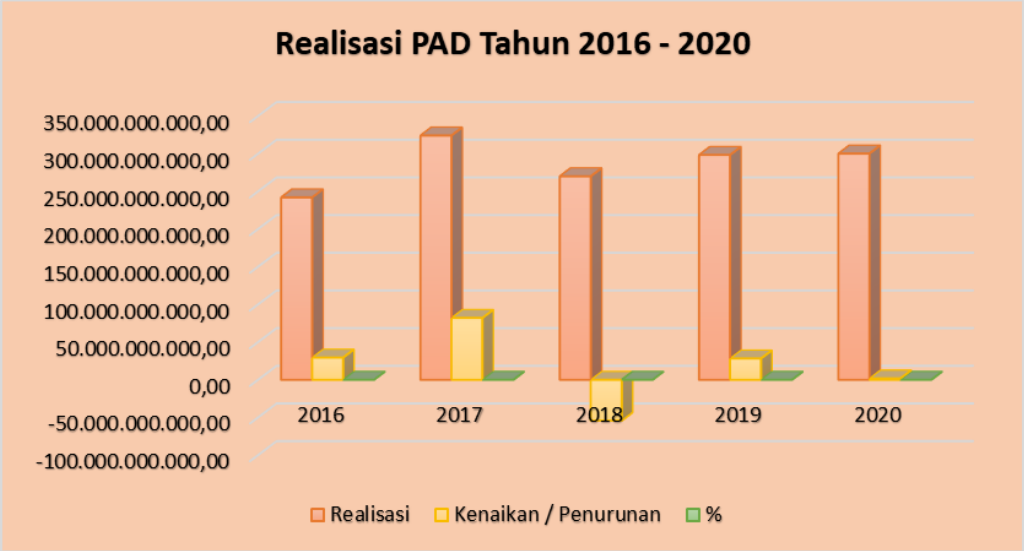

b. BELANJA DAERAH DAN TRANSFER

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun angaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Sedangkan transfer merupakan pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan (pemerintah daerah) kepada entitas pelaporan lain (misal pemerintah desa) termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Sebagaimana terlihat di tabel belanja daerah di dalam APBD Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp2.191.780.123.105,47 realisasi belanja mencapai 92,56% dari anggarannya atau sebesar Rp2.028.732.782.607,05.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja dan Transfer Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.609.722.747.991,16	1.480.355.378.952,79	91,96	(129.367.369.038,37)
2	Belanja Modal	215.354.341.154,31	198.145.592.481,26	92,01	(17.208.748.673,05)
3	Belanja Tidak Terduga	34.447.496.044,00	18.033.773.257,00	52,35	(16.413.722.787,00)
4	Belanja Transfer	332.255.537.916,00	332.198.037.916,00	99,98	(57.500.000,00)
	Jumlah Belanja	**2.191.780.123.105,47**	**2.028.732.782.607,05**	**92,56**	**(163.047.340.498,42)**

1) Belanja Operasi

Pada Tahun 2020 belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.609.722.747.991,16 dan terealisasi sebesar Rp1.480.355.378.952,79 dari anggaran. Tabel dibawah ini menyajikan data yang memberikan informasi tentang seberapa besar penyerapan anggaran untuk tiap-tiap jenis belanja operasi.

a) Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp741.631.927.441,00 dari anggaran sebesar Rp790.148.100.431,21. Dibandingkan dengan penyerapan Tahun 2019, penyerapan belanja pegawai Tahun 2020 terjadi penurunan dimana pada Tahun sebelumnya terserap sebesar Rp780.427.298.106,50 dari anggarannya;

b) Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp555.859.126.089,79 dari anggaran sebesar Rp628.632.611.691,95. Dibandingkan dengan penyerapan Tahun 2019, penyerapan belanja barang dan jasa Tahun 2020 terjadi penurunan dimana pada Tahun sebelumnya terserap sebesar Rp599.495.571.358,03 dari anggarannya;

c) Belanja bunga tidak dianggarakan jadi terealisasi 0% tidak di target di dalam APBD;

d) Belanja hibah terealisasi sebesar Rp125.225.839.973,00 dari anggaran sebesar Rp127.793.251.752,00. Dibandingkan dengan penyerapan Tahun 2019, penyerapan belanja hibah Tahun 2020 terjadi penurunan dimana pada Tahun sebelumnya terserap sebesar Rp159.157.268.656,90 dari anggarannya;

e) Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp56.568.658.101,00 dari anggaran sebesar Rp62.078.956.767,00. Dibandingkan dengan penyerapan Tahun 2019, penyerapan belanja bantuan sosial Tahun 2020 terjadi kenaikan dimana pada Tahun sebelumnya hanya terserap sebesar Rp54.895.923.459,00 dan;

f) Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik terealisasi sebesar Rp1.069.827.348,00 dari anggaran sebesar Rp1.069.827.348,00. Dibandingkan dengan penyerapan Tahun 2019, penyerapan belanja bantuan keuangan partai politik Tahun 2020 terjadi kenaikan dimana pada Tahun sebelumnya hanya terserap sebesar Rp1.000.162.612,00.

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan–Belanja Operasi Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Belanja Operasi	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	790.148.100.431,21	741.631.927.441,00	93,86	(48.516.172.990,21)	(6,54)
2	Belanja Barang dan Jasa	628.632.611.691,95	555.859.126.089,79	88,42	(72.773.485.602,16)	(13,09)

No	Belanja Operasi	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp	%	Rp	%
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	127.793.251.752,00	125.225.839.973,00	97,99	(2.567.411.779,00)	(2,05)
6	Belanja Bantuan Sosial	62.078.956.767,00	56.568.658.101,00	91,12	(5.510.298.666,00)	(9,74)
7	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	1.069.827.349,00	1.069.827.348,00	100,00	(1,00)	(0,00)
	Jumlah	**1.609.722.747.991,16**	**1.480.355.378.952,79**	**91,96**	**(129.367.369.038,37)**	**(8,74)**

Perbandingan realisasi belanja operasi selama 5 (lima) Tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 14. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020

Dalam Rupiah

Belanja	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	850.460.391.092,00	859.639.514.584,11	757.321.746.846,00	780.427.298.106,50	741.631.927.441,00
Belanja Barang	321.960.533.774,90	421.895.061.848,97	513.221.030.400,79	599.495.571.358,03	555.859.126.089,79
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	100.026.167.533,00	84.670.257.207,00	128.942.462.032,00	159.157.268.656,90	125.225.839.973,00
Bantuan Sosial	24.016.354.509,00	31.181.675.232,00	47.278.414.218,00	54.895.923.459,00	56.568.658.101,00
Bagi Hsl kpd Prov/Kab/Kota/ & Pemdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Lainnya	966.159.267,00	1.026.538.956,16	1.026.538.956,16	1.000.162.612,00	1.069.827.348,00
Jumlah	**1.297.429.606.175,90**	**1.398.413.047.828,24**	**1.447.790.192.452,95**	**1.594.976.224.192,43**	**1.480.355.378.952,79**
% Kenaikan	**(8,51)**	**7,78**	**3,53**	**8,77**	**(7,19)**

Realisasi belanja operasi dari Tahun 2020 mengalami penurunan 7,19% dari Tahun 2019, dimana realisasi Tahun 2019 sebesar Rp1.594.976.224.192,43 dan realisasi Tahun 2020 Rp1.480.355.378.952,79. Penurunan belanja operasi terutama disebabkan adanya recofucing dan realokasi dana pencegahan dan penurunan Covid 19. Gambar 7 menyajikan Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Operasi.

Gambar 7. Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016-2020

2) Belanja Modal

Pada Tahun 2020 belanja modal dianggarkan sebesar Rp215.354.341.154,31 dan terealisasi sebesar Rp198.145.592.481,26 (92,01%). Tabel berikut menyajikan data yang memberikan informasi tentang realisasi belanja modal dibandingkan dengan anggarannya.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Modal Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Tanah	766.852.900,00	747.987.360,00	97,54	(18.865.540,00)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	69.926.729.040,00	61.177.461.037,90	87,49	(8.749.268.002,10)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	25.995.497.778,43	23.973.023.775,62	92,22	(2.022.474.002,81)
4	Belanja Jalan,Irigasi,dan Jaringan	106.919.970.137,00	101.925.745.491,74	95,33	(4.994.224.645,26)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.483.862.450,00	6.346.598.272,00	97,88	(137.264.178,00)
6	Belanja Aset Lainya	5.261.428.848,88	3.974.776.544,00	75,55	(1.286.652.304,88)
	Jumlah	**215.354.341.154,31**	**198.145.592.481,26**	**92,01**	**(17.208.748.673,05)**

Tabel 15 menyajikan informasi mengenai proporsi realisasi tiap-tiap jenis belanja modal dalam memberikan konstribusi terhadap realiasi total. Dari total realisasi belanja modal, sebesar Rp215.354.341.154,31 sebesar 97,88%

terserap untuk belanja modal aset tetap lainnya yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

Proporsi penyerapan kedua terbesar adalah belanja modal tanah proporsinya 97,54% dari total realisasi belanja modal yaitu sebesar Rp766.852.900,00 yang di pergunakan belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja dan belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.

Proporsi penyerapan ketiga terbesar adalah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp101.925.745.491,74 atau 95,33% yang mengindikasikan pemerintah daerah memiliki perhatian dan konsisten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta irigasi dan jaringan.

Yang keempat adalah belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp23.973.023.775,62 atau 92,22% hal ini dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dalam bentuk pembangun dan rehabilitasi gedung dan bangunan sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar dan sarana umum lainnya serta pembangunan gedung dan bangunan kantor atau tempat kerja.

Yang kelima adalah belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp61.177.461.037,90 atau 87,49% antara lain digunakan untuk belanja alat kantor dan alat rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran dan alat kesehatan, kendaraan dinas untuk operasional, alat-alat pertanian dan perikanan serta peralatan dan mesin lainnya.

Proporsi yang keenam adalah belanja aset lainnya menyerap sebesar Rp3.974.776.544,00 atau 75,55% dari total realisasi belanja modal yang di pergunakan untuk belanja software.

Tabel 16. Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Belanja Modal	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tanah	747.987.360,00	0,38
2	Belanja Peralatan dan mesin	61.177.461.037,90	30,88
3	Belanja Gedung dan Bangunan	23.973.023.775,62	12,10
4	Belanja Jalan,Irigasi,dan Jaringan	101.925.745.491,74	51,44
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.346.598.272,00	3,20
6	Belanja Aset Lainnya	3.974.776.544,00	2,01
	Jumlah	**198.145.592.481,26**	**100,00**

Realisasi belanja modal dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan sesuai dengan pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Dalam Rupiah

Jenis Belanja Modal	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Tanah	13.397.470.320,00	1.048.921.020,00	7.004.632.997,00	8.308.200,00	747.987.360,00
Belanja Peralatan dan Mesin	93.576.726.712,45	80.783.643.796,00	74.751.188.303,37	73.189.412.867,28	61.177.461.037,90
Belanja Gedung dan Bangunan	108.689.899.758,00	88.166.020.917,00	84.921.598.485,16	50.042.478.059,87	23.973.023.775,62
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.420.214.463,00	68.240.283.621,00	98.178.259.981,43	104.177.050.289,43	101.925.745.491,74
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.143.587.705,00	16.087.112.470,00	17.757.264.954,00	12.170.465.133,00	6.346.598.272,00
Belanja Aset Lainnya	5.657.702.350,00	3.932.169.180,00	5.815.090.500,00	7.738.317.301,00	3.974.776.544,00
Jumlah	**347.885.601.308,45**	**258.258.151.004,00**	**288.428.035.220,96**	**247.326.031.850,58**	**198.145.592.481,26**
Kenaikan (penurunan)	**105.660.442.067,62**	**(89.627.450.304,45)**	**30.169.884.216,96**	**(41.102.003.370,38)**	**(49.180.439.369,32)**
% Kenaikan (penurunan)	**30,37**	**(34,70)**	**10,46**	**(16,62)**	**(24,82)**

Gambar 4. Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 s/d 2020

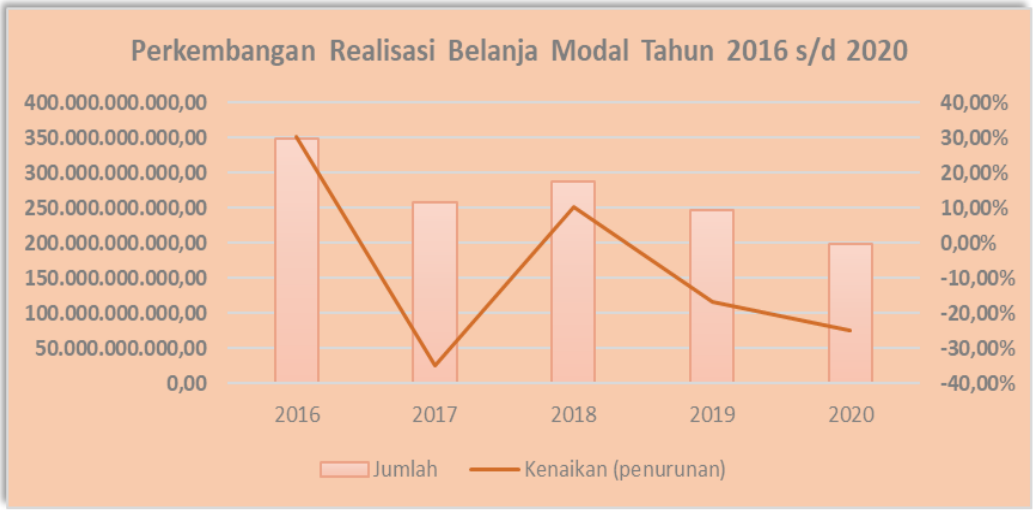

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelanggaraan kewenangan

pemerintah daerah. Tahun 2020 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp34.447.496.044,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp18.033.679.482,98,00 atau 52,35% dari anggaran.

Realisasi belanja tak terduga selama lima Tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan jika terjadi bencana alam, terutama pada Tahun 2020 yang mengalami dampak pemulihan Covid 19. Kabupaten Lumajang merupakan daerah rawan bencana alam, mengingat kondisi sebagian wilayahnya terdiri dari pegunungan dan berbatasan langsung dengan laut. Sejak Tahun 2016 sampai dengan 2019 realisasi belanja tidak terduga cenderung turun, tetapi pada Tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini di sebabkan kondisi pada Tahun 2020 terdampak dari covid 19.

Tabel 18. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Dalam Rupiah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2016	2.000.000.000,00	1.089.978.150,00	54,50
2017	4.000.000.000,00	3.510.495.735,00	87,76
2018	2.000.000.000,00	1.976.833.238,00	98,84
2019	2.500.000.000,00	1.608.071.300,00	64,32
2020	34.447.496.044,00	18.033.679.482,98	52,35

Gambar 5. Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2016 - 2020

4) Belanja Transfer (transfer keluar)

Belanja transfer (pengeluaran transfer) merupakan pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, dalam hal ini adalah

pengeluaran uang oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa berupa dana bagi hasil yang diwujudkan dalam bentuk bagi hasil pendapatan. Belanja transfer/bagi hasil ke desa Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp332.255.537.916,00 dan terealisasi sebesar Rp332.198.037.916,00 yang merupakan reklasifikasi pemberian bantuan keuangan kepada desa dan partai politik yang awalnya dicatat sebagai belanja operasi yang kemudian dicatat sebagai transfer.

c. PEMBIAYAAN DAERAH (FINANCING)

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Pembiayaan Daerah Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Penggunaan Silpa	88.210.955.635,61	88.217.717.326,24	100,01	6.761.690,63
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	268.581.900,00	324.772.900,00	120,92	56.191.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**88.479.537.535,61**	**88.542.490.226,24**	**100,07**	**62.952.690,63**
2	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)
	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Utang Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(1.000.000.000,00)**
	Pembiayaan Netto	**87.479.537.535,61**	**88.542.490.226,24**	**101,22**	**1.062.952.690,63**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp88.479.537.535,61 yang bersumber dari silpa Tahun lalu, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana yang tampak pada tabel, realisasinya mencapai

101,22% atau sebesar Rp88.542.490.226,24. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk penyertaan modal pemerintah daerah yang pada Tahun 2020 tidak direalisasikan. Secara keseluruhan pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp88.542.490.226,24 atau 101,22% dari yang direncanakan.

3. 2. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3.2.1. Aset Daerah

Aset Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020 terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Aset lancar adalah kekayaan pemerintah yang diharapkan segera untuk direalisaikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan yang terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, yaitu terdiri dari investasi permanen.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerajaan.

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap maupun dana cadangan. Posisi dan perkembangan aset daerah selama lima Tahun terakhir sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 20. Perkembangan Posisi Aset Daerah Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

Dalam Rupiah

Jenis Aset	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aset Lancar	262.878.707.151,18	245.423.835.217,81	252.206.344.422,65	215.006.189.353,98	289.734.112.882,38
2. Investasi Jk. Panjang	37.561.519.154,17	45.194.519.321,15	54.905.352.834,12	57.190.711.716,33	58.350.946.463,38
3. Aset Tetap	1.744.311.754.595,48	1.988.904.196.618,94	1.963.591.557.110,59	2.064.954.780.864,67	2.123.802.649.452,55
4. Dana Cadangan	33.890.911.468,69	39.338.270.790,56	0,00	0,00	0,00
3. Aset Lainnya	115.634.214.251,65	111.732.438.254,12	114.651.847.084,04	56.857.842.720,38	42.906.896.623,41
Jumlah	2.194.277.106.621,17	2.430.593.260.202,58	2.385.355.101.451,40	2.394.009.524.655,36	2.514.794.605.421,72
Kenaikan (penurunan)	236.740.778.634,64	236.316.153.581,41	(45.238.158.751,18)	8.654.423.203,96	120.785.080.766,36
%	**10,79**	**9,72**	**(1,90)**	**0,36**	4,80

3.2.2. Kewajiban

Kewajiban Daerah dibedakan menjadi kewajiban lancar atau jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang.

Tabel 21. Perkembangan Posisi Kewajiban Daerah Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

Dalam Rupiah

KEWAJIBAN	2016	2017	2018	2019	2020
1. Kewajiban Jangka Pendek	14.645.534.117,23	18.166.590.499,77	30.134.238.578,00	33.640.380.935,36	85.572.386.308,99
2. Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	**14.645.534.117,23**	**18.166.590.499,77**	**30.134.238.578,00**	**33.640.380.935,36**	**85.572.386.308,99**

Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2020 sebagaimana tabel diatas merupakan pendapatan diterima di muka dan utang belanja yang merupakan implikasi penerapan basis akrual. Sedangkan pemerintah daerah tidak memliki utang jangka panjang.

3.2.3. Ekuitas

Ekuitas Dana merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas dana menggambarkan jumlah kekayaan bersih milik pemerintah daerah. Posisi ekuitas pemerintah daerah pada akhir Tahun 2016 s/d 2020 sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 22. Perkembangan Posisi Ekuitas Dana per 31 Des 2016 s.d. 2020

Dalam Rupiah

Tahun	Jumlah (Rp)
2016	2.087.119.149.095,35
2017	2.194.277.106.621,17
2018	2.385.355.101.451,40
2019	2.360.369.143.720,00
2020	2.429.222.219.112,73

3. 3. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

3.1.1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan Lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/propinsi dan institusi lain sesuai dengan bidang kewenanggannya.

3.1.2. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan melakukan bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan maupun BPK.

3.1.3. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam hal ini Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan entitas akuntansi terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Pendidikan – Sekretariat
3. Dinas Pendidikan – Pendidikan Dasar
4. Dinas Pendidikan – Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
5. Dinas Pendidikan – Guru dan Tenaga Kependidikan
6. Dinas Pendidikan – Pengembangan Sarana dan Prasarana
7. Dinas Kesehatan
8. Puskesmas Tempursari
9. Puskesmas Pronojiwo
10. Puskesmas Candipuro
11. Puskesmas Penanggal
12. Puskesmas Pasirian
13. Puskesmas Bades
14. Puskesmas Tempeh
15. Puskesmas Gesang
16. Puskesmas Rogotrunan
17. Puskesmas Labruk Kidul
18. Puskesmas Tekung
19. Puskesmas Kunir
20. Puskesmas Yosowilangun
21. Puskesmas Sumbersari
22. Puskesmas Jatiroto
23. Puskesmas Randuagung
24. Puskesmas Sukodono
25. Puskesmas Padang
26. Puskesmas Pasrujambe
27. Puskesmas Senduro
28. Puskesmas Gucialit
29. Puskesmas Kedungjajang
30. Puskesmas Klakah
31. Puskesmas Ranuyoso
32. Puskesmas Tunjung
33. Laboratorium Kesehatan Kabupaten
34. Instalasi Perbekalan Farmasi Kabupaten Lumajang
35. RSUD dr. Haryoto
36. RSUD Pasirian

37. Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang
38. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
39. Satuan Polisi Pamong Praja
40. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
41. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
42. Dinas Sosial
43. Dinas Tenaga Kerja
44. Dinas Ketahanan Pangan
45. Dinas Lingkungan Hidup
46. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
47. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
48. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
49. Dinas Perhubungan
50. Dinas Komunikasi dan Informatika
51. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
52. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
53. Dinas Pemuda dan Olahraga
54. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
55. Dinas Perikanan
56. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
57. Dinas Pertanian
58. Dinas Perdagangan
59. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
60. Badan Pengelola Keuangan Daerah
61. Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
62. Badan Pajak dan Retribusi Daerah
63. Badan Kepegawaian Daerah
64. Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
65. Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
66. Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pemerintahan
67. Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Energi Sumberdaya Alam dan Perekonomian
68. Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
69. Sekretariat Daerah - Bagian Rumah Tangga dan Protokol
70. Sekretariat Daerah - Bagian Umum
71. Sekretariat Daerah - Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
72. Sekretariat DPRD
73. Inspektorat Kabupaten
74. Kecamatan Lumajang
75. Kecamatan Lumajang - Kelurahan Citrodiwangsan
76. Kecamatan Lumajang - Kelurahan Ditotrunan
77. Kecamatan Lumajang - Kelurahan Jogotrunan
78. Kecamatan Lumajang - Kelurahan Jogoyudan
79. Kecamatan Lumajang - Kelurahan Tompokersan

80. Kecamatan Lumajang - Kelurahan Rogotrunan
81. Kecamatan Lumajang - Kelurahan Kepuharjo
82. Kecamatan Sukodono
83. Kecamatan Padang
84. Kecamatan Gucialit
85. Kecamatan Senduro
86. Kecamatan Pasrujambe
87. Kecamatan Sumbersuko
88. Kecamatan Tempeh
89. Kecamatan Pasirian
90. Kecamatan Candipuro
91. Kecamatan Pronojiwo
92. Kecamatan Tempursari
93. Kecamatan Kunir
94. Kecamatan Yosowilangun
95. Kecamatan Tekung
96. Kecamatan Rowokangkung
97. Kecamatan Jatiroto
98. Kecamatan Randuagung
99. Kecamatan Klakah
100. Kecamatan Ranuyoso
101. Kecamatan Kedungjajang

Entitas akuntansi sebagaimana tersebut di atas adalah entitas akuntansi sesudah diberlakukannya ketentuan Organisasi Perangkat Daerah yang baru.

4.2. BASIS AKUNTANSI

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 disusun berdasarkan basis akrual (*accrual*). Penerapan basis akrual dimaksud adalah:

a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
b. Basis akrual untuk laporan operasional dan neraca dimana aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. BASIS PENGUKURAN

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

Basis pengukuran terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas meliputi kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah.

Kas dan setara kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

1) Kas di Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening kas umum daerah;
2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan;
3) Kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari :
   (a) Kas di Bendahara Penerimaan, yaitu penerimaan pendapatan pada SKPD yang belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan akhir periode akuntansi.
   (b) Kas di Bendahara Pengeluaran, meliputi:
      - Sisa Uang Persediaan (UP) yang berasal dari BUD yang belum/tidak dibelanjakan dan belum disetor kembali ke kas daerah sampai dengan akhir periode akuntansi; dan
      - Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara sampai dengan akhir periode akuntansi.
      - Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), meliputi:
         (1) Kas di Bendahara Umum BLUD terdiri dari rekening penerimaan BLUD, rekening pengeluaran BLUD, dan rekening Kas Umum Umum BLUD;
         (2) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD, yaitu penerimaan pendapatan BLUD yang belum disetorkan ke Rekening Penerimaan BLUD sampai dengan akhir periode akuntansi;
         (3) Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, meliputi sisa uang tunai dan/atau saldo bank yang ada pada rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas;
         (4) Kas di entitas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari Kas Daerah, seperti saldo rekening di bank maupun uang tunai yang menjadi tanggungjawab

Bendahara Dana BOS serta kas lainnya dalam bentuk apapun yang pengelolaannya di luar mekanisme Rekening Kas Umum Daerah.

Kas dicatat sebagai berikut:

1) Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya;
2) Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca; dan
3) Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

b. Piutang Daerah

1) Piutang Pajak dan Retribusi

Piutang pajak dan piutang retribusi diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak/piutang retribusi daerah di ukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan.

2) Piutang lainnya

Piutang lainnya meliputi jenis piutang berikut:

a) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Atas penyertaan modal pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas, piutang diakui pada saat perusahaan mengumumkan pembagian deviden melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah.

Untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah (BUMD) berbentuk selain perseroan terbatas, piutang diakui pada saat timbul hak atas laba perusahaan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perusahaan daerah.

Di ukur sebesar nilai nominal pendapatan deviden/bagian laba perusahaan daerah yang belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.

b) Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang sah diakui pada saat timbul hak tagih atas Lain-lain PAD yang sah dan diukur sebesar nilai nominal yang belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan berdasarkan bukti pendukung/dokumen.

c) Piutang Transfer

Piutang transfer meliputi piutang kepada Pemerintah Pusat atas dana bagi hasil pajak/sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah propinsi.

Piutang transfer diakui pada akhir periode akuntansi pada saat timbul hak atas pendapatan transfer dari pemerintah pusat/propinsi yang kurang salur/belum ditransfer ke kas daerah dan pemerintah pusat/propinsi

mengakuinya dengan menerbitkan Peraturan Presiden/SK Menteri Keuangan R.I/SK. Gubernur Jatim atau dokumen lainnya yang sah.

Piutang transfer di ukur sebesar nilai pendapatan transfer yang belum di terima sampai dengan akhir periode akuntansi berdasarkan Peraturan Presiden/SK Menteri Keuangan R.I/SK. Gubernur Jatim atau dokumen lainnya yang sah.

d) Piutang pendapatan daerah lainnya

Piutang pendapatan daerah lainnya seperti pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya, disajikan sebesar jumlah hak atas pendapatan tersebut yang belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.

e) Piutang pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman diakui pada saat terjadi realisasi pengeluaran pembiayaan dari kas daerah, dan didukung dengan adanya naskah perjanjian pemberian pinjaman yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya(biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

f) Piutang Tuntuan Ganti Rugi (Piutang TGR)

TGR yang diselesaikan di luar pengedilan, piutang diakui pada saat diterbitkan SK Pembebanan/SKP2K/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

TGR yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, piutang diakui setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Piutang tuntutan ganti rugi disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam Tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi

kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan piutang disebabkan karena pelunasan, penghapustagihan *(write off)* dan penghapusbukuan *(write down)*. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern pemerintah daerah, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbuku

Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbuku, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan akun penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Penilaian Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

a. Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1) Kualitas Piutang Pajak dibedakan sebagai berikut:

a) Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 Tahun; dan/atau Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak kooperatif; dan/atau Wajib Pajak likuid; dan/atau Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 Tahun; dan/atau Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 Tahun; dan/atau Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Macet, jika umur piutang diatas 5 Tahun; dan/atau Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau Wajib Pajak bangkrut/meninggal

dunia; dan/atau Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

2) Kualitas Piutang Retribusi dibedakan sebagai berikut:

a) Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b) Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
c) Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
d) Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

3) Kualitas Piutang Lainnya dibedakan sebagai berikut:

a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b) Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

b. Penyisihan piutang tidak tertagih

Prosentase penyisihan piutang tak tertagih ditentukan sebagai berikut:

1) 0,5% dari jumlah piutang kategori lancar;
2) 10% dari jumlah piutang kategori kurang lancar;
3) 50% dari jumlah piutang kategori diragukan; dan
4) 100% dari jumlah piutang kategori macet.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, tetapi merupakan penyesuaian agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penghitungan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam Daftar Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

c. Persediaan

1) Jenis Persediaan

Persediaan meliputi:

a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang-barang cetakan, alat-alat listrik dan elektronik habis pakai, materai, perangko dan benda pos, peralatan kebersihan habis pakai dan barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
e) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventariasi fisik.

Beban persediaan diakui pada saat perolehan persediaan (pendekatan beban) dan pada akhir periode akuntansi diakui sebesar jumlah persediaan yang telah terpakai atau dikonsumsi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Selisih antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik yang disebabkan karena persediaan usang, rusak atau kadaluarsa, diakui sebagai beban persediaan. Selisih persediaan diakui sebagai kerugian daerah, jika selisih persediaan tersebut merupakan suatu jumlah yang abnormal, tidak wajar dan jumlahnya material.

2) Pengukuran persediaan

Persediaan yang diperoleh melalui pembelian, diukur sebesar biaya perolehan menggunakan metode harga pembelian terakhir, kecuali persediaan obat menggunakan metode FIFO.

1) Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, diukur sebesar harga pokok produksi;
2) Persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi diukur dengan nilai wajar.Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
3) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar dan
4) Persediaan dicatat dengan metode fisik/periodik.

d. Investasi

Perolehan investasi secara tunai, diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah. Sedangkan investasi yang perolehannya dengan penyerahan aset selain kas diakui pada saat aset selain kas tersebut diserahkan.

Pengakuan investasi harus memenuhi kriteria yang memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran investasi jangka pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga yang terdapat nilai biaya perolehannya, dicatat sebesar biaya perolehan yang mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya. Sedangkan jika tidak terdapat biaya perolehannya, dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

Pengukuran investasi jangka panjang sebagai berikut

1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2) Investasinon permanen:
   a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
   b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
   c) penanaman modal di proyek(proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
   d) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
   e) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi

a. **Metode biaya,** untuk kepemilikan investasi kurang dari 20% dan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi.
b. Metode **ekuitas**, untuk kepemilikan investasi 20% sampai 50%; lebih dari 50%; atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan:
   (1)Investasi dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.
   (2)Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
   (3)Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
c. Metode **nilai bersih yang dapat direalisasikan**, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, termasuk investasi non permanen. Investasi dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi

Pengakuan hasil investasi

a. Hasil investasi jangka pendek seperti bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividen*), diakui pada saat diperoleh dan di catat sebagai pendapatan.
b. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
c. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
d. Hasil investasi berupa dividen saham tidak menambah nilai investasi pemerintah daerah.

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan karena sebab lainnya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi dan disajikan di laporan operasional.

e. Aset Tetap

Pengakuan, Penilaian, dan Penyajian Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dimana aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap yang melebihi dan atau melewati satu periode Tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai direklasifikasikan ke akun yang sesuai dalam akun aset tetap.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya tersebut harus sesuai dengan kebijakan mengenai batasan minimum kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds).

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban Tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyusutan aset tetap

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi, dan jaringan; dan aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern. Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan; dan
3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.

Dalam menghitung penyusutan aset tetap, nilai sisa/nilai residu diabaikan dengan pertimbangan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir manfaatnya. Selain itu penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan untuk menandingkan antara biaya dengan pendapatan sebagaimana lazimnya pada sektor privat (swasta). Masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin ditentukan sebagai berikut:

1) Masa manfaat 2 Tahun (50%) untuk aset tetap alat angkutan berat tak bermotor.
2) Masa manfaat 4 Tahun (25%) untuk aset tetap alat angkut apung tak bermotor; alat pengolahan pertanian; alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan pertanian; peralatan komputer; persenjataan non senjata api.
3) Masa manfaat 5 Tahun (20%) untuk aset tetap Alat Bengkel Tak Bermesin; Alat Ukur; Alat Kantor; Alat Rumah Tangga; Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat; Alat Studio; alat komunikasi; Alat Kedokteran; Alat Kesehatan; Alat Keamanan dan Perlindungan.
4) Masa manfaat 8 Tahun (12,5%) untuk aset tetap Alat-alat Besar Apung; Alat Angkutan Darat Bermotor; Unit-Unit Laboratorium; Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
5) Masa manfaat 10 Tahun (10%) untuk aset tetap Alat-Alat Besar Darat; Alat Angkut Apung Bermotor; Alat Bengkel Bermesin; Peralatan Pemancar; Alat Peraga/Praktek Sekolah; Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir; Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika; Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory; senjata api;
6) Masa manfaat 15 Tahun (6,67%) untuk aset tetap Peralatan Laboratorium Hidrodinamika.
7) Masa manfaat 20 Tahun (5%) untuk aset tetap Alat Angkut Bermotor Udara

Masa manfaat aset tetap gedung dan bangunan ditentukan sebagai berikut:

1) Masa manfaat 50 Tahun (2%) untuk aset tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja; Bangunan Gedung Tempat Tinggal; Bangunan bersejarah; Tugu peringatan; Monumen; Tugu titik kontrol; rambu-rambu; dan
2) Masa manfaat 40 Tahun (2,5%) untuk aset tetap bangunan Menara.

Masa manfaat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ditentukan sebagai berikut:

1) Masa manfaat 10 Tahun (10%) untuk aset tetap Jalan; Bangunan; Pengaman Sungai & Penanggulangan Bencana Alam; Instalasi Pengolahan Sampah; Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan;
2) Masa manfaat 20 Tahun (5%) untuk aset tetap Instalasi Pengaman, jaringan telepon;
3) Masa manfaat 25 Tahun (4%) untuk aset tetap Bangunan Air Rawa; Bangunan Pengembangan Sbr. Air dan Air Tanah; Instalasi Air Minum/Air Bersih; Instalasi Air Kotor; Instalasi Pertahanan; Instalasi Gas; Jaringan Air Minum; Jaringan Gas;
4) Masa manfaat 40 Tahun (2,5%) untuk aset tetap Bangunan Air Bersih/Baku; Bangunan Air Kotor; Bangunan Air; Instalasi Pembangkit Listrik; Instalasi Gardu Listrik; Jaringan Listrik;
5) Masa manfaat 50 Tahun (2%) untuk aset tetap Jembatan; bangunan air irigasi; bangunan air pasang surut;

Penyusutan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap Tahun selama masa manfaatnya.

Penyusutan aset tetap dilakukan satu Tahun penuh (pendekatan Tahunan) pada akhir periode tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap.

Kapitalisasi aset tetap

Pengeluaran atas pembelian baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dikapitalisasi sebagai aset tetap sepanjang pengeluaran tersebut memenuhi kriteria batasan minimal kapiitalisasi aset tetap.

Semua pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap tanah dikapitalisasi dan menambah nilai aset tetap tanah, meliputi biaya pembebasan tanah; biaya pembayaran honor tim pembebasan tanah; biaya pembuatan sertifikat tanah; biaya pematangan, pengukuran dan pengurukan tanah; biaya-biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung sehingga membawa aset tetap tanah ke kondisi siap untuk dimanfaatkan.

Batasan minimal jumlah harga perolehan awal atau pengadaan baru yang dikapitalisasi ke nilai aset tetap peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit.

Pengeluaran biaya setelah perolehan awal dikapitalisasi menambah nilai peralatan dan mesin sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat dan memenuhi batas minimal pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin Rp500.000,00.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin dengan jumlah berapapun untuk pemeliharaan rutin (*maintenance*) guna mempertahankan agar peralatan dan mesin berfungsi normal sebagaimana mestinya, diakui sebagai beban dan tidak dikapitalisasi menambah nilai peralatan dan mesin serta dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Batasan minimal jumlah harga perolehan awal atau pengadaan baru yang dikapitalisasi ke nilai aset tetap gedung dan bangunan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.

Pengeluaran biaya setelah perolehan awal aset tetap minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikapitalisasi menambah nilai gedung dan bangunan sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat.

Pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi atau untuk pemeliharaan rutin (*maintenance*) guna mempertahankan agar gedung dan bangunan berfungsi normal sebagaimana mestinya, diakui sebagai beban dan tidak dikapitalisasi menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan dan dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Semua pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi dan menambah nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat, yang disebabkan karena adanya perbaikan, penambahan dan pengembangan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan untuk pemeliharaan rutin (*maintenance*) guna mempertahankan agar jalan, irigasi dan jaringan berfungsi normal sebagaimana mestinya, diakui sebagai beban dan tidak dikapitalisasi menambah nilai jalan, irigasi dan jaringan serta dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Semua pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset tetap lainnya, sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya untuk pemeliharaan rutin (*maintenance*) guna mempertahankan agar aset tetap lainnya berfungsi normal sebagaimana mestinya, diakui sebagai beban dan tidak dikapitalisasi menambah nilai aset tetap lainnya serta dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Suatu aset berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos asset tetap yang bersangkutan jika pekerjaan konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi yang dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman seperti bunga dan biaya pinjaman lainnya yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

f. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud (ATB), dan Aset Lain-lain.

1). Tagihan jangka panjang, meliputi:

- Tagihan penjualan angsuran diperoleh dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/pejabat daerah pemerintah daerah, diakui pada saat timbul hak/klaim atas penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Bagian Lancar Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam 1 (satu) periode akuntansi diakui sebagai piutang sebagai bagian dari aset lancar.
- Tuntutan Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2). Kemitraan dengan pihak ke tiga, meliputi :

(a) Sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan sewa.

(b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya, diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan

klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama pemanfaatan (KSP).

(c) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) adalah kerjasama pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

(d) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3). Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB), adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas, meliputi *Software* komputer; Lisensi dan *Frenchise;* Hak Paten dan Hak Cipta; Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang; ATB yang mempunyai nilai sejarah dan budaya; ATB dalam pengerjaan.

Aset tidak berwujud diakui jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dikukan dengan metode garis lurus. Masa Manfaat aset tak berwujud ditetapkan 5 (lima) Tahun.

4). Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan

karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset Lain-lain, dicatat menurut nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain.

g. Dana Cadangan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (LS).

Pembentukan dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam SP2D LS pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan.

Bunga/Jasa Giro dari rekening dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal diakui/dikapitalisasi menambah saldo dana cadangan; dan

Pencairan Dana Cadangan dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Daerah berdasarkan surat perintah pemindahbukuan yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah kepada Bank tempat Rekening Dana Cadangan di simpan.

h. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, sebagai akibat dari melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

Jenis Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, antara lain utang perhitungan fihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang belanja dan utang jangka pendek lainnya
2) Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari: utang dalam Negeri – Pemerintah Pusat, utang dalam negeri – Pemerintah Daerah lainnya; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank; Utang Dalam Negeri – Obligasi; Utang jangka panjang lainnya.

Pengakuan kewajiban

Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Transaksi tanpa Pertukaran (*non exchange transactions*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain

kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government related events*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

Kejadian yang diakui pemerintah (*government acknowledge events*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran Kewajiban

1) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
2) Pengukuran Utang Bunga, dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
4) Pendapatan diterima di muka, dicatat sebesar jumlah pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah.
5) Utang belanja/Utang kepada pihak ke tiga, terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
6) Pengukuran Utang Transfer, adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7) Utang Jangka Pendek Lainnya, pengukuran disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
8) Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya, sebagai berikut:
   (a) Utang yang tidak diperjualbelikan, memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga perbankan, lembaga bukan bank.
   (b) Utang yang diperjualbelikan, pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum

diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

i. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

j. Pendapatan

Pendapatan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Jika besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat Ketetapan telah diterbitkan; atau pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah yang diterima untuk beberapa periode yang melampaui akhir periode akuntansi tertentu (pendapatan diterima dimuka), dicatat dengan pendekatan pendapatan, dimana Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui Pendapatan LO sebesar pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan yang dipungut berdasarkan klaim, seperti klaim kepada BPJS atau klaim kepada pihak-pihak lainnya, diakui pada saat klaim telah mendapatkan persetujuan BPJS/pihak lainnya

k. Belanja dan Beban

1) Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Transaksi belanja yang dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

Transaksi belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan, diakui pada saat terbitnya SP2D GU atau GU Nihil.

Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) sesuai dengan Bagan Akun Standar, meliputi belanja pegawai, belanja barang barang, belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan beban pegawai yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran.

Beban persediaan diakui pada saat diterima Berita Acara Serah Terima barang. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui beban persediaan sebesar nilai barang-barang persediaan yang telah digunakan atau dikonsumsi.

Beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya diakui sebagai beban barang dan jasa pada saat timbul kewajiban.

Beban bunga di akui pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Beban bunga juga di akui pada akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang sudah menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan meskipun belum jatuh tempo.

Beban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Beban penyisihan piutang di akui pada akhir periode akuntansi.

Beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud di akui pada akhir periode akuntansi.

Beban Lain-lain yang sifat pengeluarannya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya, diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode terdapat kurang salur atas dana transfer ke entitas pelaporan lain, maka kekurangan salur tersebut diakui sebagai beban transfer dan utang belanja transfer pada periode yang bersangkutan, sepanjang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

l. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan

1) Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah, diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.

Pengeluaran pembiayaan

1) Adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah, diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penerapan kebijakan akuntansi sebagaimana di atur di dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka memenuhi tujuan umum (*general purpose financial statements*), Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 telah berpedoman kepada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
b. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah berpedoman pada dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana di atur di dalam PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
c. Penyusunan Laporan Arus Kas telah berpedoman pada PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas.
d. Penyusunan Laporan Operasional telah berpedoman pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional.
e. Penyusunan neraca telah berpedoman pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
f. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian serta pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan telah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA mencakup pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA; pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
A. Pendapatan Daerah	**2.104.300.585.569,86**	**2.118.849.571.641,14**	**2.186.593.815.093,29**

Pendapatan daerah di dalam LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah, meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Realiasi anggaran pendapatan daerah Tahun 2020 dan 2019 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 23. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4(6	8=7/6
1	Pendapatan Asli Daerah	280.977.944.540,86	300.263.112.642,77	106,86	296.467.374.174,37	3.795.738.468,40	1,28
2	Pendapatan Transfer	1.723.648.930.650,00	1.725.518.141.013,00	100,11	1.774.505.135.577,00	(48.986.994.564,00)	(2,76)
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	99.673.710.379,00	93.068.317.985,37	93,37	115.621.305.341,92	(22.552.987.356,55)	(19,51)
	Jumlah	**2.104.300.585.569,86**	**2.118.849.571.641,14**	100,69	**2.186.593.815.093,29**	(67.744.243.452,15)	(3,10)

Total realisasi pendapatan daerah Tahun 2020 sebesar Rp2.118.849.571.641,14 dan 2019 sebesar Rp2.186.593.815.093,29. Realisasi Tahun 2020 mencapai 100,69% dari anggaran sebesar Rp2.104.300.585.569,86, terinci sebagai berikut:

a. Realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2020 mencapai Rp300.263.112.642,77 atau 106,86% dari anggaran sebesar Rp280.977.944.540,86. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp3.795.738.468,40 atau 1,28%.

b. Realisasi pendapatan transfer Tahun 2020 mencapai Rp1.725.518.141.013,00 atau 100,11% dari anggaran sebesar Rp1.723.648.930.650,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 terdapat penurunan sebesar (Rp48.986.994.564,00) atau (2,76%)
c. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp93.068.317.985,37 93,37% dari anggaran sebesar Rp99.673.710.379,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 terdapat penurunan sebesar Rp67.744.243.452,15 atau 3,10%

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah	**280.977.944.540,86**	**300.263.112.642,77**	**296.467.374.174,37**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Rincian realisasi PAD Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pajak Daerah	70.000.000.000,00	68.659.995.181,00	98,09	74.232.832.052,00	(5.572.836.871,00)	(7,51)
2	Retribusi Daerah	50.019.898.222,00	46.060.581.317,00	92,08	58.197.444.588,18	(12.136.863.271,18)	(20,85)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.105.516.366,26	5.105.516.366,26	100,00	4.968.766.089,07	136.750.277,19	2,75
4	Lain-lain PAD Yang Sah	155.852.529.952,60	180.437.019.778,51	115,77	159.068.331.445,12	21.368.688.333,39	13,43
	Jumlah	**280.977.944.540,86**	**300.263.112.642,77**	**106,86**	**296.467.374.174,37**	**3.795.738.468,40**	**1,28**

Total realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2020 telah melampaui anggarannya dengan realisasi mencapai 106,86% dari target. Dibanding periode sebelumnya realisasinya meningkat sebesar 1,28%.

Realisasi pajak daerah dan retribusi belum melampaui anggaran yang telah ditetapkan, dengan realisasi masing-masing mencapai 98,09% dari target pajak daerah dan 92,08 % dari target retribusi daerah. Dibanding periode sebelumnya, realisasi pajak daerah dan retribusi mengalami penurunan masing-masing 7,51% untuk pajak daerah dan 20,85% untuk retribusi daerah.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah telah melampaui anggaran, dengan realisasi masing-masing mencapai 100,00% dari

target pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah dan 115,77 % dari target lain-lain PAD yang sah. Dibanding periode sebelumnya, realisasinya meningkat masing-masing sebesar 2,75% dan 13,43%.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.1 Pajak Daerah	**70.000.000.000,00**	**68.659.995.181,00**	**74.232.832.052,00**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Lumajang sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak reklame, pajak air tanah dan PBB-P2 dipungut dengan sistem *official assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Sedangkan untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan dan BPHTB dipungut berdasarkan sistem *self assesment* dengan memberikan kewenangan kepada wajib pajak daerah untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak daerah yang terutang.

Rincian realisasi pajak daerah Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun nggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan	%
			2020	%	2019	(Penurunan)	
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pajak Hotel	520.000.000,00	655.800.332,00	126,12	893.513.355,00	(237.713.023,00)	(26,60)
2	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.709.014.493,00	135,45	4.931.846.931,00	(2.222.832.438,00)	(45,07)
3	Pajak Hiburan	75.000.000,00	78.062.129,00	104,08	129.463.166,00	(51.401.037,00)	(39,70)
4	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.789.379.587,00	119,29	1.868.350.757,00	(78.971.170,00)	(4,23)
5	Pajak Penerangan Jalan	25.650.000.000,00	25.980.921.440,00	101,29	27.072.321.155,00	(1.091.399.715,00)	(4,03)
6	Pajak Parkir	325.000.000,00	349.329.700,00	107,49	433.921.600,00	(84.591.900,00)	(19,49)
7	Pajak Air Tanah	230.000.000,00	346.102.543,00	150,48	369.409.176,00	(23.306.633,00)	(6,31)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.000.000.000,00	7.091.249.500,00	54,55	11.023.188.750,00	(3.931.939.250,00)	(35,67)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	12.000.000.000,00	11.625.274.574,00	96,88	12.253.606.043,00	(628.331.469,00)	(5,13)

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan	%
			2020	%	2019	(Penurunan)	
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	14.700.000.000,00	18.034.860.883,00	122,69	15.257.211.119,00	2.777.649.764,00	18,21
	Jumlah	**70.000.000.000,00**	**68.659.995.181,00**	98,09	**74.232.832.052,00**	(5.572.836.871,00)	(7,51)

Total realisasi pajak daerah Tahun 2020 tidak mencapai target, realisasi hanya mencapai 98,09% dari target. Dibanding periode sebelumnya realisasinya menurun sebesar (7,51%). Tiap-tiap jenis pajak daerah realisasinya telah melampaui target lebih dari 100%, kecuali untuk jenis pajak mineral bukan logam dan batuan hanya mencapai 54,55% dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan realisasi hanya mencapai 96,88%.

Di banding Tahun 2019, seluruh jenis pajak daerah realisasinya menurun, kecuali bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) meningkat sebesar 18,21%. Penurunan penerimaan pajak daerah tersebut tidak terlepas dari lesunya perekonomian daerah akibat pandemi covid-19.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.2 Retribusi Daerah	**50.019.898.222,00**	**46.060.581.317,00**	**58.197.444.588,18**

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang Retribusi Daerah, terdapat 13 (tiga belas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin gangguan/keramaian dan retribusi ijin trayek.

Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2020 dan 2019 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 26. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 & 2019

Dalam Rupiah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan	%
			2020	%	2019	Penurunan)	
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	34.120.610.297,00	28.807.555.537,00	84,43	35.946.920.655,9**30**	(7.139.657.118,93)	(19,86)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	811.600.000,00	732.300.000,00	90,23	866.150.000,00	(133.850.000,00)	(15,45)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.948.612.000,00	4.780.461.000,00	162,13	5.102.365.500,00	(321.904.500,00)	(6,31)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	6.880.813.000,00	6.940.840.825,00	100,87	7.833.865.581,25	(893.024.756,25)	(11,40)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	497.060.000,00	675.225.000,00	135,84	1.363.955.000,00	(688.730.000,00)	(50,50)
6	Retribusi Penyedotan Kakus/Tinja	34.625.000,00	41.920.000,00	121,07	17.190.000,00	24.730.000,00	143,86
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	140.022.000,00	140.593.600,00	100,41	161.382.000,00	(20.788.400,00)	(12,88)
9	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	700.162.425,00	453.583.233,00	64,78	574.524.331,00	(120.940.098,00)	(21,05)
10	Retribusi Terminal	65.002.000,00	82.623.400,00	127,11	114.783.600,00	(32.160.200,00)	(28,02)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.900.500,00	28.746.500,00	152,09	31.392.500,00	(2.646.000,00)	(8,43)
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.235.000,00	247.072.000,00	98,74	255.175.000,00	(8.103.000,00)	(3,18)
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	873.429.000,00	1.369.719.500,00	156,82	3.884.237.950,00	(2.514.518.450,00)	(64,74)
14	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	2.273.762.000,00	1.756.690.722,00	77,26	2.036.565.470,00	(279.874.748,00)	(13,74)
15	Retribusi Ijin Trayek	5.065.000,00	3.250.000,00	64,17	9.645.000,00	(6.395.000,00)	(66,30)
	Jumlah	**50.019.898.222,00**	**46.060.581.317,00**	**92,08**	**58.197.443.588,18**	**(12.136.862.271,18)**	**(20,85)**

Total realisasi retribusi daerah Tahun 2020 tidak mencapai target, realisasi hanya mencapai 92,08% dari target. Dibanding periode sebelumnya realisasinya menurun sebesar (20,85%).

Tiap-tiap jenis retribusi daerah realisasinya telah melampaui target lebih dari 100%, kecuali untuk retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persamapahan/kebersihan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi rumah potong hewan, retribusi ijin mendirikan bangunan dan retribusi ijin trayek.

Sedangkan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 tetapi tidak terealisasi pemungutannya karena terkendala regulasinya yang masih belum disesuaikan dengan nomenklatur baru SKPD pemungutnya.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan	**34.120.610.297,00**	**28.807.555.537,00**	**35.946.920.655,93**

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan adalah pendapatan yang dipungut atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Pasirian yang belum melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Total realisasi retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2020 tidak mencapai target, realisasi hanya mencapai 84,43% dari target. Dibanding periode sebelumnya realisasinya menurun sebesar (19,86%). Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lumajang berdampak signifikan terhadap realisasi hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan. Rincian realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			Realisasi 2020	%	Realisasi 2019		
1	Dinas Kesehatan	665.451.260,00	510.144.700,00	76,66	499.555.200,00	10.589.500,00	2,12
2	Puskesmas Tempursari	508.500.000,00	451.437.600,00	88,78	674.563.100,00	(223.125.500,00)	(33,08)
3	Puskesmas Pronojiwo	579.396.000,00	272.499.700,00	47,03	465.079.700,00	(192.580.000,00)	(41,41)
4	Puskesmas Candipuro	417.848.000,00	294.891.000,00	70,57	411.309.500,00	(116.418.500,00)	(28,30)
5	Puskesmas Penanggal	231.788.000,00	189.653.100,00	81,82	246.089.200,00	(56.436.100,00)	(22,93)
6	Puskesmas Pasirian	995.972.800,00	557.938.700,00	56,02	803.627.300,00	(245.688.600,00)	(30,57)
7	Puskesmas Bades	501.195.200,00	351.794.600,00	70,19	351.173.700,00	620.900,00	0,18
8	Puskesmas Tempeh	1.336.421.200,00	567.340.600,00	42,45	746.350.000,00	(179.009.400,00)	(23,98)
9	Puskesmas Gesang	249.020.000,00	214.101.500,00	85,98	317.172.300,00	(103.070.800,00)	(32,50)
10	Puskesmas Rogotrunan	496.491.200,00	315.027.300,00	63,45	568.148.000,00	(253.120.700,00)	(44,55)
11	Puskesmas Labruk Kidul	441.482.000,00	278.007.600,00	62,97	430.896.700,00	(152.889.100,00)	(35,48)
12	Puskesmas Tekung	695.864.000,00	331.936.500,00	47,70	383.069.300,00	(51.132.800,00)	(13,35)
13	Puskesmas Kunir	1.044.724.000,00	629.239.000,00	60,23	1.104.891.200,00	(475.652.200,00)	(43,05)
14	Puskesmas Yosowilangun	913.220.000,00	448.732.000,00	49,14	847.150.800,00	(398.418.800,00)	(47,03)
15	Sumbersari	764.577.600,00	378.472.000,00	49,50	614.360.200,00	(235.888.200,00)	(38,40)
16	Puskesmas Jatiroto	924.700.000,00	579.637.800,00	62,68	909.524.400,00	(329.886.600,00)	(36,27)
17	Randuagung	572.836.000,00	231.161.000,00	40,35	260.982.600,00	(29.821.600,00)	(11,43)
18	Puskesmas Sukodono	734.467.600,00	357.897.400,00	48,73	815.540.500,00	(457.643.100,00)	(56,12)
19	Puskesmas Padang	461.720.000,00	309.151.300,00	66,96	411.424.200,00	(102.272.900,00)	(24,86)
20	Puskesmas Pasrujambe	343.080.000,00	315.705.400,00	92,02	292.358.100,00	23.347.300,00	7,99
21	Puskesmas Senduro	700.272.000,00	395.227.600,00	56,44	559.305.000,00	(164.077.400,00)	(29,34)
22	Puskesmas Gucialit	480.353.600,00	286.411.900,00	59,63	384.894.300,00	(98.482.400,00)	(25,59)
23	Puskesmas Kedungjajang	700.696.000,00	399.314.000,00	56,99	494.841.055,00	(95.527.055,00)	(19,30)

No	Nama SKPD	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			Realisasi 2020	%	Realisasi 2019		
24	Puskesmas Klakah	916.980.000,00	634.352.400,00	69,18	843.750.800,00	(209.398.400,00)	(24,82)
25	Puskesmas Ranuyoso	785.000.000,00	403.584.900,00	51,41	684.828.600,00	(281.243.700,00)	(41,07)
26	Puskesmas Tunjung	347.826.000,00	208.444.200,00	59,93	381.520.300,00	(173.076.100,00)	(45,36)
27	RSUD Pasirian	17.310.727.837,00	18.895.451.737,00	109,15	21.444.514.600,93	(2.549.062.863,93)	(11,89)
	Jumlah	**34.120.610.297,00**	**28.807.555.537,00**	**84,43**	**35.946.920.655,93**	**(7.139.365.118,93)**	**(19,86)**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan merupakan pendapatan yang dipungut pada Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan pelayanan kesehatan non kapitasi BPJS. Sedangkan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas merupakan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan kesehatan non kapitasi JKN. Pendapatan pada RSUD Pasirian merupakan pendapatan layanan kesehatan meliputi layanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, pelayanan laboratorium, rediologi, pelayanan farmasi, kebidanan dan kandungan, pelayanan jenazah dan layanan lainnya.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(2) Retribusi Pelayanan Persampahan	**811.600.000,00**	**732.300.000,00**	**866.150.000,00**

Pendapatan retribusi pelayanan persampahan dipungut atas jasa pelayanan di bidang persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan Tahun 2020 sebesar Rp732.300.000,00 atau 90,23% dari target sebesar Rp811.600.000,00. Dibanding periode sebelumnya, realisasianya menurun sebesar 15,45% sebagaimana data berikut ini.

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan

Dalam Rupiah

No	Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1	2019	865.000.000,00	866.150.000,00	100,13
2	2020	811.600.000,00	732.300.000,00	90,23
	Kenaikan (Penurunan)	(53.400.000,00)	(133.850.000,00)	250,66
	% Kenaikan (Penurunan)	(6,17)	(15,45)	250,32

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(3) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	**2.948.612.000,00**	**4.780.461.000,00**	**5.102.365.500,00**

Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut oleh Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan) atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Lumajang meliputi :

a. Parkir berlangganan pemungutannya bekerjasama dengan Samsat Kabupaten Lumajang, dipungut sekali untuk 12 (dua belas) bulan ke depan, pada saat pemilik kendaraan bermotor yang bernomor polisi wilayah kabupaten Lumajang melakukan transaksi dengan samsat yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Selanjutnya kendaraan tersebut tidak di pungut lagi retribusi parkir pada saat memanfaatkan fasilitas parkir di wilayah kabupaten Lumajang.
b. Parkir konvensional di pungut terhadap kendaraan bermotor dengan nomor polisi di luar wilayah kabupaten Lumajang yang memanfaatkan area parkir di tepi jalan umum yang ada di wilayah kabupaten Lumajang sehingga wajib membayar retribusi parkir di tepi jalan umum.
c. Tempat khusus parkir

Realisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum Tahun 2020 mencapai Rp4.780.461.000,00 atau 162.13% dari anggaran sebesar Rp2.948.612.000,00. Dibanding Tahun 2019, realisasi mengalami penurunan sebesar Rp321.904.500,00 atau (6,31%) Rincian realisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum TA 2020 & 2019

Dalam Rupiah

NO.	Jenis Retribusi Parkir	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan	%
			2020	%	2019	Penurunan)	
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Parkir Konvensional	110.560.500,00	155.542.500,00	140,69	138.168.500,00	17.374.000,00	12,57
2	Retribusi Parkir Khusus	3.214.000,00	5.538.500,00	172,32	12.194.500,00	(6.656.000,00)	(54,58)
3	Retribusi Parkir Berlangganan	2.834.837.500,00	4.619.380.000,00	162,95	4.952.002.500,00	(332.622.500,00)	(6,72)
	Jumlah	**2.948.612.000,00**	**4.780.461.000,00**	**162,13**	**5.102.365.500,00**	**(321.904.500,00)**	**(6,31)**

Dari pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum Tahun 2020 termasuk di dalamnya pendapatan retribusi parkir berlangganan diterima di muka yang akan menjadi hak atas pendapatan LO di Tahun 2021. Sedangkan dari pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum Tahun 2019 termasuk di dalamnya pendapatan retribusi parkir berlangganan diterima di muka yang sudah menjadi hak atas pendapatan LO di Tahun 2020.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(4) Retribusi Pelayanan pasar	**6.880.813.000,00**	**6.940.840.825,00**	**7.833.865.581,25**

Retribusi pelayanan pasar dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Lumajang meliputi retribusi pasar umum, pasar hewan, perijinan atas peralatan/bangunan pasar dan MCK pasar. Retribusi Pelayanan Pasar di kelola oleh Dinas Perdagangan.

Retribusi pelayanan pasar Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp6.880.813.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.940.840.825,00 atau mencapai 100,87%. Realisasi retribusi pasar umum daerah dan retribusi pasar hewan telah melampaui target lebih dari 100%, sedangkan untuk perijinan atas peralatan/bangunan pasar terealisasi 97,47% dari target. Pada Tahun 2020 tidak di pungut biaya untuk penggunaan MCK pasar.

Dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Lumajang menyebabkan realisasi pendapatan retribusi pasar mengalami penurunan di bandingkan dengan realisasi periode sebelumnya mencapai (11,40%).

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2020 & 2019

Dalam Rupiah

No	Jenis Retribusi Pasar	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pasar Umum Daerah	6.099.636.000,00	6.163.507.800,00	101,05	6.602.527.700,00	(439.019.900,00)	(6,65)
2	Pasar Hewan	326.377.000,00	334.039.000,00	102,35	388.420.000,00	(54.381.000,00)	(14,00)
3	Perijinan atas Peralatan / Bangunan Pasar	454.800.000,00	443.294.025,00	97,47	826.317.881,25	(383.023.856,25)	(46,35)
4	MCK Pasar	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	(16.600.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**6.880.813.000,00**	**6.940.840.825,00**	**100,87**	**7.833.865.581,25**	**(893.024.756,25)**	**(11,40)**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	**497.060.000,00**	**675.225.000,00**	**1.363.955.000,00**

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut oleh Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan) atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	497.060.000,00	675.225.000,00	135,84	1.363.955.000,00	(688.730.000,00)	(50,50)
	Jumlah	**497.060.000,00**	**675.225.000,00**	**135,84**	**1.363.955.000,00**	**(688.730.000,00)**	**(50,50)**

Realisasi Tahun 2020 mencapai 135,84% dari anggarannya. Di banding Tahun 2019, realisasi menurun sebesar (50,50)%. Penurunan yang sangat signifikan ini disebabkan karena masayarakat pemilik kendaraan bermotor menunda untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor karena kondisi perekonomian yang lesu akibat pandemi covid-19.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(6) Retribusi Penyedotan Kakus/Tinja	**34.625.000,00**	**41.920.000,00**	**17.190.000,00**

Pendapatan Retribusi Penyedotan Kakus dipungut oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) yang merupakan jenis retribusi baru mulai Tahun 2019. Dimana pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp41.920.000,00 dan 2019 sebesar Rp17.190.000,00.

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyedotan Kakus/Tinja Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Penyedotan Kakus/Tinja	34.625.000,00	41.920.000,00	121,07	17.190.000,00	24.730.000,00	143,86
	Jumlah	**34.625.000,00**	**41.920.000,00**	**121,07**	**17.190.000,00**	**24.730.000,00**	**143,86**

Realisasi Tahun 2020 mencapai 121,07% dari anggarannya. Di banding Tahun 2019, realisasi naik sebesar 143,86%. Kenaikan yang sangat yang sangat signifikan ini disebabkan karena kegiatan penyedotan dan pembuangan limbah tinja mengandung resiko terjadinya

pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang harus dikelola dengan baik dan masyarakat telah sadar akan hal tersebut.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pendapatan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tidak terealisasinya pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tahun 2020 dan 2019 disebabkan sebagai berikut:

a. Pada Tahun 2018 kewenangan pemungutannya dialihkan dari Dinas Kominfo ke Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang PUTR.
b. Pada Tahun 2019 Dinas PUTR belum melakukan perubahan Perda sebagai landasan hukum melaksanakan pemungutan.
c. Pada Tahun 2020 kewenangan pemungutannya dari DPUTR dialihkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dan belum dilaksanakan pemungutan.

Dengan belum di pungutnya retribusi tersebut, akibatnya potensi pendapatan yang sudah di anggarkan menjadi hilang karena tidak di pungut.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(8) Retribusi Pelayanan Tera Ulang	**140.022.000,00**	**140.593.600,00**	**161.382.000,00**

Pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Dinas Perdagangan) atas pelayanan tera/tera ulang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang retribusi tera/tera ulang. Objek retribusi pelayanan

tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Didalam APBD Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp140.022.000,00 dengan realisasi sebesar Rp140.593.600,00 atau 100,41%. Dibanding Tahun 2019, realisasi Tahun 2020 turun sebesar (Rp20.788.400,00) atau (12,88%.)

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang Tahun Anggaran 2020 & 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan	%
			2020	%	2019	Penurunan)	
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retibusi Tera Ulang	140.022.000,00	140.593.600,00	100,41	161.382.000,00	(20.788.400,00)	(12,88)
	Jumlah	**140.022.000,00**	**140.593.600,00**	**100,41**	**161.382.000,00**	**(20.788.400,00)**	**(12,88)**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**700.162.425,00**	**453.583.233,00**	**574.524.331,00**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian barang milik daerah. Di Kabupaten Lumajang retribusi pemakaian kekayaan daerah di pungut oleh beberapa entitas, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Bagian Umum, Dinas Pertanian, Puskesmas dan Balai Kesehatan Olahraga.

Secara total realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi hanya mencapai 64,78% dari anggarannya.

Beberapa jenis pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya telah melampaui target lebih dari 100%, seperti sewa alat laboratorium, kabel FO, sewa rumah dinas dan sewa rumah potong hewan pada Dinas Pertanian serta sewa tanah reklame pada Dinas Perdagangan, sedangkan lainnya realisasinya tidak mencapai target. Dibanding Tahun 2019 total realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020 turun (21,05%) atau sebesar Rp120.941.098,00 (Tabel 35).

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan	%
			2020	%	2019	Penurunan)	
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
I	**Dinas PUTR**	**622.151.225,00**	**371.300.633,00**	**59,68**	**471.617.131,00**	**(100.316.498,00)**	**(21,27)**
1	Sewa Tanah dan Bangunan Pengairan	323.420.225,00	143.785.880,00	44,46	176.871.381,00	(33.085.501,00)	(18,71)

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
2	Sewa alat berat/Walls	109.130.000,00	82.500.000,00	75,60	151.650.000,00	(69.150.000,00)	(45,60)
3	Sewa Alat Laboratorium	52.713.000,00	63.889.000,00	121,20	112.092.000,00	(48.203.000,00)	(43,00)
4	Sewa Tanah dan Bangunan untuk Reklame	136.480.000,00	77.023.353,00	56,44	31.003.750,00	46.019.603,00	148,43
5	Kabel FO	408.000,00	4.102.400,00	1.005,49	0,00	4.102.400,00	0,00
II	**Dinas Pertanian**	**680.400,00**	**680.400,00**	**100,00**	**680.400,00**	**0,00**	**0,00**
6	Sewa Rumah Dinas	181.500,00	181.500,00	100,00	181.500,00	0,00	0,00
7	Sewa Tanah Rumah Potong Hewan	498.900,00	498.900,00	100,00	498.900,00	0,00	0,00
III	**Dinas Kesehatan & Puskesmas**	**63.461.800,00**	**42.675.400,00**	**67,25**	**102.226.800,00**	**(59.551.400,00)**	**(58,25)**
8	Pemanfaatan Fasilitas Fitnes pada BKOR (Dinkes)	56.956.000,00	36.676.000,00	64,39	96.367.000,00	(59.691.000,00)	(61,94)
9	Sewa Rumah Dinas / Puskesmas	6.505.800,00	5.999.400,00	92,22	5.859.800,00	139.600,00	2,38
IV	**DINAS PERDAGANGAN**	**13.869.000,00**	**38.926.800,00**	**280,67**	**0,00**	**38.926.800,00**	0,00
10	Sewa Tanah Reklame Pasar	13.869.000,00	38.926.800,00	280,67	0,00	38.926.800,00	0,00
	Jumlah	**700.162.425,00**	**453.583.233,00**	**64,78**	**574.524.331,00**	**(120.941.098,00)**	**(21,05)**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(10) Retibusi Jasa Usaha Terminal	**65.002.000,00**	**82.623.400,00**	**114.783.600,00**

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Terminal dipungut oleh Dinas Perhubungan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Terminal Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp65.002.000,00 terealisasi 127,11% atau sebesar Rp82.623.400,00 terinci sebagaimana tersaji dalam tabel 31. Dibanding Tahun 2019, total realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Terminal mengalami penurunan sebesar Rp32.160.200,00 atau (28,02%)

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Terminal Tahun Anggaran 2020 & 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Taksi/MPU	52.682.000,00	65.664.000,00	124,64	94.158.100,00	(28.494.100,00)	(30,26)
2	Retribusi Kios Terminal	9.500.000,00	14.929.400,00	157,15	16.825.500,00	(1.896.100,00)	(11,27)
3	M C K Terminal	2.820.000,00	2.030.000,00	71,99	3.800.000,00	(1.770.000,00)	(46,58)
	Jumlah	**65.002.000,00**	**82.623.400,00**	**127,11**	**114.783.600,00**	**(32.160.200,00)**	**(28,02)**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(11) Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	**18.900.500,00**	**28.746.500,00**	**31.392.500,00**

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus/Parkir dipungut oleh Dinas Perhubungan atas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus/Parkir mencapai target dengan total realisasi mencapai 152,09%. Dibanding Tahun 2019, realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus/Parkir di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.646.000,00 atau (8,43%).

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Kend. Bermotor dengan berat kurang 3.500Kg	7.285.500,00	10.903.500,00	149,66	15.403.000,00	(4.499.500,00)	(29,21)
2	Kend. Bermotor dengan berat 3.500Kg s/d 15.000Kg	9.150.000,00	13.528.000,00	147,85	12.732.000,00	796.000,00	6,25
3	Kend. Bermotor dengan berat lebih 15.000Kg	2.465.000,00	4.315.000,00	175,05	3.257.500,00	1.057.500,00	32,46
	Jumlah	**18.900.500,00**	**28.746.500,00**	**152,09**	**31.392.500,00**	**(2.646.000,00)**	**(8,43)**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(12) Retribusi JasaUsaha Rumah Potong Hewan	**250.235.000,00**	**247.072.000,00**	**255.175.000,00**

Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan dipungut oleh Dinas Pertanian atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Total Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dengan realisasi mencapai 98,74% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, realisasi retribusi jasa usaha rumah potong hewan mengalami penurunan sebesar (Rp8.103.000,00) atau turun sebesar (3,18%).

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Sapi Usaha	248.075.000,00	243.429.000,00	98,13	255.175.000,00	(11.746.000,00)	(4,60)
2	Kambing	2.160.000,00	3.643.000,00	168,66	0,00	3.643.000,00	0,00
	Jumlah	**250.235.000,00**	**247.072.000,00**	**98,74**	**255.175.000,00**	**(8.103.000,00)**	**(3,18)**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(13) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	**873.429.000,00**	**1.369.719.500,00**	**3.884.237.950,00**

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Lumajang, retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Rincian realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
I	**Dinas Pariwisata & Kebudayaan**						
1	Pemandian alam Selokambang	464.528.500,00	818.816.500,00	176,27	2.251.860.000,00	(1.433.043.500,00)	(63,64)
2	Kawasan Wonorejo Terpadu/KWT	250.996.750,00	321.271.500,00	128,00	1.099.026.000,00	(777.754.500,00)	(70,77)
3	Segitiga Ranu	24.859.500,00	88.621.000,00	356,49	119.923.000,00	(31.302.000,00)	(26,10)
4	B 29	6.798.250,00	13.096.000,00	192,64	13.318.750,00	(222.750,00)	(1,67)
5	Sewa Gedung Soedjono	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	(110.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah (1)	**747.183.000,00**	**1.241.805.000,00**	**166,20**	**3.594.127.750,00**	**(2.352.322.750,00)**	**(65,45)**
II	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**						
6	Kolam Renang Veteran	43.306.000,00	48.967.500,00	113,07	91.646.200,00	(42.678.700,00)	(46,57)
7	Stadion Semeru	57.440.000,00	67.637.000,00	117,75	154.769.000,00	(87.132.000,00)	(56,30)
8	Sewa GOR Wira Bakti	25.500.000,00	11.310.000,00	44,35	43.695.000,00	(32.385.000,00)	(74,12)
	Jumlah (2)	**126.246.000,00**	**127.914.500,00**	**101,32**	**290.110.200,00**	**(162.195.700,00)**	**(55,91)**
	Jumlah (1) + (2)	**873.429.000,00**	**1.369.719.500,00**	**156,82**	**3.884.237.950,00**	**(2.514.518.450,00)**	**(64,74)**

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun 2020 sebesar Rp1.369.719.500,00 atau 156,82% dari anggaran sebesar Rp873.429.000,00, dibanding Tahun 2019, realisasinya turun sebesar Rp2.514.518.450,00 atau 64,74%. Penurunan ini disebabkan tempat-tempat wisata dan tempat olah raga selama pandemi covid-19 di tutup dan tidak dioperasikan. Pada saat di buka kembali juga masih sepi pengunjung. Penurunan juga di sebabkan karena untuk pemanfaatan gedung Sudjono anggaran dan realisasinya melekat di BPKD.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(14) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	**2.273.762.000,00**	**1.756.690.722,00**	**2.036.565.470,00**

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atas pemberian ijin untuk mendirikan suatu bangunan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Rincian realisasi pendapatan retribusi IMB Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan - IMB Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi IMB	2.273.762.000,00	1.756.690.722,00	77,26	2.036.565.470,00	(279.874.748,00)	(13,74)
	Jumlah	**2.273.762.000,00**	**1.756.690.722,00**	**77,26**	**2.036.565.470,00**	**(279.874.748,00)**	**(13,74)**

Pendapatan Retribusi IMB Tahun 2020 tidak mencapai target dan dibandingkan dengan periode sebelumnya mengalami penurunan sebesar (13,74%).

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(15) Retribusi Ijin Trayek	**5.065.000,00**	**3.250.000,00**	**9.645.000,00**

Retribusi Ijin Trayek dipungut oleh Dinas Perhubungan atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada beberapa trayek tertentu. Rincian realisasi retribusi ijin trayek Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Ijin Trayek Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Ijin Trayek dengan KPS tmpt duduk s/d 15 orang	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)	(100,00)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
2	Ijin Trayek dengan KPS tmpt duduk lebih 16 orang	500.000,00	250.000,00	50,00	1.250.000,00	(1.000.000,00)	(80,00)
3	Jenis angkutan KP tempat duduk s/d 15 orang	1.040.000,00	720.000,00	69,23	1.880.000,00	(1.160.000,00)	(61,70)
4	Jenis angkutan KP tempat duduk lebih 16 orang	200.000,00	200.000,00	100,00	500.000,00	(300.000,00)	(60,00)
5	Truck Insidentil MPU	945.000,00	840.000,00	88,89	1.815.000,00	(975.000,00)	(53,72)
6	Truck Insidentil BUS	1.980.000,00	1.240.000,00	62,63	3.800.000,00	(2.560.000,00)	(67,37)
	Jumlah	**5.065.000,00**	**3.250.000,00**	**64,17**	**9.645.000,00**	**(6.395.000,00)**	**(66,30)**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**5.105.516.366,26**	**5.105.516.366,26**	**4.968.766.089,07**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan pendapatan dividen / bagian laba dari hasil investasi/penyertaan modal Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6		
1	PT. Bank Jatim	3.239.331.369,00	3.239.331.369,00	100,00	3.065.267.712,45	174.063.656,55	5,68
2	PT. BPR Jatim	33.689.000,00	33.689.000,00	100,00	64.099.000,00	(30.410.000,00)	(47,44)
3	PD. Bank Pasar	426.945.151,50	426.945.151,50	100,00	102.419.197,60	324.525.953,90	316,86
4	PDAM	1.405.550.845,76	1.405.550.845,76	100,00	1.736.980.179,02	(331.429.333,26)	(19,08)
5	PD. Semeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**5.105.516.366,26**	**5.105.516.366,26**	**100,00**	**4.968.766.089,07**	**136.750.277,19**	**2,75**

- Hasil penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Tbk pada Tahun 2020 sebesar Rp3.239.331.369,00 merupakan pendapatan deviden tunai atas laba bersih Tahun 2019.

Sedangkan hasil penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Tbk pada Tahun 2019 sebesar Rp3.065.267.712,45 merupakan pendapatan deviden tunai atas laba bersih Tahun 2018.

- Hasil penyertaan modal pada PT. BPR Jatim pada Tahun 2020 sebesar Rp33.689.000,00 merupakan pendapatan deviden tunai atas laba bersih Tahun 2019. Sedangkan hasil penyertaan modal pada PT. BPR Jatim pada Tahun 2019 sebesar Rp64.099.000,00 merupakan pendapatan deviden tunai atas laba bersih Tahun 2018.
- Hasil penyertaan modal pada PD. BPR Bank Pasar Lumajang Tahun 2020 sebesar Rp426.945.151,50 merupakan bagian laba atas laba bersih Tahun 2019. Sedangkan hasil penyertaan modal pada PD. BPR Bank Pasar Lumajang Tahun 2019 sebesar Rp102.419.197,60 yang merupakan bagian laba atas laba bersih Tahun 2018.
- Hasil penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Lumajang Tahun 2020 sebesar Rp1.405.550.845,76 merupakan bagian laba atas laba bersih Tahun 2019. Sedangkan hasil penyertaan modal pada PD. BPR Bank Pasar Lumajang Tahun 2019 sebesar Rp1.736.980.179,02 yang merupakan bagian laba atas laba bersih Tahun 2018.
- Pada Tahun 2020 dan 2019 tidak ada penerimaan bagian laba dari PD. Semeru.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	**155.852.529.952,60**	**180.437.019.778,51**	**159.068.331.445,12**

Lain-lain PAD yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun 2020 sebesar Rp180.437.019.778,51 atau mencapai 115,77% dari anggaran sebesar Rp155.852.529.952,60. Dibanding Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 13,43% atau Rp21.368.688.333,39.

Tabel 43. Realisasi Anggaran Pendapatan Lain - Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	216.750.000,00	276.001.332,00	127,34	236.675.000,00	39.326.332,00	16,62
2	Penerimaan Jasa Giro	2.356.949.154,24	2.231.304.326,14	94,67	2.659.609.637,71	(428.305.311,57)	(16,10)
3	Penerimaan Deposito	237.500.000,00	235.479.649,00	99,15	3.220.239.775,11	(2.984.760.126,11)	(92,69)
4	Tuntutan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	39.270.500,00	55.270.500,00	140,74	90.075.000,00	(34.804.500,00)	(38,64)

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	790.975,00	90.173.802,00	11.400,34	161.633.912,05	(71.460.110,05)	(44,21)
6	Pendapatan Denda Pajak	65.565.848,00	65.565.848,00	100,00	200.371.351,50	(134.805.503,50)	(67,28)
7	Pendapatan Denda Retribusi	252.712.500,00	471.712.500,00	186,66	0,00	471.712.500,00	0,00
8	Pendapatn Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	9.890.000,00	(9.890.000,00)	(100,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian	949.362.442,36	2.332.227.934,41	245,66	1.691.754.483,55	640.473.450,86	37,86
10	Pendapatan BLUD RSUD Dr. Haryoto	105.000.000.000,00	133.656.344.484,96	127,29	107.916.456.533,20	25.739.887.951,76	23,85
11	Pendapatan Sewa	1.552.664.500,00	1.693.696.000,00	109,08	1.624.158.080,00	69.537.920,00	4,28
12	Dana Kapitasi JKN	45.166.535.400,00	39.315.464.575,00	87,05	40.111.039.361,00	(795.574.786,00)	(1,98)
13	Pendapatan Denda Sewa	593.200,00	1.075.800,00	181,36	3.179.200,00	(2.103.400,00)	(66,16)
14	Lain-lain PAD Yg Sah lainnya	13.835.433,00	12.703.027,00	92,49	1.143.249.111,00	(1.130.546.084,00)	(98,89)
	Jumlah	**155.852.529.952,60**	**180.437.019.778,51**	**115,77**	**159.068.331.445,12**	**21.368.688.333,39**	**13,43**

a. Hasil Penjualan Aset daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak di pisahkan meliputi penjualan drum bekas pada Dinas PUTR, Penjualan hasil pertanian dan penjualan hasil perkebunan pada Dinas Pertanian serta penjualan hasil perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan, terinci sebagai berikut:

Tabel 44. Realisasi Anggaran Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Penjualan drum bekas (Dinas PUTR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penjualan hasil pertanian (Dinas Pertanian)	116.750.000,00	103.200.000,00	88,39	71.000.000,00	32.200.000,00	45,35
3	Penjualan hasil perkebunan (Dinas Pertanian)	0,00	0,00	0,00	30.675.000,00	(30.675.000,00)	(100,00)

No	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
4	Penjualan hasil perikanan (Dinas Perikanan)	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	135.000.000,00	(45.000.000,00)	(33,33)
5	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	19.475.000,00	0,00	0,00	19.475.000,00	0,00
6	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	37.375.832,00	0,00	0,00	37.375.832,00	0,00
7	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat/Roda Enam	0,00	15.250.500,00	0,00	0,00	15.250.500,00	0,00
8	Penjualan hasil penebangan Pohon	10.000.000,00	10.700.000,00	107,00	0,00	10.700.000,00	0,00
	Jumlah	**216.750.000,00**	**276.001.332,00**	**127,34**	**236.675.000,00**	**39.326.332,00**	**16,62**

b. Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro meliputi penerimaan jasa giro atas rekening giro milik Pemerintah Daerah meliputi rekening penerimaan daerah; rekening pengeluaran daerah; rekeing kas umum daerah; rekening bendahara pengeluaran dan rekening BOS, terinci sebagai berikut:

Tabel 45. Realisasi Anggaran Jasa Giro Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Jasa Giro	Anggaran 2019	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Jasa giro rek. kas umum daerah	2.036.949.154,24	1.798.451.739,19	88,29	2.294.457.691,74	(496.005.952,55)	(21,62)
2	Jasa giro rek. pengeluaran daerah	175.000.000,00	261.333.512,69	149,33	234.101.627,71	27.231.884,98	11,63
3	Jasa giro rek. penerimaan daerah	20.000.000,00	671.594,13	3,36	1.348.518,84	(676.924,71)	(50,20)
4	Jasa giro rek. bendahara pengeluaran	125.000.000,00	157.882.568,72	126,31	90.517.744,99	67.364.823,73	74,42
5	Jasa giro rek. bendahara pengeluaran BOS	0,00	12.964.911,41	0,00	39.184.054,43	(26.219.143,02)	(66,91)
	Jumlah	**2.356.949.154,24**	**2.231.304.326,14**	**94,67**	**2.659.609.637,71**	**(428.305.311,57)**	**(16,10)**

Pada Tahun 2020 terdapat pendapatan jasa giro/bunga atas rekening BOS sebesar Rp12.964.911,41 yang belum di setorkan ke rekening kas daerah dan masih ada di rekening lembaga sekolah.

c. Penerimaan Bunga Deposito

Penerimaan Bunga Deposito merupakan pendapatan bunga deposito atas penempatan uang daerah pada Bank Jatim, Bank BRI dan Bank Mandiri dalam bentuk Deposito. Penempatan Dana dalam bentuk Deposito adalah dalam rangka manajemen kas, dan penempatannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Daerah. Rincian deposito beserta pendapatan bunga deposito sebagai berikut:

Tabel 46. Rincian Pendapatan Bunga Deposito Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Deposito	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Bank Jatim	0,00	0,00	0,00	2.259.417.808,14	0,00	0,00
2	Bank BRI	237.500.000,00	235.479.649,00	99,15	735.821.967,00	(500.342.318,00)	(68,00)
3	Bank Mandiri	0,00	0,00	0,00	224.999.999,97	0,00	0,00
	Jumlah	**237.500.000,00**	**235.479.649,00**	**99,15**	**3.220.239.775,11**	**(2.984.760.126,11)**	**(92,69)**

Pada Tahun 2020 tidak ada penempatan dana deposito di Bank lain selain di Bank BRI Cabang Lumajang dan pada bulan Desember 2020 dana deposito yang ditempatkan pada Bank BRI tersebut telah di tarik ke Kas Daerah, sebagai berikut:

Tabel 47. Rincian Pendapatan Bunga Deposito Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Nama Bank	Nominal (Rp)	No. & Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Pendapatan Bunga Tahun 2020	Pendapatan Bunga Tahun 2019	Tanggal Penarikan Kembali (Penutupan)
	TAHUN 2020						
1	PT. Bank BRI Cabang Lumajang	15.000.000.000,00	916/301/427,73/2020 B.3915/KC-XVI/PEM/08/2020	1 bulan	235.479.649,00	0,00	3 Des. 2020
	TAHUN 2019						
1	PT. Bank Jatim Cabang Lumajang	35.000.000.000,00	910/688,1/427,73/2018 052/160/LMJ/PN/PKS	1 Bulan	0,00	2.259.417.808,14	16 Des. 2019
2	PT. Bank Mandiri Cabang Lumajang	5.000.000.000,00	916/174/427.73/2017 DSB.R08/BR/LMJ/053/2017	1 Bulan	0,00	224.999.999,97	13 Des. 2019
3	PT. Bank BRI Cabang Lumajang	30.000.000.000,00	916/1006/427.73/2019 B.3215/KC/XVI/OPS/08/2019	1 Bulan	0,00	735.821.967,00	30 Des. 2019

No	Nama Bank	Nominal (Rp)	No. & Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Pendapatan Bunga Tahun 2020	Pendapatan Bunga Tahun 2019	Tanggal Penarikan Kembali (Penutupan)
	TAHUN 2020						
1	PT. Bank BRI Cabang Lumajang	15.000.000.000,00	916/301/427.73/2020 B.3915/KC-XVI/PEM/08/2020	1 bulan	235.479.649,00	0,00	3 Des. 2020
	TAHUN 2019						
	Jumlah				**235.479.649,00**	**3.220.239.775,11**	

d. Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Realisasi pendapatan dari TGR Tahun 2020 sebesar Rp55.270.500,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp90.075.000,00. Rincian Realisasi Penerimaan TGR Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 48. Rincian Pendapatan TGR Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Keterangan	2020	2019
1	Penerimaan embayaran tuntutan ganti rugi barang a.n Cipto SP	13.270.500,00	
2	Penerimaan pembayaran TGR kendaraan dinas roda dua a.n Ebara Bappeda	8.000.000,00	
3	Penerimaan pembayaran TGR an M. Chaiyun	7.500.000,00	
4	Penerimaan pembayaran TGR an.drh. Doni Afandi Dinas Pertanian	7.000.000,00	
5	pembayaran tuntutan ganti daerah kendaraan dinas SKP2K no. 188.45/203/427.12/2020	3.500.000,00	
6	Penerimaan pembayaran TPTGR kendaraan dinas roda dua a.n Eko Sugeng Dinas Pertanian	16.000.000,00	
7	Penerimaan pembayaran TGR kehilangan sepeda motor a.n. Moch. Ikhwan Bag. LPbj (ULP)		9.500.000,00
8	Penerimaan pembayaran TGR kehilangan sepeda motor a.n. Bambang Sriwahyuni (Disdalduk)		4.750.000,00
9	Penerimaan pembayaran TGR kehilangan sepeda motor a.n. Drh. Nurul Pratiwi (Dinas Pertanian)		18.600.000,00
10	Penerimaan pembayaran TGR kehilangan sepeda motor a.n. Cipto, STP (Dinas Pertanian)		12.475.000,00
11	Penerimaan pembayaran TGR kehilangan sepeda motor a.n. Wiji Utami (BPKD)		8.500.000,00
12	Penerimaan pembayaran TGR kehilangan sepeda motor a.n. Maskur (Dinas Pendidikan)		7.750.000,00

No	Keterangan	2020	2019
13	Penerimaan pembayaran TGR kehilangan sepeda motor a.n. Nurman Riyadi (Dinas Koperasi)		7.500.000,00
14	Penerimaan pembayaran TGR penggunaan sewa ATM a.n. Neneng (Dinas Perdagangan)		18.000.000,00
15	Penerimaan setoran an. Satuhan Rogotrunan		3.000.000,00
	Jumlah	**55.270.500,00**	**90.075.000,00**

e. Penerimaan dari Denda Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan.

Pendapatan dari Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp161.633.912,05 merupakan pendapatan atas denda yang di pungut kepada Rekanan Pemerintah Daerah yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terinci sebagai berikut:

Tabel 49. Rincian Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	Nama Rekanan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Denda keterlambatan cetak KIB pada Dinkes		449.300,00	
2	Denda keterlambatan perencanaan rehabilitasi pasar plasa	CV. Surya Ningrum	124.575,00	
3	Denda keterlambatan perencanaan rehabilitasi pasar agropolitan	CV. Candra Swasa Prabaswara	99.422,00	
4	Denda keterlambatan perencanaan rehabilitasi pasar randuagung	CV. Candra Buana Perkasa	117.678,00	
5	Denda keterlambatan		25.000.000,00	
6	Denda keterlambatan pembangunan ipal puskesmas gesang	CV. Bambang karya tama	418.849,00	
7	Denda keterlambatan pembangunan IPAL puskesmas pasrujambe	CV. Bambang karya tama	418.849,00	
8	enda keterlambatan pembangunan IPAL puskesmas pronojiwo	CV. Ardhana wicaksana	1.383.405,00	
9	Denda keterlambatan pembangunan IPAL puskesmas penanggal	CV. Bambang karya tama	176.559,00	
10	Denda keterlambatan pembangunan IPAL puskesmas candipuro	CV. Bambang karya tama	162.197,00	
11	Denda keterlambatan pembangunan IPAL puskesmas bades	CV. Bambang karya tama	427.597,00	

No	Uraian	Nama Rekanan	Tahun 2020	Tahun 2019
12	Denda keterlambatan pembangunan IPAL puskesmas tempursari	CV. Ardhana wicaksana	2.170.664,00	
13	Denda keterlambatan pekerjaan	PT Imar Karya	26.999.060,00	
14	Denda pembangunan infrastruktur Desa Kaliuling Kec. Tempursari		758.397,00	
15	Denda keterlambatan PT. Inti Sumber Hasil Sempurna	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna	213.600,00	
16	Denda keterlambatan pekerjaan pengadaan	CV. Karya anda group	20.700.000,00	
17	Denda pekerjaan belanja modal rehab gedung		510.000,00	
18	Denda keterlambatan	CV. Kana Surya Gemilang	1.519.650,00	
19	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	(CV RAJA)	8.524.000,00	
20	BPRD	PT. ACCES LINTAS SOLUSI		2.391.840,00
21	DPKP	CV. AKSATA KONSULINDO		223.740,00
22	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	CV. HARSA WIJAYA		3.261.060,00
23	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	CV. KRISNA JAYA		2.102.296,00
24	RSUD dr. HARYOTO	PT. ELS INDONESIA PRIMA		7.023.305,00
25	Dinas PUTR	PT. FEVA INDONESIA		58.063.677,50
26	Dinas Kesehatan	PT. EFSEVAL PUTRA MEGA TRADING, Tbk.		2.227.500,00
27	Dinas PUTR	CV. GUNA JAYA		6.684.335,00
28	Dinas PUTR	CV. GUNA JAYA		7.950.986,59
29	Dinas PUTR	CV. FAST		10.923.668,00
30	Dinas PUTR	CV. KRISNA JAYA		15.047.658,35
31	Dinas PUTR	CV. GARIS HARMONI		9.493.000,00
32	Dinas PUTR	CV. BADRI KARYA		1.185.555,00
33	Dinas PUTR	CV. FAST		16.030.837,45
34	Dinas PUTR	CV. SONGO		1.907.766,16
35	Dinas Pertanian	CV. FAST		4.969.709,00
36	Dinas Perdagangan	CV. AL KHIDIR JAYA		3.551.352,00
37	DPKP	CV. MEDIO JAYA		1.631.452,00
38	Dinas Pertanian	CV. MEMO TIMUR MANDIRI		2.264.000,00
39	Dinas Lingkungan Hidup	CV. SAMUDRA		541.534,00
40	Dinas Lingkungan Hidup	CV. FAJAR CITRA BANGUN		549.532,00
41	Dinas Lingkungan Hidup	CV. REMAJA KARYA		991.808,00

No	Uraian	Nama Rekanan	Tahun 2020	Tahun 2019
42	Dinas Pemuda & Olah Raga	CV. LIMA JAYA		2.617.300,00
	Jumlah		**90.173.802,00**	**161.633.912,05**

f. Penerimaan dari Denda Pajak.

Pendapatan Denda Pajak merupakan denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Daerah sehingga dikenakan denda pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian denda pajak Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 50. Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Jenis Denda	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pendapatan denda pajak hotel	0,00	0,00	0,00	27.100,00	(27.100,00)	(100,00)
2	Pendapatan denda pajak restoran	8.961.080,00	8.961.080,00	100,00	41.878.038,00	(32.916.958,00)	(78,60)
3	Pendapatan denda pajak hiburan	6.000,00	6.000,00	100,00	5.000,00	1.000,00	20,00
4	Pendapatan denda pajak reklame	764.550,00	764.550,00	100,00	742.023,50	22.526,50	3,04
5	Pendapatan denda pajak parkir	400,00	400,00	0,00	18.200,00	(18.200,00)	(100,00)
6	Pendapatan denda pajak air bawah tanah	838.661,00	838.661,00	100,00	4.256.989,00	(3.418.328,00)	(80,30)
7	Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan	0,00	0,00	0,00	17.120.275,00	(17.120.275,00)	(100,00)
8	Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan	43.529.157,00	43.529.157,00	100,00	118.544.692,00	(75.015.535,00)	(63,28)
9	Pendapatan denda perolehan hak atas tanah dan bangunan	11.466.000,00	11.466.000,00	100,00	17.779.034,00	(6.313.034,00)	(35,51)
	Jumlah	**65.565.448,00**	**65.565.448,00**	**100,00**	**200.371.351,50**	**(134.805.903,50)**	**(67,28)**

g. Penerimaan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi merupakan denda atas keterlambatan Uji KIR (Leading sektor Dinas Perhubungan) dimana pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp471.712.500,00 dari anggaran sebesar Rp252.712.500,00.

h. Penerimaan dari Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan pelaksanaan pekerjaan Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp9.890.000,00. Klaim senilai Rp9.890.000,00 pada Tahun 2019 merupakan Eksekusi Atas Jaminan pelaksanaan pekerjaan urugan tanah SMPN Ranupane pada Dinas Pendidikan atas nama CV. Sumber Makmur. Rincian penerimaan dari hasil eksekusi atas jaminan Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 51. Rincian Penerimaan dari Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Penerimaan dari hasil eksekusi atas jaminan	0,00	0,00	0,00	9.890.000,00	(9.890.000,00)	(100)
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.890.000,00**	**(9.890.000,00)**	**(100)**

i. Penerimaan dari pengembalian.

Penerimaan dari pengembalian merupakan pendapatan yang diterima dari pengembalian belanja pada periode sebelumnya seperti pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja pegawai, pengembalian belanja modal karena kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan pada periode sebelumnya, dan lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52. Rincian Penerimaan Dari Pengembalian Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pengembalian belanja hibah PPKD	1.000.000,00	0,00
2	Pengembalian dari CV Mandiri Konstruksi	45.090.814,00	0,00
3	Pengembalian DAK 2008 SDN Sumbermujur 05	6.000.000,00	0,00
4	Pengembalian dari CV. Ega Satria	1.057.920,00	0,00
5	Pengembalian terkait hasil pemeriksaan BPK TA . 2010	10.040.360,16	0,00
6	Pengembalian atas lebih bayar lembur PNS Kec. Yosowilangun Tahun 2019	1.790.000,00	0,00
7	Pengembalian dari Paud KB kartini Tahun lalu	2.000.000,00	0,00
8	Pengebalian dari CV. Jasa Mandiri	10.000.000,00	0,00
9	Pengembalian atas kelebihan pembayaran hasil pemeriksaan BPK RI Dinas Perdagangan	5.000.000,00	0,00
10	Pengembalian atas kelebihan pembayaran kepada CV. Kria Mandiri pekerjaan fisik kontruksi Pasar Pronojiwo	5.000.000,00	0,00
11	Pengembalian atas kelebihan pembayaran kepada CV Kria Mandiri	49.667.316,43	0,00
12	Pengembalian dari Dinas Pasar / Dinas Perdagangan	3.279.363,58	0,00

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
13	Penerimaan belanja Tahun lalu	2.136.327,00	0,00
14	Penerimaan kembali belanja Tahun lalu	2.500.000,00	0,00
15	Pengembalian belanja hasil LHP inspektorat Tahun 2019 DPMD	7.185.053,00	0,00
16	Pengembalian belanja insentif pemungutan retribusi tribulan I 2019 Dinas Perdagangan	5.404.062,00	0,00
17	Pengembalian belanja Tahun 2019 BKD	6.500.000,00	0,00
18	Pengembalian dana bantuan milik tani tunas inti desa kertosari kecamatan pasrujambe TA 2011	5.000.000,00	0,00
19	Pengembalian dana DAK 2008 SDN Selok Awar-awar 03	2.000.000,00	0,00
20	Pengembalian dana hibah MPC Pemuda Pancasila TA 2019 Kab Lumajang	175.000.000,00	0,00
21	Pengembalian dari desa pagawon	120.000.000,00	0,00
22	Pengembalian kelebihan pembayaran CV. Dwi Karya	24.517.560,68	0,00
23	Pengembalian kelebihan pembayaran pembangunan puskesmas rogotrunan CV. Remaja Karya	32.879.673,58	0,00
24	Pengembalian kelebihan pembayaran pembangunan Puskesmas Rogotrunan oleh CV. Remaja Karya	30.000.000,00	0,00
25	Pengembalian kelebihan pembayaran pembangunan puskesmas tunjung oleh CV. Cipta Enginering 2019	17.056.711,97	0,00
26	Pengembalian kelebihan pembayaran rehabilitasi puskesmas tempursari CV. Mahakarya Abadi	37.660.156,14	0,00
27	Pengembalian tunjangan fungsioanal guru pada Dinas Pendidikan	395.209.200,00	0,00
28	Pengembalian biaya pengawasan pelaksanaan reviuw Dinas Perikanan TA 2019	2.731.000,00	0,00
29	Pengembalian gaji PNS bulan juni 2011 - desember 2019 RSUD dr. HAryoto	35.011.770,00	0,00
30	Pengembalian uang laporan hasil inspektorat Dinas Ketahanan Pangan	10.276.506,00	0,00
31	Pengembalian uang laporan hasil pemeriksaan reguler inspektorat Tahun 2018	2.690.409,00	0,00
32	Pengembalian DAK Tahun 2008	300.000,00	0,00
33	Penyetoran kembali atas temuan pemeriksaan BPK dari DAK Tahun 2008 SDN Wonocepokoayu 01	240.000,00	0,00
34	penyetoran kembali atas temuan pemeriksaan BPK SDN Kebonsari 02	5.500.000,00	0,00
35	penyetoran kembali atas temuan pemeriksaan BPK untuk bulan September 2020 SDN Dawuhan Lor 02	500.000,00	0,00
36	penyetoran kembali dana Bansos Tahun 2019	11.200.000,00	0,00
37	Pengembalian dana Bansos 2019 Puskesmas Kunir	2.770.000,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
38	Pengembalian dana Bansos 2019 Puskesmas Senduro	7.125.000,00	0,00
39	Pengembalian dana bansos Tahun 2019	1.385.000,00	0,00
40	Pengembalian hasil temuan pemeriksaan BPK TA 2019 BPRD	51.919.717,00	0,00
41	Pengembalian temuan BPK DAK 2008 SDN Dawuhan Lor 02	500.000,00	0,00
42	Pengembalian temuan BPK DAK Tahun 2008 SDN Papringan 02	1.000.000,00	0,00
43	Pengembalian temuan BPK DAK Tahun 2008 SDN Yosowilangun Lor 05	300.000,00	0,00
44	Pengembalian temuan BPK SDN Dawuhan Lor 02	3.000.000,00	0,00
45	Pengembalian temuan BPK SDN Sumberejo 04 Candipuro	1.000.000,00	0,00
46	Pengembalian temuan inspektorat Tahun 2019	350.000,00	0,00
47	Pengembalian temuan pemeriksa BPK SDN Pasrujambe 05 DAK 2008	1.000.000,00	0,00
48	Pengembalian temuan pemeriksaan BPK atas DAK Tahun 2008 SDN Dawuhan Lor 2	1.400.000,00	0,00
49	Pengembalian temuan pemeriksaan BPK DAK Tahun 2008	2.000.000,00	0,00
50	Pengembalian temuan pemeriksaan BPK DAK Tahun 2008 SDN Bades 05	5.000.000,00	0,00
51	Pengembalian temuan pemeriksaan BPK DAK Tahun 2008 SDN Gondoruso 02	3.500.000,00	0,00
52	Pengembalian temuan pemeriksaan BPK DAK Tahun 2008 SDN Papringan 02	500.000,00	0,00
53	Pengembalian temuan pemeriksaan BPK DAK Tahun 2008 SDN Selok Awar Awar 03	3.500.000,00	0,00
54	Pengembalian temuan pemeriksaan BPK untuk bulan Nopember 2020 SDN Dawuhan Lor 02	500.000,00	0,00
55	Pengembalian temuan pemeriksaan inspektorat Tahun 2018-2019 Kecamatan Pasrujambe	9.645.000,00	0,00
56	Pengembalian berdasar temuan inspektorat Tahun 2019 Dispendukcapil	1.450.000,00	0,00
57	Pengembalian dana Bansos	2.100.000,00	0,00
58	Pengembalian dana Bansos 2019 Puskesmas Candipuro	5.140.000,00	0,00
59	Pengembalian dana Bansos 2019 Puskesmas Klakah	3.855.000,00	0,00
60	Pengembalian dana Bansos 2019 Puskesmas Tekung	3.859.000,00	0,00
61	Pengembalian dana Bansos 2019 Puskesmas Tempeh	1.369.000,00	0,00
62	Pengembalian dana hibah 2019	750.000,00	0,00
63	Pengembalian dana hibah 2019 SMA Islam Terpadu Ar-Rahmah	750.000,00	0,00
64	Pengembalian dana hibah SMAS BUSTANUL ULUM Ranuyoso Tahun 2019	2.875.000,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
65	Pengembalian dana hibah SMK Manba'ul Hikmah	2.700.000,00	0,00
66	Pengembalian dana hibah Tahun 2019 SMA PGRI Yosowilangun	750.000,00	0,00
67	Pengembalian gaji	35.246.100,00	0,00
68	Pengembalian gaji untuk bulan desember 2019 BPKD	4.191.000,00	0,00
69	Pengembalian kelebihan perjalanan dinas Setwan	1.274.000,00	0,00
70	Pengembalian kelebihan transfer dana bagi hasil dan retribusi daerah	2.642.944,00	0,00
71	Pengembalian kelebihan tunjangan anak Kecamatan Lumajang april s/d Desember 2019	854.100,00	0,00
72	Pengembalian kelebihan tunjangan suami an Dra. Elli Nurul Komariah Disdalduk	15.974.704,00	0,00
73	Pengembalian kelebihan uang lembur PNS bulan Januari 2019 Kecamatan Lumajang	256.000,00	0,00
74	Pengembalian kelebihan uang lembur PNS Tahun 2018 Kec. Lumajang	80.000,00	0,00
75	Pengembalian LHP nomor 700/165/427.3/2017 13 oktober 2017 Kec. Tempursari	260.000,00	0,00
76	Pengembalian LHP nomor 700/213/427.51/2014 26 desember 2016 Kec. Tempursari	7.997.209,00	0,00
77	Pengembalian penerimaan insentif BPRD tribulan IV 2018 dan tribulan I 2019	5.848.252,00	0,00
78	Pengembalian perjalanan dinas luar DPKP Tahun 2019	5.200.000,00	0,00
79	Pengembalian sisa penggunaan dana kelebihan pembayaran TA 2018 pada DPMD	229.234.000,00	0,00
80	Pengembalian temuan inspektorat Kecamatan Tempeh	175.000,00	0,00
81	Pengembalian TPP an. Slamet Bulan Nop s/d Des 2019	2.912.852,00	0,00
82	Pengembalian tunjangan an. Ngudi Budianto bulan Agustus 2019	3.899.300,00	0,00
83	Pengembalian kelebihan belanja atas LHP kelurahan citrodiwangsan	2.393.000,00	0,00
84	Pengembalian penerimaan insentif tribulan IV 2018 dan tribulan I dan II 2018 BPRD	3.987.915,97	0,00
85	Pengembalian kelebihan belanja Dinas Pertanian Tahun 2019	1.180.000,00	0,00
86	Pengembalian belanja Tahun lalu TK Dharma Wanita 02 desa Barat	2.000.000,00	0,00
87	Pengembaian atas pekerjaan jalan tempeh - pandanwangi	35.594.221,05	0,00
88	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan pasrujambe - loji PT Gunung Kelabat Citra Abadi	94.176.006,15	0,00
89	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan PT. Bumi Karya Utama	100.000.000,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
90	Pengembalian atas kelebihan bayar PT. Bumi K	210.635.490,32	0,00
91	Pengembalian atas pekerjaan pembangunan dam boreng TA 2018	30.000.000,00	0,00
92	Pengembalian atas pekerjaan pembangunan Dam Boreng TA. 2018 CV. Sofie	5.000.000,00	0,00
93	Pengembalian atas pekerjaan peningkatan jalan pasrujambe - senduro	14.405.778,95	0,00
94	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan pasangan batu dan mortar jalan kebonan - curahpetung	46.986.165,36	0,00
95	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan gondoruso - jugosari	80.000.000,00	0,00
96	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan kalisemut - dadapan	25.923.651,50	0,00
97	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan paket 2 CV. Amanda Raya	4.144.074,74	0,00
98	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan pasrujambe - senduro TA 2019	19.976.883,71	0,00
99	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan pronojiwo - kaliuling 2019	19.606.917,64	0,00
100	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan peningkatana jalan jeruk - sombo	57.915.447,48	0,00
101	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan PT. Gunung Kelabat Citra Abadi	50.000.000,00	0,00
102	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan PT. Gunung Kelabat CTR ABADi	2.000.000,00	0,00
103	Pengembalian atas pengadaan barang yang tidak sesuai Dinas Perikanan	5.940.000,00	0,00
104	Pengembalian atas pengadaan benih Tahun 2018 Dinas Perikanan	8.900.000,00	0,00
105	Pengembalian dari TK DW Tunas Harapan	2.000.000,00	0,00
106	Pengembalian DPUTR atas temuan BPK kekurangan volume Tahun 2018	0,00	69.303.640,59
107	Pengembalian belanja sumber dana DAK 2018 SDN Yosowilangun Lor 01	0,00	100.000,00
108	Pengembalian belanja atas temuan pemeriksaan BPK DAK 2018 SD Ranuyoso 04	0,00	5.725.000,00
109	Pengembalian belanja atas temuan BPK DAK Tahun 2008 SDN Alun alun 02	0,00	725.000,00
110	Pengembalian belanja atas temuan BPK DAK Tahun 2008 SDN Jenggrong 03	0,00	6.225.000,00
111	Pengembalian belanja Dinas Perdagangan Tahun 2018	0,00	2.500.000,00
112	Pengembalian belanja atas temuan pemeriksaan BPK DAK 2008 SDN Kalisemut 03	0,00	1.000.000,00

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
113	Pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran rehab pasar yosowilangun CV. Berkah Jaya	0,00	46.484.195,29
114	Pengembalian belanja atas kekurangan volume Tahun 2018 CV. Songo	0,00	978.500,00
115	Pengembalian belanja atas kekurangan volume Tahun 2018 denda keterlambatan CV. SOFIE	0,00	921.500,00
116	Pengembalian sisa dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil bupati dan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2018	0,00	5.080,00
117	Pengembalian gaji pokok bulan desember 2018 Dinas Pertanian	0,00	297.000,00
118	Pengembalian belanja temuan BPK kekurangan volume Tahun 2018 Pek. peningkatan jalan madurejo - sememu	0,00	10.000.000,00
119	Pengembalian kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018	0,00	100.000.000,00
120	Pengembalian belanja temuan BPK kekurangan volume Pek. peningkatan jalan kayuenak - argosari Tahun 2018	0,00	10.000.000,00
121	pembayaran kelebihan pembayaran rehabilitasi pasar pronojiwo CV. Kria mandiri	0,00	62.508.693,62
122	Pengembalian kekurangan gaji PNS Tahun 2018 DPMD	0,00	721.134,00
123	Pengembalian belanja temuan bPK kekurangan volume Pek. pembangunan jembatan jambearum Tahun 2018	0,00	10.000.000,00
124	pengembalian kekurangan gaji Kecamatan Gucialit Tahun 2018	0,00	15.235.600,00
125	pembayaran kelebihan belanja mamin kegiatan konservasi SDA CV. Arrachman	0,00	3.000.000,00
126	temuan BPK kekurangan volume Pek. peningkatan jalan kayuenak - argosari Tahun 2018	0,00	30.000.000,00
127	Pengembalian belanja temuan BPK kekurangan volume pekerjaan peningkatan bangunan pelimpah DAM tirtorejo JL. Blukon TA 2018	0,00	1.963.079,64
128	pengembalian sisa bantuan sosial kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman padat dan kumuh perkotaan Tahun 2018	0,00	4.707.014,12
129	Pengembalian belanja pegawai tunjangan fungsional gaji PNS	0,00	325.000,00
130	Pengembalian belanja temuan BPK kekurangan volume Tahun 2018	0,00	10.000.000,00
131	Pengembalian belanja temuan BPK kekurangan volume jalan pasrujambe - senduro Tahun 2018	0,00	10.000.000,00
132	kekurangan pengembalian kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan DISBUDPAR Tahun 2018	0,00	83.816.047,76
133	Pengembalian belanja temuan BPK kekurangan volume jalan kayuenak - argosari Tahun 2018	0,00	4.199.291,19
134	Pengembalian kelebihan pembayaran Tahun 2017 Kecamatan Tekung	0,00	450.000,00

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
135	Pengembalian belanja pembangunan pagar SMPN 2 Pronojiwo	0,00	986.054,84
136	Pengembalian belanja temuan BPK kekurangan volume TA 2018 CV. Cipta Graha Engineering	0,00	12.261.584,65
137	Pengembalian belanja atas kelebihan gaji bulan januari 2017 - 2018 bendahara gaji Disperindag	0,00	6.445.400,00
138	Pengembalian belanja dana pekerjaan APJ 2018 Dishub	0,00	4.200.000,00
139	Pengembalian belanja TPG Tribulan I dan II Tahun 2018 Dinas Pendidikan	0,00	22.360.440,00
140	pembayaran kelebihan pembayaran rehabilitasi puskesmas sukodono Tahun 2018 CV. Remaja Karya di Lumajang	0,00	43.302.738,85
141	Pengembalian atas kelebihan pembayaran rehabilitasi puskesmas tekung Tahun 2018 CV. Romero Sejahtera di Lumajang	0,00	50.201.261,18
142	Pengembalian belanja tunjangan fungsional gaji PNS bulan januari 2012 - oktober 2014 dr. asih retno	0,00	325.000,00
143	Pengembalian kelebihan pembayaran rehabilitasi puskesmas padang Tahun 2018 CV. Rajendra Pratama Jaya di Jember	0,00	31.279.865,08
144	Pengeblaina atas kelebihan gaji bulan januari 2017 s/d januari 2018 a/n Sanari Dindag	0,00	5.523.200,00
145	Pengembalian atas kelebihan pembayaran rehabilitasi puskesmas gucialit Tahun 2018 CV. Cipta Graha Engineering di Lumajang	0,00	6.295.855,44
146	Pengembalian belanja PNMN BPK KKRG VL JAMBEARUM	0,00	8.231.200,00
147	Pengembalian tunjangan fungsional gaji PNS bulan januari 2012 - oktober 2014 an. dr. Asih Retno	0,00	325.000,00
148	Pengembalian tunjangan fungsional gaji PNS Januari 2012 - Oktober 2014	0,00	325.000,00
149	Pengembalian belanja temuan BPK kekurangan volume pek. peningkatan jalan madurejo - sememu Tahun 2018	0,00	9.000.000,00
150	Pengembalian pemberian tunjangan anak Dinas Koprasi & UKM bulan Mei s/d Nop 2018	0,00	620.102,00
151	Pengembalian uang makan PNS atas dasar p2hp inspektorat Tahun 2017 Dinas Koprasi & UKM	0,00	275.000,00
152	Pengembalian uang sewa ruang pertemuan dlm rangka keg. bimbingan teknis perkoprasian 2018 Dinas Koprasi & UKM	0,00	1.000.000,00
153	kelebihan pembayaran pelaksanaan pembangunan gedung kantor kecamatan 2018 rowokangkung	0,00	11.004.666,37
154	Pengembalian temuan BPK terkait BBM TA 2018 Satpol PP	0,00	17.396.200,00
155	Pengembalian kelebihan pembayaran biaya BBM kendaraan dinas oprasional TA 2018 BPBD	0,00	26.400.000,00
156	Pengembalian kelebihan pembayaran atas belanja BBM Dinas Pertanian TA 2018	0,00	44.592.550,00
157	Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan	0,00	50.245.500,00

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	tribun stadion sisi timur Dispora		
158	Pengembalian atas kekurangan volume atas item pekerjaan pembangunan jaringan air bersih pedesaan desa pasrujambe	0,00	20.245.985,64
159	temuan pemeriksaan BPK realisasi belanja BBM Bagian Umum	0,00	150.000.000,00
160	Pengembalian kurang volume depo arsip 2018 CV Guna Bakti	0,00	27.445.309,00
161	Pengembalian belanja temuan BPK kekurangan volume pek. pengingkatan jalan tempeh - pandanwangi Tahun 2018	0,00	19.000.000,00
162	Pengembalian belanja temuan BPK kekurangan volume pek. peningkatan jln pasrujambe - senduro Tahun 2018	0,00	18.000.000,00
163	kelebihan pembayaran pek. peningkatan trotoar dan drainase Tahun 2018	0,00	13.000.000,00
164	Pengembalian bendahara PP bencana alam Tahun 2015	0,00	40.000,00
165	Pengembalian kurang volume Depo arsip 2018	0,00	500,00
166	Pengembalian belanja temuan BPK kelebihan pembayaran pekerjaan Bag. Umum CV. Yang Abadi	0,00	1.743.846,00
167	Pengembalian belanja temuan BPK atas kelebihan pembayaran pekerjaan CV. Guna Bakti Bag. Umum Setda	0,00	35.980.966,31
168	Pengembalian denda BPK Depo arsip CV. Guna Bakti	0,00	5.000.000,00
169	Pengembalian kelebihan pembayaran pembangunan AKNL Dinas PUTR	0,00	18.118.753,13
170	Pengembalian belanja atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan jaringan air bersih desa gedangmas kec. randuagung TA 2018	0,00	23.736.899,55
171	Pengembalian belanja temuan pemeriksaan BPK realisasi belanja BBM bag. umum Setda angsuran II	0,00	204.448.333,00
172	Pengembalian uang lembur PNS TA 2017 kecamatan Lumajang	0,00	468.000,00
173	Pengembalian belanja atas BBM kecamatan Lumajang	0,00	855.000,00
174	Pengembalian hasil inspektorat TA 2018 bag. organisasi setda	0,00	3.467.500,00
175	Pengembalian kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan (kelebihan perhitungan volume) Disbudpar	0,00	803.772,00
176	Pengembalian kelebihan pembayaran pek pemeliharaan sarana prasarana B29 Argosari tahap 2 Disbudpar	0,00	2.561.138,09
177	Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan sarpras CV. Menara	0,00	10.000.000,00
178	pengembalian dana bantuan milik kelompok tani tunas inti desa kertosari kec. pasrujambe bansos pada masyarakat TA 2011	0,00	5.000.000,00
179	Pengembalian temuan inspektorat Tahun 2018 kecamatan pasirian	0,00	2.226.100,00
180	Pengembalian kelebihan pembayaran telepon Tahun 2018 bagian adm. pembangunan	0,00	4.432.468,00

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
181	Pengembalian tunjangan bulan juli 2017 s/d april 2018 Kecamatan Yosowilangun	0,00	3.026.760,00
182	Pengembalian atas kekurangan volume 2018 CV. MAHARANA	0,00	1.861.838,38
183	Pengembalian atas kelebihan tunjangan anak 2015 - 2017	0,00	3.736.272,00
184	Pengembalian atas kelebihan tunjangan anak kecamatan padang 2017	0,00	681.192,00
185	Pengembalian atas tambahan upah TA 2018 Disbudpar	0,00	40.148.000,00
186	Pengembalian atas temuan BPK Tahun 2018 DPUTR	0,00	2.049.414,42
187	Pengembalian belanja atas temuan pemeriksaan BPK DAK 2008 SDN Kalisemut 03	0,00	1.000.000,00
188	Pengembalian belanja BBM Tahun 2018 Dinkes	0,00	8.381.300,00
189	Pengembalian belanja atas kekurangan volume pekerjaan peningkatan jl tempeh - pandanwangi Tahun 2018 DPU TR	0,00	25.000.000,00
190	Pengembalian belanja atas kekurangan volume pekerjaan peningkatan jl pasrujambe - senduro Tahun 2018 DPU TR	0,00	25.000.000,00
191	Pengembalian atas kelebihan belanja TA 2018 Kec. Gucialit	0,00	11.992.600,00
192	Pengembalian atas Temuan BPK	0,00	29.048.248,38
193	Pengembalian Kekurangan Gaji Tahun Anggaran 2018	0,00	366.702,50
194	Pengembalian Gaji Tahun 2018	0,00	19.764.900,00
195	Pengembalian belanja Tahun lalu	0,00	490.000,00
196	Pengembalian belanja atas temuan BPK Tahun lalu	0,00	1.000.000,00
197	Pengembalian belanja Tambahan Upah Tahun lalu	0,00	20.000.000,00
198	Pengembalian bantuan keuangan khusus Tahun 2018 desa Jatiroto	0,00	5.000.000,00
199	Pengembalian belanja temuan BPK kekurangan pekerjaan rehab TA 2015	0,00	403.898,28
200	Pengembalian belanja Temuan BPK kekurangan pekerjaan rehab TA 2015	0,00	785,65
201	Pengembalian kelebihan uang refresentasi pimpinan dan anggota DPRD Tahun 2018	0,00	14.750.000,00
202	Pengembalian belanja atas temuan BPK DAK 2008	0,00	500.000,00
203	Pengembalian belanja bantuan Partai Politik Tahun 2010 Partai Gerindra	0,00	2.888.121,09
204	Pengembalian belanja bantuan Partai Politik Tahun 2010 PKS	0,00	1.652.497,02
205	Pengembalian belanja bantuan Partai Politik Tahun 2010 Partai Golkar	0,00	3.847.245,03
206	Pengembalian belanja bantuan Partai Politik Tahun 2010 Partai Demokrat	0,00	4.725.523,62
207	Pengembalian belanja bantuan Partai Politik Tahun 2010 PAN	0,00	2.277.000,00

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
208	Pengembalian belanja setor tambahan upah TA 2018 Disparbud	0,00	50.000.000,00
209	Pengembalian belanja temuan BPK TA 2010 PPP	0,00	1.657.374,84
210	Pengembalian belanja pegawai (Taspen) Tahun lalu	0,00	35.711,00
211	Pengembalian belanja pegawai (Taspen) Tahun lalu	0,00	107.134,00
212	Penerimaak kembali belanja Tahun lalu	0,00	0,00
213	Penerimaan kembali belanja pegawai	0,00	0,00
	Jumlah	**2.332.227.934,41**	**1.691.754.483,55**

j. Pendapatan dari Badan Layananan Umum Daerah (BLUD)

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Rincian Pendapatan BLUD RSUD dr. Haryoto Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Jenis Pendapatan BLUD	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Jasa Layanan	104.275.000.000,00	113.840.977.883,00	109,17	106.670.094.479,00	7.170.883.404,00	6,72
2	Hasil Kerjasama	25.000.000,00	190.950.000,00	763,80	308.361.495,00	(117.411.495,00)	(38,08)
3	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	700.000.000,00	19.624.416.601,96	2.803,49	938.000.559,20	18.686.416.042,76	1.992,15
	Jumlah	**105.000.000.000,00**	**133.656.344.484,96**	**127,29**	**107.916.456.533,20**	**25.739.887.951,76**	**23,85**

k. Penerimaan Pendapatan Sewa.

Pendapatan Sewa Tahun 2020 sebesar Rp1.693.696.000,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp1.624.158.080,00 masing-masing terdiri dari pendapatan sewa tanah dan pendapatan sewa bangunan, terinci sebagai berikut:

Tabel 54. Rincian Pendapatan Sewa Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	2020	2019
I	**PENDAPATAN SEWA TANAH**		
1	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**		
	Sewa Tanah Eks. Bengkok	182.750.000,00	0,00
	Sewa Tanah Eks. Bengkok (Kel. Jogoyudan, Desa Bago, Kepuharjo, Jogotrunan, Citrodiwangsan, Desa labruk Lor dan Ditrotrunan)	734.790.000,00	0,00
	Jumlah Pend. Sewa Tanah Dinas PUTR (1)	**917.540.000,00**	**0,00**

No	Uraian	2020	2019
2	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**		
	Pendapatan sewa tanah Prayuana Desa Kebonan Kec. Klakah seluas 4 Ha masa sewa 1 September 2019 - 31 Agustus 2020 (a.n H. SAMSUL HADI Desa Sumberejo Kec. Sukodono)	0,00	46.200.000,00
	Pendapatan sewa tanah Eks Prayuana Desa Kebonan Kec. Klakah seluas 2,969 Ha masa sewa 1 September 2019 - 31 Agustus 2020 (a.n. Drs. SUIGSAN Desa Sukosari Kec. Kunir)	0,00	34.325.000,00
	Pendapatan sewa tanah Eks Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang lokasi di Desa Wonosari Kecamatan Tekung seluas 4,895 Ha masa sewa 1 September 2019 - 31 Agustus 2020 (a.n. Drs. H. SUIGSAN Desa Sukosari Kec. Kunir.)	0,00	61.450.000,00
	Pendapatan Sewa Eks. Tanah Bengkok Kelurahan Periode sewa 2020-2021	0,00	803.061.500,00
	Jumlah Pend. Sewa Tanah Bag. Adm. Pemerintahan (2)	**0,00**	**945.036.500,00**
3	**DINAS PERTANIAN**		
	Pendapatan Sewa Tanah Pertanian Untuk Tanaman Tebu Periode Tahun 2019-2020 Seluas 2.550 Ha di Desa Duren Kecamatan Klakah An. Suigsan)	0,00	29.500.000,00
	Pendapatan Sewa Tanah Pertanian Kebun Dinas Pertanian Desa Wonorejo Kec. Kedungjajang A.n. Nasrotul Muhajaroh.	4.600.000,00	0,00
	Pendapatan Sewa Tanah Pertanian Untuk Tanaman Tebu Periode Tahun 2019-2020 Seluas 0.549 Ha di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang An. Hari Sijatmiko)	0,00	5.500.000,00
	Pendapatan Sewa Tanah Pertanian Untuk Tanaman Tebu Periode , Seluas 6.500 Ha di Desa Kebonan Kecamatan Klakah (An. Abdul Mukhid))	78.750.000,00	0,00
	Pendapatan Sewa Tanah Pertanian Untuk Tanaman Tebu Periode Tahun 2018-2019 dan 2019-2020, Seluas 6.500 Ha di Desa Kebonan Kecamatan Klakah An. Budi santoso)	0,00	75.000.000,00
	Pendapatan sewa tanah kebun dinas Desa Krai Kec. Yosowilangun a.n. Prasetyo Adi Cahyono	45.000.000,00	34.500.000,00
	Pendapatan sewa tanah kebun dinas Desa Krai Kec. Yosowilangun a.n. Bahtiar Rifai	30.000.000,00	0,00
	Pendapatan sewa tanah kebun dinas Desa Sumber Urip Kecamatan Peonojiwo An. Wilujeng	3.000.000,00	3.000.000,00
	Pendapatan sewa tanah kebun dinas Desa Sumber Urip Kecamatan Peonojiwo An. SUGITO	25.000.000,00	25.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Sewa Tanah Dinas Pertanian (3)	**186.350.000,00**	**172.500.000,00**
4	**DINAS PERDAGANGAN**		
	Pendapatan Sewa Tanah Pasar Daerah	245.610.000,00	268.856.980,00
	Jumlah Pendapatan Sewa Tanah Dinas Perdagangan (4)	**245.610.000,00**	**268.856.980,00**

No	Uraian	2020	2019
5	**DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN**		
	Pendapatan Sewa Tanah Ex. Kebun Dinas Selokamabang	6.960.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Sewa Tanah Disparbud (5)	**6.960.000,00**	**0,00**
6	**BPKD**		
	Sewa lahan ATM BNI RSUD Pasirian	15.000.000,00	0,00
	Pembayaran sewa lahan parkir RSUD Pasirian	1.200.000,00	
	Sewa lahan ATM BNI di Puskes. Tempeh	0,00	18.000.000,00
	Sewa sebagian bangunan kantor kecamatan Ranuyoso oleh bank jatim sewa selama 2 Tahun 1 januari 2020 - 31 desember 2021	15.000.000,00	0,00
	Sewa sebagian bangunan kantor kecamatan padang selama 2 Tahun 22 februari 2020 - 21 februari 2022	15.000.000,00	0,00
	Sewa lahan ATM BNI di Puskes. Ranuyoso	0,00	21.000.000,00
	Sewa lahan ATM BNI di Puskes. Yosowilangun	0,00	14.400.000,00
	Sewa lahan atm bank jatim Puskesmas Kunir	2.000.000,00	2.000.000,00
	Sewa pemakaian lahan ATM Bank Jatim Pusk. Randuagung	4.000.000,00	4.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Sewa Tanah BPKD (6)	**52.200.000,00**	**59.400.000,00**
	Jumlah Pendapatan Sewa Tanah (1+2+3+4+5+6)	**1.408.660.000,00**	**1.445.793.480,00**
II	**PENDAPATAN SEWA BANGUNAN**		
1	**BPKD**		
	Sewa gedung kantin RSUD Pasirian	1.200.000,00	0,00
	Sewa gedung sudjono	62.000.000,00	0,00
	Sewa bangunan eks kecamatan pasirian oleh bank jatim cabang Lumajang sewa selama 2 Tahun 1 januari 2020 - 31 desember 2021	90.000.000,00	0,00
	Pendapatan sewa ruangan untuk kantor kas Bank Jatim	15.000.000,00	15.000.000,00
	Pendapatan Sewa PAUD Balita Center	0,00	3.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Sewa Bangunan – BPKD (1)	**168.200.000,00**	**18.000.000,00**
2	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
	Pendapatan Sewa Bangunan Rusunawa Tahun 2020 dan 2019	116.836.000,00	160.364.600,00
	Jumlah Pend. Sewa Bangunan – DPKP (2)	**116.836.000,00**	**160.364.600,00**
	Jumlah Pendapatan Sewa Bangunan (1+2)	**285.036.000,00**	**178.364.600,00**
	Jumlah Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan	**1.693.696.000,00**	**1.624.158.080,00**

l. Penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN.

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2020 sebesar Rp39.315.464.575,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp40.111.039.361,00 merupakan pendapatan Kapitasi JKN pada 25 (dua puluh lima) Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 55. Pendapatan Kapitasi JKN Pada FKTP Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Nama Puskesmas	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			Realisasi 2020	%	Realisasi 2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Puskesmas Tempursari	1.013.430.000,00	1.011.855.300,00	99,84	939.885.350,00	71.969.950,00	7,66
2	Puskesmas Pronojiwo	1.382.911.200,00	1.082.105.200,00	78,25	1.189.575.825,00	(107.470.625,00)	(9,03)
3	Puskesmas Candipuro	1.896.901.200,00	1.318.105.700,00	69,49	1.618.510.150,00	(300.404.450,00)	(18,56)
4	Puskesmas Penanggal	951.307.200,00	816.868.200,00	85,87	843.984.250,00	(27.116.050,00)	(3,21)
5	Puskesmas Pasirian	2.373.957.000,00	2.023.613.400,00	85,24	2.173.020.550,00	(149.407.150,00)	(6,88)
6	Puskesmas Bades	1.295.503.200,00	1.041.208.800,00	80,37	1.025.700.325,00	15.508.475,00	1,51
7	Puskesmas Tempeh	2.773.346.400,00	2.340.360.900,00	84,39	2.496.550.600,00	(156.189.700,00)	(6,26)
8	Puskesmas Gesang	1.139.954.400,00	850.555.400,00	74,61	931.985.586,00	(81.430.186,00)	(8,74)
9	Puskesmas Rogotrunan	2.622.798.000,00	2.246.509.200,00	85,65	2.476.440.400,00	(229.931.200,00)	(9,28)
10	Puskesmas Labruk Kidul	1.161.363.600,00	1.103.569.850,00	95,02	1.099.561.900,00	4.007.950,00	0,36
11	Puskesmas Tekung	1.103.907.600,00	1.030.443.600,00	93,35	957.172.000,00	73.271.600,00	7,66
12	Puskesmas Kunir	2.483.877.600,00	2.206.197.900,00	88,82	2.338.667.800,00	(132.469.900,00)	(5,66)
13	Puskesmas Yosowilangun	2.320.810.200,00	2.137.625.400,00	92,11	2.037.898.075,00	99.727.325,00	4,89
14	Puskesmas Sumbersari	1.674.637.200,00	1.432.275.600,00	85,53	1.549.720.000,00	(117.444.400,00)	(7,58)
15	Puskesmas Jatiroto	2.277.000.000,00	1.907.828.650,00	83,79	1.984.855.750,00	(77.027.100,00)	(3,88)
16	Puskesmas Randuagung	1.911.301.200,00	1.557.052.500,00	81,47	1.730.317.900,00	(173.265.400,00)	(10,01)
17	Puskesmas Sukodono	1.901.763.000,00	1.783.509.300,00	93,78	1.733.906.825,00	49.602.475,00	2,86
18	Puskesmas Padang	1.720.054.800,00	1.584.062.400,00	92,09	1.456.964.675,00	127.097.725,00	8,72
19	Puskesmas Pasrujambe	887.580.000,00	901.364.425,00	101,55	820.344.500,00	81.019.925,00	9,88
20	Puskesmas Senduro	1.849.604.400,00	1.623.900.300,00	87,80	1.406.551.350,00	217.348.950,00	15,45
21	Puskesmas Gucialit	1.297.301.400,00	1.223.182.800,00	94,29	1.171.492.325,00	51.690.475,00	4,41
22	Puskesmas Kedungjajang	2.237.227.200,00	1.898.557.950,00	84,86	2.020.456.650,00	(121.898.700,00)	(6,03)
23	Puskesmas Klakah	2.893.388.400,00	2.603.599.500,00	89,98	2.615.222.200,00	(11.622.700,00)	(0,44)
24	Puskesmas Ranuyoso	2.850.624.000,00	2.486.514.300,00	87,23	2.523.959.200,00	(37.444.900,00)	(1,48)
25	Puskesmas Tunjung	1.145.986.200,00	1.104.598.000,00	96,39	968.295.175,00	136.302.825,00	14,08
	Jumlah	**45.166.535.400,00**	**39.315.464.575,00**	87,05	**40.111.039.361,00**	**(795.574.786,00)**	**(1,98)**

m. Penerimaan Pendapatan Denda Sewa.

Pendapatan Denda Sewa merupakan denda atas keterlambatan pembayaran biaya sewa gedung Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terinci sebagai berikut:

Tabel 56. Pendapatan Denda Sewa Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikain (Penurunan)	%
			Realisasi 2020	%	Realisasi 2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Denda Sewa Bangunan Gedung Rusunawa	593.200,00	1.075.800,00	181,36	3.179.200,00	(2.103.400,00)	(66,16)
	Jumlah	**593.200,00**	**1.075.800,00**	**181,36**	**3.179.200,00**	**(2.103.400,00)**	**(66,16)**

n. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya.

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2020 merupakan pendapatan dari penerimaan kembali piutang PBB-P2 periode yang lalu yang telah di hapus. Sedangkan Tahun 2019 meliputi pendapatan yang diperoleh dari penerimaan dari PT. Mutiara Halim, penerimaan kembali piutang PBB-P2 periode yang lalu yang telah di hapus dan penerimaan lainnya berasal dari kegiatan pameran. Rincian penerimaan Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 57. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Jenis Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikain (Penurunan)	%
			Realisasi 2020	%	Realisasi 2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Penerimaan kembali Piutang PBB-P2 yang telah di hapus	13.835.433,00	10.703.027,00	77,36	14.844.111,00	(4.141.084,00)	(27,90)
2	Penerimaan dari pameran	0,00	0,00	0,00	26.405.000,00	(26.405.000,00)	(100,00)
3	Penerimaan dari PT. MH	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	(1.100.000.000,00)	(100,00)
4	Setoran Kwarcab Pramuka	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**13.835.433,00**	**12.703.027,00**	**91,82**	**1.143.249.111,00**	**(1.130.546.084,00)**	**(98,89)**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2. Pendapatan Transfer	**1.723.648.930.650,00**	**1.725.518.141.013,00**	**1.774.505.135.577,00**

Pendapatan Transfer Meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 58. Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Transfer	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.292.726.757.634,00	1.271.212.220.474,00	98,34	1.409.112.910.571,00	(137.900.690.097,00)	(9,79)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	227.364.377.000,00	227.364.377.000,00	100,00	188.469.078.400,00	38.895.298.600,00	20,64
3	Transfer Pemerintah Propinsi	203.557.796.016,00	226.941.543.539,00	111,49	176.923.146.606,00	50.018.396.933,00	28,27
	Jumlah	**1.723.648.930.650,00**	**1.725.518.141.013,00**	**100,11**	**1.774.505.135.577,00**	**(48.986.994.564,00)**	**(2,76)**

Total Realisasi Pendapatan Transfer telah mencapai target. Di banding periode sebelumnya realisasi pendapatan transfer turun sebesar (Rp48.986.994.564,00) atau (2,76%).

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
2.1 Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan	**1.292.726.757.634,00**	**1.271.212.220.474,00**	**1.409.112.910.571,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan meliputi penerimaan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Total realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan tidak mencapai target, realisasi mencapai 98,34% atau Rp1.271.212.220.474,00 terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 59. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Dana Perimbangan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Dana Bagi Hasil Pajak	31.886.741.114,00	23.800.062.748,00	74,64	17.345.158.115,00	6.454.904.633,00	37,21
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /SDA	64.348.107.401,00	66.217.220.913,00	102,90	77.925.877.850,00	(11.708.656.937,00)	(15,03)

No.	Jenis Dana Perimbangan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
3	Dana Alokasi Umum	920.012.364.000,00	908.166.706.000,00	98,71	1.003.092.909.000,00	(94.926.203.000,00)	(9,46)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)						
	- Fisik Reguler	45.226.083.500,00	40.844.510.293,00	90,31	68.465.715.776,00	(27.621.205.483,00)	(40,34)
	- Fisik Penugasan	18.651.147.525,00	15.677.070.583,00	84,05	29.862.398.464,00	(14.185.327.881,00)	(47,50)
	- DAK Non Fisik	212.602.314.094,00	216.506.649.937,00	101,84	212.420.851.366,00	4.085.798.571,00	1,92
	Jumlah DAK	**276.479.545.119,00**	**273.028.230.813,00**	**98,75**	**310.748.965.606,00**	**(37.720.734.793,00)**	**(12,14)**
	Jumlah	**1.292.726.757.634,00**	**1.271.212.220.474,00**	**98,34**	**1.409.112.910.571,00**	**(137.900.690.097,00)**	**(9,79)**

Rincian lebih lanjut Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 60. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Naik (Turun)	%
1	Bagi hasil pajak bumi dan bangunan	13.248.227.230,00	8.100.031.793,00	61,14	7.341.067.700,00	758.964.093,00	10,34
2	Bagi hasil pajak penghasilan pasal 21	16.319.292.534,00	13.171.584.080,00	80,71	9.193.516.215,00	3.978.068.865,00	43,27
3	Bagi hasil pajak penghasilan pasal 25, 29	2.319.221.350,00	2.528.446.875,00	109,02	810.574.200,00	1.717.872.675,00	211,93
	Jumlah	**31.886.741.114,00**	**23.800.062.748,00**	74,64	**17.345.158.115,00**	**6.454.905.633,00**	**37,21**

Tabel 61. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Naik (Turun)	%
1	Bagi hasil sumber daya alam minyak bumi	33.548.649.422,00	37.803.687.552,00	112,68	51.107.481.097,00	(13.303.793.545,00)	(26,03)
2	Bagi hasil sumber daya alam gas bumi	4.377.279.016,00	5.382.490.341,00	122,96	5.978.092.816,00	(595.602.475,00)	(9,96)

No	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Naik (Turun)	%
3	Bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara	794.434.345,00	296.497.350,00	37,32	1.219.058.433,00	(922.561.083,00)	(75,68)
4	Bagi hasil sumber daya alam kehutanan	475.326.149,00	237.752.150,00	50,02	230.847.000,00	6.905.150,00	2,99
5	Bagi hasil sumber daya alam perikanan	1.592.666.192,00	788.276.289,00	49,49	590.155.800,00	198.120.489,00	33,57
6	Bagi hasil sumber daya alam panas bumi	48.308.524,00	31.628.750,00	65,47	34.775.673,00	(3.146.923,00)	(9,05)
7	Bagi hasil cukai hasil tembakau	23.511.443.753,00	21.676.888.481,00	92,20	18.765.467.031,00	2.911.421.450,00	15,51
	Jumlah	**64.348.107.401,00**	**66.217.220.913,00**	**102,90**	**77.925.877.850,00**	**(11.708.656.937,00)**	**(15,03)**

Tabel 62. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Naik (Turun)	%
1	**Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler**	**45.226.083.500,00**	**40.844.510.293,00**	90,31	**68.465.715.776,00**	**(27.621.205.483,00)**	**(40,34)**
	DAK fisik reguler bidang pendidikan	10.666.478.000,00	10.566.105.442,00	99,06	9.894.979.608,00	671.125.834,00	6,78
	DAK fisik reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana	25.839.036.500,00	21.557.835.851,00	83,43	21.808.426.944,00	(250.591.093,00)	(1,15)
	DAK fisik reguler bidang perumahan dan permukiman	4.134.612.000,00	4.134.612.000,00	100,00	3.192.785.000,00	941.827.000,00	29,50
	DAK fisik reguler bidang pertanian	0,00	0,00	0,00	3.834.246.000,00	(3.834.246.000,00)	(100,00)
	DAK fisik reguler bidang kelautan dan perikanan	0,00	0,00	0,00	1.188.885.050,00	(1.188.885.050,00)	(100,00)
	DAK fisik reguler bidang pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK fisik reguler bidang air minum	0,00	0,00	0,00	1.524.193.574,00	(1.524.193.574,00)	(100,00)

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Naik (Turun)	%
	DAK fisik reguler bidang sanitasi	4.585.957.000,00	3.439.467.750,00	75,00	4.397.412.000,00	(957.944.250,00)	(21,78)
	DAK fisik reguler bidang pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK fisik reguler bidang jalan	0,00	1.146.489.250,00	0,00	22.624.787.600,00	(21.478.298.350,00)	(94,93)
2	**Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan**	**18.651.147.525,00**	**15.677.070.583,00**	84,05	**29.862.398.464,00**	**(15.569.732.881,00)**	**(47,50)**
	DAK fisik penugasan bidang kesehatan & KB	6.078.333.525,00	5.558.077.975,00	91,44	2.509.972.500,00	3.048.105.475,00	121,44
	DAK fisik penugasan bidang air minum	4.894.415.000,00	3.682.765.408,00	75,24	2.274.558.018,00	1.408.207.390,00	61,91
	DAK fisik penugasan bidang sanitasi	1.719.799.000,00	1.289.849.250,00	75,00	996.800.000,00	293.049.250,00	29,40
	DAK fisik penugasan bidang jalan	0,00	804.124.750,00	0,00	12.142.577.260,00	(11.338.452.510,00)	(93,38)
	DAK fisik penugasan bidang pasar	0,00	0,00	0,00	2.857.705.000,00	(2.857.705.000,00)	(100,00)
	DAK fisik penugasan bidang irigasi	2.473.270.000,00	1.835.643.000,00	74,22	5.592.700.386,00	(3.757.057.386,00)	(67,18)
	DAK fisik penugasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	257.400.000,00	0,00	0,00	257.504.400,00	(257.504.400,00)	(100,00)
	DAK fisik penugasan bidang pariwisata	1.501.667.000,00	1.122.205.200,00	74,73	3.230.580.900,00	(2.108.375.700,00)	(65,26)
	DAK fisik penugasan bidang pertanian	1.148.500.000,00	1.020.000.000,00	88,81	0,00	0,00	0,00
	DAK fisik penugasan bidang perikanan	577.763.000,00	364.405.000,00	63,07	0,00	0,00	0,00
3	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**212.602.314.094,00**	**216.506.649.937,00**	101,84	**212.420.851.366,00**	**4.085.798.571,00**	**1,92**
	DAK non fisik bantuan operasional penyelenggaraan PAUD	20.616.000.000,00	20.616.000.000,00	100,00	21.243.000.000,00	(627.000.000,00)	(2,95)
	DAK non fisik tunjangan profesi guru	0,00	0,00	0,00	163.049.772.625,00	(163.049.772.625,00)	(100,00)
	DAK non fisik tambahan penghasilan guru	152.459.330.000,00	152.459.330.000,00	100,00	0,00	152.459.330.000,00	0,00
	DAK non fisik tunjangan khusus guru	0,00	0,00	0,00	29.848.000,00	(29.848.000,00)	(100,00)

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Naik (Turun)	%
	DAK non fisik bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional KB	32.784.032.159,00	36.936.668.002,00	112,67	18.547.583.563,00	18.389.084.439,00	99,15
	DAK non fisik pelayanan administrasi kependudukan	3.204.854.440,00	3.204.854.440,00	100,00	2.278.509.178,00	926.345.262,00	40,66
	DAK non fisik peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	446.285.000,00	446.285.000,00	100,00	470.000.000,00	(23.715.000,00)	(5,05)
	DAK non fisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	2.205.900.000,00	1.957.600.000,00	88,74	5.439.100.000,00	(3.481.500.000,00)	(64,01)
	DAK non fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya	595.337.100,00	595.337.100,00	100,00	450.000.000,00	145.337.100,00	32,30
	DAK non fisik pelayanan kepariwisataan	290.575.395,00	290.575.395,00	100,00	913.038.000,00	(622.462.605,00)	(68,17)
	Jumlah DAK	**276.479.545.119,00**	**273.028.230.813,00**	**98,75**	**310.748.965.606,00**	**(39.105.139.793,00)**	**(12,58)**

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**227.364.377.000,00**	**227.364.377.000,00**	**188.469.078.400,00**

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat lainnya meliputi Dana Desa (DD) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp227.364.377.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran sebesar Rp227.364.377.000,00. Dibanding Tahun 2019, Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya naik sebesar Rp38.895.298.600,00 atau 20,64%. Kenaikan tersebut merupakan selisih kenaikan Dana Desa sebesar Rp4.658.653.600,00 dan kenaikan Dana Insentif Daerah sebesar Rp34.236.645.000,00.

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Transfer	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Naik Turun)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Dana Desa (DD)	193.127.732.000,00	193.127.732.000,00	100,00	188.469.078.400,00	4.658.653.600,00	2,47
2	Dana Insentif Daerah DID)	34.236.645.000,00	34.236.645.000,00	100,00	0,00	34.236.645.000,00	0,00
	Jumlah	**227.364.377.000,00**	**227.364.377.000,00**	**100,00**	**188.469.078.400,00**	**38.895.298.600,00**	**20,64**

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
2.3 Transfer Pem. Propinsi	**203.557.796.016,00**	**226.941.543.539,00**	**176.923.146.606,00**

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, meliputi bagi hasil pajak propinsi sebesar Rp123.312.451.789,00 dan Pendapatan bagi hasil lainnya sebesar Rp103.629.091.750,00

Total Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Propinsi Tahun 2020 mencapai 111,49% dari anggaran. Dibanding Tahun 2019, Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Propinsi Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp50.018.396.933,00 atau 28,27%. Kenaikan tersebut merupakan akumulasi dari penurunan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar (Rp19.826.335.817,00) dan kenaikan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp69.844.732.750,00, terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 60. Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurnan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
A	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi**	**99.928.704.266,00**	**123.312.451.789,00**	**123,40**	**143.138.787.606,00**	**(19.826.335.817,00)**	**(13,85)**
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor / PKB	21.303.369.474,00	28.438.331.027,00	133,49	42.967.203.973,00	(14.528.872.946,00)	(33,81)
	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBNKB	8.891.594.526,00	13.557.828.875,00	152,48	18.990.077.769,00	(5.432.248.894,00)	(28,61)
	Hasil Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor / PBBKB	14.861.785.272,00	29.544.990.186,00	198,80	39.194.921.857,00	(9.649.931.671,00)	(24,62)
	Bagi Hasil Pengambilan Pemanfaatan AP	142.447.368,00	359.737.434,00	252,54	526.332.870,00	(166.595.436,00)	(31,65)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurnan)	%
			2020	%	2019		
	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	54.729.507.626,00	51.411.564.267,00	93,94	41.460.251.137,00	9.951.313.130,00	24,00
B	**Pendapatan Bagi Hasil Lainnya**	**103.629.091.750,00**	**103.629.091.750,00**	**100,00**	**33.784.359.000,00**	**69.844.732.750,00**	**206,74**
1	**Bantuan Keu. Bidang Pendidikan**	**5.091.500.000,00**	**5.091.500.000,00**	**100,00**	**5.127.500.000,00**	**(36.000.000,00)**	**(0,70)**
	Madin dan Guru Swasta BPPDGS)	0,00	4.417.500.000,00	0,00	4.417.500.000,00	0,00	0,00
	BOP Madin	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium kinerja Kepala Guru TK/PAUD Non PNS	0,00	336.000.000,00	0,00	336.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium kinerja Kepala Guru Non PNS	0,00	0,00	0,00	264.000.000,00	(264.000.000,00)	(100,00)
	Jenjang Pendidikan TK	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00
	Jenjang Pendidikan SD	0,00	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	Jenjang Pendidikan SMP	0,00	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Propinsi	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2	**Bantuan Keuagan Bidang Kesehatan**	**3.267.591.750,00**	**3.267.591.750,00**	**100,00**	**3.576.859.000,00**	**(309.267.250,00)**	**(8,65)**
	Honor 127 Perawat Ponkendes	0,00	2.414.351.750,00	0,00	2.209.800.000,00	204.551.750,00	9,26
	Pemenuhan iuran JKN untuk perawat	0,00	0,00	0,00	110.490.000,00	(110.490.000,00)	(100,00)
	Pemenuhan iuran JKN untuk dokter Puskesmas	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	Honor 3 Dokter Puskesmas Rawat Inap Plus	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	(100,00)
	Honor 3 Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	0,00	188.640.000,00	0,00	90.000.000,00	98.640.000,00	109,60
	Pengembangan Taman Posyandu	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	Kunjungan konseling kesehatan	0,00	0,00	0,00	891.540.000,00	(891.540.000,00)	(100,00)
	Pendampingan Poskestren selama 10 bulan	0,00	0,00	0,00	121.029.000,00	(121.029.000,00)	(100,00)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurnan)	%
			2020	%	2019		
	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,00	609.600.000,00	0,00	0,00	609.600.000,00	0,00
3	**Bantuan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa TMMD**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**150.000.000,00**	**0,00**
4	**Bantuan untuk HUT Prop Jatim Tahun 2018**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**100,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana kebinamargaan, sumber daya air, dan cipta karya**	**95.000.000.000,00**	**95.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**95.000.000.000,00**	**0,00**
6	**Bantuan Keuangan Program Jatim Puspa**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**0,00**
7	**Bantuan Keuangan Khusus Program Jalin Matra**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**(30.000.000,00)**	**(100,00)**
8	**Bantuan keuangan percepatan pembangunan infrastruktur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000.000,00**	**(25.000.000.000,00)**	**(100,00)**
	Jumlah	**203.557.796.016,00**	**226.941.543.539,00**	**111,49**	**176.923.146.606,00**	**50.018.396.933,00**	**28,27**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	**99.673.710.379,00**	**93.068.317.985,37**	**115.621.305.341,92**

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan selain PAD dan pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 dan 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 65. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	**Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat**						
1.1	Pendapatan hibah untuk air minum perkotaan yang nantinya akan diteruskan kepada PDAM sebagai penyertaan modal	0,00	0,00	0,00	4.599.000.000,00	(4.599.000.000,00)	(100,00)
1.2	Hibah untuk air minum pedesaan	6.000.000.000,00	842.000.000,00	14,03	1.894.000.000,00	(1.052.000.000,00)	(55,54)
1.3	Dana hibah IPDMIP Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program)	2.273.893.000,00	1.628.614.768,00	71,62	1.761.060.392,00	(132.445.624,00)	(7,52)
	Hibah Pasimas	3.700.000.000,00	1.200.000.000,00	32,43	0,00	1.200.000.000,00	0,00
	Hibah Pariwisata	1.721.900.000,00	860.950.000,00	50,00	0,00	860.950.000,00	0,00
	Hibah jalan	0,00	0,00	0,00	21.827.440.768,00	(21.827.440.768,00)	(100,00)
	Hibah air limbah	0,00	0,00	0,00	933.000.000,00	(933.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	**13.695.793.000,00**	**4.531.564.768,00**	**33,09**	**31.014.501.160,00**	**(26.482.936.392,00)**	**(85,39)**
2	**Hibah BOS dari Pemerintah Popinsi**	85.851.010.000,00	85.971.010.000,00	100,14	**84.266.280.000,00**	1.704.730.000,00	2,02
	Jumlah Pendapatan Hibah 1+2)	**99.546.803.000,00**	**90.502.574.768,00**	**90,91**	**115.280.781.160,00**	**(24.778.206.392,00)**	**(21,49)**
3	**Pendapatan lainnya**						
3.1	Sumbangan pihak ke III dari petani Tebu	109.475.597,00	161.236.924,00	147,28	153.840.710,00	7.396.214,00	4,81
3.2	Sumbangan pihak ke III dari pihak lainnya	17.431.782,00	0,00	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
3.3	Penerimaan lain-lain	0,00	2.404.506.293,37	0,00	166.683.471,92	2.287.822.821,45	1.960,71
	Jumlah Pendapatan Lainnya	**126.907.379,00**	**2.565.743.217,37**	**2.021,74**	**340.524.181,92**	**2.225.219.035,45**	**653,47**
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	**99.673.710.379,00**	**93.068.317.985,37**	**93,37**	**115.621.305.341,92**	**(22.552.987.356,55)**	**(19,51)**

Penerimaan lain-lain Tahun 2020 sebesar Rp2.404.506.293,37 meliputi :

a. Hasil klaim dana covid dari Kementerian Kesehatan oleh RSUD Pasirian sebesar Rp1.553.530.950,00.
b. Setoran hasil Operasi Yustisi oleh Satpol PP dalam rangka Operasi Penegakan Disiplin pemakaian masker di Kabupaten Lumajang sebesar Rp5.681.000,00.

c. Penerimaan sisa dana Kwarcab Pramuka Rp361.141,00
d. Setoran dengan kode yang dapat di identifikasi dari PT. Taspen sebesar Rp186.100.030,00
e. Sisanya sebesar Rp658.833.172,37 merupakan akumulasi dari penerimaan yang tidak dapat diidentifikasi karena tidak disertakan informasi yang jelas. Konfirmasi dan koordinasi dengan Bank Jatim Cabang Lumajang dan pihak terkait lainnya sudah dilakukan namun tidak diperoleh kejelasan mengenai penerimaan setoran tersebut.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
B. Belanja dan Transfer	**2.191.780.123.105,47**	**2.028.732.782.607,05**	**2.229.227.269.040,01**

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer/bagi hasil ke desa, sebagai berikut:

Tabel 66. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realiasi 2019
1	Belanja Operasi	1.609.722.747.991,16	1.480.355.378.952,79	1.594.976.224.192,43
2	Belanja Modal	215.354.341.154,31	198.145.592.481,26	247.326.031.850,58
3	Belanja Tidak Terduga	34.447.496.044,00	18.033.773.257,00	1.608.071.300,00
4	Transfer ke Desa	332.255.537.916,00	332.198.037.916,00	385.316.941.697,00
	Jumlah	**2.191.780.123.105,47**	**2.028.732.782.607,05**	**2.229.227.269.040,01**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1. Belanja Operasi	**1.609.722.747.991,16**	**1.480.355.378.952,79**	**1.594.976.224.192,43**

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, hibah, bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja operasi Tahun anggran 2020 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 67. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Pegawai	790.148.100.431,21	741.631.927.441,00	93,86	780.427.298.106,50	(38.795.370.665,50)	(4,97)
2	Belanja Barang	628.632.611.691,95	555.859.126.089,79	88,42	599.495.571.358,03	(67.299.853.260,52)	(11,23)
3	Hibah	127.793.251.752,00	126.295.667.321,00	98,83	159.157.268.656,90	(10.604.020.691,62)	(6,66)

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
4	Bantuan Sosial	62.078.956.767,00	56.568.658.101,00	91,12	54.895.923.459,00	2.008.734.642,00	3,66
5	Bantuan Keuangan	1.069.827.349,00	0,00	0,00	1.000.162.612,00	69.664.736,00	6,97
	Jumlah	**1.609.722.747.991,16**	**1.480.355.378.952,79**	**91,96**	**1.594.976.224.192,43**	**(114.620.845.239,64)**	**(7,19)**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.1 Belanja Pegawai	**790.148.100.431,21**	**741.631.927.441,00**	**780.427.298.106,50**

Belanja Pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Pegawai tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan Belanja Pegawai belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jumlah realisasi belanja pegawai Tahun 2020 mencapai Rp741.631.927.441,00 atau 93,86% dari anggaran sebesar Rp790.148.100.431,21 di banding realisasi Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp38.795.370.665,50 atau (4,97%). Rincian realisasi belanja pegawai Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 68. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikain (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
I	**Belanja Tidak Langsung (BTL)**	**743.580.746.750,21**	**704.183.262.724,00**	**94,70**	**744.994.176.940,50**	**(40.810.914.216,50)**	**(5,48)**
1	**Gaji dan Tunjangan**	**670.942.000.891,96**	**634.027.509.409,00**	**94,50**	**679.266.857.535,50**	**(45.239.348.126,50)**	**(6,66)**
	Gaji pokok PNS/Uang representasi	370.028.059.602,00	362.322.002.483,00	97,92	383.737.126.876,00	(21.415.124.393,00)	(5,58)
	Tunjangan keluarga	34.966.987.906,00	33.809.756.000,00	96,69	35.773.285.073,50	(1.963.529.073,50)	(5,49)
	Tunjangan jabatan	8.814.527.703,00	8.524.913.480,00	96,71	8.699.544.842,00	(174.631.362,00)	(2,01)
	Tunjangan fungsional	24.800.328.758,00	24.566.262.970,00	99,06	26.381.331.000,00	(1.815.068.030,00)	(6,88)
	Tunjangan fungsional umum	5.418.926.440,00	4.864.774.254,00	89,77	4.768.165.000,00	96.609.254,00	2,03
	Tunjangan beras	19.687.053.439,00	16.836.787.504,00	85,52	17.658.383.285,00	(821.595.781,00)	(4,65)
	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	680.526.655,00	598.861.439,00	88,00	627.751.092,00	(28.889.653,00)	(4,60)
	Pembulatan gaji	6.584.093,00	4.843.224,00	73,56	5.554.495,00	(711.271,00)	(12,81)
	Iuran BPJS Kesehatan	31.759.023.344,96	17.980.826.566,00	56,62	10.836.205.312,00	7.144.621.254,00	65,93
	Uang paket	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	95.424.000,00	84.000,00	0,09
	Tunjangan badan musyawarah	32.703.300,00	32.703.300,00	100,00	25.791.150,00	6.912.150,00	26,80
	Tunjangan komisi	61.387.200,00	61.387.200,00	100,00	50.912.400,00	10.474.800,00	20,57
	Tunjangan badan anggaran	32.703.300,00	32.703.300,00	100,00	27.252.750,00	5.450.550,00	20,00
	Tunjangan badan kehormatan	7.855.800,00	7.855.800,00	100,00	6.546.700,00	1.309.100,00	20,00
	Tunjangan alat kelengkapan lainnya	22.380.754,00	22.380.750,00	100,00	19.183.500,00	3.197.250,00	16,67

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikain (Penurunan)	%
	Tunjangan perumahan	6.666.000.000,00	6.666.000.000,00	100,00	6.258.500.000,00	407.500.000,00	6,51
	Uang jasa pengabdian	19.485.550,00	0,00	0,00	471.240.000,00	(471.240.000,00)	(100,00)
	Dana operasional pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan badan legislasi	18.087.000,00	18.087.000,00	100,00	14.341.900,00	3.745.100,00	26,11
	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	3.227.788.917,00	2.965.169.059,00	91,86	3.140.749.740,00	(175.580.681,00)	(5,59)
	Tunjangan bahaya radiasi	84.162.750,00	82.800.000,00	98,38	92.000.000,00	(9.200.000,00)	(10,00)
	Tambahan penghasilan guru	463.350.000,00	434.000.000,00	93,67	382.750.000,00	51.250.000,00	13,39
	Tunjangan profesi guru	157.583.450.380,00	147.634.767.080,00	93,69	174.051.698.420,00	(26.416.931.340,00)	(15,18)
	Tunjangan transportasi	6.072.000.000,00	6.072.000.000,00	100,00	5.750.000.000,00	322.000.000,00	5,60
2	**Tambahan Penghasilan PNS**	**57.676.611.389,00**	**55.740.148.317,00**	**96,64**	**52.729.987.277,00**	**3.010.161.040,00**	**5,71**
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57.676.611.389,00	55.740.148.317,00	96,64	52.729.987.277,00	3.010.161.040,00	5,71
3	**Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH**	**11.625.000.000,00**	**11.625.000.000,00**	**100,00**	**10.890.000.000,00**	**735.000.000,00**	**6,75**
	Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.820.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan reses	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	100,00	1.470.000.000,00	735.000.000,00	50,00
4	**Belanja Insentif Pemungutan Pajak**	**2.369.562.000,00**	**2.224.405.136,00**	**93,87**	**1.354.815.171,00**	**869.589.965,00**	**64,19**
	Belanja insentif pemungutan pajak hotel	33.150.000,00	30.422.323,00	91,77	20.379.173,00	10.043.150,00	49,28
	Belanja insentif pemungutan pajak restoran	188.900.000,00	170.974.012,00	90,51	88.703.498,00	82.270.514,00	92,75
	Belanja insentif pemungutan pajak hiburan	3.800.000,00	3.648.688,00	96,02	2.300.004,00	1.348.684,00	58,64
	Belanja insentif pemungutan pajak reklame	63.040.000,00	60.385.259,00	95,79	30.473.180,00	29.912.079,00	98,16
	Belanja insentif pemungutan pajak penerangan jalan	1.002.687.000,00	937.675.599,00	93,52	601.499.389,00	336.176.210,00	55,89
	Belanja insentif pemungutan pajak parkir	9.345.000,00	9.059.366,00	96,94	2.013.167,00	7.046.199,00	350,01
	Belanja insentif pemungutan pajak air tanah	6.765.000,00	6.598.687,00	97,54	1.752.911,00	4.845.776,00	276,44
	Belanja insentif pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan	119.000.000,00	110.916.718,00	93,21	64.705.740,00	46.210.978,00	71,42
	Belanja insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	444.375.000,00	417.326.162,00	93,91	277.914.559,00	139.411.603,00	50,16

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikain (Penurunan)	%
	Belanja insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	498.500.000,00	477.398.322,00	95,77	265.073.550,00	212.324.772,00	80,10
5	**Belanja Insentif Pemungutan Retribusi**	**967.572.469,25**	**566.199.862,00**	**58,52**	**752.516.957,00**	**(186.317.095,00)**	**(24,76)**
	Belanja insentif pemungutan retribusi jasa usaha	163.667.617,25	156.145.927,00	95,40	197.541.623,00	(41.395.696,00)	(20,96)
	Belanja insentif pemungutan retribusi perijinan tertentu	114.134.405,00	343.111,00	0,30	335.608,00	7.503,00	2,24
	Belanja insentif pemungutan retribusi jasa umum	689.770.447,00	409.710.824,00	59,40	554.639.726,00	(144.928.902,00)	(26,13)
II	**Belanja Langsung**	**46.567.353.681,00**	**37.448.664.717,00**	**80,42**	**35.433.121.166,00**	**2.015.543.551,00**	**5,69**
1	**Honorarium PNS**	**38.162.723.925,00**	**30.581.867.357,00**	**80,14**	**27.056.186.908,00**	**3.525.680.449,00**	**13,03**
	Honorarium tim teknis kegiatan	871.112.500,00	794.080.500,00	91,16	809.784.000,00	(15.703.500,00)	(1,94)
	Honorarium pengadaan barang/jasa	758.069.420,00	693.627.900,00	91,50	584.251.100,00	109.376.800,00	18,72
	Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarium pengurus barang	644.355.200,00	636.566.450,00	98,79	1.402.110.500,00	(765.544.050,00)	(54,60)
	Honorarium penerima hasil pekerjaan	138.264.700,00	123.754.200,00	89,51	197.505.900,00	(73.751.700,00)	(37,34)
	Honorarium tim anggaran pemerintah daerah	397.000.000,00	397.000.000,00	100,00	384.000.000,00	13.000.000,00	3,39
	Honorarium tim peneliti RKA-SKPD	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00	0,00	69.000.000,00	0,00
	Honorarium pelayanan kesehatan	28.061.410.635,00	20.951.546.747,00	74,66	18.234.068.358,00	2.717.478.389,00	14,90
	Honorarium penyelenggara ujian (Dinas Pendidikan)	734.332.100,00	627.207.350,00	85,41	1.081.188.250,00	(453.980.900,00)	(41,99)
	Honorarium pengelola sekolah	1.047.709.800,00	1.043.604.800,00	99,61	1.070.795.500,00	(27.190.700,00)	(2,54)
	Honorarium tim pemeriksa kasus (Inspektorat)	167.500.000,00	166.800.000,00	99,58	114.600.000,00	52.200.000,00	45,55
	Honorarium verifikator jampersal	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00
	Honorarium tim kewaspadaan dini daerah (Bakesbangpol)	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	0,00	27.600.000,00	0,00
	Honorarium komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00	(27.600.000,00)	(100,00)
	Honorarium sekretariat tim anggaran pemerintah daerah (BPKD)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	9.000.000,00	36.000.000,00	400,00
	Honorarium pengguna anggaran	743.314.000,00	740.949.500,00	99,68	518.268.000,00	222.681.500,00	42,97
	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan	2.290.533.750,00	2.131.946.610,00	93,08	2.257.475.300,00	(125.528.690,00)	(5,56)
	Honorarium pengurus gaji (smp negeri)	143.570.000,00	143.570.000,00	100,00	57.690.000,00	85.880.000,00	148,86

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikain (Penurunan)	%
	Honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00	292.500.000,00	97.500.000,00	33,33
	Honorarium penyelenggara ujian ASN (BKD)	26.500.000,00	15.600.000,00	58,87	5.350.000,00	10.250.000,00	191,59
	Honorarium bendahara	1.027.217.320,00	1.017.430.300,00	99,05	0,00	1.017.430.300,00	0,00
	Honorarium PPK-SKPD (verifikator)	379.192.000,00	332.811.000,00	87,77	0,00	332.811.000,00	0,00
	Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi	201.042.500,00	233.772.000,00	116,28	0,00	233.772.000,00	0,00
2	**Honorarium Non PNS**	**3.089.400.000,00**	**1.813.900.000,00**	**58,71**	**2.049.910.000,00**	**(236.010.000,00)**	**(11,51)**
	Honorarium tim teknis kegiatan	1.638.200.000,00	398.200.000,00	24,31	1.276.710.000,00	(878.510.000,00)	(68,81)
	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	655.200.000,00	634.200.000,00	96,79	686.400.000,00	(52.200.000,00)	(7,60)
	Honorarium tim kewaspadaan dini daerah (Bakesbangpol)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	Honorarium panitia seleksi pimpinan tinggi/administrator	48.000.000,00	33.500.000,00	69,79	0,00	33.500.000,00	0,00
	Honorarium tim pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum (Satpol PP)	708.000.000,00	708.000.000,00	100,00	0,00	708.000.000,00	0,00
	Honorarium tim FLS	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	(14.800.000,00)	(100,00)
	Honorarium komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	(72.000.000,00)	(100,00)
3	**Uang lembur**	**5.315.229.756,00**	**5.052.897.360,00**	**95,06**	**5.929.691.058,00**	**(876.793.698,00)**	**(14,79)**
	Uang lembur PNS	5.198.525.756,00	4.953.248.360,00	95,28	5.859.951.058,00	(906.702.698,00)	(15,47)
	Uang lembur non PNS	116.704.000,00	99.649.000,00	85,39	69.740.000,00	29.909.000,00	42,89
4	**Belanja Pegawai pada BLUD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.266.200,00**	**(98.266.200,00)**	**(100,00)**
	Belanja pegawai pada BLUD	0,00	0,00	0,00	98.266.200,00	(98.266.200,00)	(100,00)
5	**Belanja Pegawai Dana BOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**299.067.000,00**	**(299.067.000,00)**	**(100,00)**
	Jumlah Belanja Pegawai	**790.148.100.431,21**	**741.631.927.441,00**	**93,86**	**780.427.298.106,50**	**(38.795.370.665,50)**	**(4,97)**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.2 Belanja Barang dan Jasa	**628.632.611.691,95**	**555.859.126.089,79**	**599.495.571.358,03**

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya, terinci sebagai berikut:

Tabel 69. Realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi		Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%			
1	Belanja Persediaan	206.562.032.532,22	180.300.533.596,77	87,29	191.364.385.481,50	(11.063.851.884,73)	(5,78)
2	Belanja Jasa	318.058.159.735,08	284.880.936.668,20	89,57	288.533.977.779,70	(3.653.041.111,50)	(1,27)
3	Belanja Pemeliharaan	49.518.913.720,65	43.095.846.301,82	87,03	61.079.827.769,11	(17.983.981.467,29)	(29,44)
4	Belanja Perjalanan Dinas	48.872.005.788,00	42.308.366.867,00	86,57	51.301.004.560,00	(8.992.637.693,00)	(17,53)
5	Belanja Lainnya	5.621.499.916,00	5.273.442.656,00	93,81	7.216.375.767,72	(1.942.933.111,72)	(26,92)
	Jumlah	**628.632.611.691,95**	**555.859.126.089,79**	**88,42**	**599.495.571.358,03**	**(43.636.445.268,24)**	**(7,28)**

(1) Belanja Persediaan

Belanja Persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke tiga.

Realisasi Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp180.300.533.596,77, atau 87,29% dari anggaran sebesar Rp206.562.032.532,22 terinci sebagai berikut:

Tabel 70. Realisasi Belanja Belanja dan Jasa - Belanja Persediaan Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Persediaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**2**	**3**	**4**	**5=4/3**	**6**	**7=4-6**	**8=7/6**
1	Belanja alat tulis kantor	16.310.474.030,65	15.606.614.060,76	95,68	14.606.493.508,00	1.000.120.552,76	6,85
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	1.732.052.475,00	1.687.796.334,00	97,44	1.638.022.845,00	49.773.489,00	3,04
3	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	603.405.000,00	579.695.000,00	96,07	722.364.500,00	(142.669.500,00)	(19,75)
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.393.870.002,46	10.048.877.085,31	96,68	5.356.020.951,00	4.692.856.134,31	87,62
5	Belanja bahan bakar minyak/gas	1.011.394.800,00	432.547.554,00	42,77	340.182.293,00	92.365.261,00	27,15
6	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	56.107.500,00	27.142.500,00	48,38	38.967.500,00	(11.825.000,00)	(30,35)
7	Belanja pengisian tabung gas	3.051.842.961,00	2.458.986.809,00	80,57	1.000.773.097,00	1.458.213.712,00	145,71
8	Belanja pengisian tabung gas medis	0,00	0,00	0,00	1.430.256.968,00	(1.430.256.968,00)	(100,00)
9	Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai	18.972.561.099,00	38.382.392.928,00	202,30	28.128.103.141,00	10.254.289.787,00	36,46

No	Belanja Persediaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
10	Belanja peralatan pengolah tanah dan tanaman sekali pakai	18.335.045.864,11	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
11	Belanja peralatan bangunan sekali pakai	44.477.500,00	21.850.500,00	49,13	383.312.160,00	(361.461.660,00)	(94,30)
12	Belanja peralatan perikanan sekali pakai	5.105.000,00	4.869.500,00	95,39	29.406.900,00	(24.537.400,00)	(83,44)
13	Belanja cinderamata	107.034.000,00	82.850.000,00	77,41	594.147.500,00	(511.297.500,00)	(86,06)
14	Belanja alat olah raga habis pakai	1.786.536.800,00	1.788.019.300,00	100,08	2.262.103.501,00	(474.084.201,00)	(20,96)
15	Belanja karangan bunga/bunga tabur	34.127.000,00	31.920.000,00	93,53	12.000.000,00	19.920.000,00	166,00
16	Belanja pakan ikan/ternak	110.938.300,00	110.531.300,00	99,63	90.211.250,00	20.320.050,00	22,52
17	Belanja pupuk	75.371.000,00	69.907.930,00	92,75	132.863.100,00	(62.955.170,00)	(47,38)
18	Belanja make up	0,00	0,00	0,00	5.345.300,00	(5.345.300,00)	(100,00)
19	Belanja umbul-umbul/bendera	198.552.400,00	182.436.400,00	91,88	234.476.300,00	(52.039.900,00)	(22,19)
20	Belanja spanduk/baliho/banner	696.881.713,00	608.747.050,00	87,35	508.217.050,00	100.530.000,00	19,78
21	Belanja alat penunjang kesehatan/kedokteran habis pakai	2.052.927.603,00	1.472.159.397,00	71,71	377.130.064,00	1.095.029.333,00	290,36
22	Belanja bahan baku bangunan	540.731.750,00	557.622.107,00	103,12	446.537.092,00	111.085.015,00	24,88
23	Belanja bahan/bibit tanaman	515.365.300,00	500.133.300,00	97,04	571.793.405,00	(71.660.105,00)	(12,53)
24	Belanja bibit ternak	240.950.000,00	239.373.000,00	99,35	238.838.100,00	534.900,00	0,22
25	Belanja bahan obat-obatan	39.426.880.975,00	28.952.169.017,00	73,43	32.707.742.319,00	(3.755.573.302,00)	(11,48)
26	Belanja bahan kimia	2.393.182.098,00	2.302.883.419,00	96,23	1.766.609.946,00	536.273.473,00	30,36
27	Belanja bahan makanan	6.301.510.045,00	5.525.499.285,00	87,69	6.822.077.889,50	(1.296.578.604,50)	(19,01)
28	Belanja bahan sandang	523.205.000,00	134.235.000,00	25,66	500.238.800,00	(366.003.800,00)	(73,17)
29	Belanja bahan baku praktek/pelatihan	410.947.553,00	371.268.990,00	90,34	538.737.540,00	(167.468.550,00)	(31,09)
30	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	955.617.600,00	723.393.490,00	75,70	1.741.617.390,00	(1.018.223.900,00)	(58,46)
31	Belanja bahan/sampel uji lab	92.810.000,00	61.407.000,00	66,16	47.109.000,00	14.298.000,00	30,35
32	Belanja bahan logam	13.400.000,00	13.400.000,00	100,00	11.145.000,00	2.255.000,00	20,23
33	Belanja cetak	12.725.592.112,00	12.001.365.986,00	94,31	21.719.078.670,00	(9.717.712.684,00)	(44,74)
34	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	9.184.237.532,00	8.766.675.488,42	95,45	9.300.939.015,00	(534.263.526,58)	(5,74)
35	Belanja makanan dan minuman rapat	18.614.879.788,00	12.894.225.951,00	69,27	22.990.633.710,00	(10.096.407.759,00)	(43,92)
36	Belanja makanan dan minuman tamu	2.226.266.440,00	1.795.609.755,00	80,66	2.803.024.902,00	(1.007.415.147,00)	(35,94)
37	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	2.595.835.750,00	2.392.238.750,00	92,16	5.993.388.400,00	(3.601.149.650,00)	(60,09)
38	Belanja makanan dan minuman pasien	3.454.580.000,00	2.001.084.450,00	57,93	2.898.233.150,00	(897.148.700,00)	(30,96)
39	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	269.000.000,00	267.706.000,00	99,52	267.910.000,00	(204.000,00)	(0,08)
40	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	12.000.000,00	11.550.000,00	96,25	151.545.000,00	(139.995.000,00)	(92,38)
41	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	127.500.000,00	127.245.000,00	99,80	127.245.000,00	0,00	0,00
42	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	6.468.000,00	5.841.000,00	90,31	0,00	5.841.000,00	0,00
43	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	139.500.000,00	138.591.000,00	99,35	138.795.000,00	(204.000,00)	(0,15)

No	Belanja Persediaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
44	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	18.000.000,00	17.550.000,00	97,50	27.783.000,00	(10.233.000,00)	(36,83)
45	Belanja pakaian kerja lapangan	896.809.000,00	870.109.000,00	97,02	762.195.525,00	107.913.475,00	14,16
46	Belanja pakaian adat daerah	187.500.000,00	186.466.500,00	99,45	0,00	186.466.500,00	0,00
47	Belanja pakaian batik tradisional	654.234.000,00	568.829.000,00	86,95	1.924.787.600,00	(1.355.958.600,00)	(70,45)
48	Belanja pakaian olah raga	309.225.000,00	304.062.900,00	98,33	1.142.137.550,00	(838.074.650,00)	(73,38)
49	Belanja pakaian seragam	88.794.800,00	86.434.550,00	97,34	297.932.000,00	(211.497.450,00)	(70,99)
50	Belanja pakaian kegiatan tertentu	693.238.000,00	690.100.518,00	99,55	1.834.598.750,00	(1.144.498.232,00)	(62,38)
51	Belanja hadiah uang tunai	539.925.000,00	251.200.000,00	46,52	1.511.625.000,00	(1.260.425.000,00)	(83,38)
52	Belanja hadiah barang	309.310.500,00	281.011.500,00	90,85	666.830.150,00	(385.818.650,00)	(57,86)
53	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	11.888.551.691,00	11.544.659.250,00	97,11	13.491.453.650,00	(1.946.794.400,00)	(14,43)
54	Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga (barang jadi)	0,00	0,00	0,00	31.405.000,00	(31.405.000,00)	(100,00)
55	Belanja Hibah Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.291.279.550,00	11.782.748.742,28	82,45	0,00	11.782.748.742,28	0,00
56	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	0,00	336.000.000,00	0,00
	JUMLAH	**206.562.032.532,22**	**180.300.533.596,77**	**87,29**	**191.364.385.481,50**	**(11.063.851.884,73)**	**(5,78)**

(2) Belanja Jasa

Belanja Jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa. Realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp284.880.936.668,20 atau 89,57% dari anggaran sebesar Rp318.058.159.735,08 terinci sebagai berikut:

Tabel 71. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa
Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Belanja telepon	819.921.124,00	542.753.754,00	66,20	616.556.618,00	(73.802.864,00)	(11,97)
2	Belanja air	1.238.258.013,48	889.127.753,40	71,80	1.045.229.487,00	(156.101.733,60)	(14,93)
3	Belanja listrik	28.660.445.711,60	26.567.900.687,84	92,70	25.960.199.549,00	607.701.138,84	2,34
4	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	1.650.000,00	1.850.000,00	112,12
5	Belanja surat kabar/majalah	404.920.000,00	332.006.000,00	81,99	355.284.300,00	(23.278.300,00)	(6,55)
6	Belanja kawat/faksimili/internet	10.694.183.321,00	10.182.800.741,09	95,22	6.073.728.204,00	4.109.072.537,09	67,65
7	Belanja paket/pengiriman	77.786.960,00	26.592.212,00	34,19	36.357.387,00	(9.765.175,00)	(26,86)
8	Belanja sertifikasi	29.273.500,00	7.391.200,00	25,25	83.512.500,00	(76.121.300,00)	(91,15)

No	Belanja Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
9	Belanja jasa transaksi keuangan	6.800.000,00	2.791.611,67	41,05	9.298.632,78	(6.507.021,11)	(69,98)
10	Belanja jasa administrasi pemungutan retribusi parkir	902.000.000,00	836.342.550,00	92,72	888.670.800,00	(52.328.250,00)	(5,89)
11	Belanja jasa siaran radio	177.253.200,00	133.761.250,00	75,46	152.800.000,00	(19.038.750,00)	(12,46)
12	Belanja jasa transportasi/akomodasi	2.098.173.600,00	1.620.182.000,00	77,22	7.501.432.695,00	(5.881.250.695,00)	(78,40)
13	Belanja dokumentasi	762.497.400,00	736.495.000,00	96,59	864.969.570,00	(128.474.570,00)	(14,85)
14	Belanja dekorasi	355.787.150,00	236.875.750,00	66,58	780.786.901,00	(543.911.151,00)	(69,66)
15	Belanja jasa tera/kir	60.040.000,00	57.153.900,00	95,19	95.901.500,00	(38.747.600,00)	(40,40)
16	Belanja jasa promosi/publikasi/advertising	2.555.284.060,00	2.351.463.900,00	92,02	2.258.687.400,00	92.776.500,00	4,11
17	Belanja jasa gelombang radio/televisi	3.480.000,00	2.700.000,00	77,59	10.965.447,00	(8.265.447,00)	(75,38)
18	Belanja jasa pemeliharaan kesehatan bupati/wakil bupati	40.000.000,00	7.826.955,00	19,57	0,00	7.826.955,00	0,00
19	Belanja jasa uji laboratorium	368.097.800,00	242.886.900,00	65,98	233.795.675,00	9.091.225,00	3,89
20	Belanja jasa cleaning service	1.017.832.500,00	872.688.800,00	85,74	622.625.400,00	250.063.400,00	40,16
21	Belanja pajak bumi dan bangunan	0,00	0,00	0,00	747.332,00	(747.332,00)	(100,00)
22	Belanja pajak air tanah	12.000.000,00	9.525.204,00	79,38	8.365.369,00	1.159.835,00	13,86
23	Belanja jasa tenaga keamanan	1.501.200.000,00	1.383.700.000,00	92,17	2.702.925.000,00	(1.319.225.000,00)	(48,81)
24	Belanja penggantian transport	12.533.118.500,00	8.797.927.250,00	70,20	19.022.298.812,00	(10.224.371.562,00)	(53,75)
25	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	5.550.358.500,00	3.616.140.700,00	65,15	7.007.979.080,00	(3.391.838.380,00)	(48,40)
26	Belanja jasa pendukung kegiatan	388.636.000,00	220.746.000,00	56,80	467.250.000,00	(246.504.000,00)	(52,76)
27	Belanja jasa laundry	89.117.000,00	85.255.020,00	95,67	49.375.900,00	35.879.120,00	72,67
28	Belanja jasa administrasi pemungutan PBB P2	910.150.000,00	910.149.000,00	100,00	1.044.061.000,00	(133.912.000,00)	(12,83)
29	Belanja jasa juri/wasit	85.425.000,00	81.425.000,00	95,32	413.625.000,00	(332.200.000,00)	(80,31)
30	Belanja jasa petugas korsik dan drum band	62.250.000,00	62.250.000,00	100,00	135.000.000,00	(72.750.000,00)	(53,89)
31	Belanja jasa penata rias/make up	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	16.680.000,00	(9.880.000,00)	(59,23)
32	Belanja jasa event organizer	111.966.000,00	111.250.700,00	99,36	1.331.896.600,00	(1.220.645.900,00)	(91,65)
33	Belanja jasa fumigasi	9.000.000,00	0,00	0,00	7.244.000,00	(7.244.000,00)	(100,00)
34	Belanja jasa siaran televisi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)
35	Belanja jasa pembuatan video	70.489.600,00	70.409.500,00	99,89	23.500.000,00	46.909.500,00	199,61
36	Belanja jasa kalibrasi alat kesehatan	162.744.000,00	100.240.000,00	61,59	182.933.900,00	(82.693.900,00)	(45,20)

No	Belanja Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
37	Belanja jasa pengolahan limbah medis	1.767.084.000,00	1.085.851.273,00	61,45	1.133.073.802,00	(47.222.529,00)	(4,17)
38	Belanja jasa pemeliharaan kesehatan DPRD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja jasa penyelenggaraan diklat	202.000.000,00	287.850.554,00	142,50	227.300.000,00	60.550.554,00	26,64
40	Belanja jasa sewa pengharum ruangan	78.000.000,00	55.400.000,00	71,03	54.250.000,00	1.150.000,00	2,12
41	Belanja retribusi pelayanan persampahan	33.830.000,00	31.210.000,00	92,26	42.950.000,00	(11.740.000,00)	(27,33)
42	Belanja jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi	1.519.571.000,00	1.070.399.250,00	70,44	1.422.883.000,00	(352.483.750,00)	(24,77)
43	Belanja jasa penyelenggara ujian	149.375.000,00	143.685.000,00	96,19	448.590.000,00	(304.905.000,00)	(67,97)
44	Belanja akomodasi transmigran	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)	(100,00)
45	Belanja jasa pelayanan kesehatan	65.322.200.949,00	55.211.933.699,00	84,52	57.566.001.537,00	(2.354.067.838,00)	(4,09)
46	Belanja penggantian pengolahan darah	608.000.000,00	299.955.000,00	49,33	157.023.000,00	142.932.000,00	91,03
47	Belanja jasa perizinan penyelenggaraan penyiaran LPPL	7.060.000,00	5.673.256,00	80,36	2.839.095,00	2.834.161,00	99,83
48	Belanja jasa penyedotan tinja dan air limbah rumah tangga	20.000.000,00	19.666.700,00	98,33	0,00	19.666.700,00	0,00
49	Belanja uang saku rapat TP4D (Inspektorat)	17.300.000,00	12.225.000,00	70,66	16.350.000,00	(4.125.000,00)	(25,23)
50	Belanja jasa/insentif RT/RW	1.276.800.000,00	1.276.800.000,00	100,00	1.274.400.000,00	2.400.000,00	0,19
51	Belanja iuran wajib Tahunan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	0,00	0,00
52	Belanja jasa lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	20.360.000,00	(20.360.000,00)	(100,00)
53	Belanja jasa perizinan penerbitan atau pembuatan produk/kemasan	3.000.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja jasa insentif tenaga kesehatan (Covid-19)	11.967.474.650,00	10.012.662.400,00	83,67	0,00	10.012.662.400,00	0,00
55	Belanja jasa lembur GTT/PTT	894.483.500,00	891.507.500,00	99,67	124.040.000,00	767.467.500,00	618,73
56	Belanja premi asuransi kesehatan	8.348.682.404,00	6.028.862.869,00	72,21	810.387.631,00	5.218.475.238,00	643,95
57	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	1.716.208.818,00	1.394.629.427,20	81,26	589.497.009,92	805.132.417,28	136,58

No	Belanja Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
58	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	220.800.000,00	161.802.000,00	73,28	874.399.000,00	(712.597.000,00)	(81,50)
59	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	389.750.000,00	298.677.400,00	76,63	667.532.145,00	(368.854.745,00)	(55,26)
60	Belanja sewa tanah/lahan	697.371.990,00	681.185.054,00	97,68	639.808.102,00	41.376.952,00	6,47
61	Belanja sewa penginapan	318.160.000,00	123.803.441,00	38,91	238.817.250,00	(115.013.809,00)	(48,16)
62	Belanja sewa sarana mobilitas darat	401.633.300,00	384.686.200,00	95,78	973.189.261,00	(588.503.061,00)	(60,47)
63	Belanja sewa mesin proses	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Belanja sewa electric generating set	16.500.000,00	7.150.000,00	43,33	18.525.000,00	(11.375.000,00)	(61,40)
65	Belanja sewa alat kantor	78.500.000,00	39.860.000,00	50,78	28.714.000,00	11.146.000,00	38,82
66	Belanja sewa alat rumah tangga	92.300.000,00	83.600.000,00	90,57	41.160.000,00	42.440.000,00	103,11
67	Belanja sewa komputer	25.775.000,00	25.775.000,00	100,00	0,00	25.775.000,00	0,00
68	Belanja sewa meja dan kursi	166.781.000,00	77.111.000,00	46,23	325.038.500,00	(247.927.500,00)	(76,28)
69	Belanja sewa alat studio	128.901.000,00	82.156.000,00	63,74	313.871.750,00	(231.715.750,00)	(73,82)
70	Belanja sewa alat komunikasi	160.000.000,00	103.060.800,00	64,41	91.420.000,00	11.640.800,00	12,73
71	Belanja sewa barang bercorak kebudayaan	21.650.000,00	9.650.000,00	44,57	48.410.000,00	(38.760.000,00)	(80,07)
72	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	324.270.000,00	112.715.000,00	34,76	691.359.350,00	(578.644.350,00)	(83,70)
73	Belanja sewa alat praktek/peraga	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	(2.970.000,00)	(100,00)
74	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	566.955.500,00	363.241.500,00	64,07	4.077.925.500,00	(3.714.684.000,00)	(91,09)
75	Belanja bimbingan teknis	45.400.000,00	30.900.000,00	68,06	13.200.000,00	17.700.000,00	134,09
76	Belanja pendidikan struktural	2.676.174.000,00	2.028.894.000,00	75,81	17.500.000,00	2.011.394.000,00	11.493,68
77	Belanja fit and proper test	291.150.000,00	192.000.000,00	65,95	545.500.000,00	(353.500.000,00)	(64,80)
78	Belanja jasa konsultansi penelitian	50.000.000,00	48.950.000,00	97,90	297.005.000,00	(248.055.000,00)	(83,52)
79	Belanja jasa konsultansi perencanaan	708.827.330,00	688.173.500,00	97,09	1.344.148.614,00	(655.975.114,00)	(48,80)
80	Belanja jasa konsultansi pelaporan	2.209.999.998,00	1.967.440.670,00	89,02	147.420.000,00	1.820.020.670,00	1.234,58
81	Belanja jasa konsultansi pengawasan	529.425.798,00	510.030.275,00	96,34	1.105.860.604,00	(595.830.329,00)	(53,88)
82	Belanja jasa konsultansi hukum	420.600.000,00	323.763.000,00	76,98	337.445.400,00	(13.682.400,00)	(4,05)
83	Belanja jasa konsultansi IT	268.684.000,00	266.750.000,00	99,28	820.407.500,00	(553.657.500,00)	(67,49)
84	Belanja jasa konsultansi evaluasi	629.110.000,00	189.245.000,00	30,08	229.240.000,00	(39.995.000,00)	(17,45)

No	Belanja Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
85	Belanja jasa konsultansi psikologi	12.000.000,00	4.000.000,00	33,33	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)
86	Belanja upah/ongkos tenaga kerja harian	1.319.420.000,00	884.835.000,00	67,06	585.855.000,00	298.980.000,00	51,03
87	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	82.162.265.000,00	80.575.995.000,00	98,07	77.307.383.238,00	3.268.611.762,00	4,23
88	Belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan	2.101.273.000,00	1.872.323.223,00	89,10	1.601.044.994,00	271.278.229,00	16,94
89	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	5.410.520.518,00	4.961.848.250,00	91,71	5.040.926.368,00	(79.078.118,00)	(1,57)
90	Belanja upah/ongkos guru dan tenaga kependidikan	31.400.000.000,00	30.790.000.000,00	98,06	31.918.800.000,00	(1.128.800.000,00)	(3,54)
91	Belanja tambahan upah guru dan tenaga kependidikan	17.425.186.000,00	17.080.686.600,00	98,02	12.421.939.070,00	4.658.747.530,00	37,50
92	Belanja operasional pemeriksaan internal reguler	58.625.000,00	31.885.000,00	54,39	669.276.000,00	(637.391.000,00)	(95,24)
93	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	938.000.000,00	902.210.488,00	96,18	1.144.867.000,00	(242.656.512,00)	(21,20)
94	Belanja seminar	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	(3.800.000,00)	(100,00)
95	Belanja lomba	10.292.000,00	10.162.000,00	98,74	2.940.000,00	7.222.000,00	245,65
	Jumlah Belanja Jasa	**318.058.159.735,08**	**284.880.936.668,20**	**89,57**	**288.533.977.779,70**	**(3.653.041.111,50)**	**(1,27)**

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2020 sebesar Rp43.095.846.301,8211 atau 87,03% dari anggaran sebesar Rp49.518.913.720,65 terinci sebagai berikut:

Tabel 72. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa - Belanja Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	6.814.230.621,00	5.901.065.441,00	86,60	7.536.269.293,00	(1.635.203.852,00)	(21,70)
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	3.894.867.021,65	3.556.074.058,00	91,30	3.739.243.471,00	(183.169.413,00)	(4,90)

No	Belanja Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
3	Belanja jasa kir kendaraan dinas/operasional	44.496.398,00	14.998.650,00	33,71	13.735.000,00	1.263.650,00	9,20
4	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	967.446.128,00	707.366.570,00	73,12	675.517.350,00	31.849.220,00	4,71
5	Belanja pemeliharaan excavator	235.000.000,00	234.349.625,00	99,72	214.975.000,00	19.374.625,00	9,01
6	Belanja pemeliharaan asphal equipment	100.000,00	0,00	0,00	183.362.000,00	(183.362.000,00)	(100,00)
7	Belanja pemeliharaan loader	16.659.000,00	16.654.750,00	99,97	190.494.400,00	(173.839.650,00)	(91,26)
8	Belanja pemeliharaan electric generating set	426.526.200,00	396.290.800,00	92,91	256.551.120,00	139.739.680,00	54,47
9	Belanja pemeliharaan pompa	31.140.000,00	18.332.000,00	58,87	11.105.000,00	7.227.000,00	65,08
10	Belanja pemeliharaan alat pengolahan air kotor	0,00	0,00		26.176.700,00	(26.176.700,00)	(100,00)
11	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor perorangan	38.000.000,00	16.968.586,00	44,65	10.145.647,00	6.822.939,00	67,25
12	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor berpenumpang	88.800.000,00	24.356.964,00	27,43	31.199.713,00	(6.842.749,00)	(21,93)
13	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor khusus	294.900.000,00	252.753.096,00	85,71	317.215.765,00	(64.462.669,00)	(20,32)
14	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	17.500.000,00	2.427.000,00	13,87	5.416.350,00	(2.989.350,00)	(55,19)
15	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda tiga	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja pemeliharaan kendaraan tak bermotor angkutan barang	35.000.000,00	10.853.000,00	31,01	209.217.139,00	(198.364.139,00)	(94,81)
17	Belanja pemeliharaan alat angkut apung bermotor berpenumpang	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	27.264.000,00	(25.264.000,00)	(92,66)
18	Belanja pemeliharaan alat angkut apung tak bermotor berpenumpang	0,00	0,00	0,00	20.592.000,00	(20.592.000,00)	(100,00)
19	Belanja pemeliharaan alat kalibrasi	500.000.000,00	265.805.142,00	53,16	325.119.001,00	(59.313.859,00)	(18,24)
20	Belanja pemeliharaan alat ukur lainnya	84.000.000,00	79.337.500,00	94,45	90.928.000,00	(11.590.500,00)	(12,75)
21	Belanja pemeliharaan alat pengolahan tanah dan tanaman	5.050.000,00	5.050.000,00	100,00	4.500.000,00	550.000,00	12,22
22	Belanja pemeliharaan alat prosesing	9.900.000,00	8.993.000,00	90,84	16.000.000,00	(7.007.000,00)	(43,79)
23	Belanja pemeliharaan alat pemeliharaan tanaman	0,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00
24	Belanja pemeliharaan alat reproduksi (pengganda)	168.050.000,00	84.324.040,00	50,18	66.697.390,00	17.626.650,00	26,43

No	Belanja Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
25	Belanja pemeliharaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	92.065.000,00	92.055.000,00	99,99	16.750.000,00	75.305.000,00	449,58
26	Belanja pemeliharaan office use	217.849.000,00	197.344.900,00	90,59	220.406.000,00	(23.061.100,00)	(10,46)
27	Belanja pemeliharaan meubelair	1.577.570.400,00	1.494.790.200,00	94,75	1.746.376.200,00	(251.586.000,00)	(14,41)
28	Belanja pemeliharaan alat pembersih	22.125.000,00	17.070.000,00	77,15	11.338.000,00	5.732.000,00	50,56
29	Belanja pemeliharaan alat pendingin	1.026.695.000,00	810.955.200,00	78,99	784.590.500,00	26.364.700,00	3,36
30	Belanja pemeliharaan alat dapur	13.600.000,00	3.500.000,00	25,74	465.000,00	3.035.000,00	652,69
31	Belanja pemeliharaan home use	505.805.400,00	242.470.439,00	47,94	375.690.339,00	(133.219.900,00)	(35,46)
32	Belanja pemeliharaan alat pemadam kebakaran	10.500.000,00	7.160.000,00	68,19	7.000.000,00	160.000,00	2,29
33	Belanja pemeliharaan komputer unit/jaringan	124.574.000,00	89.164.000,00	71,58	97.586.000,00	(8.422.000,00)	(8,63)
34	Belanja pemeliharaan personal komputer	2.531.305.710,00	2.322.983.202,00	91,77	2.216.703.438,00	106.279.764,00	4,79
35	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	1.438.019.917,00	1.346.665.942,00	93,65	1.223.892.500,00	122.773.442,00	10,03
36	Belanja pemeliharaan peralatan jaringan	148.958.500,00	137.684.881,00	92,43	251.989.191,00	(114.304.310,00)	(45,36)
37	Belanja pemeliharaan meja kerja pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja pemeliharaan kursi tamu di ruangan pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	2.500.000,00	0,00
39	Belanja pemeliharaan peralatan studio video dan film	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	11.756.500,00	28.243.500,00	240,24
40	Belanja pemeliharaan peralatan cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00	0,00
41	Belanja pemeliharaan alat komunikasi telephone	8.450.000,00	4.000.000,00	47,34	18.536.000,00	(14.536.000,00)	(78,42)
42	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio SSB	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	0,00	0,00
43	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio HF/FM	28.000.000,00	27.499.000,00	98,21	27.500.000,00	(1.000,00)	(0,00)
44	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio VHF	18.700.000,00	18.676.000,00	99,87	21.693.050,00	(3.017.050,00)	(13,91)
45	Belanja pemeliharaan alat kedokteran umum	886.000.000,00	866.003.700,00	97,74	877.402.369,00	(11.398.669,00)	(1,30)

No	Belanja Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
46	Belanja pemeliharaan alat kedokteran gigi	61.305.618,00	15.842.000,00	25,84	30.290.800,00	(14.448.800,00)	(47,70)
47	Belanja pemeliharaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	5.790.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Belanja pemeliharaan alat rontgen	0,00	0,00	0,00	5.331.150,00	(5.331.150,00)	(100,00)
49	Belanja pemeliharaan alat kedokteran radiologi	1.685.000.000,00	151.897.500,00	9,01	0,00	151.897.500,00	0,00
50	Belanja pemeliharaan alat kedokteran bedah	315.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja pemeliharaan alat kesehatan perawatan	7.137.702,00	7.062.700,00	98,95	63.951.050,00	(56.888.350,00)	(88,96)
52	Belanja pemeliharaan alat kesehatan olah raga	1.938.000,00	1.938.000,00	100,00	5.000.000,00	(3.062.000,00)	(61,24)
53	Belanja pemeliharaan alat laboratorium microbiologi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	4.860.000,00	140.000,00	2,88
54	Belanja pemeliharaan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	(12.750.000,00)	(100,00)
55	Belanja pemeliharaan alat laboratorium umum	55.500.000,00	43.452.200,00	78,29	14.017.300,00	29.434.900,00	209,99
56	Belanja pemeliharaan alat laboratorium mekanik tanah dan batuan	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00	(12.650.000,00)	(100,00)
57	Belanja pemeliharaan alat laboratorium kedokteran	0,00	0,00	0,00	6.067.600,00	(6.067.600,00)	(100,00)
58	Belanja pemeliharaan alat laboratorium hematologi	5.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Belanja pemeliharaan alat peraga bidang studi Olah Raga	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000,00	0,00
60	Belanja pemeliharaan alat laboratorium lingkungan	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	5.500.000,00	(550.000,00)	(10,00)
61	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	1.155.443.600,00	988.219.624,00	85,53	2.231.402.023,00	(1.243.182.399,00)	(55,71)
62	Belanja pemeliharaan bangunan gudang	13.121.000,00	13.121.000,00	100,00	4.747.880,00	8.373.120,00	176,35
63	Belanja pemeliharaan bangunan gedung laboratarium	3.510.000,00	3.510.000,00	100,00	67.220.000,00	(63.710.000,00)	(94,78)
64	Belanja pemeliharaan bangunan kesehatan	1.156.664.496,00	620.140.121,00	53,61	711.324.071,00	(91.183.950,00)	(12,82)
65	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat ibadah	244.948.100,00	244.446.600,00	99,80	29.208.400,00	215.238.200,00	736,91

No	Belanja Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
66	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan	3.871.396.320,00	3.854.517.820,00	99,56	4.016.645.900,00	(162.128.080,00)	(4,04)
67	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat olah raga	740.980.000,00	740.564.000,00	99,94	272.000.000,00	468.564.000,00	172,27
68	Belanja pemeliharaan bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar	0,00	0,00	0,00	249.456.000,00	(249.456.000,00)	(100,00)
69	Belanja pemeliharaan bangunan gedung untuk pos jaga	2.215.000,00	2.215.000,00	100,00	5.312.400,00	(3.097.400,00)	(58,31)
70	Belanja pemeliharaan bangunan gedung perpustakaan	93.280.875,00	93.080.875,00	99,79	82.183.300,00	10.897.575,00	13,26
71	Belanja pemeliharaan bangunan gedung museum	98.200.000,00	97.009.600,00	98,79	84.560.000,00	12.449.600,00	14,72
72	Belanja pemeliharaan bangunan taman/wisata/rekreasi	250.924.333,00	243.873.900,00	97,19	388.970.555,53	(145.096.655,53)	(37,30)
73	Belanja pemeliharaan bangunan gedung garasi/pool	0,00	0,00	0,00	2.427.900,00	(2.427.900,00)	(100,00)
74	Belanja pemeliharaan bangunan gedung instalasi	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan I	59.850.000,00	37.000.000,00	61,82	49.200.000,00	(12.200.000,00)	(24,80)
76	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan II	0,00	0,00	0,00	63.048.500,00	(63.048.500,00)	(100,00)
77	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan III	9.140.000,00	9.140.000,00	100,00	0,00	9.140.000,00	0,00
78	Belanja pemeliharaan flat/rumah susun	113.450.000,00	111.858.000,00	98,60	88.879.350,00	22.978.650,00	25,85
79	Belanja pemeliharaan bangunan menara telekomunikasi	26.850.000,00	26.600.000,00	99,07	0,00	26.600.000,00	0,00
80	Belanja pemeliharaan bangunan kerangka reklame	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Belanja pemeliharaan makam bersejarah	6.475.000,00	4.300.000,00	66,41	0,00	4.300.000,00	0,00
82	Belanja pemeliharaan bangunan bersejarah	49.640.072,00	47.372.000,00	95,43	59.700.000,00	(12.328.000,00)	(20,65)
83	Belanja pemeliharaan rambu bersuar	300.000.000,00	296.151.000,00	98,72	49.474.000,00	246.677.000,00	498,60
84	Belanja pemeliharaan rambu tidak bersuar	226.970.000,00	226.141.220,00	99,63	0,00	226.141.220,00	0,00

No	Belanja Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
85	Belanja pemeliharaan jalan kabupaten/kota	9.550.802.309,00	9.494.286.148,82	99,41	22.849.695.328,74	(13.355.409.179,92)	(58,45)
86	Belanja pemeliharaan penunjang jalan kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	324.532.841,84	(324.532.841,84)	(100,00)
87	Belanja pemeliharaan jembatan kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	600.397.370,00	(600.397.370,00)	(100,00)
88	Belanja pemeliharaan bangunan pembawa irigasi	2.667.531.000,00	2.635.180.650,00	98,79	2.168.176.390,00	467.004.260,00	21,54
89	Belanja pemeliharaan bangunan pembuang irigasi	1.330.000.000,00	1.325.802.000,00	99,68	687.970.000,00	637.832.000,00	92,71
90	Belanja pemeliharaan bangunan pengaman irigasi	53.310.000,00	51.974.200,00	97,49	289.916.100,00	(237.941.900,00)	(82,07)
91	Belanja pemeliharaan bangunan pembuang air kotor	3.000.000,00	2.902.900,00	96,76	0,00	2.902.900,00	0,00
92	Belanja pemeliharaan air tanah dalam	33.800.000,00	2.840.000,00	8,40	0,00	2.840.000,00	0,00
93	Belanja pemeliharaan instalasi air bersih/air baku lainnya	255.163.750,00	120.777.000,00	47,33	6.075.000,00	114.702.000,00	1.888,10
94	Belanja pemeliharaan instalasi air buangan domestik	179.640.900,00	41.000.000,00	22,82	59.913.422,00	(18.913.422,00)	(31,57)
95	Belanja pemeliharaan instalasi pengolahan sampah organik	244.980.000,00	197.980.000,00	80,81	155.751.750,00	42.228.250,00	27,11
96	Belanja pemeliharaan instalasi pengolahan sampah non organik	0,00	0,00	0,00	185.000,00	(185.000,00)	(100,00)
97	Belanja pemeliharaan jaringan transmisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Belanja pemeliharaan jaringan distribusi	910.000.000,00	785.602.025,00	86,33	0,00	785.602.025,00	0,00
99	Belanja pemeliharaan jaringan pipa distribusi	70.000.000,00	56.144.000,00	80,21	1.850.218.694,00	(1.794.074.694,00)	(96,97)
100	Belanja pemeliharaan buku	283.561.200,00	282.959.200,00	99,79	96.088.050,00	186.871.150,00	194,48
101	Belanja pemeliharaan barang-barang perpustakaan	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	1.100.000,00	650.000,00	59,09
102	Belanja pemeliharaan barang bercorak kebudayaan	135.585.000,00	135.436.500,00	99,89	129.294.300,00	6.142.200,00	4,75
103	Belanja pemeliharaan tanaman	250.000.000,00	249.094.500,00	99,64	247.823.994,00	1.270.506,00	0,51

No	Belanja Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
104	Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud	100.940.200,00	100.091.700,00	99,16	348.810.500,00	(248.718.800,00)	(71,30)
105	Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	42.680.623,00	(42.680.623,00)	(100,00)
106	Belanja pemeliharaan taman	458.000.000,00	391.399.632,00	85,46	722.020.800,00	(330.621.168,00)	(45,79)
	Jumlah	**49.518.913.720,65**	**43.095.846.301,82**	**87,03**	**61.079.827.769,11**	**(17.983.981.467,29)**	**(29,44)**

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp42.308.366.867,00 atau 86,57% dari anggaran sebesar Rp48.872.005.788,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 73. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Perjalanan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan	%
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.874.147.475,00	17.574.468.375,00	80,34	21.140.376.245,00	(3.565.907.870,00)	(16,87)
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.997.858.313,00	24.733.898.492,00	91,61	29.904.128.927,00	(5.170.230.435,00)	(17,29)
3	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	256.499.388,00	(256.499.388,00)	(100,00)
	Jumlah	**48.872.005.788,00**	**42.308.366.867,00**	**86,57**	**51.301.004.560,00**	**(8.992.637.693,00)**	**(17,53)**

(5) Belanja Lainnya

Belanja Lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap.

Belanja Lainnya merupakan belanja untuk pembelian barang-barang *extrakomptabel* yang tidak di catat di neraca karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai aset tetap, Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp5.273.442.656,00 atau 93,81% dari anggaran sebesar Rp5.621.499.916,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 74. Belanja Barang dan Jasa - Belanja Lainnya Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan	%
1	2	3	4	5	6	7=4-6	8=7/6
1	Belanja kendaraan tak bermotor angkutan barang	2.445.000,00	2.445.000,00	100,00	0,00	2.445.000,00	0,00

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan	%
2	Belanja perkakas konstruksi logam yang berpindah	49.875.000,00	49.350.000,00	98,95	0,00	49.350.000,00	0,00
3	Belanja perkakas konstruksi logam yang berpindah	0,00	0,00	0,00	116.019.750,00	(116.019.750,00)	(100,00)
4	Belanja perkakas bengkel khusus	0,00	0,00	0,00	2.051.500,00	(2.051.500,00)	(100,00)
5	Belanja perkakas standar (standart tool)	14.717.000,00	13.441.750,00	91,33	12.892.985,00	548.765,00	4,26
6	Belanja perkakas bengkel kerja	5.005.000,00	2.790.000,00	55,74	7.454.930,00	(4.664.930,00)	(62,58)
7	Belanja alat ukur universal	1.755.000,00	1.555.000,00	88,6	4.140.000,00	(2.585.000,00)	(62,44)
8	Belanja alat ukur lainnya	35.085.000,00	14.745.000,00	42,03	2.345.000,00	12.400.000,00	528,78
9	Belanja alat timbangan	6.361.500,00	5.770.000,00	90,7	769.500,00	5.000.500,00	649,84
10	Belanja alat pengolahan tanah dan tanaman	24.210.000,00	21.902.500,00	90,47	22.855.000,00	(952.500,00)	(4,17)
11	Belanja alat-alat peternakan	0,00	0,00	0,00	15.390.000,00	(15.390.000,00)	(100,00)
12	Belanja alat prosesing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja alat produksi perikanan	0,00	0,00	0,00	4.981.900	(4.981.900,00)	(100,00)
14	Belanja alat pemeliharaan tanaman	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	(10.700.000,00)	(100,00)
15	Belanja alat panen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja mesin hitung/jumlah	10.510.000,00	5.760.000,00	54,8	8.036.000,00	(2.276.000,00)	(28,32)
17	Belanja alat penyimpanan perlengkapan kantor	65.520.000,00	65.520.000,00	100	3.100.000,00	62.420.000,00	2.013,55
18	Belanja office use	83.623.000,00	67.685.000,00	80,94	58.566.200,00	9.118.800,00	15,57
19	Belanja meubelair	1.237.022.700,00	1.110.599.118,00	89,78	1.579.704.694,72	(469.105.576,72)	(29,70)
20	Belanja alat pengukur waktu	22.330.000,00	36.365.000,00	162,85	4.363.000,00	32.002.000,00	733,49
21	Belanja alat pembersih	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	(1.950.000,00)	(100,00)
22	Belanja alat pendingin	76.455.000,00	93.199.500,00	121,9	60.655.500,00	32.544.000,00	53,65
23	Belanja alat dapur	194.346.894,00	162.107.050,00	83,41	150.711.700,00	11.395.350,00	7,56
24	Belanja home use	343.849.700,00	326.999.430,00	95,1	715.229.957,00	(388.230.527,00)	(54,28)
25	Belanja alat pemadam kebakaran	34.885.310,00	34.885.310,00	100	13.127.290,00	21.758.020,00	165,75
26	Belanja peralatan personal komputer	720.000,00	720.000,00	100	5.900.000,00	(5.180.000,00)	(87,80)
27	Belanja komputer unit/jaringan	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	(1.045.000,00)	(100,00)
28	Belanja peralatan jaringan	39.101.000,00	33.340.900,00	85,27	0,00	33.340.900,00	0,00
29	Belanja kursi rapat pejabat	0,00	0,00	0,00	58.567.713,00	(58.567.713,00)	(100,00)

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan	%
30	Belanja peralatan studio visual	900.000,00	875.000,00	97,22	8.300.000,00	(7.425.000,00)	(89,46)
31	Belanja peralatan studio video dan film	1.050.000,00	975.000,00	92,86	15.135.000,00	(14.160.000,00)	(93,56)
32	Belanja alat komunikasi telephone	4.009.400,00	3.250.000,00	81,06	440.000,00	2.810.000,00	638,64
33	Belanja alat kedokteran umum	1.808.949.443,00	1.715.579.858,00	94,84	311.275.365,00	1.404.304.493,00	451,15
34	Belanja alat kedokteran gigi	17.756.750,00	17.282.450,00	97,33	24.917.250,00	(7.634.800,00)	(30,64)
35	Belanja alat kedokteran mata	0,00	0,00	0,00	92.977.500,00	(92.977.500,00)	(100,00)
36	Belanja alat farmasi	143.000,00	140.000,00	97,9	1.340.625,00	(1.200.625,00)	(89,56)
37	Belanja alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	20.671.700,00	17.248.950,00	83,44	7.101.850,00	10.147.100,00	142,88
38	Belanja alat kesehatan anak	0,00	0,00	0,00	412.500,00	(412.500,00)	(100,00)
39	Belanja alat kedokteran gawat darurat	21.061.000,00	14.419.900,00	68,47	4.312.000,00	10.107.900,00	234,41
40	Belanja alat kesehatan perawatan	4.773.000,00	695.000,00	14,56	4.245.000,00	(3.550.000,00)	(83,63)
41	Belanja alat laboratorium microbiologi	1.175.000,00	979.000,00	83,32	1.000.000,00	(21.000,00)	(2,10)
42	Belanja alat laboratorium umum	131.485.719,00	100.036.840,00	76,08	20207000	79.829.840,00	395,06
43	Belanja alat laboratorium kedokteran	3.504.700,00	1.649.100,00	47,05	100.000,00	1.549.100,00	1.549,10
44	Belanja alat laboratorium kimia	40.957.500,00	39.374.500,00	96,14	12.999.250,00	26.375.250,00	202,90
45	Belanja alat laboratorium hematologi	705.800,00	658.000,00	93,23	15825000	(15.167.000,00)	(95,84)
46	Belanja alat peraga bidang studi Bahasa Indonesia	5.884.000,00	5.884.000,00	100	3576000	2.308.000,00	64,54
47	Belanja alat peraga bidang studi Matematika	70.218.350,00	69.903.950,00	99,55	495.000,00	69.408.950,00	14.022,01
48	Belanja alat peraga bidang studi IPA Dasar	196.851.400,00	196.622.200,00	99,88	7.655.000,00	188.967.200,00	2.468,55
49	Belanja alat peraga bidang studi IPA Lanjutan	7.840.000,00	7.840.000,00	100	28.254.250,00	(20.414.250,00)	(72,25)
50	Belanja alat peraga bidang studi IPA Menengah	16.559.250,00	16.559.250,00	100	384.000,00	16.175.250,00	4.212,30
51	Belanja alat peraga bidang studi IPS	125.120.000,00	123.775.200,00	98,93	3.200.000,00	120.575.200,00	3.767,98

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan	%
52	Belanja alat peraga bidang studi Agama Islam	325.000,00	325.000,00	100	5.756.500,00	(5.431.500,00)	(94,35)
53	Belanja alat peraga bidang studi Ketrampilan	879.000,00	879.000,00	100	39.304.700,00	(38.425.700,00)	(97,76)
54	Belanja alat peraga bidang studi Kesenian	4.877.200,00	4.877.200,00	100	10.257.750,00	(5.380.550,00)	(52,45)
55	Belanja alat peraga bidang studi Olah Raga	64.583.600,00	64.410.200,00	99,73	1.617.000,00	62.793.200,00	3.883,31
56	Belanja alat peraga/praktek kerja	16.388.900,00	16.388.900,00	100	600.000,00	15.788.900,00	2.631,48
57	Belanja alat laboratorium lingkungan	6.490.000,00	6.486.700,00	99,95	22.475.000,00	(15.988.300,00)	(71,14)
58	Belanja alat laboratorium penunjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Belanja bangunan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Belanja bangunan gedung tempat pendidikan	1.005.900,00	1.005.900,00	100	0,00	1.005.900,00	0,00
61	Belanja bangunan gedung instalasi	3.600.000,00	3.600.000,00	100	4.500.000,00	(900.000,00)	(20,00)
62	Belanja bangunan menara telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	31.851.000,00	(31.851.000,00)	(100,00)
63	Belanja tugu/tanda batas	300.000.000,00	300.000.000,00	100	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
64	Belanja rambu bersuar	0,00	0,00	0,00	197.997.800,00	(197.997.800,00)	(100,00)
65	Belanja rambu tidak bersuar	390.750.000,00	388.219.000,00	99,35	791.859.000,00	(403.640.000,00)	(50,97)
66	Belanja alat kesenian	65.200.000,00	64.755.000,00	99,32	7.895.000,00	56.860.000,00	720,20
67	Belanja binatang ikan	20.560.200,00	20.520.000,00	99,8	54.600.000,00	(34.080.000,00)	(62,42)
68	Belanja alat kesehatan olah raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Belanja buku agama	0,00	0,00	0,00	125.661.115,00	(125.661.115,00)	(100,00)
70	Belanja buku ilmu sosial	0,00	0,00	0,00	67.743.100,00	(67.743.100,00)	(100,00)
71	Belanja buku ilmu bahasa	0,00	0,00	0,00	105.897.100,00	(105.897.100,00)	(100,00)
72	Belanja buku matematika & pengetahuan alam	0,00	0,00	0,00	470.954.600,00	(470.954.600,00)	(100,00)
73	Belanja buku ilmu pengetahuan praktis	0,00	0,00	0,00	36.833.700,00	(36.833.700,00)	(100,00)
74	Belanja buku arsitektur, kesenian, olah raga	0,00	0,00	0,00	424.638.500,00	(424.638.500,00)	(100,00)
75	Belanja buku georafi, biografi, sejarah	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	(3.080.000,00)	(100,00)
76	Belanja peta	2.007.000,00	2.007.000,00	100	0,00	2.007.000,00	0,00
77	Belanja majalah	0,00	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)	(100,00)

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan	%
78	Belanja alat olah raga	17.400.000,00	17.040.000,00	97,93	2.700.000,00	14.340.000,00	531,11
79	Belanja buku umum	0,00	0,00	0,00	1.235.398.693,00	(1.235.398.693,00)	(100,00)
	JUMLAH	**5.621.499.916,00**	**5.273.442.656,00**	**93,81**	**7.216.375.767,72**	**(1.942.933.111,72)**	**(26,92)**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.3 Belanja Bunga	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pada Tahun 2020 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak memliki pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang yang mengharuskan dianggarkan dan direalisasikannya Belanja Bunga.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.4 Belanja Subsidi	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pada Tahun 2020 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak menganggarkan dan merealisasikan Belanja Subsidi.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.5 Belanja Hibah	**127.793.251.752,00**	**125.225.839.973,00**	**159.157.268.656,90**

Belanja Hibah meliputi :

a. Belanja Hibah pada PPKD merupakan belanja hibah dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melalui SKPD yang dianggarkan melalui belanja tidak langsung di PPKD sebesar Rp127.793.251.752,00. dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp125.225.839.973,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp159.157.268.656,90
b. Belanja Hibah barang yang diserahkan kepada Masyarakat/pihak ke tiga, merupakan belanja hibah berupa aset tetap yang dianggarkan melalui program/kegiatan (belanja langsung) SKPD sebesar Rp0,00 dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp12.689.034.051,90.
c. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga merupakan belanja barang/jasa yang dianggarkan di SKPD sebesar Rp0,00 dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

Anggaran dan realisasi sebesar Rp0,00 di tahun 2020 baik di Belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga di sebabkan reklasifikasi Belanja Hibah barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga ke Belanja Barang dan Jasa yang disesuaikan dengan struktur APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

d. Belanja Bantuan Partai Politik merupakan belanja bantuan yang diberikan kepada 10 Partai Politik yang ada di Kabupaten Lumajang dengan anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp1.069.827.348,00.
Sesuai dengan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur No.188/26031/013.4/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Lumajang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD TA 2020 untuk mengalihkan rekening Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ke Rekening Belanja Hibah, maka pada Belanja Hibah ada penambahan realisasi Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp1.069.827.348,00 akan tetapi anggarannya tetap melekat pada Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik.

Tabel 75. Rincian Realisasi Belanja Hibah
Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Hibah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Belanja Hibah Pada PPKD**	**127.793.251.752,00**	**125.225.839.973,00**	**97,99**	**146.468.234.605,00**	**(21.242.394.632,00)**	**(14,50)**
2	**Belanja Hibah Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.689.034.051,90**	**(12.689.034.051,90)**	**(100,00)**
	1) Belanja hibah peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	0,00	0,00	0,00	1.726.991.100,00	(1.726.991.100,00)	(100,00)
	2) Belanja hibah gedung dan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	0,00	0,00	0,00	243.741.750,00	(243.741.750,00)	(100,00)
	3) Belanja hibah jalan, irigasi, dan jaringan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	0,00	0,00	0,00	7.692.138.792,90	(7.692.138.792,90)	(100,00)
	4) Belanja hibah aset tetap lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	0,00	0,00	0,00	662.678.250,00	(662.678.250,00)	(100,00)
	5) Belanja hibah barang/jasa lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	0,00	0,00	0,00	2.263.627.159,00	(2.263.627.159,00)	(100,00)
	6) Belanja hibah aset lainnya yang	0,00	0,00	0,00	99.857.000,00	(99.857.000,00)	(100,00)

No	Belanja Hibah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
	diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD						
3	**Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Belanja Hibah	**127.793.251.752,00**	**125.225.839.973,00**	**97,99**	**159.157.268.656,90**	**(21.242.394.632,00)**	**(13,35)**

Tabel 76. Daftar Rincian Realisasi Hibah pada PPKD Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Hibah PPKD	Realisasi 2020	Realisasi 2019
I	**Belanja Hibah pada Pemerintah Pusat**	**0,00**	**500.000.000,00**
1	Belanja Hibah kepada Polres untuk pengamanan Pilkades serentak	0,00	500.000.000,00
II	**Belanja Hibah pada Masyarakat**	**118.435.523.240,00**	**136.039.150.000,00**
	DINAS PENDIDIKAN		
1	Operasional Penyelenggaraan PAUD DAK Non Fisik	20.784.900.000,00	20.932.200.000,00
2	Hibah BOSDA MADIN untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (Dinas Pendidikan)	8.834.400.000,00	8.835.000.000,00
3	Hibah kepada sekolah swasta (Honor Guru Non NIP)	36.011.000.000,00	32.408.500.000,00
4	Akademi Komunitas Negeri Lumajang	0,00	2.000.000.000,00
5	Hibah Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 (Dindik)	18.000.000,00	32.000.000,00
6	Hibah BOSDA untuk SD/MI/SMP dan MTs Swasta, Upah/Ongkos Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS Jenjang KB.TK SD dan SMP , hibah kepada lembaga pendidikan	0,00	6.619.850.000,00
7	Hibah kepada Komite Sekolah SMA/SMK/MA/PK-PLK Negeri Swasta (Dinas Pendidikan)	10.850.400.000,00	32.107.050.000,00
8	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	3.915.200.000,00	3.502.650.000,00
9	Hibah Bidang Pendidikan Kepada 29 Lembaga PKBM untuk Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Tahun 2019 (Dinas Pendidikan)	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00
10	Hibah Kepada Masyarakat (Bidang Pendidikan) Pendamping BOSDA untuk SD.MI.SMP.MTs Swasta se Kabupaten Lumajang	9.474.500.000,00	9.287.150.000,00
11	Hibah Bidang Pendidikan untuk Lembaga Sekolah Swasta	5.575.000.000,00	0,00
12	Hibah bidang Pendidikan untuk POLITEKNIK Negri Malang Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknis Malang Tahun	2.000.000.000,00	0,00

No	Hibah PPKD	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	2020		
13	Hibah Kepada Masyarakat (Bidang Pendidikan) DAK Fisik 2019 untuk SMP Muhammadiyah 02 Jatiroto	0,00	98.750.000,00
	BAGIAN KESRA		
14	Hibah kepada Yayasan / Ponpes / Organisasi Keagamaan /Tempat Ibadah	2.360.000.000,00	3.240.000.000,00
15	Hibah LPTQ Kecamatan (Honor Guru Ngaji) Se Kab Lumajang	7.668.000.000,00	7.668.000.000,00
16	Hibah Kepada Kel. Masyrakat - Rukun Kematian (Rukem)	2.098.000.000,00	693.500.000,00
	DINAS PARIWISATA		
17	Hibah Bidang Perekonomian untuk 14 Pelaku Usaha Pariwisata Tahun 2020.	576.623.240,00	0,00
18	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian dan Pariwisata	545.000.000,00	0,00
19	Hbah Bidang Kesenian dan Pariwisata Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Lumajang Tahun 2020	165.000.000,00	0,00
20	Hibah Kepada Masyarakat (Bidang Kesenian) untuk Pokdarwis,Paguyuban Karawitan, Seni Reog Suromenggolo, kelompok masayarakat bidang kesenian (Dinas Periwisata)	0,00	847.000.000,00
21	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**		
22	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) (Bidang ekonomi) untuk Infrastruktur (Dinas PUTR)	0,00	3.840.000.000,00
23	Hbah Kepada Masyarakat (POKMAS) Bidang Perekonomian dalam Bentuk Padat karya untuk Pemulihan Perekonomian Nasional Tahun 2020	2.950.000.000,00	0,00
24	**DINAS KOPERASI DAN UM**		
25	Hibah Bidang Perekonomian untuk 1 Koperasi dan 17 Kelompok Masyarakat Tahun 2020	650.000.000,00	0,00
26	Hibah Kepada Msyarakat Bidang Perekonomian bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat /Usaha Tahun 2020	2.812.000.000,00	0,00
27	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan (Bidang Ekonomi) dan penguatan modal koperasi (Dinas Koperasi & UM)	0,00	2.410.000.000,00
	DINAS PERTANIAN		
28	Hibah Untuk Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Pertanian .10 Kelompok Tani Tahun 2019 (Dinas Pertanian)	0,00	290.000.000,00
29	**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**		
30	Hibah Bidang Kesehatan untuk Sanitasi Lingkungan di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2020	50.000.000,00	0,00

No	Hibah PPKD	Realisasi 2020	Realisasi 2019
31	Hibah Kepada Masyarakat (Bidang Ekonomi) untuk Infrstruktur Lingkungan Kelurahan Tahun 2019 (DPKP)	0,00	140.000.000,00
	DINAS PERIKANAN		
32	Hibah Sarana Produksi Perikanan untuk kelompok NILA SARI Tahun 2020	10.000.000,00	0,00
III	**Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan**	**6.915.000.000,00**	**10.130.000.000,00**
1	Belanja Hibah kepada GOW (Badan kesbangpol)	50.000.000,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan (Badan Kesbangpol)	50.000.000,00	0,00
3	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan (PDPM) Pimpunan Daerah Pemuda Muhammadiyah Taun 2020	200.000.000,00	0,00
4	Belanja Hibah PAC Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Pronojiwo	30.000.000,00	0,00
5	Belanja Hibah kepada KONI (DISPORA)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
6	Belanja Hibah kepada Pramuka (DISPORA)	1.400.000.000,00	475.000.000,00
7	Hibah bidang pemuda dan olah raga untuk 5 kelompok masyarakat.	85.000.000,00	0,00
8	PSHT (DISPORA)	0,00	200.000.000,00
9	KAHMI (DISPORA)	0,00	300.000.000,00
10	IKA-PMII (DISPORA)	0,00	300.000.000,00
11	PWRI (BADAN KESBANGPOL)	0,00	100.000.000,00
12	LVRI (BADAN KESBANGPOL)	0,00	20.000.000,00
13	ORARI (BADAN KESBANGPOL)	0,00	15.000.000,00
14	RAPI (BADAN KESBANGPOL)	0,00	15.000.000,00
15	GP Ansor (BADAN KESBANGPOL)	0,00	220.000.000,00
16	KB-PII (BADAN KESBANGPOL)	0,00	200.000.000,00
17	DHC 45 (BADAN KESBANGPOL)	0,00	15.000.000,00
18	Pemuda Pancasila	0,00	175.000.000,00
19	Bankom 734 (BADAN KESBANGPOL)	0,00	40.000.000,00
20	Belanja Hibah kepada PMI (DINAS SOSIAL)	1.100.000.000,00	650.000.000,00
21	Belanja Hibah kepada GNOTA (DINAS SOSIAL)	0,00	100.000.000,00
22	Belanja Hibah kepada MUI (BAGIAN KESRA)	0,00	100.000.000,00
23	Belanja Hibah kepada BAZ (BAGIAN KESRA)	0,00	130.000.000,00
24	Dewan Pendidikan Kabupaten Lumajang (DINAS PENDIDIKAN)	0,00	50.000.000,00
25	Hibah Kepada NU (DINAS KESEHATAN)	0,00	2.000.000.000,00
26	Hibah Kepada Muhammadiyah (DINAS KESEHATAN)	0,00	1.000.000.000,00
27	Hibah kepada Mualimat (Oro-oro Ombo)	0,00	25.000.000,00
	Jumlah Hibah PPKD	**125.350.523.240,00**	**146.669.150.000,00**
IV	**Pengembalian (Contra Post):**		
1	Setor kembali Hibah Honor Guru Non NIP (Dinas Pendidikan)	(55.000.000,00)	0,00

No	Hibah PPKD	Realisasi 2020	Realisasi 2019
2	Setro Kembali Kelebihan atas Dana Hibah Operasional PAUD (Dinas Pendidikan)	(8.400.000,00)	0,00
3	Setor Kembali Hibah Bidang Pendidikan	0,00	(20.000.000,00)
4	Setor kembali Hibah kepada Rukem (bagian Kesra)	(5.000.000,00)	0,00
5	Setor Kembali Hibah bidang Pendidikan untuk POLITEKNIK Negri Malang Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknis Malang Tahun 2020	(56.283.267,00)	0,00
6	Akademi Komunitas Negeri Lumajang	0,00	(179.546.565,00)
7	Pramuka	0,00	(1.368.830,00)
	Jumlah pengembalian belanja hibah	**(124.683.267,00)**	**(200.915.395,00)**
	Jumlah Hibah PPKD	**125.225.839.973,00**	**146.468.234.605,00**

Tabel 77. Daftar Rincian Realisasi Belanja Operasi – Hibah Barang Yang Diserahkan pada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	**Belanja hibah peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD**				
	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	897.954.200,00
	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	829.036.900,00
	(Jumlah 1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.726.991.100,00**
2	**Belanja hibah gedung dan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD**				
	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	49.543.000,00
	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	194.198.750,00
	(Jumlah 2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.741.750,00**
3	**Belanja hibah jalan, irigasi, dan jaringan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD**				
	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	3.854.871.992,90
	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	3.715.305.800,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kelurahan Ditotrunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kelurahan Rogotrunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kelurahan Citrodewangsan	0,00	0,00	0,00	121.961.000,00
	(Jumlah 3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.692.138.792,90**

No	Nama SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
4	**Belanja hibah aset tetap lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD**				
	Dinas Pendidikan - Bidang PAUD & Pendidikan Masayarakat	0,00	0,00	0,00	85.610.250,00
	Dinas Pendidikan - Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan	0,00	0,00	0,00	129.260.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	164.808.000,00
	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	283.000.000,00
	(Jumlah 4)	0,00	**0,00**	**0,00**	**662.678.250,00**
5	**Belanja hibah barang/jasa lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD**				
	Dinas Pendidikan - Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan	0,00	0,00	0,00	24.993.559,00
	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	965.947.500,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	937.041.100,00
	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	335.645.000,00
	(Jumlah 5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.263.627.159,00**
6	**Belanja hibah aset lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD**				
	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	99.857.000,00
	Dinas Pendidikan - Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Jumlah 6)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.857.000,00**
	(Jumlah (1) s/d 6)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.689.034.051,90**

Tabel 78. Daftar Rincian Realisasi Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan Daftar Rincian Realisasi Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan Belanja Partai PolotikTahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
I	**Rincian Realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat**				
1	Dinas Pendidikan-Sekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Pendidikan – Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pemberdayaan masayarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Setda-Bagian Kesra	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kelurahan Citrodewangsan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kelurahan Ditotrunan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kelurahan Jogotrunan	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kelurahan Jogoyudan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kelurahan Rogotrunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.6 Belanja Bantuan Sosial	**62.078.956.767,00**	**56.568.658.101,00**	**54.895.923.459,00**

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp62.078.956.767,00 terealisasi sebesar Rp56.568.658.101,00.

Tabel 79. Daftar Realisasi Belanja Operasi – Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Bantuan Sosial	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan Penurunan)	%
1	Belanja bantuan sosial pada PPKD	62.078.956.767,00	56.568.658.101,00	91,12	54.585.459.459,00	1.983.198.642,00	3,63
2	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga (Dinas Sosial)	0,00	0,00	0,00	310.464.000,00	(310.464.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**62.078.956.767,00**	**56.568.658.101,00**	**91,12**	**54.895.923.459,00**	**1.672.734.642,00**	**3,05**

Tabel 80. Belanja Bantuan Sosial pada PPKD Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Ket.
I	**Bentuan Sosial Pada Perorangan / Keluarga / Masayarakat**					
1	Bantuan Sosial - Pendamping Program Kotaku (Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Padat dan Kumuh Perkotaan)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	DPKP
2	Bantuan Sosial untuk Rehab Rumah Masayarakat Miskin (Rumah Tidak Layak Huni / RTLH)	3.155.000.000,00	3.145.000.000,00	99,68	9.920.000.000,00	DPKP
3	Bantuan Sosial untuk Rehab Rumah Masayarakat Miskin (Rumah Swadaya Kelurahan) - DAK Perumahan	3.937.500.000,00	3.937.500.000,00	100,00	3.027.500.000,00	DPKP
4	Bantuan Sosial untuk Sanitasi Masyarakat (DAK Sanitasi)	6.040.256.000,00	6.040.256.000,00	100,00	4.164.250.000,00	DPKP
5	Bantusan Sosial Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin (Pamsimas)	7.035.000.000,00	6.877.000.000,00	97,75	2.833.000.000,00	DPKP
6	Bantuan Sosial untuk Program AIR MINUM dan SANITASI Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	0,00	0,00	0,00	737.955.000,00	Dinas PUTR
7	Bantuan Sosial untuk Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tak mampu Kabupaten Lumajang	3.182.400.000,00	2.923.200.000,00	91,86	871.200.000,00	Dinas Sosial
8	Bantuan Sosial Untuk Tenaga Kontrak Yang Purna Tugas	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	BKD
9	Bantusn Sosial Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Pendamping Feminisasi Kemiskinan)	0,00	0,00	0,00	697.500.000,00	DPM
10	Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan (Santunan Kematian, Bantuan Korban Kebakaran, Bantuan Pengobatan, Bantuan biaya persalinan gratis, dll)	10.500.000.000,00	10.517.317.000,00	100,16	9.466.304.000,00	Dinas Sosial
11	Bansos untuk Bantuan Kesehatan masayarakat Miskin dan Jampersal daerah	4.500.000.000,00	1.816.424.445,00	40,36	1.815.577.459,00	Dinkes
	Jumlah Bansos Kepada Pererorangan/Keluarga/Masyarakat	**38.870.156.000,00**	**35.776.697.445,00**	**92,04**	**35.533.286.459,00**	
II	**Bansos Kepada Lembaga Non Pemerintah**					
1	Bantuan Sosial untuk Lembaga Non Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar LKSA / Panti Asuhan	2.248.400.000,00	2.207.500.000,00	98,18	1.549.425.000,00	Dinas Sosial
2	Bantuan sarana LKSA dan Bantuan Masyarakat Miskin (Panti Asuhan)	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Dinas Sosial

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Ket.
3	Belanja bantuan sosial pada PPKD, Bantuan Sosial untuk Pembangunan LKSA ,	940.000.000,00	922.500.000,00	98,14	315.000.000,00	Dinas Sosial
4	Bansos Karang taruna	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Dinas Sosial
5	Bantuan Sosial untukPembangunan Rehap Asrama LKSA pada Lembaga Kesejahteran Anak Darul Falah Desa Denok	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Dinas Sosial
6	Iuran BPJS Kesehatan PBI-D Kab Lumajang	20.020.400.767,00	17.896.060.656,00	89,39	17.171.248.000,00	Dinkes
	Jumlah Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah	**23.208.800.767,00**	**21.026.060.656,00**	**90,60**	**19.214.673.000,00**	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	**62.078.956.767,00**	**56.802.758.101,00**	**91,50**	**54.747.959.459,00**	
III	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga (Dinas Sosial)	0,00	0,00	0,00	**310.464.000,00**	Dinas Sosial
IV	**Contra Post (Pengembalian) :**					
	1. Santunan Kematian	0,00	43.000.000,00	0,00	162.500.000,00	
	2. Pengembalian biaya rujukan RSUD dr. Subandi	0,00	171.100.000,00	0,00	0,00	
	3. Pengembalian Bamsos RTLH	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah pengembalian	**0,00**	**234.100.000,00**	**0,00**	**162.500.000,00**	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Pada PPKD (setelah contra post)	**62.078.956.767,00**	**56.568.658.101,00**	**91,12**	**54.895.923.459,00**	

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.7 Belanja Bantuan Keuangan Parpol	**1.069.827.349,00**	**1.069.827.348,00**	**1.000.162.612,00**

Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2020 terealisasi 100% sebesar Rp1.069.827.348,00**.**

Tabel 81. Daftar Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Partai Politik	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Partai HANURA	35.292.140,00	35.292.139,00	100,00	0,00
2	Partai GERINDRA	165.331.185,00	165.331.185,00	100,00	131.288.405,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	75.135.384,00	75.135.384,00	100,00	72.066.658,00
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	19.330.104,00	19.330.104,00	100,00	46.696.494,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	214.726.557,00	214.726.557,00	100,00	185.535.422,00
6	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	80.672.355,00	80.672.355,00	100,00	76.279.584,00
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	90.303.350,00	90.303.350,00	100,00	75.999.360,00

No	Partai Politik	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	201.080.406,00	201.080.406,00	100,00	205.463.617,00
9	Partai Demokrat	104.126.956,00	104.126.956,00	100,00	132.645.312,00
10	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	83.828.912,00	83.828.912,00	100,00	74.187.760,00
	Jumlah	**1.069.827.349,00**	**1.069.827.348,00**	**100,00**	**1.000.162.612,00**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2. Belanja Modal	**215.354.341.154,31**	**198.145.592.481,26**	**247.326.031.850,58**

Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Total realisasi belanja modal Tahun 2020 sebesar Rp198.145.592.481,26 atau 92,01% dari anggaran sebesar Rp215.354.341.154,31 terinci sebagai berikut:

Tabel 82. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Modal Tanah	766.852.900,00	747.987.360,00	97,54	8.308.200,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.926.729.040,00	61.177.461.037,90	87,49	73.189.412.867,28
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.995.497.778,43	23.973.023.775,62	92,22	50.042.478.059,87
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	106.919.970.137,00	101.925.745.491,74	95,33	104.177.050.289,43
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.483.862.450,00	6.346.598.272,00	97,88	12.170.465.133,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	5.261.428.848,88	3.974.776.544,00	75,55	7.738.317.301,00
	Jumlah Belanja Modal	**215.354.341.154,31**	**198.145.592.481,26**	**92,01**	**247.326.031.850,58**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2.1 Belanja Modal Tanah	**766.852.900,00**	**747.987.360,00**	**8.308.200,00**

Belanja Modal Tanah Tahun 2020 dianggarkan pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan dan BPKD untuk biaya pensertifikatan tanah, terinci sebagai berikut:

Tabel 83. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Modal Tanah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal	30.979.000,00	21.826.360,00	70,46	1.248.000,00
2	Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	735.813.900,00	726.161.000,00	98,69	5.685.200,00
3	Belanja modal tanah kosong	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja modal tanah untuk bangunan jalan dan jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja modal tanah untuk bangunan jalan	60.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00
	Jumlah	**766.852.900,00**	**747.987.360,00**	**97,54**	**8.308.200,00**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2.2 Belanja Modal Peralatan & Mesin	**69.926.729.040,00**	**61.177.461.037,90**	**73.189.412.867,28**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp69.926.729.040,00 terealisasi sebesar 87,49% atau sebesar 61.177.461.037,90 terinci sebagai berikut:

Tabel 84. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja modal compacting equipment	0,00	0,00	0,00	594.000.000,00
2	Belanja modal aggragate & concrete equipment	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja modal loader	0,00	0,00	0,00	629.529.900,00
4	Belanja modal electric generating set	964.898.203,00	944.291.500,00	97,86	938.217.670,00
5	Belanja modal pompa	113.037.200,00	82.618.875,00	73,09	424.460.500,00
6	Belanja modal unit pemeliharaan lapangan	20.000.000,00	19.775.000,00	98,88	79.200.000,00
7	Belanja modal kendaraan bermotor perorangan	500.000.000,00	469.000.000,00	93,80	411.590.000,00
8	Belanja modal kendaraan bermotor berpenumpang	436.738.000,00	417.145.500,00	95,51	1.227.163.800,00
9	Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang	1.189.277.150,00	1.113.925.401,00	93,66	1.061.142.400,00
10	Belanja modal kendaraan bermotor khusus	3.680.935.400,00	3.208.229.600,00	87,16	3.546.604.900,00
11	Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua	436.750.000,00	423.802.999,00	97,04	723.434.800,00
12	Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga	177.500.000,00	170.500.000,00	96,06	114.850.000,00

No	Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
13	Belanja modal kendaraan tak bermotor angkutan barang	336.076.080,00	300.138.740,00	89,31	445.085.000,00
14	Belanja modal perkakas bengkel listrik	0,00	0,00	0,00	20.943.450,00
15	Belanja modal perkakas bengkel khusus	0,00	0,00	0,00	106.535.380,00
16	Belanja modal perkakas bengkel listrik	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
17	Belanja modal perkakas standar (standart tool)	0,00	0,00	0,00	11.825.000,00
18	Belanja modal perkakas bengkel kerja	0,00	0,00	0,00	4.039.000,00
19	Belanja modal alat ukur universal	14.800.000,00	14.600.000,00	98,65	22.062.000,00
20	Belanja modal alat ukur/test klinis lain	0,00	0,00	0,00	9.680.000,00
21	Belanja modal alat ukur/pembanding	0,00	0,00	0,00	3.630.000,00
22	Belanja modal alat ukur lainnya	78.891.000,00	59.891.000,00	75,92	371.156.000,00
23	Belanja modal alat timbangan	2.300.000,00	1.945.000,00	84,57	5.226.700,00
24	Belanja modal alat pengolahan tanah dan tanaman	62.930.000,00	62.775.400,00	99,75	36.057.886,00
25	Belanja modal alat-alat peternakan	0,00	0,00	0,00	168.564.000,00
26	Belanja modal alat laboratorium pertanian	0,00	0,00	0,00	39.979.500,00
27	Belanja modal alat prosesing	0,00	0,00	0,00	79.196.700,00
28	Belanja modal alat produksi perikanan	0,00	0,00	0,00	26.917.000,00
29	Belanja modal alat pemeliharaan tanaman	86.345.630,00	83.202.730,00	96,36	75.454.650,00
30	Belanja modal alat penyimpanan	0,00	0,00	0,00	45.593.525,00
31	Belanja modal mesin hitung/jumlah	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
32	Belanja modal alat reproduksi (pengganda)	29.645.000,00	28.645.000,00	96,63	141.715.000,00
33	Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor	1.474.121.814,00	1.435.961.800,00	97,41	2.399.880.480,00
34	Belanja modal office use	4.127.234.688,00	3.931.054.785,30	95,25	5.767.965.359,00
35	Belanja modal meubelair	2.597.912.010,00	2.035.821.220,00	78,36	3.239.374.857,28
36	Belanja modal alat pembersih	100.033.179,00	96.332.100,00	96,30	1.571.342.100,00
37	Belanja modal alat pendingin	1.549.248.044,00	1.238.810.660,00	79,96	1.323.606.514,00
38	Belanja modal alat dapur	153.625.908,00	122.727.500,00	79,89	32.110.000,00
39	Belanja modal home use	2.943.343.284,00	2.391.465.052,00	81,25	3.392.324.335,00
40	Belanja modal alat pemadam kebakaran	94.367.500,00	90.668.500,00	96,08	144.319.540,00
41	Belanja modal komputer unit/jaringan	668.280.600,00	499.555.800,00	74,75	1.952.968.700,00
42	Belanja modal personal komputer	8.726.850.906,00	8.551.429.080,00	97,99	12.176.044.420,00
43	Belanja modal peralatan komputer mainframe	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	99.000.000,00
44	Belanja modal peralatan personal komputer	2.216.047.706,00	2.167.246.926,00	97,80	3.663.460.020,00
45	Belanja modal peralatan jaringan	915.795.970,00	894.396.605,60	97,66	2.374.392.000,00
46	Belanja modal meja kerja pejabat	60.292.500,00	56.225.000,00	93,25	28.100.000,00
47	Belanja modal meja rapat pejabat	19.965.000,00	19.900.000,00	99,67	14.553.000,00
48	Belanja modal kursi kerja pejabat	116.866.018,00	115.068.000,00	98,46	103.415.000,00
49	Belanja modal kursi rapat pejabat	18.240.000,00	18.000.000,00	98,68	18.994.800,00

No	Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
50	Belanja modal kursi tamu di ruangan pejabat	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
51	Belanja modal lemari arsip pejabat	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
52	Belanja modal peralatan studio visual	215.000.000,00	214.062.000,00	99,56	102.410.000,00
53	Belanja modal peralatan studio video dan film	77.200.000,00	77.125.000,00	99,90	0,00
54	Belanja modal alat komunikasi telephone	5.952.870.582,00	5.916.736.900,00	99,39	1.497.487.000,00
55	Belanja modal alat komunikasi radio SSB	0,00	0,00	0,00	77.775.000,00
56	Belanja modal alat komunikasi radio HF/FM	0,00	0,00	0,00	265.378.000,00
57	Belanja modal alat komunikasi radio VHF	62.675.000,00	26.070.000,00	41,60	235.960.500,00
58	Belanja modal alat lomunikasi radio UHF	0,00	0,00	0,00	54.450.000,00
59	Belanja modal alat komunikasi sosial	0,00	0,00	0,00	74.910.000,00
60	Belanja modal alat-alat sandi	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00
61	Belanja modal peralatan pemancar UHF	130.200.000,00	124.080.000,00	95,30	3.850.000,00
62	Belanja modal peralatan antena VHF/FM	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
63	Belanja modal peralatan antena UHF	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
64	Belanja modal alat kedokteran umum	9.755.044.536,00	7.467.162.322,00	76,55	12.235.687.118,00
65	Belanja modal alat kedokteran gigi	460.515.250,00	431.635.461,00	93,73	701.570.250,00
66	Belanja modal alat kedokteran mata	10.505.000,00	10.322.500,00	98,26	2.709.515.578,00
67	Belanja modal alat kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	66.769.098,00
68	Belanja modal alat rontgen	0,00	0,00	0,00	392.551.400,00
69	Belanja modal alat farmasi	1.484.657.100,00	1.236.655.616,00	83,30	266.567.410,00
70	Belanja modal alat kedokteran bedah	4.093.070.914,00	2.657.386.700,00	64,92	2.518.543.989,00
71	Belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	321.298.441,00	239.590.500,00	74,57	103.159.000,00
72	Belanja modal alat kedokteran bagian penyakit dalam	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00
73	Belanja modal mortuary	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00
74	Belanja modal alat kesehatan anak	1.333.671.000,00	1.022.423.050,00	76,66	38.005.000,00
75	Belanja modal alat bantu penderita cacat tubuh	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	1.750.000,00
76	Belanja modal alat kedokteran jantung	2.562.926.000,00	2.353.300.000,00	91,82	110.128.843,00
77	Belanja modal alat kedokteran radiologi	5.557.583.000,00	4.845.547.750,00	87,19	10.450.000,00
78	Belanja modal alat kedokteran gawat darurat	432.136.000,00	184.724.365,00	42,75	115.662.500,00
79	Belanja modal alat kedokteran patologi klinik	0,00	0,00	0,00	570.248.000,00
80	Belanja modal alat kedokteran rehab medis	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00
81	Belanja modal alat kesehatan perawatan	186.000.000,00	165.670.500,00	89,07	25.389.000,00
82	Belanja modal alat kesehatan olah raga	10.830.000,00	9.000.000,00	83,10	44.600.000,00
83	Belanja modal alat laboratorium microbiologi	0,00	0,00	0,00	5.545.500,00

No	Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
84	Belanja modal alat laboratorium mekanik tanah dan batuan	0,00	0,00	0,00	131.560.000,00
85	Belanja modal alat laboratorium umum	1.368.494.981,00	1.331.624.200,00	97,31	142.308.450,00
86	Belanja modal alat laboratorium kedokteran	291.459.944,00	247.467.500,00	84,91	98.265.600,00
87	Belanja modal alat laboratorium kimia	401.580.900,00	389.553.000,00	97,00	25.422.500,00
88	Belanja modal alat laboratorium patologi	323.830.000,00	282.867.200,00	87,35	0,00
89	Belanja modal alat laboratorium hematologi	368.524.452,00	328.043.000,00	89,02	75.000.000,00
90	Belanja modal alat laboratorium hematologi & urinalisis A	0,00	0,00	0,00	210.610.000,00
91	Belanja modal alat peraga bidang studi Matematika	8.717.500,00	8.704.300,00	99,85	4.810.000,00
92	Belanja modal alat peraga bidang studi IPA Dasar	52.363.000,00	51.800.000,00	98,92	13.110.000,00
93	Belanja modal alat peraga bidang studi IPA Menengah	4.038.000,00	4.031.500,00	99,84	19.150.000,00
94	Belanja modal alat peraga bidang studi IPS	8.000.000,00	7.986.000,00	99,83	1.450.000,00
95	Belanja modal alat peraga bidang studi Ketrampilan	1.550.000,00	1.542.250,00	99,50	0,00
96	Belanja modal alat peraga bidang studi Kesenian	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
97	Belanja modal alat peraga bidang studi Olah Raga	52.584.600,00	51.206.650,00	97,38	61.565.600,00
98	Belanja modal alat peraga/praktek kerja	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	797.500,00
99	Belanja modal proteksi lingkungan	380.754.050,00	378.823.000,00	99,49	0,00
100	Belanja modal alat laboratorium kualitas air dan tanah	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00
101	Belanja modal alat laboratorium lingkungan	0,00	0,00	0,00	178.794.220,00
102	Belanja modal alat keamanan	16.200.000,00	16.170.000,00	99,81	74.999.925,00
103	Belanja Modal Instalasi Air Buangan RS	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**69.926.729.040,00**	**61.177.461.037,90**	**87,49**	**73.189.412.867,28**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2.3 BelanjaModal Gedung Dan Bangunan	**25.995.497.778,43**	**23.973.023.775,62**	**50.042.478.059,87**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp25.995.497.778,43 terealisasi sebesar 92,22% atau sebesar Rp23.973.023.775,62 terinci sebagai berikut:

Tabel 85. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja modal bangunan gedung kantor	3.745.667.661,43	3.234.747.632,29	86,36	6.583.390.875,85
2	Belanja modal bangunan gudang	451.100.000,00	369.772.500,00	81,97	208.743.200,50
3	Belanja modal bangunan gedung instalasi	203.025.000,00	123.291.304,00	60,73	278.229.000,00
4	Belanja modal bangunan gedung laboratarium	0,00	0,00	0,00	318.170.000,00
5	Belanja modal bangunan kesehatan	6.810.725.412,00	6.067.547.167,00	89,09	13.589.109.200,41
6	Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah	140.400.000,00	139.766.000,00	99,55	223.994.402,00
7	Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan	0,00	0,00	0,00	194.551.788,00
8	Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan	7.389.969.650,00	7.342.782.000,00	99,36	13.419.478.319,98
9	Belanja modal bangunan gedung tempat olah raga	1.737.154.000,00	1.652.703.666,33	95,14	1.826.706.715,00
10	Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar	1.384.488.838,00	1.356.581.139,00	97,98	5.745.250.356,50
11	Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga	0,00	0,00	0,00	31.820.000,00
12	Belanja modal bangunan gedung garasi/pool	162.000.000,00	160.502.000,00	99,08	74.475.000,00
13	Belanja modal bangunan gedung pemotongan hewan	18.500.000,00	0,00	0,00	568.911.620,54
14	Belanja modal bangunan gedung perpustakaan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	553.962.700,00

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
15	Belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandar	0,00	0,00	0,00	3.531.900,00
16	Belanja modal bangunan pengujian kelaikan	234.268.000,00	231.913.000,00	98,99	159.108.000,00
17	Belanja modal bangunan taman/wisata/rekreasi	3.097.976.667,00	2.705.493.694,00	87,33	3.300.809.181,09
18	Belanja modal rumah negara golongan I	200.000.000,00	189.501.375,00	94,75	2.079.181.300,00
19	Belanja modal rumah negara golongan II	35.700.000,00	35.503.423,00	99,45	0,00
20	Belanja modal rumah negara golongan III	0,00	0,00	0,00	279.450.800,00
21	Belanja modal mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan	200.000.000,00	191.010.375,00	95,51	0,00
22	Belanja modal asrama	0,00	0,00	0,00	126.269.200,00
23	Belanja modal bangunan menara telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	51.134.500,00
24	Belanja modal tugu peringatan lainnya	105.122.550,00	102.889.000,00	97,88	0,00
25	Belanja modal rambu bersuar	71.700.000,00	64.469.500,00	89,92	297.421.000,00
26	Belanja modal rambu tidak bersuar	3.700.000,00	550.000,00	14,86	128.779.000,00
	Jumlah	**25.995.497.778,43**	**23.973.023.775,62**	**92,22**	**50.042.478.059,87**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2.4 Belanja Modal Jalan & Jaringan	**106.919.970.137,00**	**101.925.745.491,74**	**104.177.050.289,43**

Belanja Modal Jalan dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp106.919.970.137,00 terealisasi sebesar 95,33% atau sebesar Rp101.925.745.491,74 terinci sebagai berikut:

Tabel 86. Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jarungan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja modal jalan kabupaten/kota	33.701.243.800,00	32.353.222.638,00	96,00	78.824.975.275,69
2	Belanja modal jalan desa	0,00	0,00	0,00	192.877.200,00
3	Belanja modal penunjang jalan kabupaten/kota	41.884.810.402,00	41.683.389.805,34	99,52	8.985.872.587,47
4	Belanja modal jembatan kabupaten/kota	1.973.110.000,00	1.762.720.000,00	89,34	81.245.000,00
5	Belanja modal bangunan pengambil irigasi	5.015.896.000,00	4.964.285.800,00	98,97	1.233.707.700,00
6	Belanja modal bangunan pembawa irigasi	9.370.046.000,00	9.276.646.000,00	99,00	2.429.263.600,00
7	Belanja modal bangunan pengaman irigasi	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	394.458.000,00
8	Belanja modal bangunan pelengkap irigasi	2.550.820.000,00	1.904.754.200,00	74,67	5.727.653.097,27
9	Belanja modal bangunan pengaman pengamanan sungai	2.592.899.000,00	2.566.343.500,00	98,98	1.481.125.300,00
10	Belanja modal bangunan pelengkap pengamanan sungai	2.012.979.335,00	1.992.673.500,00	98,99	1.237.214.650,00
11	Belanja modal bangunan pengambil air bersih/baku	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
12	Belanja modal bangunan air tawar	460.988.000,00	364.117.000,00	78,99	102.736.000,00
13	Belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya	0,00	0,00	0,00	326.567.320,00
14	Belanja modal instalasi pengolahan sampah organik	30.000.000,00	29.788.000,00	99,29	472.607.709,00
15	Belanja modal instalasi jaringan pipa gas	200.000.000,00	199.954.370,00	99,98	317.789.450,00
16	Belanja modal instalasi pengaman penangkal petir	100.180.000,00	99.841.500,00	99,66	91.960.000,00
17	Belanja modal jaringan distribusi	1.347.879.600,00	1.308.186.038,40	97,06	2.252.997.400,00
18	Belanja modal instalasi pengolahan limbah medis	5.577.268.000,00	3.319.250.000,00	59,51	0,00
19	Belanja modal jaringan internet	100.600.000,00	99.323.140,00	98,73	0,00
	Jumlah	**106.919.970.137,00**	**101.925.745.491,74**	**95,33**	**104.177.050.289,43**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2.5 BelanjaModal Aset Tetap Lainnya	**6.483.862.450,00**	**6.346.598.272,00**	**12.170.465.133,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp6.483.862.450,00 terealisasi sebesar 97,88% atau sebesar Rp6.346.598.272,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 87. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja modal buku umum	1.963.073.450,00	1.950.884.072,00	99,38	3.248.424.155,00
2	Belanja modal buku filsafat	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	11.640.800,00
3	Belanja modal buku agama	118.773.700,00	114.724.500,00	96,59	607.064.782,00
4	Belanja modal buku ilmu sosial	40.966.200,00	40.966.200,00	100,00	190.005.900,00
5	Belanja modal buku ilmu bahasa	505.290.100,00	491.171.600,00	97,21	717.172.682,00
6	Belanja modal buku matematika & pengetahuan alam	391.137.900,00	376.462.100,00	96,25	1.295.801.450,00
7	Belanja modal buku ilmu pengetahuan praktis	602.000,00	602.000,00	100,00	21.860.000,00
8	Belanja modal buku arsitektur, kesenian, olah raga	306.925.100,00	284.815.100,00	92,80	1.329.856.550,00
9	Belanja modal buku georafi, biografi, sejarah	0,00	0,00	0,00	20.143.300,00
10	Belanja modal buku tematik K13	1.289.925.500,00	1.243.077.800,00	96,37	4.012.641.664,00
11	Belanja modal film bergerak dan rekaman video	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
12	Belanja modal alat kesenian	701.408.500,00	681.275.900,00	97,13	463.433.850,00
13	Belanja modal alat olah raga	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
14	Belanja modal alat permainan	0,00	0,00	0,00	38.150.000,00
15	Belanja modal alat olah raga lainnya	908.760.000,00	905.969.000,00	99,69	205.070.000,00
16	Belanja modal tanaman holtikultura	200.000.000,00	199.650.000,00	99,83	0,00
17	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**6.483.862.450,00**	**6.346.598.272,00**	**97,88**	**12.170.465.133,00**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	**5.261.428.848,88**	**3.974.776.544,00**	**7.738.317.301,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2020 merupakan pengadaan aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset lancar, penyertaan modal maupun aset tetap, seperti pengadaan software/aplikasi komputer. Anggaran belanja modal aset lainnya sebesar Rp5.261.428.848,88 dan terealisasi sebesar Rp3.974.776.544,00. Rincian realisasi belanja modal aset lainnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 88. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Software komputer	2.431.941.448,88	1.326.837.900,00	54,56	2.945.499.050,00
2	Lisensi dan franchise	58.743.000,00	58.743.000,00	100,00	0,00
3	Hasil kajian/pengembangan	2.657.864.400,00	2.476.412.984,00	93,17	4.742.910.551,00
4	Aset tidak berwujud bernilai sejarah/budaya (heritage)	0,00	0,00	0,00	49.907.700,00
5	Aset tidak berwujud dalam pengerjaan	112.880.000,00	112.782.660,00	99,91	0,00
	Jumlah	**5.261.428.848,88**	**3.974.776.544,00**	**75,55**	**7.738.317.301,00**

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
3. Belanja Tidak Terduga	**34.447.496.044,00**	**18.033.773.257,00**	**1.608.071.300,00**

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang menurut sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Tahun 2020 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp34.447.496.044,00 dengan realisasi sebesar Rp18.033.773.257,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 89. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2020	SKPD	No	Uraian	Realisasi 2019	SKPD
1	Pengembalian pendapatan Tahun lalu kepada BNI karena adanya salah transfer masuk ke rek . Kas daerah	5.585.000,00	BPKD	1	Penanganan becana alam di beberapa kecamatan di kabupaten Lumajang Tahun 2019	467.495.600,00	BPBD
2	Bantuan Korban Bencana Alam Hujan Deras disertai Angin Kencang Cuaca Ekstrim di Wilayah Kab Lumajang	7.500.000,00	BPBD	2	Penanganan korban Bencana Alam Hujan Deras Disertai Angin Kencang dan Tanah Longsor di Wilayah kabupaten Lumajang Tahun 2019	33.000.000,00	BPBD
3	Bantuan Dana Operasional Penanganan Bencala Alam Tanah Longsor Piket NOL KM 57 dan KM 58)	7.052.500,00	BPBD	3	Penangana tanah longsor dusun kali rejo desa kali uling kec tempursari dan korban bencana angin kencang di desa taman ayu di kec pronojiwo	119.649.500,00	BPBD
4	Operasional Pengiriman Air Bersih di Desa Mojosari Kecamatan Sumbersuko akibat kekeringan	5.440.650,00	BPBD	4	Penanganan darurat longsor desa krasak Kecamatan Kedungjajang dan penanganan darurat perkuatran longsor desa sumbersari Kecamatan Sumbersuko Tahun 2019	280.981.800,00	BPBD
5	Blnj Tak Terduga korban banjir desa rowokangkung Kev Rowokangkung dan Desa Rojopolo kec Jatiroto Kab Lumjang	32.000.000,00	BPBD	5	Bantuan Ke pada 16 Rumah korban Bencana Alam Angin kencang	18.375.000,00	BPBD
6	Biaya untuk Darurat Percepatan Penanganan Corona Virus Disases 19 (COVID - 19)	328.500.000,00	BPBD	6	Penanganan darurat Longsor di ranupane Senduro dan Sumberwuluh Candipuro	126.377.900,00	BPBD
7	Pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) untuk Siaga Percepatan Darurat COVID-19 Kab Lumajang	100.000.000,00	BPBD	7	Penanganan Korban Benana Alam disertai angin kencang di walayah desa kaliboto kidul kecamatan jatiroto, desa labruk kidulKec sumbersuko .Desa Oro Oro Ombo Kec Pronojiwo	19.500.000,00	BPBD
8	Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor Lumpur Desa Ranupane Senduro	5.517.500,00	BPBD	8	Penanganann Darurat Longsor Tangkis kiri Kali Curah Menjangan Desa Babakan Kec. Padang	249.606.500,00	BPBD
9	Penanganan Darurat dengan Pembuatan Saluran Irigasi Darurat Desa Pandan Arum Kec Tempeh Tahun 2020	199.172.600,00	BPBD	9	Penanganan 7 warga korban bencana alam hujan deras disertai angin kencang akibat cuaca ekstrim di wilayah kab Lumajang Tahun 2019	12.500.000,00	BPBD
10	Bantuan Korban Bencana Alam Hujan deras disertai Angin Kencang Akibat Cuaca Ekstreim	400.000,00	BPBD	10	Penanganan Darurat Bencana Alam Longsor Jalan Rabat Beton Desa Taman Ayu Kec Pronojiwo	199.675.300,00	BPBD

No	Uraian	Realisasi 2020	SKPD	No	Uraian	Realisasi 2019	SKPD
11	Penanganan Darurat Krisis Air Bersih desa Mlawang Kec Klakah Kabupaten Lumajang	4.552.745,00	BPBD	11	Penangan Darurat Kekringan untuk Desa Kebonan da Desa Salak Kec Randuagung	23.083.200,00	BPBD
12	Bantuan Korban Bencana Alam Hujan Deras di Sertai Angin Kencang Akibat Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupate Lumajang	250.000,00	BPBD	12	Penanganan bencana Alam Hujan Deras di Sertai Angin kecang akibat cuaca ekstrim di wilayah Kab Lumajang	18.500.000,00	BPBD
13	TUP NIHIL BTT Dana Operasional Posko Logistik di GOR Wira Bhakti dan Posko Tugas di Panti PKK dlm Rangka Penanganan COVID 19	179.826.000,00	BPBD	13	Bantuan Korban Bencana Alam Hujan Deras disertai Angin Kencang kibat cuaca ekstrem di Dsesa	6.000.000,00	BPKD
14	Tambahan Kebutuhan Dana Operasional Pokso Logistik di Gor Wira Bhakti Lumajang dalam Rangka Penanganan Covid 19	66.416.000,00	BPBD	14	Penaganan Korban Bencana Alam Hujan Deras di Sertai Angin Kencang di wilayah Kab Lumajang Tahun 2019	19.270.000,00	BPBD
15	Operasional Kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Penanganan COVID- 19 Pada DINKES	1.227.842.675,00	DINKES	15	Penanganan Korban Bencana Alam Hujan Deras di Sertai Angin Kencang di wilayah Kab Lumajang Tahun 2019	21.043.200,00	BPBD
16	Pengadaan Beras dalam Rangka Penanganan Dampak COVID - 19 melalui DPMD	100.000.000,00	DPM	16	Pengembalian atas penerimaan Tahun sebelumnya	7.500.000,00	BPKD
17	Kebutuhan Penanganan Covid - 19 pada DISPERINDAG	49.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN				
18	Penanganan darurat Kekerigan di Wilayah Kebupaten Lumajang Tahun 2020	161.136.000,00	BPBD				
19	Pengadaan Beras dalam Rangka Penanganan COVID 19 pada Dinas Ketahanan Pangan	46.750.000,00	KETAHANAN PANGAN				
20	Pengadaan Beras dalam Rangka Penanganan COVID 19 pada Dinas Ketahanan Pangan	999.960.000,00	KETAHANAN PANGAN				
21	Pinjmana Modal Usaha kepada Pedagang Kecil/Pracangan dalam rangka Membantu Pemulihan Pananganan Dampak Ekonomi Covid 19 Tahun 2020	1.532.500.000,00	DINAS KOPERASI				

No	Uraian	Realisasi 2020	SKPD	No	Uraian	Realisasi 2019	SKPD
22	Operasional Penanganan Bencana Alam Longsor Lumpur di Desa Pundungsari Kec Tempursari ,Evakuasi Korban Pendaki Gunung Lemongan Kec Klakah dan Evakuasi Korban Tercebur Sumur Desa Sumberwringin Kec Klakah	12.964.500,00	BPBD				
23	Keburuhan belanja untuk penanganan COVID 19 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	375.236.780,00	DINAS PARIWISATA				
24	Opersional dalam Rangka Pengadaaan Beras Dampak COVID 19 (Dinas Ketahanan Pangan)	12.761.000,00	KETAHANAN PANGAN				
25	Pengadaan Beras dalam Rangka Penanggulangan Dampak COVID 19 pada Dinas Ketahanan Pangann	999.970.000,00	KETAHANAN PANGAN				
26	Penyetoran Kembali Sisa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur pada Sekretariat bagian Umum	3.650.000,00	BPKD				
27	Penyetoran Kembali Sisa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur pada Dinas Pendidikan	68.381.500,00	BPKD				
28	Penyetoran Kembali Sisa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur pada Dinas Kesehatan	832.122.367,00	BPKD				
29	Penyetoran Kembali Sisa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur pada DPU	2.089.963.815,00	BPKD				
30	Operasi Penegakan Masker di Kecematan se Kabupaten Lumajang dalam rangka penanganan COVID 19	1.058.445.000,00	BPBD				

No	Uraian	Realisasi 2020	SKPD	No	Uraian	Realisasi 2019	SKPD
31	Kebutuhan dan Operasional Pendistribusian Beras Dalam Rangka Penanganan COVID 19 pada BPBD	22.600.000,00	BPBD				
32	Pengadaan Masker dalam rangka percepatan penanganan COVID 19 di Kabupaten wilayah Lumajang	40.000.000,00	BPBD				
33	Opersional Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Penanganan COVID 19 (DINKES)	1.021.825.500,00	DINKES				
34	Operasional Penunjang Pelaksana JPS BTT Provinsi Jawa Timur bagi KPM Dampak Covid 19 bagian bulan Mei.Juni dan Juli Tahun 2020	246.621.000,00	BPBD				
35	Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kab Lumajang	24.170.400,00	BPKD				
36	Pengiriman Air Bersih Desa Mojosari Kecamatan Sumbersuko Kab Lumajang	2.632.500,00	BPBD				
37	Pinjaman Modal kepada pedagang Kecil /Peracangan dalam rangka membantu pemulihan Ekonimo Terdampak Covud 19	283.000.000,00	DINKOP				
38	Penanganan Darurat Bencana Alam Longsor Dusun SritiRT 09 / RW 06 Desa Sumberurip Kec Pronojiwo Kab Lumajang	380.069.800,00	BPBD				
39	Penanganan Darurat Bencana Alam Longsor Dusun Manggisan RT 10/ RW 04 Desa Taman Ayu Kec Pronojiwo Kabupaten Lumajang	151.793.400,00	BPBD				
40	Operasional Penanganan Darurat Bencana Alam Longsor Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	19.120.000,00	BPBD				

No	Uraian	Realisasi 2020	SKPD	No	Uraian	Realisasi 2019	SKPD
41	Operasional Penangnan Longsor Menutup Jalan di Jalur Pronojiwo - Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2020	7.515.000,00	BPBD				
42	Operasional PenangnanTanggul Kritis Vak 12 Dusun Genitri Desa Rowokangkung Kec Rowokangkung Kab Lumajang Tahun 2020	34.490.000,00	BPBD				
43	Insentif Tim Pemulasaran Jenazah Infeksi Covid 19 dan Jasa Pelayanan Kesehatan Tambahan bagi petugas Rapidn Diagnostic Test Corona Virus Disease 2019 bagi masyarakat tertentu	123.140.000,00	DINKES				
44	Kebutuhan Tanggap darurat Erupsi Gunung Semeru Tahun 2020	502.486.000,00	BPBD				
45	Penanganan Darurat Bencana Alam Longsor Dusun Gondang Desa Burno Kec Senduro	152.875.000,00	BPBD				
46	Penanganan Darurat Bencana Alam Longsor Dusun Sidomakmur Desa Gucialit Kec Gucialit	272.540.000,00	BPBD				
47	Operasional Pencairan ,Pertolongan dan Evakuasi Korban Laka Laut di Pantai Selatan Dusun Meleman Desa Wotgalih Kec Yosowilangun Kab Lumajang Tahun 2020	3.805.000,00	BPBD				
48	Penyetoran kembali sisa Dana Desa yang ada di Rekening Kas Desa/RKD dan Rekening Kas Umum Daerah/RKUD Tahun Anggaran 2018 s/d 2019.	796.917.600,00	BPKD				
49	Insentif Tim Pemulasaran Jenazah Infeksius Covid 19 Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan.	540.000.000,00	DINKES				

No	Uraian	Realisasi 2020	SKPD	No	Uraian	Realisasi 2019	SKPD
50	Operasi dan Sidang Yustisi bagi Pelanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan COVID 19	52.474.900,00	DINKES				
51	Pemberian Pinjaman Modal Usaha Kepada 371 Pedagang Kecil /Pracangan dalam Rangka Membantu Pemulihan Penanganan Dampak Ekonomi COVID 19 Tahap III Tahun 2020	1.336.000.000,00	DINKOP				
52	Tamabahan Insentif Daerah Bagi Tenaga Kesehatan ,Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang Menangani COVID 19 Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan	734.500.000,00	DINKES				
53	Pengadaan Sarana Produksi Perikanan dalam Rangka Penanggulangan Dampak Covid 19 pada Dinas Perikanan	496.539.140,00	DINAS PERIKANAN				
54	Pengadaan Hanndscoon,Sepatu Boot,Faceshield , caiiran Disinfektan dan Kantong Mayat dalam Rangka Penanganan Covid 19	56.700.000,00	BPBD				
55	Pemeriksaan Swab Covid- 19 bagi tenaga kesehatan yang melakukan dan penanggunglangan Covid- 19 di lingkungan DINKES dan di UPT Dinkes	160.500.000,00	DINKES				
56	Operasional Rumah Aman (Safe House) Isolasi Terdapadu Pasien Konfirmasi COVID 19 di Asrama Badan Kepegawaian Daerah	27.949.500,00	DINKES				
57	Insentif Tim Pemulasaran Jenazah Covid 19 dan Biaya Pemusnahan Limbah Medis Penanganan Covid 19 di Dinas Kesehatan Tahun 2020	485.033.700,00	DINKES				

No	Uraian	Realisasi 2020	SKPD	No	Uraian	Realisasi 2019	SKPD
58	Pengadaan HAZMAT APD bagi petugas pemakaman Jenazah Covid 19	116.987.500,00	BPBD				
59	Oprasional Obat dan Bahan Pakai Habis dalam Rangka Penanganan COVID 19 di Dinas Kesehatan Tahun 2020	180.179.500,00	DINKES				
60	Operasional Rumah Aman (Safe House) Isolasi Terdapadu Pasien Konfirmasi COVID 19 di Asrama Badan Kepegawaian Daerah	125.829.000,00	DINKES				
Jumlah Belanja BTT		**18.911.441.072,00**				**1.622.558.000,00**	
	PENGEMBALIAN BELANJA BTT (CP)				**PENGEMBALIAN BELANJA BTT (CP)**		
1	Setor Kembali Pengadaan Handscoon	(488.820,00)	BPBD	1	Pengembalian Belanja Tidak Terduga Tahun Berjalan	(14.486.700,00)	BPBD
2	Setor Kembali Blnj Hand Sanitizer	(176.400,00)	BPBD				
3	SETOR KEMBALI SISA PENGIRIMAN AIR BERSIH DESA MLAWANG KEC.KLAKAH BTT TA.2020	(22.545,00)	BPBD				
4	Setor Kembali Blnj Tempat cuci tangan portable dan bilik sterilisasi	(700.000,00)	BPBD				
5	Setor Kembali Pengadaan Masker kain	(425.000,00)	BPBD				
6	Operasional penyemprotan desinfektan dan pengiriman air bersih tandon cuci tangan	(33.000,00)	BPBD				
7	Operasional Logistik di GOR Wira Bhakti dan Posko Gugus Tugas di Panti PKK dalam rangka penanganan Covid - 19	(158.500,00)	BPBD				

No	Uraian	Realisasi 2020	SKPD	No	Uraian	Realisasi 2019	SKPD
8	Tambahan Operasional Posko Logistik Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di GOR Wira Bhakti Lumajang	(85.000,00)	BPBD				
9	Setor kembali sisa BTT Penanganan Bencana Alam Longsor di Dusun Pundungsari Kec. Tempursari	(352.000,00)	BPBD				
10	Tambahan Operasional Posko Logistik Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di GOR Wira Bhakti Lumajang	(500,00)	BPBD				
11	Setor kambali BTT Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Desa Kaliuling Kec. Tempursari TA. 2020	(250.000,00)	BPBD				
12	Setor Kembali sisa anggaran BTT	(425.400.000,00)	DINKES				
13	Setor kembali BTT penanganan covid-19 Dinas Ketahanan Pangan	(449.523.750,00)	KETAHANAN PANGAN				
14	Setoran kembali BTT penanganan longsor BPBD	(12.300,00)	BPBD				
15	setoran pengembalian BTT penanganan longsor BPBD	(40.000,00)	BPBD				
	Jumlah Pengembalian BTT	**(877.667.815,00)**			**Jumlah Pengembalian BTT**	**(14.486.700,00)**	
	Belanja BTT Tahun 2020	**18.033.773.257,00**			**Belanja BTT Tahun 2019**	**1.608.071.300,00**	

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
C. Transfer/Bagi Hasil ke Desa	**332.255.537.916,00**	**332.198.037.916,00**	**385.316.941.697,00**

Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa meliputi bagi hasil pajak/retribusi daerah ke desa, dan bantuan keuangan bersifat umum dan khusus kepada desa. Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp332.255.537.916,00dengan realisasi sebesar Rp332.198.037.916,00 Rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 90. Perbandingan Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Desa Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	5.053.955.636,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	2.044.566.445,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Umum (ADD)	118.792.032.000,00	118.792.032.000,00	100,00	133.754.095.902,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Khusus (DD)	193.127.732.000,00	193.127.732.000,00	100,00	188.544.614.400,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Lainnya	20.335.773.916,00	20.278.273.916,00	99,72	55.919.709.314,00
Jumlah		**332.255.537.916,00**	**332.198.037.916,00**	**99,98**	**385.316.941.697,00**

Pada Tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Lumajang menunda alokasi anggaran belanja bagi hasil pajak dan bagi hamsil retribusi ke Desa karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah akibat adanya refokusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 pada Tahun 2020 dan akan dialokasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2021.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Desa (DD) mulai Tahun anggaran 2020 di transfer langsung dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa atau tidak melalui rekening kas umum daerah.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
d. Surplus Defisit	**(87.479.537.535,61)**	**90.116.789.034,09**	**(42.633.453.946,72)**

Surplus (defisit) merupakan selisih realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja dan transfer, sebagai berikut:

Tabel 91. Surplus/Defisit Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Pendapatan & Transfer	2.104.300.585.569,86	2.118.849.571.641,14	100,69	2.186.593.815.093,29
2	Belanja & Transfer	2.191.780.123.105,47	2.028.732.782.607,05	92,56	2.229.227.269.040,01
Surplus (Defisit)		**(87.479.537.535,61)**	**90.116.789.034,09**	**(103,01)**	**(42.633.453.946,72)**

e. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1) Penerimaan Pembiayaan	**88.479.537.535,61**	**88.542.490.226,24**	**141.544.909.582,33**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan, meliputi penggunaan SILPA , pencairan Dana Cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, terinci sebagai berikut:

Tabel 92. Daftar Rincian Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Penggunaan Silpa	88.210.955.635,61	88.217.717.326,24	100,01	141.024.677.582,33
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	268.581.900,00	324.772.900,00	120,92	520.232.000,00
	Jumlah	**88.479.537.535,61**	**88.542.490.226,24**	**100,07**	**141.544.909.582,33**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(a) Pengunaan SILPA	**88.210.955.635,61**	**88.217.717.326,24**	**141.024.677.582,33**

Penggunaan SILPA Tahun 2020 sebesar Rp88.217.717.326,24 merupakan realisasi SILPA Tahun anggaran 2019 yang digunakan kembali di dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Sedangkan Realisasi penggunaan SILPA Tahun 2019 sebesar Rp141.024.677.582,33 merupakan realisasi SILPA Tahun anggaran 2018 yang digunakan di dalam APBD 2019.

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
(b) Pencairan Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pada Tahun 2020 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak memiliki Dana Cadangan.

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
(c) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	**268.581.900,00**	**324.772.900,00**	**520.232.000,00**

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun 2020 dan 2019 merupakan jumlah penerimaan kembali atas pemberian pinjaman kepada masyarakat/kelompok masayarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian, Dinas Ketahana Pangan dan Dinas Perdagangan.

Tabel 93. Daftar Rincian Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman
Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Dinas Koperasi dan UKM	291.022.900,00	520.232.000,00
2	Dinas Pertanian	0,00	0,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	26.500.000,00	0,00
4	Dinas Perdagangan	7.250.000,00	0,00
	Jumlah	**324.772.900,00**	**520.232.000,00**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2) Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**10.700.500.000,00**

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk penyertaan modal kepada PD. Semeru Tahun 2020 dan tidak direalisasikan karena sampai dengan akhir Tahun 2020 tidak ada pengajuan untuk direalisasikan dari PD. Semeru.

Tabel 94. Daftar Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Keterangan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	8.599.000.000,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	2.101.500.000,00
	Jumlah	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.700.500.000,00**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(a) PembentukanDana cadangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Di dalam APBD Tahun anggaran 2020 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak membentuk dana cadangan.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(b) Penyertaan Modal Pemda	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**8.599.000.000,00**

Di dalam APBD Tahun anggaran 2020 telah dianggarkan penyertaan modal kepada PD. Semeru sebesar Rp1.000.000.000,00 tetapi tidak direalisasikan karena sampai dengan akhir Tahun 2020 tidak ada pengajuan untuk direalisasikan dari PD. Semeru.

Tabel 95. Daftar Rincian Penyertaan Modal Pemda Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Perusahaan Daerah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	PD. Semeru	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
2	PDAM	0,00	0,00	0,00	4.599.999.999,99
3	Bank Pasar	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.599.999.999,99**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(c) Pembayaran Utang Pinjaman	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pada Tahun 2020 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak menganggarkan Pembayaran Pokok Utang Pinjaman.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(d) Pemberian Pinjaman	**0,00**	**0,00**	**2.101.500.000,00**

Pada Tahun 2020 tidak menganggarkan pemberian pinjaman. Sedangkan pemberian pinjaman Tahun 2019 sebesar Rp2.101.500.000,00 merupakan Pemberian pinjaman kepada masayarakat untuk modal usaha yang nantinya akan ditagih kembali menjadi penerimaan pembiayaan, pelaksanannya di koordinasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Ketahanan Pangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman Daerah Kepada Masyarakat untuk 4 Kelompok Lumbung Pangan Desa Tahun 2019 (Dinas Ketahanan Pangan) sebesar Rp300.000.000,00
2. Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat untuk 332 Pedagang Sayur Tahun 2019 (Dinas Koperasi dan UM) sebesar Rp331.500.000,00
3. Pinjaman Modal Usaha untuk Pedagang Sayur Tahap II bagi 253 Mlijo (Dinas Koperasi dan UM) sebesar Rp253.000.000,00

4. Pinjaman Modal Usaha Bagi Pedagang Kecil Tahap I Tahun 2019 untuk 238 Pedagang (Dinas Kopeasi dan UM) sebesar Rp822.500.000,00
5. Pinjaman Modal Usaha Bagi Pedagang Kecil Tahun 2019 untuk 99 Pedagang sebesar Rp394.500.000,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
3) Pembiayaan Netto	**87.479.537.535,61**	**88.542.490.226,24**	**130.844.409.582,33**

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp88.542.490.226,24 dengan pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0,00**	**178.659.279.260,33**	**88.210.955.635,61**

SILPA sebesar Rp178.659.279.260,33 merupakan jumlah realisasi surplus (defisit) Tahun 2020 sebesar Rp90.116.789.034,09danrealisasi pembiayaan netto sebesar Rp88.542.490.226,24.SILPA tersebut mencerminkan jumlah saldo kas milik Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020, terinci sebagai berikut:

Tabel 96. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Rekening Kas	2020	2019
1	Kas di BUD	123.010.458.457,29	69.269.607.122,51
2	Kas di bendahara penerimaan	14.074.811,00	22.351.861,00
3	Kas BLUD	54.193.276.148,07	10.730.917.344,11
4	Kas lainnya	1.441.469.843,97	8.188.079.307,99
	Jumlah	**178.659.281.280,33**	**88.210.955.635,61**

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1. Saldo Anggaran Lebih Awal	**88.210.955.635,61**	**141.024.677.582,33**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan saldo anggaran lebih akhir periode sebelumnya. Saldo anggaran lebih awal Tahun 2020 sebesar Rp88.210.955.635,61 merupakan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2019, dan saldo anggaran lebih awal

Tahun 2019 sebesar Rp141.024.677.582,33 merupakan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2018. Masing-masing terdiri dari saldo kas sebagai berikut:

Tabel 97. Saldo Anggaran Lebih Awal

Dalam Rupiah

No	Saldo Awal	2020	2019
1	Kas di BUD	69.269.607.122,51	135.646.547.586,02
2	Kas di bendahara penerimaan	22.351.861,00	33.408.678,00
3	Kas BLUD	10.730.917.344,11	3.926.633.224,91
4	Kas lainnya	8.188.079.307,99	1.418.088.093,40
	Jumlah saldo awal	**88.210.955.635,61**	**141.024.677.582,33**

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**88.217.717.326,24**	**141.024.677.582,33**

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal Sebagai Penerimaan Pembiayaan merupakan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di APBD Tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp88.217.717.326,24 merupakan saldo anggaran lebih Tahun 2019 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di APBD 2020. Di dalam SILPA Tahun 2019 saldo kas lainnya di catat terlalu rendah sebesar Rp6.761.690,63 sehingga silpa Tahun lalu perlu di koreksi sebesar Rp6.761.690,63.

Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp141.024.677.582,33 merupakan saldo anggaran lebih Tahun 2018 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di APBD 2019. Jumlah tersebut merupakan SILPA Tahun 2019, meliputi:

Tabel 98. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Silpa periode sebelumnya (audited)	88.210.955.635,61	141.024.677.582,33
2	Koreksi Silpa periode sebelumnya	6.761.690,63	0,00
3	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan	88.217.717.326,24	141.024.677.582,33

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
3. Sisa Lebih / KurangPembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	**178.659.279.260,33**	**88.210.955.635,61**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA) merupakan jumlah surplus (defisit) LRA ditambah pembiayaan netto. SILPA (SIKPA) tersebut mencerminkan jumlah saldo kas milik Pemerintah Kabupaten Lumajang pada akhir periode, sebagai berikut:

Tabel 99. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Surplus (defisit)	90.116.789.034,09	(42.633.453.946,72)
2	Pembiayaan neto	88.542.490.226,24	130.844.409.582,33
3	**SILPA / SIKPA (1+2)**	**178.659.279.260,33**	**88.210.955.635,61**

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	**6.761.690,63**	**0,00**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 2020 sebesar Rp6.761.690,63 dan Tahun 2019 sebesar Rp0,00. Di dalam SILPA Tahun 2019 saldo kas lainnya di catat terlalu rendah sebesar Rp6.761.690,63 sehingga silpa Tahun lalu perlu di koreksi sebesar Rp6.761.690,63. Adapun rincian kas lainnya yang di koreksi dapat dilihat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	**178.659.279.260,33**	**88.210.955.635,61**

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA),sebagai berikut:

Tabel 100. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	2020	2021
1	Saldo anggaran lebih awal	88.210.955.635,61	141.024.677.582,33
2	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan	88.217.717.326,24	141.024.677.582,33
3	**Jumlah (1-2)**	**(6.761.690,63)**	**0,00**
4	Silpa/Silpa Tahun Berjalan	178.659.279.260,33	88.210.955.635,61
5	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	6.761.690,63	0,00
6	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (3+4+5)**	**178.659.279.260,33**	**88.210.955.635,61**

Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari saldo kas sebagai berikut:

Tabel 101. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Surplus (defisit)	90.116.789.034,09	(42.633.453.946,72)
2	Pembiayaan neto	88.542.490.226,24	130.844.409.582,33
3	**Silpa / Sikpa (1+2)**	**178.659.279.260,33**	**88.210.955.635,61**
	Rincian SILPA / SIKPA		
1	Kas di kas daerah	123.010.458.457,29	69.269.607.122,51
2	Kas di bendahara penerimaan	14.074.811,00	22.351.861,00
3	Kas di BLUD RSUD dr. Haryoto	54.193.276.148,07	10.730.917.344,11
4	Kas lainnya	1.441.469.843,97	8.188.079.307,99
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (1 s/d 4)	**178.659.279.260,33**	**88.210.955.635,61**

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas,investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Saldo masing-masing aset lancar dapat sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 102. Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2020

Dalam Rupiah

Keterangan	2020	2019
Kas dan setara kas	178.659.279.260,33	88.210.955.635,61
Piutang	81.597.935.390,57	103.252.911.103,45
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(22.357.091.476,08)	(21.221.521.611,51)
Persediaan	51.833.924.392,56	44.763.844.226,43
Jumlah	289.734.047.567,38	215.006.189.353,98

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Kas dan Setara Kas	**178.659.279.260,33**	**88.210.955.635,61**

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2020 dan 2019 terinci sebagaimana berikut ini.

Tabel 103. Rincian Saldo Kas Per 31 Desember 2020

Dalam Rupiah

No	Jenis Kas	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Kas di Kas Daerah	123.010.458.457,29	69.269.607.122,51
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	14.074.811,00	22.351.861,00
4	Kas di BLUD	54.193.276.148,07	10.730.917.344,11
5	Kas Lainnya	1.441.469.843,97	8.188.079.307,99
	Jumlah	**178.659.279.260,33**	**88.210.955.635,61**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Kas di Kas Daerah	**123.010.458.457,29**	**69.269.607.122,51**

Kas di Kas Daerah adalah kas milik pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD), meliputi rekening giro dan deposito sebagaimana tersaji di dalam tabel.

Tabel 104. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2019

Dalam Rupiah

No	Nama Bank	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Jangka Waktu	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Bank Jatim Cab. Lumajang	Giro	91026881	-	123.010.458.457,29	69.269.607.122,51
Jumlah					**123.010.458.457,29**	**69.269.607.122,51**

Didalam kas di Kas Daerah sebesar Rp123.010.458.457,29 terdapat sisa dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seluruh puskesmas dan Dinas kesehatan sebesar Rp14.893.795.502,00.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b) Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2020

Dalam Rupiah

Uraian	31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	248.425.755.742,20	248.425.755.742,20	0,00
Jumlah	**0,00**	**248.425.755.742,20**	**248.425.755.742,20**	**0,00**

Penambahan dan Pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing sebesar Rp248.425.755.742,20merupakan jumlah dana UP/GU/TU yang diterima dan telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada BUD pada Tahun anggaran 2020.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c) Kas di Bendahara Penerimaan	**14.074.811,00**	**22.351.861,00**

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp14.074.811,00 dan Rp22.351.861,00. Rincian mutasi kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

Tabel 106. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2020

dalam rupiah

No	Kas di Bendahara Penerimaan	31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	RSUD Pasirian	22.351.861,00	18.873.099.876,00	18.881.837.926,00	13.613.811,00
2	Dinas Perhubungan	0,00	6.042.018.400,00	6.041.557.400,00	461.000,00
	Jumlah	22.351.861,00	24.915.118.276,00	24.923.395.326,00	14.074.811,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
d) Kas di BLUD	**54.193.276.148,07**	**10.730.917.344,11**

Kas di BLUD adalah kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasasi dan di bawah tanggungjawab bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Kerja di bawah OPD di

lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Menurut ketentuan perundang-undangan, BLUD dapat menggunakan langsung pendapatannya. Dengan demikian saldo kas di bendahara BLUD pada akhir periode meliputi saldo kas tunai, rekening giro dan deposito di bank yang berasal dari sisa pendapatan yang dikelola sendiri. Di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang, OPD/Unit Kerja yang telah ditetapkan sebagai BLUD adalah RSUD dr. Haryoto.

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar Rp54.193.276.148,07 dan Rp10.730.917.344,11. Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2020Rp54.193.276.148,07terinci sebagai berikut:

a) Rekening Bank Jatim Nomor 0091031752 sebesar Rp54.140.117.049,07
b) Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp53.159.099,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
e) Kas Lainnya	**1.441.469.843,97**	**8.188.079.307,99**

Kas Lainnya merupakan kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai, dan di bawah tanggungjawab selain BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Saldo kas lainnya yang merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler per 31 Desember 2020 yang dikelola langsung oleh 602 Lembaga Sekolah Negeri (SD, SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Saldo kas lainnya (Dana Bantuan Operasional Sekolah) terdiri dari kas bank sebesar Rp858.551.792,13 dan kas tunai sebesar Rp582.918.051,84.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Investasi Jangka Pendek	**0,00**	**0,00**

Saldo Investasi Jangka Pendek Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing tercatat sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak memiliki investasi jangka pendek dalam bentuk apapun.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Piutang Pajak	**29.585.187.526,00**	**23.825.850.840,00**

Piutang Pajak merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak daerah yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, tetapi sampai dengan 31 Desember masih belum diterima. Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut:

	31 Des. 2020 (Rp)	31 Des. 2019 (Rp)
Piutang Pajak Hotel	20.887.500,00	0,00
Piutang Pajak Restoran	21.677.500,00	34.179.550,00
Piutang Pajak Reklame	140.562.895,00	151.887.683,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	2.001.052.900,00	2.418.476.054,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	3.188.853.250,00	53.685.500,00
Piutang Pajak Air Tanah	2.595.696,00	3.158.596,00
Piutang PBB P2	24.209.557.785,00	21.164.463.457,00
Jumlah	**29.585.187.526,00**	**23.825.850.840,00**

a) Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.887.500,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 107. Perkembangan Piutang Pajak Hotel

Dalam Rupiah

Tahun SKP	Saldo 31-Des-19	Koreksi / Mutasi	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31-Des-20
2020	0,00	0,00	20.887.500,00	0,00	20.887.500,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**20.887.500,00**	**0,00**	**20.887.500,00**

Pajak Hotel merupakan pajak daerah yang pemungutannya menggunakan sistem *Self Asessment*. Penambahan sebesar Rp20.887.500,00 merupakan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Tahun anggaran 2020.

Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

.

Tabel 108. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des. 2020
Lancar	< 1 Tahun	20.887.500,00	0,50%	104.437,50
Kurang Lancar	1 – 2 Tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	>2 – 5 Tahun	0,00	50%	0,00
Macet	>5 Tahun	0,00	100%	0,00
Jumlah		**20.887.500,00**		**104.437,50**

b) Piutang Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak daerah yang pemungutannya menggunakan sistem *Self Asessment*. Saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 34.179.550,00. Pada Tahun 2020 tidak ada penambahan piutang namun ada pengurangan piutang sebesar Rp12.502.050,00, sehingga saldo akhir 2020 senilai Rp21.677.500,00.

Tabel 109. Perkembangan Piutang Pajak Restoran

Dalam Rupiah

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2020
2012	34.179.550,00	0,00	12.502.050,00	21.677.500,00
Jumlah	**34.179.550,00**	**0,00**	**12.502.050,00**	**21.677.500,00**

Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 110. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 Tahun	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	1 – 2 Tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	>2 – 5 Tahun	0,00	50%	0,00
Macet	> 5 Tahun	21.677.500,00	100%	21.677.500,00
Jumlah		**21.677.500,00**		**21.677.500,00**

c) Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 sebesar Rp140.562.895,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 111. Perkembangan Piutang Pajak Reklame

Dalam Rupiah

Tahun SKP	Saldo 31-Des-19	Koreksi / Mutasi	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31-Des-20
2014	72.278.615,00	0,00	0,00	0,00	72.278.615,00
2015	12.387.000,00	0,00	0,00	0,00	12.387.000,00
2016	5.297.980,00	0,00	0,00	900,00	5.297.080,00
2017	1.789.400,00	0,00	0,00	5.400,00	1.784.000,00
2018	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
2019	59.159.688,00	(2.323.750,00)	0,00	55.760.938,00	1.075.000,00
2020	0,00	0,00	46.766.200,00	0,00	46.766.200,00
Jumlah	**151.887.683,00**	**(2.323.750,00)**	**46.766.200,00**	**55.767.238,00**	**140.562.895,00**

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang pemungutannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (*Official Asessment*).

Penambahan sebesar Rp46.766.200,00 merupakan jumlah Surat Ketetapan Pajak Reklame yang diterbitkan Tahun anggaran 2020. Pengurangan sebesar Rp55.767.238,00 merupakan pengurangan piutang di Tahun 2019 meliputi penghapusan piutang dari realisasi di Tahun 2019 sebesar Rp195.000,00 dan Koreksi saldo piutang Tahun lalu karena usaha sudah tutup sebesar Rp2.323.750,00.

Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 112. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des. 2019
Lancar	< 1 Tahun	46.766.200,00	0,50%	233.831,00
Kurang Lancar	1 – 2 Tahun	2.050.000,00	10%	205.000,00
Diragukan	>2 – 5 Tahun	19.468.080,00	50%	9.734.040,00
Macet	>5 Tahun	72.278.615,00	100%	72.278.615,00
Jumlah		**140.562.895,00**		**82.451.486,00**

d) Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Piutang tersebut telah dihapus sesuai Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/103/427.12/2018, sehingga bersaldo nihil pada Tahun 2019.

Tabel 113. Perkembangan Piutang Pajak Hiburan

Dalam Rupiah

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.001.052.900,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 114. Perkembangan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2020

Dalam Rupiah

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2020
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2.418.476.054,00	2.001.052.900,00	2.418.476.054,00	2.001.052.900,00
Jumlah	**2.418.476.054,00**	**2.001.052.900,00**	**2.418.476.054,00**	**2.001.052.900,00**

Penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp2.001.052.900,00 merupakan pendapatan bulan Desember 2020 yang belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi. Jumlah tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara hasil koordinasi dan rekonsiliasi data pajak penerangan jalan antara Badan Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Lumajang dengan Manager PT. PLN Area Jember.

Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Tabel 115. Perhitungan Penyisihan Piutang PPJ Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2019
Lancar	< 1 Tahun	2.001.052.900,00	0,50%	10.005.264,50
Kurang Lancar	1 – 2 Tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	>2 – 5 Tahun	0,00	50%	0,00
Macet	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00
Jumlah		**2.001.052.900,00**		**10.005.264,50**

f) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak daerah yang pemungutannya menggunakan sistem *Self Asessment*. Saldo piutang pajak mineral bukan logam per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.188.853.250,00.

Tabel 116. Perkembangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

Dalam Rupiah

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2020
2017	53.685.500,00	0,00	0,00	53.685.500,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3.135.167.750,00	0,00	3.135.167.750,00
Jumlah	**53.685.500,00**	**3.135.167.750,00**	**0,00**	**3.188.853.250,00**

Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 117. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 Tahun	15.675.838,75	0,50%	78.379,19
Kurang Lancar	1 – 2 Tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	>2 – 5 Tahun	0,00	50%	0,00
Macet	> 5 Tahun	53.685.500,00	100%	53.685.500,00
Jumlah		**69.361.338,75**		**53.763.879,19**

g) Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.595.696,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 118. Perkembangan Piutang Pajak Air Tanah

Dalam Rupiah

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2019	Koreksi	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2020
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.158.596,00	0,00	0,00	3.158.596,00	0,00
2020	0,00	0,00	2.595.696,00	0,00	2.595.696,00
Jumlah	**3.158.596,00**	**0,00**	**2.595.696,00**	**3.158.596,00**	**2.595.696,00**

Pajak Air Tanah merupakan pajak daerah yang pemungutannya berdasarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) atau bisa disebut *Official Asessment*. Saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.158.596,00. Pada Tahun 2020 ada penambahan piutang dengan jumlah Rp2.595.696,00 dan ada pengurangan piutang sebesar Rp3.158.596,00 sehingga saldo akhir piutang pajak air tanah sebesar Rp2.595.696,00.

Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 119. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 Tahun	2.595.696,00	0,50%	12.978,00
Kurang Lancar	1 – 2 Tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	>2 – 5 Tahun	0,00	50%	0,00
Macet	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00
Jumlah		**2.595.696,00**		**12.978,00**

h) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Saldo Piutang PBB P2 per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.209.557.785,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 120. Perkembangan Piutang PBB P2

Dalam Rupiah

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2020
2012	3.412.111.716,00	0,00	5.338.461,00	3.406.773.255,00
2013	4.561.040.517,00	0,00	5.415.874,00	4.555.624.643,00
2014	2.466.194.970,00	0,00	7.780.362,00	2.458.414.608,00
2015	1.430.394.795,00	0,00	9.105.675,00	1.421.289.120,00
2016	1.574.673.288,00	0,00	39.014.739,00	1.535.658.549,00
2017	2.007.714.563,00	0,00	54.765.832,00	1.952.948.731,00
2018	2.512.447.967,00	0,00	94.104.629,00	2.418.343.338,00
2019	3.199.885.641,00	0,00	394.412.710,00	2.805.472.931,00
2020	0,00	3.655.032.610,00	0,00	3.655.032.610,00
Jumlah	**21.164.463.457,00**	**3.655.032.610,00**	**609.938.282,00**	**24.209.557.785,00**

PBB P2 pemungutannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (*Official Asessment*) dengan menerbitkan SPPT-PBB. Penambahan sebesar Rp3.655.032.610,00 merupakan jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan pada Tahun 2020 dan pengurangan sebesar Rp609.887.405,00 terdiri dari pembayaran piutang Tahun 2012 sebesar Rp5.338.461,00 ; Tahun 2013 sebesar Rp5.415.874,00 ; Tahun 2014 sebesar Rp7.780.362,00 ; Tahun 2015 sebesar Rp9.105.675,00 ; Tahun 2016 sebesar Rp39.014.739,00 ; Tahun 2017 sebesar Rp54.765.832,00 ; Tahun 2018 sebesar Rp94.104.629,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp394.412.710,00.

Penyisihan piutang PBB-P2 Tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 121. Perhitungan Penyisihan Piutang PBB P2 Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 Tahun	3.654.981.733,00	0,50%	18.274.908,67
Kurang Lancar	1 – 2 Tahun	5.223.867.146,00	10%	522.386.714,60
Diragukan	>2 – 5 Tahun	4.909.896.400,00	50%	2.454.948.200,00
Macet	> 5 Tahun	10.420.812.506,00	100%	10.420.812.506,00
Jumlah		**24.209.557.785,00**		**13.416.422.329,27**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4) Piutang Retribusi	**4.121.151.245,50**	**5.696.752.264,00**

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp4.121.151.245,50 dan Rp5.696.752.264,00 terinci sebagai berikut:

	31 Des 2020	31 Des 2019
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.388.997.426,00	4.024.033.630,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	522.116.027,00	518.111.839,50
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	582.146.125,50	545.409.727,50
Piutang Retribusi Terminal	39.787.500,00	21.092.900,00
Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO)	588.104.167,00	588.104.167,00
Jumlah	**4.121.151.245,50**	**5.696.752.264,00**

a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.388.997.426,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 122. Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dalam Rupiah

No	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Saldo 31 Des 2019	Koreksi/Mutasi Piutang 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2020
1	Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian	2.240.960.630,00	69.958,00	559.397.500,00	2.231.519.162,00	568.908.926,00
2	Dinas Kesehatan	5.940.000,00	(5.940.000,00)	0,00	0,00	0,00

No	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Saldo 31 Des 2019	Koreksi/Mutasi Piutang 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2020
3	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi (BPJS Puskesmas dan LABKESDA)	1.777.133.000,00	5.940.000,00	1.818.983.500,00	1.781.968.000,00	1.820.088.500,00
	Jumlah	**4.024.033.630,00**	**69.958,00**	**2.378.381.000,00**	**4.013.487.162,00**	**2.388.997.426,00**

Penambahan sebesar Rp1.727.158.000,00 meliputi:
- Sebesar Rp559.397.500,00 merupakan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Pasirian yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2020
- Pelayanan kesehatan non kapitasi BPJS di Puskesmas sebesar Rp1.818.983.500,00 yang belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp4.013.487.162,00 meliputi:
- Retribusi pelayanan kesehatan yang sudah di terima dari RSUD Pasirian pada Tahun 2020 sebesar Rp2.231.519.162,00
- Penerimaan jasa pelayanan kesehatan non kapitasi (BPJS Puskesmas) sebesar Rp1.781.968.000,00

Terdapat Koreksi / mutasi piutang meliputi :
- Mutasi Piutang dari Dinas Kesehatan sebesar Rp5.940.000,00 pindah pada Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)
- Koreksi Saldo awal piutang retribusi RSUD PASIRIAN karena kurang catat diTahun 2019 sebesar Rp69.958,00

Penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 123. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2020

Dalam Rupiah

No	Jenis Piutang	Saldo	Kualitas Piutang			
		31-Des-20	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			0,50%	10%	50%	100%
1	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian	568.908.926,00	558.411.000,00	0,00	986.500,00	9.511.426,00
	Penyisihan Piutang	12.796.731,00	2.792.055,00	0,00	493.250,00	9.511.426,00
2	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi-BPJS Puskesmas dan LABKESDA	1.820.088.500,00	562.122.000,00	611.423.000,00	645.438.500,00	1.105.000,00
	Penyisihan piutang	387.777.160,00	2.810.610,00	61.142.300,00	322.719.250,00	1.105.000,00
3	Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Piutang 1 + 2 + 3	**2.388.997.426,00**	**1.120.533.000,00**	**611.423.000,00**	**646.425.000,00**	**10.616.426,00**
	Jumlah Penyisihan Piutang 1 + 2 + 3	**400.573.891,00**	**5.602.665,00**	**61.142.300,00**	**323.212.500,00**	**10.616.426,00**

b) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2020 sebesar Rp522.116.027,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 124. Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 31 Des 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2020
	Retribusi Pasar Umum				
1	Pasar Baru Lumajang	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
2	Pasar Plaza	3.218.000,00	0,00	0,00	3.218.000,00
3	Pasar Serangin	26.556.000,00	0,00	0,00	26.556.000,00
4	Pasar Senggol	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
5	Pasar Senduro	1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00
6	Pasar Gucialit	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00
7	Pasar Sukodono	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
8	Pasar Ranuyoso	1.223.200,00	0,00	0,00	1.223.200,00
9	Pasar Yosowilangun	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10	Pasar Tempeh	32.212.800,00	0,00	0,00	32.212.800,00
11	Pasar Pasirian	2.292.000,00	0,00	0,00	2.292.000,00
12	Pasar Candipuro	10.830.000,00	0,00	0,00	10.830.000,00
13	Pasar Pronojiwo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	Jumlah (1)	**80.850.600,00**	**0,00**	**0,00**	**80.850.600,00**
II	**Retribusi Daftar Ulang**				
1	Baru Lumajang	32.474.379,50	0,00	0,00	32.474.379,50
2	Plaza Lumajang	47.649.794,00	22.500,00	0,00	47.672.294,00
3	Hewan Jogotrunan	1.508.600,00	0,00	0,00	1.508.600,00
4	Serangin	16.870.163,00	190.000,00	0,00	17.060.163,00
5	Klojen	8.772.025,00	0,00	0,00	8.772.025,00
6	Senggol	7.223.606,00	0,00	0,00	7.223.606,00
7	Toga	9.383.813,00	184.500,00	0,00	9.568.313,00
8	Senduro	11.024.535,00	741.000,00	0,00	11.765.535,00
9	Agropolitan	3.574.875,00	80.000,00	0,00	3.654.875,00
10	Dawuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sukodono	9.613.001,00	20.000,00	0,00	9.633.001,00
12	Randuagung	11.238.042,00	0,00	0,00	11.238.042,00
13	Klakah	15.674.975,00	484.750,00	0,00	16.159.725,00
14	Yosowilangun	25.785.782,50	0,00	0,00	25.785.782,50
15	Hewan Krai	1.247.940,00	0,00	0,00	1.247.940,00

No	Uraian	Saldo 31 Des 2019	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2020
16	Nogosari	8.925.345,50	179.937,50	0,00	9.105.283,00
17	Tekung	1.590.500,00	0,00	0,00	1.590.500,00
18	Kunir	10.749.202,25	0,00	0,00	10.749.202,25
19	Tempeh	26.970.083,25	129.000,00	0,00	27.099.083,25
20	Pasirian	36.509.615,00	129.000,00	0,00	36.638.615,00
21	Candipuro	4.559.000,00	1.189.437,50	0,00	5.748.437,50
22	Pronojiwo	10.864.000,00	495.750,00	0,00	11.359.750,00
23	Hygenis	2.087.200,00	5.000,00	0,00	2.092.200,00
24	Hewan Pasirian	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00
25	Hewan Klakah	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
26	Artagama	3.646.725,00	135.375,00	0,00	3.782.100,00
27	LSS	890.400,00	0,00	0,00	890.400,00
28	Gucialit	274.125,00	17.937,50	0,00	292.062,50
	Jumlah (2)	**309.925.127,00**	**4.004.187,50**	**0,00**	**313.929.314,50**
III	**Retribusi Perijinan Pasar**				
1	Hewan Jogotrunan	2.804.000,00	0,00	0,00	2.804.000,00
2	Serangin	14.644.749,90	0,00	0,00	14.644.749,90
3	Pasirian	11.164.000,00	0,00	0,00	11.164.000,00
4	Hewan Pasirian	4.764.000,00	0,00	0,00	4.764.000,00
5	Yosowilangun	5.401.669,50	0,00	0,00	5.401.669,50
6	Klakah	30.926.200,00	0,00	0,00	30.926.200,00
7	Hewan Klakah	3.255.000,00	0,00	0,00	3.255.000,00
8	Senduro	3.482.000,00	0,00	0,00	3.482.000,00
9	Tempeh	673.312,00	0,00	0,00	673.312,00
10	Kunir	763.255,50	0,00	0,00	763.255,50
11	Nogosari	1.194.874,80	0,00	0,00	1.194.874,80
12	Senggol	2.874.875,00	0,00	0,00	2.874.875,00
13	Ranuyoso	1.783.500,00	0,00	0,00	1.783.500,00
14	Randuagung	710.275,81	0,00	0,00	710.275,80
15	Hewan Krai	2.884.400,00	0,00	0,00	2.884.400,00
16	Plaza Lumajang	4.657.250,00	0,00	0,00	4.657.250,00
17	Baru Lumajang	33.357.250,00	0,00	0,00	33.357.250,00
18	Pronojiwo	1.995.500,00	0,00	0,00	1.995.500,00
	Jumlah (3)	**127.336.112,51**	**0,00**	**0,00**	**127.336.112,50**
	Jumlah (1+2+3)	**518.111.839,51**	**4.004.187,50**	**0,00**	**522.116.027,00**

Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 125. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2020
Lancar	< 1 bulan	652.000,00	0,50%	3.260,00
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	385.437,50	10%	38.543,75
Diragukan	>3 – 12 bulan	2.966.750,00	50%	1.483.375,00
Macet	> 12 bulan	518.111.839,50	100%	518.111.839,50
Jumlah		**522.116.027,00**		**519.637.018,25**

c) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp582.146.125,50, terinci sebagai berikut:

Tabel 126. Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	31-Dec-19	Koreksi/Mutasi	Penambahan	Pengurangan	31-Dec-20
1	Sewa Pemakaian Tanah Stren Kali (Dinas PU)	545.409.727,50	0,00	179.862.151,00	143.125.753,00	582.146.125,50
	Jumlah	**545.409.727,50**	**0,00**	**179.862.151,00**	**143.125.753,00**	**582.146.125,50**

Penambahan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp179.862.151,00 merupakan Sewa Tanah Stren Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2020.

Sedangkan pengurangan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp143.125.753,00 merupakan penerimaan piutang sewa tanah stren kali (Dinas PU).
Penyisihan Piutang Retribusi terinci sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 127. Perhitungan Penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Jenis Piutang	Saldo Piutang 31 Des 2020	Kualitas Piutang			
			Lancar > 0 - 1 Bulan	Kurang Lancar > 1 - 3 Bulan	Diragukan > 3 - 12 Bulan	Macet > 12 Bulan
1	Piutang Sewa Tanah Stren kali (Dinas PU)	582.146.125,50	41.853.372,50	0,00	60.803.560,00	479.489.192,50
	Prosentase Penyisihan Piutang	0,00	0,50%	0,10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**510.100.239,36**	**209.266,86**	**0,00**	**30.401.780,00**	**479.489.192,50**

d) Piutang Retribusi Terminal

Saldo Piutang Retribusi Terminal per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.787.500,00. Jumlah tersebut merupakan sewa kios terminal yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2020.

Tabel 128. Daftar Piutang Retribusi Terminal Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	SKRD	31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	2018	21.092.900,00	33.624.000,00	14.929.400,00	39.787.500,00
	Jumlah	**21.092.900,00**	**33.624.000,00**	**14.929.400,00**	**39.787.500,00**

Penyisihan Piutang Retribusi Terminal Tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 129. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Terminal 2020

Dalam rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 bulan	18.694.600,00	0,50%	93.473,00
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	0,00	10%	0,00
Diragukan	>3 – 12 bulan	0,00	50%	0,00
Macet	> 12 bulan	21.092.900,00	100%	21.092.900,00
Jumlah		**39.787.500,00**		**21.186.373,00**

e) Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO)

Saldo Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) per 31 Desember 2020 sebesar Rp588.104.167,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 130. Daftar Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	SKRD	31 Des 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	2019	588.104.167,00	0,00	0,00	588.104.167,00
	Jumlah	**588.104.167,00**	0,00	0,00	**588.104.167,00**

Penyisihan Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) Tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 131. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 bulan	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	0,00	10%	0,00

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Diragukan	>3 – 12 bulan	0,00	50%	0,00
Macet	> 12 bulan	588.104.167,00	100%	588.104.167,00
Jumlah		**588.104.167,00**		**588.104.167,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5) Piutang Lainnya	**47.891.596.619,07**	**73.730.307.999,45**

Piutang Lainnya merupakan piutang yang tidak dapat dikategorikan sebagai piutang pajak dan piutang retribusi. Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut:

Tabel 132. Daftar dan Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Jenis Piutang	Saldo Akhir 31 Desember 2019	Koreksi/Mutasi Piutang 2020	Penambahan Piutang 2020	Pengurangan Piutang 2020	Saldo Akhir 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	**PIUTANG LAINNYA**					
	- Piutang Pendapatan BLUD	20.594.818.635,79	0,00	18.269.349.203,07	19.939.263.448,79	18.924.904.390,07
	- Piutang Atas Pinjaman Modal Kepada Masyarakat	6.258.474.224,00	0,00	3.651.210.000,00	324.772.900,00	9.584.911.324,00
	- Piutang Bagi hasil Pajak Propinsi	11.527.154.589,00	0,00	9.955.327.272,00	11.527.154.589,00	9.955.327.272,00
	- Piutang Bagi hasil Pemerintah Pusat	33.169.655.132,00	(19.785.841.828,00)	7.727.445.647,00	13.132.474.161,00	7.978.784.790,00
	- Piutang Kebun Dinas	24.750.000,00	0,00	0,00		24.750.000,00
	- Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Puskesmas	15.603.750,00	1.587.000,00	0,00	15.603.750,00	1.587.000,00
	- Piutang Kelebihan Pembayaran atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan	969.115.910,66	0,00	0,00	969.115.910,66	0,00
	- Piutang Hibah Pemerintah Pusat	1.114.949.413,00	0,00	761.444.192,00	1.114.949.413,00	761.444.192,00
	- Piutang Atas Kerugian Daerah	23.143.401,00	0,00	0,00	13.270.500,00	9.872.901,00
	- Piutang lain - lain	2.642.944,00	0.00	620.014.750,00	2.642.944,00	620.014.750,00
	- Piutang sewa gedung bioskop	30.000.000,00	0,00	0,00		30.000.000,00
	Jumlah	**72.761.192.088,79**	**(19.785.841.828,00)**	**40.986.378.064,07**	**47.039.247.616,45**	**47.891.596.619,07**

a) Piutang Pendapatan BLUD

Saldo Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD Haryoto per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.924.904.390,07.

Tabel 133. Daftar Piutang Pendapatan BLUD RSUD Dr. Haryoto Tahun 2020

No.	Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2020	Penambahan Piutang 2020	Pengurangan Piutang 2020	Saldo Akhir 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6
1	Piutang dengan surat pernyataan	749.951.867,00	209.279.494,00	95.990.349,00	863.241.012,00
2	Piutang Honorarium Pelayanan Kesehatan / Penyelenggaraan Diklat	2.703.480,00	358.800,00	2.703.480,00	358.800,00
3	Piutang kepada PT. Jasa Raharja	143.335.884,00	66.565.627,00	143.335.884,00	66.565.627,00
4	Klaim BPJS Ketenagakerjaan	204.349.049,00	207.903.826,00	204.405.380,00	207.847.495,00
5	Piutang pelayanan kesehatan pasien peserta JKN/BPJS	19.029.985.046,00	9.495.612.043,00	19.029.985.046,00	9.495.612.043,00
6	Piutang kepada KPRI Pangudi Luhur	75.150.000,00	43.650.000,00	73.500.000,00	45.300.000,00
7	Klaim BPJS Obat Kronis	236.248.931,00	110.278.685,00	236.248.931,00	110.278.685,00
8	Klaim BPJS Obat Kemoterapi	39.035.042,00	0,00	39.035.042,00	0,00
9	Piutang atas pendapatan bunga	19.501.506,79	43.321.498,07	19.501.506,79	43.321.498,07
10	Piutang RS. Wijaya Kusuma	89.205.000,00	26.600.000,00	89.205.000,00	26.600.000,00
11	Piutang RSUD Pasirian	1.383.000,00	0.00	1.383.000,00	0.00
12	Piutang RS Muhamadiah	0,00	18.947.000,00	0,00	18.947.000,00
13	Piutang PT. TASPEN	3.969.830,00	636.330,00	3.969.830,00	636.330,00
	JUMLAH	**20.594.818.635,79**	**18.269.349.203,07**	**19.939.263.448,79**	**18.924.904.390,07**

Penyisihan piutang BLUD Tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 134. Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2020
Lancar	< 1 bulan	10.997.800.533,07	0,50%	54.989.002,66
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	6.379.250.035,00	10%	637.925.003,50
Diragukan	>3 – 12 bulan	803.497.573,00	50%	401.748.786,50
Macet	> 12 bulan	744.356.249,00	100%	744.356.249,00
Jumlah		**18.924.904.390,07**		**1.839.019.041,66**

b) Piutang atas Pinjaman Modal Kepada Masyarakat

Saldo Piutang atas Pinjaman Modal Kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.584.911.324,00. Pinjaman modal kepada masyarakat anggaran dan realisasinya melalui pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman kepada masyarakat di PPKD yang menyalurannya melalui Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Kantor

Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan. Sedangkan penerimaan kembali pemberian pinjaman modal kepada masyarakat melalui penerimaan pembiayaan.

Tabel 135. Daftar dan Mutasi Piutang/Pinjaman Modal Kepada Masyarakat Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Leading Sektor	31-Des-19	Koreksi/Mutasi piutang 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	Dinas Koperasi dan UKM	5.058.902.200,00	0,00	3.351.210.000,00	291.022.900,00	8.119.089.300,00
2	Dinas Pertanian	162.199.024,00	0,00	0,00	0,00	162.199.024,00
3	Kantor Ketahanan Pangan	763.500.000,00	0,00	300.000.000,00	26.500.000,00	1.037.000.000,00
4	Dinas Perdagangan	273.873.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	266.623.000,00
Jumlah		**6.258.474.224,00**	**0,00**	**3.651.210.000,00**	**324.772.900,00**	**9.584.911.324,00**

Pengurangan piutang sebesar Rp324.772.900,00 direalisasikan melalui penerimaan pembiayaan meliputi:

- Penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat pada Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp291.022.900,00 meliputi penerimaan kembali atas pemberian pinjaman Tahun 2012 sebesar Rp1.595.000; Tahun 2013 sebesar Rp2.250.000; Tahun 2014 sebesar Rp250.000; Tahun 2015 sebesar Rp1.940.000; Tahun 2017 sebesar Rp24.391.700, Tahun 2019 sebesar Rp255.179.500 dan Tahun 2020 sebesar Rp5.416.700.
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp26.500.000,00 dari 2 (dua) lembaga/kelompok.
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat pada Dinas Perdagangan sebesar Rp7.250.000,00 dari 1 (satu) lembaga/kelompok.

Penyisihan piutang pemberian pinjaman kepada masyarakat Tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 136. Perhitungan Penyisihan Piutang Pinjaman Kepada Masyarakat Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Des. 2020	Kualitas Piutang			
			< 1 Tahun (Lancar)	> 1-2 Tahun (Kurang Lancar)	> 2-3 Tahun (Diragukan)	> 3 Tahun (Macet)
			0,50%	10%	50%	100%
1	**Dinas Koperasi dan UKM**					
	Piutang	8.119.089.300,00	4.429.683.800,00	219.415.000,00	0,00	3.469.990.500,00
	Penyisihan	3.514.080.419,00	22.148.419,00	21.941.500,00	0,00	3.469.990.500,00
2	**Dinas Pertanian**					

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Des. 2020	Kualitas Piutang			
			< 1 Tahun (Lancar)	> 1-2 Tahun (Kurang Lancar)	> 2-3 Tahun (Diragukan)	> 3 Tahun (Macet)
			0,50%	10%	50%	100%
	Piutang	162.199.024,00	0,00	0,00	0,00	162.199.024,00
	Penyisihan	162.199.024,00	0,00	0,00	0,00	162.199.024,00
3	**Kantor Ketahanan Pangan**					
	Piutang	1.037.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	737.000.000,00
	Penyisihan	887.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	737.000.000,00
4	**Dinas Perdagangan**					
	Piutang	266.623.000,00	129.648.000,00	0,00	0,00	136.975.000,00
	Penyisihan	149.939.800,00	12.964.800,00	0,00	0,00	136.975.000,00
	Jml Piutang	**9.584.911.324,00**	**4.559.331.800,00**	**219.415.000,00**	**300.000.000,00**	**4.506.164.524,00**
	Jml. Penyisihan	**4.713.219.243,00**	**35.113.219,00**	**21.941.500,00**	**150.000.000,00**	**4.506.164.524,00**

c) Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi

Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 9.955.327.272,00 merupakan hak Pemerintah Kabupaten Lumajang atas bagi hasil pajak propinsi atas pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi TW IV sesuai SK Gubernur Nomor 188/646/KPTS/013/2020.

Tabel 137. Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	Saldo Akhir 31-Des-19	Koreksi / Mutasi Piutang 2020	Mutasi Piutang (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-20	Keterangan
				Bertambah	Berkurang		
1	Piutang Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Piutang Bagi hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Piutang Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	Saldo Akhir 31-Des-19	Koreksi / Mutasi Piutang 2020	Mutasi Piutang (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-20	Keterangan
				Bertambah	Berkurang		
4	Piutang Bagi hasil Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Piutang Bagi hasil Pajak Rokok	11.527.154.589,00	0,00	9.955.327.272,00	11.527.154.589,00	9.955.327.272,00	Piutang bagi hasil pjk rokok propinsi sebesar Rp. 9.955.327.272,-
Jumlah		**11.527.154.589,00**	0,00	**9.955.327.272,00**	**11.527.154.589,00**	**9.955.327.272,00**	

Tabel 138. Perhitungan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah (Rp)	% Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 Tahun	9.955.327.272,00	0,50%	49.776.636,36
Kurang Lancar	< 1 – 2 Tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	> 2 - 3 Tahun	0,00	50%	0,00
Macet	> 3 Tahun	0,00	100%	0,00
Jumlah		**9.955.327.272,00**		**49.776.636,36**

d) Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat

Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat merupakan hak pemerintah daerahatas pendapatan transfer pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang belum disalurkan/belum diterima oleh pemerintah daerah sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

Tabel 139. Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat	Saldo Akhir 31-Des-19	Koreksi / Mutasi piutang 2020	Mutasi Piutang		Saldo Akhir 31-Des-20	Keterangan
				Bertambah	Berkurang		
1	Bagi Hasil PPh 21	2.871.962.030,00	(2.871.962.030,00)	2.912.700.900,00	0,00	2.912.700.900,00	
2	Bagi hasil Pajak bumi dan bangunan	5.444.670.147,00	(2.709.120.538,00)	1.601.211.000,00	2.484.210.466,00	1.852.550.143,00	
3	Bagi Hasil SDA Panas Bumi	14.304.221,00	(14.304.221,00)	4.295.625,00	0,00	4.295.625,00	
4	Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi	23.138.868.027,00	(12.516.559.966,00)	582.521.600,00	10.622.308.061,00	582.521.600,00	
5	Bagi Hasil dari iuran tetap (landret)	1.119.364.399,00	(1.119.364.399,00)	2.392.800,00	0,00	2392800	

No	Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat	Saldo Akhir 31-Des-19	Koreksi / Mutasi piutang 2020	Mutasi Piutang		Saldo Akhir 31-Des-20	Keterangan
				Bertambah	Berkurang		
6	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	22.278.345,00	0,00	1.834.555.272,00	22.278.345,00	1.834.555.272,00	
7	Bagi Hasil SDA Kehutanan	284.718.100,00	(284.718.100,00)	80.312.425,00	0,00	80.312.425,00	
8	Bagi Hasil SDA Perikanan	273.489.863,00	(269.812.574,00)	316.881.000,00	3.677.289,00	316.881.000,00	
9	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29	0,00	0,00	367.493.000,00	0,00	367.493.000,00	
10	Bagi hasil dari eksplorasi dan iuran Eksploitasi (royalti)	0,00	0,00	25.082.025,00	0,00	25.082.025,00	
Jumlah		**33.169.655.132,00**	**(19.785.841.828,00)**	**7.727.445.647,00**	**13.132.474.161,00**	**7.978.784.790,00**	

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Buletin Teknis nomor 21 tentang Akuntansi Transfer berbasis Akrual pada point 4.3 Koreksi utang piutang transfer disebutkan bahwa :

Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

Berdasarkan hal tersebut untuk piutang bagi hasil pemerintah pusat tidak terdapat penyisihan piutang.

e) Piutang Sewa Kebun Dinas Pertanian

Saldo Piutang Sewa Kebun Dinas Pertanian Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing tercatat sebesar Rp24.750.000,00 dan Rp24.750.000,00. Saldo tersebut merupakan piutang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Dinas Pertanian yang sampai dengan 31 Desember 2019 masih belum diterima.

Tabel 140. Piutang Sewa Kebun Dinas Pertanian Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Jenis Piutang	Saldo Akhir 31 Des 19	Mutasi Piutang (Rp)		Saldo Akhir 31 Des 20
			Bertambah	Berkurang	
1	Sewa Kebun Dinas	24.750.000,00	0,00	0,00	24.750.000,00
Jumlah		**24.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.750.000,00**

Penyisihan Piutang Sewa Kebun Dinas berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 141. Perhitungan Penyisihan Piutang Sewa Kebun Dinas Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2020
Lancar	< 1 bulan	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	0,00	10%	0,00
Diragukan	>3 – 12 bulan	0,00	50%	0,00
Macet	> 12 bulan	24.750.000,00	100%	24.750.000,00
Jumlah		**24.750.000,00**		**24.750.000,00**

f) Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Puskesmas.

Saldo Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Puskesmas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.603.750,00 pada Tahun 2020 ada pengurangan sebesar Rp15.603.750,00 dan penambahan saldo piutang Tahun 2020 sebesar Rp1.587.000,00.

Tabel 142. Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Puskesmas Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Puskesmas	Saldo Akhir 31-Des-19	Koreksi / Mutasi piutang 2020	Mutasi Piutang		Saldo Akhir 31-Des-20	Keterangan
				Bertambah	Berkurang		
1	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	1.197.000,00	0,00	68.400,00	1.197.000,00	68.400,00	Pkm Tunjung
2	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	815.400,00	0,00	145.800,00	815.400,00	145.800,00	Pkm Rogotrunan
3	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	404.700,00	0,00	136.800,00	404.700,00	136.800,00	Pkm Labruk
4	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	691.200,00	0,00	32.400,00	691.200,00	32.400,00	Pkm Sukodono
5	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	684.000,00	0,00	97.200,00	684.000,00	97.200,00	Pkm Padang
6	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	438.900,00	0,00	20.400,00	438.900,00	20.400,00	Pkm Gucialit
7	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	1.054.500,00	0,00	59.400,00	1.054.500,00	59.400,00	Pkm Senduro
8	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	701.100,00	0,00	51.300,00	701.100,00	51.300,00	Pkm Pasrujambe
9	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	1.111.500,00	0,00	37.800,00	1.111.500,00	37.800,00	Pkm Klakah
10	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	609.900,00	0,00	48.600,00	609.900,00	48.600,00	Pkm Kedungjajang
11	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	872.100,00	0,00	22.800,00	872.100,00	22.800,00	Pkm Ranuyoso

No	Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Puskesmas	Saldo Akhir 31-Des-19	Koreksi / Mutasi piutang 2020	Mutasi Piutang		Saldo Akhir 31-Des-20	Keterangan
				Bertambah	Berkurang		
12	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	59.400,00	0,00	27.000,00	59.400,00	27.000,00	Pkm Randuagung
13	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	889.200,00	0,00	81.000,00	889.200,00	81.000,00	Pkm Yosowilangun
14	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	946.200,00	0,00	64.800,00	946.200,00	64.800,00	Pkm Kunir
15	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	478.800,00	0,00	34.200,00	478.800,00	34.200,00	Pkm Tekung
16	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	612.750,00	0,00	64.800,00	612.750,00	64.800,00	Pkm Jatiroto
17	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	475.200,00	0,00	75.600,00	475.200,00	75.600,00	Pkm Sumbersari
18	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	259.200,00	0,00	135.000,00	259.200,00	135.000,00	Pkm Pasirian
19	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	809.400,00	0,00	16.200,00	809.400,00	16.200,00	Pkm Bades
20	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	918.000,00	0,00	43.200,00	918.000,00	43.200,00	Pkm Tempeh
21	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	205.200,00	0,00	57.000,00	205.200,00	57.000,00	Pkm Gesang
22	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	61.200,00	0,00	91.800,00	61.200,00	91.800,00	Pkm Candipuro
23	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	594.000,00	0,00	51.300,00	594.000,00	51.300,00	Pkm Penanggal
24	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	367.200,00	0,00	97.200,00	367.200,00	97.200,00	Pkm Pronojiwo
25	Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama	347.700,00	0,00	27.000,00	347.700,00	27.000,00	Pkm Tempursari
Jumlah		**15.603.750,00**	**0,00**	**1.587.000,00**	**15.603.750,00**	**1.587.000,00**	

Penyisihan Piutang Kapitasi (klaim BPJS) berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 143. Perhitungan Penyisihan Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 bulan	1.587.000,00	0,50%	7.935,00
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	0,00	10%	0,00
Diragukan	>3 – 12 bulan	0,00	50%	0,00

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Macet	> 12 bulan	0,00	100%	0,00
Jumlah		**1.587.000,00**		**7.935,00**

g) Piutang Kelebihan Pembayaran atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Piutang Atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan berupa kelebihan pembayaran berdasarkan hasil pemeriksaan BPK TA 2019 pada beberapa SKPD pada Tahun 2020 sudah dilakukan pengembalian oleh pihak ke-3 ke kas daerah (rekening 0091000755 atas nama Pemda TK.II Lumajang), terinci sebagai berikut:

Tabel 144. Piutang Kelebihan Pembayaran atas atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Saldo Akhir 31-Des-19	Mutasi Piutang 2020 (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-20
			Bertambah	Berkurang	
1	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**757.334.491,86**	**0,00**	**757.334.491,86**	**0,00**
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	757.334.491,86	0,00	757.334.491,86	0,00
2	**Gedung dan Bangunan**	**211.781.418,80**	**0,00**	**211.781.418,80**	**0,00**
	- Dinas Perdagangan	69.667.316,43	0,00	69.667.316,43	0,00
	- Puskesmas Rogotrunan	62.879.673,58	0,00	62.879.673,58	0,00
	- Puskesmas Tempursari	37.660.156,14	0,00	37.660.156,14	0,00
	- Puskesmas Gesang	24.517.560,68	0,00	24.517.560,68	0,00
	- Puskesmas Tunjung	17.056.711,97	0,00	17.056.711,97	0,00
Jumlah		**969.115.910,66**	**0,00**	**969.115.910,66**	**0,00**

h) Piutang Hibah Pemerintah Pusat Tahun 2020

Saldo Piutang Hibah Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp761.444.192,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 145. Perhitungan Piutang Hibah Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Piutang Hibah Pemerintah Pusat	Saldo Akhir 31-Des-19	Koreksi / Mutasi piutang 2020	Mutasi Piutang		Saldo Akhir 31-Des-20	Keterangan
				Bertambah	Berkurang		
1	Pendapatan Hibah IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irigation Project)	1.114.949.413,00	0,00	761.444.192,00	1.114.949.413,00	761.444.192,00	
Jumlah		**1.114.949.413,00**	**0,00**	**761.444.192,00**	**1.114.949.413,00**	**761.444.192,00**	

Penyisihan Piutang Hibah Pemerintah Pusat berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 146. Perhitungan Penyisihan Piutang hibah

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 Tahun	761.444.192,00	0,50%	3.807.220,96
Kurang Lancar	< 1 – 2 Tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	> 2 - 3 Tahun	0,00	50%	0,00-
Macet	> 3 Tahun	0,00	100%	0,00
Jumlah		**761.444.192,00**		**3.807.220,96**

i) Piutang Atas Kerugian Daerah

Saldo Piutang Atas Kerugian Daerah per 31 Desember 2020adalah sebesar Rp9.872.901,00 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 147. Piutang Atas Kerugian Daerah Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	U R A I A N	Saldo Awal TGR	KOREKSI	Penambahan TGR	Pengurangan TGR	Saldo Akhir TGR	KETERANGAN
		01-Jan-20	Tahun 2020	1 Jan s/d Des 2020	1 Jan s/d Des 2020	31-Des-20	
1	TGR Kec. Kunir (Mulyadi setoran PBB)	9.268.059,00	0,00	0,00	0,00	9.268.059,00	REKLAS TGR KE PIUTANG LAINNYA KARENA

No	U R A I A N	Saldo Awal TGR	KOREKSI	Penambahan TGR	Pengurangan TGR	Saldo Akhir TGR	KETERANGAN
		01-Jan-20	Tahun 2020	1 Jan s/d Des 2020	1 Jan s/d Des 2020	31-Des-20	
2	TGR Kaur Keu. Desa Kabuaran (Tohari setoran PBB)	604.842,00	0,00	0,00	0,00	604.842,00	SUDAH MELEWATI JATUH TEMPO PEMBAYARAN DARI SKTJM
3	TGR Staf Dinas Pertanian (Cipto, SP)	13.270.500,00	0,00	0,00	13.270.500,00	0,00	
Jumlah		**23.143.401,00**	**0,00**	**0,00**	**13.270.500,00**	**9.872.901,00**	

Penyisihan Piutang Atas Kerugian Daerah berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 148. Penyisihan Piutang Atas Kerugian Daerah Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 Tahun	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	< 1 – 2 Tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	> 2 - 3 Tahun	0,00	50%	0,00
Macet	> 3 Tahun	9.872.901,00	100%	9.872.901,00
Jumlah		**9.872.901,00**		**9.872.901,00**

j) Piutang lain - lain

Saldo Piutang lain-lain per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp620.014.750,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 149. Piutang lain - lain

Dalam Rupiah

No.	Jenis Piutang	Saldo Akhir 31-Des-19	Koreksi / Mutasi piutang 2020	Mutasi Piutang (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-20
				Bertambah	Berkurang	
1	Bagi hasil Pajak daerah ke desa	2.642.944,00	0,00	0,00	2.642.944,00	0,00
2	Klaim tagihan pelayanan pasien covid-19 kepada Kemenkes yang belum diterimakan di 2020	0,00	0,00	620.014.750,00	0,00	620.014.750,00
Jumlah		**2.642.944,00**	**0.00**	**620.014.750,00**	**2.642.944,00**	**620.014.750,00**

Penyisihan Piutang Atas Kerugian Daerah berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 150. Penyisihan Piutang lain - lain

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020
Lancar	< 1 bulan	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	620.014.750,00	10%	62.001.475,00
Diragukan	>3 – 12 bulan	0,00	50%	0,00
Macet	> 12 bulan	0,00	100%	0,00
Jumlah		**620.014.750,00**		**62.001.475,00**

k) Piutang Sewa Gedung Bioskop Tahun 2020

Tabel 151. Piutang Sewa Gedung Bioskop Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Jenis Piutang	Saldo Akhir 31-Des-19	Koreksi / Mutasi piutang 2020	Mutasi Piutang (Rp) Bertambah	Mutasi Piutang (Rp) Berkurang	Saldo Akhir 31-Des-20
1	Sewa Gedung Bioskop (CV. MOPIC Indonesia)	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Jumlah		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**

Tabel 152. Penyisihan Piutang Sewa Gedung Bioskop Tahun 2020

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2020
Lancar	< 1 bulan	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	0,00	10%	0,00
Diragukan	>3 – 12 bulan	30.000.000,00	50%	15.000.000,00
Macet	> 12 bulan	0,00	100%	0,00
Jumlah		**30.000.000,00**		**15.000.000,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
6) Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**(22.357.091.476,08)**	**(21.221.521.611,51)**

Berdasarkan Saldo Piutang per 31 Desember 2020, jumlah penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp22.357.091.476,08) dan sebesar (Rp21.221.521.611,51) untuk Tahun 2019, untuk setiap jenis piutang.

Tabel 153. Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir 31 Des 19	Koreksi Tahun Berjalan	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
				Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	31-Des-20
1	**PENYISIHAN PIUTANG PAJAK**					
1.1.	Penyisihan Pajak Hotel	0,00	0,00	104.437,50	0,00	104.437,50
1.2.	Penyisihan Pajak Reklame	45.554.035,94	0,00	36.909.068,81	11.618,75	82.451.486,00
1.3.	Penyisihan Pajak Restoran	34.179.550,00		0,00	12.502.050,00	21.677.500,00
1.4.	Penyisihan Pajak Hiburan	0,00		0,00	0,00	0,00
1.5.	Penyisihan Pajak Air Tanah	15.792,98	0,00	12.978,48	15.792,98	12.978,48
1.6.	Penyisihan Pajak Mineral Bukan Logam (Gol. C)	53.685.500,00	0,00	15.675.838,75	0,00	69.361.338,75
1.7.	Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	12.092.380,27	0,00	10.005.264,50	12.092.380,27	10.005.264,50
1.8	Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan	11.176.799.440,70	0,00	2.239.622.888,56	0,00	13.416.422.329,26
	Jumlah (1)	**11.322.326.699,89**	**0,00**	**2.302.330.476,60**	**24.621.842,00**	**13.600.035.334,49**
2	**PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI**					
	RETRIBUSI JASA UMUM	**923.092.420,63**	**69.958,00**	**405.444.265,62**	**408.395.735,00**	**920.210.909,25**
2.1.	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	416.257.278,00	69.958,00	392.642.390,00	408.395.735,00	400.573.891,00
2.2.	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	506.835.142,63	0,00	12.801.875,62	0,00	519.637.018,25
	RETRIBUSI JASA USAHA	**457.855.832,05**	**0,00**	**73.760.382,99**	**329.602,68**	**531.286.612,36**
2.3.	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	436.762.932,05	0,00	73.666.909,99	329.602,68	510.100.239,36
2.4.	Penyisihan Piutang Retribusi Terminal	21.092.900,00	0,00	93.473,00	0,00	21.186.373,00
	RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU	**588.104.167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.104.167,00**
2.5	Penyisihan Piutang Retribusi IMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir 31 Des 19	Koreksi Tahun Berjalan	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
				Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	31-Des-20
2.6	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	588.104.167,00	0,00	0,00	0,00	588.104.167,00
	Jumlah (2)	**1.969.052.419,68**	**69.958,00**	**958.409.297,22**	**817.450.675,36**	**2.039.601.688,61**
3	**PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA**					
3.1.	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	2.900.789.650,10	0,00	1.187.193.471,55	2.248.964.079,99	1.839.019.041,66
3.2.	Penyisihan Piutang Atas Pinjaman Modal Kepada Masyarakat	4.564.729.439,00	0,00	148.489.804,00	0,00	4.713.219.243,00
3.3.	Penyisihan Piutang Bagi hasil Pajak Propinsi	424.118.168,80	0,00	0,00	374.341.532,44	49.776.636,36
3.4.	Penyisihan Piutang Bagi hasil Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Penyisihan Piutang Kebun Dinas	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00	24.750.000,00
3.6.	Penyisihan Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Puskesmas	78.018,75	0,00	7.935,00	78.018,75	7.935,00
3.7.	Penyisihan Piutang kelebihan pembayaran atas nilai aset gedung dan bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Penyisihan Piutang Hibah Pemerintah Pusat	5.574.747,07	0,00	0,00	1.767.526,11	3.807.220,96
3.9	Penyisihan Piutang Atas Kerugian Daerah	9.939.253,50	0,00	0,00	66.352,50	9.872.901,00
3.10	Penyisihan Piutang bagi hasil pajak ke desa	13.214,72	0,00	62.001.475,00	13.214,72	62.001.475,00
3.11	Penyisihan Piutang sewa gedung bioskop	150.000,00	0,00	14.850.000,00	0,00	15.000.000,00
	Jumlah (3)	**7.930.142.491,94**	**0,00**	**1.412.552.835,55**	**2.625.230.724,51**	**6.717.464.602,98**
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIIH (1+2+3)	**21.221.521.611,51**	**69.958,00**	**4.673.292.609,37**	**3.467.303.241,87**	**22.357.091.476,08**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
7) Persediaan	**51.833.924.392,56**	**44.763.844.226,43**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 154. Daftar Persediaan Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Persediaan	2020	2019
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	4.901.815.512,77	3.971.677.487,94
2	Persediaan Barang cetakan	4.276.117.909,85	6.160.700.635,73
3	Persediaan Barang Penggandaan	1.090.000,00	2.590.000,00
4	Persediaan Bahan Baku Bangunan	522.600,00	6.159.100,00
5	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	0,00	4.000.000,00
6	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	12.753.600,00	16.051.860,00
7	Persediaan Bibit Ternak	80.931.435,00	84.396.600,00
8	Persediaan Obat-obatan	17.964.240.297,14	20.767.235.712,98
9	Persediaan Bahan Kimia	1.178.640.119,00	868.253.141,00
10	Persediaan bahan praktek kegiatan	39.120.274,00	136.750,00
11	Persediaan alat kesehatan/ kedokteran habis pakai	0,00	5.805.794.504,69
12	Persediaan Materai	8.778.000,00	8.963.500,00
13	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	0,00	0,00
14	Persediaan Gas	71.481.500,00	135.135.000,00
15	Persediaan Bahan Makanan Pokok	682.947.566,78	1.732.497.246,99
16	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	803.021.437,66	790.598.643,60
17	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	650.862.422,36	1.789.677.502,50
18	Persediaan barang kebutuhan peserta diklat/sosialisasi	0,00	43.450.000,00
19	Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	3.215.016.748,22	32.830.030,00
20	Persediaan souvenir/cindera mata	1.200.000,00	0,00
21	Persediaan pupuk dan pembasmi hama	12.925.000,00	16.500.000,00
22	Persediaan alat kesehatan/kedokteran habis pakai	15.015.567.820,78	0,00
23	Persediaan umbul – umbul	40.645.000,00	66.587.500,00

No	Persediaan	2020	2019
24	Persediaan yang dihibahkan/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	2.876.247.149,00	2.460.609.011,00
	Jumlah	**51.833.924.392,56**	**44.763.844.226,43**

Tabel 155. Persediaan Alat Tulis Kantor

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS PENDIDIKAN	33.040.726,00
2	DINAS KESEHATAN	203.121.555,00
3	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	614.350,00
4	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	13.752.400,00
5	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS CANDIPURO	23.506.666,67
6	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PENANGGAL	14.378.500,00
7	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASIRIAN	21.319.350,00
8	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS BADES	29.884.150,00
9	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPEH	67.416.072,50
10	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GESANG	23.442.250,00
11	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	12.225.800,00
12	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	48.418.400,00
13	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEKUNG	15.368.170,00
14	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KUNIR	64.881.055,00
15	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	60.869.400,00
16	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	22.244.881,67
17	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS JATIROTO	18.162.250,00
18	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	20.085.416,42
19	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUKODONO	19.318.500,00
20	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PADANG	12.025.891,67
21	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	16.217.300,00
22	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SENDURO	35.222.000,00
23	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	14.523.100,00
24	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	19.858.850,00
25	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KLAKAH	40.269.225,00
26	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANUYOSO	34.290.385,00
27	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TUNJUNG	27.852.805,00
28	DINAS KESEHATAN - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	7.088.505,00
29	DINAS KESEHATAN - UPT INSTALASI FARMASI	795.426,00
30	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD dr. HARYOTO	152.090.985,00
31	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	128.040.550,00
32	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	22.573.600,00
33	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.430.000,00

No.	Nama SKPD	Nominal
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	723.900,00
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.325.000,00
36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	967.000,00
37	DINAS SOSIAL	4.747.500,00
38	DINAS TENAGA KERJA	2.719.500,00
39	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.375.150,00
40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.486.700,00
41	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.163.610.259,17
42	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.533.350,00
43	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	37.383.125,00
44	DINAS PERHUBUNGAN	3.290.992,00
45	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.690.000,00
46	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7.960.938,00
47	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.901.825,00
48	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.423.243,00
49	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.664.380,00
50	DINAS PERIKANAN	2.766.900,00
51	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	14.656.950,00
52	DINAS PERTANIAN	3.781.525,00
53	DINAS PERDAGANGAN	3.440.800,00
54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.018.500,00
55	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	561.347.617,00
56	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	389.993.766,67
57	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.522.775,00
58	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	4.622.628,00
59	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	1.492.775,00
60	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	228.085,00
61	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	3.818.808,00
62	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	2.867.687,00
63	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	9.725.476,00
64	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL PIMPINAN	21.893.649,00
65	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	320.466.025,00
66	SEKRETARIAT DPRD	14.197.250,00
67	INSPEKTORAT KABUPATEN	8.693.223,00
68	KECAMATAN LUMAJANG	771.350,00

No.	Nama SKPD	Nominal
69	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN CITRODIWANGSAN	333.500,00
70	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN DITOTRUNAN	2.295.450,00
71	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN	1.326.000,00
72	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOYUDAN	45.000,00
73	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN TOMPOKERSAN	497.700,00
74	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	485.000,00
75	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN KEPUHARJO	321.600,00
76	KECAMATAN SUKODONO	4.505.175,00
77	KECAMATAN PADANG	272.600,00
78	KECAMATAN GUCIALIT	5.079.690,00
79	KECAMATAN SENDURO	462.200,00
80	KECAMATAN PASRUJAMBE	1.138.000,00
81	KECAMATAN SUMBERSUKO	682.000,00
82	KECAMATAN TEMPEH	18.098.520,00
83	KECAMATAN PASIRIAN	133.000,00
84	KECAMATAN CANDIPURO	1.946.550,00
85	KECAMATAN PRONOJIWO	1.313.350,00
86	KECAMATAN TEMPURSARI	1.456.000,00
87	KECAMATAN KUNIR	2.516.300,00
88	KECAMATAN YOSOWILANGUN	457.000,00
89	KECAMATAN TEKUNG	1.215.000,00
90	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	965.000,00
91	KECAMATAN JATIROTO	1.041.810,00
92	KECAMATAN KLAKAH	549.300,00
93	KECAMATAN RANUYOSO	273.000,00
94	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	969.600,00
Jumlah		**4.901.815.512,77**

Tabel 156. Persediaan Barang Cetakan

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS KESEHATAN	8.075.480,00
2	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	30.294,00
3	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	107.632,80
4	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS CANDIPURO	6.593.587,20
5	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PENANGGAL	83.160,00
6	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASIRIAN	211.345,20
7	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS BADES	30.263.566,00
8	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPEH	12.606.898,40
9	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GESANG	93.495,60

No.	Nama SKPD	Nominal
10	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	119.189.244,80
11	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	19.178.854,40
12	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEKUNG	29.138.460,00
13	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KUNIR	169.018.714,80
14	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	86.534.864,80
15	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	65.404.097,60
16	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS JATIROTO	51.733.865,70
17	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	20.432.072,40
18	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUKODONO	48.810.640,00
19	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PADANG	40.424.620,00
20	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	18.542.231,05
21	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SENDURO	2.432.703,60
22	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	67.967.040,80
23	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	40.756.423,20
24	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KLAKAH	69.999.937,60
25	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANUYOSO	16.253.093,60
26	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TUNJUNG	17.347.080,00
27	DINAS KESEHATAN - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	22.970.718,40
28	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD dr. HARYOTO	230.975.800,00
29	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	7.033.254,00
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	25.481.642,00
31	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	657.250,00
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.135.400,00
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.344.875,00
34	DINAS SOSIAL	2.450.000,00
35	DINAS TENAGA KERJA	750.000,00
36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.566.317,00
37	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	536.765.000,00
38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.661.000,00
39	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	36.392.525,00
40	DINAS PERHUBUNGAN	310.663.820,00
41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.159.000,00
42	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	4.648.000,00
43	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	165.051.480,00
44	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.847.908,50
45	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.013.000,00
46	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	80.466.345,00

No.	Nama SKPD	Nominal
47	DINAS PERTANIAN	2.619.742,00
48	DINAS PERDAGANGAN	22.199.384,00
49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.562.550,00
50	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	61.551.600,00
51	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	1.546.071.243,40
52	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.455.000,00
53	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	676.500,00
54	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	34.500,00
55	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	94.000,00
56	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	1.212.375,00
57	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	172.000,00
58	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	2.922.575,00
59	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL PIMPINAN	93.346.450,00
60	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	137.094.452,00
61	SEKRETARIAT DPRD	7.615.100,00
62	INSPEKTORAT KABUPATEN	2.941.000,00
63	KECAMATAN LUMAJANG	503.500,00
64	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN CITRODIWANGSAN	80.000,00
65	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN TOMPOKERSAN	67.000,00
66	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	110.000,00
67	KECAMATAN GUCIALIT	325.000,00
68	KECAMATAN SENDURO	259.000,00
69	KECAMATAN PASRUJAMBE	248.000,00
70	KECAMATAN SUMBERSUKO	212.500,00
71	KECAMATAN TEMPEH	1.500.000,00
72	KECAMATAN CANDIPURO	475.000,00
73	KECAMATAN KUNIR	70.000,00
74	KECAMATAN TEKUNG	237.000,00
75	KECAMATAN JATIROTO	810.700,00
76	KECAMATAN KLAKAH	345.000,00
77	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	44.000,00
Jumlah		**4.276.117.909,85**

Tabel 157. Persediaan Barang Penggandaan

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	1.090.000,00
Jumlah		**1.090.000,00**

Tabel 158. Persediaan Bahan Baku Bangunan

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	522.600,00
Jumlah		**522.600,00**

Tabel 159. Persediaan Bahan/Bibit Tanaman

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.753.600,00
Jumlah		**12.753.600,00**

Tabel 160. Persediaan Bibit Ternak

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS PERTANIAN	80.931.435,00
Jumlah		**80.931.435,00**

Tabel 161. Persediaan Obat-obatan

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	186.249.243,70
2	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	245.575.909,30
3	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS CANDIPURO	356.725.942,10
4	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PENANGGAL	103.399.028,00
5	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASIRIAN	320.504.609,68
6	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS BADES	297.493.253,10
7	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPEH	535.526.229,80
8	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GESANG	169.330.984,02
9	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	417.767.873,32
10	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	171.169.847,58
11	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEKUNG	151.295.970,96
12	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KUNIR	317.993.391,80
13	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	306.641.468,40
14	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	342.980.215,50

No.	Nama SKPD	Nominal
15	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS JATIROTO	414.015.067,20
16	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	384.299.839,50
17	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUKODONO	286.587.254,40
18	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PADANG	163.458.587,65
19	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	154.750.319,50
20	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SENDURO	287.905.002,80
21	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	156.101.222,00
22	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	505.533.898,30
23	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KLAKAH	374.534.018,30
24	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANUYOSO	332.317.668,30
25	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TUNJUNG	168.352.627,20
26	DINAS KESEHATAN - UPT INSTALASI FARMASI	5.119.254.949,00
27	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD dr. HARYOTO	3.551.479.473,73
28	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	1.160.276.396,00
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.088.600,00
30	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	974.353.406,00
31	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	278.000,00
Jumlah		**17.964.240.297,14**

Tabel 162. Persediaan Bahan Kimia

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	6.358.000,00
2	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	43.886.370,00
3	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	25.808.970,00
4	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS JATIROTO	43.660.000,00
5	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUKODONO	52.454.450,00
6	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PADANG	24.660.000,00
7	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	49.183.970,00
8	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KLAKAH	93.323.970,00
9	DINAS KESEHATAN - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	572.682.261,00
10	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	215.340.128,00
11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	36.883.000,00
12	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	14.399.000,00
Jumlah		**1.178.640.119,00**

Tabel 163. Persediaan bahan praktek kegiatan

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	36.459.500,00
2	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KLAKAH	2.607.024,00
3	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	53.750,00
Jumlah		**39.120.274,00**

Tabel 164. Persediaan Materai

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS KESEHATAN	1.473.000,00
2	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PENANGGAL	300.000,00
3	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS BADES	2.550.000,00
4	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEKUNG	603.000,00
5	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS JATIROTO	528.000,00
6	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PADANG	6.000,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	39.000,00
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	186.000,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	45.000,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	150.000,00
11	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	90.000,00
12	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	1.395.000,00
13	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	120.000,00
14	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	30.000,00
15	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	60.000,00
16	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	399.000,00
17	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL PIMPINAN	33.000,00
18	INSPEKTORAT KABUPATEN	228.000,00
19	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN DITOTRUNAN	150.000,00
20	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	6.000,00
21	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN KEPUHARJO	78.000,00
22	KECAMATAN CANDIPURO	66.000,00
23	KECAMATAN KUNIR	243.000,00
Jumlah		**8.778.000,00**

Tabel 165. Persediaan Gas

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS CANDIPURO	572.000,00
2	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS BADES	654.500,00
3	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	357.500,00
4	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	467.500,00
5	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	38.500,00
6	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	110.000,00
7	DINAS KESEHATAN - UPT INSTALASI FARMASI	3.426.500,00
8	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	65.055.000,00
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	800.000,00
Jumlah		**71.481.500,00**

Tabel 166. Persediaan Bahan Makanan Pokok

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	8.832.159,12
2	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	16.546.761,00
3	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS CANDIPURO	98.993.067,28
4	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PENANGGAL	16.481.986,08
5	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASIRIAN	16.481.986,08
6	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPEH	11.230.358,16
7	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GESANG	19.438.261,00
8	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	7.462.129,00
9	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	16.482.004,00
10	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KUNIR	16.481.986,08
11	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	18.445.205,52
12	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS JATIROTO	16.611.535,92
13	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	39.671.407,44
14	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUKODONO	16.611.535,92
15	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SENDURO	16.611.535,92
16	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	2.152.150,56
17	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	259.099,68
18	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KLAKAH	2.802.868,38

No.	Nama SKPD	Nominal
19	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANUYOSO	15.854.208,72
20	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TUNJUNG	16.611.535,92
21	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD dr. HARYOTO	13.823.645,00
22	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	277.727.140,00
23	DINAS SOSIAL	16.500.000,00
24	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL PIMPINAN	835.000,00
Jumlah		**682.947.566,78**

Tabel 167. Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS KESEHATAN	67.242.635,00
2	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	1.378.125,00
3	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	7.806.500,00
4	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS CANDIPURO	6.888.700,00
5	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PENANGGAL	3.076.000,00
6	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASIRIAN	12.889.700,00
7	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS BADES	6.323.217,00
8	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPEH	45.491.981,00
9	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GESANG	1.397.000,00
10	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	2.130.025,00
11	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	13.062.350,00
12	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEKUNG	3.185.933,33
13	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KUNIR	26.262.075,00
14	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	41.493.500,00
15	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	6.527.960,00
16	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS JATIROTO	12.421.250,00
17	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	1.879.200,00
18	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUKODONO	4.731.500,00
19	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PADANG	7.306.500,00
20	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	15.167.601,00
21	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SENDURO	5.984.578,00
22	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	5.825.000,00
23	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	6.376.400,00
24	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KLAKAH	7.470.275,00

No.	Nama SKPD	Nominal
25	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANUYOSO	7.546.450,00
26	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TUNJUNG	3.934.600,00
27	DINAS KESEHATAN - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	7.503.600,00
28	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD dr. HARYOTO	185.692.000,00
29	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	137.432.100,00
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	9.951.500,00
31	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	85.800,00
32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	474.500,00
33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.136.500,00
34	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	6.925.715,00
35	DINAS PERHUBUNGAN	673.900,00
36	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	804.500,00
37	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.976.850,00
38	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.312.000,00
39	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	904.000,00
40	DINAS PERTANIAN	1.407.000,00
41	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	9.229.133,33
42	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	341.500,00
43	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	366.000,00
44	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	855.555,00
45	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL PIMPINAN	20.982.300,00
46	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	75.973.470,00
47	INSPEKTORAT KABUPATEN	2.527.000,00
48	KECAMATAN LUMAJANG	342.609,00
49	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	135.000,00
50	KECAMATAN SUMBERSUKO	130.000,00
51	KECAMATAN TEMPEH	907.400,00
52	KECAMATAN TEKUNG	64.000,00
53	KECAMATAN KLAKAH	88.450,00
Jumlah		**803.021.437,66**

Tabel 168. Persediaan Alat Listrik dan Elektronika (lampu pijar, battery kering)

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS KESEHATAN	27.340.030,00
2	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS BADES	3.596.000,00
4	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEKUNG	77.792,86
5	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KUNIR	1.878.650,00
6	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	5.345.000,00
8	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS JATIROTO	3.235.000,00
9	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	54.250,00
10	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUKODONO	388.500,00
11	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PADANG	6.393.200,00
12	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	1.784.000,00
13	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	504.000,00
14	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KLAKAH	1.872.000,00
16	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TUNJUNG	649.400,00
17	DINAS KESEHATAN - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	2.525.000,00
19	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD dr. HARYOTO	85.448.550,00
20	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	28.389.950,00
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	13.128.514,00
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	29.200,00
23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	105.000,00
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	575.000,00
25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	6.309.100,00
26	DINAS PERHUBUNGAN	282.548.525,50
28	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1.673.100,00
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.940.300,00
30	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	677.600,00
31	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	520.000,00
34	DINAS PERTANIAN	1.453.000,00
35	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	7.890.000,00
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	45.000,00
37	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	112.860,00
38	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL PIMPINAN	27.679.800,00

No.	Nama SKPD	Nominal
39	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	118.575.300,00
40	SEKRETARIAT DPRD	13.509.900,00
41	INSPEKTORAT KABUPATEN	519.400,00
42	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN CITRODIWANGSAN	102.000,00
43	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	90.000,00
47	KECAMATAN TEMPEH	2.897.500,00
Jumlah		**650.862.422,36**

Tabel 169. Persediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pakai Habis Lainnya

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS KESEHATAN	2.486.794.550,00
2	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	2.016.500,00
3	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS CANDIPURO	197.114.800,00
4	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASIRIAN	144.670.536,00
5	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS BADES	1.219.000,00
6	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GESANG	4.900.250,00
7	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	16.152.400,00
8	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEKUNG	11.748.500,00
9	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	52.116.000,00
10	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS JATIROTO	33.302.950,00
11	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUKODONO	2.770.000,00
12	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PADANG	7.825.000,00
13	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	48.728.832,22
14	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SENDURO	6.455.000,00
15	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	3.186.200,00
16	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	38.345.400,00
17	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KLAKAH	13.788.500,00
18	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TUNJUNG	2.788.000,00
19	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	39.710.000,00
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.234.330,00
21	DINAS SOSIAL	14.080.000,00
22	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	4.920.000,00
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	68.775.000,00
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.375.000,00
Jumlah		**3.215.016.748,22**

Tabel 170. Persediaan Souvenir/Cinderamata

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	SEKRETARIAT DPRD	1.200.000,00
Jumlah		**1.200.000,00**

Tabel 171. Persediaan Pupuk Dan Pembasmi Hama

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	12.925.000,00
Jumlah		**12.925.000,00**

Tabel 172. Persediaan Alat Kesehatan/Kedokteran Habis Pakai

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	91.796.833,36
2	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	165.332.462,89
3	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS CANDIPURO	88.897.841,98
4	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PENANGGAL	133.054.320,85
5	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASIRIAN	120.540.954,11
6	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS BADES	91.487.545,74
7	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPEH	107.322.154,94
8	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GESANG	108.776.646,93
9	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	287.820.219,29
10	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	112.141.130,92
11	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEKUNG	93.594.027,25
12	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KUNIR	72.828.953,80
13	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	282.442.226,02
14	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	131.090.881,88
15	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS JATIROTO	254.820.004,12
16	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	9.495.700,00
17	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUKODONO	289.581.752,34
18	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PADANG	169.943.089,89
19	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	30.220.950,00
20	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SENDURO	184.776.061,16
21	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	220.923.634,95
22	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	332.289.989,30
23	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KLAKAH	328.338.538,56
24	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS RANUYOSO	37.268.183,22
25	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TUNJUNG	90.528.648,85
26	DINAS KESEHATAN - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	111.835.333,10

No.	Nama SKPD	Nominal
27	DINAS KESEHATAN - UPT INSTALASI FARMASI	4.912.496.101,85
28	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD dr. HARYOTO	4.499.842.278,48
29	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	1.656.081.355,00
Jumlah		**15.015.567.820,78**

Tabel 173. Persediaan Umbul-umbul / Bendera

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	40.645.000,00
Jumlah		**40.645.000,00**

Tabel 174. Persediaan yang Dihibahkan/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Nominal
1	DINAS PENDIDIKAN	985.784.100,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.890.463.049,00
Jumlah		**2.876.247.149,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
B. INVESTASI JANGKA PANJANG	**58.350.946.463,38**	**57.190.711.716,33**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Sedangkan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi jangka panjang pemerintah Kabupaten Lumajang berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim, Tbk, PT. BPR Jatim, PD. BPR Bank Pasar (BPR Bank Lumajang), PD. Semeru Kabupaten Lumajang dan PDAM (PDAM Tirta Mahameru) Kabupaten Lumajang.

Terhadap PT. Bank Jatim Tbk dan PT. BPR Jatim, pemerintah Kabupaten Lumajang adalah pemegang saham minoritas sehingga penyertaan modal dicatat menggunakan metode biaya. Sedangkan terhadap PD. BPR Bank Pasar, PD. Semeru dan PDAM, pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan pemegang saham mayoritas (pengendali) penyertaan modal pada perusahaan tersebut dicatat menggunakan metode ekuitas.

Kebijakan akuntansi terhadap metode penilaian investasi sebagai berikut:

Tabel 175. Metode Penilaian Investasi

Dalam Rupiah

No	Nama Perusahaan	% Kepemilikan	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal Per Lembar	Metode Penilaian
1	PT. Bank Jatim, Tbk	0,56%	67.206.045	250,00	Metode Biaya
2	PT. BPR Jatim	0,37%	14.900	100.000,00	Metode Biaya
3	BPR Bank Pasar (BPR Bank Lumajang)	100%	0,00	0,00	Metode Ekuitas
4	PD. Semeru	100%	0,00	0,00	Metode Ekuitas
5	PDAM (PDAM Tirta Mahameru)	100%	0,00	0,00	Metode Ekuitas

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Investasi Permanen	**58.350.946.463,38**	**57.190.711.716,33**

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 dan 2019 pada beberapa perusahaan daerah, terinci sebagai berikut :

Tabel 176. Perkembangan Investasi Jangka Panjang – Penyertaan Modal Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Nama Perusahaan	31 Des. 2019	Koreksi Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	31-Des-20
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	PT. Bank Jatim, Tbk	16.801.511.250,00	0,00	0,00	0,00	16.801.511.250,00
2	PT. BPR Jatim	1.490.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000.000,00
3	BPR Bank Pasar (BPR Bank Lumajang)	9.264.590.619,40	1,00	385.881.014,00	426.945.151,50	9.223.526.482,90
4	PD. Semeru	5.027.275.054,18	(367.345.564,17)	318.155.021,00	0,00	4.978.084.511,01
5	PDAM Tirta Mahameru	24.607.334.792,75	(53.244.000,00)	3.859.280.419,00	2.555.546.992,28	25.857.824.219,47
	Jumlah	**57.190.711.716,33**	**(420.589.563,17)**	**4.563.316.454,00**	**2.982.492.143,78**	**58.350.946.463,38**

Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp4.563.316.454,00 meliputi:

1) Penambahan pada BPR Bank Pasar (BPR Bank Lumajang) sebesar Rp385.881.014,00 merupakan pengakuan atas laba bersih perusahaan tahun 2020.

2) Penambahan pada PD. Semeru sebesar Rp318.155.021,00 merupakan pengakuan atas laba bersih perusahaan tahun 2020.
3) Penambahan pada PDAM Tirta Mahameru sebesar Rp3.859.280.419,00 merupakan pengakuan atas laba bersih PDAM Tahun 2020.

Pengurangan Penyertaan Modal sebesar Rp2.982.492.143,78 terdiri dari:
1) Setoran bagian laba BPR Bank Pasar (BPR Bank Lumajang) kepada Pemda Tahun 2020 sebesar Rp426.945.151,5;
2) Setoran bagian laba PDAM Tirta Mahameru kepada Pemda Tahun 2020 sebesar Rp1.405.550.845,76 dan setoran bagian laba ditahan selain disetor ke pemda sebesar Rp1.149.996.146,52.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(1) Penyertaan Modal pada Bank Jatim	**16.801.511.250,00**	**16.801.511.250,00**

Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan pemegang saham minoritas dengan kepemilikan saham seri A sebanyak 67.206.045 lembar dari 11.934.147.982 lembar saham seri A yang dikeluarkan oleh Perseroan (0,56%), oleh karenanya kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mencatat investasi dan pendapatan dari hasil investasi adalah metode biaya, dimana pendapatan dari hasil investasi (deviden) dicatat sebagai pendapatan dan tidak diakui sebagai penambahan investasi.

Atas penyertaan modal pada PT. Bank Jatim, Tbk pada Tahun 2020 diperoleh pendapatan deviden tunai atas laba bersih Tahun 2019 sebesar Rp3.239.331.369,00 dan pada Tahun 2019 diterima pendapatan deviden tunai atas laba bersih Tahun 2018 sebesar Rp3.065.267.712,45.

Pada Tahun 2020 tidak ada penambahan maupun penarikan kembali penyertaan modal pada PT. Bank Jatim, Tbk. Rincian penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Tbk sebagai berikut:

Tabel 177. Perkembangan Penyertaan Modal Pada Bank Jatim

Dalam Rupiah

Tahun	Nominal	Keterangan
s/d 2007	4.139.779.323,71	Perda. No. 02 Th. 2007 tentang Penyertaan Modal Pemda Kab. Lumajang pada PT. Bank Jatim
2008	1.500.000.000,00	Perda. No. 08 Th. 2008 tentang Penyertaan Modal Pemda Kab. Lumajang pada PT. Bank Jatim
2011	1.000.000.000,00	Perda. No. 07 Th. 2011 tentang Penyertaan Modal Pemda Kab. Lumajang pada PT. Bank Jatim
2012	9.508.511.250,00	Perda. No. 03 Th. 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kab. Lumajang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timut (Penerimaan Dana Cadangan Umum Bank Jatim yang dikonversi menjadi saham)

Tahun	Nominal	Keterangan
2018	653.220.676,29	Pengakuan atas stock dividen Tahun 2007 (Perda No. 17 Tahun 2018)
Jumlah	**16.801.511.250,00**	**67.206.045 lembar @ Rp.250,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	32 Desember 2019 (Rp)
(2) Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim	**1.490.000.000,00**	**1.490.000.000,00**

Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan pemegang saham minoritas dengan kepemilikan saham sebanyak 14.900 lembar dari 3.994.823 lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (0,37%), oleh karenanya kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mencatat investasi dan pendapatan dari hasil investasi adalah metode biaya, dimana pendapatan dari hasil investasi (deviden) di catat sebagai pendapatan dan tidak diakui sebagai penambahan investasi.

Atas penyertaan modal pada PT. BPR Jatim, pada Tahun 2020 diperoleh pendapatan deviden tunai atas laba bersih Tahun 2019 sebesar Rp33.689.000,00 dan Tahun 2018 diterima pendapatan deviden tunai atas laba bersih Tahun 2018 sebesar Rp64.099.000,00.

Pada Tahun 2020 tidak ada penambahan maupun penarikan kembali penyertaan modal pada PT. BPR Jatim. Rincian jumlah setoran modal pembelian saham PT. BPR Jatim sebagai berikut:

Tabel 178. Perkembangan Penyertaan Modal Pada BPR Jatim

Dalam Rupiah

Tahun	Nominal	Keterangan
2001	60.000.000,00	Setoran tunai
2002	180.000.000,00	Setoran tunai
2004	150.000.000,00	Setoran tunai
2005	100.000.000,00	Setoran tunai
2006	100.000.000,00	Setoran tunai
2007	200.000.000,00	Setoran tunai
2008	200.000.000,00	Setoran tunai
2012	500.000.000,00	Setoran tunai
Jumlah	**1.490.000.000,00**	

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(3) Penyertaan Modal pada PD. Bank Pasar BPR Bank Pasar (BPR Bank Lumajang)	**9.223.526.482,90**	**9.264.590.619,40**

PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 03 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang. Pada Tahun 2005 berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke Dua atas Perda Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupan Lumajang. Pada Tahun 2020 Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang.

Pemerintah kabupeten Lumajang adalah pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 100%, sehingga pencatatan investasi yang diterapkan adalah metode ekuitas, dimana Pemerintah Kabupaten Lumajang mengakui laba (rugi) bersih PD. BPR Bank Pasar sebagai penambah (pengurang) penyertaan modal sebesar 100%. Bagian laba yang diterima dari PD. BPR Bank Pasar dicatat sebagai pengurang penyertaan modal sebesar jumlah bagian laba yang diterima.

Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017, bahwa modal dasar PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang sebesar Rp18.475.000.000,00 (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Jumlah modal disetor sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp16.475.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terinci sebagai berikut:

- Modal disetor berupa uang s/d Tahun 2017 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Modal disetor berupa penyerahan aset tetap tanah dan bangunan dengan nilai Rp975.000.000.00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Tambahan modal disetor berupa uang pada Tahun 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) melalui pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dalam APBD 2018.
- Tambahan modal disetor berupa uang pada Tahun 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dalam APBD 2019.

Saldo penyertaan modal pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang dan rincian modal disetor per 31 Desember 2020 dan 2019, terinci sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 179. Penyertaan Modal Pada PD. BPR Bank Pasar Lumajang

Dalam Rupiah

Keterangan	2020	2019
1. Modal disetor	18.475.000.000,00	16.475.000.000,00
2. Tambahan Modal disetor	0,00	2.000.000.000,00
3. Jumlah modal disetor s/d 2018 (1+2)	**18.475.000.000,00**	**18.475.000.000,00**
4. Saldo laba (rugi) Tahun lalu	(9.210.409.379,60)	(9.961.880.485,00)
5. Laba Tahun berjalan	385.881.014,00	853.890.303,00
6. Koreksi saldo laba Tahun lalu	0,00	0,00
7. Setoran bagian laba kepada Pemda	(426.945.151,50)	(102.419.197,60)
8. Jumlah saldo laba (rugi) (4+5+6+7)	**(9.251.473.517,10)**	**(9.210.409.379,60)**
9. Jumlah Penyertaan Modal (3+8)	**9.223.526.482,90**	**9.264.590.620,40**

Tabel 180. Jumlah Modal Disetor-Penyertaan Modal Pada BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang

Dalam Rupiah

Tahun	Nominal	Keterangan
2003	1.377.413.000,00	Jumlah s/d 2003
2003	975.000.000,00	Tanah dan Bangunan
2004	622.587.000,00	
2005	4.000.000.000,00	
2006	6.000.000.000,00	
2012	500.000.000,00	
2018	3.000.000.000,00	
2019	2.000.000.000,00	
Jumlah	**18.475.000.000,00**	

Pada Tahun 2020, modal inti PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang telah mencapai Rp9.223.526.482,90 (Sembilan milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh sen). Distribusi atas laba bersih Tahun 2019 sebesar Rp853.890.303,00 direalisasikan pada Tahun 2020 sebesar Rp426.945.151,50.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(4) Penyertaan Modal Pada PD Semeru	**4.978.084.511,01**	**5.027.275.054,18**

PD. Semeru Kabupaten Lumajang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Semeru Lumajang.

Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2018, modal dasar PD. Semeru Kabupaten Lumajang ditetapkan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah). Jumlah modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah). Metode penilaian investasi yang diterapkan adalah metode ekuitas. Pemerintah Kabupaten Lumajang mengakui laba (rugi) bersih PD. Semeru sebagai penambah (pengurang) penyertaan modal sebesar 100% dan mencatat pembagian laba sebagai pengurang penyertaan modal sebesar bagian laba yang diterima.

Saldo penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (PD) Semeru Lumajang dan jumlah modal disetor per 31 Desember 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut:

Tabel 181. Penyertaan Modal Pada PD. Semeru Lumajang

Dalam Rupiah

Keterangan	2019	koreksi Ekuitas	2020
1. Modal disetor	3.500.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00
2. Tambahan penyertaan modal	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3. Jumlah modal disetor (2+3)	**5.500.000.000,00**	**0,00**	**5.500.000.000,00**
4. Saldo laba (rugi) Tahun lalu	(487.887.263,78)	0,00	(472.724.945,82)
5. Koreksi Laba (rugi) Tahun Lalu	0,00	(367.345.564,17)	(367.345.564,17)
6. Laba Tahun berjalan	15.162.317,96	0,00	318.155.021,00
7. Setoran bagian laba kepada Pemda	0,00	0,00	0,00
8. Jumlah saldo laba (rugi) (4+5+6+7)	**(472.724.945,82)**	**(367.345.564,17)**	**(521.915.488,99)**
9. Jumlah Penyertaan Modal (3+8)	**5.027.275.054,18**	**(367.345.564,17)**	**4.978.084.511,01**

Tabel 182. Jumlah Modal Disetor-Penyertaan Modal Pada PD Semeru Kabupaten Lumajang

Dalam Rupiah

Tahun	Nominal	Keterangan
2004	200.000.000,00	
2005	1.000.000.000,00	
2013	500.000.000,00	
2014	800.000.000,00	
2018	1.000.000.000,00	
2019	2.000.000.000,00	
Jumlah	**5.500.000.000,00**	

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(5) Penyertaan Modal pada PDAM	**25.857.824.219,47**	**24.607.334.792,75**

PDAM Kabupaten Lumajang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 18 September 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang. Di dalam Perda PDAM tidak ditentukan besarnya modal dasar, dan seluruh penyertaan modal adalah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang. Metode penilaian investasi yang diterapkan adalah metode ekuitas. Dengan motode ekuitas, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengakui laba (rugi) bersih PDAM sebagai penambah (pengurang) penyertaan modal sebesar 100%.

Perkembangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lumajang pada PDAM sebagai berikut:

Tabel 183. Perkembangan Penyertaan Modal Pada PD PDAM Kabupaten Lumajang

Dalam Rupiah

Keterangan		2020	2019
1	Modal disetor	61.077.969.983,76	56.478.969.983,76
2	Tambahan modal disetor berupa uang	0,00	4.599.000.000,00
3	Tambahan modal disetor berupa barang	0,00	0,00
4	Koreksi Saldo awal Hibah BTN	(53.244.000,00)	
5	**Jumlah modal disetor (1 s/d 4)**	**61.024.725.983,76**	**61.077.969.983,76**
6	Saldo laba (rugi) tahun lalu	(36.470.635.191,01)	(31.628.899.305,26)
7	Koreksi Laba(rugi) tahun lalu	0,00	(4.239.137.098,00)
8	Laba tahun berjalan	3.859.280.419,00	2.555.546.992,28
9	Setoran bagian laba kepada Pemda	(1.405.550.845,76)	(1.736.980.179,02)
10	Alokasi laba PDAM untuk cadangan umum	(511.109.398,46)	(631.629.156,01)
11	Alokasi Laba PDAM untuk dana sosial dan pendidikan	(255.554.699,23)	(315.814.578,00)
12	Alokasi laba PDAM untuk Jasa Produksi	(255.554.699,23)	(315.814.578,00)
13	Alokasi laba PDAM untuk sumbangan pensiun dan sokongan	(127.777.349,60)	(157.907.289,00)
14	**Jumlah saldo laba (rugi) (6 s/d 13)**	**(35.166.901.764,29)**	**(36.470.635.191,01)**
15	**Jumlah penyertaan modal Pemda (5+14)**	**25.857.824.219,47**	**24.607.334.792,75**

Setoran bagian laba ditahan selain di setor ke pemda yaitu merupakan dana alokasi laba PDAM untuk :

a. Alokasi laba PDAM untuk cadangan umum sebesar Rp511.109.398,46
b. Alokasi Laba PDAM untuk dana sosial dan pendidikan Rp255.554.699,23
c. Alokasi laba PDAM untuk Jasa Produksi Rp255.554.699,23
d. Alokasi laba PDAM untuk sumbangan pensiun dan sokongan Rp127.777.349,60

Tabel 184. Jumlah Modal Disetor - Penyertaan Modal Pada PD PDAM Kabupaten Lumajang

Dalam Rupiah

No.	Tahun	Nominal	Keterangan
1		339.076.107,00	Nilai aset eks Jaman Belanda
2		127.216.615,00	Nilai aset Eks SAM Pedesaan
3		122.850.500,00	Nilai aset Eks DIPA TK. II
4		23.250.000,00	Nilai aset Eks P3KT
5		18.032.500,00	Nilai aset Eks PD-PKT
6		798.545.000,00	Nilai Aset berupa tanah
7		3.000.000,00	Nilai aset berupa kendaraan/Truk
8		578.650.000,00	Nilai aset berupa Instalasi Air
9		1.427.707.895,00	Penyertaan Pemerintah Pusat
10		1.800.000.000,00	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda
11	2010	2.494.829.496,88	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda berupa aset jaringan air bersih (selokambang) Dinas PU yang dihibahkan kepada PDAM
12	2015	6.589.241.525,42	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda
13	2016	33.341.808.344,45	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda
14	2017	3.449.000.000,00	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda
15	2018	4.500.000.000,00	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda
16	2018	812.518.000,00	Penambahan modal disetor berupa barang yaitu pembangunan sistem penyediaan IKK sumber air minum (SPAM) IKK sumbersuko dan IKK padang yang telah diserahkan tahun 2016
17	2019	4.599.000.000,00	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda
Jumlah		**61.024.725.983,75**	

C. ASET TETAP

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Tetap	**3.802.809.573.169,33**	**3.622.964.038.853,15**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut:

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya diabaikan.
- Aset tetap disusutkan satu Tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan Tahunan)
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.802.809.573.169,33 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.622.964.038.853,15. Jumlah penambahan aset tetap Tahun 2020 sebesar Rp232.630.817.846,15 dan pengurangan aset tetap Tahun 2020 sebesar Rp52.785.283.529,97 untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 185. Daftar Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Awal 31-Des-19	Mutasi		Saldo 31-Des-20
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	550.277.725.611,09	15.184.064.172,51	12.357.884.500,00	553.103.905.283,60
2	Peralatan dan Mesin	641.072.387.301,13	67.436.954.986,00	5.203.155.392,55	703.306.186.894,58
3	Gedung dan Bangunan	1.046.055.353.067,51	30.509.888.609,90	1.030.793.720,00	1.075.534.447.957,41
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	1.272.757.127.830,42	112.028.881.841,74	31.992.365.947,42	1.352.793.643.724,74
5	Aset Tetap Lainnya	106.481.995.529,00	6.139.958.172,00	10.751.250,00	112.611.202.451,00

No	Uraian	Saldo Awal 31-Des-19	Mutasi		Saldo 31-Des-20
			Bertambah	Berkurang	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.319.449.514,00	1.331.070.064,00	2.190.332.720,00	5.460.186.858,00
	Jumlah	**3.622.964.038.853,15**	**232.630.817.846,15**	**52.785.283.529,97**	**3.802.809.573.169,33**

a. Penambahan Aset Tetap

Penambahan Aset Tetap di Tahun 2020 sebanyak 122.386 buah dengan nilai perolehan aset tetap sebesar Rp232.630.817.846,15, lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 186. Penambahan Aset Tetap Tahun 2020

Dalam Rupiah

NO.	U R A I A N	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2020	121.132,00	193.785.382.268,54	
2.	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap	155,00	204.201.800,00	
3.	Koreksi Kurang Catat	493,00	22.509.199.624,05	
4.	Hibah	606,00	15.477.082.333,56	
5.	Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap	0,00	654.951.820,00	Reklas dari KIB KDP sehingga tidak ada jumlah barang karena berapa dokumen
Jumlah Penambahan		**122.386,00**	**232.630.817.846,15**	

b. Pengurangan Aset Tetap

Pengurangan Aset Tetap pada Tahun 2020 sebanyak 1.475 buah dengan nilai Rp52.785.283.529,97 meliputi transaksi sebagai berikut:

Tabel 187. Pengurangan Aset Tetap Tahun 2020

Dalam Rupiah

NO.	U R A I A N	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Penghapusan Aset Tetap	1.366	51.889.854.489,97	
2.	Reklasifikasi Antar Golongan Barang	33	764.664.040,00	
3.	Koreksi lebih Catat	76	130.765.000,00	Koreksi lebih catat : - 31 bidang pada KIB A (22 tanah jalan dipecah dan 9 tanah jalan digabung) - 44 buah pada KIB D (22 jalan pecah, 10 jalan gabung dan 12 bh mencatat 1 jalan 11 drainase milik OPD lain)
Jumlah Pengurang Aset Tetap		**1.475**	**52.785.283.529,97**	

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1)	**Tanah**	**553.103.905.283,60**	**550.277.725.611,09**

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp553.103.905.283,60 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp550.277.725.611,09. Penambahan aset tetap tanah Tahun 2020 sebesar Rp15.184.064.172,51 dan pengurangan sebesar Rp12.357.884.500,00 sehingga penambahan riil nilai tanah dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 sebesar Rp2.826.179.672,51.

a. Penambahan Aset Tetap Tanah

Penambahan Aset Tetap Tanah di Tahun 2020 sebanyak 447 bidang dengan nilai aset tetap tanah sebesar Rp14.854.675.172,51, lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 188. Penambahan Aset tetap Tanah Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	U R A I A N	Jml Barang (bidang)	Nilai Barang (Rp)
1	Realisasi Belanja Modal Tanah - Belanja Modal Ganti Rugi : 1 bdg Rp674.843.500,00 - Belanja Modal Pensertifikatan Rp71.793.860,00	1	746.637.360,00
2	Reklas dari Belanja Modal yang lain (Gedung & Bangunan)	0	366.510.575,00
3	Koreksi Kurang Catat	375	5.857.985.317,05
4	Hibah	71	8.212.930.920,46
	Jumlah Penambahan	**447**	**15.184.064.172,51**

Penambahan Aset Tetap Tanah di Tahun 2020 lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1 (Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2020).

b. Pengurang Aset Tetap Tanah

Pengurang Nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp12.357.884.500,00 terdiri dari Rp12.227.119.500,00 berasal dari penghapusan Aset Tetap Tanah berdasarkan SK Penghapusan tanah No. 188/29/427.12/2020 dan doubel catat sebesar Rp130.765.000,00, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2 (Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2020).

c. Kondisi aset tetap tanah

1. Jumlah Bidang Tanah

Jumlah Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lumajang di Tahun 2019 sebanyak 2.296 bidang tanah dengan nilai aset sebesar Rp550.277.725.611,09. Pada Tahun 2020 nilai aset tetap tanah meningkat menjadi Rp553.103.905.283,60 (bertambah sebanyak Rp2.826.179.672,51) dan penambahan nilai aset tersebut berdampak pada jumlah bidang tanah, meningkat dari 2.296 bidang menjadi 2.662 bidang (bertambah sebanyak 366 bidang) dengant rincian sebagai berikut:

a. Penambahan Tanah

- Belanja Modal Ganti Rugi menambah	:	1	bidang
- Koreksi kurang catat menambah	:	375	bidang
- Hibah menambah	:	1	bidang
- Penyerahan dari Pengembang	:	70	bidang
Jumlah Penambahan	:	447	bidang

b. Pengurangan Tanah karena :

- Penghapusan	:	49	bidang
- Lebih catat	:	32	bidang
Jumlah Pengurangan	:	81	bidang
Jumlah Penambahan Bidang Tanah Riil	:	366	bidang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3a (Penambahan Jumlah Bidang Tanah Tahun 2020) dan lampiran 3b (Pengurang Jumlah Bidang Tanah Tahun 2020)

2. Jumlah Bidang Tanah Bersertifikat

Tanah yang telah bersertifikat di Tahun 2020 naik sebesar 9,17% di banding Tahun 2019 yaitu dari 731 bidang tanah menjadi menjadi 798 bidang tanah besertifikat (bertambah 67 bidang tanah yang bersertifikat di Tahun 2020). Kenaikan Tanah yang bersertifikat berasal dari :

(a) Sertifikat yang jadi diTahun 2020 sebanyak 35 bidang : 33 bidang
(dari 35 bidang, 2 bidang berasal dari balik nama/sudahbersertifikat jadi tidak mengurangi jumlah tanah yang belum sertifikat, maka yang kita hitung 33 bidang)

(b) Penyerahan sertifikat Fasum dan Fasos dari Pengembang : 34 bidang

Jumlah penambahan sertifikat di Tahun 2020 : 67 bidang

Untuk lebih jelasnya perkembangan sertifikat dapat dilihat pada lampiran 4 (Jumlah Perkembangan Tanah yang Bersertifikat Tahun 2020).

Dari uraian poin (1) dan (2) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah Tanah Pemerintah Kab. Lumajang Tahun 2020	:	2.662	bidang
- Jumlah Tanah yang sudah sertifikat	:	798	bidang
Jumlah tanah yang belum bersertifikat	:	1.864	bidang

3. Pemanfaatan

Bentuk Pemanfaatan tanah di Kabupaten Lumajang berupa :

a. Pinjam Pakai

Pinjam Pakai Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan dengan Instansi Pemerintah :

- Pinjam Pakai Tanah, perjanjian ada & masih berlaku : 3 bh
- Pinjam Pakai Tanah & Bangunan, perjanjian ada & berlaku : 7 bh
- Pinjam Pakai Tanah, perjanjian ada & masa berlaku habis : 2 bh

Pinjam Pakai Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan dengan non Instansi Pemerintah :

- Pinjam Pakai Tanah, perjanjian ada & masih berlaku : 5 bh

- Pinjam Pakai Tanah & Bangunan, perjanjian ada & berlaku : 3 bh
- Pinjam Pakai Tanah yang tidak ada perjanjian : 3 bh

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5 (Daftar Pinjam Pakai Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang)

b. Sewa

Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan penyewaan tanah :

- Sewa Tanah sebagian, perjanjian ada dan berlaku : 1 penyewa
- Sewa Tanah sebagian, perjanjian ada & tidak berlaku : 1 penyewa
- Sewa Tanah seluruhnya, perjanjian ada & berlaku : 33 bidang
- Sewa Tanah seluruhnya, perjanjian ada & tdk berlaku : 4 bidang
- Sewa Tanah sebagian dan Bangunan (milik Pemda) perjanjian ada dan masih berlaku : 3 penyewa
- Sewa Tanah sebagian dan Bangunan (milik Pemda) perjanjian ada dan tidak berlaku : 2 penyewa
- Sewa Tanah sebagian & Bangunan (bkn milik Pemda) perjanjian ada dan berlaku : 16 penyewa
- Sewa Tanah sebagian & Bangunan (bkn milik Pemda) dan perjanjian ada dan tidak berlaku. : 1 penyewa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6 (Daftar Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang)

4. Tanah Milik TNI dan Badan Usaha Milik Negara yang tercatat di KIB A

a. Tanah milik TNI : 2 bidang
b. Tanah milik Badan Usaha Milik Negara (PJKA,PTP dan Perhutani) : 43 bidang

Jumlah Tanah milik TNI dan BUMN : 55 bidang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 7 (Daftar Tanah milik TNI dan BUMN yang tercatat pada KIB Pemerintah Kabupaten Lumajang).

5. Tanah Dengan Luasan 0 M^2 dan Nilai Rp0,00

Tanah dengan luasan 0 M^2 dan Nilai Rp0,00 adalah tanah yang ada dibawa Air Irigasi, pencatatannya berdasarkan Peraturan Menteri PUTR Nomor 14/PRT/M/2015 sebanyak 329 Jaringan Irigasi (329 Bidang Tanah dengan kondisi belum dilakukan pengukuran dan penilaian sehingga luasanya 0 M^2 dan Nilai Rp0,00).

Dengan kondisi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang setiap tahun melakukan pengukuran dan penilaian secara bertahap, dengan perkembangan sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

- Tanah dibawah air irigasi yg sudah diukur dan dinilai sebanyak : 134 bidang;
- Tanah dibawah air irigasi yg belum diukur dan belum dinilai : 195 bidang;

Total Tanah dibawa Air Irigasi sebanyak : 329 bidang.

Dari tanah dibawah air irigasi yang belum diukur dan belum dinilai terdapat 81 bangunan Jaringan Irigasi yang belum dinilai sehingga nilainya masih Rp0,00

6. Tanah Sengketa/Bermasalah

Tanah Sengketa/bermasalah adalah tanah tanah yang dituntut secara resmi oleh masyakat ada 2 (dua) bidang yaitu :

a. Tanah SDN Jatimulyo 01 dituntut 2 (dua) kali :
   - Digugat oleh Surat Bin Dulhari tanggal 20 Juni 2020 No. 5/PDT.G/2020/PN-Lmj, dimenangkan Pemda Lumajang;
   - Digugat oleh Surat Bin Dulhari tanggal 20 Juni 2020 No. 41/PDT.G/2020/PN-Lmj, dimenangkan Penggugat;
   - Pemerintah Daerah Upaya Banding.

b. Tanah SDN Dorogowok 03 dituntut :
   - Digugat Trumo tanggal 19 Pebruari 2020 No. 35/PDT,G/2019/PN-Lmj dengan hasil Pemda menang;
   - Relaas Pemberitahuan Isi Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 206/PDT/2020/PT SBY jo. Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN Lmj, dengan hasil menguatkan hasil dari keputusan sebelumnya.
   - Menunggu hasil kasasi.

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2)	**Peralatan dan Mesin**	**703.306.186.894,58**	**641.072.387.301,13**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp703.306.186.894,58 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp641.072.387.301,13. Jumlah penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.436.954.986,00 & pengurangan sebesar Rp5.203.155.392,55, maka penambahan riil sebesar Rp62.233.799.593,45.

a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Tahun 2020 sebanyak 11.007 buah dengan penambahan nilai sebesar Rp67.436.704.986,00 lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 189. Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	U R A I A N	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)
1	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020	10.324	60.413.044.881,90
2	Reklas dari Belanja Modal yang lain (Gedung & Bangunan)	14	3.538.334.500,00
3	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	155	204.201.800,00
4	Koreksi Kurang Catat	3	39.000.000,00
5	Hibah	511	3.242.373.804,10
	Jumlah Penambahan	**11.007**	**67.436.954.986,00**

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Tahun 2020 lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 8(Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020).

b. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Pengurangan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin terjadi karena Penghapusan Barang Milik Daerah sebanyak 854 barang dengan nilai Rp5.203.155.392,55 sesuai dengan SK Nomor : 188/11/427.12/2020 tanggal 10 Juni 2020, SK Penghapusan Nomor : 188/20/427.12/2020 tanggal 18 September 2020, dan SK Penghapusan Nomor : 188/27/427.12/2020,untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 9 (Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020).

c. Kondisi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kondisi Aset Tetap Peralatan dan Mesin disini kami perjelas khususnya Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai kendaraan bermotor.

- Dengan Intansi Pemerintah perjanjian ada dan berlaku : 10 unit;
- Dengan Intansi Pemerintah perjanjian ada dan tidak berlaku : 1 unit;
- Dengan Non Intansi Pemerintah perjanjian ada dan berlaku : 9 unit;
- Dengan Non Intansi Pemerintah perjanjian ada dan tidak berlaku : 43 unit;
- Dengan Non Intansi Pemerintah perjanjian tdk ada : 1 unit;

Untuk lebih jelasnya pada lampiran 10 (Daftar Pinjam Pakai Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten Lumajang)

d. Hibah yang belum di catat

Hibah yang belum di catat di KIB Tahun 2020 sebanyak 58 buah dengan nilai sebesar Rp4.625.779.021,00 berada di 3 (tiga) OPD untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 11 (Daftar Hibah Barang yang belum ada Berita Acara Serah Terima)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Gedung dan Bangunan	**1.075.534.447.957,41**	**1.046.055.353.067,51**

Saldo Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.075.534.447.957,41 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.046.055.353.067,51. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.509.888.609,90 dan pengurangan sebesar Rp1.030.793.720,00 maka penambahan riil sebesar Rp29.479.094.889,90.

a. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Tahun 2020 sebanyak 126 gedung dengan penambahan nilai sebesar Rp30.509.888.609,90 lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 190. Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	U R A I A N	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	KETERANGAN
1	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020	73	22.542.380.213,62	
2	Reklas dari Belanja Modal	8	553.282.987,28	

No.	U R A I A N	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	KETERANGAN
3	Koreksi Kurang Catat	21	3.382.547.800,00	
4	Hibah	24	4.021.777.609,00	
5	Reklasifikasi Antar Golongan Barang	0	9.900.000,00	Reklas dari KIB KDP sehingga tidak ada jml barang, karena berapa dokumen
Jumlah Penambahan		**126**	**30.509.888.609,90**	

Rincian dapat dilihat pada lampiran 12 (Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020).

b. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan terjadi karena Penghapusan Barang Milik Daerah sebanyak 5 barang dengan nilai Rp921.081.500,00 sesuai dengan SK Nomor : 188/11/427.12/2020 dan Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain lain) sebesar Rp109.712.220,00, sehingga jumlah total sebesar Rp1.030.793.720,00, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 13 (Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020).

c. Kondisi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kondisi Aset Tetap ini difokuskan pada Gedung dan Bangunan yang menempati Tanah di luar milik Pemerintah Kabupaten Lumajang sebanyak 45 lembaga Pendidikan yang Gedung dan Bangunan dibangun di atas Tanah Milik TNI dan BUMN yaitu :

- Tanah milik TNI : 2 bidang
- Tanah milik BUMN (PJKA, PTP dan Perhutani) : 43 bidang

Jumlah Tanah milik TNI dan BUMN : 45 bidang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 14 (Daftar Bangunan milik Pemerintah Kabupaten yang menempati Tanah milik TNI dan BUMN)

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4)	**Jalan, Irigasi & Jaringan**	**1.352.793.643.724,74**	**1.272.757.127.830,42**

Saldo Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.352.793.643.724,74dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.272.757.127.830,42. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp112.028.881.841,74 dan pengurangan sebesar Rp31.992.365.947,42 maka penambahan riil sebesar Rp80.036.515.894,32

a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun 2020 sebanyak 366 gedung dengan penambahan nilai sebesar Rp112.028.881.841,74, lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 191. Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

Dalam Rupiah

NO.	U R A I A N	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	KETERANGAN
1	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahun 2020	271	97.943.473.264,74	
2	Reklas dari Belanja Modal yang lain	1	210.690.250,00	
3	Reklas dari antar Golongan Barang	0	645.051.820,00	Reklas dari KIB KDP sehingga tidak ada jumlah barang karena berapa dokumen
4	Koreksi Kurang Catat	94	13.229.666.507,00	
Jumlah Penambahan		**366**	**112.028.881.841,74**	

Rincian dapat dilihat pada lampiran 15 (Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020).

b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebanyak 67 buah dengan nilai Rp31.992.365.947,42 terjadi karena:

- Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan SK No. 188/11/427.12/2020, No. 188/20/427.12/2020 dan No. 188/29/427.12/2020 sebanyak 23 ruas.
- Koreksi lebih catat terjadi karena ada penggabungan beberapa ruas jalan jadi satu ruas jalan sehingga ada 44 ruas jalan yang harus dikoreksi lebih catat, untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 16 (Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020).

c. Jalan yang dibangun di Tanah Pihak Lain

Jalan yang dibangun di Tanah Pihak Lain sebanyak 40 ruas jalan yaitu :

- Seluruh ruas jalan tanahnya milik pihak lain : 32 ruas
- Sebagian dari ruas jalan tanahnya milik pihak lain : 8 ruas

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 17 (Daftar Jalan yang dibangun bukan diatas Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020).

d. Jaringan Irigasi yang bernilai Rp0,00

Jaringan Irigasi yang bernilai Rp0,00 sebanyak 81 Jaringan Irigasi, kondisi ini setiap Tahun sudah dilakukan penilaian meskipun hasilnya belum maksimal, untuk Tahun 2020 Jaringan Irigasi yang dinilai sebanyak 16 jalan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 18 (Daftar Jaringan Irigasi yang bernilai Rp0,00)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5). Aset Tetap Lainnya	**112.611.202.451,00**	**106.481.995.529,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 sebesar Rp112.611.202.451,00 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp106.481.995.529,00.

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp6.139.958.172,00 dan pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp10.751.250,00 maka penambahan riil sebesar Rp6.129.206.922,00.

a. Penambahan Aset Tetap Lainnya

Penambahan Aset Tetap Lainnya di Tahun 2020 sebanyak 110.387 buah dengan penambahan nilai sebesar 6.139.958.172,00, lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 192. Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020

Dalam Rupiah

NO.	U R A I A N	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)
1	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	110.240	6.124.968.172,00
2	Reklas dari Belanja Modal yang lain	147	14.990.000,00
	Jumlah Penambahan	**110.387**	**6.139.958.172,00**

Rincian dapat dilihat pada lampiran 19 (Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020).

b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Pengurangan Aset Tetap Lainya terjadi karena Penghapusan Barang Milik Daerah berupa buku dan ikan sebanyak 397 buah/ekor dengan nilai Rp10.751.250,00 pada Dinas Perikanan sesuai dengan SK No. 188/20/427.12/2020.

		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
6)	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**5.460.186.858,00**	**6.319.449.514,00**

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.460.186.858,00dan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.319.449.514,00. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.331.070.064,00 dan pengurangan sebesar Rp2.190.332.720,00.

a. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan di Tahun 2020 berasal dari Reklas belanja Modal yang lain sebanyak 53 buah/paket dengan nilai Rp1.331.070.064,00 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 20 (Penambahan Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2020).

b. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan di Tahun 2020 sebanyak 71 buah dengan pengurangan nilai sebesar Rp2.190.332.720,00, lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 193. Pengurangan Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2020

Dalam Rupiah

NO.	U R A I A N	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)
1	Penghapusan Aset KDP Tahun 2020	38	1.535.380.900,00
2	Reklas Antar Golongan Barang	33	654.951.820,00
	Jumlah Pengurangan	**71**	**2.190.332.720,00**

Rincian dapat dilihat pada lampiran 21 Pengurangan Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2020.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
7) Akumulasi Penyusutan	**(1.679.006.923.716,78)**	**(1.558.009.257.988,48)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.679.006.923.716,78) dan 31 Desember 2019 sebesar Rp(1.558.009.257.988,48) audited untuk Tahun 2019, di Tahun 2020 terjadi pengurangan atas akumulasi penyusutan Tahun 2019 sebesar Rp(29.704.987.433,39) disebabkan karena ada koreksi dan penghapusan dan terjadi penambahan sebesar Rp(150.547.449.703,91) dari beban penyusutan Tahun 2020, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 194. Perkembangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2020

Dalam Rupiah

NO.	U R A I A N	Nilai Barang (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Tahun 2019	**(1.558.009.257.988,48)**
2	Pengurang :	29.704.987.433,39
	a. Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Th. 2019, Rp1.500.004.761,23	
	b. Penghapusan Barang di Tahun 2020, Rp28.204.982.672,16	
3	Beban Penyusutan Tahun 2020	(150.702.653.161,69)
4	Akumulasi Penyusutan Tahun 2020	**(1.679.006.923.716,78)**

a. Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Tahun 2020

Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 sebesar Rp1.500.004.761,23 disebabkan karena:

- Validasi sebagian tindak lanjut LHP Tahun 2019 hasil mapping KIB D dengan SK Ruas Jalan Tahun 2017, dari 22 ruas jalan menjadi 50 ruas jalan sehingga mempengaruhi Akumulasi Penyusutan Tahun 2019 berkurang (Rp559.375.841,23) dengan rincian :
  1. Mutasi masuk Akibat Validasi sebesar Rp94.389.540.820,57
  2. Mutasi keluar Akibat Validasi sebesar Rp94.948.916.661,80

  Selisih Rp 559.375.841,23
- Mutasi keluar dari BPBD yang semula dicatat Pembangunan Baru setelah dimutasi ke PUTR maka Akumulasi penyusutan dikeluarkan sebesar Rp960.334.720,00.

- Total koreksi atas Akumulasi Penyusutran Tahun 2020 sebesar Rp559.375.841,23 + Rp960.334.720,00 = Rp1.500.004.761,23

b. Penghapusan Barang di Tahun 2020

Penghapusan Barang KIB B, KIB C dan KIB D di Tahun 2020 memberi dampak pengurangan pada Akumulasi penyusutan sebesar Rp28.204.982.672,16 untuk lebih jelasnya pada Tabel berikut:

Tabel 195. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2020

Dalam Rupiah

NO.	U R A I A N	Akumulasi Penyusutan yang Dihapus
1	KIB B (Peralatan dan Mesin)	5.094.589.951,62
2	KIB C (Gedung dan Bangunan)	154.774.751,90
3	KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	22.955.617.968,64
Jumlah Pengurangan		**28.204.982.672,16**

c. Beban Penyusutan di Tahun 2020

Beban Penyusutan di Tahun 2020 sebesar (Rp150.702.653.161,69), untuk lebih jelas dilihat pada tabel berikut:

Tabel 196. Beban Penyusutan Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	U R A I A N	Beban Penyusutan
1	KIB B (Peralatan dan Mesin)	(76.343.360.917,63)
2	KIB C (Gedung dan Bangunan)	(21.958.518.573,33)
3	KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	(52.400.773.573,73)
Jumlah		**(150.702.653.161,69)**

Dari uraian tersebut diatas maka tersusun daftar Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 197. Daftar Akumulasi Penyusutan Aset tetap Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Tahun 2019	Koreksi Dan Penghapusan	Beban penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan Th. 2020
1	KIB B	(461.009.757.189,20)	5.094.589.951,62	(76.343.360.917,63)	(532.258.528.155,21)
2	KIB C	(262.024.018.955,43)	154.774.751,90	(21.958.518.670,33)	(283.827.762.873,86)
3	KIB D	(834.975.481.843,85)	24.455.622.729,87	(52.400.773.573,73)	(862.920.632.687,71)
Jumlah		**(1.558.009.257.988,48)**	**29.704.987.433,39**	**(150.702.653.161,69)**	**(1.679.006.923.716,78)**

D. DANA CADANGAN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Pembentukan Dana cadangan tersebut pada Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan yang tujuan pembentukannya untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Lumajang Tahun 2018. Pada Tahun 2020 sudah tidak ada saldo dana cadangan karena seluruh dana cadangan dicairkan pada Tahun 2018.

E. ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap, meliputi tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud dan aset lain-lain serta kas yang dibatasi penggunaannya.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Lainnya	**42.906.896.623,41**	**56.857.842.720,38**

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.906.896.623,41 dan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp56.857.842.720,38. Koreksi saldo awal Aset Lainnya di Tahun 2020 sebesar (Rp15.465.500,00), penambahan sebesar (Rp1.134.481.448,82) dan terjadi pengurangan Aset Lainnya sebesar Rp12.800.999.148,15 terinci sebagai berikut:

Tabel 198. Saldo Aset Lainnya Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Saldo awal	56.857.842.720,38	114.651.847.084,04
2	Koreksi Saldo Awal	(15.465.500,00)	(2.072.000,00)
3	**Jumlah setelah Koreksi**	**56.842.377.220,38**	**114.649.775.084,04**
4	Penambahan	(1.244.193.668,82)	5.844.460.376,24
5	Pengurangan	12.800.999.148,15	63.636.392.739,87
	Saldo akhir	**42.906.896.623,41**	**56.857.842.720,41**

Rincian per jenis aset lainnya sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 199. Daftar Rincian Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Lumajang
Per 31 Desember 2020

Dalam Rupiah

No	Jenis	31 Desember 2019 (Rp)	Koreksi saldo awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	33.255.449.479,00	0,00	3.992.351.222,72	0,00	37.247.800.701,72
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(20.671.032.702,60)	0,00	(5.484.468.757,54)	0,00	(26.155.501.460,14)
3	Aset yang dibatasi penggunaannya	388.958.773,00	(15.465.500,00)	247.858.866,00	41.818.500,00	579.533.639,00
4	Piutang Jangka Panjang	499.710.000,00	0,00	0,00	499.710.000,00	0,00
5	Aset Lain lain	43.384.757.170,98	0,00	109.777.220,00	12.259.470.648,15	31.235.063.742,83
	Jumlah	**56.857.842.720,38**	**(15.465.500,00)**	**(1.134.481.448,82)**	**12.800.999.148,15**	**42.906.896.623,41**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Aset Tak Berwujud (ATB)	**37.247.800.701,72**	**33.255.449.479,00**

Aset Tak Berwujud adalah aset berupa perangkat lunak (*software*) komputer dan kajian yang dilakukan oleh SKPD. Saldo Aset tak berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 748 buah dengan nilai sebesar Rp37.247.800.701,72 sedangkan saldo Per 31 Desember 2019 sebanyak 706 buah sebesar Rp33.255.449.479,00. Pada Tahun 2020 terdapat penambahan Aset Tak Berwujud sebanyak 42 buah dengan nilai sebesar Rp3.992.351.222,72 dan tidak ada pengurangan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel 200. Penambahan Aset Tak berwujud Tahun 2020

Dalam Rupiah

NO.	U R A I A N	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)
1	Realisasi Belanja Modal Aset Tak berwujud Tahun 2020	41	3.974.776.544,00
2	Reklas dari Belanja Modal yang lain	1	17.574.678,72
Jumlah Penambahan		**42**	**3.992.351.222,72**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b. Akumulasi Amortisasi ATB	**(26.155.501.460,14)**	**(20.671.032.702,60)**

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2020 sebesar (26.155.501.460,14) dan 31 Desember 2019 sebesar (Rp20.671.032.702,60)

dengan beban Amortisasi sebesar Rp5.484.468.757,54 rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 201. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	U R A I A N	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)
1	Saldo Akhir Aset Tetap Berwujud	748	37.247.800.701,72
2	Akumulasi Amortisasi ATB Tahun 2019	748	(20.671.032.702,60)
3	Beban Amortisasi Tahun 2020	748	(5.484.468.757,54)
4	Akumulasi Amortisasi ATB Tahun 2020	748	**(26.155.501.460,14)**

d. Aset yang dibatasi Penggunaanya	**31 Desember 2020 (Rp)**	**31 Desember 2019 (Rp)**
	579.533.639,00	**388.958.773,00**

Aset yang dibatasi Penggunaannya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan kas milik pihak ke tiga sebagai jaminan pembongkaran bangunan papan reklame yang telah di ikat dengan perjanjian bersama antara pihak ke tiga dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Kas tersebut akan dapat di cairkan oleh pihak ketiga jika kewajiban pembongkaran papan reklame yang sudah habis ijinnya telah dilaksanakan. Sedangkan kas tersebut akan menjadi milik pemerintah jika pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya. Saldo akhir aset yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp579.533.639,00 berasal dari Penerimaan jaminan Jasa Bongkar Tahun 2019 sebesar Rp388.958.773,00 ditambah koreksi saldo awal karena dobel catat jasa bongkar Menara Telekomunikasi atas nama PT. Asri Duta Indonesia pada tahun 2018 sebesar Rp15.465.500,00, kemudian ditambah Jasa Bongkar tahun berjalan sebesar Rp247.858.866,00 dikurangi pencairan deposito tahun 2020 sebesar Rp41.818.500,00, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 202. Rincian aset yang dibatasi penggunaanya Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Jenis aset yang dibatasi penggunaannya	Saldo 31-Des-19	Koreksi saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-20
1	Menara Telekomunikasi	334.743.773,00	(15.465.500,00)	243.798.166,00	41.818.500,00	521.257.939,00
2	Reklame	54.215.000,00	0,00	4.060.700,00	0,00	58.275.700,00
TOTAL		388.958.773,00	(15.465.500,00)	247.858.866,00	41.818.500,00	579.533.639,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
e. Piutang Jangka Panjang	**0,00**	**499.710.000,00**

Piutang Jangka Panjang terjadi karena adanya reklasifikasi atas penempatan piutang pemberian pinjaman kepada masyarakat kelompok lumbung pangan (Leading sektor Dinas Ketahanan Pangan) dan pemberian pinjaman kepada masyarakat pedagang kecil (Leading sektor Dinas Koperasi dan UKM) yang awalnya pada Laporan Keuangan Unaudited 2019 dicatat pada Piutang Lainnya, ternyata jatuh temponya masih pada Tahun 2021 sehingga harus dipindahkan ke Aset Lainnya berupa piutang jangka panjang sebesar Rp499.710.000,00.Dan pada Tahun 2021 direklas kembali pada akun Piutang Lainnya sehingga Piutang Jangka Panjang bersaldo nihil.

Tabel 203. Piutang Jangka Panjang

Dalam Rupiah

NO	Leading Sektor	31-Des-2019	Reklas ke Piutang Lainnya	31-Des-2020
1	Dinas Koperasi dan UKM	199.710.000,00	199.710.000,00	0,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
	JUMLAH	**499.710.000,00**	**499.710.000,00**	**0,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
f. Aset Lain-lain	**31.235.063.742,83**	**43.384.757.170,98**

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.235.063.742,83 dan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp43.384.757.170,98. Penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp109.777.220,00 dan pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp12.259.470.648,15.

1) Penambahan Aset Lain Lain
   Penambahan Aset Lain lain di Tahun 2020 dikarenakan ada kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atas biaya Pengawasan sebesar Rp65.000,00 dan pembongkaran pagar serta bangunan relokasi pasar Candipuro sebesar Rp.109.712.220,00
2) Pengurangan Aset Lain lain di Tahun 2020 sebesar Rp12.259.470.648,15 dikarenakan :
   - Adanya Pemindahtangan melalui Hibah sebanyak 139 unit dengan nilai Rp601.676.100,00 (sesuai Permendagri No.17 Tahun 2007, dihapus dari Daftar selanjutnya dipindahtangankan)
   - Ada Aset Lain Lain Rusak berat sebanyak 471 unit dengan nilai Rp11.657.794.548,15.

Untuk lebih jelasnya dari uraian poin 1 dan poin 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 204. Daftar Perkembangan Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Lumajang
Per 31 Desember 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir	Saldo
		31 Des 2020			31 Des 2020	31 Des 2020
1	Sisa Kendaraan Roda 2 Yang Balum Terjual	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	Sudah dilaksanakan pemindahtanganan melalui mekanisme Hibah dengan SK Bupati No.188.45/258/427.12/2020 tanggal 20-7-2020
2	Uang Persediaan yg blm di SPJ kan	47.979.750,00	0,00	0,00	47.979.750,00	
3	Sisa Kendaraan Roda 4 yang belum terjual	807.176.100,00	0,00	582.176.100,00	225.000.000,00	Sudah dilaksanakan pemindahtanganan melalui mekanisme hibah dan penjualan
4	Aset Lain-lain Rusak Berat	42.510.101.320,98	0,00	11.657.794.548,15	30.852.306.772,83	Sudah dihapus dg SK Bupati Nomor : 188/11/427.12/2020 188/20/427.12/2020 188/27/427.12/2020 188/28/427.12/2020
5	Kelebihan Pembayaran atas Biaya Pengawasan Rehab Bangunan Gedung Kantor pada BKD	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
6	Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Pagar dan Bangunan relokasi Pasar Candipuro)	0,00	109.712.220,00	0,00	109.712.220,00	
Jumlah		**43.384.757.170,98**	**109.777.220,00**	**12.259.470.648,15**	**31.235.063.742,83**	

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	**85.572.386.308,99**	**33.640.380.935,36**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi, pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek pemerintah daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp85.572.386.308,99 dan Rp33.640.380.935,36. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi, utang PFK pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Utang PFK	**0,00**	**0,00**

Utang PFK timbul karena pelaksanaan aktivitas non anggaran meliputi penerimaan dan pengeluaran kas atas potongan - potongan SP2D baik oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 utang PFK masing-masing sebesar Rp0,00. Hal ini mencerminkan seluruh potongan SP2D seperti potongan taspen, taperum, PPh21, PPh22, PPN dan potongan-potongan SP2D lainnya telah distorkan ke rekening Kas Negara atau ke rekening pihak ke tiga. Jumlah potongan SP2D yang diterima dan disetorkan ke rekening kas negara/rekening pihak ke tiga pada Tahun 2020 sebesar Rp85.719.205.994,00.

Tabel 205. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

Dalam Rupiah

No	Jenis Pajak	Nominal
1	Utang Taspen	26.895.232.359,00
2	Utang BPJS	3.849.868.315,00
3	Utang PPH 21 (gaji)	752.221.439,00
4	Utang TAPERUM	466.799.000,00
5	Utang JKK	742.856.759,00
6	Utang JKM	2.221.789.027,00
7	BPJS Non PNS	44.560.203,00
8	BPJS TPP	532.278.759,00
9	BPJS JAPEL	136.607.601,00
10	Utang Pemotongan PPN	21.600.488.460,00
11	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	1.299.966.872,00
12	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	278.604.737,00
13	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2	2.581.932.720,00
14	Utang PPh 21 (LS selain gaji)	24.315.999.743,00
	TOTAL	**85.719.205.994,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(b) Pendapatan Diterima Dimuka	**4.761.271.993,99**	**4.947.329.507,86**

Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir Tahun 2020 dan 2019 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rp4.761.271.993,99 dan Rp4.947.329.507,86yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM, Pendapatan Parkir Berlangganan, dan Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut:

Tabel 206. Rekap Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2020	Koreksi/Mutasi Pendapatan diterima dimuka 2019	Penambahan Pendapatan diterima dimuka 2020	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka 2020	Saldo Akhir 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN PAJAK DAERAH**					
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.466.871,00	0,00	40.630,00	2.466.871,00	40.630,00
	Jumlah	**2.466.871,00**	**0,00**	**40.630,00**	**2.466.871,00**	**40.630,00**
2	**PENDAPATAN RETRIBUSI**					
	RETRIBUSI JASA UMUM					
	- Retribusi Pelayanan Pasar	1.172.151.986,59	0,00	292.455.210,42	379.030.182,00	1.085.577.015,01
	- Retribusi pelayanan tera/tera ulang	91.690.433,33	0,00	72.530.558,33	91.690.433,33	72.530.558,33
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.445.632.083,33	0,00	2.266.606.041,67	2.445.632.083,33	2.266.606.041,67

No.	Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2020	Koreksi/Mutasi Pendapatan diterima dimuka 2019	Penambahan Pendapatan diterima dimuka 2020	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka 2020	Saldo Akhir 31 Desember 2020
	RETRIBUSI JASA USAHA					
	- Pemakaian Kekayaan Daerah	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00
	Jumlah	**3.710.349.503,25**	**0,00**	**2.631.591.810,42**	**2.917.227.698,66**	**3.424.713.615,01**
3	**LAIN-LAIN PAD YANG SAH**					
	- Pendapatan Sewa Tanah	1.187.388.133,61	0,00	1.172.248.333,33	1.141.743.717,96	1.217.892.748,98
	- Pendapatan BLUD	47.125.000,00	0,00	122.700.000,00	51.200.000,00	118.625.000,00
	Jumlah	**1.234.513.133,61**	**0,00**	**1.294.948.333,33**	**1.192.943.717,96**	**1.336.517.748,98**
	TOTAL	**4.947.329.507,86**	**0,00**	**3.926.580.773,75**	**4.112.638.287,62**	**4.761.271.993,99**

Tabel 207. Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2020	Koreksi/Mutasi Pendapatan diterima dimuka 2019	Penambahan Pendapatan diterima dimuka 2020	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka 2020	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PENDAPATAN PAJAK DAERAH**						
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.466.871,00	0,00	40.630,00	2.466.871,00	40.630,00	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah	**2.466.871,00**	**0,00**	**40.630,00**	**2.466.871,00**	**40.630,00**	
2	**PENDAPATAN RETRIBUSI**						
	RETRIBUSI JASA UMUM						
	- Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Perdagangan)	1.172.151.986,59	0,00	292.455.210,42	379.030.182,00	1.085.577.015,01	Dinas Perdagangan
	- Retribusi pelayanan tera/tera ulang (Dinas Perdagangan)	91.690.433,33	0,00	72.530.558,33	91.690.433,33	72.530.558,33	Dinas Perdagangan
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)	2.445.632.083,33	0,00	2.266.606.041,67	2.445.632.083,33	2.266.606.041,67	Dinas Perhubungan
	RETRIBUSI JASA USAHA						
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (RSUD Pasirian)	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	RSUD Pasirian
	Jumlah	**3.710.349.503,25**	**0,00**	**2.631.591.810,42**	**2.917.227.698,66**	**3.424.713.615,01**	

No.	Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2020	Koreksi/Mutasi Pendapatan diterima dimuka 2019	Penambahan Pendapatan diterima dimuka 2020	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka 2020	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Keterangan
3	**LAIN-LAIN PAD YANG SAH**						
	- Pendapatan Sewa Tanah (BPKD)	58.216.300,28	0,00	135.000.000,00	87.957.967,96	105.258.332,32	BPKD
	- Pendapatan Sewa Tanah (Bag. Administrasi Pemerintahan)	969.931.000,00	(969.931.000,00)	0,00	0,00	(0,00)	Bagian Adm. Pemerintahan
	- Pendapatan Sewa Tanah (Dinas PUTR)	0,00	969.931.000,00	856.623.333,33	861.011.583,33	965.542.750,00	Dinas PUTR
	- Pendapatan Sewa Tanah (Dinas pariwisata dan kebudayaan)	11.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	7.000.000,00	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
	- Pendapatan Sewa Tanah (RSUD dr. haryoto)	47.125.000,00	0,00	122.700.000,00	51.200.000,00	118.625.000,00	RSUD dr. Haryoto
	- Pendapatan Sewa Tanah (Dinas Pertanian)	96.333.333,33	0,00	158.350.000,00	149.116.666,67	105.566.666,66	Dinas Pertanian
	- Pendapatan Sewa Tanah (Dinas Perdagangan)	51.907.500,00	0,00	22.275.000,00	39.657.500,00	34.525.000,00	Dinas Perdagangan
	Jumlah	**1.234.513.133,61**	**0,00**	**1.294.948.333,33**	**1.192.943.717,96**	**1.336.517.748,98**	
	TOTAL	**4.947.329.507,86**	**0,00**	**3.926.580.773,75**	**4.112.638.287,62**	**4.761.271.993,99**	

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(c) Utang Lain-lain	**10.971.917.125,00**	**5.230.988.280,00**

Utang Lain – lain adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan di Tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 208. Rekap Utang Lain – lain Tahun 2020

Dalam Rupiah

NO	RINCIAN UTANG	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020	Koreksi 2020	Tambahan Utang Lain-lain Tahun 2020	Pengurangan Utang Lain-lain Tahun 2020	Saldo Akhir 31 Desember 2020
1	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa	833.111.349,00	(2.642.944,00)	2.876.345.843,00	0,00	3.706.814.248,00
2	Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa	337.962.876,00	0,00	3.416.639.746,00	0,00	3.754.602.622,00
3	Utang Dana Desa	676.917.600,00	120.000.000,00	0,00	796.917.600,00	0,00
4	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Propinsi	2.994.037.682,00	2.915.501.116,00	0,00	2.994.037.682,00	2.915.501.116,00
5	Utang Jaminan Jasa Bongkar	388.958.773,00	0,00	247.858.866,00	41.818.500,00	594.999.139,00
JUMLAH		**5.230.988.280,00**	**3.032.858.172,00**	**6.540.844.455,00**	**3.832.773.782,00**	**10.971.917.125,00**

1. Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke desa sebesar Rp3.706.814.248,00, merupakan bagi hasil pajak daerah Tahun 2020 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 209. Rekap Utang Bagi Hasil Pajak ke Desa Tahun 2020

Dalam Rupiah

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
1	Desa Labruk Lor Kec. Lumajang	19.606.569	31.535.321	51.141.890
2	Desa Banjarwaru Kec. Lumajang	5.226.004	16.506.494	21.732.498
3	Desa Denok Kec. Lumajang	2.810.309	13.893.599	16.703.908
4	Desa Boreng Kec. Lumajang	3.863.810	18.901.958	22.765.768
5	Desa Blukon Kec. Lumajang	2.999.829	11.734.250	14.734.079
6	Desa Klanting Kec. Sukodono	2.875.779	12.274.510	15.150.289
7	Desa Kebonagung Kec. Sukodono	3.053.649	10.234.562	13.288.211
8	Desa Karangsari Kec. Sukodono	5.514.622	27.791.129	33.305.751
9	Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono	4.736.332	15.176.096	19.912.428
10	Desa Kutorenon Kec. Sukodono	13.640.468	45.148.374	58.788.842
11	Desa Selokbesuki Kec. Sukodono	5.808.854	16.371.631	22.180.485
12	Desa Sumberejo Kec. Sukodono	3.490.345	30.030.968	33.521.313
13	Desa Uranggantung Kec. Sukodono	2.639.589	10.691.033	13.330.622
14	Desa Selokgondang Kec. Sukodono	5.598.641	21.339.165	26.937.806
15	Desa Bondoyudo Kec. Sukodono	3.041.096	13.546.667	16.587.763
16	Desa Purworejo Kec. Senduro	2.744.473	12.414.881	15.159.354
17	Desa Sarikemuning Kec. Senduro	3.339.913	15.438.195	18.778.108
18	Desa Pandansari Kec. Senduro	2.773.986	12.906.807	15.680.793
19	Desa Senduro Kec. Senduro	4.887.893	19.339.352	24.227.245
20	Desa Burno Kec. Senduro	2.657.997	15.481.014	18.139.011
21	Desa Kandangtepus Kec. Senduro	4.278.301	14.445.935	18.724.236
22	Desa Kandangan Kec. Senduro	2.846.549	13.009.867	15.856.416
23	Desa Bedayu Kec. Senduro	2.729.209	11.174.919	13.904.128
24	Desa Bedayu Talang Kec. Senduro	2.639.589	10.189.659	12.829.248
25	Desa Wonocepoko Ayu Kec. Senduro	2.639.729	10.116.054	12.755.783

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
26	Desa Argosari Kec. Senduro	2.651.589	11.270.984	13.922.573
27	Desa Ranupani Kec. Senduro	2.975.043	10.343.209	13.318.252
28	Desa Wonokerto Kec. Gucialit	2.639.989	10.303.637	12.943.626
29	Desa Pakel Kec. Gucialit	2.639.729	10.202.991	12.842.720
30	Desa Kenongo Kec. Gucialit	2.639.729	10.450.697	13.090.426
31	Desa Gucialit Kec. Gucialit	3.515.729	12.123.643	15.639.372
32	Desa Dadapan Kec. Gucialit	2.705.129	11.186.539	13.891.668
33	Desa Kertowono Kec. Gucialit	2.639.729	10.543.542	13.183.271
34	Desa Tunjung Kec. Gucialit	2.639.589	10.041.201	12.680.790
35	Desa Jeruk Kec. Gucialit	2.769.209	10.177.366	12.946.575
36	Desa Sombo Kec. Gucialit	2.639.590	9.868.835	12.508.425
37	Desa Barat Kec. Padang	2.763.069	10.529.208	13.292.277
38	Desa Babakan Kec. Padang	3.361.745	10.046.877	13.408.622
39	Desa Mojo Kec. Padang	2.641.303	12.083.229	14.724.532
40	Desa Bodang Kec. Padang	2.639.869	13.767.007	16.406.876
41	Desa Kedawung Kec. Padang	3.003.878	10.454.419	13.458.297
42	Desa Padang Kec. Padang	3.993.246	10.697.610	14.690.856
43	Desa Kalisemut Kec. Padang	3.567.850	10.614.674	14.182.524
44	Desa Merakan Kec. Padang	2.978.466	11.777.898	14.756.364
45	Desa Tanggung Kec. Padang	2.674.617	12.017.213	14.691.830
46	Desa Pasrujambe Kec. Pasrujambe	3.769.846	11.734.000	15.503.846
47	Desa Jambekumbu Kec. Pasrujambe	2.818.014	10.906.508	13.724.522
48	Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe	2.641.589	12.112.066	14.753.655
49	Desa Jambearum Kec. Pasrujambe	2.673.474	10.271.981	12.945.455
50	Desa Kertosari Kec. Pasrujambe	3.144.934	12.091.094	15.236.028
51	Desa Pagowan Kec. Pasrujambe	3.218.478	14.923.564	18.142.042
52	Desa Karanganom Kec. Pasrujambe	2.926.480	14.983.312	17.909.792
53	Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko	(2.642.944)	54.725.972	52.083.028
54	Desa Kebonsari Kec. Sumbersuko	4.464.262	17.816.924	22.281.186

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
55	Desa Grati Kec. Sumbersuko	4.234.641	18.874.137	23.108.778
56	Desa Labruk Kidul Kec. Sumbersuko	3.301.999	13.363.944	16.665.943
57	Desa Mojosari Kec. Sumbersuko	3.208.446	15.376.261	18.584.707
58	Desa Sentul Kec. Sumbersuko	2.937.868	13.086.402	16.024.270
59	Desa Purwosono Kec. Sumbersuko	3.096.881	18.958.968	22.055.849
60	Desa PeTahunan Kec. Sumbersuko	3.406.809	19.805.882	23.212.691
61	Desa Jenggrong Kec. Ranuyoso	2.851.641	11.310.186	14.161.827
62	Desa Meninjo Kec. Ranuyoso	2.639.589	10.579.862	13.219.451
63	Desa Tegalbangsri Kec. Ranuyoso	2.639.589	10.422.465	13.062.054
64	Desa Sumberpetung Kec. Ranuyoso	3.212.479	10.989.414	14.201.893
65	Desa Alun-alun Kec. Ranuyoso	2.639.589	13.079.861	15.719.450
66	Desa Ranu Bedali Kec. Ranuyoso	2.641.990	11.662.213	14.304.203
67	Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso	4.006.529	12.986.531	16.993.060
68	Desa Wonoayu Kec. Ranuyoso	3.380.372	10.254.455	13.634.827
69	Desa Penawungan Kec. Ranuyoso	2.639.590	11.424.714	14.064.304
70	Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso	2.752.655	10.815.729	13.568.384
71	Desa Wates Wetan Kec. Ranuyoso	2.847.095	10.817.612	13.664.707
72	Desa Kebonan Kec. Klakah	2.869.253	13.726.216	16.595.469
73	Desa Kudus Kec. Klakah	2.649.727	17.400.275	20.050.002
74	Desa Duren Kec. Klakah	2.899.590	9.887.916	12.787.506
75	Desa Sumberwringin Kec. Klakah	2.648.289	10.425.532	13.073.821
76	Desa Papringan Kec. Klakah	2.649.189	9.968.544	12.617.733
77	Desa Ranupakis Kec. Klakah	2.679.189	11.786.656	14.465.845
78	Desa Tegalrandu Kec. Klakah	2.721.389	10.892.766	13.614.155
79	Desa Klakah Kec. Klakah	3.625.182	14.653.622	18.278.804
80	Desa Mlawang Kec. Klakah	3.353.135	15.031.456	18.384.591
81	Desa Sruni Kec. Klakah	2.663.589	11.208.009	13.871.598
82	Desa Tegalciut Kec. Klakah	2.657.589	11.192.589	13.850.178
83	Desa Sawaran Lor Kec. Klakah	2.684.988	11.367.423	14.052.411

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
84	Desa Banyuputih Lor Kec. Randuagung	3.648.601	16.661.458	20.310.059
85	Desa Kalidilem Kec. Randuagung	2.793.264	10.581.875	13.375.139
86	Desa Tunjung Kec. Randuagung	3.978.135	10.644.637	14.622.772
87	Desa Gedang Mas Kec. Randuagung	2.975.045	12.666.266	15.641.311
88	Desa Kalipenggung Kec. Randuagung	3.155.044	10.726.430	13.881.474
89	Desa Ranulogong Kec. Randuagung	2.675.589	11.348.522	14.024.111
90	Desa Randuagung Kec. Randuagung	3.350.968	12.814.026	16.164.994
91	Desa Ledok Tempuro Kec. Randuagung	2.867.509	11.823.768	14.691.277
92	Desa Pajarakan Kec. Randuagung	2.639.589	10.017.788	12.657.377
93	Desa Buwek Kec. Randuagung	2.755.189	11.493.940	14.249.129
94	Desa Ranuwurung Kec. Randuagung	3.015.515	11.803.343	14.818.858
95	Desa Salak Kec. Randuagung	3.714.358	10.712.980	14.427.338
96	Desa Banyuputih Kidul Kec. Jatiroto	3.079.826	10.245.256	13.325.082
97	Desa Rojopolo Kec. Jatiroto	2.989.440	11.620.601	14.610.041
98	Desa Sukosari Kec. Jatiroto	3.038.056	13.092.245	16.130.301
99	Desa Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto	2.840.638	11.427.118	14.267.756
100	Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto	3.173.544	13.922.248	17.095.792
101	Desa Jatiroto Kec. Jatiroto	4.177.931	14.357.865	18.535.796
102	Desa Pandansari Kec. Kedungjajang	2.639.589	12.455.462	15.095.051
103	Desa Krasak Kec. Kedungjajang	2.639.589	10.565.957	13.205.546
104	Desa Kedungjajang Kec. Kedungjajang	5.955.046	16.651.290	22.606.336
105	Desa Wonorejo Kec. Kedungjajang	6.698.393	18.496.060	25.194.453
106	Desa Umbul Kec. Kedungjajang	3.315.557	9.957.933	13.273.490
107	Desa Curahpetung Kec. Kedungjajang	2.714.389	10.512.711	13.227.100
108	Desa Grobogan Kec. Kedungjajang	3.114.941	11.886.504	15.001.445
109	Desa Bence Kec. Kedungjajang	2.639.590	10.090.570	12.730.160
110	Desa Jatisari Kec. Kedungjajang	2.639.589	10.273.309	12.912.898
111	Desa Tempursari Kec. Kedungjajang	2.719.589	10.706.478	13.426.067
112	Desa Bandaran Kec. Kedungjajang	2.639.589	10.359.217	12.998.806

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
113	Desa Sawaran Kulon Kec. Kedungjajang	2.639.589	10.017.296	12.656.885
114	Desa Nogosari Kec. Rowokangkung	3.970.553	15.072.395	19.042.948
115	Desa Kedungrejo Kec. Rowokangkung	3.315.679	10.987.427	14.303.106
116	Desa Sidorejo Kec. Rowokangkung	3.846.811	12.833.728	16.680.539
117	Desa Rowokangkung Kec. Rowokangkung	2.970.280	10.878.082	13.848.362
118	Desa Sumbersari Kec. Rowokangkung	3.683.047	12.643.123	16.326.170
119	Desa Sumberanyar Kec. Rowokangkung	2.975.949	10.177.752	13.153.701
120	Desa Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung	2.997.762	12.186.767	15.184.529
121	Desa Wonogriyo Kec. Tekung	3.038.167	12.953.292	15.991.459
122	Desa Wonosari Kec. Tekung	2.809.565	10.753.545	13.563.110
123	Desa Mangunsari Kec. Tekung	2.892.390	12.093.399	14.985.789
124	Desa Tekung Kec. Tekung	3.845.268	15.129.443	18.974.711
125	Desa Wonokerto Kec. Tekung	10.497.399	17.503.607	28.001.006
126	Desa Tukum Kec. Tekung	33.060	32.811.235	32.844.295
127	Desa Karangbendo Kec. Tekung	3.345.289	15.855.807	19.201.096
128	Desa Klampokarum Kec. Tekung	4.488.288	13.566.968	18.055.256
129	Desa Gondoruso Kec. Pasirian	14.070.723	28.129.532	42.200.255
130	Desa Kalibendo Kec. Pasirian	3.270.137	11.410.561	14.680.698
131	Desa Bades Kec. Pasirian	4.455.748	11.858.891	16.314.639
132	Desa Bago Kec. Pasirian	19.280.847	22.919.194	42.200.041
133	Desa Selokawar-awar Kec. Pasirian	2.655.004	11.737.017	14.392.021
134	Desa Condro Kec. Pasirian	4.603.742	13.184.951	17.788.693
135	Desa Madurejo Kec. Pasirian	4.107.427	11.156.337	15.263.764
136	Desa Pasirian Kec. Pasirian	5.878.782	34.123.504	40.002.286
137	Desa Sememu Kec. Pasirian	2.694.302	10.716.247	13.410.549
138	Desa Nguter Kec. Pasirian	5.597.817	14.185.727	19.783.544
139	Desa Selokanyar Kec. Pasirian	2.699.459	10.227.892	12.927.351
140	Desa Pandanarum Kec. Tempeh	5.360.389	15.568.110	20.928.499
141	Desa Pandanwangi Kec. Tempeh	16.363.309	16.734.787	33.098.096

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
142	Desa Sumberjati Kec. Tempeh	2.868.699	11.809.892	14.678.591
143	Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh	3.604.163	16.683.986	20.288.149
144	Desa Lempeni Kec. Tempeh	7.978.267	15.774.486	23.752.753
145	Desa Tempeh Tengah Kec. Tempeh	3.668.264	24.938.708	28.606.972
146	Desa Kaliwungu Kec. Tempeh	3.383.398	11.859.049	15.242.447
147	Desa Tempeh Lor Kec. Tempeh	22.807.290	20.522.922	43.330.212
148	Desa Besuk Kec. Tempeh	14.084.899	19.333.307	33.418.206
149	Desa Jatisari Kec. Tempeh	4.452.465	12.880.198	17.332.663
150	Desa Pulo Kec. Tempeh	4.133.596	15.337.996	19.471.592
151	Desa Gesang Kec. Tempeh	4.788.114	14.320.556	19.108.670
152	Desa Jokarto Kec. Tempeh	3.705.310	14.383.134	18.088.444
153	Desa Sidomulyo Kec. Pronojiwo	2.796.250	12.838.642	15.634.892
154	Desa Pronojiwo Kec. Pronojiwo	18.102.515	68.078.248	86.180.763
155	Desa Tamanayu Kec. Pronojiwo	3.334.239	11.963.001	15.297.240
156	Desa Sumberurip Kec. Pronojiwo	19.151.696	37.542.993	56.694.689
157	Desa Oro-oro Ombo Kec. Pronojiwo	5.327.290	10.643.808	15.971.098
158	Desa Supiturang Kec. Pronojiwo	15.760.132	46.645.656	62.405.788
159	Desa Jugosari Kec. Candipuro	18.043.589	17.077.053	35.120.642
160	Desa Jarit Kec. Candipuro	4.884.303	18.040.632	22.924.935
161	Desa Candipuro Kec. Candipuro	4.707.233	15.644.779	20.352.012
162	Desa Sumberejo Kec. Candipuro	3.110.878	12.412.599	15.523.477
163	Desa Sumber Wuluh Kec. Candipuro	17.250.624	33.303.048	50.553.672
164	Desa Sumber Mujur Kec. Candipuro	3.282.872	12.744.428	16.027.300
165	Desa Penanggal Kec. Candipuro	3.782.409	14.524.216	18.306.625
166	Desa Tambahrejo Kec. Candipuro	4.151.178	11.610.010	15.761.188
167	Desa Kloposawit Kec. Candipuro	3.927.427	12.958.708	16.886.135
168	Desa Tumpeng Kec. Candipuro	3.593.043	11.380.294	14.973.337
169	Desa Tegalrejo Kec. Tempursari	2.639.589	11.154.797	13.794.386
170	Desa Bulurejo Kec. Tempursari	2.885.589	10.248.335	13.133.924

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
171	Desa Purorejo Kec. Tempursari	2.651.350	12.143.712	14.795.062
172	Desa Tempurejo Kec. Tempursari	2.709.189	11.117.681	13.826.870
173	Desa Tempursari Kec. Tempursari	3.432.578	14.874.966	18.307.544
174	Desa Pundungsari Kec. Tempursari	2.758.929	10.034.343	12.793.272
175	Desa Kaliuling Kec. Tempursari	2.639.589	10.656.991	13.296.580
176	Desa Jatimulyo Kec. Kunir	3.441.326	9.879.118	13.320.444
177	Desa Jatirejo Kec. Kunir	2.650.080	10.325.330	12.975.410
178	Desa Jatigono Kec. Kunir	2.690.787	12.542.081	15.232.868
179	Desa Sukorejo Kec. Kunir	2.796.927	11.881.968	14.678.895
180	Desa Sukosari Kec. Kunir	3.290.076	12.032.776	15.322.852
181	Desa Kunir Kidul Kec. Kunir	3.004.767	14.337.807	17.342.574
182	Desa Kunir Lor Kec. Kunir	4.142.738	18.215.925	22.358.663
183	Desa Kedungmoro Kec. Kunir	2.759.888	10.289.303	13.049.191
184	Desa Karanglo Kec. Kunir	2.891.169	11.262.077	14.153.246
185	Desa Kabuaran Kec. Kunir	2.700.809	12.240.571	14.941.380
186	Desa Dorogowok Kec. Kunir	6.539.319	14.220.727	20.760.046
187	Desa Darungan Kec. Yosowilangun	3.057.172	13.132.159	16.189.331
188	Desa Kraton Kec. Yosowilangun	2.858.680	13.064.664	15.923.344
189	Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun	2.727.440	17.154.603	19.882.043
190	Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun	2.822.258	11.656.848	14.479.106
191	Desa Yosowilangun Kidul Kec. Yosowilangun	4.863.730	17.926.377	22.790.107
192	Desa Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun	4.455.458	19.886.385	24.341.843
193	Desa Krai Kec. Yosowilangun	3.373.397	12.542.220	15.915.617
194	Desa Karanganyar Kec. Yosowilangun	2.722.506	10.943.015	13.665.521
195	Desa Karangrejo Kec. Yosowilangun	3.059.249	12.351.008	15.410.257
196	Desa Munder Kec. Yosowilangun	3.544.106	14.243.529	17.787.635
197	Desa Kebonsari Kec. Yosowilangun	3.148.809	13.890.028	17.038.837
198	Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun	3.484.238	12.403.397	15.887.635
	TOTAL	**830.468.405**	**2.876.345.843**	**3.706.814.248**

2. Utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa sebesar Rp3.754.602.622,00 merupakan bagi hasil retribusi daerah ke desa Tahun 2020 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 210. Rincian Utang bagi Hasil Retribusi

Dalam Rupiah

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
1	Desa Labruk Lor Kec. Lumajang	1.418.707	13.026.377	14.445.084
2	Desa Banjarwaru Kec. Lumajang	1.294.819	12.698.645	13.993.464
3	Desa Denok Kec. Lumajang	1.329.835	12.579.172	13.909.007
4	Desa Boreng Kec. Lumajang	1.294.755	12.569.919	13.864.674
5	Desa Blukon Kec. Lumajang	1.329.515	12.587.169	13.916.684
6	Desa Klanting Kec. Sukodono	1.428.114	15.297.823	16.725.937
7	Desa Kebonagung Kec. Sukodono	1.290.754	14.537.789	15.828.543
8	Desa Karangsari Kec. Sukodono	2.560.696	16.961.590	19.522.286
9	Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono	2.119.356	17.635.175	19.754.531
10	Desa Kutorenon Kec. Sukodono	2.589.626	20.503.149	23.092.775
11	Desa Selokbesuki Kec. Sukodono	1.507.386	15.566.665	17.074.051
12	Desa Sumberejo Kec. Sukodono	1.588.412	15.367.400	16.955.812
13	Desa Uranggantung Kec. Sukodono	1.318.838	14.474.845	15.793.683
14	Desa Selokgondang Kec. Sukodono	1.327.470	14.834.125	16.161.595
15	Desa Bondoyudo Kec. Sukodono	1.338.492	14.524.578	15.863.070
16	Desa Purworejo Kec. Senduro	1.255.281	13.638.806	14.894.087
17	Desa Sarikemuning Kec. Senduro	1.315.017	13.578.502	14.893.519
18	Desa Pandansari Kec. Senduro	1.257.473	13.655.006	14.912.479
19	Desa Senduro Kec. Senduro	5.095.700	31.577.489	36.673.189
20	Desa Burno Kec. Senduro	1.305.564	13.663.649	14.969.213
21	Desa Kandangtepus Kec. Senduro	1.325.731	13.640.069	14.965.800
22	Desa Kandangan Kec. Senduro	1.307.769	13.657.522	14.965.291
23	Desa Bedayu Kec. Senduro	1.278.229	12.626.354	13.904.583
24	Desa Bedayu Talang Kec. Senduro	1.293.152	12.611.581	13.904.733
25	Desa Wonocepoko Ayu Kec. Senduro	1.267.933	13.637.086	14.905.019
26	Desa Argosari Kec. Senduro	1.364.237	14.087.642	15.451.879

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
27	Desa Ranupani Kec. Senduro	1.278.229	13.660.702	14.938.931
28	Desa Wonokerto Kec. Gucialit	1.249.366	12.532.705	13.782.071
29	Desa Pakel Kec. Gucialit	1.240.768	12.518.705	13.759.473
30	Desa Kenongo Kec. Gucialit	1.250.500	12.573.650	13.824.150
31	Desa Gucialit Kec. Gucialit	1.380.698	12.648.085	14.028.783
32	Desa Dadapan Kec. Gucialit	1.247.464	12.526.877	13.774.341
33	Desa Kertowono Kec. Gucialit	1.259.836	12.554.454	13.814.290
34	Desa Tunjung Kec. Gucialit	1.242.834	12.514.705	13.757.539
35	Desa Jeruk Kec. Gucialit	1.237.768	12.529.069	13.766.837
36	Desa Sombo Kec. Gucialit	1.267.655	12.513.902	13.781.557
37	Desa Barat Kec. Padang	1.215.156	12.614.293	13.829.449
38	Desa Babakan Kec. Padang	1.217.368	12.758.361	13.975.729
39	Desa Mojo Kec. Padang	1.253.660	12.644.985	13.898.645
40	Desa Bodang Kec. Padang	1.254.312	12.806.177	14.060.489
41	Desa Kedawung Kec. Padang	1.234.920	12.667.997	13.902.917
42	Desa Padang Kec. Padang	1.259.912	12.668.653	13.928.565
43	Desa Kalisemut Kec. Padang	1.227.032	12.633.201	13.860.233
44	Desa Merakan Kec. Padang	1.247.848	12.654.157	13.902.005
45	Desa Tanggung Kec. Padang	1.261.476	12.641.129	13.902.605
46	Desa Pasrujambe Kec. Pasrujambe	1.326.460	13.831.974	15.158.434
47	Desa Jambekumbu Kec. Pasrujambe	1.289.302	12.731.952	14.021.254
48	Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe	1.246.080	12.712.488	13.958.568
49	Desa Jambearum Kec. Pasrujambe	1.270.122	12.697.420	13.967.542
50	Desa Kertosari Kec. Pasrujambe	1.215.864	12.894.112	14.109.976
51	Desa Pagowan Kec. Pasrujambe	1.262.950	12.714.768	13.977.718
52	Desa Karanganom Kec. Pasrujambe	1.220.224	12.781.808	14.002.032
53	Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko	1.246.944	13.589.815	14.836.759
54	Desa Kebonsari Kec. Sumbersuko	1.499.088	13.211.681	14.710.769
55	Desa Grati Kec. Sumbersuko	1.424.760	13.048.469	14.473.229
56	Desa Labruk Kidul Kec. Sumbersuko	1.394.464	12.966.970	14.361.434
57	Desa Mojosari Kec. Sumbersuko	1.330.084	12.833.267	14.163.351

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
58	Desa Sentul Kec. Sumbersuko	1.335.852	12.716.937	14.052.789
59	Desa Purwosono Kec. Sumbersuko	20.067.560	35.291.740	55.359.300
60	Desa PeTahunan Kec. Sumbersuko	1.318.740	13.430.633	14.749.373
61	Desa Jenggrong Kec. Ranuyoso	1.278.328	12.575.399	13.853.727
62	Desa Meninjo Kec. Ranuyoso	1.277.022	12.569.906	13.846.928
63	Desa Tegalbangsri Kec. Ranuyoso	1.284.864	12.586.028	13.870.892
64	Desa Sumberpetung Kec. Ranuyoso	1.295.464	12.575.371	13.870.835
65	Desa Alun-alun Kec. Ranuyoso	1.271.790	12.578.446	13.850.236
66	Desa Ranu Bedali Kec. Ranuyoso	1.589.403	12.601.968	14.191.371
67	Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso	1.320.692	12.797.152	14.117.844
68	Desa Wonoayu Kec. Ranuyoso	1.289.284	12.589.271	13.878.555
69	Desa Penawungan Kec. Ranuyoso	1.271.790	12.581.106	13.852.896
70	Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso	1.289.412	12.586.748	13.876.160
71	Desa Wates Wetan Kec. Ranuyoso	2.321.872	18.455.884	20.777.756
72	Desa Kebonan Kec. Klakah	1.341.879	14.098.990	15.440.869
73	Desa Kudus Kec. Klakah	1.341.215	13.314.266	14.655.481
74	Desa Duren Kec. Klakah	1.297.467	13.354.254	14.651.721
75	Desa Sumberwringin Kec. Klakah	1.299.819	13.283.390	14.583.209
76	Desa Papringan Kec. Klakah	1.313.201	13.293.332	14.606.533
77	Desa Ranupakis Kec. Klakah	1.619.748	13.305.112	14.924.860
78	Desa Tegalrandu Kec. Klakah	1.648.930	15.278.034	16.926.964
79	Desa Klakah Kec. Klakah	1.518.477	14.969.290	16.487.767
80	Desa Mlawang Kec. Klakah	6.271.963	28.282.776	34.554.739
81	Desa Sruni Kec. Klakah	1.302.695	13.260.566	14.563.261
82	Desa Tegalciut Kec. Klakah	1.321.507	13.331.962	14.653.469
83	Desa Sawaran Lor Kec. Klakah	1.307.669	13.265.008	14.572.677
84	Desa Banyuputih Lor Kec. Randuagung	1.268.049	12.278.890	13.546.939
85	Desa Kalidilem Kec. Randuagung	1.295.633	12.296.200	13.591.833
86	Desa Tunjung Kec. Randuagung	1.239.889	12.439.160	13.679.049
87	Desa Gedang Mas Kec. Randuagung	2.550.773	12.088.395	14.639.168
88	Desa Kalipenggung Kec. Randuagung	1.253.929	12.102.267	13.356.196

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
89	Desa Ranulogong Kec. Randuagung	1.258.137	12.114.924	13.373.061
90	Desa Randuagung Kec. Randuagung	8.153.892	21.186.751	29.340.643
91	Desa Ledok Tempuro Kec. Randuagung	1.289.761	12.346.839	13.636.600
92	Desa Pajarakan Kec. Randuagung	1.252.049	12.098.051	13.350.100
93	Desa Buwek Kec. Randuagung	1.256.289	12.077.828	13.334.117
94	Desa Ranuwurung Kec. Randuagung	1.262.745	12.100.162	13.362.907
95	Desa Salak Kec. Randuagung	1.233.013	12.059.174	13.292.187
96	Desa Banyuputih Kidul Kec. Jatiroto	1.213.252	15.326.101	16.539.353
97	Desa Rojopolo Kec. Jatiroto	1.234.280	15.239.925	16.474.205
98	Desa Sukosari Kec. Jatiroto	1.254.621	15.174.313	16.428.934
99	Desa Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto	1.200.340	15.234.285	16.434.625
100	Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto	1.248.306	15.296.754	16.545.060
101	Desa Jatiroto Kec. Jatiroto	1.509.356	16.506.464	18.015.820
102	Desa Pandansari Kec. Kedungjajang	1.294.913	12.386.862	13.681.775
103	Desa Krasak Kec. Kedungjajang	1.281.087	12.367.411	13.648.498
104	Desa Kedungjajang Kec. Kedungjajang	1.317.165	12.823.527	14.140.692
105	Desa Wonorejo Kec. Kedungjajang	10.025.677	22.700.769	32.726.446
106	Desa Umbul Kec. Kedungjajang	1.298.851	12.428.503	13.727.354
107	Desa Curahpetung Kec. Kedungjajang	1.323.457	12.439.958	13.763.415
108	Desa Grobogan Kec. Kedungjajang	1.416.489	12.738.537	14.155.026
109	Desa Bence Kec. Kedungjajang	1.286.639	12.382.211	13.668.850
110	Desa Jatisari Kec. Kedungjajang	1.284.293	12.416.025	13.700.318
111	Desa Tempursari Kec. Kedungjajang	1.278.229	12.361.762	13.639.991
112	Desa Bandaran Kec. Kedungjajang	1.284.293	12.381.625	13.665.918
113	Desa Sawaran Kulon Kec. Kedungjajang	1.278.229	12.967.746	14.245.975
114	Desa Nogosari Kec. Rowokangkung	2.295.924	15.940.084	18.236.008
115	Desa Kedungrejo Kec. Rowokangkung	1.311.050	13.096.664	14.407.714

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
116	Desa Sidorejo Kec. Rowokangkung	1.368.846	12.971.819	14.340.665
117	Desa Rowokangkung Kec. Rowokangkung	1.366.402	13.069.382	14.435.784
118	Desa Sumbersari Kec. Rowokangkung	1.278.722	12.923.583	14.202.305
119	Desa Sumberanyar Kec. Rowokangkung	1.263.646	12.870.427	14.134.073
120	Desa Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung	1.291.680	12.992.154	14.283.834
121	Desa Wonogriyo Kec. Tekung	1.280.789	12.776.355	14.057.144
122	Desa Wonosari Kec. Tekung	1.219.015	12.711.800	13.930.815
123	Desa Mangunsari Kec. Tekung	1.213.883	12.702.017	13.915.900
124	Desa Tekung Kec. Tekung	1.364.087	12.965.637	14.329.724
125	Desa Wonokerto Kec. Tekung	1.230.673	12.981.515	14.212.188
126	Desa Tukum Kec. Tekung	1.566.047	14.802.073	16.368.120
127	Desa Karangbendo Kec. Tekung	1.342.139	13.849.207	15.191.346
128	Desa Klampokarum Kec. Tekung	1.317.907	13.018.820	14.336.727
129	Desa Gondoruso Kec. Pasirian	1.254.068	68.918.965	70.173.033
130	Desa Kalibendo Kec. Pasirian	1.338.636	68.888.839	70.227.475
131	Desa Bades Kec. Pasirian	1.312.923	68.998.049	70.310.972
132	Desa Bago Kec. Pasirian	1.221.724	69.020.591	70.242.315
133	Desa Selokawar-awar Kec. Pasirian	1.309.716	70.128.299	71.438.015
134	Desa Condro Kec. Pasirian	1.837.664	70.657.417	72.495.081
135	Desa Madurejo Kec. Pasirian	1.328.872	69.530.255	70.859.127
136	Desa Pasirian Kec. Pasirian	5.359.428	97.138.530	102.497.958
137	Desa Sememu Kec. Pasirian	1.320.660	68.940.801	70.261.461
138	Desa Nguter Kec. Pasirian	1.266.648	69.372.390	70.639.038
139	Desa Selokanyar Kec. Pasirian	2.842.617	68.832.359	71.674.976
140	Desa Pandanarum Kec. Tempeh	1.278.068	13.378.442	14.656.510
141	Desa Pandanwangi Kec. Tempeh	1.300.134	13.383.397	14.683.531

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
142	Desa Sumberjati Kec. Tempeh	1.290.576	13.612.996	14.903.572
143	Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh	1.318.388	13.960.568	15.278.956
144	Desa Lempeni Kec. Tempeh	1.509.230	15.081.174	16.590.404
145	Desa Tempeh Tengah Kec. Tempeh	4.721.275	24.974.456	29.695.731
146	Desa Kaliwungu Kec. Tempeh	1.300.594	13.356.517	14.657.111
147	Desa Tempeh Lor Kec. Tempeh	1.502.080	13.844.969	15.347.049
148	Desa Besuk Kec. Tempeh	1.361.314	18.102.274	19.463.588
149	Desa Jatisari Kec. Tempeh	1.304.668	13.369.910	14.674.578
150	Desa Pulo Kec. Tempeh	1.324.474	13.367.337	14.691.811
151	Desa Gesang Kec. Tempeh	1.303.314	13.679.844	14.983.158
152	Desa Jokarto Kec. Tempeh	2.174.282	13.383.926	15.558.208
153	Desa Sidomulyo Kec. Pronojiwo	1.230.726	13.766.520	14.997.246
154	Desa Pronojiwo Kec. Pronojiwo	3.491.222	22.324.024	25.815.246
155	Desa Tamanayu Kec. Pronojiwo	1.258.756	13.386.560	14.645.316
156	Desa Sumberurip Kec. Pronojiwo	1.240.922	13.457.874	14.698.796
157	Desa Oro-oro Ombo Kec. Pronojiwo	1.230.726	14.021.890	15.252.616
158	Desa Supiturang Kec. Pronojiwo	1.219.156	13.449.848	14.669.004
159	Desa Jugosari Kec. Candipuro	1.187.875	13.004.830	14.192.705
160	Desa Jarit Kec. Candipuro	1.307.109	13.331.441	14.638.550
161	Desa Candipuro Kec. Candipuro	1.251.221	13.984.697	15.235.918
162	Desa Sumberejo Kec. Candipuro	2.022.140	16.374.240	18.396.380
163	Desa Sumber Wuluh Kec. Candipuro	1.230.713	13.403.277	14.633.990
164	Desa Sumber Mujur Kec. Candipuro	1.224.871	13.599.334	14.824.205
165	Desa Penanggal Kec. Candipuro	1.301.109	13.143.248	14.444.357
166	Desa Tambahrejo Kec. Candipuro	1.252.389	13.035.117	14.287.506
167	Desa Kloposawit Kec. Candipuro	1.231.875	13.029.806	14.261.681
168	Desa Tumpeng Kec. Candipuro	1.252.837	13.080.912	14.333.749
169	Desa Tegalrejo Kec. Tempursari	1.186.489	13.889.998	15.076.487
170	Desa Bulurejo Kec. Tempursari	1.216.185	13.905.339	15.121.524
171	Desa Purorejo Kec. Tempursari	1.213.689	13.872.186	15.085.875

NO	PEMERINTAHAN DESA	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
		KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019	KURANG BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020	TOTAL KURANG BAYAR
172	Desa Tempurejo Kec. Tempursari	1.239.129	13.918.158	15.157.287
173	Desa Tempursari Kec. Tempursari	1.277.621	14.237.387	15.515.008
174	Desa Pundungsari Kec. Tempursari	1.251.289	13.862.386	15.113.675
175	Desa Kaliuling Kec. Tempursari	1.283.253	13.863.786	15.147.039
176	Desa Jatimulyo Kec. Kunir	1.236.704	13.182.193	14.418.897
177	Desa Jatirejo Kec. Kunir	1.306.112	13.185.336	14.491.448
178	Desa Jatigono Kec. Kunir	1.300.430	13.180.697	14.481.127
179	Desa Sukorejo Kec. Kunir	1.217.504	13.182.953	14.400.457
180	Desa Sukosari Kec. Kunir	1.332.034	13.678.489	15.010.523
181	Desa Kunir Kidul Kec. Kunir	1.297.504	13.214.297	14.511.801
182	Desa Kunir Lor Kec. Kunir	3.048.241	22.514.086	25.562.327
183	Desa Kedungmoro Kec. Kunir	1.296.844	13.179.936	14.476.780
184	Desa Karanglo Kec. Kunir	1.300.430	13.142.221	14.442.651
185	Desa Kabuaran Kec. Kunir	1.299.380	13.272.973	14.572.353
186	Desa Dorogowok Kec. Kunir	1.278.168	13.192.980	14.471.148
187	Desa Darungan Kec. Yosowilangun	1.296.887	12.823.185	14.120.072
188	Desa Kraton Kec. Yosowilangun	1.312.543	12.869.221	14.181.764
189	Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun	11.753.719	12.805.871	24.559.590
190	Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun	1.300.027	12.818.933	14.118.960
191	Desa Yosowilangun Kidul Kec. Yosowilangun	1.436.399	12.925.417	14.361.816
192	Desa Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun	5.765.917	31.833.405	37.599.322
193	Desa Krai Kec. Yosowilangun	1.797.047	14.117.085	15.914.132
194	Desa Karanganyar Kec. Yosowilangun	1.288.843	12.800.589	14.089.432
195	Desa Karangrejo Kec. Yosowilangun	1.302.717	12.846.291	14.149.008
196	Desa Munder Kec. Yosowilangun	1.274.157	12.848.863	14.123.020
197	Desa Kebonsari Kec. Yosowilangun	1.302.447	12.916.737	14.219.184
198	Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun	1.329.073	13.021.642	14.350.715
	TOTAL	**337.962.876**	**3.416.639.746**	**3.754.602.622**

3. Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Propinsi sebesar Rp2.915.501.116,00 merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang karena adanya lebih transfer pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021.

4. Utang Jasa Bongkar merupakana utang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas penerimaan jaminan Jasa Bongkar sebesar Rp594.999.139,00 (rincian dapat dilihat pada penjelasan akun Aset yang Dibatasi Penggunaannya tabel.199).

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Utang Belanja	**69.839.197.190,00**	**23.462.063.147,50**

Utang Belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp69.839.197.190,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp21.878.374.276,00, utang belanja dan jasa sebesar Rp42.990.833.437,00, utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.210.119.800,00, utang belanja tidak terduga sebesar Rp2.563.126.798,00, dan utang belanja bantuan sebesar Rp196.742.879,00 sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 211. Rincian Utang Belanja Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Koreksi Saldo Awal	Reklas Utang	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Utang Belanja Pegawai	10.674.052.668,00	133.140.500,00	0,00	21.743.029.935,00	10.671.848.827,00	21.878.374.276,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	10.262.352.513,50	10.392.628,00	(98.094.700,00)	42.980.053.937,00	10.163.870.941,50	42.990.833.437,00
3	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	2.210.119.800,00	0,00	98.094.700,00	0,00	98.094.700,00	2.210.119.800,00

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Koreksi Saldo Awal	Reklas Utang	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
4	Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00-	2.563.126.798,00	0,00	2.563.126.798,00
5	Utang Belanja Bantuan	315.538.166,00	0,00	0,00	196.742.879,00	315.538.166,00	196.742.879,00
Jumlah		**23.462.063.147,50**	**143.533.128,00**	**0,00**	**67.482.953.549,00**	**21.249.352.634,50**	**69.839.197.190,00**

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.878.374.276,00 merupakan kewajiban atas jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga medis dan non medis PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi di entitas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan seperti RSUD dr. Haryoto dan Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan, serta kekurangan tambahan penghasilan pegawai yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2020.

Tabel 212. Rekap Utang Belanja Pegawai Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	Gaji dan Tunjangan	12.969.483.752,00
2	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	4.990.782.395,00
3	Honorarium pelayanan kesehatan (PNS)	2.105.025.508,00
4	Insentif Pemungutan Pajak	1.808.806.621,00
5	Lembur PNS	4.276.000,00
Jumlah		**21.878.374.276,00**

Tabel 213. Rincian Utang Gaji dan Tunjangan 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	14.845.798,00
2	Tunjangan keluarga	3.671.734,00
3	Tunjangan jabatan	10.538.850,00
4	Tunjangan fungsional	1.109.950,00
5	Tunjangan fungsional Umum	1.599.950,00

No	Uraian	Jumlah
6	Tunjangan Beras	10.614.156,00
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	283.219,00
8	Pembulatan gaji	1.680,00
9	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	132.615,00
10	Tambahan penghasilan guru	161.500.000,00
11	Tunjangan profesi guru	12.765.185.800,00
	Jumlah	**12.969.483.752,00**

Tabel 214. Rincian Utang Gaji dan Tunjangan 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	Uraian
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	114.803.805
2	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	65.561.231
3	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	71.973.820
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	44.891.475,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	106.122.033,00
6	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	95.139.971,00
7	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	58.633.368,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	64.556.405,00
9	DINAS KESEHATAN	344.996.019,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	50.773.147,00
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.478.075,00
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	68.674.790,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	349.054.223,00
14	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	94.271.636,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	178.998.426,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	56.342.957,00
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	59.999.047,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	50.542.781,00
19	DINAS PENDIDIKAN	375.839.756,00
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	86.328.249,00
21	DINAS PERDAGANGAN	374.300.555,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	180.447.315,00

No	Uraian	Uraian
23	DINAS PERIKANAN	75.679.072,00
24	DINAS PERTANIAN	346.603.556,00
25	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	128.821.930,00
26	DINAS SOSIAL	62.730.128,00
27	DINAS TENAGA KERJA	89.536.573,00
28	INSPEKTORAT KABUPATEN	129.255.592,00
29	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	104.396.242,00
30	KECAMATAN CANDIPURO	35.989.440,00
31	KECAMATAN GUCIALIT	34.227.247,00
32	KECAMATAN JATIROTO	29.423.034,00
33	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	33.582.700,00
34	KECAMATAN KLAKAH	32.494.729,00
35	KECAMATAN KUNIR	32.684.821,00
36	KECAMATAN LUMAJANG	131.060.568,00
37	KECAMATAN PADANG	30.004.679,00
38	KECAMATAN PASIRIAN	35.049.349,00
39	KECAMATAN PASRUJAMBE	33.164.545,00
40	KECAMATAN PRONOJIWO	32.249.780,00
41	KECAMATAN RANDUAGUNG	24.501.363,00
42	KECAMATAN RANUYOSO	30.956.198,00
43	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	30.114.394,00
44	KECAMATAN SENDURO	45.782.413,00
45	KECAMATAN SUKODONO	32.915.345,00
46	KECAMATAN SUMBERSUKO	33.787.106,00
47	KECAMATAN TEKUNG	30.397.401,00
48	KECAMATAN TEMPEH	29.319.019,00
49	KECAMATAN TEMPURSARI	30.023.615,00
50	KECAMATAN YOSOWILANGUN	33.346.253,00
51	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	239.296.735,00
52	SEKRETARIAT DPRD	68.659.484,00
Jumlah		**4.990.782.395**

Tabel 215. Honorarium Pelayanan Kesehatan (PNS) 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS KESEHATAN	175.691.250
2	PUSKESMAS BADES	24.075.975,00
3	PUSKESMAS CANDIPURO	93.826.741,00
4	PUSKESMAS GESANG	20.572.738,00
5	PUSKESMAS GUCIALIT	39.846.185,00
6	PUSKESMAS JATIROTO	66.111.162,00
7	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	109.967.757,00
8	PUSKESMAS KLAKAH	84.029.960,00
9	PUSKESMAS KUNIR	67.211.998,00
10	PUSKESMAS PADANG	62.915.165,00
11	PUSKESMAS PASIRIAN	52.673.683,00
12	PUSKESMAS PASRUJAMBE	56.363.037,00
13	PUSKESMAS PENANGGAL	30.803.783
14	PUSKESMAS PRONOJIWO	61.950.971,00
15	PUSKESMAS RANDUAGUNG	38.753.741,00
16	PUSKESMAS RANUYOSO	54.910.420,00
17	PUSKESMAS ROGOTRUNAN	68.169.878,00
18	PUSKESMAS SENDURO	45.100.611,00
19	PUSKESMAS SUKODONO	87.371.918,00
20	PUSKESMAS SUMBERSARI	39.374.604,00
21	PUSKESMAS TEKUNG	101.131.978,00
22	PUSKESMAS TEMPEH	245.688.702,00
23	PUSKESMAS TEMPURSARI	54.157.358,00
24	PUSKESMAS TUNJUNG	44.073.650,00
25	PUSKESMAS YOSOWILANGUN	134.308.300,00
26	RSUD PASIRIAN	245.943.943,00
Jumlah		**2.105.025.508**

Tabel 216. Rincian Utang Insentif Pemungutan Pajak 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	BPRD - Insentif pemungutan pajak hotel	21.611.302,00
2	BPRD - Insentif pemungutan pajak restoran	119.285.997,00
3	BPRD - Insentif pemungutan pajak hiburan	3.232.484,00
4	BPRD - Insentif pemungutan pajak reklame	45.770.150,00
5	BPRD - Insentif pemungutan pajak penerangan jalan	654.795.020,00
6	BPRD - Insentif pemungutan pajak parkir	10.777.109,00
7	BPRD - Insentif pemungutan pajak air tanah	9.169.197,00
8	BPRD - Insentif pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan	266.616.559,00

No	Uraian	Jumlah
9	BPRD - Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	296.376.516,00
10	BPRD - Insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	381.172.287,00
Total		**1.808.806.621,00**

Tabel 217. Rincian Utang Lembur 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	4.048.000,00
2	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI ORGANISASI	228.000,00
Total		**4.276.000,00**

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.990.833.437,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima oleh entitas di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi.

Tabel 218. Rekap Utang Barang dan Jasa Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28.681.400,00
2	Belanja pengisian tabung gas medis	710.044.833,00
3	Alat kesehatan/kedokteran habis pakai	5.160.086.617,00
4	Belanja bahan obat-obatan	4.855.761.434,00
5	Belanja Bahan Makanan	158.927.255,00
6	Belanja Telephon	52.112.744,00
7	Belanja Air	58.598.235,00
8	Belanja Listrik	2.019.006.103,00
9	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.470.000,00
10	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	294.799.300,00
11	Belanja bagi hasil pemungutan retribusi parkir	39.027.150,00
12	Jasa cleaning service	16.644.000,00
13	Belanja pajak air tanah	845.364,00
14	Belanja jasa pengelolaan limbah medis	62.301.496,00
15	Belanja pelayanan persampahan	205.000,00
16	Belanja jasa pelayanan kesehatan	16.182.631.366,00

No	Uraian	Jumlah
17	Belanja Pengelola Darah	25.252.000,00
18	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	15.365.300,00
19	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	1.943.800,00
20	Belanja Cetak	110.777.500,00
21	Belanja makanan dan minuman rapat	3.184.000,00
22	Belanja makanan dan minuman pasien	53.523.050,00
23	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.756.000,00
24	Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.850.600,00
25	Beban upah/ongkos tenaga kerja borongan	360.735.570,00
26	jasa konsultansi pelaporan	65.780.000,00
27	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	2.700.000,00
28	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	44.356.000,00
29	Beban meubelair	63.980.000,00
30	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor khusus	272.876,00
31	Belanja jasa insentif tenaga kesehatan (Covid-19)	12.588.214.444,00
Jumlah		**42.990.833.437,00**

Tabel 219. Utang Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	28.681.400,00
Jumlah		**28.681.400,00**

Tabel 220. Utang Belanja pengisian tabung gas medis

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	710.044.833,00
Jumlah		**710.044.833,00**

Tabel 221. Utang Alat kesehatan/kedokteran habis pakai

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	5.123.688.667,00
2	RSUD PASIRIAN	36.397.950,00
Jumlah		**5.160.086.617,00**

Tabel 222 Utang Belanja bahan obat-obatan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	4.672.863.535,00
2	RSUD PASIRIAN	182.897.899,00
Jumlah		**4.855.761.434,00**

Tabel 223. Utang Belanja Bahan Makanan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	PUSKESMAS KUNIR	2.824.000,00
2	RSUD dr. HARYOTO	141.885.275,00
3	RSUD PASIRIAN	14.217.980,00
Jumlah		**158.927.255,00**

Tabel 224. Utang Belanja Telepon

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	934.975
2	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	363.350
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	691.150,00
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.115.237,00
5	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	302.774,00
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	135.640,00
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	111.652,00
8	DINAS KESEHATAN	78.820,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	60.585,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.453.762,00
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	134.319,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	143.822,00
13	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	715.509,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	614.661,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	41.660,00
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	50.240,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	66.023,00
18	DINAS PENDIDIKAN	306.160,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	135.690,00
20	DINAS PERDAGANGAN	32.750,00
21	DINAS PERHUBUNGAN	1.987.570,00
22	DINAS PERIKANAN	78.160,00
23	DINAS PERTANIAN	734.109,00
24	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	69.000,00
25	DINAS SOSIAL	110.689,00
26	DINAS TENAGA KERJA	1.053.860,00
27	INSPEKTORAT KABUPATEN	148.150,00
28	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	365.500,00
29	KECAMATAN CANDIPURO	31.160,00
30	KECAMATAN GUCIALIT	42.160,00
31	KECAMATAN JATIROTO	30.660,00

No	Uraian	Jumlah
32	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	129.396,00
33	KECAMATAN LUMAJANG	165.000,00
34	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN	67.790,00
35	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOYUDAN	52.500,00
36	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	47.660,00
37	KECAMATAN PASIRIAN	231.000,00
38	KECAMATAN PASRUJAMBE	47.660,00
39	KECAMATAN PRONOJIWO	30.660,00
40	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	25.160,00
41	KECAMATAN SENDURO	30.660,00
42	KECAMATAN SUMBERSUKO	66.740,00
43	KECAMATAN YOSOWILANGUN	42.160,00
44	PUSKESMAS GUCIALIT	408.688,00
45	PUSKESMAS JATIROTO	107.647,00
46	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	47.160,00
47	PUSKESMAS KLAKAH	62.320,00
48	PUSKESMAS KUNIR	366.320,00
49	PUSKESMAS PADANG	36.000,00
50	PUSKESMAS PASIRIAN	716.001,00
51	PUSKESMAS ROGOTRUNAN	415.159,00
52	PUSKESMAS SENDURO	1.528.793,00
53	PUSKESMAS SUKODONO	69.320,00
54	PUSKESMAS SUMBERSARI	423.056,00
55	PUSKESMAS TEKUNG	93.370,00
56	PUSKESMAS TEMPEH	369.249,00
57	PUSKESMAS TUNJUNG	194.023,00
58	PUSKESMAS YOSOWILANGUN	56.932,00
59	LABORATORIUM KESEHATAN	8.000,00
60	IPFK	58.000,00
61	RSUD dr. HARYOTO	1.913.964,00
62	RSUD PASIRIAN	2.090.274,00
63	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBERDAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN	173.801,00
64	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM	578.000,00
65	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	194.510,00
66	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI ORGANISASI	57.597,00
67	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	36.000,00
68	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	27.331.968,00

No	Uraian	Jumlah
69	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	93.500,00
70	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	1.351.945,00
71	SEKRETARIAT DPRD	254.964,00
Jumlah		**52.112.744,00**

Tabel 225. Utang Belanja Air

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	9.907.200
2	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	34.800
3	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	133.350
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	87.300,00
8	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.063.400,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	113.300,00
10	DINAS KESEHATAN	146.400,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	267.700,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.800,00
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	28.800,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	288.750,00
15	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	470.500,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	65.250,00
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.508.550,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	170.400,00
20	DINAS PENDIDIKAN	220.900,00
26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.075.000,00
27	DINAS PERDAGANGAN	100.100,00
28	DINAS PERHUBUNGAN	627.900,00
29	DINAS PERIKANAN	557.400,00
30	DINAS PERTANIAN	1.900.850,00
31	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	232.100,00
32	DINAS SOSIAL	525.500,00
33	DINAS TENAGA KERJA	3.261.500,00
35	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	177.500,00
39	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	126.800,00
40	KECAMATAN KLAKAH	53.500,00
41	KECAMATAN KUNIR	304.225,00
42	KECAMATAN LUMAJANG	401.800,00
45	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN	270.600,00
47	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN KEPUHARJO	27.500,00

No	Uraian	Jumlah
49	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN TOMPOKERSAN	112.200,00
51	KECAMATAN PASIRIAN	128.000,00
58	KECAMATAN SUKODONO	29.300,00
61	KECAMATAN TEMPEH	52.200,00
62	KECAMATAN TEMPURSARI	68.300,00
66	PUSKESMAS GESANG	30.000,00
69	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	416.400,00
70	PUSKESMAS KLAKAH	130.200,00
71	PUSKESMAS KUNIR	163.160,00
74	PUSKESMAS PASIRIAN	3.034.800,00
79	PUSKESMAS RANUYOSO	185.000,00
81	PUSKESMAS SENDURO	747.450,00
82	PUSKESMAS SUKODONO	3.474.200,00
85	PUSKESMAS TEMPEH	19.700,00
86	PUSKESMAS TEMPURSARI	368.300,00
89	LABORATORIUM KESEHATAN	27.500,00
90	IPFK	72.050,00
92	RSUD dr. HARYOTO	11.960.100,00
93	RSUD PASIRIAN	465.100,00
103	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	6.282.100,00
104	SEKRETARIAT DPRD	5.653.500,00
Jumlah		**58.598.235,00**

Tabel 226. Rekap Belanja Surat Kabar/Majalah

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	380.000
2	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	190.000
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	225.000,00
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	435.000,00
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	135.000,00
6	INSPEKTORAT KABUPATEN	280.000,00
7	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN	225.000,00
8	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	600.000,00
Jumlah		**2.470.000,00**

Tabel 227. Rekap Kawat/Faksimile/Internet

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	20.472.700
2	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	944.300
3	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	11.364.567
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.163.900,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	16.506.000,00
7	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.320.900,00
8	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.549.000,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	61.577.615,00
10	DINAS KESEHATAN	5.455.785,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.854.000,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.928.000,00
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	585.500,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.558.400,00
15	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	1.736.489,00
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.358.000,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.154.500,00
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.668.000,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.256.000,00
20	DINAS PENDIDIKAN	9.643.860,00
26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5.227.300,00
27	DINAS PERDAGANGAN	1.136.828,00
28	DINAS PERHUBUNGAN	2.300.975,00
29	DINAS PERIKANAN	1.861.812,00
30	DINAS PERTANIAN	13.790.400,00
31	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.357.000,00
32	DINAS SOSIAL	1.367.000,00
35	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	364.400,00
36	KECAMATAN CANDIPURO	854.565,00
37	KECAMATAN GUCIALIT	1.364.800,00
38	KECAMATAN JATIROTO	1.429.000,00
39	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	1.286.502,00
40	KECAMATAN KLAKAH	1.124.160,00
41	KECAMATAN KUNIR	695.500,00
42	KECAMATAN LUMAJANG	1.850.945,00
43	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN CITRODIWANGSAN	594.566,00
44	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN DITOTRUNAN	701.000,00
45	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN	410.000,00
46	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOYUDAN	663.000,00

No	Uraian	Jumlah
48	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	555.000,00
49	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN TOMPOKERSAN	871.502,00
50	KECAMATAN PADANG	956.501,00
51	KECAMATAN PASIRIAN	732.000,00
52	KECAMATAN PASRUJAMBE	1.375.500,00
53	KECAMATAN PRONOJIWO	585.500,00
54	KECAMATAN RANDUAGUNG	659.277,00
55	KECAMATAN RANUYOSO	1.543.500,00
56	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	712.000,00
57	KECAMATAN SENDURO	1.743.300,00
58	KECAMATAN SUKODONO	712.000,00
59	KECAMATAN SUMBERSUKO	1.215.000,00
61	KECAMATAN TEMPEH	1.113.232,00
62	KECAMATAN TEMPURSARI	1.725.107,00
63	KECAMATAN YOSOWILANGUN	1.485.500,00
64	PUSKESMAS BADES	655.000,00
66	PUSKESMAS GESANG	375.818,00
67	PUSKESMAS GUCIALIT	791.500,00
68	PUSKESMAS JATIROTO	881.700,00
69	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	772.500,00
70	PUSKESMAS KLAKAH	2.021.539,00
71	PUSKESMAS KUNIR	888.300,00
72	PUSKESMAS LABRUK KIDUL	1.736.000,00
73	PUSKESMAS PADANG	2.156.192,00
74	PUSKESMAS PASIRIAN	238.400,00
75	PUSKESMAS PASRUJAMBE	524.275,00
76	PUSKESMAS PENANGGAL	1.071.000,00
77	PUSKESMAS PRONOJIWO	1.204.293,00
78	PUSKESMAS RANDUAGUNG	5.205.681,00
79	PUSKESMAS RANUYOSO	1.034.500,00
80	PUSKESMAS ROGOTRUNAN	609.700,00
81	PUSKESMAS SENDURO	1.451.000,00
82	PUSKESMAS SUKODONO	1.510.500,00
83	PUSKESMAS SUMBERSARI	602.000,00
84	PUSKESMAS TEKUNG	1.197.000,00
85	PUSKESMAS TEMPEH	609.700,00
86	PUSKESMAS TEMPURSARI	572.160,00
87	PUSKESMAS TUNJUNG	1.097.000,00
88	PUSKESMAS YOSOWILANGUN	1.097.301,00
89	LABORATORIUM KESEHATAN	668.000,00
90	IPFK	443.000,00
92	RSUD dr. HARYOTO	3.025.000,00

No	Uraian	Jumlah
94	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBERDAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN	413.000,00
95	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM	663.000,00
96	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	817.000,00
97	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI ORGANISASI	442.500,00
99	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	795.000,00
102	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	15.073.999,00
103	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	12.043.354,00
104	SEKRETARIAT DPRD	1.650.200,00
Jumlah		**294.799.300,00**

Tabel 228. Utang Belanja Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Parkir

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS PERHUBUNGAN	39.027.150,00
Jumlah		**39.027.150,00**

Tabel 229. Utang Jasa Cleaning Service

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	16.644.000,00
Jumlah		**16.644.000,00**

Tabel 230. Utang Belanja Pajak Air Tanah

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	845.364,00
Jumlah		**845.364,00**

Tabel 231. Utang Belanja Jasa Pengelolaan Limbah Medis

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	PUSKESMAS TEMPURSARI	1.870.000,00
2	RSUD PASIRIAN	60.431.496,00
Jumlah		**62.301.496,00**

Tabel 232. Utang Belanja Pelayanan Persampahan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.000,00
2	IPFK	50.000,00
3	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	105.000,00
Jumlah		**205.000,00**

Tabel 233. Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS KESEHATAN	76.393.782,00
2	PUSKESMAS BADES	51.144.608,00
3	PUSKESMAS CANDIPURO	93.831.539,00
4	PUSKESMAS GESANG	22.534.622,00
5	PUSKESMAS GUCIALIT	34.902.835,00
6	PUSKESMAS JATIROTO	77.557.818,00
7	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	103.890.205,00
8	PUSKESMAS KLAKAH	77.390.500,00
9	PUSKESMAS KUNIR	44.666.702,00
10	PUSKESMAS PADANG	43.545.055,00
11	PUSKESMAS PASIRIAN	49.870.577,00
12	PUSKESMAS PASRUJAMBE	38.759.373,00
13	PUSKESMAS PENANGGAL	31.355.137,00
14	PUSKESMAS PRONOJIWO	69.117.408,00
15	PUSKESMAS RANDUAGUNG	36.487.039,00
16	PUSKESMAS RANUYOSO	70.913.060,00
17	PUSKESMAS ROGOTRUNAN	81.942.518,00
18	PUSKESMAS SENDURO	38.713.209,00
19	PUSKESMAS SUKODONO	99.154.383,00
20	PUSKESMAS SUMBERSARI	47.592.876,00
21	PUSKESMAS TEKUNG	85.551.182,00
22	PUSKESMAS TEMPEH	170.775.798,00
23	PUSKESMAS TEMPURSARI	32.877.382,00
24	PUSKESMAS TUNJUNG	110.245.420,00
25	PUSKESMAS YOSOWILANGUN	92.160.740,00
26	RSUD dr. HARYOTO	14.010.633.988,00
27	RSUD PASIRIAN	490.623.610,00
Jumlah		**16.182.631.366,00**

Tabel 234. Utang Belanja Pengelola Darah

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD PASIRIAN	25.252.000,00
Jumlah		**25.252.000,00**

Tabel 235. Utang Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11.412.400,00
2	PUSKESMAS TEMPURSARI	635.000,00
3	RSUD PASIRIAN	3.317.900,00
Jumlah		**15.365.300,00**

Tabel 236. Utang Belanja STNK Kendaraan Dinas/Operasional

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS TENAGA KERJA	1.943.800,00
Jumlah		**1.943.800,00**

Tabel 237. Utang Belanja Cetak

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	110.777.500,00
Jumlah		**110.777.500,00**

Tabel 238. Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	3.184.000,00
Jumlah		**3.184.000,00**

Tabel 239. Utang Belanja Makanan dan Minuman Pasien

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	PUSKESMAS BADES	8.240.000,00
2	PUSKESMAS CANDIPURO	2.574.150,00
3	PUSKESMAS GESANG	2.265.500,00
4	PUSKESMAS GUCIALIT	2.200.000,00
5	PUSKESMAS JATIROTO	2.659.500,00
6	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	2.300.000,00
7	PUSKESMAS PADANG	3.680.000,00
8	PUSKESMAS PASRUJAMBE	4.160.000,00
9	PUSKESMAS PENANGGAL	2.344.300,00

No	Uraian	Jumlah
10	PUSKESMAS RANDUAGUNG	2.475.000,00
11	PUSKESMAS RANUYOSO	1.960.000,00
12	PUSKESMAS SUKODONO	1.156.300,00
13	PUSKESMAS TEKUNG	2.760.000,00
14	PUSKESMAS TEMPEH	3.760.000,00
15	PUSKESMAS TEMPURSARI	6.308.300,00
16	PUSKESMAS YOSOWILANGUN	4.680.000,00
Jumlah		**53.523.050,00**

Tabel 240. Utang Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	KECAMATAN CANDIPURO	2.100.000,00
2	RSUD dr. HARYOTO	3.046.000,00
3	RSUD PASIRIAN	1.610.000,00
Jumlah		**6.756.000,00**

Tabel 241. Utang Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	4.200.600,00
2	RSUD PASIRIAN	1.650.000,00
Jumlah		**5.850.600,00**

Tabel 242. Utang Beban Upah/Ongkos Tenaga Kerja Borongan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	360.735.570,00
Jumlah		**360.735.570,00**

Tabel 243. Utang Jasa Konsultansi Pelaporan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	65.780.000,00
Jumlah		**65.780.000,00**

Tabel 244. Utang Upah/Ongkos Tenaga Kerja Bulanan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	2.700.000,00
Jumlah		**2.700.000,00**

Tabel 245. Utang Belanja Tambahan Upah Tenaga Kerja Bulanan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34.200.000,00
2	RSUD dr. HARYOTO	8.230.000,00
3	RSUD PASIRIAN	1.800.000,00
4	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI ORGANISASI	126.000,00
Jumlah		**44.356.000,00**

Tabel 246. Utang Beban Meubelair

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	63.980.000,00
Jumlah		**63.980.000,00**

Tabel 247. Utang Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	272.876,00
Jumlah		**272.876,00**

Tabel 248. Utang Belanja jasa insentif tenaga kesehatan (Covid-19)

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS KESEHATAN	12.588.214.444,00
Jumlah		**12.588.214.444,00**

3) Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.210.119.800,00 merupakan tagihan atas belum dibayarkannya pekerjaan kepada PT. Ken Diva Pratama yang sudah diselesaikan sejak Tahun 2019 dikarenakan PT. Ken Diva Pratama belum melengkapi persyaratan hasil laboratorium sesuai dengan permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Tabel 249. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan

Dalam Rupiah

No.	NAMA OPD	Jumlah
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2.210.119.800,00
TOTAL		**2.210.119.800,00**

4) Utang Belanja Tidak Terduga

Saldo Utang Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.563.126.798,00 merupakan utang Pendapatan Transfer dari Pemerintah Propinsi (Bantuan Keuangan Khusus) karena masih ada sisa dana transfer Bantuan Keuangan Khusus di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tidak bisa direalisasikan pada tahun 2020 dan belum disetorkan kembali kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020.

Tabe 250.Rekap Utang Belanja Tidak Terduga
Tahun 2020

No	Uraian	ANGGARAN	Realisasi Penerimaan Di RKUD		Realisasi Penggunaan	Sisa Dana Di RKUD	BA. Rekon
		SK. Gub. Jatim	Nota Kredit	Nominal	Realisasi SP2D	Per 31 Desember 2020	
1	2	3	5	6	10	11 = 6 - 10	12
1	Pendidikan						
	a. BPPDGS	4.417.500.000,00	0091000755	4.417.500.000,00	4.417.200.000,00	300.000,00	300.000,00
	b. BOP MADIN	100.000.000,00	0091000755	100.000.000,00	95.307.750,00	4.692.250,00	4.692.250,00
	c. Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	336.000.000,00	0091000755	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	0,00
	d. Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 12 bulan :						
	1. Jenjang Pendidikan TK sebanyak 3 orang	36.000.000,00	0091000755	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
	2. Jenjang Pendidikan SD sebanyak 8 orang	96.000.000,00	0091000755	96.000.000,00	81.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	3. Jenjang Pendidikan SMP sebanyak 8 orang	96.000.000,00	0091000755	96.000.000,00	72.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
	e. Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	10.000.000,00	0091000755	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Kesehatan						
	a. Pemenuhan Honor 127 Orang Perawat Ponkesdes selama 12 bulan	2.209.800.000,00	0091000755	2.209.800.000,00	2.209.800.000,00	0,00	0,00
	b. Pemenuhan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Perawat Ponkesdes	83.522.750,00	0091000755	83.522.750,00	69.547.545,00	13.975.205,00	13.975.205,00
	c. Pemenuhan Honor 6 Orang Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar selama 12 bulan	180.000.000,00	0091000755	180.000.000,00	177.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	d. Pemenuhan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	8.640.000,00	0091000755	8.640.000,00	6.720.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
	e. Pengembangan Taman Posyandu	55.000.000,00	0091000755	55.000.000,00	23.850.000,00	31.150.000,00	31.150.000,00
	f. Kunjungan Konseling Kesehatan oleh Tim yang Terdiri dari Bidan dan Perawat Ponkesdes	609.600.000,00	0091000755	609.600.000,00	403.725.000,00	205.875.000,00	205.875.000,00
	g. Pendampingan Poskestren	121.029.000,00	0091000755	121.029.000,00	86.629.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00
3	Hari Jadi Pemerintah Provinsi JATIM	50.000.000,00	0091000755	50.000.000,00	10.587.500,00	39.412.500,00	39.412.500,00
4	Infrastruktur Pembangunan Sarana Prasarana Kebinamargaan, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya	95.000.000.000,00	0091000755	95.000.000.000,00	92.844.779.157,00	2.155.220.843,00	2.155.220.843,00

No	Uraian	ANGGARAN	Realisasi Penerimaan Di RKUD		Realisasi Penggunaan	Sisa Dana Di RKUD	BA. Rekon
		SK. Gub. Jatim	Nota Kredit	Nominal	Realisasi SP2D	Per 31 Desember 2020	
5	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	150.000.000,00	0091000755	150.000.000,00	126.819.000,00	23.181.000,00	23.181.000,00
6	Program Jatim Puspa	70.000.000,00	0091000755	70.000.000,00	68.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	JUMLAH	**103.629.091.750,00**		**103.629.091.750,00**	**101.065.964.952,00**	**2.563.126.798,00**	**2.563.126.798,00**

5) Utang Belanja Bantuan

Saldo Utang Belanja bantuan sebesar Rp196.742.879,00 merupakan utang belanja Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang merupakan sistem jaminan kesehatan yang bersifat sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang belum dibayarkan kepada beberapa rumah sakit Tahun 2020 kepada :

1. RSD Dr. Soebandi Jember sebesar Rp150.523.241,00
2. RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebesar Rp9.261.438,00
3. Dr. Syaiful Anwar Malang sebesar Rp24.023.300,00
4. RSJ Dr. Radjiman Malang sebesar Rp12.934.900,00

Tabel 251. Utang Belanja bantuan pada PPKD

Dalam Rupiah

NO	BULAN PELAYANAN KESEHATAN	NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	BIAYA	BIAYA TAGIHAN
I. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA						**9.261.438**	
1	**DESEMBER 2020**	1	15 Oktober - 3 November 2020	SHOFIYAH	Dsn.Karang Anyar RT 07 RW 06 Ds. Purwosono Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang	8.479.300	**9.261.438**
	900/18374.1/301/2020	2	9 November 2020	SHOFIYAH	Dsn.Karang Anyar RT 07 RW 06 Ds.Purwosono Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang	377.100	
		3	15-Des-20	SHOFIYAH	Dsn.Karang Anyar RT 07 RW 06 Ds.Purwosono Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang	27.938	
		4	28-Des-20	SHOFIYAH	Dsn.Karang Anyar RT 07 RW 06 Ds.Purwosono Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang	377.100	

NO	BULAN PELAYANAN KESEHATAN	NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	BIAYA	BIAYA TAGIHAN
Ii. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang						**24.023.300**	
1	**DESEMBER 2020**	1	6 November 2020	MUHAMMAD ILHAM PRATAMA	Dsn.Krajan Barat RT 42/RW 06 Ds.Labruk Kidul Kec.Sumbersuko Kab. Lumajang	7.164.500	**15.375.400**
	900/33710/302/2020		13 November 2020	MUHAMMAD ILHAM PRATAMA	Dsn.Krajan Barat RT 42/RW 06 Ds.Labruk Kidul Kec.Sumbersuko Kab. Lumajang	377.100	
			19 November 2020	MUHAMMAD ILHAM PRATAMA	Dsn.Krajan Barat RT 42/RW 06 Desa Labruk Kidul Kec.Sumbersuko Kab. Lumajang	7.833.800	
2	**DESEMBER 2020**	2	6 November 2020	MUHAMMAD ILHAM PRATAMA	Dsn.Krajan Barat RT 42/RW 06 Desa Labruk Kidul Kec.Sumbersuko Kab. Lumajang	8.647.900	**8.647.900**
Iii. Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang-Malang						**12.934.900**	
1	**DESEMBER 2020**	1	4 NOVEMBER 2020	MOCHAMAD FERI	Dawuhan Wetan Rowokangkung	354.400	**12.934.900**
	UM.05.01/XXVII.3.1.3/3942/2020	2	10 NOVEMBER 2020	MOCHAMAD FERI	Dawuhan Wetan Rowokangkung	466.700	
		3	5-18 NOVEMBER 2020	ADI PRATAMA	Gunung Lawang RT 3 / RW 5 Ds.Tegalrandu Kec.Klakah	5.460.700	
		4	28 SEPTEMBER - 7 NOVEMBER 2021	MUJIANTO	Dsn.Besuk Cukit RT 8 / RW 7 Ds.Sidomulyo Kec.Pronojiwo	6.276.000	
		5	17-Des-20	ADI PRATAMA	Gunung Lawang RT 3 / RW 5 Ds.Tegalrandu Kec.Klakah	377.100	
Iv. Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember						**150.523.241**	
1	**NOVEMBER 2020**	1	09-Okt-20	MALIHA	Dsn.Kebonsari RT 13/RW 6, Ds.Yosowilangun Kidul	146.813	**150.523.241**
	900/10937/610/2020	2	19-Okt-20	MALIHA	Dsn.Kebonsari RT 13/RW 6, Ds.Yosowilangun Kidul	43.813	
		3	19-Okt-20	MALIHA	Dsn.Kebonsari RT 13/RW 6, Ds.Yosowilangun Kidul	155.000	

NO	BULAN PELAYANAN KESEHATAN	NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	BIAYA	BIAYA TAGIHAN
		4	27-Okt-20	SATRUNI B.SARPAN	Dsn. Darungan RT 23 / RW 4 , Ds. Umbul Kec. Kedungjajang	35.000	
		5	27-Okt-20	SATRUNI B.SARPAN	Dsn. Darungan RT 23 / RW 4 , Ds. Umbul Kec. Kedungjajang	820.466	
		6	06-Okt-20	ANDIKA RIZKI SAPUTRA	Dsn. Krajan RT.05 / RW.03, Ds. Krai, Kec. Yosowilangun	390.500	
		7	13 - 15 OKTOBER 2020	ANDIKA RIZKI SAPUTRA	Dsn. Krajan RT.05 / RW.03, Ds. Krai, Kec. Yosowilangun	4.536.791	
		8	6 - 19 OKTOBER 2020	RIFI AIDATUL MUFLIDAH	Dsn.Krajan Ii, RT. 16 / RW. 05, Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung	11.792.297	
		9	14 - 22 OKTOBER 2020	SATRUNI B.SARPAN	Dsn. Darungan RT 23 / RW 4 , Ds. Umbul Kec. Kedungjajang	9.072.057	
		10	26 - 31 OKTOBER 2020	MALIHA	Dsn.Kebonsari RT 13/RW 6, Ds.Yosowilangun Kidul	10.828.696	
2	**Des-20**	1	3 NOVEMBER 2020	MALIHA	Dsn.Kebonsari RT 13/RW 6, Ds.Yosowilangun Kidul	35.000	
	900/11714/610/2020	2	9 NOVEMBER 2020	MALIHA	Dsn.Kebonsari RT 13/RW 6, Ds.Yosowilangun Kidul	130.000	
		3	11 NOVEMBER 2020	MALIHA	Dsn.Kebonsari RT 13/RW 6, Ds.Yosowilangun Kidul	130.000	
		4	11 NOVEMBER 2020	RIFI AIDATUL MUFLIDAH	Dsn.Krajan Ii, RT. 16 / RW. 05, Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung	351.000	
		5	18 NOVEMBER 2020	RIFI AIDATUL MUFLIDAH	Dsn.Krajan Ii, RT. 16 / RW. 05, Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung	170.000	
		6	24 NOVEMBER 2020	MALIHA	Dsn.Kebonsari RT 13/RW 6, Ds.Yosowilangun Kidul	267.103	
		7	15 OKTOBER - 9 NOVEMBER 2020	KENZO ABIZARD RAFFASYAH	Dsn.SekaRWadunng RT 03 / RW 09, Ds.Karangbendo, Kec. Tekung	27.813.253	

NO	BULAN PELAYANAN KESEHATAN	NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	BIAYA	BIAYA TAGIHAN
		8	18 - 21 NOVEMBER 2020	RIFI AIDATUL MUFLIDAH	Dsn.Krajan Ii, RT. 16 / RW. 05, Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung	11.283.172	
3	**Des-20**	1	25 NOVEMBER - 8 DESEMBER 2020	SITI KHOIRUL FATIMAH BY NY	Dsn.Tulungagungan RT 12 / RW 05 Ds.Pronojiwo Kec.Pronojiwo	12.261.282	
	900/12518/610/2020	2	04-Des-20	RIFI AIDATUL MUFLIDAH	Dsn.Krajan Ii, RT. 16 / RW. 05, Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung	303.973	
4	**Jan-21**	1	25 DESEMBER - 6 JANUARI 2020	NIMAN	Dsn. Jatiagung RT 22 RW 5, Ds.Jatirejo Kec.Kunir	44.984.669	
5	**Jan-21**	1	24 - 30 DESEMBER 2020	ANIS RIA PURWANTI	Dsn.Krajan I RT 01/RW 01 Ds.Alun Alun Kec.Ranuyoso	13.161.856	
	900/407/610/2020	2	24 - 30 DESEMBER 2020	ANIS RIA PURWANTI	Dsn.Krajan I RT 01/RW 01 Ds.Alun Alun Kec.Ranuyoso	1.775.500	
		3	28-Des-20	SITI KHOIRUL FATIMAH BY NY	Dsn.Tulungagungan RT 12 / RW 05 Ds.Pronojiwo Kec.Pronojiwo	35.000	
		JUMLAH TOTAL (I + II + III + IV)					**196.742.879**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak memiliki kewajiban/utang jangka panjang.

1) EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Ekuitas	**2.429.222.153.797,73**	**2.360.369.143.720,00**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 252. Daftar Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Jumlah Aset	2.514.794.540.106,72	2.394.009.524.655,36
2	Jumlah Kewajiban	85.572.386.308,99	33.640.380.935,36
3	Ekuitas (1-2)	2.429.222.153.797,73	2.360.369.143.720,00

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut:

Tabel 253. Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Ekuitas Awal	2.360.369.143.720,00	2.355.220.862.873,39
2	Surplus (Defisit) LO	72.654.373.905,10	3.344.258.842,36
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	21.238.909.054,54	1.804.022.004,25
4	Ekuitas Akhir	2.454.262.426.679,64	2.360.369.143.720,00

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

A. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO meliputi Pendapatan Asli Daerah LO; Pendapatan Transfer LO dan Lain-lain pendapatan yang sah LO.

	31 Desember 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah-LO	**290.501.657.840,41**	**299.749.112.160,40**
PAD - LO terdiri dari:		
- Pajak Daerah	74.424.081.858,00	76.742.173.857,00
- Retribusi Daerah	44.770.571.428,74	57.068.026.324,08
- Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang dipisahkan	6.686.340.676,48	6.553.966.325,69
- Lain-lain PAD yang sah	177.595.983.480,76	159.384.945.653,63
Jumlah PAD – LO	**303.476.977.443,98**	**299.749.112.160,40**

Pendapatan Asli Daerah LO terinci sebagai berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.1 Pendapatan Pajak Daerah LO	**74.424.081.858,00**	**76.742.173.857,00**

Pendapatan Pajak LO yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut:

Tabel 254. Daftar Pendapatan Pajak Daerah LO Per 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Pajak Daerah	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Pajak Hotel	676.687.832,00	893.513.355,00
2	Pajak Restoran	2.696.512.443,00	4.931.846.931,00
3	Pajak Hiburan	78.062.129,00	129.463.166,00
4	Pajak Reklame	1.780.378.549,00	1.886.222.732,00
5	Pajak Penerangan Jalan	25.563.498.286,00	27.232.744.889,00
6	Pajak Parkir	349.329.700,00	433.921.600,00
7	Pajak Air Tanah	345.539.643,00	369.929.324,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.226.417.250,00	11.023.188.750,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.672.795.143,00	14.584.131.991,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	18.034.860.883,00	15.257.211.119,00
	Jumlah	**74.424.081.858,00**	**76.742.173.857,00**

Tabel 255. Pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak LRA (SIPKD)	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Pajak - LO
			Piutang Pajak 2020	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka 2019	Penerimaan Piutang Tahun 2019	Penambahan Pendapatan diterima dimuka 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)-(6+7)
1	Pajak Hotel	655.800.332	20.887.500	0,00	0,00	0,00	676.687.832,00
2	Pajak Restoran	2.709.014.493	0,00	0,00	12.502.050	0,00	2.696.512.443,00
3	Pajak Hiburan	78.062.129	0,00	0,00	0,00	0,00	78.062.129,00
4	Pajak Reklame	1.789.379.587	46.766.200	0,00	55.767.238	0,00	1.780.378.549,00
5	Pajak Penerangan Jalan	25.980.921.440	2.001.052.900	0,00	2.418.476.054	0,00	25.563.498.286,00
6	Pajak Parkir	349.329.700	0,00	0,00	0,00	0,00	349.329.700,00
7	Pajak Air Tanah	346.102.543	2.595.696	0,00	3.158.596	0,00	345.539.643,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.091.249.500	3.135.167.750	0,00	0,00	0,00	10.226.417.250,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.625.274.574	3.655.032.610	2.466.871	609.938.282	40.630	14.672.795.143,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	18.034.860.883	0,00	0,00	0,00	0,00	18.034.860.883,00
	JUMLAH	**68.659.995.181,00**	**8.861.502.656,00**	**2.466.871,00**	**3.099.842.220,00**	**40.630,00**	**74.424.081.858,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.2 Pendapatan Retribusi Daerah LO	**44.770.571.428,74**	**57.068.026.324,08**

Pendapatan Retribusi Daerah LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 terinci sebagai berikut:

Tabel 256. Daftar Pendapatan Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	HASIL RETRIBUSI DAERAH - LO	2020	2019
1	**Retribusi Jasa Umum**	**40.772.580.075,74**	**50.110.121.928,03**
	Retribusi pelayanan kesehatan	27.172.474.575,00	35.170.887.256,44
	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	732.300.000,00	866.150.000,00
	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	4.959.487.041,66	5.040.834.458,34
	Retribusi pelayanan pasar	7.031.419.984,08	7.489.198.088,25
	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	675.225.000,00	1.363.955.000,00
	Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus	41.920.000,00	17.190.000,00
	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	159.753.475,00	161.907.125,00
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.238.050.631,00**	**4.911.693.926,05**

No	HASIL RETRIBUSI DAERAH - LO	2020	2019
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	491.194.631,00	626.104.876,05
	Retribusi terminal	101.318.000,00	114.783.600,00
	Retribusi tempat khusus parkir	28.746.500,00	31.392.500,00
	Retribusi rumah potong hewan	247.072.000,00	255.175.000,00
	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	1.369.719.500,00	3.884.237.950,00
3	**Retribusi Perijinan Tertentu**	**1.759.940.722,00**	**2.046.210.470,00**
	Retribusi ijin mendirikan bangunan	1.756.690.722,00	2.036.565.470,00
	Retribusi ijin gangguan/keramaian	0,00	0,00
	Retribusi ijin trayek	3.250.000,00	9.645.000,00
	Jumlah Retribusi Daerah LO	**44.770.571.428,74**	**57.068.026.324,08**

Tabel 257. Pendapatan Retribusi LRA dan LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	Jasa Transaksi Keuangan	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3+4+5+6) - (7+8)
1	**HASIL RETRIBUSI DAERAH**	**46.060.581.317,00**	**2.595.871.338,50**	**2.917.227.698,66**	**25.200,00**	**4.171.542.315,00**	**2.631.591.810,42**	**44.770.571.428,74**
2	**Retribusi Jasa Umum**	**42.118.895.962,00**	**2.382.385.187,50**	**2.916.352.698,66**	**25.200,00**	**4.013.487.162,00**	**2.631.591.810,42**	**40.772.580.075,74**
3	Retribusi pelayanan kesehatan	28.807.555.537	2.378.381.000	0,00	25.200	4.013.487.162	0,00	27.172.474.575,00
4	Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	732.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.300.000,00
5	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	4.780.461.000	0,00	2.445.632.083,33	0,00	0,00	2.266.606.041,67	4.959.487.041,66
6	Retribusi pelayanan pasar	6.940.840.825	4.004.187,50	379.030.182	0,00	0,00	292.455.210,42	7.031.419.984,08
7	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	675.225.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.225.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	41.920.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920.000,00
9	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	Jasa Transaksi Keuangan	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	
10	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	140.593.600	0,00	91.690.433,33	0,00	0,00	72.530.558,33	159.753.475,00
11	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.181.744.633,00**	**213.486.151,00**	**875.000,00**	0,00	**158.055.153,00**	**0,00**	2.238.050.631,00
12	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	453.583.233	179.862.151	875.000	0,00	143.125.753	0,00	491.194.631,00
13	Retribusi terminal	82.623.400	33.624.000	0,00	0,00	14.929.400	0,00	101.318.000,00
14	Retribusi tempat khusus parkir	28.746.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.746.500,00
15	Retribusi rumah potong hewan	247.072.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.072.000,00
16	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	1.369.719.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.719.500,00
17	**Retribusi Perijinan Tertentu**	**1.759.940.722,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	1.759.940.722,00
18	Retribusi ijin mendirikan bangunan	1.756.690.722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.690.722,00
19	Retribusi ijin gangguan/keramaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Retribusi ijin trayek	3.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
	Jumlah	**46.060.581.317,00**	**2.595.871.338,50**	**2.917.227.698,66**	**25.200,00**	**4.171.542.315,00**	**2.631.591.810,42**	**44.770.571.428,74**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan LO	**27.172.474.575,00**	**35.170.887.256,44**

Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan LO sebagaimana tabel berikut:

Tabel 258. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA dan LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Penambahan - LO				Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
		Jumlah Pendapatan Retribusi LRA (SIPKD)	Piutang Retribusi Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	Jasa Transaksi Keuangan	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3+4+5+6)-(7+8)
1	Dinas Kesehatan	4.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.000,00

No	Nama SKPD	Penambahan - LO				Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
		Jumlah Pendapatan Retribusi LRA (SIPKD)	Piutang Retribusi Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	Jasa Transaksi Keuangan	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	
2	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Tempursari	451.437.600,00	40.490.000,00	0,00	900	88.020.000,00	0,00	403.908.500,00
3	Dinas Kesehatan- UPT Puskesmas Pronojiwo	272.499.700,00	51.640.000,00	0,00	1400	59.915.000,00	0,00	264.226.100,00
4	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Candipuro	294.891.000,00	93.115.000,00	0,00	700	46.500.000,00	0,00	341.506.700,00
5	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Penanggal	189.653.100,00	31.460.000,00	0,00		48.600.000,00	0,00	172.513.100,00
6	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Pasirian	557.938.700,00	56.965.000,00	0,00	1000	112.414.000,00	0,00	502.490.700,00
7	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Bades	351.794.600,00	39.355.000,00	0,00	700	44.409.000,00	0,00	346.741.300,00
8	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Tempeh	567.340.600,00	134.046.000,00	0,00	4300	197.384.000,00	0,00	504.006.900,00
9	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Gesang	214.101.500,00	31.735.000,00	0,00	100	5.600.000,00	0,00	240.236.600,00

No	Nama SKPD	Penambahan - LO				Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
		Jumlah Pendapatan Retribusi LRA (SIPKD)	Piutang Retribusi Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	Jasa Transaksi Keuangan	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	
10	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Rogotrunan	315.027.300,00	47.930.000,00	0,00	1100	63.511.000,00	0,00	299.447.400,00
11	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Labruk Kidul	278.007.600,00	48.670.000,00	0,00	1400	77.897.000,00	0,00	248.782.000,00
12	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Tekung	331.936.500,00	149.070.000,00	0,00	2000	68.808.000,00	0,00	412.200.500,00
13	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Kunir	629.239.000,00	97.160.000,00	0,00	0,00	107.425.000,00	0,00	618.974.000,00
14	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Yosowilangun	448.732.000,00	67.680.000,00	0,00	1500	90.791.000,00	0,00	425.622.500,00
15	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Sumbersari	378.472.000,00	131.615.000,00	0,00	1200	74.410.000,00	0,00	435.678.200,00
16	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Jatiroto	579.637.800,00	99.090.000,00	0,00	0	158.289.000,00	0,00	520.438.800,00

No	Nama SKPD	Penambahan - LO				Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
		Jumlah Pendapatan Retribusi LRA (SIPKD)	Piutang Retribusi Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	Jasa Transaksi Keuangan	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	
17	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Randuagung	231.161.000,00	87.655.000,00	0,00	1200	79.665.000,00	0,00	239.152.200,00
18	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Sukodono	357.897.400,00	72.250.000,00	0,00	0	72.945.000,00	0,00	357.202.400,00
19	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Padang	309.151.300,00	46.675.000,00	0,00	2200	49.120.000,00	0,00	306.708.500,00
20	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Pasrujambe	315.705.400,00	29.595.000,00	0,00	500	26.885.000,00	0,00	318.415.900,00
21	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Senduro	395.227.600,00	137.340.000,00	0,00	1000	61.180.000,00	0,00	471.388.600,00
22	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Gucialit	286.411.900,00	34.602.500,00	0,00	500	29.835.000,00	0,00	291.179.900,00
23	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Kedungjajang	399.314.000,00	71.647.000,00	0,00	800	51.365.000,00	0,00	419.596.800,00

No	Nama SKPD	Penambahan - LO				Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
		Jumlah Pendapatan Retribusi LRA (SIPKD)	Piutang Retribusi Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	Jasa Transaksi Keuangan	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	
24	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Klakah	634.352.400,00	66.600.000,00	0,00	1300	84.405.000,00	0,00	616.548.700,00
25	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Ranuyoso	403.584.900,00	71.961.000,00	0,00	900	46.875.000,00	0,00	428.671.800,00
26	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Tunjung	208.444.200,00	80.637.000,00	0,00	500	29.780.000,00	0,00	259.301.700,00
27	Dinas Kesehatan-UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten	505.859.700,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	0,00	499.919.700,00
28	Dinas Kesehatan-UPT RSUD Pasirian	18.895.451.737,00	559.397.500,00	0,00	0,00	2.231.519.162,00	0,00	17.223.330.075,00
	Jumlah	**28.807.555.537,00**	**2.378.381.000,00**	**0,00**	**25.200,00**	**4.013.487.162,00**	**0,00**	**27.172.474.575,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(2) Retribusi Pelayanan Persampahan LO	**732.300.000,00**	**866.150.000,00**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Lingkungan Hidup) masing-masing sebesar Rp732.300.000,00 dan Rp866.150.000,00. Pada akhir periode tidak ada hak atas pendapatan retribusi pelayanan persampahan yang belum diterima atau diterima di muka.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(3) Retribusi Parkir di tepi jalan umum LO	**4.959.487.041,66**	**5.040.834.458,34**

Pendapatan Retribusi Parkir di tepi jalan umum LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Perhubungan), terinci sebagai berikut:

Tabel 259. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Per 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

Uraian	2020	2019
Pendapatan retribusi Parkir di tepi jalan umum LRA	**4.780.461.000,00**	**5.102.365.500,00**
Dikurangi:		
Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	(2.266.606.041,67)	(2.445.632.083,33)
Ditambah:		
Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	2.445.632.083,33	2.384.101.041,67
Pendapatan Retribusi Parkir di tepi jalan umum LO	**4.959.487.041,66**	**5.040.834.458,34**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(4) Retribusi Pelayanan Pasar LO	**7.031.419.984,08**	**7.489.198.088,25**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Perdagangan), sebagai berikut:

Tabel 260. Rincian Retribusi Pelayanan Pasar LO Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

Uraian	2020	2019
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LRA	**6.940.840.825,00**	**7.833.865.581,25**
Ditambah:		
1. Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2020	4.004.187,50	18.281.437,50
2. Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	379.030.182,00	264.974.552,31
Dikurangi :		
1. Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	(0,00)	0,00
2. Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	(292.455.210,42)	(627.923.482,81)
Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar – LO	**7.031.419.984,08**	**7.489.198.088,25**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO	**675.225.000,00**	**1.363.955.000,00**

Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO yang telah diterima dan menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Perhubungan) masing-masing Rp675.225.000,00dan Rp1.363.955.000,00. Pada akhir Tahun 2020 tidak ada pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor di terima di muka atau yang masih harus diterima.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	**41.920.000,00**	**17.190.000,00**

Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang telah diterima dan menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) masing-masing Rp41.920.000,00 dan Rp17.190.000,00. Pada akhir Tahun 2020 tidak ada pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diterima di muka atau yang masih harus diterima.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang LO	**159.753.475,00**	**161.907.125,00**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Perdagangan), sebagai berikut:

Tabel 261. Rincian Pelayanan Tera/Tera Ulang LO Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

Uraian	2020	2019
Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang LRA	**140.593.600,00**	**161.382.000,00**
Ditambah:		
1. Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	91.690.433,00	92.215.558,33
Dikurangi:		
1. Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	0,00	(91.690.433,33)
2. Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	(72.530.558,00)	0,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	**159.753.475,00**	**161.907.125,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO	**491.194.631,00**	**626.104.876,05**

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

Tabel 262. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS KESEHATAN	36.676.000,00	96.367.000,00
2	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	453.600,00	324.000,00
3	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	252.000,00	2.585.333,35
4	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS CANDIPURO	373.800,00	373.800,00
5	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS PENANGGAL	72.000,00	72.000,00
6	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS PASIRIAN	234.000,00	234.000,00
7	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS BADES	0,00	90.000,00
8	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS TEMPEH	200.000,00	1.950.000,00
9	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	160.000,00	160.000,00
10	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	162.000,00	162.000,00
11	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS TEKUNG	144.000,00	144.000,00
12	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS KUNIR	108.000,00	2.441.333,35
13	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	708.000,00	3.208.000,00
14	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	144.000,00	144.000,00
15	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS JATIROTO	360.000,00	360.000,00
16	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	100.000,00	2.333.333,35
17	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS SUKODONO	72.000,00	72.000,00
18	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS PADANG	216.000,00	216.000,00
19	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	144.000,00	144.000,00
20	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS SENDURO	336.000,00	336.000,00
21	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS GUCIALIT	762.000,00	762.000,00
22	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	224.000,00	224.000,00
23	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS KLAKAH	306.000,00	306.000,00
24	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS RANUYOSO	468.000,00	2.968.000,00
25	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS TUNJUNG	0,00	0,00
26	BALAI KESEHATAN OLAHRAGA	0,00	0,00

No	SKPD	2020	2019
27	RSUD PASIRIAN	875.000,00	0,00
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	408.037.031,00	509.447.676,00
29	DINAS PERTANIAN	680.400,00	680.400,00
30	DINAS PERDAGANGAN	38.926.800,00	0,00
	Jumlah	**491.194.631,00**	**626.104.876,05**

Tabel 263. Hubungan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA dan LO

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA (SIPKD)	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5) - (6+7)
1	DINAS KESEHATAN	36.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.676.000,00
2	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	453.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.600,00
3	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
4	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS CANDIPURO	373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00
5	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PENANGGAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
6	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PASIRIAN	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
7	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS BADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS TEMPEH	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
10	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
11	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS TEKUNG	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
12	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS KUNIR	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
13	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00
14	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA (SIPKD)	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	
15	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS JATIROTO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
16	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS SUKODONO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
18	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PADANG	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
19	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
20	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS SENDURO	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
21	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS GUCIALIT	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
22	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
23	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS KLAKAH	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
24	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS RANUYOSO	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
25	DINAS KESEHATAN- UPT RSUD PASIRIAN	0,00	0,00	875.000	0,00	0,00	875.000,00
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	371.300.633,00	179.862.151,00	0,00	143.125.753,00	0,00	408.037.031,00
27	DINAS PERTANIAN	680.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.400,00
28	DINAS PERDAGANGAN	38.926.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.926.800,00
	JUMLAH	**453.583.233,00**	**179.862.151,00**	**875.000**	**143.125.753,00**	**0,00**	**491.194.631,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(9) Retribusi Terminal LO	**101.318.000,00**	**114.783.600,00**

Pendapatan Retribusi Terminal LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Perhubungan), masing-masing sebesar Rp101.318.000,00 dan Rp114.783.600,00. Pada akhir Tahun 2020 dan 2019 terdapat penerimaan piutang retribusi sebesar Rp14.929.400,00 dan penambahan piutang sebesar Rp33.624.000,00.

Tabel 264. Hubungan Retribusi Terminal LRA dan LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA (SIPKD)	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5) - (6+7)
1	Retribusi terminal	82.623.400,00	33.624.000,00	0,00	14.929.400,00	0,00	101.318.000,00
	JUMLAH	**82.623.400,00**	**33.624.000,00**	**0,00**	**14.929.400,00**	**0,00**	**101.318.000,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(10) Retribusi Tempat Khusus Parkir LO	**28.746.500,00**	**31.392.500,00**

Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Perhubungan) masing-masing sebesar Rp28.746.500,00 dan Rp31.392.500,00. Pada akhir Tahun 2020 dan 2019 tidak ada retribusi terminal diterima dimuka atau yang belum diterima.

Tabel 265. Hubungan Retribusi Tempat Parkir LRA dan LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Nama Akun	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA (SIPKD)	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5) - (6+7)
1	Retribusi tempat khusus parkir	28.746.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.746.500,00
	JUMLAH	**28.746.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.746.500,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(11) Retribusi Rumah Potong Hewan LO	**247.072.000,00**	**255.175.000,00**

Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan sudah diterima sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Pertanian), masing masing sebesar Rp247.072.000,00 dan Rp255.175.000,00. Pada akhir Tahun 2020 dan 2019 tidak ada retribusi terminal diterima dimuka atau yang belum diterima.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(12) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga LO	**1.369.719.500,00**	**3.884.237.950,00**

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

Tabel 266. Hubungan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga LRA dan LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA (SIPKD)	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2019	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5) - (6+7)
1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	127.914.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.914.500,00
2	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.241.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.805.000,00
	JUMLAH	**1.369.719.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.369.719.500,00**

Tabel 267. Daftar Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga LO per 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	URAIAN	2020	2019
1	Pemandian alam Selokambang	818.816.500,00	2.251.860.000,00
2	Kawasan Wonorejo Terpadu/KWT	321.271.500,00	1.099.026.000,00
3	Segitiga Ranu	88.621.000,00	119.923.000,00
5	Pantai Wot Galih	0,00	0,00
6	Pantai Tempursari	0,00	0,00
7	Goa Tetes	0,00	0,00

No	URAIAN	2020	2019
8	Tumpak Sewu	0,00	0,00
9	B 29	13.096.000,00	13.318.750,00
12	Kolam Renang Veteran	48.967.500,00	91.646.200,00
13	Stadion Semeru	67.637.000,00	154.769.000,00
14	Sewa GOR Wira Bakti	11.310.000,00	43.695.000,00
15	Sewa Gedung	0,00	110.000.000,00
	Jumlah	**1.369.719.500,00**	**3.884.237.950,00**

Pada akhir Tahun 2020 dan 2019 tidak ada retribusi tempat rekreasi dan olah raga diterima dimuka atau yang belum diterima.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(13) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) LO	**1.756.690.722,00**	**2.036.565.470,00**

Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman) masing-masing sebesar Rp1.756.690.722,00 dan Rp2.036.565.470,00. Pada akhir Tahun 2020 dan 2019 tidak ada retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB) diterima dimuka atau yang belum diterima.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(14) Retribusi Ijin Trayek LO	**3.250.000,00**	**9.645.000,00**

Pendapatan Retribusi Ijin Trayek LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Perhubungan) masing-masing sebesar Rp3.250.000,00 dan Rp9.645.000,00. Sampai dengan akhir Tahun 2020 dan 2019 tidak ada pendapatan ijin trayek yang belum di terima atau diterima di muka.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	**6.686.340.676,48**	**6.553.966.325,69**

Jumlah tersebut merupakan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

Tabel 268. Daftar Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO per 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Penerimaan Deviden PT. Bank Jatim	3.239.331.369,00	3.065.267.712,45
2	Penerimaan Deviden PT. BPR Jatim	33.689.000,00	64.099.000,00
3	Penerimaan Bagian Laba PD. BPR Bank Pasar	426.945.151,50	102.419.197,60
4	Penerimaan Bagian Laba PDAM	1.405.550.845,76	1.736.980.179,02
5	Penerimaan Bagian Laba PD. Semeru	0,00	0,00
6	**Jumlah Pendapatan – LRA (1 s/d 5)**	**5.105.516.366,26**	**4.968.766.089,07**
7	Laba (Rugi) PD. BPR Bank Pasar	385.881.014,00	853.890.303,00
8	Laba (Rugi) PDAM	3.859.280.419,00	2.555.546.992,28
9	Laba (Rugi) PD. SEMERU	318.155.021,00	15.162.317,96
10	Penerimaan Bagian Laba PDAM	(2.555.546.992,28)	(1.736.980.179,02)
11	Penerimaan Bagian Laba BPR Bank Pasar	(426.945.151,50)	(102.419.197,60)
	Jumlah Pendapatan – LO (6 s/d 11)	**6.686.340.676,48**	**6.553.966.325,69**

Tabel 269. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA dan LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA (SIPKD)	Penambahan - LO	Pengurangan - LO		Total Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO
			Pengakuan Laba BUMD Tahun 2020	Pengakuan Rugi BUMD Tahun 2020	Penerimaan Bagian Laba BUMD	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4) - (5+6)
1	**HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**	**5.105.516.366,26**	**4.563.316.454,00**	**0,00**	**2.982.492.143,78**	**6.686.340.676,48**
2	**Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD**	**5.105.516.366,26**	**4.563.316.454,00**	**0,00**	**2.982.492.143,78**	**6.686.340.676,48**
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1.405.550.846	3.859.280.419	0,00	2.555.546.992	2.709.284.272,48
4	Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar	426.945.152	385.881.014	0,00	426.945.152	385.881.014,00
5	Perusahaan Daerah (PD) Semeru	0,00	318.155.021	0,00	0,00	318.155.021,00
6	PT. Bank Jatim	3.239.331.369	0,00	0,00	0,00	3.239.331.369,00
7	PT. BPR Jatim	33.689.000	0,00	0,00	0,00	33.689.000,00
	Jumlah	**5.105.516.366,26**	**4.563.316.454,00**	**0,00**	**2.982.492.143,78**	**6.686.340.676,48**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO	**177.595.983.480,76**	**159.384.945.653,63**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang menjadi hak Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut:

Tabel 270. Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO
Per 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	2020	2019
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA**	**177.595.983.480,76**	**159.384.945.653,63**
2	**Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan**	**203.900.000,00**	**236.675.000,00**
3	Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai	0,00	0,00
4	Penjualan kendaraan dinas roda dua	0,00	0,00
5	Penjualan kendaraan dinas roda empat/roda enam	0,00	0,00
6	Penjualan drum bekas	0,00	0,00
7	Penjualan hasil penebangan pohon	10.700.000	0,00
8	Penjualan hasil pertanian	103.200.000	71.000.000,00
9	Penjualan hasil perkebunan	0,00	30.675.000,00
10	Penjualan hasil perikanan	90.000.000	135.000.000,00
11	**Penerimaan Jasa Giro**	**2.231.304.326,14**	**2.659.609.637,71**
12	Jasa giro kas daerah	1.798.451.739,19	2.294.457.691,74
13	Jasa giro bendahara	157.882.568,72	90.517.744,99
14	Jasa giro pengeluaran daerah	261.333.512,69	234.101.627,71
15	Jasa giro bendahara pengeluaran bos	12.964.911,41	39.184.054,43
16	Jasa giro penerimaan daerah	671.594,13	1.348.518,84
17	**Pendapatan Bunga Deposito**	**235.479.649,00**	**3.220.239.775,11**
18	Rekening deposito pada Bank Jatim	0,00	2.259.417.808,14
19	Rekening deposito pada Bank BRI	235.479.649	735.821.967,00
20	Rekening deposito pada Bank Mandiri	0,00	224.999.999,97
21	Deposito Dana Cadangan	0,00	0,00
22	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**	**42.000.000,00**	**103.345.500,00**
23	Kerugian barang daerah	42.000.000	103.345.500,00

No.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	2020	2019
24	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**90.173.802,00**	**161.633.912,05**
25	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	90.173.802	161.633.912,05
26	**Pendapatan Denda Pajak**	**65.565.848,00**	**200.371.351,50**
27	Pendapatan denda pajak hotel	0,00	27.100,00
28	Pendapatan denda pajak restoran	8.961.080	41.878.038,00
29	Pendapatan denda pajak hiburan	6.000	5.000,00
30	Pendapatan denda pajak reklame	764.550	742.023,50
31	Pendapatan denda pajak parkir	400	18.200,00
32	Pendapatan denda pajak air bawah tanah	838.661	4.256.989,00
33	Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan	0,00	17.120.275,00
34	Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan	43.529.157	118.544.692,00
35	Pendapatan denda BPHTB	11.466.000	17.779.034,00
36	**Pendapatan Denda Retribusi**	**471.712.500**	**0,00**
37	Pendapatan denda retribusi jasa umum	471.712.500	0,00
38	**Pendapatan Hasil eksekusi atas jaminan**	**0,00**	**9.890.000,00**
39	Hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan	0,00	9.890.000,00
40	**Pendapatan dari Pengembalian**	**1.360.469.079,76**	**1.448.326.217,19**
41	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan	0,00	0,00
42	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja Tahun lalu	1.360.469.079,76	1.448.326.217,19
43	**Pendapatan dari BLUD**	**131.916.960.239,23**	**108.545.305.014,28**
44	Pendapatan dari BLUD RSUD dr. Haryoto	131.916.960.239,23	108.545.305.014,28
45	**Pendapatan Sewa**	**1.663.191.384,63**	**1.529.568.273,79**
46	Pendapatan Sewa Tanah	1.378.155.384,63	1.321.203.673,79
47	Pendapatan Sewa Bangunan	285.036.000,00	208.364.600,00
48	**Dana Kapitasi JKN pada FKTP**	**39.301.447.825,00**	**40.123.552.661,00**
49	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tempursari	1.011.534.600	940.064.900,00
50	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pronojiwo	1.081.835.200	1.189.856.445,00
51	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Candipuro	1.318.136.300	1.618.298.290,00
52	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Penanggal	816.325.500	844.520.110,00
53	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasirian	2.023.489.200	2.172.965.110,00
54	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bades	1.040.415.600	1.026.433.135,00
55	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tempeh	2.339.486.100	2.497.324.960,00
56	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gesang	850.407.200	932.080.896,00
57	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Rogotrunan	2.245.839.600	2.477.255.800,00

No.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	2020	2019
58	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Labruk Kidul	1.103.301.950	1.099.844.200,00
59	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tekung	1.029.999.000	957.412.660,00
60	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kunir	2.205.316.500	2.339.462.800,00
61	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Yosowilangun	2.136.817.200	2.038.550.845,00
62	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumbersari	1.431.876.000	1.550.090.800,00
63	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jatiroto	1.907.280.700	1.985.362.480,00
64	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Randuagung	1.557.020.100	1.730.288.380,00
65	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sukodono	1.782.850.500	1.734.404.885,00
66	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Padang	1.583.475.600	1.457.538.785,00
67	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasrujambe	900.714.625	821.020.400,00
68	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Senduro	1.622.905.200	1.407.469.320,00
69	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gucialit	1.222.764.300	1.171.907.915,00
70	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedungjajang	1.897.996.650	2.021.019.750,00
71	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Klakah	2.602.525.800	2.616.227.680,00
72	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ranuyoso	2.485.665.000	2.524.755.700,00
73	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tunjung	1.103.469.400	969.396.415,00
74	**Pendapatan Denda Sewa**	**1.075.800,00**	**3.179.200,00**
75	Pendapatan denda sewa bangunan	1.075.800,00	3.179.200,00
76	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya**	**12.703.027,00**	**1.143.249.111,00**
77	Penerimaan dari hasil pameran	0,00	26.405.000,00
78	Penerimaan lain-lain	12.703.027,00	1.116.844.111,00
79	**Pendapatan Bunga BOS - LO**	**0,00**	**0,00**
80	Pendapatan Bunga BOS - LO	0,00	0,00
81	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	**177.595.983.480,76**	**159.384.945.653,63**

Tabel 271. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA dan LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Pengurangi - LO			Total Lain-lain PAD yang Sah - LO
			Piutang BLUD Tahun 2020	Piutang (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2019	Penerimaan Piutang (Lain-lain PAD Yang Sah) Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2020	Reklas ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (4+5+6+7) - (8+9+10)
1	**LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**	**180.437.019.778,51**	**18.271.379.203,07**	**1.587.000,00**	**1.192.943.717,96**	**20.939.896.553,45**	**1.294.948.333,33**	**72.101.332,00**	**177.595.983.480,76**

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Pengurangi - LO			Total Lain-lain PAD yang Sah - LO
			Piutang BLUD Tahun 2020	Piutang (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2019	Penerimaan Piutang (Lain-lain PAD Yang Sah) Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2020	Reklas ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar	
2	**Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan**	**276.001.332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.101.332,00**	**203.900.000,00**
3	Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai	19.475.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.475.000	0,00
4	Penjualan kendaraan dinas roda dua	37.375.832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.375.832	0,00
5	Penjualan kendaraan dinas roda empat/roda enam	15.250.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250.500	0,00
6	Penjualan drum bekas	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penjualan hasil penebangan pohon	10.700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000
8	Penjualan hasil pertanian	103.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200.000
9	Penjualan hasil perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Penjualan hasil perikanan	90.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000
11	**Penerimaan Jasa Giro**	**2.231.304.326,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.231.304.326,14**
12	Jasa giro kas daerah	1.798.451.739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.451.739,19
13	Jasa giro bendahara	157.882.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.882.569,72
14	Jasa giro pengeluaran daerah	261.333.513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.333.513 ,69
15	Jasa giro bendahara pengeluaran bos	12.964.911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964.911,41
16	Jasa giro penerimaan daerah	671.594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.594,13
17	**Pendapatan Bunga Deposito**	**235.479.649,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.479.649,00**
18	Rekening deposito pada Bank Jatim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rekening deposito pada Bank BRI	235.479.649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.479.649
20	Rekening deposito pada Bank Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Deposito Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**	**55.270.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.270.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000.000,00**
23	Kerugian barang daerah	55.270.500	0,00	0,00	0,00	13.270.500	0,00	0,00	42.000.000

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Pengurangi - LO			Total Lain-lain PAD yang Sah - LO
			Piutang BLUD Tahun 2020	Piutang (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2019	Penerimaan Piutang (Lain-lain PAD Yang Sah) Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2020	Reklas ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar	
24	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**90.173.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.173.802,00**
25	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	90.173.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.173.802
26	**Pendapatan Denda Pajak**	**65.565.848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.565.848,00**
27	Pendapatan denda pajak hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan denda pajak restoran	8.961.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.080
29	Pendapatan denda pajak hiburan	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000
30	Pendapatan denda pajak reklame	764.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.550
31	Pendapatan denda pajak parkir	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400
32	Pendapatan denda pajak air bawah tanah	838.661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.661
33	Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan	43.529.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.529.157
35	Pendapatan denda BPHTB	11.466.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466.000
36	**Pendapatan Denda Retribusi**	**471.712.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.712.500
37	Pendapatan denda retribusi jasa umum	471.712.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.712.500
38	**Pendapatan Hasil eksekusi atas jaminan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	Hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	**Pendapatan dari Pengembalian**	**2.332.227.934,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**971.758.854,65**	**0,00**	**0,00**	**1.360.469.079,76**
41	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun lalu	2.332.227.934,41	0,00	0,00	0,00	971.758.854,65	0,00	0,00	1.360.469.079,76
43	**Pendapatan dari BLUD**	**133.656.344.484,96**	**18.271.379.203,07**	**0,00**	**51.200.000,00**	**19.939.263.448,80**	**122.700.000,00**	**0,00**	**131.916.960.239,23**

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Pengurangi - LO			Total Lain-lain PAD yang Sah - LO
			Piutang BLUD Tahun 2020	Piutang (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2019	Penerimaan Piutang (Lain-lain PAD Yang Sah) Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2020	Reklas ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar	
44	Pendapatan dari BLUD RSUD dr. Haryoto	133.656.344.484,96	18.271.379.203,07	-	51.200.000	19.939.263.448,80	122.700.000	0,00	131.916.960.239,23
45	**Pendapatan Sewa**	**1.693.696.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141.743.717,96**	**0,00**	**1.172.248.333,33**	**0,00**	**1.663.191.384,63**
46	Pendapatan Sewa Tanah	1.408.660.000,00	0,00	0,00	1.141.743.717,96	0,00	1.172.248.333,33	0,00	1.378.155.384,63
47	Pendapatan Sewa Bangunan	285.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.036.000,00
48	**Dana Kapitasi JKN pada FKTP**	**39.315.464.575,00**	**0,00**	**1.587.000,00**	**0,00**	**15.603.750,00**	**0,00**	**0,00**	**39.301.447.825,00**
49	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tempursari	1.011.855.300	0,00	27.000	0,00	347.700	0,00	0,00	1.011.534.600
50	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pronojiwo	1.082.105.200	0,00	97.200	0,00	367.200	0,00	0,00	1.081.835.200
51	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Candipuro	1.318.105.700	0,00	91.800	0,00	61.200	0,00	0,00	1.318.136.300
52	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Penanggal	816.868.200	0,00	51.300	0,00	594.000	0,00	0,00	816.325.500
53	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasirian	2.023.613.400	0,00	135.000	0,00	259.200	0,00	0,00	2.023.489.200
54	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bades	1.041.208.800	0,00	16.200	0,00	809.400	0,00	0,00	1.040.415.600
55	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tempeh	2.340.360.900	0,00	43.200	0,00	918.000	0,00	0,00	2.339.486.100
56	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gesang	850.555.400	0,00	57.000	0,00	205.200	0,00	0,00	850.407.200
57	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Rogotrunan	2.246.509.200	0,00	145.800	0,00	815.400	0,00	0,00	2.245.839.600
58	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Labruk Kidul	1.103.569.850	0,00	136.800	0,00	404.700	0,00	0,00	1.103.301.950
59	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tekung	1.030.443.600	0,00	34.200	0,00	478.800	0,00	0,00	1.029.999.000
60	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kunir	2.206.197.900	0,00	64.800	0,00	946.200	0,00	0,00	2.205.316.500
61	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Yosowilangun	2.137.625.400	0,00	81.000	0,00	889.200	0,00	0,00	2.136.817.200
62	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumbersari	1.432.275.600	0,00	75.600	0,00	475.200	0,00	0,00	1.431.876.000
63	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jatiroto	1.907.828.650	0,00	64.800	0,00	612.750	0,00	0,00	1.907.280.700
64	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Randuagung	1.557.052.500	0,00	27.000	0,00	59.400	0,00	0,00	1.557.020.100
65	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sukodono	1.783.509.300	0,00	32.400	0,00	691.200	0,00	0,00	1.782.850.500
66	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Padang	1.584.062.400	0,00	97.200	0,00	684.000	0,00	0,00	1.583.475.600

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Pengurangi - LO			Total Lain-lain PAD yang Sah - LO
			Piutang BLUD Tahun 2020	Piutang (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2020	Pendapatan Diterima Dimuka (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2019	Penerimaan Piutang (Lain-lain PAD Yang Sah) Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka (Lain-lain PAD yang Sah) Tahun 2020	Reklas ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar	
67	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasrujambe	901.364.425	0,00	51.300	0,00	701.100	0,00	0,00	900.714.625
68	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Senduro	1.623.900.300	0,00	59.400	0,00	1.054.500	0,00	0,00	1.622.905.200
69	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gucialit	1.223.182.800	0,00	20.400	0,00	438.900	0,00	0,00	1.222.764.300
70	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedungjajang	1.898.557.950	0,00	48.600	0,00	609.900	0,00	0,00	1.897.996.650
71	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Klakah	2.603.599.500	0,00	37.800	0,00	1.111.500	0,00	0,00	2.602.525.800
72	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ranuyoso	2.486.514.300	0,00	22.800	0,00	872.100	0,00	0,00	2.485.665.000
73	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tunjung	1.104.598.000	0,00	68.400	0,00	1.197.000	0,00	0,00	1.103.469.400
74	**Pendapatan Denda Sewa**	**1.075.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.075.800,00**
75	Pendapatan denda sewa bangunan	1.075.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.800
76	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya**	**12.703.027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.703.027,00**
77	Penerimaan lain-lain	12.703.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703.027
78	**Pendapatan Bunga BOS - LO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79	Pendapatan Bunga BOS - LO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah	**180.437.019.778,51**	**18.271.379.203,07**	**1.587.000,00**	**1.192.943.717,96**	**20.939.896.553,45**	**1.294.948.333,33**	**72.101.332,00**	**177.595.983.480,76**

2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- Pendapatan transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
- Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya.
- Pendapatan transfer Pemerintah Propinsi.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	**1.265.807.191.960,00**	**1.411.598.076.706,00**

Tabel 272. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LO
Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Dana Perimbangan	2020	2019
1	Bagi hasil pajak	49.686.422.590,00	37.672.906.911,00
2	Bagi hasil SDA	34.925.832.557,00	60.083.295.189,00
3	Dana Alokasi Umum	908.166.706.000,00	1.003.092.909.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	273.028.230.813,00	310.748.965.606,00
	Jumlah	**1.265.807.191.960,00**	**1.411.598.076.706,00**

Tabel 273. Hubungan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LRA dan LO

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA (SIPKD)	Penambahan-LO	Pengurangan- LO	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan LO
			Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2020	Penerimaan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6 = (3+4) -(5)
1	**BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK**	**90.017.283.661,00**	**7.727.445.647,00**	**13.132.474.161,00**	**84.612.255.147,00**
2	**Bagi Hasil Pajak**	**45.476.951.229,00**	**6.715.960.172,00**	**2.506.488.811,00**	**49.686.422.590,00**
3	Bagi hasil pajak bumi dan bangunan	8.100.031.793,00	1.601.211.000,00	2.416.703.793,00	7.284.539.000,00
4	Bagi hasil pajak penghasilan pasal 21	13.171.584.080,00	2.912.700.900,00	0,00	16.084.284.980,00
5	Bagi hasil pajak penghasilan pasal 25, 29	2.528.446.875,00	367.493.000,00	67.506.673,00	2.828.433.202,00
6	Bagi hasil cukai hasil tembakau	21.676.888.481,00	1.834.555.272,00	22.278.345,00	21.654.610.136,00
7	**Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam**	**44.540.332.432,00**	**1.011.485.475,00**	**10.625.985.350,00**	**34.925.832.557,00**
8	Bagi hasil sumber daya alam minyak bumi	37.803.687.552,00	582.521.600,00	7.995.279.045,00	30.390.930.107,00
9	Bagi hasil sumber daya alam gas bumi	5.382.490.341,00	0,00	2.627.029.016,00	2.755.461.325,00
10	Bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara	296.497.350,00	0,00	0,00	296.497.350,00

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA (SIPKD)	Penambahan-LO	Pengurangan- LO	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan LO
			Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2020	Penerimaan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2019	
11	Bagi hasil sumber daya alam kehutanan	237.752.150,00	80.312.425,00	0,00	318.064.575,00
12	Bagi hasil sumber daya alam perikanan	788.276.289,00	316.881.000,00	3.677.289,00	1.101.480.000,00
13	Bagi hasil sumber daya alam panas bumi	31.628.750,00	4.295.625,00	0,00	35.924.375,00
14	Bagi hasil dari iuran tetap (land-rent)	0,00	2.392.800,00	0,00	2.392.800,00
15	Bagi hasil dari iuran eksplorasi & iuran eksploitasi (royalti)	0,00	25.082.025,00	0,00	25.082.025,00
16	**DANA ALOKASI UMUM**	**908.166.706.000,00**	**0,00**	**0,00**	**908.166.706.000,00**
17	**Dana Alokasi Umum**	**908.166.706.000,00**	**0,00**	**0,00**	**908.166.706.000,00**
18	Dana alokasi umum	908.166.706.000,00	0,00	0,00	908.166.706.000,00
19	**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**	**273.028.230.813,00**	**0,00**	**0,00**	**273.028.230.813,00**
20	**Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler**	**40.844.510.293,00**	**0,00**	**0,00**	**40.844.510.293,00**
21	DAK fisik reguler bidang pendidikan	10.566.105.442,00	0,00	0,00	10.566.105.442,00
22	DAK fisik reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana	21.557.835.851,00	0,00	0,00	21.557.835.851,00
23	DAK fisik reguler bidang perumahan dan permukiman	4.134.612.000,00	0,00	0,00	4.134.612.000,00
24	DAK fisik reguler bidang sanitasi	3.439.467.750,00	0,00	0,00	3.439.467.750,00
25	DAK fisik reguler bidang jalan	1.146.489.250,00	0,00	0,00	1.146.489.250,00
26	**Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan**	**15.677.070.583,00**	**0,00**	**0,00**	**15.677.070.583,00**
27	DAK fisik penugasan bidang kesehatan dan keluarga berencana	5.558.077.975,00	0,00	0,00	5.558.077.975,00
28	DAK fisik penugasan bidang air minum	3.682.765.408,00	0,00	0,00	3.682.765.408,00
29	DAK fisik penugasan bidang sanitasi	1.289.849.250,00	0,00	0,00	1.289.849.250,00
30	DAK fisik penugasan bidang jalan	804.124.750,00	0,00	0,00	804.124.750,00

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA (SIPKD)	Penambahan-LO	Pengurangan- LO	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan LO
			Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2020	Penerimaan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2019	
31	DAK fisik penugasan bidang irigasi	1.835.643.000,00	0,00	0,00	1.835.643.000,00
32	DAK fisik penugasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DAK fisik penugasan bidang pariwisata	1.122.205.200,00	0,00	0,00	1.122.205.200,00
34	DAK fisik penugasan bidang pertanian	1.020.000.000,00	0,00	0,00	1.020.000.000,00
35	DAK fisik penugasan bidang kelautan dan perikanan	364.405.000,00	0,00	0,00	364.405.000,00
36	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**216.506.649.937,00**	**0,00**	**0,00**	**216.506.649.937,00**
37	DAK non fisik bantuan operasional penyelenggaraan PAUD	20.616.000.000,00	0,00	0,00	20.616.000.000,00
38	DAK non fisik tunjangan profesi guru	152.459.330.000,00	0,00	0,00	152.459.330.000,00
39	DAK non fisik bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional KB	36.936.668.002,00	0,00	0,00	36.936.668.002,00
40	DAK non fisik peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	446.285.000,00	0,00	0,00	446.285.000,00
41	DAK non fisik pelayanan administrasi kependudukan	3.204.854.440,00	0,00	0,00	3.204.854.440,00
42	DAK non fisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	1.957.600.000,00	0,00	0,00	1.957.600.000,00
43	DAK non fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya	595.337.100,00	0,00	0,00	595.337.100,00
44	DAK non fisik pelayanan kepariwisataan	290.575.395,00	0,00	0,00	290.575.395,00
	Jumlah	**1.271.212.220.474,00**	**7.727.445.647,00**	**13.132.474.161,00**	**1.265.807.191.960,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	**34.236.645.000,00**	**0,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya meliputi dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. Dana transfer Pemerintah Pusat lainnya yang diterima Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan bahwa Dana Desa (DD) merupakan dana yang dialokasikan melalui APBN kepada Pemerintahan Desa, yang penyalurannya melalui rekening kas desa (RKD). Dengan demikian Dana Desa bagi pemerintah daerah bukan merupakan pendapatan, karena Dana Desa yang diterima merupakan hak Pemerintah Desa, sehingga di dalam Laporan Operasional Dana Desa tidak di akui sebagai pendapatan LO karena penyalurannya langsung ke RKD (rekening kas desa) tanpa melalui rekening kas umum daerah (RKUD).

Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya sebagai berikut:

Tabel 274. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya

Dalam Rupiah

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	2020	2019
1	**DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS**	**34.236.645.000,00**	**0,00**
2	**Dana Penyesuaian**	**34.236.645.000,00**	**0,00**
3	Dana Desa (DD)	0,00	0,00
4	Dana insentif daerah (DID)	34.236.645.000,00	0,00
	Jumlah	**34.236.645.000,00**	**0,00**

Tabel 275. Hubungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA (SIPKD)	Pengurangan- LO	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO
			Penyaluran Dana Desa (DD) langsung ke RKD (Rekening Kas Desa) tanpa melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)	
1	2	3	4	5 = (3+4)
1	DANA PENYESUAIAN	227.364.377.000,00	193.127.732.000,00	34.236.645.000,00

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA (SIPKD)	Pengurangan- LO	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO
			Penyaluran Dana Desa (DD) langsung ke RKD (Rekening Kas Desa) tanpa melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)	
	DAN OTONOMI KHUSUS			
1.1	**Dana Penyesuaian**	**227.364.377.000,00**	**193.127.732.000,00**	**34.236.645.000,00**
1.1.1	Dana Desa (DD)	193.127.732.000,00	193.127.732.000,00	0,00
1.1.2	Dana insentif daerah (DID)	34.236.645.000,00	0,00	34.236.645.000,00
	Jumlah	**227.364.377.000,00**	**193.127.732.000,00**	**34.236.645.000,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi – LO	**222.806.589.424,00**	**172.592.138.336,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi meliputi pendapatan bagi hasil pajak propinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak air permukaan dan bagi hasil pajak rokok serta pendapatan bagi hasil lainnya berupa bantuan keuangan.

Tabel 276. Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LO
Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi	2020	2019
1	**PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK**	**121.740.624.472,00**	**141.801.817.018,00**
2	**PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI JAWA TIMUR**	**121.740.624.472,00**	**141.801.817.018,00**
3	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	28.438.331.027,00	42.967.203.973,00
4	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	13.557.828.875,00	18.990.077.769,00
5	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	29.544.990.186,00	39.194.921.857,00
6	Bagi hasil dari pajak air permukaan	359.737.434,00	526.332.870,00
7	Bagi hasil dari pajak rokok	49.839.736.950,00	40.123.280.549,00

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi	2020	2019
8	**PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK LAINNYA**	**101.065.964.952,00**	**30.790.321.318,00**
9	**BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI JAWA TIMUR**	**101.065.964.952,00**	**30.790.321.318,00**
10	Bantuan keuangan peningkatan pendidikan	5.037.507.750,00	5.059.118.500,00
11	Bantuan keuangan peningkatan pelayanan kesehatan	2.977.771.545,00	2.744.736.633,00
12	Bantuan keuangan peringatan hari jadi Propinsi Jawa Timur	10.587.500,00	46.430.000,00
13	Bantuan keuangan program terpadu TMMD	126.819.000,00	0,00
14	Bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana kebinamargaan, sumber daya air, dan cipta karya	92.844.779.157,00	0,00
15	Bantuan keuangan program JATIM PUSPA	68.500.000,00	0,00
16	Bantuan keuangan program JALIN MATRA	0,00	30.000.000,00
17	Bantuan keuangan percepatan pembangunan infrastruktur	0,00	22.910.036.185,00
	Jumlah	**222.806.589.424,00**	**172.592.138.336,00**

Tabel 277. Hubungan Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LRA dan LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LRA (SIPKD)	Penambahan- LO	Pengurangan - LO		Total Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LO
			Piutang Tahun 2020	Penerimaan piutang Tahun 2019	Utang lain-lain Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4) - (5+6)
1	**PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK**	**123.312.451.789,00**	**9.955.327.272,00**	**11.527.154.589,00**	**0,00**	**121.740.624.472,00**
2	**DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI JAWA TIMUR**	**123.312.451.789,00**	**9.955.327.272,00**	**11.527.154.589,00**	**0,00**	**121.740.624.472,00**
3	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	28.438.331.027,00	0,00	0,00	0,00	28.438.331.027,00
4	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	13.557.828.875,00	0,00	0,00	0,00	13.557.828.875,00
5	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	29.544.990.186,00	0,00	0,00	0,00	29.544.990.186,00
6	Bagi hasil dari pajak air permukaan	359.737.434,00	0,00	0,00	0,00	359.737.434,00
7	Bagi hasil dari pajak rokok	51.411.564.267,00	9.955.327.272,00	11.527.154.589,00	0,00	49.839.736.950,00

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LRA (SIPKD)	Penambahan- LO	Pengurangan - LO		Total Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LO
			Piutang Tahun 2020	Penerimaan piutang Tahun 2019	Utang lain-lain Tahun 2020	
8	**PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK LAINNYA**	**103.629.091.750,00**	**0,00**	**0,00**	**2.563.126.798,00**	**101.065.964.952,00**
9	**BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI JAWA TIMUR**	**103.629.091.750,00**	**0,00**	**0,00**	**2.563.126.798,00**	**101.065.964.952,00**
10	Bantuan keuangan peningkatan pendidikan	5.091.500.000,00	0,00	0,00	53.992.250,00	5.037.507.750,00
11	Bantuan keuangan peningkatan pelayanan kesehatan	3.267.591.750,00	0,00	0,00	289.820.205,00	2.977.771.545,00
12	Bantuan keuangan peringatan hari jadi Propinsi Jawa Timur	50.000.000,00	0,00	0,00	39.412.500,00	10.587.500,00
13	Bantuan keuangan program terpadu TMMD	150.000.000,00	0,00	0,00	23.181.000,00	126.819.000,00
14	Bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana kebinamargaan, sumber daya air, dan cipta karya	95.000.000.000,00	0,00	0,00	2.155.220.843,00	92.844.779.157,00
15	Bantuan keuangan program JATIM PUSPA	70.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	68.500.000,00
	Jumlah	**226.941.543.539,00**	**9.955.327.272,00**	**11.527.154.589,00**	**2.563.126.798,00**	**222.806.589.424,00**

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Yang Sah meliputi pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, diantaranya adalah pendapatan hibah uang dan/atau barang baik dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau dari pihak lainnya serta pendapatan lainnya seperti bantuan keuangan.

Tabel 278. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2020	2019
1	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**138.172.331.339,17**	**166.840.565.813,76**
2	**PENDAPATAN HIBAH**	**133.305.961.948,96**	**166.500.041.631,84**
3	Pendapatan hibah dari pemerintah pusat	98.418.714.875,96	63.683.071.099,84
4	Pendapatan hibah dari pemerintah propinsi	17.719.585.923,10	95.572.543.673,00
5	Pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri	9.198.826.760,46	7.232.954.859,00

No.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2020	2019
6	Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	7.968.834.389,44	11.472.000,00
7	**PENDAPATAN DANA LAINNYA**	**4.866.369.390,21**	**340.524.181,92**
8	**Sumbangan Pihak Ketiga**	**161.236.924,00**	**173.840.710,00**
9	Sumbangan pihak ketiga dari ...	0,00	0,00
10	Sumbangan pihak ke III dari petani Tebu	161.236.924,00	153.840.710,00
11	Sumbangan pihak ke III dari kelompok sadar	0,00	20.000.000,00
12	**Pendapatan Lainnya**	**4.705.132.466,21**	**166.683.471,92**
13	Penerimaan lain-lain	4.705.132.466,21	166.683.471,92
	Jumlah	**138.172.331.339,17**	**166.840.565.813,76**

Tabel 279. Hubungan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA dan LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA (SIPKD)	Penambahan- LO						Pengurangan - LO		Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO
			Pendapatan hibah dari pemerintah pusat	Pendapatan hibah dari pemerintah propinsi	Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan	Piutang Tahun 2020	Pengurangan penyisihan piutang	Penerimaan piutang Tahun 2019	Sisa pendapatan hibah uang untuk covid yang disetor kembali ke kas daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (3+4+5+6+7+8+9) - (10+11)
1	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**93.068.317.985,37**	**8.269.645.328,96**	**17.719.585.923,10**	**9.198.826.760,46**	**7.968.834.389,44**	**1.381.458.942,00**	**1.737.720.801,21**	**1.114.949.413,00**	**57.109.378,37**	**138.172.331.339,17**
2	**PENDAPATAN HIBAH**	**90.502.574.768,00**	**8.269.645.328,96**	**17.719.585.923,10**	**9.198.826.760,46**	**7.968.834.389,44**	**761.444.192,00**	**0,00**	**1.114.949.413,00**	**0,00**	**133.305.961.948,96**
3	Pendapatan hibah dari pemerintah pusat	90.502.574.768,00	8.269.645.328,96	0,00	0,00	0,00	761.444.192,00	0,00	1.114.949.413,00	0,00	98.418.714.875,96
4	Pendapatan hibah dari pemerintah propinsi	0,00	0,00	17.719.585.923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.719.585.923,10
5	Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	0,00	0,00	0,00	9.198.826.760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198.826.760,46
6	Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968.834.389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968.834.389,44
7	**PENDAPATAN DANA LAINNYA**	**2.565.743.217,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620.014.750,00**	**1.737.720.801,21**	**0,00**	**57.109.378,37**	**4.866.369.390,21**

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA (SIPKD)	Penambahan- LO						Pengurangan - LO		Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO
			Pendapatan hibah dari pemerintah pusat	Pendapatan hibah dari pemerintah propinsi	Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan	Piutang Tahun 2020	Pengurangan penyisihan piutang	Penerimaan piutang Tahun 2019	Sisa pendapatan hibah uang untuk covid yang disetor kembali ke kas daerah	
8	**Sumbangan Pihak Ketiga**	**161.236.924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.236.924,00**
9	Sumbangan pihak ketiga dari ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sumbangan pihak ke III dari petani Tebu	161.236.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.236.924,00
11	**Pendapatan Lainnya**	**2.404.506.293,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620.014.750,00**	**1.737.720.801,21**	**0,00**	**57.109.378,37**	**4.705.132.466,21**
12	Penerimaan lain-lain	2.404.506.293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	620.014.750,00	1.737.720.801,21	0,00	57.109.378,37	4.705.132.466,21
	Jumlah	**93.068.317.985,37**	**8.269.645.328,96**	**17.719.585.923,10**	**9.198.826.760,46**	**7.968.834.389,44**	**1.381.458.942,00**	**1.737.720.801,21**	**1.114.949.413,00**	**57.109.378,37**	**138.172.331.339,17**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3.1 Pendapatan Hibah – LO	**133.305.961.948,96**	**166.500.041.631,84**

Pendapatan Hibah LO meliputi pendapatan hibah uang dan hibah barang terinci sebagai berikut:

Tabel 280. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Pendapatan Hibah	2020	2019
1	**PENDAPATAN HIBAH UANG**		
1.1.	**Hibah dari Pemerintah Pusat**	**90.149.069.547,00**	**135.343.921.901,74**
	- Hibah untuk air minum perkotaan	0,00	4.599.000.000,00
	- Hibah untuk air minum perdesaan	842.000.000,00	1.894.000.000,00
	- Pendapatan Hibah Sanitas/air limbah Setempat	1.200.000.000,00	933.000.000,00
	- Dana hibah IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program)*	1.275.109.547,00	2.876.009.805,00
	- Hibah untuk rehabilitasi 12 ruas jalan kabupaten Lumajang dari Kementerian PUPR	0,00	40.775.632.096,74
	- Pendapatan Hibah Pariwisata dalam rangka PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)	860.950.000,00	0,00
	- Hibah Dana BOS untuk lembaga sekolah	85.971.010.000,00	84.266.280.000,00
1.2.	**Hibah dari kelompok masyarakat / perorangan**	**2.244.716.029,44**	**0,00**
	- Hibah Uang dari PNS untuk bantuan covid	2.227.452.255,42	0,00
	- Hibah uang dari masyarakat untuk bantuan covid	17.263.774,02	0,00
A.	**Jumlah Pendapatan Hibah Uang (1.1. + 1.2.)**	**92.393.785.576,44**	**135.343.921.901,74**
2	**PENDAPATAN HIBAH BARANG**		
2.1.	**Hibah dari pemerintah pusat**	**8.269.645.328,96**	**12.605.429.198,10**
	- Hibah barang persediaan	2.214.982.723,96	1.429.678.958,10
	- Hibah Aset Tetap	6.054.662.605,00	11.175.750.240,00
2.2.	**Hibah barang dari pemerintah propinsi**	**17.719.585.923,10**	**11.306.263.673,00**
	- Hibah barang persediaan	17.001.250.415,00	11.306.263.673,00
	- Hibah Aset Tetap	718.335.508,10	0,00
2.3.	**Hibah barang dari lembaga/organisasi swasta**	**9.198.826.760,46**	**7.232.954.859,00**
	- Hibah barang persediaan	930.242.540,00	56.705.976,00
	- Hibah Aset Tetap	8.247.084.220,46	7.176.248.883,00
	- Hibah Pemeliharaan Gedung Bangunan	7.500.000,00	0,00
	- Hibah Sewa Tenda	14.000.000,00	0,00
2.4.	**Hibah barang dari kelompok masayarakat / perorangan**	**5.724.118.360,00**	**11.472.000,00**
	- Hibah barang persediaan	5.268.818.360,00	0,00

No	Pendapatan Hibah	2020	2019
	- Hibah Aset Tetap	455.300.000,00	11.472.000,00
B.	**Jumlah Pendapatan Hibah Barang (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4.)**	**40.912.176.372,52**	**31.156.119.730,10**
3	**Jumlah Pendapatan Hibah LO (A+B)**	**133.305.961.948,96**	**166.500.041.631,84**

Pendapatan hibah uang dari PNS sebesar Rp2.227.452.255,42 digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian bahan makanan sebesar Rp2.160.050.000,00;
2. Jasa transaksi keuangan sebesar Rp1.182.951,07;
3. Pembelian ATK sebesar Rp276.000,00;
4. Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp4.175.000,00;
5. Lembur sebesar Rp2.527.500,00;
6. Materai sebesar Rp936.000,00;
7. Fotocopy sebesar Rp14.200,00;
8. Konsumsi rapat sebesar Rp1.275.000,00;
9. Sisa sebesar Rp57.015.604,35 disetorkan ke rekening kas daerah.

Pendapatan hibah uang dari masyarakat untuk bantuan covid sebesar Rp17.263.774,02 digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp1.700.000,00 dan membentuk aset tetap peralatan dan mesin;
2. Belanja upah tenaga kerja borongan sebesar Rp3.500.000,00;
3. Belanja alat pendingin sebesar Rp11.970.000,00;
4. Sisa sebesar Rp93.774,02 disetorkan ke rekening kas daerah.

Hibah barang berupa aset tetap dan hibah barang persediaan, terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 281. Rincian Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
1	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	802.247.000,00	0,00	0,00	Hibah persediaan penunjang kesehatan untuk penanganan covid dari Kemenkes RI
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	330.718.640,00	0,00	0,00	hibah penunjang kesehatan dan cetak dari Kemenkes RI
3	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	0,00	0,00	16.546.761,00	0,00	0,00	Hibah Bahan Makanan (PMT) dari Kemenkes RI
4	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS CANDIPURO	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	PMT BALITA dari Kemenkes RI
5	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS CANDIPURO	0,00	0,00	12.177.684,96	0,00	0,00	PMT IBU HAMIL Kemenkes RI
6	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PENANGGAL	0,00	0,00	12.177.684,96	0,00	0,00	Makanan Tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dari Kemenkes RI
7	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PENANGGAL	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	PMT BALITA dari Kemenkes RI

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
8	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PASIRIAN	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	PMT BALITA dari Kemenkes RI
9	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PASIRIAN	0,00	0,00	12.177.684,96	0,00	0,00	PMT IBU HAMIL Kemenkes RI
10	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS BADES	0,00	0,00	12.177.684,96	0,00	0,00	PMT IBU HAMIL Kemenkes RI
11	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS BADES	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	PMT BALITA dari Kemenkes RI
12	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS TEMPEH	0,00	0,00	16.481.986,08	0,00	0,00	Hibah Persediaan bahan makanan (PMT) dari Kemenkes RI
13	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS GESANG	0,00	0,00	8.529.664,00	0,00	0,00	Persediaan bahan makanan (PMT) dari Kemenkes RI
14	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	0,00	0,00	16.482.004,00	0,00	0,00	Hibah Persediaan bahan makanan (PMT) dari Kemenkes
15	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS TEKUNG	0,00	0,00	16.481.986,08	0,00	0,00	Hibah Persediaan bahan makanan (PMT) dari Kemenkes
16	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS KUNIR	0,00	0,00	12.177.684,96	0,00	0,00	PMT Makanan Tambahan untuk ibu Hamil kurang energi kronis(KEK) dari Kemenkes RI
17	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS KUNIR	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	PMT BALITA dari Kemenkes RI
18	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	0,00	0,00	12.177.684,96	0,00	0,00	PMT Makanan Tambahan untuk ibu Hamil kurang energi kronis(KEK) dari Kemenkes RI
19	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	PMT BALITA dari Kemenkes RI
20	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	0,00	0,00	12.307.234,80	0,00	0,00	PMT Makanan Tambahan untuk ibu Hamil kurang energi kronis(KEK) dari Kemenkes RI
21	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	PMT BALITA dari Kemenkes RI
22	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS SUKODONO	0,00	0,00	16.611.535,92	0,00	0,00	Hibah Persediaan bahan makanan (PMT) dari Kemenkes
23	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PADANG	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	PMT BALITA dari Kemenkes RI
24	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PADANG	0,00	0,00	12.307.234,80	0,00	0,00	PMT Makanan Tambahan untuk ibu Hamil kurang energi kronis (KEK) dari Kemenkes RI
25	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	PMT BALITA dari Kemenkes RI
26	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	0,00	0,00	12.307.234,80	0,00	0,00	PMT Makanan Tambahan untuk ibu Hamil kurang energi kronis(KEK) dari Kemenkes RI

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
27	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS SENDURO	0,00	0,00	12.307.234,80	0,00	0,00	PMT Makanan Tambahan untuk ibu Hamil kurang energi kronis(KEK) dari Kemenkes RI
28	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS SENDURO	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	PMT BALITA dari Kemenkes RI
29	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS GUCIALIT	0,00	0,00	16.611.535,92	0,00	0,00	Kemenkes (bahan makanan pokok / PMT)
30	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	0,00	0,00	16.611.535,92	0,00	0,00	Hibah Persediaan Bahan Makanan (PMT) dari Kementrian Kesehatan
31	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS TUNJUNG	0,00	0,00	12.307.234,80	0,00	0,00	PMT Makanan Tambahan untuk ibu Hamil kurang energi kronis(KEK) dari Kemenkes RI
32	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS TUNJUNG	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	PMT BALITA dari Kemenkes RI
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	420.745.000,00	0,00	0,00	0,00	Menerima Hibah Aset Tetap Berasal dari Pemerintah Pusat (BNPB) berupa Tenda pengungsi, Fleksible Tank, Power Suply, Senter, HT, Tabung SCBA, Helm Safety, Megaphone
34	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	1.275.109.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Hibah IPDMIP
35	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Hibah Air Minum
36	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	842.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Hibah Sanitas/Air Limbah Setempat
37	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	860.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Hibah Pariwisata dalam rangka PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)
38	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	Hibah Persediaan bahan makanan (PMT) dari Kemenkes RI
39	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS ROGOTUNAN	0,00	0,00	8.529.664,00	0,00	0,00	Persediaan bahan makanan (PMT) dari Kemenkes RI
40	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	0,00	0,00	12.177.684,96	0,00	0,00	PMT Makanan Tambahan untuk ibu Hamil kurang energi kronis(KEK) dari Kemenkes RI
41	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	0,00	0,00	4.304.301,12	0,00	0,00	Makanan Tambahan untuk balita PMT dari Kemenkes RI
42	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS JATIROTO	0,00	0,00	16.611.535,92	0,00	0,00	Hibah Persediaan bahan makanan (PMT) dari Kemenkes
43	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS KLAKAH	0,00	0,00	16.611.535,92	0,00	0,00	Hibah Persediaan bahan makanan (PMT) dari Kemenkes

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
							RI
44	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS RANUYOSO	0,00	0,00	16.611.535,92	0,00	0,00	Hibah Persediaan bahan makanan (PMT) dari Kemenkes RI
45	DINAS KESEHATAN- UPT INSTALASI FARMASI	0,00	0,00	696.559.920,00	0,00	0,00	Hibah Alat Kesehatan/ Kedokteran Habis Pakai dari Kemenkes RI
46	DINAS PENDIDIKAN	0,00	723.880.000,00	0,00	0,00	0,00	Menerima hibah barang TIK SMP dari KEMENDIKBUD (laptop, projektor, router)
47	DINAS PENDIDIKAN	0,00	1.232.700.000,00	0,00	0,00	0,00	Menerima hibah uang yang dibelanjakan menjadi barang TIK(SD) dari KEMENDIKBUD (Laptop)
48	DINAS PENDIDIKAN	0,00	89.959.996,00	0,00	0,00	0,00	Hibah uang yang dibelanjakan menjadi wastafel portable dari kemendikbud
49	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	85.971.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan hibah dari pemerintah pusat (BOS)
50	DINAS PERDAGANGAN	0,00	3.587.377.609,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Hibah dari Kementerian Perdagangan Gedung dan bangunan pasar klojen
TOTAL		**90.149.069.547,00**	**6.054.662.605,00**	**2.214.982.723,96**	**0,00**	**0,00**	

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Propinsi sebesar Rp17.719.585.923,10 meliputi hibah barang berupa barang persediaan berupa penunjang kesehatan untuk penanganan covid, persediaan kesehatan/kedokteran habis pakai, hibah obat-obatan, alat-alat kedokteran, alat-alat studio dan komunikasi, hibah barang (Anjungan Dukcapil Mandiri), dan persediaan alat dan obat (Alkon) dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 282. Rincian Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur
Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
1	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	157.250.000,00	0,00	0,00	Hibah dari BPBD Prop Jatim berupa penunjang kesehatan untuk penanganan covid
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	18.950.000,00	0,00	0,00	Hibah dari BBTKL PP Surabaya berupa penunjang kesehatan untuk penanganan covid
3	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	2.038.316.100,00	0,00	0,00	Hibah dari Dinkes Prop Jatim berupa penunjang kesehatan untuk penanganan covid

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
4	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	9.291.000,00	0,00	0,00	Hibah dari Dinkes Prop Jatim berupa penunjang kesehatan dan cetak
5	RSUD DR. HARYOTO LUMAJANG	0,00	0,00	507.632.500,00	0,00	0,00	Hibah Persediaan kesehatan/ kedokteran habis pakai dari BPBD Provinsi jawa Timur
6	RSUD DR. HARYOTO LUMAJANG	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	Hibah Persediaan kesehatan/ kedokteran habis pakai dari dinkes Provinsi jawa Timur
7	RSUD DR. HARYOTO LUMAJANG	0,00	250.797.619,05	0,00	0,00	0,00	Hibah Alat-alat kedokteran dari dinkes Provinsi jawa Timur
8	RSUD DR. HARYOTO LUMAJANG	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Hibah Alat-alat studio dan komunikasi dari BPBD Provinsi jawa Timur
9	BPBD	0,00	0,00	3.297.844.950,00	0,00	0,00	Hibah Masuk Persediaan Logistik dari Provinsi Jatim untuk Penanganan Covid-19
10	BPBD	0,00	28.240.270,00	0,00	0,00	0,00	Menerima Hibah Aset Tetap Berasal dari Pemerintah Provinsi (BPBD Provinsi Jatim & Dinas Sosial Jatim) berupa Thermoghun 14 buah @ Rp. 500.000 dan Velbed 30 Buah @ Rp. 708.009
11	DINAS KESEHATAN - UPT INSTALASI FARMASI	0,00	0,00	1.069.291.085,00	0,00	0,00	Hibah Alat Kesehatan/Kedokteran Habis Pakai dari Dinas Kesehatan Pemprop Jatim
12	DINAS KESEHATAN - UPT INSTALASI FARMASI	0,00	0,00	8.309.941.935,00	0,00	0,00	Hibah Obat-obatan dari Dinas Kesehatan Pemprop Jatim
13	DINAS KESEHATAN - UPT INSTALASI FARMASI	0,00	0,00	79.560.000,00	0,00	0,00	Hibah Obat dari Kabupaten Sidoarjo
14	DINAS KESEHATAN - UPT INSTALASI FARMASI	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	Hibah Obat dari Kabupaten Jember
15	RSUD PASIRIAN	0,00	250.797.619,05	0,00	0,00	0,00	Menerima Hibah Aset Tetap Alat Kedokteran Umum dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (DINKES PROV JATIM)

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
16	RSUD PASIRIAN	0,00	0,00	103.099.600,00	0,00	0,00	Mencatat Hibah Masuk Persediaan Alat Kesehatan/Kedokteran Habis Pakai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim (BPBD JATIM)
17	RSUD PASIRIAN	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Mencatat Hibah Masuk Persediaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Habis Pakai dari Dinas Kesehatan Provinsi Jatim
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	186.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Menerima hibah barang (Anjungan Dukcapil Mandiri)
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	1.306.228.245,00	0,00	0,00	Hibah Persediaan Alat dan Obat (Alkon) dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
TOTAL		**0,00**	**718.335.508,10**	**17.001.250.415,00**	**0,00**	**0,00**	

Pendapatan Hibah Dari Lembaga/Organisasi Swasta sebesar Rp9.198.826.760,46 merupakan pendapatan hibah berupa aset tetap dan hibah barang persediaan, pemeliharaan, dan sewa dari lembaga/organisasi swasta. Hibah barang dari lembaga/organisasi swasta terinci sebagai berikut:

Tabel 283. Pendapataan Hibah Aset Tetap dan Barang persediaan dari Lembaga/Organisasi Swasta Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
1	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Hibah PT Hazten Indonesia berupa alat penunjang kesehatan untuk penanganan covid
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	21.603.000,00	0,00	0,00	Hibah PT Telkom Cabang Lumajang berupa penunjang kesehatan untuk penanganan covid

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
3	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	0,00	0,00	5.915.000,00	0,00	0,00	Hibah Persediaan untuk Bantuan Covid dari Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri
4	RSUD DR. HARYOTO LUMAJANG	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	Persediaan Kesehatan/kedokteran habis pakai dari lembaga swasta Kab Lumajang
5	RSUD DR. HARYOTO LUMAJANG	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Persediaan Kesehatan/kedokteran habis pakai dari lembaga swasta
6	RSUD DR. HARYOTO LUMAJANG	0,00	0,00	639.632.470,00	0,00	0,00	Persediaan Kesehatan/kedokteran habis pakai dari perusahaan
7	RSUD DR. HARYOTO LUMAJANG	0,00	0,00	14.045.570,00	0,00	0,00	Persediaan Bahan Obat-obatan dari perusahaan
8	RSUD DR. HARYOTO LUMAJANG	0,00	0,00	43.993.000,00	0,00	0,00	Persediaan Bahan Makanan dari Lembaga Swasta
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	8.200.930.920,46	0,00	0,00	0,00	Hibah tanah dari pengembang
10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Hibah Kaos kegiatan Bansos RTLH dan BRS DAK TA. 2020 dari Bank Jatim
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Hadiah pemenang untuk lomba fasion baju daur ulang dari Bank Jatim
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Hibah 125 buah baju pohon berlogo Bank Jatim
13	BPRD	0,00	13.750.000,00		0,00	0,00	Hibah Komputer-Server dari Bank Jatim
14	BPRD	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	Hibah Tenda Kerucut (2 unit @ Rp2.450.000,00) dari Bank Jatim
15	BPRD	0,00	0,00	9.875.000,00	0,00	0,00	Hibah Hadiah Tablet Samsung (5 buah @ Rp1.975.000,00) dari Bank Jatim
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Hibah sewa tenda dari BPD Jawa Timur (Bank Jatim)
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Hibah Paket konsumsi selama 4 hari untuk acara Trans7 di Lumajang dari Bank Jatim
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Hibah Kaos untuk pengunjung Perpustakaan dari Bank Jatim

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
19	DISPORA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Hibah hadiah doorprize dari Bank Jatim
20	DINAS PERTANIAN	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Hibah Kaos dari Bank Jatim Tahun 2020
21	DINAS PERTANIAN	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Hibah Durian dari Bank Jatim
22	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Hibah dari Bank Jatim berupa Kaos untuk pendataan guru ngaji bersama Bank Jatim di LPTQ Kecamatan
23	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL PIMPINAN	0,00	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Hibah kaos dan *goodie bag* peserta *east java ecotourism* Forum di Hutan bambu dari bank Jatim
24	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL PIMPINAN	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Hibah Rompi COVID-19 untuk operasi masker dari Bank Jatim
25	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL PIMPINAN	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Hibah Kaos untuk tamu undangan acara sikatan daya 2020 di AWR Pandanwangi dari Bank Jatim
26	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Hibah persediaan bahan Juknis dari Bank Jatim
27	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	hibah persedian cindera mata dari Bank Jatim
28	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Hibah persediaan konsumsi kegiatan Sosialisasi dan Bimtek dari Bank JATIM
29	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS JATIROTO	0,00	0,00	47.406.500,00	0,00	0,00	Hibah Alat Kesehatan/Kedokteran Habis Pakai dari Lembaga/ Organisasi Swasta/Pemerintah
30	DINAS KESEHATAN- UPT PUSKESMAS JATIROTO	0,00	0,00	2.282.000,00	0,00	0,00	Hibah Bahan Makanan dari Lembaga/Organisasi Swasta/Pemerintah
31	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	Hibah Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dari PT. Bank Jatim
32	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	0,00	27.503.300,00	0,00	0,00	0,00	Hibah Aset Tetap Alat Kedokteran Umum dari Lembaga/Organisasi Swasta (Rumah Amal Salman

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
							Rp26.400.000 dan PT Hazten Indonesia Rp1.103.300)
TOTAL		0,00	8.247.084.220,46	930.242.540,00	7.500.000,00	14.000.000,00	

Pendapatan Hibah Barang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan sebesar Rp5.724.118.360,00 merupakan pendapatan hibah berupa Aset Tetap dan persediaan. Hibah tersebut terinci sebagai berikut

Tabel 284. Pendapataan Hibah Aset Tetap dan Persediaan dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
1	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	406.242.000,00	0,00	0,00	Hibah penunjang kesehatan habis pakai (untuk penanganan covid) dari kelompok masyarakat maupun perorangan
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Hibah bahan makanan (vitamin dan telur untuk penanganan covid) dari kelompok masyarakat maupun perorangan
3	PUSKESMAS GESANG	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Hibah alat kesehatan dari perorangan
4	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	0,00	0,00	58.630.000,00	0,00	0,00	Hibah Persediaan untuk Bantuan Covid dari kelompok masyarakat/perorangan
5	BPBD	0,00	0,00	206.590.000,00	0,00	0,00	Hibah Persediaan Logistik Bantuan Masyarakat untuk Penanganan Covid-19
6	BPBD	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	Menerima Hibah Aset Tetap Berasal dari Kelompok Masyarakat berupa Chain Saw Kecil 1 Unit Rp. 3.250.000 dan Chain Sawa Besar 1 Unit @ Rp. 4.650.000
7	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	4.087.953.000,00	0,00	0,00	Hibah Beras, minyak goreng, mie instan, tepung, gula, susu, masker , APD, sanitizer, handwash dan shampo dari kelompok masyarakat maupun perorangan

No.	SKPD	Jenis Barang Hibah					Keterangan
		Uang	Aset	Persediaan	Pemeliharaan	Sewa	
8	DINAS PERDAGANGAN	0,00	434.400.000,00	0,00	0,00	0,00	Menerima Hibah Aset Tetap KIOS PASAR PASIRIAN dari 24 pedagang
9	DINAS PENDIDIKAN	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Hibah tanah dari masyarakat untuk digunakan di SMPN 2 Rowokangkung
10	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	0,00	0,00	65.756.100,00	0,00	0,00	Hibah Alat penunjang kesehatan habis pakai dari perorangan dan kelompok masyarakat
11	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	0,00	0,00	662.500,00	0,00	0,00	Hibah Bahan makanan dari perorangan
12	DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS JATIROTO	0,00	0,00	23.908.020,00	0,00	0,00	Hibah Alat Kesehatan/ Kedokteran Habis Pakai dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan
13	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	0,00	0,00	375.059.300,00	0,00	0,00	Hibah Persediaan Alat Kedokteran/Kesehatan Habis Pakai dari kelompok masyarakat dan perorangan
14	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	0,00	0,00	15.123.440,00	0,00	0,00	Hibah Persediaan Bahan Obat-Obatan dari kelompok masyarakat
15	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	0,00	0,00	16.744.000,00	0,00	0,00	Hibah Persediaan Bahan Makanan dari kelompok masyarakat
16	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Hibah Persediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih dari kelompok masyarakat
TOTAL		0,00	**455.300.000,00**	**5.268.818.360,00**	0,00	0,00	

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3.2 Pendapatan Dana Lainnya – LO	**4.866.369.390,21**	**340.524.181,92**

Pendapatan Dana Lainnya merupakan pendapatan lain-lain, terinci sebagai berikut:

Tabel 285. Rincian Pendapatan Lainnya LO Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO	2020	2019
1	**PENDAPATAN DANA LAINNYA**		
2	**Sumbangan Pihak Ketiga**	**161.236.924,00**	**173.840.710,00**
3	Sumbangan pihak ketiga dari ...	0,00	0,00
4	Sumbangan pihak ke III dari petani Tebu	161.236.924,00	153.840.710,00
5	Sumbangan pihak ke III dari kelompok sadar	0,00	20.000.000,00
6	**Pendapatan Lainnya**	**4.705.132.466,21**	**166.683.471,92**
7	Penerimaan lain-lain	4.705.132.466,21	166.683.471,92
	Jumlah (2+6)	**4.866.369.390,21**	**340.524.181,92**

Pendapatan Dana Lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga serta dari penerimaan lain-lain.

Tabel 286. Hubungan Pendapatan Dana Lainya LRA dan LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA (SIPKD)	Penambahan - LO		Pengurangan - LO	Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO
			Piutang 2020	Pengurangan penyisihan piutang	Sisa pendapatan hibah uang untuk covid yang disetor kembali ke kas daerah	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = (3+4+5) - (6)**
1	**PENDAPATAN DANA LAINNYA**					
2	**Sumbangan Pihak Ketiga**	**161.236.924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.236.924,00**
3	Sumbangan pihak ketiga dari ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sumbangan pihak ke III dari petani Tebu	161.236.924,00	0,00	0,00	0,00	161.236.924,00
5	**Pendapatan Lainnya**	**2.404.506.293,37**	**620.014.750,00**	**1.737.720.801,21**	**57.109.378,37**	**4.705.132.466,21**
6	Penerimaan lain-lain	2.404.506.293,37	620.014.750,00	1.737.720.801,21	57.109.378,37	4.705.132.466,21
	Jumlah (2+5)	**2.565.743.217,37**	**620.014.750,00**	**1.737.720.801,21**	**57.109.378,37**	**4.866.369.390,21**

B. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan, beban penyisihan piutang, beban transfer dan beban lain-lain.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1. Beban Pegawai-LO	**752.705.636.049,00**	**783.303.286.234,50**

Beban Pegawai meliputi beban gaji dan tunjangan pegawai, honorarium dan uang lembur. Rincian beban pegawai Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 287. Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Beban Pegawai	2020	2019
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	361.866.349.629,00	383.866.095.552,00
2	Tunjangan keluarga	33.773.667.370,00	35.810.762.879,50
3	Tunjangan jabatan	8.520.010.685,00	8.708.891.487,00
4	Tunjangan fungsional	24.531.724.920,00	26.415.479.000,00
5	Tunjangan fungsional umum	4.865.654.204,00	4.768.310.000,00
6	Tunjangan beras	16.846.605.040,00	17.658.745.385,00
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	593.268.017,00	633.506.504,00
8	Pembulatan gaji	4.791.844,00	5.604.969,00
9	Iuran BPJS Kesehatan	17.980.826.566,00	10.836.185.358,00
10	Uang paket	95.508.000,00	95.424.000,00
11	Tunjangan badan musyawarah	32.703.300,00	25.791.150,00
12	Tunjangan komisi	61.387.200,00	50.912.400,00
13	Tunjangan badan anggaran	32.703.300,00	27.252.750,00
14	Tunjangan badan kehormatan	7.855.800,00	6.546.700,00
15	Tunjangan alat kelengkapan lainnya	22.380.750,00	19.183.500,00
16	Tunjangan perumahan	6.666.000.000,00	6.258.500.000,00
17	Uang duka wafat/tewas	0,00	0,00
18	Uang jasa pengabdian	0,00	471.240.000,00
19	Beban penunjang operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00
20	Tunjangan badan legislasi	18.087.000,00	14.341.900,00
21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	2.960.011.944,00	3.145.888.234,00
22	Tunjangan bahaya radiasi	82.800.000,00	92.000.000,00
23	Tambahan penghasilan guru	595.500.000,00	382.750.000,00
24	Tunjangan profesi guru	160.399.952.880,00	174.051.698.420,00

No	Beban Pegawai	2020	2019
25	Tunjangan Transportasi	6.072.000.000,00	5.750.000.000,00
26	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	55.935.190.187,00	53.212.097.566,00
27	Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00
28	Beban penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati	600.000.000,00	600.000.000,00
29	Tunjangan Reses	2.205.000.000,00	1.470.000.000,00
30	Beban insentif pemungutan pajak hotel	31.423.431,00	30.421.541,00
31	Beban insentif pemungutan pajak restoran	173.235.423,00	172.832.555,00
32	Beban insentif pemungutan pajak hiburan	4.594.888,00	3.374.510,00
33	Beban insentif pemungutan pajak reklame	65.869.705,00	59.497.824,00
34	Beban insentif pemungutan pajak penerangan jalan	950.997.223,00	945.559.034,00
35	Beban insentif pemungutan pajak parkir	15.624.119,00	6.225.523,00
36	Beban insentif pemungutan pajak air tanah	13.378.280,00	3.529.399,00
37	Beban insentif pemungutan pajak sarang burung walet	0,00	0,00
38	Beban insentif pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan	259.001.246,00	118.294.406,00
39	Beban insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	430.931.726,00	417.388.387,00
40	Beban insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	538.229.425,00	473.027.262,00
41	Beban insentif pemungutan retribusi jasa usaha	156.145.927,00	197.541.623,00
42	Beban insentif pemungutan retribusi perijinan tertentu	343.111,00	335.608,00
43	Beban insentif pemungutan retribusi jasa umum	409.710.824,00	554.639.726,00
44	Honorarium tim teknis kegiatan	794.080.500,00	809.784.000,00
45	Honorarium pengadaan barang/jasa	693.627.900,00	585.183.500,00
46	Honorarium penyimpan dan pengurus barang	636.566.450,00	1.402.110.500,00
47	Honorarium penerima hasil pekerjaan	123.754.200,00	197.505.900,00
48	Honorarium tim anggaran pemerintah daerah	397.000.000,00	384.000.000,00
49	Honorarium tim peneliti RKA-SKPD	69.000.000,00	0,00
50	Honorarium pelayanan kesehatan	19.187.460.115,00	19.571.866.874,00
51	Honorarium penyelenggara ujian	627.207.350,00	1.081.188.250,00
52	Honorarium pengelola sekolah	1.043.604.800,00	1.070.795.500,00
53	Honorarium tim pemeriksa kasus (Inspektorat)	166.800.000,00	114.600.000,00
54	Honorarium verifikator jampersal	0,00	10.000.000,00

No	Beban Pegawai	2020	2019
55	Honorarium komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	27.600.000,00	27.600.000,00
56	Honorarium sekretariat tim anggaran pemerintah daerah	45.000.000,00	9.000.000,00
57	Honorarium pengguna anggaran	740.949.500,00	518.268.000,00
58	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan	2.131.946.610,00	2.257.475.300,00
59	Honorarium pengurus gaji (Smp Negeri)	143.570.000,00	57.690.000,00
60	Honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah	390.000.000,00	240.000.000,00
61	Honorarium penyelenggara ujian ASN (BKD)	15.600.000,00	5.350.000,00
62	Honorarium bendahara	1.017.430.300,00	0,00
63	Honorarium PPK-SKPD (verifikator)	332.811.000,00	0,00
64	Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi	233.772.000,00	0,00
65	Honorarium tim teknis kegiatan	398.200.000,00	1.276.710.000,00
66	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	634.200.000,00	686.400.000,00
67	Honorarium tim FLS	0,00	14.800.000,00
68	Honorarium komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	40.000.000,00	72.000.000,00
69	Honorarium panitia seleksi pimpinan tinggi/administrator	33.500.000,00	0,00
70	Honorarium tim pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum (Satpol PP)	708.000.000,00	0,00
71	Uang lembur PNS	4.941.722.360,00	6.169.957.058,00
72	Uang lembur non PNS	99.649.000,00	69.740.000,00
73	Beban pegawai pada BLUD	0,00	98.266.200,00
74	Beban Pegawai Dana BOS	0,00	0,00
	Jumlah	**752.705.636.049,00**	**783.303.286.234,50**

Hubungan Beban Pegawai pada laporan operasional dengan belanja pegawai pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 288. Hubungan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Beban Pegawai	Jumlah Belanja Pegawai LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Pengurangan - LO	Total Beban Pegawai – LO
			Utang Belanja Pegawai Tahun 2020	Dana BOS	Pendapatan Hibah	Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8 =(3+4+5+6) - (7)
1	Gaji pokok PNS/uang representasi	362.322.002.483	14.845.798	0,00	0,00	470.498.652	361.866.349.629
2	Tunjangan keluarga	33.809.756.000	3.027.244	0,00	0,00	39.115.874	33.773.667.370
3	Tunjangan jabatan	8.524.913.480	10.538.850	0,00	0,00	15.441.645	8.520.010.685
4	Tunjangan fungsional	24.566.262.970	1.109.950	0,00	0,00	35.648.000	24.531.724.920
5	Tunjangan fungsional umum	4.864.774.254	879.950	0,00	0,00	0,00	4.865.654.204
6	Tunjangan beras	16.836.787.504	9.817.536	0,00	0,00	0,00	16.846.605.040
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	598.861.439	240.488	0,00	0,00	5.833.910	593.268.017
8	Pembulatan gaji	4.843.224	1.680	0,00	0,00	53.060	4.791.844
9	Iuran BPJS Kesehatan	17.980.826.566	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980.826.566
10	Uang paket	95.508.000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.508.000
11	Tunjangan badan musyawarah	32.703.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32.703.300
12	Tunjangan komisi	61.387.200	0,00	0,00	0,00	0,00	61.387.200
13	Tunjangan badan anggaran	32.703.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32.703.300
14	Tunjangan badan kehormatan	7.855.800	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855.800
15	Tunjangan alat kelengkapan lainnya	22.380.750	0,00	0,00	0,00	0,00	22.380.750
16	Tunjangan perumahan	6.666.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666.000.000
17	Uang duka wafat/tewas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18	Uang jasa pengabdian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19	Beban penunjang operasional Pimpinan DPRD	393.120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	393.120.000
20	Tunjangan badan legislasi	18.087.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.087.000
21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	2.965.169.059	132.615	0,00	0,00	5.289.730	2.960.011.944
22	Tunjangan bahaya radiasi	82.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800.000

No	Beban Pegawai	Jumlah Belanja Pegawai LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Pengurangan - LO	Total Beban Pegawai – LO
			Utang Belanja Pegawai Tahun 2020	Dana BOS	Pendapatan Hibah	Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2019	
23	Tambahan penghasilan guru	434.000.000	161.500.000	0,00	0,00	0,00	595.500.000
24	Tunjangan profesi guru	147.634.767.080	12.765.185.800	0,00	0,00	0,00	160.399.952.880
25	Tunjangan Transportasi	6.072.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072.000.000
26	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	55.740.148.317	4.857.641.895	0,00	0,00	4.662.600.025	55.935.190.187
27	Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.000.000
28	Beban penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati	600.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000
29	Tunjangan Reses	2.205.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000.000
30	Beban insentif pemungutan pajak hotel	30.422.323	21.611.302	0,00	0,00	20.610.194	31.423.431
31	Beban insentif pemungutan pajak restoran	170.974.012	119.285.997	0,00	0,00	117.024.586	173.235.423
32	Beban insentif pemungutan pajak hiburan	3.648.688	3.232.484	0,00	0,00	2.286.284	4.594.888
33	Beban insentif pemungutan pajak reklame	60.385.259	45.770.150	0,00	0,00	40.285.704	65.869.705
34	Beban insentif pemungutan pajak penerangan jalan	937.675.599	654.795.020	0,00	0,00	641.473.396	950.997.223
35	Beban insentif pemungutan pajak parkir	9.059.366	10.777.109	0,00	0,00	4.212.356	15.624.119
36	Beban insentif pemungutan pajak air tanah	6.598.687	9.169.197	0,00	0,00	2.389.604	13.378.280
37	Beban insentif pemungutan pajak sarang burung walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Beban Pegawai	Jumlah Belanja Pegawai LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Pengurangan - LO	Total Beban Pegawai – LO
			Utang Belanja Pegawai Tahun 2020	Dana BOS	Pendapatan Hibah	Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2019	
38	Beban insentif pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan	110.916.718	266.616.559	0,00	0,00	118.532.031	259.001.246
39	Beban insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	417.326.162	296.376.516	0,00	0,00	282.770.952	430.931.726
40	Beban insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	477.398.322	381.172.287	0,00	0,00	320.341.184	538.229.425
41	Beban insentif pemungutan retribusi jasa usaha	156.145.927	0,00	0,00	0,00	0,00	156.145.927
42	Beban insentif pemungutan retribusi perijinan tertentu	343.111	0,00	0,00	0,00	0,00	343.111
43	Beban insentif pemungutan retribusi jasa umum	409.710.824	0,00	0,00	0,00	0,00	409.710.824
44	Honorarium tim teknis kegiatan	794.080.500	0,00	0,00	0,00	0,00	794.080.500
45	Honorarium pengadaan barang/jasa	693.627.900	0,00	0,00	0,00	0,00	693.627.900
46	Honorarium penyimpan dan pengurus barang	636.566.450	0,00	0,00	0,00	0,00	636.566.450
47	Honorarium penerima hasil pekerjaan	123.754.200	0,00	0,00	0,00	0,00	123.754.200
48	Honorarium tim anggaran pemerintah daerah	397.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000.000
49	Honorarium tim peneliti RKA-SKPD	69.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000
50	Honorarium pelayanan kesehatan	20.951.546.747	2.105.025.508	0,00	0,00	3.869.112.140	19.187.460.115
51	Honorarium penyelenggara ujian	627.207.350	0,00	0,00	0,00	0,00	627.207.350

No	Beban Pegawai	Jumlah Belanja Pegawai LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Pengurangan - LO	Total Beban Pegawai – LO
			Utang Belanja Pegawai Tahun 2020	Dana BOS	Pendapatan Hibah	Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2019	
52	Honorarium pengelola sekolah	1.043.604.800	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.604.800
53	Honorarium tim pemeriksa kasus (Inspektorat)	166.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800.000
54	Honorarium komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	27.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600.000
55	Honorarium sekretariat tim anggaran pemerintah daerah	45.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000
56	Honorarium pengguna anggaran	740.949.500	0,00	0,00	0,00	0,00	740.949.500
57	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan	2.131.946.610	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.946.610
58	Honorarium pengurus gaji (smp negeri)	143.570.000	0,00	0,00	0,00	0,00	143.570.000
59	Honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah	390.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000.000
60	Honorarium penyelenggara ujian ASN (BKD)	15.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000
61	Honorarium bendahara	1.017.430.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.430.300
62	Honorarium PPK-SKPD (verifikator)	332.811.000	0,00	0,00	0,00	0,00	332.811.000
63	Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi	233.772.000	0,00	0,00	0,00	0,00	233.772.000
65	Honorarium tim teknis kegiatan	398.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	398.200.000
66	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	634.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	634.200.000
67	Honorarium komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	40.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000

No	Beban Pegawai	Jumlah Belanja Pegawai LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Pengurangan - LO	Total Beban Pegawai – LO
			Utang Belanja Pegawai Tahun 2020	Dana BOS	Pendapatan Hibah	Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2019	
68	Honorarium panitia seleksi pimpinan tinggi/administrator	33.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000
69	Honorarium tim pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum (Satpol PP)	708.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000.000
70	Uang lembur PNS	4.041.919.360	4.276.000	911.329.000	2.527.500	18.329.500	4.941.722.360
71	Uang lembur non PNS	99.649.000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.649.000
72	Beban pegawai pada BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Beban Pegawai Dana BOS	911.329.000	0,00	(911.329.000)	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**741.631.927.441**	**21.743.029.935**	**0,00**	**2.527.500**	**10.671.848.827**	**752.705.636.049**

Rincian jumlah Beban Belanja Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp752.705.636.049,00 sebagaimana disajikan pada penjelasan beban di Laporan Operasional.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa-LO	**557.772.601.167,02**	**603.758.556.267,61**

Beban Barang dan Jasa meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 289. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	2020	2019
1	Beban Persediaan	182.074.869.564,93	205.243.532.515,37
2	Beban Jasa	309.750.870.563,27	282.620.726.722,21
3	Beban Pemeliharaan	43.024.463.587,82	56.772.318.292,11
4	Beban Perjalanan Dinas	42.107.791.194,00	51.346.053.933,00
5	Beban Lainnya	5.326.034.386,00	7.775.924.804,92
	Jumlah	582.284.029.296,02	**603.758.556.267,61**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2.1 Beban Persediaan	**182.074.869.564,93**	**205.243.532.515,37**

Beban Persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/ dikonsumsi selama Tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut:

Tabel 290. Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Beban	2020	2019
1	Beban alat tulis kantor	14.676.752.035,93	13.217.143.366,03
2	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	2.830.603.414,14	875.010.690,50
3	Beban perangko, materai, dan benda pos lainnya	580.306.500,00	724.741.800,00
4	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.069.369.691,25	5.175.612.745,12
5	Beban bahan bakar minyak/gas	429.777.391,00	342.152.456,00
6	Beban pengisian tabung pemadam kebakaran	27.142.500,00	38.967.500,00
7	Beban pengisian tabung gas	3.101.871.713,00	923.716.526,00
8	Beban alat kesehatan/kedokteran habis pakai	43.427.898.396,98	27.083.289.396,22
9	Belanja peralatan pengolah tanah dan tanaman sekali pakai	500.000,00	0,00
10	Beban peralatan bangunan sekali pakai	43.899.000,00	370.010.410,00
11	Beban peralatan perikanan sekali pakai	4.869.500,00	29.406.900,00
12	Beban Cinderamata	96.650.000,00	634.649.500,00
13	Beban alat olah raga habis pakai	1.788.019.300,00	2.271.703.501,00
14	Beban karangan bunga/bunga tabur	31.920.000,00	12.000.000,00
15	Beban pakan ikan/ternak	110.531.300,00	90.211.250,00
16	Beban pupuk	73.482.930,00	116.363.100,00
17	Beban make up	0,00	5.345.300,00
18	Beban umbul-umbul/bendera	208.378.900,00	167.888.800,00
19	Beban spanduk/baliho/banner	608.747.050,00	508.217.050,00
20	Beban alat penunjang kesehatan/kedokteran habis pakai	3.033.467.528,78	703.337.634,00
21	Beban pengisian tabung gas medis	0,00	1.430.256.968,00
22	Beban bahan sandang	123.600.000,00	486.724.400,00
23	Beban bahan baku bangunan	563.258.607,00	444.562.092,00
24	Beban bahan/bibit tanaman	503.431.560,00	603.327.341,00
25	Beban bibit ternak	242.838.165,00	193.734.600,00
26	Beban bahan obat-obatan	38.415.907.393,58	46.810.174.425,57
27	Beban bahan kimia	1.992.496.441,00	1.722.948.151,00
28	Beban bahan makanan	13.413.538.884,17	8.180.289.581,21
29	Beban bahan baku praktek/pelatihan	371.351.990,00	539.154.790,00

No.	Nama Akun Beban	2020	2019
30	Beban perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	764.236.466,00	1.698.167.390,00
31	Beban bahan/sampel uji lab	24.947.500,00	47.109.000,00
32	Beban bahan logam	13.400.000,00	11.145.000,00
33	Beban cetak	12.400.910.844,68	19.416.027.070,72
34	Beban penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	8.767.818.288,42	9.299.460.005,00
35	Beban makanan dan minuman rapat	12.898.334.951,00	22.987.668.710,00
36	Beban makanan dan minuman tamu	1.795.503.755,00	2.803.130.902,00
37	Beban makanan dan minuman kegiatan tertentu	2.417.138.750,00	5.993.388.400,00
38	Beban makanan dan minuman pasien	1.906.649.850,00	2.962.552.800,00
39	Beban pakaian sipil harian (PSH)	267.706.000,00	267.910.000,00
40	Beban pakaian sipil lengkap (PSL)	11.550.000,00	151.545.000,00
41	Beban pakaian dinas harian (PDH)	127.245.000,00	127.245.000,00
42	Beban pakaian dinas upacara (PDU)	5.841.000,00	0,00
43	Beban pakaian kerja lapangan	870.109.000,00	762.195.525,00
44	Beban pakaian sipil resmi (PSR)	138.591.000,00	138.795.000,00
45	Beban pakaian dinas lapangan (PDL)	17.550.000,00	27.783.000,00
46	Belanja pakaian adat daerah	186.466.500,00	0,00
47	Beban pakaian batik tradisional	568.829.000,00	1.924.787.600,00
48	Beban pakaian olah raga	304.062.900,00	1.142.137.550,00
49	Beban pakaian seragam	86.434.550,00	297.932.000,00
50	Beban pakaian kegiatan tertentu	764.700.518,00	1.837.653.750,00
51	Beban hadiah uang tunai	251.200.000,00	1.511.625.000,00
52	Beban hadiah barang	299.086.500,00	666.830.150,00
53	Beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	13.273.830.134,00
54	Beban barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga (barang jadi)	0,00	31.405.000,00
55	Beban bantuan sosial barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	336.000.000,00	
56	Beban jasa servis dan penggantian suku cadang	79.947.000,00	4.162.268.255,00
	Jumlah	**182.074.869.564,93**	**205.243.532.515,37**

Tabel 291. Hubungan Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan Tahun 2020

Dalam Rupiah

1	**Persediaan Awal 2020**		**44.763.844.226,43**
2	**Koreksi Tahun Lalu Persediaan**		**(1.547.057.374,20)**
3	**Belanja Persediaan LRA - APBD**		**115.471.980.315,00**
4	**Belanja Persediaan LRA - BOS**		**41.501.145.289,49**
5	**Penambahan LO - Beban Persediaan:**		
6	Utang Belanja persediaan thn 2020	11.080.986.089,00	
7	Menerima Hibah Persediaan	27.577.845.238,96	
8	Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset tetap Dan Jadi Persediaan	88.284.300,00	
9	Beban Tidak Terduga yang menjadi persediaan	1.358.495.349,35	
10	Reklas dari beban lainnya yang menjadi persediaan	160.934.490,00	
11	Reklas Beban Pemeliharaan yang menjadi Persediaan	75.947.000,00	
12	**Jumlah (6 s/d 11)**		**40.342.492.467,31**
13	**Pengurangan LO - Beban Persediaan:**		
14	Hibah Persediaan Kepada Swasta	539.607.494,04	
15	Persediaan Kadaluarsa	628.023.280,00	
16	Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2019	2.956.305.480,50	
17	Persediaan Akhir	51.833.924.392,56	
18	Reklas ke Beban Hibah	2.499.674.712,00	
19	**Jumlah (14 s/d 18)**		**58.457.535.359,10**
20	**TOTAL (1+2+3+4+12) - (19)**		**182.074.869.564,93**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2.2 Beban Jasa	**309.750.870.563,27**	**282.620.726.722,21**

Beban Jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya. Jumlah Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp**309.750.870.563,27** dan Rp282.620.726.722,21.

Tabel 292. Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Beban Jasa	2020	2019
1	Beban telepon	554.061.182,00	611.062.019,00
2	Beban air	900.488.708,40	1.029.780.602,00
3	Beban listrik	26.383.825.626,84	26.178.302.313,00
4	Beban jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	3.500.000,00	1.650.000,00

No.	Beban Jasa	2020	2019
5	Beban surat kabar/majalah	331.736.000,00	354.115.300,00
6	Beban kawat/faksimili/internet	10.214.052.619,09	6.127.796.921,00
7	Beban paket/pengiriman	26.592.212,00	36.357.387,00
8	Beban sertifikasi	7.391.200,00	83.512.500,00
9	Beban jasa transaksi keuangan	3.999.762,74	9.404.956,29
10	Beban jasa administrasi pemungutan retribusi parkir	831.488.400,00	932.987.925,00
11	Beban jasa siaran radio	133.761.250,00	152.800.000,00
12	Beban jasa transportasi/akomodasi	1.620.182.000,00	7.501.432.695,00
13	Beban dokumentasi	736.495.000,00	864.969.570,00
14	Beban dekorasi	236.875.750,00	780.786.901,00
15	Beban jasa tera/kir	57.153.900,00	95.901.500,00
16	Beban jasa promosi/publikasi/advertising	2.351.463.900,00	2.258.687.400,00
17	Beban jasa gelombang radio/televisi	2.700.000,00	10.965.447,00
18	Beban pemeliharaan kesehatan bupati/wabup	7.826.955,00	0,00
19	Beban jasa uji laboratorium	244.916.900,00	233.795.675,00
20	Beban jasa cleaning service	889.332.800,00	622.625.400,00
21	Beban pajak bumi dan bangunan	0,00	747.332,00
22	Beban pajak air tanah	9.620.988,00	8.791.354,00
23	Beban jasa tenaga keamanan	1.383.700.000,00	2.702.925.000,00
24	Beban penggantian transport	8.797.927.250,00	19.018.778.812,00
25	Beban jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	3.616.140.700,00	7.011.499.080,00
26	Beban jasa pendukung kegiatan	220.746.000,00	467.250.000,00
27	Beban jasa laundry	85.255.020,00	49.375.900,00
28	Beban jasa administrasi pemungutan PBB P2	910.149.000,00	1.044.061.000,00
29	Beban jasa juri/wasit	81.425.000,00	413.625.000,00
30	Beban jasa petugas korsik dan drum band	62.250.000,00	135.000.000,00
31	Beban jasa penata rias/make up	6.800.000,00	16.680.000,00
32	Beban jasa event organizer	111.250.700,00	1.331.896.600,00
33	Beban jasa fumigasi	0,00	7.244.000,00
34	Beban jasa siaran televisi	4.000.000,00	5.000.000,00

No.	Beban Jasa	2020	2019
35	Beban jasa pembuatan video	70.409.500,00	23.500.000,00
36	Beban jasa kalibrasi alat kesehatan	100.240.000,00	182.933.900,00
37	Beban jasa pengolahan limbah medis	1.133.903.919,00	967.758.652,00
38	Beban jasa penyelenggaraan diklat	287.850.554,00	227.300.000,00
39	Beban jasa sewa pengharum ruangan	55.400.000,00	54.250.000,00
40	Beban retribusi pelayanan persampahan	31.315.000,00	43.000.000,00
41	Beban jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi	1.070.399.250,00	1.422.883.000,00
42	Beban akomodasi transmigran	0,00	462.590.000,00
43	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	67.973.485.449,00	51.724.101.576,00
44	Beban Penggantian Pengolahan Darah	325.207.000,00	140.823.000,00
45	Beban jasa perizinan penyelenggaraan penyiaran LPPL	5.673.256,00	2.839.095,00
46	Beban jasa penyedotan tinja dan air limbah rumah tangga	19.666.700,00	0,00
47	Beban uang saku rapat	12.225.000,00	16.350.000,00
48	Beban jasa/insentif RT/RW	1.276.800.000,00	1.274.400.000,00
49	Beban iuran wajib Tahunan	25.000.000,00	25.000.000,00
50	Beban jasa lainnya BLUD	0,00	20.360.000,00
51	Beban jasa insentif tenaga kesehatan (Covid-19)	22.600.876.844,00	0,00
52	Beban jasa penyelenggara ujian	143.685.000,00	0,00
53	Beban premi asuransi kesehatan	6.028.862.869,00	810.387.631,00
54	Beban premi asuransi ketenagakerjaan	1.394.629.427,20	589.439.632,92
55	Beban sewa gedung/kantor/tempat	161.802.000,00	874.399.000,00
56	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	298.677.400,00	667.532.145,00
57	Beban sewa tanah/lahan	681.185.054,00	639.808.102,00
58	Beban sewa penginapan	123.803.441,00	238.817.250,00
59	Beban sewa sarana mobilitas darat	384.686.200,00	973.189.261,00
60	Beban sewa electric generating set	7.150.000,00	18.525.000,00
61	Beban sewa alat kantor	39.860.000,00	28.714.000,00
62	Beban sewa alat rumah tangga	83.600.000,00	41.160.000,00
63	Beban sewa komputer	25.775.000,00	0,00

No.	Beban Jasa	2020	2019
64	Beban sewa meja dan kursi	77.111.000,00	325.038.500,00
65	Beban sewa alat studio	82.156.000,00	313.871.750,00
66	Beban sewa alat komunikasi	103.060.800,00	91.420.000,00
67	Beban sewa barang bercorak kebudayaan	9.650.000,00	48.410.000,00
68	Beban sewa tenda dan perlengkapannya	126.715.000,00	691.359.350,00
69	Beban sewa alat praktek/peraga	0,00	2.970.000,00
70	Beban kursus-kursus singkat/pelatihan	351.241.500,00	4.090.550.500,00
71	Beban bimbingan teknis	30.900.000,00	13.200.000,00
72	Beban pendidikan struktural	2.028.894.000,00	17.500.000,00
73	Beban fit and proper test	192.000.000,00	545.500.000,00
74	Beban Seminar	0,00	3.800.000,00
75	Beban jasa konsultansi penelitian	48.950.000,00	297.005.000,00
76	Beban jasa konsultansi perencanaan	688.173.500,00	1.303.148.614,00
77	Beban jasa konsultansi pelaporan	2.033.220.670,00	147.420.000,00
72	Beban jasa konsultansi pengawasan	510.030.275,00	1.050.058.604,00
74	Beban jasa konsultansi hukum	323.763.000,00	337.445.400,00
75	Beban jasa konsultansi IT	266.750.000,00	820.407.500,00
76	Beban jasa konsultansi evaluasi	189.245.000,00	229.240.000,00
77	Beban jasa konsultansi psikologi	4.000.000,00	6.000.000,00
78	Beban upah/ongkos tenaga kerja harian	884.835.000,00	585.855.000,00
79	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	80.578.695.000,00	77.307.383.238,00
80	Beban upah/ongkos tenaga kerja borongan	2.236.558.793,00	1.601.044.994,00
81	Beban tambahan upah tenaga kerja bulanan	4.987.724.250,00	5.058.881.368,00
82	Beban upah/ongkos tenaga pendidik	30.790.000.000,00	31.918.800.000,00
83	Beban tambahan upah tenaga pendidik	17.080.686.600,00	12.421.939.070,00
84	Beban operasional pemeriksaan internal reguler	31.885.000,00	669.276.000,00
85	Beban kursus-kursus singkat/pelatihan	895.185.488,00	1.150.392.000,00
86	Beban Lomba	10.162.000,00	2.940.000,00
	JUMLAH	**309.750.870.563,27**	**282.620.726.722,21**

Hubungan Beban Jasa pada Laporan Operasional dengan belanja jasa pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 293. Hubungan Beban jasa dengan Belanja jasa Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Beban Jasa	Belanja LRA		Penambahan – LO			Pengurangan – LO	Total Beban Jasa – LO
		APBD	BOS	Utang Belanja Jasa Tahun 2020	Pendapatan Hibah	Jasa transaksi keuangan yg dipotong langsung BPJS	Pembayaran Hutang Jasa Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3+4+5+6+7) – (8)
1	Beban telepon	486.901.338,00	55.852.416,00	52.112.744,00	0,00	0,00	40.805.316,00	554.061.182,00
2	Beban air	591.680.785,00	297.446.968,40	58.598.235,00	0,00	0,00	47.237.280,00	900.488.708,40
3	Beban listrik	25.432.524.524,00	1.135.376.163,84	2.019.006.103,00	0,00	0,00	2.203.081.164,00	26.383.825.626,84
4	Beban jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5	Beban surat kabar/majalah	211.526.000,00	120.480.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	331.736.000,00
6	Beban kawat/faksimili/internet	4.693.932.505,00	5.488.868.236,09	294.799.300,00	0,00	0,00	263.547.422,00	10.214.052.619,09
7	Beban paket/pengiriman	26.592.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.592.212,00
8	Beban sertifikasi	7.391.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391.200,00
9	Beban jasa transaksi keuangan	2.791.611,67	0,00	0,00	1.182.951,07	25.200,00	0,00	3.999.762,74
10	Beban jasa administrasi pemungutan retribusi parkir	836.342.550,00	0,00	39.027.150,00	0,00	0,00	43.881.300,00	831.488.400,00
11	Beban jasa siaran radio	133.761.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.761.250,00

No.	Beban Jasa	Belanja LRA		Penambahan – LO			Pengurangan – LO	Total Beban Jasa – LO
		APBD	BOS	Utang Belanja Jasa Tahun 2020	Pendapatan Hibah	Jasa transaksi keuangan yg dipotong langsung BPJS	Pembayaran Hutang Jasa Tahun 2019	
12	Beban jasa transportasi/akomodasi	1.620.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.182.000,00
13	Beban dokumentasi	51.299.000,00	685.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.495.000,00
14	Beban dekorasi	236.875.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.875.750,00
15	Beban jasa tera/kir	57.153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.153.900,00
16	Beban jasa promosi/publikasi/advertising	2.205.393.550,00	146.070.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.463.900,00
17	Beban jasa gelombang radio/televisi	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
18	Beban pemeliharaan kesehatan bupati/wabup	7.826.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826.955,00
19	Beban jasa uji laboratorium	196.916.900,00	45.970.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	244.916.900,00
20	Beban jasa cleaning service	872.688.800,00	0,00	16.644.000,00	0,00	0,00	0,00	889.332.800,00
21	Beban pajak bumi dan bangunan	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Beban pajak air tanah	9.525.204,00	0,00	845.364,00	0,00	0,00	749.580,00	9.620.988,00
23	Beban jasa tenaga keamanan	1.383.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.700.000,00
24	Beban penggantian transport	6.752.670.750,00	2.045.256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797.927.250,00
25	Beban jasa instruktur/ narasumber/tenaga ahli	3.490.870.700,00	125.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.140.700,00

No.	Beban Jasa	Belanja LRA		Penambahan – LO			Pengurangan – LO	Total Beban Jasa – LO
		APBD	BOS	Utang Belanja Jasa Tahun 2020	Pendapatan Hibah	Jasa transaksi keuangan yg dipotong langsung BPJS	Pembayaran Hutang Jasa Tahun 2019	
26	Beban jasa pendukung kegiatan	216.246.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.746.000,00
27	Beban jasa laundry	84.655.020,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.255.020,00
28	Beban jasa administrasi pemungutan PBB P2	910.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.149.000,00
29	Beban jasa juri/wasit	81.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.425.000,00
30	Beban jasa petugas korsik dan drum band	62.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250.000,00
31	Beban jasa penata rias/make up	2.800.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
32	Beban jasa event organizer	111.250.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.250.700,00
33	Beban jasa siaran televisi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
34	Beban jasa pembuatan video	50.119.900,00	20.289.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.409.500,00
35	Beban jasa kalibrasi alat kesehatan	100.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.240.000,00
36	Beban jasa pengolahan limbah medis	1.085.851.273,00	0,00	62.301.496,00	0,00	0,00	14.248.850,00	1.133.903.919,00
37	Beban jasa penyelenggaraan diklat	287.850.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.850.554,00
38	Beban jasa sewa pengharum ruangan	55.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400.000,00

No.	Beban Jasa	Belanja LRA		Penambahan – LO			Pengurangan – LO	Total Beban Jasa – LO
		APBD	BOS	Utang Belanja Jasa Tahun 2020	Pendapatan Hibah	Jasa transaksi keuangan yg dipotong langsung BPJS	Pembayaran Hutang Jasa Tahun 2019	
39	Beban retribusi pelayanan persampahan	15.300.000,00	15.910.000,00	205.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31.315.000,00
40	Beban jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi	1.070.399.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.399.250,00
41	Beban akomodasi transmigran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	55.211.933.699,00	891.507.500,00	16.171.921.866,00	0,00	0,00	4.301.877.616,00	67.973.485.449,00
43	Beban Penggantian Pengolahan Darah	299.955.000,00	0,00	25.252.000,00	0,00	0,00	0,00	325.207.000,00
44	Beban jasa perizinan penyelenggaraan penyiaran LPPL	5.673.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673.256,00
45	Beban jasa penyedotan tinja dan air limbah rumah tangga	19.666.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.666.700,00
46	Beban uang saku rapat	12.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225.000,00
47	Beban jasa/insentif RT/RW	1.276.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.800.000,00
48	Beban iuran wajib Tahunan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
49	Beban jasa insentif tenaga kesehatan (Covid-19)	10.012.662.400,00	0,00	12.588.214.444,00	0,00	0,00	0,00	22.600.876.844,00
49	Beban jasa penyelenggara ujian	0,00	143.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.685.000,00

No.	Beban Jasa	Belanja LRA		Penambahan – LO			Pengurangan – LO	Total Beban Jasa – LO
		APBD	BOS	Utang Belanja Jasa Tahun 2020	Pendapatan Hibah	Jasa transaksi keuangan yg dipotong langsung BPJS	Pembayaran Hutang Jasa Tahun 2019	
50	Beban premi asuransi kesehatan	6.028.862.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028.862.869,00
51	Beban premi asuransi ketenagakerjaan	1.394.629.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.629.427,20
52	Beban sewa gedung/kantor/tempat	161.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.802.000,00
53	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	298.677.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.677.400,00
54	Beban sewa tanah/lahan	681.185.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.185.054,00
55	Beban sewa penginapan	123.803.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.803.441,00
56	Beban sewa sarana mobilitas darat	232.136.200,00	152.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.686.200,00
57	Beban sewa electric generating set	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150.000,00
58	Beban sewa alat kantor	39.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.860.000,00
59	Beban sewa alat rumah tangga	83.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600.000,00
60	Beban sewa komputer	25.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.775.000,00
61	Beban sewa meja dan kursi	77.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.111.000,00
62	Beban sewa alat studio	82.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.156.000,00
63	Beban sewa alat komunikasi	103.060.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.060.800,00

No.	Beban Jasa	Belanja LRA		Penambahan – LO			Pengurangan – LO	Total Beban Jasa – LO
		APBD	BOS	Utang Belanja Jasa Tahun 2020	Pendapatan Hibah	Jasa transaksi keuangan yg dipotong langsung BPJS	Pembayaran Hutang Jasa Tahun 2019	
64	Beban sewa barang bercorak kebudayaan	9.000.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00
65	Beban sewa tenda dan perlengkapannya	112.715.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	126.715.000,00
66	Beban kursus-kursus singkat/pelatihan	361.241.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	351.241.500,00
67	Beban bimbingan teknis	30.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900.000,00
68	Beban pendidikan struktural	2.028.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.894.000,00
69	Beban fit and proper test	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000.000,00
69	Beban jasa konsultansi penelitian	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950.000,00
70	Beban jasa konsultansi perencanaan	688.173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.173.500,00
71	Beban jasa konsultansi pelaporan	1.967.440.670,00	0,00	65.780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.033.220.670,00
72	Beban jasa konsultansi pengawasan	510.030.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.030.275,00
73	Beban jasa konsultansi hukum	323.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.763.000,00
74	Beban jasa konsultansi IT	266.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.750.000,00
74	Beban jasa konsultansi evaluasi	189.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.245.000,00

No.	Beban Jasa	Belanja LRA		Penambahan – LO			Pengurangan – LO	Total Beban Jasa – LO
		APBD	BOS	Utang Belanja Jasa Tahun 2020	Pendapatan Hibah	Jasa transaksi keuangan yg dipotong langsung BPJS	Pembayaran Hutang Jasa Tahun 2019	
75	Beban jasa konsultansi psikologi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
76	Beban upah/ongkos tenaga kerja harian	884.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.835.000,00
77	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	80.575.995.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	80.578.695.000,00
78	Beban upah/ongkos tenaga kerja borongan	1.872.192.223,00	131.000,00	360.735.570,00	3.500.000,00	0,00	0,00	2.236.558.793,00
79	Beban tambahan upah tenaga kerja bulanan	4.961.848.250,00	0,00	44.356.000,00	0,00	0,00	18.480.000,00	4.987.724.250,00
80	Beban upah/ongkos tenaga pendidik	30.790.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.790.000.000,00
81	Beban tambahan upah tenaga pendidik	2.235.456.000,00	14.845.230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080.686.600,00
82	Beban operasional pemeriksaan internal reguler	31.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.885.000,00
83	Beban kursus-kursus singkat/pelatihan	902.210.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025.000,00	895.185.488,00
84	Beban Lomba	0,00	10.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162.000,00
	JUMLAH	**258.643.934.333,87**	**26.237.002.334,33**	**31.806.999.272,00**	**18.682.951,07**	**25.200,00**	**6.955.773.528,00**	**309.750.870.563,27**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2.3 Beban Pemeliharaan	**43.024.463.587,82**	**56.772.318.292,11**

Beban Pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp43.024.463.587,82 dan Rp56.772.318.292,11.

Tabel 294. Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Beban Pemeliharaan	2020	2019
1	Beban bahan bakar minyak dan pelumas	5.898.292.818,00	7.175.068.202,00
2	Beban jasa servis dan penggantian suku cadang	3.480.127.058,00	0,00
3	Beban jasa kir kendaraan dinas/operasional	14.998.650,00	13.735.000,00
4	Beban STNK kendaraan dinas/operasional	707.310.370,00	670.060.850,00
5	Beban pemeliharaan excavator	234.349.625,00	214.975.000,00
6	Beban pemeliharaan asphal equipment	0,00	183.362.000,00
7	Beban pemeliharaan loader	16.654.750,00	190.494.400,00
8	Beban pemeliharaan electric generating set	396.290.800,00	256.551.120,00
9	Beban pemeliharaan pompa	18.332.000,00	11.105.000,00
10	Beban pemeliharaan alat pengolahan air kotor	0,00	26.176.700,00
11	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor perorangan	16.968.586,00	10.145.647,00
12	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor berpenumpang	24.356.964,00	31.199.713,00
13	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor khusus	250.846.205,00	318.276.650,00
14	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	2.427.000,00	5.416.350,00
15	Beban pemeliharaan kendaraan tak bermotor angkutan barang	10.853.000,00	209.217.139,00
16	Beban pemeliharaan alat angkut apung bermotor beRpenumpang	2.000.000,00	27.264.000,00
17	Beban pemeliharaan alat angkut apung tak bermotor berpenumpang	0,00	20.592.000,00
18	Beban pemeliharaan alat kalibrasi	265.805.142,00	325.119.001,00
19	Beban pemeliharaan alat ukur lainnya	79.337.500,00	90.928.000,00
20	Beban pemeliharaan alat pengolahan tanah dan tanaman	5.050.000,00	4.500.000,00
21	Beban pemeliharaan alat prosesing	8.993.000,00	16.000.000,00
22	Beban pemeliharaan alat pemeliharaan tanaman	200.000,00	100.000,00
23	Beban pemeliharaan alat reproduksi (pengganda)	84.324.040,00	66.697.390,00
24	Beban pemeliharaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	92.055.000,00	16.750.000,00
25	Beban pemeliharaan office use	197.344.900,00	216.406.000,00
26	Beban pemeliharaan meubelair	1.494.790.200,00	1.746.376.200,00
27	Beban pemeliharaan alat pembersih	17.070.000,00	11.338.000,00

No.	Beban Pemeliharaan	2020	2019
28	Beban pemeliharaan alat pendingin	810.955.200,00	784.590.500,00
29	Beban pemeliharaan alat dapur	3.500.000,00	465.000,00
30	Beban pemeliharaan home use	242.470.439,00	379.690.339,00
31	Beban pemeliharaan alat pemadam kebakaran	7.160.000,00	7.000.000,00
32	Beban pemeliharaan komputer unit/jaringan	89.164.000,00	97.586.000,00
33	Beban pemeliharaan personal komputer	2.322.983.202,00	2.216.703.438,00
34	Beban pemeliharaan peralatan personal komputer	1.346.665.942,00	1.223.892.500,00
35	Beban pemeliharaan peralatan jaringan	137.684.881,00	257.989.191,00
36	Beban pemeliharaan kursi tamu pejabat	2.500.000,00	0,00
37	Beban pemeliharaan peralatan studio video dan film	40.000.000,00	11.756.500,00
38	Beban pemeliharaan peralatan cetak	10.000.000,00	0,00
39	Beban pemeliharaan alat komunikasi telephone	4.000.000,00	18.536.000,00
40	Beban pemeliharaan alat komunikasi radio SSB	1.500.000,00	1.500.000,00
41	Beban pemeliharaan alat komunikasi radio HF/FM	27.499.000,00	27.500.000,00
42	Beban pemeliharaan alat komunikasi radio VHF	18.676.000,00	21.693.050,00
43	Beban pemeliharaan alat kedokteran umum	862.403.700,00	880.202.369,00
44	Beban pemeliharaan alat kedokteran gigi	15.842.000,00	30.290.800,00
45	Beban pemeliharaan alat rontgen	151.897.500,00	5.331.150,00
46	Beban pemeliharaan alat kesehatan perawatan	7.062.700,00	63.951.050,00
47	Beban pemeliharaan alat kesehatan olah raga	1.938.000,00	5.000.000,00
48	Beban pemeliharaan alat laboratorium microbiologi	5.000.000,00	4.860.000,00
49	Beban pemeliharaan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi	0,00	12.750.000,00
50	Beban pemeliharaan alat laboratorium mekanik tanah dan batuan	0,00	12.650.000,00
51	Beban pemeliharaan alat laboratorium umum	43.452.200,00	14.017.300,00
52	Beban pemeliharaan alat laboratorium kedokteran	0,00	6.067.600,00
53	Beban pemeliharaan alat peraga bidang studi Olah Raga	1.000.000,00	0,00
54	Beban pemeliharaan alat laboratorium kualitas air dan tanah	0,00	67.220.000,00
55	Beban pemeliharaan alat laboratorium lingkungan	4.950.000,00	5.500.000,00
56	Beban pemeliharaan bangunan gedung kantor	995.719.624,00	2.019.932.723,00
57	Beban pemeliharaan bangunan gudang	13.121.000,00	4.747.880,00
59	Beban pemeliharaan bangunan gedung laboratarium	3.510.000,00	0,00
60	Beban pemeliharaan bangunan kesehatan	620.140.121,00	711.324.071,00
61	Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat ibadah	249.846.600,00	29.208.400,00
62	Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan	3.854.517.820,00	4.016.645.900,00
63	Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat olah raga	740.564.000,00	272.000.000,00
64	Beban pemeliharaan bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar	0,00	249.456.000,00
65	Beban pemeliharaan bangunan gedung untuk pos jaga	2.215.000,00	5.312.400,00

No.	Beban Pemeliharaan	2020	2019
66	Beban pemeliharaan bangunan gedung garasi/pool	0,00	2.427.900,00
67	Beban pemeliharaan bangunan gedung perpustakaan	93.080.875,00	82.183.300,00
68	Beban pemeliharaan bangunan gedung museum	97.009.600,00	84.560.000,00
69	Beban pemeliharaan bangunan taman/wisata/rekreasi	243.873.900,00	388.970.555,53
70	Beban pemeliharaan rumah negara golongan I	37.000.000,00	49.200.000,00
71	Beban pemeliharaan rumah negara golongan II	0,00	63.048.500,00
72	Beban pemeliharaan rumah negara golongan III	9.140.000,00	0,00
73	Beban pemeliharaan flat/rumah susun	111.858.000,00	88.879.350,00
74	Beban pemeliharaan bangunan menara telekomunikasi	26.600.000,00	0,00
75	Beban pemeliharaan makam bersejarah	4.300.000,00	0,00
76	Beban pemeliharaan bangunan bersejarah	47.372.000,00	59.700.000,00
77	Beban pemeliharaan rambu bersuar	296.151.000,00	49.474.000,00
78	Beban pemeliharaan rambu tidak bersuar	226.141.220,00	0,00
79	Beban pemeliharaan jalan kabupaten/kota	9.494.286.148,82	22.849.695.328,74
80	Beban pemeliharaan penunjang jalan kabupaten/kota	0,00	324.532.841,84
81	Beban pemeliharaan jembatan kabupaten/kota	0,00	600.397.370,00
82	Beban pemeliharaan bangunan pembawa irigasi	2.635.180.650,00	2.168.176.390,00
83	Beban pemeliharaan bangunan pembuang irigasi	1.325.802.000,00	687.970.000,00
84	Beban pemeliharaan bangunan pengaman irigasi	51.974.200,00	289.916.100,00
85	Beban pemeliharaan bangunan pembuang air kotor	2.902.900,00	0,00
86	Beban pemeliharaan air tanah dalam	2.840.000,00	0,00
87	Beban pemeliharaan instalasi air bersih/air baku lainnya	120.777.000,00	6.075.000,00
88	Beban pemeliharaan instalasi air buangan domestik	41.000.000,00	59.913.422,00
89	Beban pemeliharaan instalasi pengolahan sampah organik	197.980.000,00	155.751.750,00
90	Beban pemeliharaan instalasi pengolahan sampah non organik	0,00	185.000,00
91	Beban pemeliharaan jaringan distribusi	785.602.025,00	1.850.218.694,00
92	Beban pemeliharaan jaringan pipa distribusi	56.144.000,00	0,00
93	Beban pemeliharaan buku	282.959.200,00	96.088.050,00
94	Beban pemeliharaan barang-barang perpustakaan	1.750.000,00	1.100.000,00
95	Beban pemeliharaan barang bercorak kebudayaan	135.436.500,00	129.294.300,00
96	Beban pemeliharaan tanaman	249.094.500,00	290.504.617,00
97	Beban pemeliharaan aset tidak berwujud	100.091.700,00	348.810.500,00
98	Beban pemeliharaan taman	391.399.632,00	722.020.800,00
	Jumlah	**43.024.463.587,82**	**56.772.318.292,11**

Hubungan Beban Pemeliharaan pada laporan operasional dengan belanja pemeliharaan pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 295. Hubungan Beban pemeliharaan dengan Belanja pemeliharaan
Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Beban Pemeliharaan	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja pemeliharaan 2020	Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2019	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (3+4+5+6+7)-(8+9)
1	Beban bahan bakar minyak dan pelumas	5.901.065.441,00	0,00	15.365.300	0,00	0,00	18.137.923	0,00	5.898.292.818,00
2	Beban jasa servis dan penggantian suku cadang	3.556.074.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.947.000	3.480.127.058,00
3	Beban jasa kir kendaraan dinas/operasional	14.998.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998.650,00
4	Beban STNK kendaraan dinas/operasional	707.366.570,00	0,00	1.943.800	0,00	0,00	2.000.000	0,00	707.310.370,00
5	Beban pemeliharaan excavator	234.349.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.349.625,00
6	Beban pemeliharaan asphal equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban pemeliharaan loader	16.654.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.654.750,00
8	Beban pemeliharaan electric generating set	389.940.800,00	6.350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.290.800,00

No.	Beban Pemeliharaan	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja pemeliharaan 2020	Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2019	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	
9	Beban pemeliharaan pompa	18.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.332.000,00
10	Beban pemeliharaan alat pengolahan air kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor perorangan	16.968.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968.586,00
12	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor berpenumpang	24.356.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.356.964,00
13	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor khusus	252.753.096,00	0,00	272.876	0,00	0,00	2.179.767	0,00	250.846.205,00
14	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	2.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.000,00
15	Beban pemeliharaan kendaraan tak bermotor angkutan barang	10.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853.000,00
16	Beban pemeliharaan alat angkut apung bermotor berpenumpang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17	Beban pemeliharaan alat angkut apung tak bermotor berpenumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Beban pemeliharaan alat kalibrasi	265.805.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.805.142,00

No.	Beban Pemeliharaan	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja pemeliharaan 2020	Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2019	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	
19	Beban pemeliharaan alat ukur lainnya	79.337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.337.500,00
20	Beban pemeliharaan alat pengolahan tanah dan tanaman	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
21	Beban pemeliharaan alat prosesing	8.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993.000,00
22	Beban pemeliharaan alat pemeliharaan tanaman	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
23	Beban pemeliharaan alat reproduksi (pengganda)	84.324.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.324.040,00
24	Beban pemeliharaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	5.550.000,00	86.505.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.055.000,00
25	Beban pemeliharaan office use	88.400.900,00	108.944.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.344.900,00
26	Beban pemeliharaan meubelair	556.645.500,00	938.144.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.790.200,00
27	Beban pemeliharaan alat pembersih	17.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070.000,00
28	Beban pemeliharaan alat pendingin	791.835.200,00	19.120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.955.200,00

No.	Beban Pemeliharaan	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja pemeliharaan 2020	Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2019	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	
29	Beban pemeliharaan alat dapur	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
30	Beban pemeliharaan home use	239.920.439,00	2.550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.470.439,00
31	Beban pemeliharaan alat pemadam kebakaran	7.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160.000,00
32	Beban pemeliharaan komputer unit/jaringan	89.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.164.000,00
33	Beban pemeliharaan personal komputer	1.539.945.552,00	783.037.650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.983.202,00
34	Beban pemeliharaan peralatan personal komputer	1.003.259.942,00	343.406.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.665.942,00
35	Beban pemeliharaan peralatan jaringan	137.684.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.684.881,00
36	Beban pemeliharaan kursi tamu pejabat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
37	Beban pemeliharaan peralatan studio video dan film	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
38	Beban pemeliharaan peralatan cetak	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
39	Beban pemeliharaan alat komunikasi telephone	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

No.	Beban Pemeliharaan	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja pemeliharaan 2020	Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2019	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	
40	Beban pemeliharaan alat komunikasi radio SSB	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
41	Beban pemeliharaan alat komunikasi radio HF/FM	27.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.499.000,00
42	Beban pemeliharaan alat komunikasi radio VHF	18.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676.000,00
43	Beban pemeliharaan alat kedokteran umum	866.003.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000	0,00	862.403.700,00
44	Beban pemeliharaan alat kedokteran gigi	15.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.842.000,00
45	Beban pemeliharaan alat rontgen	151.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.897.500,00
46	Beban pemeliharaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Beban pemeliharaan alat kesehatan perawatan	7.062.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062.700,00
48	Beban pemeliharaan alat kesehatan olah raga	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.000,00

No.	Beban Pemeliharaan	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja pemeliharaan 2020	Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2019	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	
49	Beban pemeliharaan alat laboratorium microbiologi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
50	Beban pemeliharaan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Beban pemeliharaan alat laboratorium mekanik tanah dan batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Beban pemeliharaan alat laboratorium umum	43.452.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.452.200,00
53	Beban pemeliharaan alat laboratorium kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Beban pemeliharaan alat laboratorium hematologi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Beban pemeliharaan alat peraga bidang studi Olah Raga	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
56	Beban pemeliharaan alat laboratorium kualitas air dan tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Beban Pemeliharaan	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja pemeliharaan 2020	Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2019	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	
57	Beban pemeliharaan alat laboratorium lingkungan	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
58	Beban pemeliharaan bangunan gedung kantor	967.877.624,00	20.342.000	0,00	0,00	7.500.000	0,00	0,00	995.719.624,00
59	Beban pemeliharaan bangunan gudang	0,00	13.121.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121.000,00
60	Beban pemeliharaan bangunan gedung laboratarium	0,00	3.510.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00
61	Beban pemeliharaan bangunan kesehatan	620.140.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.140.121,00
62	Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat ibadah	222.387.900,00	22.058.700	0,00	5.400.000	0,00	0,00	0,00	249.846.600,00
63	Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan	1.569.219.740,00	2.285.298.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.517.820,00
64	Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat olah raga	739.124.000,00	1.440.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.564.000,00
65	Beban pemeliharaan bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Beban Pemeliharaan	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja pemeliharaan 2020	Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2019	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	
66	Beban pemeliharaan bangunan gedung untuk pos jaga	0,00	2.215.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00
67	Beban pemeliharaan bangunan gedung garasi/pool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Beban pemeliharaan bangunan gedung perpustakaan	73.268.675,00	19.812.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.080.875,00
69	Beban pemeliharaan bangunan gedung museum	97.009.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.009.600,00
70	Beban pemeliharaan bangunan taman/wisata/rekreasi	243.873.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.873.900,00
71	Beban pemeliharaan rumah negara golongan I	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00
72	Beban pemeliharaan rumah negara golongan II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Beban pemeliharaan rumah negara golongan III	9.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140.000,00
74	Beban pemeliharaan flat/rumah susun	111.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.858.000,00

No.	Beban Pemeliharaan	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja pemeliharaan 2020	Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2019	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	
75	Beban pemeliharaan bangunan menara perambuan penerangan pantai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Beban pemeliharaan bangunan perambuan penerangan pantai tidak bermenara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Beban pemeliharaan bangunan menara telekomunikasi	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00
78	Beban pemeliharaan bangunan kerangka reklame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Beban pemeliharaan istana peringatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Beban pemeliharaan rumah adat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Beban pemeliharaan rumah peninggalan sejarah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Beban pemeliharaan makam bersejarah	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
83	Beban pemeliharaan bangunan tempat ibadah bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Beban Pemeliharaan	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja pemeliharaan 2020	Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2019	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	
84	Beban pemeliharaan bangunan bersejarah	47.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.372.000,00
85	Beban pemeliharaan rambu bersuar	296.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.151.000,00
86	Beban pemeliharaan rambu tidak bersuar	226.141.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.141.220,00
87	Beban pemeliharaan jalan kabupaten/kota	9.494.286.148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494.286.148,82
88	Beban pemeliharaan penunjang jalan kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Beban pemeliharaan jembatan kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Beban pemeliharaan bangunan pembawa irigasi	2.635.180.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.180.650,00
91	Beban pemeliharaan bangunan pembuang irigasi	1.325.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.802.000,00
92	Beban pemeliharaan bangunan pengaman irigasi	51.974.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.974.200,00
93	Beban pemeliharaan bangunan pembuang air kotor	2.902.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.900,00

No.	Beban Pemeliharaan	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja pemeliharaan 2020	Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2019	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	
94	Beban pemeliharaan air tanah dalam	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00
95	Beban pemeliharaan instalasi air bersih/air baku lainnya	120.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.777.000,00
96	Beban pemeliharaan instalasi air buangan domestik	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00
97	Beban pemeliharaan instalasi pengolahan sampah organik	197.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.980.000,00
98	Beban pemeliharaan instalasi pengolahan sampah non organik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Beban pemeliharaan jaringan distribusi	785.602.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.602.025,00
100	Beban pemeliharaan jaringan pipa distribusi	56.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.144.000,00
101	Beban pemeliharaan buku	0,00	282.959.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.959.200,00
102	Beban pemeliharaan barang-barang perpustakaan	0,00	1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
103	Beban pemeliharaan barang bercorak kebudayaan	135.436.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.436.500,00
104	Beban pemeliharaan tanaman	249.094.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.094.500,00

No.	Beban Pemeliharaan	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja pemeliharaan 2020	Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2019	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	
105	Beban pemeliharaan aset tidak berwujud	99.151.500,00	940.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.091.700,00
106	Beban pemeliharaan taman	391.399.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.399.632,00
	Jumlah	**38.153.342.571,82**	**4.942.503.730,00**	**17.581.976,00**	**5.400.000,00**	**7.500.000,00**	**25.917.690,00**	**75.947.000,00**	**43.024.463.587,82**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2.4 Beban Perjalanan Dinas	**42.107.791.194,00**	**51.346.053.933,00**

Beban Perjalanan Dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut:

Tabel 296. Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Beban	2020	2019
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	17.578.689.375,00	21.141.861.245,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	24.529.101.819,00	29.947.693.300,00
3	Beban perjalanan dinas luar negeri	0,00	256.499.388,00
	Jumlah	**42.107.791.194,00**	**51.346.053.933,00**

Hubungan Beban Perjalanan Dinas pada laporan operasional dengan belanja perjalanan dinas pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 297. Hubungan Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Beban Perjalanan Dinas	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO	Jumlah Beban Perjalanan Dinas (LO)
		APBD	BOS	Utang belanja perjalanan dinas thn 2020	Menerima Hibah Uang	Reklas dari aset tetap menjadi barang dan jasa	Pembayaran Utang Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3+4+5+6+7) - (8)
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	16.528.560.375,00	1.045.908.000,00	4.656.000,00	4.175.000,00	1.300.000,00	5.910.000,00	17.578.689.375,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	24.733.598.492,00	300.000,00	5.850.600,00	0,00	7.286.970,00	217.934.243,00	24.529.101.819,00
Jumlah		**41.262.158.867,00**	**1.046.208.000,00**	**10.506.600,00**	**4.175.000,00**	**8.586.970,00**	**223.844.243,00**	**42.107.791.194,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2.5 Beban Lainnya	**5.326.034.386,00**	**7.775.924.804,92**

Beban Lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.

Beban Lainnya Tahun 2020 dan 2019 masing-masin sebesar Rp5.326.034.386,00 dan Rp7.775.924.804,92, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 298. Daftar Rincian Beban Lainnya Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No.	Beban Lainnya	2020	2019
1	Beban kendaraan tak bermotor angkutan barang	122.169.000,00	0,00
2	Beban perkakas konstruksi logam yang berpindah	49.350.000,00	116.019.750,00
3	Beban perkakas bengkel khusus	0,00	2.051.500,00
4	Beban perkakas standar (standart tool)	13.441.750,00	12.892.985,00
5	Beban perkakas bengkel kerja	2.790.000,00	7.454.930,00
6	Beban alat ukur universal	1.555.000,00	4.140.000,00
7	Beban alat ukur lainnya	14.745.000,00	2.345.000,00
8	Beban alat timbangan	5.770.000,00	769.500,00
9	Beban alat pengolahan tanah dan tanaman	21.902.500,00	22.855.000,00
10	Beban alat-alat peternakan	0,00	15.390.000,00
11	Beban alat produksi perikanan	0,00	4.981.900,00
12	Beban alat pemeliharaan tanaman	0,00	10.700.000,00
13	Beban alat laboratorium	0,00	2.189.999,90
14	Beban mesin hitung/jumlah	5.760.000,00	8.036.000,00
15	Beban alat penyimpanan perlengkapan kantor	65.520.000,00	1.150.000,00
16	Beban office use	81.029.400,00	66.282.850,00
17	Beban meubelair	1.151.927.318,00	1.565.534.694,72
18	Beban alat pengukur waktu	36.365.000,00	4.363.000,00
19	Beban alat pembersih	0,00	1.950.000,00
20	Beban alat pendingin	105.169.500,00	60.655.500,00
21	Beban alat dapur	162.107.050,00	150.711.700,00
22	Beban home use	319.799.430,00	762.467.957,00
23	Beban alat pemadam kebakaran	34.885.310,00	9.849.290,00
24	Beban komputer unit/jaringan	0,00	19.415.000,00
25	Beban peralatan personal komputer	720.000,00	5.900.000,00
26	Beban peralatan jaringan	42.340.900,00	58.567.713,00
27	Beban kursi rapat pejabat	11.250.000,00	15.500.000,00
28	Beban peralatan studio visual	875.000,00	450.000,00

No.	Beban Lainnya	2020	2019
29	Beban peralatan studio video dan film	975.000,00	0,00
30	Beban alat komunikasi telephone	4.600.020,00	3.410.000,00
31	Beban alat kedokteran umum	1.623.105.658,00	371.949.436,44
32	Beban alat kedokteran gigi	17.282.450,00	24.917.250,00
33	Beban alat kedokteran mata	0,00	92.977.500,00
34	Beban alat farmasi	140.000,00	1.340.625,00
35	Beban alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	17.248.950,00	7.101.850,00
36	Beban alat kesehatan anak	0,00	412.500,00
37	Beban alat kedokteran gawat darurat	14.419.900,00	4.312.000,00
38	Beban alat kesehatan perawatan	695.000,00	4.245.000,00
39	Beban alat kesehatan olah raga	0,00	2.950.000,00
40	Beban alat laboratorium microbiologi	979.000,00	0,00
41	Beban alat laboratorium umum	33.307.050,00	20.207.000,00
42	Beban alat laboratorium kedokteran	1.649.100,00	100.000,00
43	Beban alat laboratorium fisika	0,00	12.999.250,00
44	Beban alat laboratorium kimia	39.374.500,00	0,00
45	Beban alat laboratorium hematologi	658.000,00	0,00
46	Beban alat peraga bidang studi Bahasa Indonesia	5.884.000,00	0,00
47	Beban alat peraga bidang studi Matematika	69.903.950,00	15.825.000,00
48	Beban alat peraga bidang studi IPA Dasar	196.622.200,00	3.576.000,00
49	Beban alat peraga bidang studi IPA Lanjutan	7.840.000,00	495.000,00
50	Beban alat peraga bidang studi IPA Menengah	16.559.250,00	7.655.000,00
51	Beban alat peraga bidang studi IPS	123.775.200,00	28.254.250,00
52	Beban alat peraga bidang studi Agama Islam	325.000,00	384.000,00
53	Beban alat peraga bidang studi Ketrampilan	879.000,00	3.200.000,00
54	Beban alat peraga bidang studi Kesenian	6.176.300,00	5.756.500,00
55	Beban alat peraga bidang studi Olah Raga	64.410.200,00	39.304.700,00
56	Beban alat peraga/praktek kerja	16.388.900,00	10.257.750,00
57	Beban alat laboratorium lingkungan	6.486.700,00	1.617.000,00
58	Beban alat laboratorium penunjang	0,00	600.000,00
59	Beban bangunan gedung kantor	0,00	30.099.315,86

No.	Beban Lainnya	2020	2019
60	Beban bangunan gedung instalasi	3.600.000,00	4.500.000,00
61	Beban bangunan gedung tempat pendidikan	1.005.900,00	0,00
62	Beban bangunan taman/wisata/rekreasi	9.730.000,00	0,00
63	Beban bangunan menara telekomunikasi	0,00	31.851.000,00
64	Beban tugu/tanda batas	300.000.000,00	150.000.000,00
65	Beban rambu bersuar	0,00	197.997.800,00
66	Beban rambu tidak bersuar	388.219.000,00	836.473.000,00
67	Beban jalan kabupaten/kota	0,00	393.085.000,00
68	Beban buku umum	0,00	1.235.398.693,00
69	Beban buku agama	0,00	125.661.115,00
70	Beban buku ilmu sosial	0,00	67.743.100,00
71	Beban buku ilmu bahasa	0,00	105.897.100,00
72	Beban buku matematika & pengetahuan alam	0,00	470.954.600,00
73	Beban buku ilmu pengetahuan praktis	0,00	36.833.700,00
74	Beban buku arsitektur, kesenian, olah raga	0,00	424.638.500,00
75	Beban buku georafi, biografi, sejarah	0,00	3.080.000,00
76	Beban majalah	0,00	45.000,00
77	Beban Peta	2.007.000,00	0,00
78	Beban alat kesenian	64.755.000,00	7.895.000,00
79	Beban alat olah raga	17.040.000,00	2.700.000,00
80	Beban binatang ikan	20.520.000,00	54.600.000,00
	Jumlah	**5.326.034.386,00**	**7.775.924.804,92**

Tabel 299. Hubungan Beban Lain-lain dengan Belanja Lain-lain Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Beban Lainnya	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO			Jumlah Beban Lainnya (LO)
		APBD	BOS	Reklas dari Belanja Modal Tidak Menambah Aset tetap	Utang Belanja Lainnya Tahun 2020	Menerima Hibah	Reklas Dari Belanja Lainnya Menambah Aset Tetap	Reklas ke Beban Persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas dari Belanja BOS yang menjadi aset tetap	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (3+4+5+6+7)-(8+9+10)
1	Beban kendaraan bermotor angkutan barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban kendaraan tak bermotor angkutan barang	2.445.000	0,00	119.724.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.169.000,00
3	Beban perkakas konstruksi logam yang berpindah	49.350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.350.000,00
4	Beban perkakas bengkel khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban perkakas standar (standart tool)	13.441.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441.750,00
6	Beban perkakas bengkel kerja	2.790.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00

No.	Beban Lainnya	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO			Jumlah Beban Lainnya (LO)
		APBD	BOS	Reklas dari Belanja Modal Tidak Menambah Aset tetap	Utang Belanja Lainnya Tahun 2020	Menerima Hibah	Reklas Dari Belanja Lainnya Menambah Aset Tetap	Reklas ke Beban Persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas dari Belanja BOS yang menjadi aset tetap	
7	Beban alat ukur universal	1.025.000	530.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.000,00
8	Beban alat ukur lainnya	14.745.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.745.000,00
9	Beban alat timbangan	3.008.500	2.761.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770.000,00
10	Beban alat pengolahan tanah dan tanaman	21.902.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.902.500,00
11	Beban alat-alat peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban alat produksi perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban alat pemeliharaan tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban alat laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Beban mesin hitung/jumlah	5.250.000	510.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00

No.	Beban Lainnya	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO			Jumlah Beban Lainnya (LO)
		APBD	BOS	Reklas dari Belanja Modal Tidak Menambah Aset tetap	Utang Belanja Lainnya Tahun 2020	Menerima Hibah	Reklas Dari Belanja Lainnya Menambah Aset Tetap	Reklas ke Beban Persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas dari Belanja BOS yang menjadi aset tetap	
16	Beban alat penyimpanan perlengkapan kantor	37.200.000	28.320.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520.000,00
17	Beban office use	53.371.000	14.314.000	13.344.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.029.400,00
18	Beban meubelair	1.011.299.118	99.300.000	0,00	63.980.000	0,00	0,00	0,00	22.651.800	1.151.927.318,00
19	Beban alat pengukur waktu	35.350.000	1.015.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.365.000,00
20	Beban alat pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Beban alat pendingin	84.639.500	8.560.000	0,00	0,00	11.970.000	0,00	0,00	0,00	105.169.500,00
22	Beban alat dapur	162.107.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.107.050,00
23	Beban home use	316.809.430	10.190.000	0,00	0,00	0,00	7.200.000	0,00	0,00	319.799.430,00
24	Beban alat pemadam kebakaran	4.140.000	30.745.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.885.310,00

No.	Beban Lainnya	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO			Jumlah Beban Lainnya (LO)
		APBD	BOS	Reklas dari Belanja Modal Tidak Menambah Aset tetap	Utang Belanja Lainnya Tahun 2020	Menerima Hibah	Reklas Dari Belanja Lainnya Menambah Aset Tetap	Reklas ke Beban Persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas dari Belanja BOS yang menjadi aset tetap	
25	Beban komputer unit/jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Beban peralatan personal komputer	240.000	480.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
27	Beban peralatan jaringan	33.340.900	0,00	9.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.340.900,00
28	Beban kursi rapat pejabat	0,00	0,00	11.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
29	Beban peralatan studio visual	875.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
30	Beban peralatan studio video dan film	975.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
31	Beban alat komunikasi telephone	3.250.000	0,00	1.350.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.020,00
32	Beban alat kedokteran umum	284.261.957	1.431.317.901	1.268.000	0,00	0,00	0,00	93.742.200	0,00	1.623.105.658,00
33	Beban alat kedokteran gigi	17.282.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282.450,00
34	Beban alat kedokteran mata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Beban Lainnya	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO			Jumlah Beban Lainnya (LO)
		APBD	BOS	Reklas dari Belanja Modal Tidak Menambah Aset tetap	Utang Belanja Lainnya Tahun 2020	Menerima Hibah	Reklas Dari Belanja Lainnya Menambah Aset Tetap	Reklas ke Beban Persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas dari Belanja BOS yang menjadi aset tetap	
35	Beban alat farmasi	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
36	Beban alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	17.248.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.248.950,00
37	Beban alat kesehatan anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Beban alat kedokteran gawat darurat	14.419.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419.900,00
39	Beban alat kesehatan perawatan	695.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
40	Beban alat kesehatan olah raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Beban alat laboratorium microbiologi	979.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00
42	Beban alat laboratorium umum	100.036.840	0,00	462.500	0,00	0,00	0,00	67.192.290	0,00	33.307.050,00
43	Beban alat laboratorium kedokteran	1.649.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.100,00

No.	Beban Lainnya	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO			Jumlah Beban Lainnya (LO)
		APBD	BOS	Reklas dari Belanja Modal Tidak Menambah Aset tetap	Utang Belanja Lainnya Tahun 2020	Menerima Hibah	Reklas Dari Belanja Lainnya Menambah Aset Tetap	Reklas ke Beban Persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas dari Belanja BOS yang menjadi aset tetap	
44	Beban alat laboratorium kimia	39.374.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.374.500,00
45	Beban alat laboratorium hematologi	658.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00
46	Beban alat peraga bidang studi Bahasa Indonesia	0,00	5.884.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884.000,00
47	Beban alat peraga bidang studi Matematika	33.765.600	36.138.350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.903.950,00
48	Beban alat peraga bidang studi IPA Dasar	157.770.800	38.851.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.622.200,00
49	Beban alat peraga bidang studi IPA Lanjutan	7.840.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840.000,00
50	Beban alat peraga bidang studi IPA Menengah	0,00	16.559.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.559.250,00

No.	Beban Lainnya	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO			Jumlah Beban Lainnya (LO)
		APBD	BOS	Reklas dari Belanja Modal Tidak Menambah Aset tetap	Utang Belanja Lainnya Tahun 2020	Menerima Hibah	Reklas Dari Belanja Lainnya Menambah Aset Tetap	Reklas ke Beban Persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas dari Belanja BOS yang menjadi aset tetap	
51	Beban alat peraga bidang studi IPS	71.135.200	52.640.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.775.200,00
52	Beban alat peraga bidang studi Agama Islam	0,00	325.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
53	Beban alat peraga bidang studi Ketrampilan	0,00	879.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00
54	Beban alat peraga bidang studi Kesenian	0,00	4.877.200	1.299.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.300,00
55	Beban alat peraga bidang studi Olah Raga	36.219.600	28.190.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.410.200,00
56	Beban alat peraga/praktek kerja	16.388.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.388.900,00
57	Beban alat laboratorium lingkungan	6.486.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486.700,00

No.	Beban Lainnya	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO			Jumlah Beban Lainnya (LO)
		APBD	BOS	Reklas dari Belanja Modal Tidak Menambah Aset tetap	Utang Belanja Lainnya Tahun 2020	Menerima Hibah	Reklas Dari Belanja Lainnya Menambah Aset Tetap	Reklas ke Beban Persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas dari Belanja BOS yang menjadi aset tetap	
58	Beban alat laboratorium penunjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Beban bangunan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Beban bangunan gedung instalasi	3.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
61	Beban bangunan gedung tempat pendidikan	1.005.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.900,00
62	Beban bangunan taman/wisata/rekreasi	0,00	0,00	9.730.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730.000,00
63	Beban bangunan menara telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Beban tugu/tanda batas	300.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
65	Beban rambu bersuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Beban Lainnya	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO			Jumlah Beban Lainnya (LO)
		APBD	BOS	Reklas dari Belanja Modal Tidak Menambah Aset tetap	Utang Belanja Lainnya Tahun 2020	Menerima Hibah	Reklas Dari Belanja Lainnya Menambah Aset Tetap	Reklas ke Beban Persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas dari Belanja BOS yang menjadi aset tetap	
66	Beban rambu tidak bersuar	388.219.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.219.000,00
67	Beban jalan kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Beban buku umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Beban buku agama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Beban buku ilmu sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Beban buku ilmu bahasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Beban buku matematika & pengetahuan alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Beban buku ilmu pengetahuan praktis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Beban buku arsitektur, kesenian, olah raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Beban Lainnya	Belanja LRA		Penambahan - LO			Pengurangan - LO			Jumlah Beban Lainnya (LO)
		APBD	BOS	Reklas dari Belanja Modal Tidak Menambah Aset tetap	Utang Belanja Lainnya Tahun 2020	Menerima Hibah	Reklas Dari Belanja Lainnya Menambah Aset Tetap	Reklas ke Beban Persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas dari Belanja BOS yang menjadi aset tetap	
75	Beban buku georafi, biografi, sejarah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Beban majalah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Beban Peta	0,00	2.007.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.000,00
78	Beban alat kesenian	64.755.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.755.000,00
79	Beban alat olah raga	17.040.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040.000,00
80	Beban binatang ikan	20.520.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520.000,00
	Jumlah	**3.459.047.145,00**	**1.814.395.511,00**	**167.428.020,00**	**63.980.000,00**	**11.970.000,00**	**7.200.000,00**	**160.934.490,00**	**22.651.800,00**	**5.326.034.386,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3. Beban Hibah	**152.662.357.519,32**	**159.513.199.868,63**

Beban Hibah dapat berupa hibah uang dan hibah barang. Untuk hibah uang anggaran dan realisasinya melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sedangkan untuk hibah barang direalisasikan melalui kegiatan beberapa SKPD. Beban hibah Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 300. Daftar Rincian Beban Hibah Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Beban Hibah	2020	2019
1	**Beban hibah pada PPKD**	**125.225.839.973,00**	**146.468.234.605,00**
2	**Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**12.322.356.236,32**	**13.044.965.263,63**
3	Beban hibah tanah yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	0,00	0,00
4	Beban hibah peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	662.525.900,00	1.726.991.100,00
5	Beban hibah gedung dan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	155.418.000,00	243.741.750,00
6	Beban hibah jalan, irigasi, dan jaringan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	8.905.873.692,28	7.692.138.792,90
7	Beban hibah aset tetap lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	908.931.500,00	662.678.250,00
8	Beban hibah barang/jasa lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	1.378.342.444,04	2.619.558.370,73
9	Beban hibah aset lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	311.264.700,00	99.857.000,00
10	**Beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga**	**14.044.333.962,00**	**0,00**
11	**Bantuan Keuangan Partai Politik**	**1.069.827.348,00**	**0,00**
	JUMLAH (1+2+10)	**152.662.357.519,32**	**159.513.199.868,63**

Hubungan Beban Hibah pada laporan operasional dengan belanja hibah pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 301. Hubungan Beban hibah dengan Belanja belanja hibah Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Beban Hibah	Jumlah Belanja Hibah LRA (SIPKD)	Penambahan - LO			Total Beban Hibah - LO
			Reklas beban bantuan keuangan yang menjadi beban hibah	Hibah kepada swasta	Reklas Beban Persediaan yang menjadi beban hibah	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
1	**Beban hibah pada PPKD**	**125.225.839.973**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.225.839.973,00**
2	**Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**11.782.748.742,28**	**0,00**	**539.607.494**	**0,00**	**12.322.356.236,32**
3	Beban hibah tanah yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban hibah peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	662.525.900	0,00	0,00	0,00	662.525.900
5	Beban hibah gedung dan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	155.418.000	0,00	0,00	0,00	155.418.000
6	Beban hibah jalan, irigasi, dan jaringan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	8.905.873.692,28	0,00	0,00	0,00	8.905.873.692,28
7	Beban hibah aset tetap lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	908.931.500	0,00	0,00	0,00	908.931.500
8	Beban hibah barang/jasa lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	838.734.950	0,00	539.607.494,04	0,00	1.378.342.444,04
9	Beban hibah aset lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	311.264.700	0,00	0,00	0,00	311.264.700
10	**Beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga**	**11.544.659.250**	**0,00**	**0,00**	**2.499.674.712**	**14.044.333.962**
11	**Bantuan Keuangan Partai Politik**	**0,00**	**1.069.827.348**	**0,00**	**0,00**	**1.069.827.348**
	JUMLAH (1+2+10+11)	**148.553.247.965,28**	**1.069.827.348,00**	**539.607.494,04**	**2.499.674.712,00**	**152.662.357.519,32**

Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp539.607.494,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berupa obat - obatan (Alkon) sejumlah Rp46.795.465,00 dengan rincian penerima hibah sebagai berikut:
   a. Klinik RSI Sumbersuko sebesar Rp1.955.675,00;
   b. RS Wijaya Kusuma sebesar Rp418.750,00;
   c. Klinik Jatiroto Medika sebesar Rp1.434.905,00;

d. RS Bhayangkara sebesar Rp786.595,00;
e. Klinik Hakim Medika sebesar Rp6.183.452,00;
f. Klinik Ronaa Husada sebesar Rp2.659.940,00;
g. Klinik Nahada Medika sebesar Rp17.512.266,00;
h. Klinik Ain Hartoko Medistra sebesar Rp15.843.882,00.

2. Dinas Kesehatan sejumlah Rp129.977.500,00 berupa Buku KIA dan alat penunjang kesehatan dengan rincian:
   a. Buku KIA (cetak) ke rumah sakit swasta yang terdiri dari RS Jatiroto, RS Wijaya Kusuma, RS Islam, RS Muhamadiyah dan RS Bhayangkara masing-masing senilai Rp245.500,00 sejumlah Rp1.227.500,00;
   b. Alat penunjang kesehatan/kedokteran habis pakai ke rumah sakit swasta yang terdiri dari RS Jatiroto, RS Wijaya Kusuma, RS Islam, dan RS Muhamadiyah terkait bantuan penanganan covid-19 Rp128.750.000,00.
3. Dinas Kesehatan-UPT Instalasi Farmasi Obat sebesar Rp362.834.529,04 berupa obat-obatan senilai Rp278.125.172,34 dan alat kesehatan/kedokteran senilai Rp84.709.356,34 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Poli Pemkab berupa obat-obatan senilai Rp45.099.276,00 dan alat kesehatan/ kedokteran senilai Rp9.047.533,43;
   b. RS Wijaya Kusuma berupa obat-obatan senilai Rp62.842.465,70 dan alat kesehatan/ kedokteran senilai Rp26.007.283,25;
   c. RS Bhayangkara berupa obat-obatan senilai Rp40.441.909,00 dan alat kesehatan/ kedokteran senilai Rp1.252.000,00;
   d. RSI Lumajang berupa obat-obatan senilai Rp34.797.820,00 dan alat kesehatan/ kedokteran senilai Rp4.455.458,00;
   e. RS Djatiroto berupa obat-obatan senilai Rp11.793.402,00 dan alat kesehatan/ kedokteran senilai Rp39.104.865,00;
   f. RS Muhammadiyah berupa obat-obatan senilai Rp1.163.500,00;
   g. Klinik Muhammadiyah berupa obat-obatan senilai Rp581.750,00;
   h. Klinik NU berupa obat-obatan senilai Rp14.160.000,00;
   i. Klinik bersalin Alisa berupa obat-obatan senilai Rp3.417.500,00;
   j. Klinik Bersalin Elsa berupa obat-obatan senilai Rp9.234.100,00;
   k. Klinik Bersalin Edi Fuz berupa obat-obatan senilai Rp17.539.200,00;
   l. Klinik Utama Panasea berupa obat-obatan senilai Rp26.235.800,00;
   m. Batalyon berupa obat-obatan senilai Rp3.462.728,00 dan alat kesehatan/kedokteran senilai Rp655.600,00;
   n. Buruh Migran Indonesia berupa alat kesehatan/ kedokteran senilai Rp169.950,00;
   o. Klinik Swasta Program Pemberian FE pada Rematri berupa obat-obatan senilai Rp6.556.900,00 dan alat kesehatan/ kedokteran senilai Rp4.016.666,66;
   p. Kota Probolinggo berupa obat-obatan senilai Rp798.822,00.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4. Beban Bantuan Sosial	**56.449.862.814,00**	**55.064.805.862,00**

Beban Bantuan Sosial yang menjadi beban Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut:

Tabel 302. Daftar Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Bantuan Sosial	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Bansos uang pada PPKD	56.449.862.814,00	55.064.805.862,00
2	**Jumlah Beban Bansos**	**56.449.862.814,00**	**55.064.805.862,00**

Tabel 303. Daftar Beban Bantuan Sosial LRA dan LO Per 31 Desember 2020

Dalam Rupiah

No	Belanja Bantuan Sosial	Jumlah Belanja Bantuan Sosial LRA (SIPKD)	Penambahan - LO	Pengurangan - LO	Total Beban Bantuan Sosial - LO
			Hutang Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020	Pembayaran Hutang Belanja Bantuan Sosial 2019	
1	2	3	4	5	6 = (3+4) - (5)
1	Belanja bantuan sosial uang pada PPKD	56.568.658.101,00	196.742.879,00	315.538.166,00	56.449.862.814,00
	JUMLAH	**56.568.658.101,00**	**196.742.879,00**	**315.538.166,00**	**56.449.862.814,00**

Saldo utang belanja bantuan sebesar Rp196.742.879,00 merupakan utang belanja Jamkesda yang belum dibayar Tahun 2020 kepada:

1. RSD Dr. Soebandi Jembersebesar Rp150.523.241,00
2. RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebesar Rp 9.261.438,00
3. Dr. Syaiful Anwar Malang sebesar Rp24.023.300,00
4. RSJ Dr. Radjiman Malang sebesar Rp12.934.900,00
5.

Sedangkan pembayaran hutang belanja bantuan sosial sebesar Rp315.538.166,00 Tahun 2019 yang sudah dibayarkan melalui SP2D LS bantuan sosial pada tanggal 14 april Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. RSD Dr. Soebandi Jember sebesar Rp86.676.454,00 (SP2D LS/04069)
2. RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebesar Rp29.145.248,00 (SP2D LS/04069)
3. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebesar Rp137.073.200,00 (SP2D LS/04069)
4. RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat sebesar Rp19.672.064,00 (SP2D LS/04069)
5. RS Bhayangkara Lumajang sebesar Rp4.830.200,00 (SP2D LS/04072)
6. RS Djatiroto Lumajang sebesar Rp29.406.100,00 (SP2D LS/04072)
7. RS Islam Lumajang sebesar Rp2.147.000,00 (SP2D LS/04072)
8. RS Wijaya Kusuma Lumajang sebesar Rp6.587.900,00 (SP2D LS/04072)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5. Beban Bantuan Keuangan	**0,00**	**0,00**

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 304. Daftar Rincian Beban Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Beban Bantuan Keuangan	2020	2019
1	Beban bantuan keuangan kepada Partai Hanura	0,00	0,00
2	Beban bantuan keuangan kepada PKPB	0,00	0,00
3	Beban bantuan keuangan kepada Partai Gerindra	0,00	0,00
4	Beban bantuan keuangan kepada PKS	0,00	0,00
5	Beban bantuan keuangan kepada PAN	0,00	0,00
6	Beban bantuan keuangan kepada PKB	0,00	0,00
7	Beban bantuan keuangan kepada Partai Golkar	0,00	0,00
8	Beban bantuan keuangan kepada PPP	0,00	0,00
9	Beban bantuan keuangan kepada PDIP	0,00	0,00
10	Beban bantuan keuangan kepada Partai Demokrat	0,00	0,00
11	Beban bantuan keuangan kepada PKNU	0,00	0,00
12	Beban bantuan keuangan kepada Partai Nasdem	0,00	0,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**

Tabel 305. Daftar Rincian Bantuan Keuangan LRA dan LO Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Beban Bantuan Keuangan	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan (SIPKD)	Pengurangan - LO	Total Beban Bantuan Keuangan - LO
			Reklasifikasi ke Beban Hibah	
1	2	3	4	5 = (3) - (4)
1	Beban bantuan keuangan kepada Partai Hanura	35.292.139,00	35.292.139,00	0,00
2	Beban bantuan keuangan kepada PKPB	0,00	0,00	0,00
3	Beban bantuan keuangan kepada Partai Gerindra	165.331.185,00	165.331.185,00	0,00
4	Beban bantuan keuangan kepada PKS	75.135.384,00	75.135.384,00	0,00
5	Beban bantuan keuangan kepada PAN	19.330.104,00	19.330.104,00	0,00
6	Beban bantuan keuangan kepada PKB	214.726.557,00	214.726.557,00	0,00

No	Beban Bantuan Keuangan	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan (SIPKD)	Pengurangan - LO	Total Beban Bantuan Keuangan - LO
			Reklasifikasi ke Beban Hibah	
7	Beban bantuan keuangan kepada Partai Golkar	80.672.355,00	80.672.355,00	0,00
8	Beban bantuan keuangan kepada PPP	90.303.350,00	90.303.350,00	0,00
9	Beban bantuan keuangan kepada PDIP	201.080.406,00	201.080.406,00	0,00
10	Beban bantuan keuangan kepada Partai Demokrat	104.126.956,00	104.126.956,00	0,00
11	Beban bantuan keuangan kepada PKNU	0,00	0,00	0,00
12	Beban bantuan keuangan kepada Partai Nasdem	83.828.912,00	83.828.912,00	0,00
	JUMLAH	**1.069.827.348,00**	**1.069.827.348,00**	**0,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
6. Beban Penyusutan dan Amortisasi	**156.187.121.919,23**	**174.171.994.707,56**

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp156.187.121.919,23 dan Rp174.171.994.707,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 306. Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	76.343.360.917,63	73.550.370.004,90
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.958.518.670,33	22.580.149.812,17
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	52.400.773.573,73	72.755.995.937,49
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	**150.702.653.161,69**	**168.886.515.754,56**
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.484.468.757,54	5.285.478.953,00
	Jumlah	**156.187.121.919,23**	**174.171.994.707,56**

Tabel 307. Hubungan Akumulasi Penyusutan / Amortisasi dengan Beban Penyusutan / Amortisasi Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	Penyusutan	Amortisasi	Jumlah
1	**Saldo awal akumulasi**	**1.558.009.257.988,48**	**20.671.032.702,60**	**1.578.680.290.691,08**
2	**PENGURANGAN AKUMULASI :**			0,00
3	Penghapusan aset tetap	28.204.982.672,16	0,00	28.204.982.672,16
4	Koreksi saldo awal akumulasi	1.500.004.761,23	0,00	1.500.004.761,23
5	**Jumlah Pengurangan (3+4)**	**29.704.987.433,39**	**0,00**	**29.704.987.433,39**
6	**Total saldo akumulasi penyusutan sebelum beban penyusutan/beban amortisasi (1-5)**	**1.528.304.270.555,09**	**20.671.032.702,60**	**1.548.975.303.257,69**
7	Saldo akhir akumulasi penyusutan 2020	1.679.006.923.716,78	26.155.501.460,14	1.705.162.425.176,92
8	**Beban Penyusutan / amortisasi akhir (7-6)**	**150.702.653.161,69**	**5.484.468.757,54**	**156.187.121.919,23**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
7. Beban Penyisihan Piutang	**2.873.232.326,53**	**6.183.462.775,07**

Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Beban penyisihan piutang Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.873.232.326,53 dan Rp6.183.462.775,08 menambah jumlah penyisihan piutang tak tertagih di neraca per 31 Desember 2020.

Tabel 308. Penyisihan Piutang Dengan Beban Penyisihan Piutang

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyisihan piutang 2019	21.221.521.611,52
2	Koreksi kurang catat penyisihan piutang retribusi	69.958,00
3	**Penyisihan piutang setelah koreksi (1+2)**	**21.221.591.569,52**
4	Penyisihan piutang 2020	22.357.091.476,08
5	Reklas penyisihan piutang ke lain-lain pendapatan yang sah	1.737.720.801,21

No	Uraian	Jumlah (Rp)
6	Defisit penghapusan penyisihan pajak reklame karena usaha tutup	11.618,76
7	**Beban penyisihan piutang 2019 (4-3+5+6)**	**2.873.232.326,53**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
8. Beban Transfer	**145.363.291.505,00**	**196.605.168.137,00**

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer dimaksud adalah beban bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang yang menjadi beban Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan 2019, termasuk pula bantuan keuangan kepada desa dan bantuan keuangan kepada partai politik.

Tabel 309. Daftar Rincian Transfer Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Beban Transfer	2020	2019
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota	2.876.345.843,00	4.187.939.187,00
2	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	3.416.639.746,00	1.743.261.122,00
3	Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)	118.792.032.000,00	133.754.095.902,00
4	Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Lainnya (DD)	0,00	0,00
5	Bantuan Keuangan Kepada Desa Lainnya (Bantuan Keuangan Khusus/BKK)	20.278.273.916,00	55.919.709.314,00
6	Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00	1.000.162.612,00
	JUMLAH	**145.363.291.505,00**	**196.605.168.137,00**

Tabel 310. Daftar Rincian Transfer LRA dan LO Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Beban Transfer	Belanja Transfer - LRA	Penambahan - LO	Pengurangan - LO	Total Beban Transfer - LO
			Utang Belanja transfer 2020	Penyaluran Dana Desa (DD) langsung ke RKD (Rekening Kas Desa) tanpa melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 = (3+4) - (5)**
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota	-	2.876.345.843	-	2.876.345.843,00

No	Beban Transfer	Belanja Transfer - LRA	Penambahan - LO	Pengurangan - LO	Total Beban Transfer - LO
			Utang Belanja transfer 2020	Penyaluran Dana Desa (DD) langsung ke RKD (Rekening Kas Desa) tanpa melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)	
2	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	-	3.416.639.746	-	3.416.639.746,00
3	Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)	118.792.032.000	-	-	118.792.032.000,00
4	Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Lainnya (DD)	193.127.732.000	-	193.127.732.000	0,00
5	Bantuan Keuangan Kepada Desa Lainnya (Bantuan Keuangan Khusus/BKK)	20.278.273.916	-	-	20.278.273.916,00
	JUMLAH BEBAN BANTUAN SOSIAL (LO)	**332.198.037.916,00**	**6.292.985.589,00**	**193.127.732.000,00**	**145.363.291.505,00**

C. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar	**72.101.332,00**	**0,00**

Surplus Penjualan Aset Non Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp72.101.332,00 dan Rp0,00. Surplus penjualan aset non lancar Tahun 2020 terinci sebagai berikut:

1. Penjualan yang diperoleh dengan cara lelang yaitu :
   a. Penjualan roda dua sebanyak 30 unit motor kepada Achmad Abidin dengan alamat Kupang Krajang 3 Desa Kupang Kecamatan Sawahan Surabaya sebesar Rp19.216.000,00
   b. Penjualan roda dua sebanyak 20 unit motor kepada Mochamad Fauzi Muttaqien dengan alamat Jl. Sido Drajat Raya 43 Desa Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebesar Rp13.033.332,00
   c. Penjualan Roda Empat sebanyak 1 unit mobil amroll truck kepada Roni Kurnia Hadi P dengan alamat Graha Prima Blok L 12 A no. 2 Desa Mangunjaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebesar Rp12.250.500,00

2. Penjualan diperoleh dari penjualan langsung yaitu :
   a. Penjualan roda empat sebanyak 1 unit mobil pick up kepada Hosien dengan alamat Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang sebesar Rp3.000.000,00
   b. Penjualan Peralatan dan Mesin sebanyak 1 paket kepada Hosien dengan alamat Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang sebesar Rp19.475.000,00
   c. Penjualan roda dua sebanyak 1 unit motor kepada Yuriko Willi Ifam Priandana dengan alamat Jl. Juwet Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebesar Rp617.000,00
   d. Penjualan roda dua sebanyak 1 unit motor kepada Yayak Kurniyanto dengan alamat Jalan Suwandak Kabupaten Lumajang sebesar Rp676.500,00
   e. Penjualan roda dua sebanyak 1 unit motor kepada Manda Rafli Fauzi dengan alamat Perum Suko Asri Blok N4 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebanyak Rp555.000,00
   f. Penjualan roda dua sebanyak 1 unit motor kepada Endras Prasetiyo dengan alamat Jl. Wijaya Kusuma Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebesar Rp679.000,00
   g. Penjualan roda dua sebanyak 2 unit motor kepada Junaidi dengan alamat Jl. Pisang Hijau No.4 Desa Karangsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebesar Rp1.284.000,00
   h. Penjualan roda dua sebanyak 1 unit motor kepada Samsul Bahri Dusun Kebonsari Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang senilai Rp679.000,00
   i. Penjualan roda dua sebanyak 1 unit motor kepada Wahyudi Purnomo Perum Bumi Biting Indah Block G3 Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebanyak Rp636.000,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	**(35.946.654.597,21)**	**(66.730.850.360,84)**

Defisit Penghapusan Aset Non Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp(35.946.654.597,21) dan Rp(66.730.850.360,84). Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Tahun 2020 terinci sebagai berikut:

1. Defisit penghapusan karena barang hilang yaitu :
   a) Berdasarkan SK nomor 188/11/427.12/2020
      - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp15.960.500,00
      - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp15.537.500,00
      - Dinas Pertanian sebesar Rp14.984.627,45
      - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp18.111.500,00
      - Bagian rumah tangga dan protokol sebesar Rp16.356.300,00
2. Defisit penghapusan karena hibah barang yaitu :
   a. Berdasarkan SK nomor 188/11/427.12/2020
      - RSUD dr Haryoto sebesar Rp1.980.000,00

- Dinas Sosial sebesar Rp45.000.000,00
- Bagian Umum sebesar Rp138.367.000,00
- Kecamatan Pasirian sebesar Rp36.280.000,00

b. Berdasarkan SK nomor 188/20/427.12/2020
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp40.000.000,00
- RSUD dr Haryoto sebesar Rp486.963.846,00
- Bagian Umum sebesar Rp152.000.000,00
- Inspektorat sebesar Rp42.000.000,00
- Dinas Kesehatan sebesar Rp20.000.000,00
- Kecamatan Lumajang sebesar Rp2.400.000,00

c. Berdasarkan SK nomor 188/26/427.12/2020
- Bagian Umum sebesar Rp20.000.000,00
- Dinas Kesehatan sebesar Rp24.995.000,00

d. Berdasarkan SK nomor 188/443/427.12/2020
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Rp35.000.000,00

3. Defisit penghapusan karena pemusnahan yaitu :

a. Berdasarkan SK nomor 188/20/427.12/2020
-RSUD dr Haryoto sebesar Rp335.730.721,10
-Dinas Perikanan sebesar Rp60.000,00

4. Defisit penghapusan karena penjualan yaitu :

a) Berdasarkan SK nomor 188/27/427.12/2020
- RSUD dr Haryoto sebesar Rp3.697.768.398,00

5. Defisit penghapusan karena sebab lain yaitu :

b) Berdasarkan SK Nomor 188/29/427.12/2020
-Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp12.813.235.340,00
-Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.155.242.500,00
-Bagian Umum sebesar Rp74.115.000,00
-Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp55.103.000,00

c) Berdasarkan SK nomor 188/11/427.12/2020
-Dinas Perikanan sebesar Rp2.435.463.400,00

d) Berdasarkan SK nomor 188/20/427.12/2020
- Dinas Perikanan sebesar Rp10.691.250,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp4.458.184,47

e) Berdasarkan SK nomor 188/32/427.12/2020
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp28.102.050.422,95

Tabel 311. Daftar Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Keterangan	Jumlah
1	**Penghapusan piutang pajak reklame dan penyisihan piutang pajak daerah karena ada SK penghapusan piutang pajak**	
	- PIUTANG PAJAK REKLAME	
	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(2.323.750,00)
	JUMLAH	**(2.323.750,00)**
	- PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH	
	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	11.618,75
	JUMLAH	**11.618,75**

No	Keterangan	Jumlah
	TOTAL (1)	**(2.312.131,25)**
2	**Penghapusan Aset Tetap beserta akumulasi penyusutannya karena ada SK penghapusan Aset Tetap**	
	- ASET TETAP TANAH	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(9.071.877.000,00)
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(3.155.242.500,00)
	JUMLAH	**(12.227.119.500,00)**
	- ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	
	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD dr. HARYOTO	(3.697.768.398,00)
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(15.960.500,00)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(18.111.500,00)
	DINAS PERTANIAN	(14.984.627,45)
	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL PIMPINAN	(16.356.300,00)
	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	(278.367.000,00)
	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	(32.000.000,00)
	INSPEKTORAT	(122.000.000,00)
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	(35.000.000,00)
	JUMLAH	**(4.230.548.325,45)**
	- ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	
	DINAS PERIKANAN	(884.801.500,00)
	KECAMATAN PASIRIAN	(36.280.000,00)
	JUMLAH	**(921.081.500,00)**
	- ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(4.458.184,47)
	DINAS PERIKANAN	(1.550.661.900,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(28.102.050.422,95)
	JUMLAH	**(29.657.170.507,42)**
	- ASET TETAP LAINNYA	
	DINAS PERIKANAN	(10.751.250,00)
	JUMLAH	**(10.751.250,00)**
	- KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN	
	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(55.103.000,00)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(1.406.162.900,00)
	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	(74.115.000,00)
	JUMLAH	**(1.535.380.900,00)**
	- AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.970.375,00
	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD dr. HARYOTO	3.689.783.398,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.527.875,00
	DINAS PERTANIAN	13.111.549,02
	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL PIMPINAN	10.222.687,50
	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	290.367.000,00
	INSPEKTORAT	102.000.000,00
	JUMLAH	**4.121.982.884,52**

No	Keterangan	Jumlah
	- AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
	DINAS PERIKANAN	140.089.990,00
	KECAMATAN PASIRIAN	14.684.761,90
	JUMLAH	**154.774.751,90**
	- AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	19.992.795.658,64
	DINAS PERIKANAN	627.626.870,00
	JUMLAH	**20.620.422.528,64**
	TOTAL (2)	**(23.684.871.817,81)**
3	**Penghapusan Aset Lain-lain dan akumulasi penyusutan karena ada SK penghapusan aset lain-lain (SK pemberian hibahtabel 196 atas aset lain – lain)**	
	- ASET LAIN - LAIN	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	(14.990.000,00)
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	(601.676.100,00)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(557.395.432,00)
	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GESANG	(818.946.045,00)
	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PASIRIAN	(6.411.442.800,00)
	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	(1.006.504.009,00)
	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	(1.203.206.500,00)
	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD dr. HARYOTO	(848.096.649,00)
	DINAS PERDAGANGAN	(398.712.416,67)
	DINAS PERTANIAN	(637.615.609,75)
	DINAS TENAGA KERJA	(35.655.600,00)
	KECAMATAN TEKUNG	(15.754.750,00)
	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	(110.635.880,00)
	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	(131.455.640,00)
	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	(694.404.580,00)
	SEKRETARIAT DPRD	(180.000.000,00)
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(1.891.000,00)
	JUMLAH	**(13.668.383.011,42)**
	- AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN - LAIN	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	345.585.168,00
	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GESANG	89.343.987,44
	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	164.451.482,52
	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	214.115.798,00
	DINAS PERDAGANGAN	148.236.759,31
	DINAS PERTANIAN	341.990.750,95
	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	105.188.417,05
	JUMLAH	**1.408.912.363,27**
	TOTAL (3)	**(12.259.470.648,15)**
TOTAL (1+2+3)		**(35.946.654.597,21)**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	**(628.023.280,00)**	**(496.238.660,59)**

Jumlah tersebut merupakan nilai barang cetakan (karcis) dan nilai obat-obatan yang sudah kadaluarsa di Tahun 2020. Rincian karcis dan obat-obatan yang sudah kadaluarsa terinci pada tabel berikut ini :

Tabel 312. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

Dalam Rupiah

NO	NAMA SKPD	JENIS PERSEDIAAN KADALUARSA	NOMINAL
1	DINAS PERHUBUNGAN	Persediaan Cetak Karcis Kadaluarsa	85.800.605,00
2	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Persediaan Cetak Karcis Kadaluarsa	62.843.018,00
3	**Jumlah (1 s/d 2)**		**148.643.623,00**
4	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	Persediaan Obat Kadaluarsa	575.000,00
5	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS TEMPEH	Persediaan Obat Kadaluarsa	339.945,00
6	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	Persediaan Obat Kadaluarsa	92.019.175,00
7	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persediaan Obat Kadaluarsa	2.085.510,00
8	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	Persediaan Obat Kadaluarsa	1.242.105,00
9	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	Persediaan Obat Kadaluarsa	227.390,00
10	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SUKODONO	Persediaan Obat Kadaluarsa	297.910,00
11	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS PADANG	Persediaan Obat Kadaluarsa	2.861.164,00
12	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KLAKAH	Persediaan Obat Kadaluarsa	3.541.200,00
13	DINAS KESEHATAN - UPT INSTALASI FARMASI	Persediaan Obat Kadaluarsa	300.372.446,00
14	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD dr. HARYOTO	Persediaan Obat Kadaluarsa	41.256.636,00
15	**Jumlah (4 s/d 14)**		**444.818.481,00**
16	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	Persediaan alat kesehatan/ kedokteran habis pakai	30.585.576,00

NO	NAMA SKPD	JENIS PERSEDIAAN KADALUARSA	NOMINAL
17	DINAS KESEHATAN - UPT INSTALASI FARMASI	Persediaan alat kesehatan/ kedokteran habis pakai	3.975.600,00
18	**Jumlah (16 s/d 1 7)**		**34.561.176,00**
19	**TOTAL (3+15+18)**		**628.023.280,00**

D. Pos-pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan kejadian luar biasa yang yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran; tidak diharapkan terjadi berulang (ulang; dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah, sehingga penyajian Pos-pos luar biasa terpisah dari Pos-pos operasional dan non operasional. Pos-pos luar biasa meliputi pendapatan luar biasa dan beban luar biasa.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Beban Luar Biasa	**9.558.472.625,65**	**1.608.071.300,00**

Beban Luar Biasa Tahun 2020 sebesar Rp9.558.472.625,65 dan Tahun 2019 sebesar Rp1.608.071.300,00merupakan belanja tidak terduga, yaitu merupakan kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang dan di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Tabel 313. Beban Luar Biasa

Dalam Rupiah

No	Beban Luar Biasa	2020	2019
1	Beban tidak terduga	9.558.472.625,65	1.608.071.300,00
	JUMLAH (LO)	**9.558.472.625,65**	**1.608.071.300,00**

Tabel 314. Hubungan Beban Luar Biasa dengan Belanja Luar Biasa Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Beban Tidak Terduga	Jumlah Belanja Tidak Terduga LRA (SIPKD)	Pengurangan - LO					Total Beban Tidak Terduga - LO
			Reklas Belanja Tidak Terduga yang menjadi Persediaan	Reklas Belanja tidak terduga yang menjadi Aset Tetap	Pemberian Pinjaman Daerah kepada UKM yang terdampak Covid	Pembayaran Utang Dana Desa 2019	Pembayaran utang Bantuan Keuangan dari Pemprop Jatim Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =(3) - (4+5+6+7+8)
1	Beban tidak terduga	18.033.773.257,00	1.358.495.349,35	174.350.000,00	3.151.500.000,00	796.917.600,00	2.994.037.682,00	9.558.472.625,65
	JUMLAH	**18.033.773.257,00**	**1.358.495.349,35**	**174.350.000,00**	**3.151.500.000,00**	**796.917.600,00**	**2.994.037.682,00**	**9.558.472.625,65**

d. Surplus (Defisit) LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	**69.913.154.567,19**	**3.344.258.842,36**

Surplus (Defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut:

Tabel 315. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Surplus (defisit)	2020	2019
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	115.974.203.738,05	72.179.419.163,79
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	(36.502.576.545,21)	(67.227.089.021,43)
3	Pos Luar Biasa	(9.558.472.625,65)	(1.608.071.300,00)
	Jumlah	**69.913.154.567,19**	**3.344.258.842,36**

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Tujuan dari LAK adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas pemerintah kabupaten Lumajang Tahun 2020 merupakan Arus Kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi :

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	**2.118.849.571.641,14**	**2.186.593.815.093,29**
Jumlah Arus Kas Keluar	**1.830.587.190.125,79**	**1.981.901.237.189,43**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**288.262.381.515,35**	**204.692.577.903,86**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber-sumber pendanaan dari luar. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 316. Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

Arus Masuk / Arus Keluar		Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	68.659.995.181,00	74.232.832.052,00
	Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah	46.060.581.317,00	58.197.444.588,18
	Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.105.516.366,26	4.968.766.089,07
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	180.437.019.778,51	159.068.331.445,12
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	23.800.062.748,00	17.345.158.115,00
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam)	44.540.332.432,00	59.160.410.819,00
	Penerimaan Dana Alokasi Cukai	21.676.888.481,00	18.765.467.031,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	908.166.706.000,00	1.003.092.909.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	273.028.230.813,00	310.748.965.606,00
	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00

Arus Masuk / Arus Keluar		Tahun 2020	Tahun 2019
	Penerimaan Dana Penyesuaian	227.364.377.000,00	188.469.078.400,00
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	123.312.451.789,00	143.138.787.606,00
	Penerimaan Hibah	90.502.574.768,00	115.280.781.160,00
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	103.629.091.750,00	33.784.359.000,00
	Penerimaan Pendapatan Lainnya	2.565.743.217,37	340.524.181,92
Jumlah Arus Masuk Kas Dari Aktifitas Operasi		**2.118.849.571.641,14**	**2.186.593.815.093,29**
Jenis Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Belanja Pegawai	741.631.927.441,00	780.427.298.106,50
	Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa	532.195.718.097,51	599.495.571.358,03
	Pengeluaran Belanja Bunga	0,00	0,00
	Pengeluaran Belanja Subsidi	0,00	0,00
	Pengeluaran Belanja Hibah	148.553.247.965,28	159.157.268.656,90
	Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial	56.904.658.101,00	54.895.923.459,00
	Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan	333.267.865.264,00	379.218.582.228,00
	Pengeluaran Belanja Tidak Terduga	18.033.773.257,00	1.608.071.300,00
	Pengeluaran Belanja Bagi Hasil Pajak	0,00	7.098.522.081,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**1.830.587.190.125,79**	**1.981.901.237.189,43**
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		**288.262.381.515,35**	**204.692.577.903,86**

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Jumlah Arus Kas Keluar	**198.145.592.481,26**	**255.925.031.850,58**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	**(198.145.592.481,26)**	**(255.925.031.850,58)**

Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:

Tabel 317. Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

Arus Masuk / Arus Keluar	Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00

Arus Masuk / Arus Keluar	Tahun 2020	Tahun 2019
Pendapatan Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Aset lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Belanja Tanah	747.987.360,00	8.308.200,00
Belanja Peralatan dan Mesin	61.177.461.037,90	73.189.412.867,28
Belanja Gedung dan Bangunan	23.973.023.775,62	50.042.478.059,87
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.925.745.491,74	104.177.050.289,43
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.346.598.272,00	12.170.465.133,00
Belanja Aset Lainnya	3.974.776.544,00	7.738.317.301,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	8.599.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**198.145.592.481,26**	**255.925.031.850,58**
Atus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	**(198.145.592.481,26)**	**(255.925.031.850,58)**

c. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	**324.772.900,00**	**520.232.000,00**
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**2.101.500.000,00**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	**324.772.900,00**	**(1.581.268.000,00)**

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 318. Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

Arus Masuk / Arus Keluar	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	324.772.900,00	520.232.000,00
Jumlah arus kas masuk	**324.772.900,00**	**520.232.000,00**
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00

Arus Masuk / Arus Keluar	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Pemberian pinjaman daerah	0,00	2.101.500.000,00
Pembayaran utang belanja	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar	**0,00**	**2.101.500.000,00**
Atus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	**324.772.900,00**	**(1.581.268.000,00)**

d. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah misalnya penerimaan perhitungan fihak ke tiga (PFK) dan pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran serta kiriman uang. Penerimaan/pengeluaran PFK yaitu penerimaan/ penyetoran potongan-potongan SP2D seperti potongan Taspen, Taperum, Pajak Penghasilan dan PPN ke kas negara.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	**85.719.205.994,00**	**40.244.797.611,00**
Jumlah Arus Kas Keluar	**85.719.205.994,00**	**40.244.797.611,00**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	**0,00**	**0,00**

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 319. Rincian Potongan Per Jenis Pajak Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Jenis Pajak	Potongan	Setor	Saldo
1	Utang Taspen	26.895.232.359,00	26.895.232.359,00	
2	Utang BPJS	3.849.868.315,00	3.849.868.315,00	
3	Utang PPH 21 (gaji)	752.221.439,00	752.221.439,00	
4	Utang TAPERUM	466.799.000,00	466.799.000,00	
5	Utang JKK	742.856.759,00	742.856.759,00	
6	Utang JKM	2.221.789.027,00	2.221.789.027,00	
7	BPJS Non PNS	44.560.203,00	44.560.203,00	
8	BPJS TPP	532.278.759,00	532.278.759,00	
9	BPJS JAPEL	136.607.601,00	136.607.601,00	
10	Utang Pemotongan PPN	21.600.488.460,00	21.600.488.460,00	
11	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	1.299.966.872,00	1.299.966.872,00	

No	Jenis Pajak	Potongan	Setor	Saldo
12	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	278.604.737,00	278.604.737,00	
13	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2	2.581.932.720,00	2.581.932.720,00	
14	Utang PPh 21 (LS selain gaji)	24.315.999.743,00	24.315.999.743,00	
	TOTAL	85.719.205.994,00	85.719.205.994,00	

Tabel 320. Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

Arus Masuk / Arus Keluar	Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	85.719.205.994,00	40.244.797.611,00
Jumlah arus kas masuk	85.719.205.994,00	**40.244.797.611,00**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	85.719.205.994,00	40.244.797.611,00
Jumlah Arus Keluar	85.719.205.994,00	**40.244.797.611,00**
Atus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
e) Kenaikan (Penurunan) Kas	**90.441.561.934,09**	**(52.813.721.946,72)**

Kenaikan (Penurunan) Kas merupakan jumlah dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Tabel 321. Rincian Kenaikan Kas Tahun 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Arus Kas Bersih	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	288.262.381.515,35	204.692.577.903,86
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(198.145.592.481,26)	(255.925.031.850,58)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	324.772.900,00	(1.581.268.000,00)
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	Kenaikan (Penurunan) Kas	**90.441.561.934,09**	**(52.813.721.946,72)**

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
f) Saldo Awal Kas	**88.210.955.635,61**	**141.024.677.582,33**

Saldo Awal Kas Tahun 2020 adalah saldo akhir kas Tahun 2019, dan saldo awal kas Tahun 2019 adalah saldo akhir kas Tahun 2018. Rincian Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	2020	2019
1. Saldo Kas di BUD	**69.269.607.122,51**	**135.646.547.586,02**
2. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**
3. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	**22.351.861,00**	**33.408.678,00**
4. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	**10.730.917.344,11**	**3.926.633.224,91**
6.Saldo Akhir Kas Lainnya	**8.188.079.307,99**	**1.418.088.093,40**
Jumlah saldo awal kas	**88.210.955.635,61**	**141.024.677.582,33**
Koreksi saldo awal kas lainnya	**0,00**	**0,00**
Saldo awal kas	**88.210.955.635,61**	**141.024.677.582,33**

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
g) Saldo Akhir Kas	**178.659.279.260,33**	**88.210.955.635.61**

Saldo Akhir Kas adalah saldo awal di tambah dengan kenaikan (penurunan) kas selama satu periode tertentu. Rincian saldo kas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	2020	2019
1. Saldo Akhir Kas di BUD	**123.010.458.457,29**	**69.269.607.122,51**
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**
3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	**14.074.811,00**	**22.351.861,00**
4. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	**54.193.276.148,07**	**10.730.917.344,11**
5. Saldo Akhir Kas Lainnya	**1.441.469.843,97**	**8.188.079.307,99**
Saldo kas per 31 Desember	**178.659.279.260,33**	**88.210.955.635,61**

5.6. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Ekuitas Awal	**2.360.369.143.720,00**	**2.355.220.862.873,39**

Saldo ekuitas awal Tahun 2020 sebesar Rp2.360.369.143.720,00 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca Tahun 2019 *audited*. Sedangkan ekuitas awal Tahun 2019 sebesar Rp2.355.220.862.873,39 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2018 *audited.*

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	**69.913.154.567,19**	**3.344.258.842,36**

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

Tabel 322. Surplus/Defisit LO

Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Pendapatan LO	1.964.499.735.167,15	2.050.779.893.016,16
2	Beban	1.848.525.531.429,10	1.978.600.473.852,37
3	**Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)**	**115.974.203.738,05**	**72.179.419.163,79**
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	(36.502.576.545,21)	(67.227.089.021,43)
5	Pos Luar Biasa	(9.558.472.625,65)	(1.608.071.300,00)
6	**Surplus / Defisit LO (3+4+5)**	**69.913.154.567,19**	**3.344.258.842,36**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	**(1.060.144.489,46)**	**1.804.022.004,25**

Pada Tahun 2020 telah dilakukan koreksi berjalan atas saldo aset, kewajiban dan ekuitas Tahun 2019. Koreksi tersebut merupakan tindakan pembetulan atau koreksi secara akuntansi atas adanya beberapa pos atau akun yang masih perlu disesuaikan, yaitu saldo Kas Dana Bos 2020 kurang catat sebesar Rp6.761.690,63, Persediaan akhir 2020 lebih catat sebesar Rp1.547.057.374,20, saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2019 Kurang catat sebesar Rp69.958,00, saldo Piutang Dana Bagi Hasil 2020 terdapat koreksi lebih catat karena terbitnya PMK nomor 25/PML.07/2021 sebesar Rp19.785.841.828,00 saldo Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2019 lebih catat sebesar Rp69.958,00, saldo penyertaan modal pemerintah daerah (PD SEMERU) lebih catat Rp420.589.563,17, saldo aset tanah 2019 kurang catat sebesar Rp5.727.220.317,05, saldo aset Peralatan dan Mesin 2019 kurang catat sebesar Rp39.000.000,00, saldo aset Gedung dan Bangunan 2019 kurang catat sebesar Rp3.382.547.800,00, saldo aset jalan, jaringan dan irigasi 2019 kurang catat sebesar Rp13.229.666.507,00, saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan 2019 lebih catat Rp1.500.004.761,23, saldo aset yang dibatasi penggunaannya 2019 lebih catat sebesar Rp15.465.500,00, saldo utang Belanja Gaji dan Tunjangan kurang catat sebesar Rp133.140.500,00, saldo utang Belanja Barang dan jasa kurang catat sebesar Rp10.392.628,00, saldo utang Transfer Bagi Hasil Pajak 2019 lebih catat sebesar Rp2.642.944,00, saldo utang Transfer bagi Hasil Retribusi 2019 lebih catat sebesar Rp120.000.000,00 dan saldo utang lainnya 2019 lebih catat sebesar Rp2.915.501.116,00. Koreksi tersebut berdampak pada terjadinya penurunan ekuitas di Tahun 2020 sebesar (Rp1.060.144.489,46). Rekapitulasi Akun-akun yang dikoreksi tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 323. Rekapitulasi Daftar Akun Yang Dikoreksi Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Akun yang dikoreksi	Jumlah (Rp)
1	**Kas Lainnya**	**6.761.690,63**
01.01	Kas Dana Bos - Kas Lainnya	6.761.690,63
2	**Persediaan**	**(1.547.057.374,20)**
02.01	Persediaan Obat-Obatan	(750.000,00)
02.02	Persediaan Bahan Cetakan	(1.546.307.374,20)
3	**Piutang**	**(19.785.771.870,00)**
03.01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	69.958,00
03.02	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	(5.581.082.568,00)
03.03	Piutang Dana Bagi hasil bukan Pajak	(14.204.759.260,00)
4	**Penyisihan Piutang**	**(69.958,00)**
04.01	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(69.958,00)
5	**Investasi Jangka Panjang**	**(420.589.563,17)**
05.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PD SEMERU)	(420.589.563,17)
3	**Aset**	**23.862.973.885,28**
03.01	Tanah	5.727.220.317,05
03.02	Peralatan dan Mesin	39.000.000,00
03.03	Gedung dan Bangunan	3.382.547.800,00
03.04	Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.229.666.507,00
03.05	Akumulasi jalan, jaringan dan irigasi	1.500.004.761,23
03.06	Aset yang dibatasi penggunaannya	(15.465.500,00)
4	**Kewajiban Jangka Pendek**	**(3.176.391.300,00)**
04.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	(133.140.500,00)
04.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	(10.392.628,00)
04.03	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak	2.642.944,00
04.04	Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi	(120.000.000,00)
04.05	Utang Lainnya	(2.915.501.116,00)
TOTAL		**(1.060.144.489,46)**

Berdasarkan daftar rekapitulasi daftar akun – akun yang dikoreksi Tahun 2020 diatas, dibawah ini dijelaskan daftar perincian obyek akun yang dikoreksi dan daftar OPD yang mekukan koreksi terhadap saldo akhir akun Tahun 2019. Berikut daftar rinciannya :

Tabel 324. Koreksi Kas lainnya – Kas Dana Bos 2020

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN - SEKRETARIAT	81.690,63	**Mencatat Koreksi SA SDN KUDUS 02 Kurang catat kas 0,02 dan SDN BABAKAN 02 Kurang catat kas 140.990,96 serta SDN SUKOREJO 03 KUNIR Lebih catat 59.300,35**

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
2	DINAS PENDIDIKAN - SEKRETARIAT	1.200.000,00	**Koreksi kurang catat kas BOS SD NEGERI WONOREJO 02 karena setoran tunai ke rekening buku tabungan BOS pada tanggal 10 Oktober 2018 belum dibukukan di BKU**
3	DINAS PENDIDIKAN - SEKRETARIAT	(120.000,00)	**Koreksi lebih catat saldo awal kas SD NEGERI RANUYOSO 01 karena pada tanggal 4 juni 2018 sudah ditarik dari kas bank buku tabungan BOS tetapi belum dibukukan di BKU**
4	DINAS PENDIDIKAN - SEKRETARIAT	1.700.000,00	**Koreksi kurang catat Saldo awal SD NEGERI TUNJUNGREJO 03 yang telah setor kembali ke kas bank rekening tabungan BOS pada tanggal 18 februari 2019 atas temuan verifikasi saldo akhir 2018 dan belum di bukukan di BKU**
5	DINAS PENDIDIKAN - SEKRETARIAT	3.600.000,00	**Koreksi kurang catat saldo awal kas SMP SSA NEGERI JENGGRONG RANUYOSO atas uang bantuan bagi guru non PNS dari provinsi Tahun 2017 yang ditransferkan tanggal 14 september 2017 dan 14 desember 2017 dan beum dibukukan di BKU**
6	DINAS PENDIDIKAN - SEKRETARIAT	300.000,00	**Koreksi kurang catat saldo awal SD NEGERI RANUPAKIS 01 karena adanya setor kembali tambahan upah atas nama Endang W karena diangkat jadi PNS dimana uangnya sudah disetor ke rekening bos tetapi belum dicatat di BKU Tahun 2019 (setor tgl 2 april dan 11 april 2019)**
Total		**6.761.690,63**	

Tabel 325. Koreksi Persediaan Awal Tahun 2020

Dalam Koreksi

No	Nama SKPD	Jumlah		Keterangan
		Persediaan Obat-obatan	Persediaan Barang cetakan	
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	(750.000,00)	0,00	Mencatat Koreksi Saldo Awal Persediaan Obat Tahun 2020 Karena Belum Dikeluarkan Obat Expirednya dari Stock Persediaan Tahun 2019

No	Nama SKPD	Jumlah		Keterangan
		Persediaan Obat-obatan	Persediaan Barang cetakan	
2	DINAS PERDAGANGAN	0,00	(1.751.269.379,20)	Koreksi lebih catat saldo akhir 2019 karena adanya kesalahan dalam penetapan harga satuan perolehan karcis
3	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	0,00	204.962.005,00	Koreksi Saldo Awal Barang Cetakan (Karcis) Karena Lebih Catat sebesar Rp67.412.895 dan Koreksi persediaan barang cetakan (karcis) karena perubahan perhitungan persediaan dari metode FIFO berubah menjadi metode pembelian terakhir sebesar Rp272.374.900
Total		**(750.000,00)**	**(1.546.307.374,20)**	

Tabel 326. Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2020

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	69.958,00	Koreksi Karena Kurang Catat Saldo Akhir Piutang Tahun 2019
Total		**69.958,00**	

Tabel 327. Koreksi Piutang Dana Bagi Hasil 2020

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SKPKD	(19.785.841.828,00)	Koreksi Piutang transfer pemerintah pusat karena terbit PMK nomor 25/PMK.07/2021 tentang penetapan kurang bayar, lebih bayar dan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2021
Total		**(19.785.841.828,00)**	

Tabel 328. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 2020

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINAS KESEHATAN - UPT RSUD PASIRIAN	(69.958,00)	Koreksi Karena Kurang Catat Saldo Akhir Penyisihan Piutang Tahun 2019
Total		**(69.958,00)**	

Tabel 329. Koreksi Penyertaan Modal Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	(367.345.563,17)	Koreksi saldo awal penyertaan modal PD.Semeru karena adanya Laporan Keuangan Audited KAP 2019
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	(53.244.000,00)	(Lebih catat saldo Investasi Permanen - penyertaan modal pemerintah daerah karena hibah bantuan yang berasal dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang berupa inventaris dan prasarana oeprasional kepada BUMD - PDAM diakui sebagai tambahan penyertaan modal Pemda Lumajang kepada BUMD - PDAM pada tahun 2015 sebesar Rp53.244.000,00 dan koreksi laba/rugi BUMD-PDAM yang sebelum audit sebesar Rp4.554.374.543,43 dan setelah hasil audit KAP sebesar Rp3.859.280.419,00 sehingga ada koreksi lebih catat sebesar (Rp4.554.374.543,43 - Rp3.859.280.419,00 = Rp695.094.124,43)
Total		**(420.589.563,17)**	

Tabel 330. Koreksi Aset Tetap Tanah Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KUNIR	13.166.667,00	Mencatat koreksi aset tetap tanah Puskesmas Kunir Tahun 2020
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2.681.550.915,05	Penilaian Tanah Irigasi Sebanyak 78 Buah
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2.593.374.735,00	Penilaian Tanah Jalan Sebanyak 30 Buah
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	329.389.000,00	(Koreksi kurang catat aset tetap tanah karena ada penilaian ulang nilai 7 bidang tanah dibawah irigasi yang sebelumnya tercatat Rp0,00 dan setelah dilakukan penilaian kembali terdapat nilai tanah sebesar Rp329.389.000,00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	72.915.000,00	Penilaian Tanah Jalan Permukiman
6	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	167.589.000,00	Mencatat Mutasi Masuk Aset Tetap (Tanah Makam Peresan)
7	DINAS PENDIDIKAN	(130.765.000,00)	(Koreksi Doubel catat Saldo awal Aset tetap - tanah Dinas Pendidikan - SMPN 2 Tempursari (Ds. Kaliuling Tempursari))
Total		**5.727.220.317,05**	

Tabel 331. Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah		Keterangan
		Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat-Alat Angkutan	
1	DINAS PENDIDIKAN	4.000.000,00	0,00	Kurang Catat atas printer Rp1.400.000,- dan Lemari Perpustakaan Rp 2.600.000,- SD Rojopolo
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	35.000.000,00	Mencatat penilaian kembali kendaraan roda 4 nopol N 1169 YP
Total		**4.000.000,00**	**35.000.000,00**	

Tabel 332. Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
		Bangunan Gedung	
1	DINAS SOSIAL	913.223.000,00	Mencatat Validasi Gedung, Bangunan dan Jalan TMP
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	362.880.000,00	mencatat penilaian kembali Tahun 2020 bangunan gedung kantor 1 balai desa Nogosari
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	259.200.000,00	mencatat penilaian kembali Tahun 2020 bangunan gedung kantor 2 balai desa Nogosari
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	171.360.000,00	mencatat penilaian kembali Tahun 2020 bangunan gedung kantor 3 balai desa Nogosari
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	142.560.000,00	mencatat penilaian kembali Tahun 2020 bangunan gedung kantor 4 balai desa Nogosari
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	267.344.000,00	mencatat penilaian kembali Tahun 2020 bangunan gedung kantor balai desa Nogosari
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	174.240.000,00	mencatat penilaian kembali Tahun 2020 bangunan gedung kantor dewan pimpinan
8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	213.840.000,00	mencatat penilaian kembali Tahun 2020 bangunan gedung kantor markas polisi
9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	21.824.000,00	mencatat penilaian kembali Tahun 2020 bangunan musholla balai desa Nogosari
10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	69.836.800,00	mencatat penilaian kembali Tahun 2020 bangunan posyandu balai desa Nogosari
11	KECAMATAN CANDIPURO	786.240.000,00	Mencatat Validasi Gedung dan Bangunan Gedung Polsek dan Gedung Koramil Kecamatan Candipuro berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.45/248/427.12/2020
Total		**3.382.547.800,00**	

Tabel 333. Koreksi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah		Keterangan
		Bangunan Air/Irigasi	Jalan dan Jembatan	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.101.444.000,00	0,00	Penilaian Irigasi sebanyak 16 Buah
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	0,00	12.062.174.507,00	Penilaian Jalan sebanyak 26 buah
3	DINAS SOSIAL	0,00	66.048.000,00	Mencatat Validasi Gedung, Bangunan dan Jalan TMP
Total		**1.101.444.000,00**	**12.128.222.507,00**	

Tabel 334. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	559.375.841,23	Koreksi Akumulasi Penyusutan akibat ada jalan yang dipecah sesuai dg SK JALAN 2018
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	940.628.920,00	Salah catat akumulasi penyusutan rehab jalan irigasi dan jaringan menjadi bangunan tersendiri
Total		**1.500.004.761,23**	

Tabel 335 Koreksi Aset dibatasi penggunaannya

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	KETERANGAN
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(15.465.500,00)	(Koreksi doubel catat Jasa Bongkar Menara Telekomunikasi atas nama PT. Asri Duta Indonesia dengan tanggal deposito 12 November 2018 senilai Rp15.465.500)
Total		**(15.465.500,00)**	

Tabel 336. Koreksi Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINAS KESEHATAN	(133.140.500,00)	Koreksi Utang Pelayanan Persalinan Gratis (untuk PNS dan non PNS) Tahun 2019 yang dicatat terlalu rendah
Total		**(133.140.500,00)**	

Tabel 337. Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINAS KESEHATAN	(22.000,00)	Koreksi utang belanja jasa kawat/faksimile/internet yang dicatat terlalu rendah
2	DINAS KESEHATAN	(10.709.500,00)	Koreksi Utang Pelayanan Persalinan Gratis (untuk PNS dan non PNS) Tahun 2019 yang dicatat terlalu rendah
3	KECAMATAN TEMPURSARI	927,00	Mencatat Koreksi Kelebihan Catat saldo awal hutang Belanja Telepon sebesar Rp.160,-, Hutang belanja Air sebesar Rp.100,-, dan Hutang belanja Listrik Rp.667,-
4	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	(97.880,00)	Koreksi Saldo Awal Kecamatan Rowokangkung dikarenakan salah catat hutang belanja Tahun 2019
5	DINAS PERHUBUNGAN	435.825,00	Mencatat koreksi saldo awal dikarenakan pengajuan nya salah hitung pada belanja jasa administrasi retribusi parkir dishub
Total		**(10.392.628,00)**	

Tabel 338. Koreksi Utang Transfer Bagi Hasil Pajak

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	2.642.944,00	Kelebihan Perhitungan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2019 (Untuk Desa Sumbersuko dan Sudah Disetor Ke Kasda tgl 18 Desember 2020)
Total		**2.642.944,00**	

Tabel 339. Koreksi Utang Lain

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SKPKD	(2.915.501.116,00)	(Koreksi Kewajiban pemerintah daerah karena adanya lebih transfer pemerintah sesuai PMK nomor 25/PMK.07/2021 tentang penetapan kurang bayar, lebih bayar dan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2021)
Total		**(2.915.501.116,00)**	

Tabel 340. Koreksi Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	(120.000.000,00)	Tambahan Utang Sisa Dana Desa Pagowan Tahun 2015 sampai dengan 2018
Total		**(120.000.000,00)**	

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
d. Ekuitas Akhir	**2.429.222.153.797,73**	**2.360.369.143.719,99**

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 dan 2019, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 341. Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam Rupiah

No	Keterangan	2020	2019
1	Ekuitas Awal	2.360.369.143.720,00	2.355.220.862.873,39
2	Surplus (defisit) LO	69.913.154.567,19	3.344.258.842,36
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	(1.060.144.489,46)	1.804.022.004,25
4	**Ekuitas Akhir**	**2.429.222.153.797,73**	**2.360.369.143.720,00**

VI. INFORMASI NON KEUANGAN

6.1GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah (naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain :

1) Prasasti Mula Malurung
2) Naskah Negara Kertagama
3) Kitab Pararaton
4) Kidung Harsa Wijaya
5) Kitab Pujangga Manik
6) Serat Babat Tanah Jawi
7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang Tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam Tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990.

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak Tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa-penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut-turut dipimpin oleh:

1) KRY Kertodirejo (1928 - 1941);
2) R. Abu Bakar (1941 - 1948);
3) R. Sastrodikoro (1948 - 1959);
4) R. Sukardjono (1959 - 1966);
5) N.G. Subowo (1966 - 1973);
6) Suwandi (1973 - 1983);
7) Karsid (1983 (1988);
8) H.M. Samsi Ridwan (1988 - 1993);

9) Tarmin ariyadi (1993 - 1998);
10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998 - 2003);
11) Drs.H. Achmad Fauzi (H. Hartono, SH, S.Sos (2003 – 2008);
12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2008 – 2013);
13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2013 - 2018);
14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, M.Kes (2014 – 2018)
15) H. Thoriqul Haq, M.ML – Ir. H. Indah Amperawati, M.Si (2018 – 2023)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang :

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang terletak di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km2, terbagi menjadi 21 kecamatan, 195 desa dan 7 kelurahan Batas-batas wilayahnya yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang.

Secara geografis Lumajang berada pada posisi 112o-53' -113o-23' Bujur Timur dan 7o-54' -8o-23' Lintang Selatan. Lumajang beriklim tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termaksud iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan Tahunan berkisar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24oC –23oC. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), temperature terenda mencapai 5oC.

Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal. Sektor Pertanian yang menjadi andalan adalah padi (Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan/padi di Provinsi Jawa Timur) dan produk buah-buahan segar seperti pisang agung dan pisang mas kirana. Pada sektor peternakan ada kambing PE dan susu segar, pada sektor perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak, dan pada sektor kehutanan ada produk kayu olahan

yang masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan untuk perikanan juga potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.

d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap Tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan seTahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3- 4 bulan perTahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu seTahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada Tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

e. TOPOGRAFI

Keadaan topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan 0 – 15% (61% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim, 15 – 25% (7% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan, 25 – 40% (13%luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan prinsip konversi, 40% keatas (19% luas wilayah) merupakan daerah yang mutlak dihutankan sebagai pelindung sumber daya alam.

Sedangkan potensi hidrogafi telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, industry dan pariwisata, Kabupaten Lumajang mempunyai 31 sungai, 369 dam, 254 pompa air dan 6 air terjun. Selain itu juga terdapat danau/ranu yang potensial yang bisa diandalkan untuk pariwisata.

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di

kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN.

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dalam periode Tahun 2003 – 2007 penataan kembali fungsi (fungsi kelembagaan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pada Tahun 2003 dilakukan penataan berdasarkan PP Nomor 8/2003 dan Tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41/2007 serta pada Tahun 2016 terjadi penataan kelembagaan sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 yang ditandai dengan diundangkannya Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang di Tahun 2016 terjadi penataan kelembagan menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang ditandai dengan diundangkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana di Kabupaten Lumajang sampai dengan saat ini terdapat 52 OPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah : 1, Sekretariat DPRD : 1, Inspektur Daerah : 1, Dinas : 22, Badan : 6, Kecamatan : 21

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Yang pada Tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

VII. P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Angaran 2020 sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar generasi *(Intergenerational Equity)*.
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan Tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
   a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisir pendapatan dari yang dianggarkan.
   b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
   c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfatan surplus anggaran.
   d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
   e) Kewajiban(kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
   f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
   g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
   h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
   i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
   j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 terdiri:
      (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
      (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
      (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.
      (4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
      (5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.

(6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2020.
(7) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.

3. Laporan keuangan pemerintah daerah juga dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan keuangan.

Lampiran 1

Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	SKPD	Pengadaan dari Belanja Modal		Reklasifikasi dari Belanja Modal		Koreksi Kurang Catat		Kewajiban Pengembang		Hibah		Jumlah		Keterangan
		Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	0	23.003.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23.003.600,00	- **Biaya** Pensertifikatan Tanah
2.	Dinas Pendidikan	1	703.157.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	12.000.000,00	2	715.157.400,00	- **Hibah** dari Masyarakat berupa tanah SMP 2 Rowokangkung senilai Rp12.000.000
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	0,00	0	177.076.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	177.076.200,00	- **Reklasifikasi BM** gedung dan Bangunan menjadi rehab Landscape lapangan Suko senilai Rp177.076.200
4.	Dinas Kesehatan	0	0,00	0	0,00	1	13.166.667,00	0	0,00	0	0,00	1	13.166.667,00	- **Koreksi Kurang catat** atas tanah Puskesmas Pembantu Jatirejo Rp13.166.667
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	0,00	0	189.434.375,00	371	5.604.314.650,05	0	0,00	0	0,00	371	5.793.749.025,05	- **Reklasifikasi BM** gedung dan Bangunan menjadi rehab Landscape lapangan stadion semeru senilai Rp189.434.375 - **Koreksi Kurang Catat** atas Penilaian Tanah Jalan 30bh

														Rp2.593.374.735; Penilaian Tanah Irigasi 78bh Rp2.681.550.915,05, 50 ruas tanah karena Pemecahan Bidang ruas Jalan, 202 Tanah Jalan Irigasi yang belum tercatat
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0	20.476.360,00	0	0,00	2	72.915.000,00	70	8.200.930.920,46	0	0,00	72	8.294.322.280,46	- **Penilaian Kembali** atas Jalan RW 05 dan RW 07 senilai Rp72.915.000 - **Kewajiban penyerahan** jalan dari Pengembang sebanyak 70 bidang tanah senilai Rp8.200.930.920,46
7.	Kelurahan Rogotrunan	0	0,00	0	0,00	1	167.589.000,00	0	0,00	0-	0,00	1	167.589.000,00	- **Penilaian** Tanah Makam Covid senilai Rp167.589.000
JUMLAH		**1**	**746.637.360,00**	**0**	**366.510.575,00**	**375**	**5.528.596.317,05**	**70**	**8.200.930.920,46**	**1**	**12.000.000,00**	**447**	**14.854.675.172,51**	

Lampiran 2

Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2020

No	SKPD	Penghapusan Aset		Koreksi Kurang Catat		Jumlah		Keterangan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16	9.071.877.000,00	31	0,00	47	9.071.877.000,00	- **Koreksi Lebih catat** atas 22 ruas jalan yang akan dipecah dan 9 ruas Jalan yang digabung dengan jalan lain
2.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	33	3.155.242.500,00	0	0,00	33	3.155.242.500,00	- **Penghapusan** tanah berdasarkan SK Penghapusan No 188/29/427.12/2020
3.	Dinas Pendidikan	0	0,00	1	130.765.000,00	1	130.765.000,00	- **Koreksi Doubel catat** atas saldo awal tanah SMP Negeri 02 Tempursari (Desa Kaliuling)
JUMLAH		**49**	**2.227.119.500,00**	**31**	**130.765.000,00**	**81**	**12.357.884.500,00**	

Lampiran
3a

Penambahan Jumlah Bidang Tanah Tahun 2020

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Jumlah Bidang	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah	Penggunaan	Asal-usul	Harga Ribuan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Reg					Hak				
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Tanah Jalan dan Drainase Perumahan The Grand Zamzam Imperial	0101110801	00374	1799,6	1	2020	Desa PeTahunan, Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	235.927.560,00	*DPKP*
2	Tanah Taman Perumahan The Grand Zamzam Imperial	0101010101	00375	336,9	1	2020	Desa PeTahunan, Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	44.167.590,00	*DPKP*
3	Tanah TPS Perumahan The Grand Zamzam Imperial	0101010101	00376	40,8	1	2020	Desa PeTahunan, Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	5.348.880,00	*DPKP*
4	Tanah Pos Satpam Perumahan The Grand Zamzam Imperial	0101010101	00377	16	1	2020	Desa PeTahunan, Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	2.097.600,00	*DPKP*
5	Tanah Mushola Perumahan The Grand Zamzam Imperial	0101010101	00378	103,5	1	2020	Desa PeTahunan, Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	13.568.850,00	*DPKP*
6	Tanah IPAL Perumahan The Grand Zamzam Imperial	0101010101	00379	66	1	2020	Desa PeTahunan, Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	8.652.600,00	*DPKP*
7	Tanah Jalan dan Draenase	0101110801	00380	4540	1	2020	Desa Pasirian	Belum	Fasum &	HIBAH		*DPKP*

	Perumahan Grand Hutama						Kecamatan Pasirian	Bersertifikat	Fasos		211.110.000,00	
8	Tanah Taman Perumahan Grand Hutama	0101010101	00381	1264	1	2020	Desa Pasirian Kecamatan Pasirian	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	58.776.000,00	*DPKP*
9	Tanah TPS Perumahan Grand Hutama	0101010101	00382	12	1	2020	Desa Pasirian Kecamatan Pasirian	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	558.000,00	*DPKP*
10	Tanah Pos Satpam Perumahan Grand Hutama	0101010101	00383	6	1	2020	Desa Pasirian Kecamatan Pasirian	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	279.000,00	*DPKP*
11	Tanah Mushola Perumahan Grand Hutama	0101010101	00384	327	1	2020	Desa Pasirian Kecamatan Pasirian	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	15.205.500,00	*DPKP*
12	Tanah IPAL Perumahan Grand Hutama	0101010101	00385	64	1	2020	Desa Pasirian Kecamatan Pasirian	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	2.976.000,00	*DPKP*
13	Tanah Posyandu Perumahan Grand Hutama	0101010101	00386	9	1	2020	Desa Pasirian Kecamatan Pasirian	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	418.500,00	*DPKP*
14	Tanah Jalan dan Drainase Perumahan Randu Regency	0101110801	00387	9241,6	1	2020	Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	1.734.648.320,00	*DPKP*
15	Tanah Taman Perumahan Randu Regency	0101010101	00388	2620,3	1	2020	Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	491.830.310,00	*DPKP*
16	Tanah TPS Perumahan Randu Regency	0101010101	00389	227,6	1	2020	Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	42.720.520,00	*DPKP*
17	Tanah Pos Satpam Perumahan Randu Regency	0101010101	00390	4	1	2020	Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	750.800,00	*DPKP*
18	Tanah Masjid Perumahan Randu Regency	0101010101	00391	353	1	2020	Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	66.258.100,00	*DPKP*
19	Tanah Posyandu Perumahan Randu Regency	0101010101	00392	100	1	2020	Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	18.770.000,00	*DPKP*
20	Tanah IPAL Perumahan Randu Regency	0101010101	00393	246	1	2020	Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	46.174.200,00	*DPKP*

21	Tanah Jalan dan Drainase Perumahan Grand Mutiara Ijen	0101110801	00394	3135,62	1	2020	Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	592.945.742,00	*DPKP*
22	Tanah Taman Perumahan Grand Mutiara Ijen	0101010101	00395	490,36	1	2020	Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	92.727.076,00	*DPKP*
23	Tanah TPS Perumahan Grand Mutiara Ijen	0101010101	00396	22,22	1	2020	Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	4.201.802,00	*DPKP*
24	Tanah Posyandu Perumahan Grand Mutiara Ijen	0101010101	00397	10,8	1	2020	Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	2.042.280,00	*DPKP*
25	Tanah Mushola Perumahan Grand Mutiara Ijen	0101010101	00398	60	1	2020	Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	11.346.000,00	*DPKP*
26	Tanah Balai RT Perumahan Grand Mutiara Ijen	0101010101	00399	60	1	2020	Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	11.346.000,00	*DPKP*
27	Tanah Jalan dan Drainase Perumahan Kunir Asri	0101110801	00400	2686	1	2020	Jl. Raya Kunir Ds. Kunir Kec Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	134.300.000,00	*DPKP*
28	Tanah Taman Perumahan Kunir Asri	0101010101	00401	292,5	1	2020	Jl. Raya Kunir Ds. Kunir Kec Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	14.625.000,00	*DPKP*
29	Tanah Jalan dan Drainase Perumahan D'Green Hasanah	0101110801	00402	4902,36	1	2020	Desa Tukum Kecamatan Tekung	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	604.657.082,40	*DPKP*
30	Tanah RTH Perumahan D'Green Hasanah	0101010101	00403	833,19	1	2020	Desa Tukum Kecamatan Tekung	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	102.765.654,60	*DPKP*
31	Tanah TPS Perumahan D'Green Hasanah	0101010101	00404	12	1	2020	Desa Tukum Kecamatan Tekung	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	1.480.080,00	*DPKP*

32	Tanah Balai Warga Perumahan D'Green Hasanah	0101010101	00405	16	1	2020	Desa Tukum Kecamatan Tekung	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	1.973.440,00	*DPKP*
33	Tanah IPAL Perumahan D'Green Hasanah	0101010101	00406	65,13	1	2020	Desa Tukum Kecamatan Tekung	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	8.033.134,20	*DPKP*
34	Tanah Pos Satpam Perumahan D'Green Hasanah	0101010101	00407	6,82	1	2020	Desa Tukum Kecamatan Tekung	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	841.178,80	*DPKP*
35	Tanah Mushola dan Halaman Perumahan D'Green Hasanah	0101010101	00408	346,5	1	2020	Desa Tukum Kecamatan Tekung	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	42.737.310,00	*DPKP*
36	Tanah Jalan dan Drainase Perumahan The Hasanah Residence Tahap 2	0101110801	00409	9833,72	1	2020	Desa Dorogowok Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	1.475.058.000,00	*DPKP*
37	Tanah RTH Perumahan The Hasanah Residence Tahap 2	0101010101	00410	1282,46	1	2020	Desa Dorogowok Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	192.369.000,00	*DPKP*
38	Tanah TPS Perumahan The Hasanah Residence Tahap 2	0101010101	00411	12	1	2020	Desa Dorogowok Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	1.800.000,00	*DPKP*
39	Tanah Balai Warga Perumahan The Hasanah Residence Tahap 2	0101010101	00412	411	1	2020	Desa Dorogowok Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	61.650.000,00	*DPKP*
40	Tanah IPAL Perumahan The Hasanah Residence Tahap 2	0101010101	00413	103,82	1	2020	Desa Dorogowok Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	15.573.000,00	*DPKP*
41	Tanah Jalan dan Drainase Perumahan Merlion Park Tukum	0101110801	00414	1893,97	1	2020	Desa Tukum Kecamatan Tekung	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	328.755.312,60	*DPKP*
42	Tanah Taman (RTH) Perumahan Merlion Park Tukum	0101010101	00415	275,11	1	2020	Desa Tukum Kecamatan Tekung	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	47.753.593,80	*DPKP*
43	Tanah TPS Perumahan Merlion Park Tukum	0101010101	00416	12	1	2020	Desa Tukum Kecamatan Tekung	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	2.082.960,00	*DPKP*
44	Tanah Kolam Perumahan Merlion Park Tukum	0101010101	00417	48	1	2020	Desa Tukum Kecamatan Tekung	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	8.331.840,00	*DPKP*

45	Tanah Jalan dan Drainase Perumahan Cahaya Residence	0101110801	00418	1540,25	1	2020	Desa PeTahunan Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	418.840.182,50	*DPKP*
46	Tanah Mushola Perumahan Cahaya Residence	0101010101	00419	36	1	2020	Desa PeTahunan Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	9.789.480,00	*DPKP*
47	Tanah Posyandu Perumahan Cahaya Residence	0101010101	00420	36	1	2020	Desa PeTahunan Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	9.789.480,00	*DPKP*
48	Tanah Taman Perumahan Cahaya Residence	0101010101	00421	369,05	1	2020	Desa PeTahunan Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	100.355.766,50	*DPKP*
49	Tanah IPAL Perumahan Cahaya Residence	0101010101	00422	35	1	2020	Desa PeTahunan Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	9.517.550,00	*DPKP*
50	Tanah TPS Perumahan Cahaya Residence	0101010101	00423	12	1	2020	Desa PeTahunan Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	3.263.160,00	*DPKP*
51	Tanah Jalan dan Drainase Perumahan Pondok Abadi Tahap 2	0101110801	00424	1984	1	2020	Jl. Kapuas Kel. Jogoyudan Kecamatanm Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	228.854.400,00	*DPKP*
52	Tanah Taman Perumahan Pondok Abadi Tahap 2	0101010101	00425	334	1	2020	Jl. Kapuas Kel. Jogoyudan Kecamatanm Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	38.526.900,00	*DPKP*
53	Tanah IPAL Perumahan Pondok Abadi Tahap 2	0101010101	00426	30	1	2020	Jl. Kapuas Kel. Jogoyudan Kecamatanm Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	3.460.500,00	*DPKP*

54	Tanah Jalan dan Drainase Kaveling Griya Sumber Rejeki 2	0101110801	00427	280	1	2020	Jl. Musi, Desa Sumberejo	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	65.625.000,00	*DPKP*
55	Tanah Jalan dan Drainase Kaveling Pancoran Mas	0101110801	00428	1671	1	2020	Desa Besuk Kecamatan Tempeh	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	107.081.022,00	*DPKP*
56	Tanah RTH Kaveling Pancoran Mas	0101010101	00429	326	1	2020	Desa Besuk Kecamatan Tempeh	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	20.890.732,00	*DPKP*
57	Tanah Mushola Kaveling Pancoran Mas	0101010101	00430	81	1	2020	Desa Besuk Kecamatan Tempeh	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	5.190.642,00	*DPKP*
58	Tanah TPS Kaveling Pancoran Mas	0101010101	00431	20	1	2020	Desa Besuk Kecamatan Tempeh	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	1.281.640,00	*DPKP*
59	Tanah Posyandu Kaveling Pancoran Mas	0101010101	00432	36	1	2020	Desa Besuk Kecamatan Tempeh	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	2.306.952,00	*DPKP*
60	Tanah Jalan dan Drainase Perumahan Umbul Residence	0101110801	00433	1471,21	1	2020	Desa Umbul Krajan Kec. Kedungjajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	76.583.836,55	*DPKP*
61	Tanah RTH Perumahan Umbul Residence	0101010101	00434	208,78	1	2020	Desa Umbul Krajan Kec. Kedungjajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	10.868.042,90	*DPKP*
62	Tanah TPS Perumahan Umbul Residence	0101010101	00435	12	1	2020	Desa Umbul Krajan Kec. Kedungjajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	624.660,00	*DPKP*
63	Tanah Balai Warga Perumahan Umbul Residence	0101010101	00436	37,78	1	2020	Desa Umbul Krajan Kec. Kedungjajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	1.966.689,96	*DPKP*
64	Tanah Pos Satpam Perumahan Umbul Residence	0101010101	00437	9,23	1	2020	Desa Umbul Krajan Kec. Kedungjajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	480.467,65	*DPKP*
65	Tanah Jalan dan Drainase Kaveling Graha Budimantoro	0101110801	00438	1734,91	1	2020	Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	216.863.750,00	*DPKP*
66	Tanah Taman Kaveling Graha Budimantoro	0101010101	00439	674,74	1	2020	Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	84.342.500,00	*DPKP*
67	Tanah Mushola Kaveling Graha Budimantoro	0101010101	00440	141	1	2020	Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	17.625.000,00	*DPKP*

68	Tanah TPS Kaveling Graha Budimantoro	0101010101	00441	19,4	1	2020	Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	2.425.000,00	*DPKP*
69	Tanah Posyandu Kaveling Graha Budimantoro	0101010101	00442	33,95	1	2020	Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	4.243.750,00	*DPKP*
70	Tanah Pos Satpam Kaveling Graha Budimantoro	0101010101	00443	4	1	2020	Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	HIBAH	500.000,00	*DPKP*
71	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	0101110402	00001	6240	1	2020	Ds. Kaliuling Tempursari	Hak Pakai	smpn 2 tempursari	APBD	674.843.500,00	*Dinas Pendidikan*
72	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	0101110402	00001	341	1	2020	Ds. Dawuhan Wetan Rowokk	Hak Pakai	smpn 2 rowokangkung	BANTUAN	12.000.000,00	*Dinas Pendidikan*
73	Tanah Jalan Permukiman RW.05	0101110801	00444	574	1	2003	Kel. Tompokersan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Konstruksi Jalan	Penilaian	34.440.000,00	*DPKP*
74	Tanah Jalan Permukiman RW.07	0101110801	00445	475	1	2003	Kel. Tompokersan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Konstruksi Jalan	Penilaian	38.475.000,00	*DPKP*
75	Tanah	0101110412	00001	246	1	2020	Jatirejo Kunir	HAK PAKAI	Pustu	Tanah Negara	13.166.667,00	*Dinkes*
76	Tanah di bawah Saluran D.I.Ali	01.01.11.07.03	00053	-	1	2003	Pasirian		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
77	Tanah di bawah Saluran D.I.Bacem I	01.01.11.07.03	00054	5.790,00	1	2003	Kertosari		Saluran irigasi	Penilaian	24.318.000,00	*Dinas PUTR*
78	Tanah di bawah Saluran D.I.Bacem II	01.01.11.07.03	00055	-	1	2003	Kertosari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
79	Tanah di bawah Saluran D.I.Banjarejo	01.01.11.07.03	00056	56,10	1	2003	Penanggal		Saluran irigasi	Penilaian	841.500,00	*Dinas PUTR*
80	Tanah di bawah Saluran D.I.Bayur	01.01.11.07.03	00057	191,40	1	2003	Kalibendo		Saluran irigasi	Penilaian	3.540.900,00	*Dinas PUTR*
81	Tanah di bawah Saluran D.I.Bendo	01.01.11.07.03	00058	620,00	1	2003	Jugosari		Saluran irigasi	Penilaian	8.680.000,00	*Dinas PUTR*
82	Tanah di bawah Saluran D.I.Besuki	01.01.11.07.03	00059	894,00	1	2003	Pasirian		Saluran irigasi	Penilaian	7.666.050,00	*Dinas PUTR*

83	Tanah di bawah Saluran D.I.Betoto II	01.01.11.07.03	00060	37.262,50	1	2003	Senduro		Saluran irigasi	Penilaian	633.462.500,00	*Dinas PUTR*
84	Tanah di bawah Saluran D.I.Bisri	01.01.11.07.03	00061	1.157,50	1	2003	Bades		Saluran irigasi	Penilaian	31.252.500,00	*Dinas PUTR*
85	Tanah di bawah Saluran D.I.Blokrejo	01.01.11.07.03	00062	-	1	2003	Kloposawit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
86	Tanah di bawah Saluran D.I.Blukon	01.01.11.07.03	00063	-	1	2003	Sumbersari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
87	Tanah di bawah Saluran D.I.Bodang	01.01.11.07.03	00064	-	1	2003	Bodang		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
88	Tanah di bawah Saluran D.I.Boreng	01.01.11.07.03	00065	5.908,54	1	2003	Rogotrunan		Saluran irigasi	Penilaian	401.780.720,00	*Dinas PUTR*
89	Tanah di bawah Saluran D.I.Boto	01.01.11.07.03	00066	-	1	2003	Kaliboto lor		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
90	Tanah di bawah Saluran D.I.Bulak Klakah	01.01.11.07.03	00067	163,00	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	1.956.000,00	*Dinas PUTR*
91	Tanah di bawah Saluran D.I.Bulak Manggis	01.01.11.07.03	00068	329,90	1	2003	Sumberejo		Saluran irigasi	Penilaian	6.598.000,00	*Dinas PUTR*
92	Tanah di bawah Saluran D.I.Candri	01.01.11.07.03	00069	923,80	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	11.085.600,00	*Dinas PUTR*
93	Tanah di bawah Saluran D.I.Cangkring I	01.01.11.07.03	00070	-	1	2003	Sawaran Kulon		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
94	Tanah di bawah Saluran D.I.Cangkring II	01.01.11.07.03	00071	-	1	2003	Sawaran Kulon		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
95	Tanah di bawah Saluran D.I.Celeng Mati	01.01.11.07.03	00072	-	1	2003	Wotgalih		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
96	Tanah di bawah Saluran D.I.Curah Petung I	01.01.11.07.03	00073	-	1	2003	Curah petung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
97	Tanah di bawah Saluran D.I.Curah Petung II	01.01.11.07.03	00074	-	1	2003	Curah petung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
98	Tanah di bawah Saluran D.I.Curah Wedi I	01.01.11.07.03	00075	-	1	2003	Kaliboto lor		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

99	Tanah di bawah Saluran D.I.Curah Wedi II	01.01.11.07.03	00076	-	1	2003	Kaliboto lor		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
100	Tanah di bawah Saluran D.I.Dadapan	01.01.11.07.03	00077	15.842,00	1	2003	Jambearum		Saluran irigasi	Penilaian	79.210.000,00	*Dinas PUTR*
101	Tanah di bawah Saluran D.I.Darungan	01.01.11.07.03	00078	119,00	1	2003	Kalibendo		Saluran irigasi	Penilaian	1.190.000,00	*Dinas PUTR*
102	Tanah di bawah Saluran D.I.Demo	01.01.11.07.03	00079	605,00	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	8.470.000,00	*Dinas PUTR*
103	Tanah di bawah Saluran D.I.Dilem	01.01.11.07.03	00080	-	1	2003	Sukosari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
104	Tanah di bawah Saluran D.I.Djatim	01.01.11.07.03	00081	5.020,00	1	2003	Randuagung		Saluran irigasi	Penilaian	25.100.000,00	*Dinas PUTR*
105	Tanah di bawah Saluran D.I.Duk	01.01.11.07.03	00082	22.511,20	1	2003	Sememu		Saluran irigasi	Penilaian	225.112.044,05	*Dinas PUTR*
106	Tanah di bawah Saluran D.I.Duk I	01.01.11.07.03	00083	4.354,00	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	43.540.000,00	*Dinas PUTR*
107	Tanah di bawah Saluran D.I.Duk II	01.01.11.07.03	00084	11.150,00	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	95.611.250,00	*Dinas PUTR*
108	Tanah di bawah Saluran D.I.Duk III	01.01.11.07.03	00085	5.580,00	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	78.120.000,00	*Dinas PUTR*
109	Tanah di bawah Saluran D.I.Duk IV	01.01.11.07.03	00086	4.430,00	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	44.300.000,00	*Dinas PUTR*
110	Tanah di bawah Saluran D.I.Duk V	01.01.11.07.03	00087	286,00	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	2.860.000,00	*Dinas PUTR*
111	Tanah di bawah Saluran D.I.Durek	01.01.11.07.03	00088	10,00	1	2003	Pasirian		Saluran irigasi	Penilaian	85.750,00	*Dinas PUTR*
112	Tanah di bawah Saluran D.I.Duren I	01.01.11.07.03	00089	10,00	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	120.000,00	*Dinas PUTR*
113	Tanah di bawah Saluran D.I.Duren II	01.01.11.07.03	00090	10,00	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	120.000,00	*Dinas PUTR*
114	Tanah di bawah Saluran D.I.Duren III	01.01.11.07.03	00091	1.002,50	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	10.025.000,00	*Dinas PUTR*
115	Tanah di bawah Saluran D.I.Duren IV	01.01.11.07.03	00092	50,00	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	600.000,00	*Dinas PUTR*

116	Tanah di bawah Saluran D.I.Duren V	01.01.11.07.03	00093	2.076,00	1	2003	Sememu		Saluran irigasi	Penilaian	17.801.700,00	*Dinas PUTR*
117	Tanah di bawah Saluran D.I.Duren VI	01.01.11.07.03	00094	3.545,50	1	2003	Sememu		Saluran irigasi	Penilaian	30.402.662,50	*Dinas PUTR*
118	Tanah di bawah Saluran D.I.Gedang Mas	01.01.11.07.03	00095	-	1	2003	Gedang mas		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
119	Tanah di bawah Saluran D.I.Gedang Mas I	01.01.11.07.03	00096	-	1	2003	Kali dilem		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
120	Tanah di bawah Saluran D.I.Gedang Mas II	01.01.11.07.03	00097	-	1	2003	Kali dilem		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
121	Tanah di bawah Saluran D.I.Gedangan	01.01.11.07.03	00098	-	1	2003	Tunjung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
122	Tanah di bawah Saluran D.I.Gempol	01.01.11.07.03	00099	-	1	2003	Purorejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
123	Tanah di bawah Saluran D.I.Gubug Domas	01.01.11.07.03	00100	-	1	2003	Klampokarum		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
124	Tanah di bawah Saluran D.I.Ismail	01.01.11.07.03	00101	234,60	1	2003	Kalibendo		Saluran irigasi	Penilaian	6.334.200,00	*Dinas PUTR*
125	Tanah di bawah Saluran D.I.Jagalan II	01.01.11.07.03	00102	-	1	2003	Candipuro		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
126	Tanah di bawah Saluran D.I.Jamal	01.01.11.07.03	00103	-	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
127	Tanah di bawah Saluran D.I.Jambe	01.01.11.07.03	00104	-	1	2003	Karanglo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
128	Tanah di bawah Saluran D.I.Jati	01.01.11.07.03	00105	-	1	2003	Bades		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
129	Tanah di bawah Saluran D.I.Jerukan/Monisa	01.01.11.07.03	00106	-	1	2003	Tunjung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
130	Tanah di bawah Saluran D.I.Jonggrang I	01.01.11.07.03	00107	-	1	2003	Candipuro		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

131	Tanah di bawah Saluran D.I.Jonggrang II	01.01.11.07.03	00108	-	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
132	Tanah di bawah Saluran D.I.Jonggrang III	01.01.11.07.03	00109	-	1	2003	Kalibendo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
133	Tanah di bawah Saluran D.I.Jonggrang IV	01.01.11.07.03	00110	-	1	2003	Sumberejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
134	Tanah di bawah Saluran D.I.Kali Piri	01.01.11.07.03	00111	-	1	2003	Pundungsari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
135	Tanah di bawah Saluran D.I.Kali Wuluh	01.01.11.07.03	00112	-	1	2003	Pasirian		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
136	Tanah di bawah Saluran D.I.Kamid	01.01.11.07.03	00113	-	1	2003	Kalibendo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
137	Tanah di bawah Saluran D.I.Karang Anyar I	01.01.11.07.03	00114	-	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
138	Tanah di bawah Saluran D.I.Karang Anyar II	01.01.11.07.03	00115	-	1	2003	Kalibendo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
139	Tanah di bawah Saluran D.I.Karang Culik	01.01.11.07.03	00116	-	1	2003	Kloposawit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
140	Tanah di bawah Saluran D.I.Karang Kletak	01.01.11.07.03	00117	-	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
141	Tanah di bawah Saluran D.I.Kebon Deli I	01.01.11.07.03	00118	-	1	2003	Sumber Wuluh		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
142	Tanah di bawah Saluran D.I.Kebon Deli II	01.01.11.07.03	00119	-	1	2003	Sumber Wuluh		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
143	Tanah di bawah Saluran D.I.Kebon Deli III	01.01.11.07.03	00120	-	1	2003	Sumber Wuluh		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
144	Tanah di bawah Saluran D.I.Kebon Deli IV	01.01.11.07.03	00121	-	1	2003	Sumber Wuluh		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
145	Tanah di bawah Saluran D.I.Kebon Deli V	01.01.11.07.03	00122	-	1	2003	Sumber Wuluh		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

146	Tanah di bawah Saluran D.I.Kedung Caring	01.01.11.07.03	00123	-	1	2003	Jatisari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
147	Tanah di bawah Saluran D.I.Kedung Klampok	01.01.11.07.03	00124	-	1	2003	Kalipenggung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
148	Tanah di bawah Saluran D.I.Kedung Lier I	01.01.11.07.03	00125	-	1	2003	Pajarakan		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
149	Tanah di bawah Saluran D.I.Kedung Lier II	01.01.11.07.03	00126	-	1	2003	Pajarakan		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
150	Tanah di bawah Saluran D.I.Klerek	01.01.11.07.03	00127	-	1	2003	Gesang		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
151	Tanah di bawah Saluran D.I.Klopogading	01.01.11.07.03	00128	-	1	2003	Klampokarum		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
152	Tanah di bawah Saluran D.I.Kowang	01.01.11.07.03	00129	-	1	2003	Tempurejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
153	Tanah di bawah Saluran D.I.Krai	01.01.11.07.03	00130	-	1	2003	Krai		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
154	Tanah di bawah Saluran D.I.Krumbang I	01.01.11.07.03	00131	-	1	2003	Sumberejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
155	Tanah di bawah Saluran D.I.Krumbang II	01.01.11.07.03	00132	301,26	1	2003	Candipuro		Saluran irigasi	Penilaian	4.518.900,00	*Dinas PUTR*
156	Tanah di bawah Saluran D.I.Krumbang III	01.01.11.07.03	00133	-	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
157	Tanah di bawah Saluran D.I.Kuburan	01.01.11.07.03	00134	-	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
158	Tanah di bawah Saluran D.I.Lalangan	01.01.11.07.03	00135	-	1	2003	Tunjung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
159	Tanah di bawah Saluran D.I.Lancing	01.01.11.07.03	00136	-	1	2003	Salak		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
160	Tanah di bawah Saluran D.I.Langgar I	01.01.11.07.03	00137	346,00	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	4.844.000,00	*Dinas PUTR*

161	Tanah di bawah Saluran D.I.Langgar II	01.01.11.07.03	00138	-	1	2003	Kalibendo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
162	Tanah di bawah Saluran D.I.Langgar III/BT	01.01.11.07.03	00139	-	1	2003	Bades		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
163	Tanah di bawah Saluran D.I.Langkapan	01.01.11.07.03	00140	-	1	2003	Tempurejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
164	Tanah di bawah Saluran D.I.Legenan	01.01.11.07.03	00141	-	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
165	Tanah di bawah Saluran D.I.Lobang Kanan	01.01.11.07.03	00142	-	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
166	Tanah di bawah Saluran D.I.Lobang Kiri	01.01.11.07.03	00143	-	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
167	Tanah di bawah Saluran D.I.Lombok	01.01.11.07.03	00144	-	1	2003	Candipuro		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
168	Tanah di bawah Saluran D.I.Mangun	01.01.11.07.03	00145	-	1	2003	Kalibendo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
169	Tanah di bawah Saluran D.I.Mi'an	01.01.11.07.03	00146	-	1	2003	Bades		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
170	Tanah di bawah Saluran D.I.Mualap	01.01.11.07.03	00147	-	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
171	Tanah di bawah Saluran D.I.Ngrepyak	01.01.11.07.03	00148	3.374,44	1	2003	Bedayu		Saluran irigasi	Penilaian	16.872.200,00	*Dinas PUTR*
172	Tanah di bawah Saluran D.I.Pak Duan	01.01.11.07.03	00149	130,00	1	2003	Bades		Saluran irigasi	Penilaian	2.665.000,00	*Dinas PUTR*
173	Tanah di bawah Saluran D.I.Pakel II	01.01.11.07.03	00150	680,00	1	2003	Kertosari		Saluran irigasi	Penilaian	2.856.000,00	*Dinas PUTR*
174	Tanah di bawah Saluran D.I.Paleran	01.01.11.07.03	00151	-	1	2003	Banyuputih Lor		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
175	Tanah di bawah Saluran D.I.Pancing I	01.01.11.07.03	00152	-	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
176	Tanah di bawah Saluran D.I.Pancing II	01.01.11.07.03	00153	-	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

177	Tanah di bawah Saluran D.I.Pancing III	01.01.11.07.03	00154	-	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
178	Tanah di bawah Saluran D.I.Pancing IV	01.01.11.07.03	00155	-	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
179	Tanah di bawah Saluran D.I.Pandanwangi I	01.01.11.07.03	00156	-	1	2003	Pandanwangi		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
180	Tanah di bawah Saluran D.I.Pandanwangi II	01.01.11.07.03	00157	-	1	2003	Pandanwangi		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
181	Tanah di bawah Saluran D.I.Panggung Lombok	01.01.11.07.03	00158	-	1	2003	Candipuro		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
182	Tanah di bawah Saluran D.I.Pelus I	01.01.11.07.03	00159	-	1	2003	Candipuro		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
183	Tanah di bawah Saluran D.I.Pelus II	01.01.11.07.03	00160	-	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
184	Tanah di bawah Saluran D.I.Pelus III	01.01.11.07.03	00161	-	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
185	Tanah di bawah Saluran D.I.Petehan	01.01.11.07.03	00162	-	1	2003	Kalipenggung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
186	Tanah di bawah Saluran D.I.Pinus	01.01.11.07.03	00163	-	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
187	Tanah di bawah Saluran D.I.Poh I	01.01.11.07.03	00164	-	1	2003	Tambah rejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
188	Tanah di bawah Saluran D.I.Poh II	01.01.11.07.03	00165	-	1	2003	Tambah rejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
189	Tanah di bawah Saluran D.I.Poh III	01.01.11.07.03	00166	-	1	2003	Tambah rejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
190	Tanah di bawah Saluran D.I.Poh IV	01.01.11.07.03	00167	-	1	2003	Kloposawit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
191	Tanah di bawah Saluran D.I.Poh V	01.01.11.07.03	00168	-	1	2003	Kloposawit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
192	Tanah di bawah Saluran D.I.Poh VI	01.01.11.07.03	00169	-	1	2003	Kloposawit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
193	Tanah di bawah Saluran D.I.Ponco Kusumo	01.01.11.07.03	00170	-	1	2003	Sumber Wuluh		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

194	Tanah di bawah Saluran D.I.Prapatan	01.01.11.07.03	00171	-	1	2003	Candipuro		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
195	Tanah di bawah Saluran D.I.Pringtali	01.01.11.07.03	00172	-	1	2003	Umbul		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
196	Tanah di bawah Saluran D.I.Rahayu	01.01.11.07.03	00173	-	1	2003	Gondoruso		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
197	Tanah di bawah Saluran D.I.Rakinten	01.01.11.07.03	00174	-	1	2003	Wonokerto		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
198	Tanah di bawah Saluran D.I.Rawaan	01.01.11.07.03	00175	9.870,00	1	2003	Tempursari		Saluran irigasi	Penilaian	197.400.000,00	*Dinas PUTR*
199	Tanah di bawah Saluran D.I.Regoyo	01.01.11.07.03	00176	-	1	2003	Gondoruso		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
200	Tanah di bawah Saluran D.I.Rekesan I	01.01.11.07.03	00177	-	1	2003	Gondoruso		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
201	Tanah di bawah Saluran D.I.Rekesan II	01.01.11.07.03	00178	-	1	2003	Bades		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
202	Tanah di bawah Saluran D.I.Repeh	01.01.11.07.03	00179	-	1	2003	Tekung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
203	Tanah di bawah Saluran D.I.Rowo Asin	01.01.11.07.03	00180	-	1	2003	Wotgalih		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
204	Tanah di bawah Saluran D.I.Rowo Gedang	01.01.11.07.03	00181	-	1	2003	Kertosari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
205	Tanah di bawah Saluran D.I.Sapari	01.01.11.07.03	00182	-	1	2003	Gondoruso		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
206	Tanah di bawah Saluran D.I.Sarijo	01.01.11.07.03	00183	-	1	2003	Kalipenggung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
207	Tanah di bawah Saluran D.I.Sempu I	01.01.11.07.03	00184	-	1	2003	Kunir lor		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
208	Tanah di bawah Saluran D.I.Sempu II	01.01.11.07.03	00185	-	1	2003	Kunir		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
209	Tanah di bawah Saluran D.I.Semut I	01.01.11.07.03	00186	14,00	1	2003	Candipuro		Saluran irigasi	Penilaian	378.000,00	*Dinas PUTR*

210	Tanah di bawah Saluran D.I.Semut II	01.01.11.07.03	00187	10,00	1	2003	Candipuro		Saluran irigasi	Penilaian	140.000,00	*Dinas PUTR*
211	Tanah di bawah Saluran D.I.Semut III	01.01.11.07.03	00188	-	1	2003	Kalibendo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
212	Tanah di bawah Saluran D.I.Sengon	01.01.11.07.03	00189	325,00	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	3.250.000,00	*Dinas PUTR*
213	Tanah di bawah Saluran D.I.Solekan	01.01.11.07.03	00190	15.571,28	1	2003	Kraton		Saluran irigasi	Penilaian	155.712.800,00	*Dinas PUTR*
214	Tanah di bawah Saluran D.I.Srenteng	01.01.11.07.03	00191	-	1	2003	Kalipenggung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
215	Tanah di bawah Saluran D.I.Suco	01.01.11.07.03	00192	3.950,00	1	2003	Pasrujambe		Saluran irigasi	Penilaian	25.675.000,00	*Dinas PUTR*
216	Tanah di bawah Saluran D.I.Sukorejo	01.01.11.07.03	00193	9.800,00	1	2003	Sukorejo		Saluran irigasi	Penilaian	49.000.000,00	*Dinas PUTR*
217	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Banji	01.01.11.07.03	00194	-	1	2003	Banyuputih Lor		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
218	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Baung	01.01.11.07.03	00195	310,40	1	2003	Bades		Saluran irigasi	Penilaian	3.724.800,00	*Dinas PUTR*
219	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Bendo	01.01.11.07.03	00196	797,33	1	2003	Jatirejo		Saluran irigasi	Penilaian	3.986.625,00	*Dinas PUTR*
220	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Bening	01.01.11.07.03	00197	-	1	2003	Pronojiwo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
221	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Berca	01.01.11.07.03	00198	-	1	2003	Papringan		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
222	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Biting	01.01.11.07.03	00199	-	1	2003	Biting		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
223	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Bopong	01.01.11.07.03	00200	-	1	2003	Oro-oro ombo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
224	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Brubi	01.01.11.07.03	00201	-	1	2003	Jokarto		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

225	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Bulak Wareng	01.01.11.07.03	00202	1.724,00	1	2003	Sememu		Saluran irigasi	Penilaian	14.783.300,00	*Dinas PUTR*
226	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Bulus	01.01.11.07.03	00203	-	1	2003	Oro-oro ombo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
227	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Bunting	01.01.11.07.03	00204	-	1	2003	Kedungjajang		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
228	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Buntung	01.01.11.07.03	00205	-	1	2003	Pronojiwo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
229	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Buntung III	01.01.11.07.03	00206	-	1	2003	Karanganom		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
230	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Cabek I	01.01.11.07.03	00207	-	1	2003	Ranuwurung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
231	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Cabek II	01.01.11.07.03	00208	-	1	2003	Ranuwurung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
232	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Cemeng	01.01.11.07.03	00209	-	1	2003	Krasak		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
233	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Cilik	01.01.11.07.03	00210	-	1	2003	Jatisari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
234	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Dairun	01.01.11.07.03	00211	-	1	2003	Jatigono		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
235	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Dompyong I	01.01.11.07.03	00212	138,26	1	2003	Jugosari		Saluran irigasi	Penilaian	1.382.550,00	*Dinas PUTR*
236	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Dompyong II	01.01.11.07.03	00213	749,52	1	2003	Jugosari		Saluran irigasi	Penilaian	10.493.280,00	*Dinas PUTR*
237	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Dongki	01.01.11.07.03	00214	-	1	2003	Pronojiwo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
238	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Dukuh	01.01.11.07.03	00215	-	1	2003	Kebonagung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

239	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Gebang	01.01.11.07.03	00216	-	1	2003	Padansari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
240	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Gebang	01.01.11.07.03	00217	-	1	2003	Pandansari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
241	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Gebang	01.01.11.07.03	00218	205,00	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	1.757.875,00	*Dinas PUTR*
242	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Gedong Sutro	01.01.11.07.03	00219	10,00	1	2003	Candipuro		Saluran irigasi	Penilaian	140.000,00	*Dinas PUTR*
243	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Gendol	01.01.11.07.03	00220	741,00	1	2003	Jugosari		Saluran irigasi	Penilaian	10.374.000,00	*Dinas PUTR*
244	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Gentong	01.01.11.07.03	00221	-	1	2003	Pandanwangi		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
245	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Gentong	01.01.11.07.03	00222	-	1	2003	Jatimulyo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
246	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Gentong	01.01.11.07.03	00223	-	1	2003	Supiturang		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
247	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Glintungan	01.01.11.07.03	00224	2.806,80	1	2003	Sememu		Saluran irigasi	Penilaian	28.068.000,00	*Dinas PUTR*
248	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Gogosan	01.01.11.07.03	00225	10.500,00	1	2003	Sukorejo		Saluran irigasi	Penilaian	63.000.000,00	*Dinas PUTR*
249	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Grimis	01.01.11.07.03	00226	127,65	1	2003	Kertosari		Saluran irigasi	Penilaian	638.250,00	*Dinas PUTR*
250	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Guci	01.01.11.07.03	00227	-	1	2003	Banyuputih Lor		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
251	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Gumuk Mas	01.01.11.07.03	00228	-	1	2003	Supiturang		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
252	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Jagal	01.01.11.07.03	00229	-	1	2003	Jambe kumbu		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

253	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Jajang I	01.01.11.07.03	00230	-	1	2003	Sumber urip		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
254	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Jajang II	01.01.11.07.03	00231	-	1	2003	Sumber urip		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
255	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Jajang III	01.01.11.07.03	00232	-	1	2003	Oro-oro ombo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
256	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Jambe	01.01.11.07.03	00233	3.567,50	1	2003	Karanglo		Saluran irigasi	Penilaian	30.323.750,00	*Dinas PUTR*
257	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Jebok	01.01.11.07.03	00234	-	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
258	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Jengger	01.01.11.07.03	00235	-	1	2003	Kabuaran		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
259	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kadi	01.01.11.07.03	00236	169,00	1	2003	Kalibendo		Saluran irigasi	Penilaian	4.563.000,00	*Dinas PUTR*
260	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kajar Kuning	01.01.11.07.03	00237	314,80	1	2003	Sumber wuluh		Saluran irigasi	Penilaian	3.148.000,00	*Dinas PUTR*
261	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kaliputih	01.01.11.07.03	00238	-	1	2003	Sumber wuluh		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
262	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kalong	01.01.11.07.03	00239	-	1	2003	Kabuaran		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
263	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kalong	01.01.11.07.03	00240	-	1	2003	Klampok arum		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
264	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kamar A	01.01.11.07.03	00241	-	1	2003	Supiturang		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
265	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kecambil	01.01.11.07.03	00242	-	1	2003	Jokarto		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
266	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kemanten	01.01.11.07.03	00243	-	1	2003	Pasirian		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

267	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kembang	01.01.11.07.03	00244	440,00	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	6.160.000,00	*Dinas PUTR*
268	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kembar	01.01.11.07.03	00245	-	1	2003	Oro-oro ombo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
269	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kemiri I	01.01.11.07.03	00246	-	1	2003	Jugosari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
270	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kemiri II	01.01.11.07.03	00247	-	1	2003	Jugosari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
271	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kenek	01.01.11.07.03	00248	-	1	2003	Kalipenggung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
272	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Klinting	01.01.11.07.03	00249	-	1	2003	Kandangan		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
273	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Klutuk	01.01.11.07.03	00250	-	1	2003	Wonorejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
274	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kokap	01.01.11.07.03	00251	-	1	2003	Wonorejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
275	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kolbek	01.01.11.07.03	00252	-	1	2003	Kaliboto lor		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
276	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kramat	01.01.11.07.03	00253	-	1	2003	Ledok Tempuro		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
277	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kuning	01.01.11.07.03	00254	-	1	2003	Kalidilem		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
278	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Kutuk	01.01.11.07.03	00255	9.860,04	1	2003	Kabuaran		Saluran irigasi	Penilaian	78.880.320,00	*Dinas PUTR*
279	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Ledok	01.01.11.07.03	00256	-	1	2003	Karangbendo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
280	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Lengkong I	01.01.11.07.03	00257	-	1	2003	Oro-oro ombo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

281	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Lengkong II	01.01.11.07.03	00258	-	1	2003	Oro-oro ombo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
282	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Lowo	01.01.11.07.03	00259	10,00	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	100.000,00	*Dinas PUTR*
283	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Manggarai	01.01.11.07.03	00260	-	1	2003	Bandaran		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
284	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Mojo	01.01.11.07.03	00261	-	1	2003	Mojo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
285	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Mualam	01.01.11.07.03	00262	-	1	2003	Buwek		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
286	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Mujur	01.01.11.07.03	00263	2.550,00	1	2003	Sumber mujur		Saluran irigasi	Penilaian	30.600.000,00	*Dinas PUTR*
287	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Munder	01.01.11.07.03	00264	-	1	2003	Tukum		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
288	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Muris	01.01.11.07.03	00265	162,80	1	2003	Gondoruso		Saluran irigasi	Penilaian	4.395.600,00	*Dinas PUTR*
289	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Nah	01.01.11.07.03	00266	-	1	2003	Kalisemut		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
290	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Ngambon	01.01.11.07.03	00267	785,00	1	2003	Jambe kumbu		Saluran irigasi	Penilaian	3.925.000,00	*Dinas PUTR*
291	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Nongko I	01.01.11.07.03	00268	160,00	1	2003	Sumber wuluh		Saluran irigasi	Penilaian	1.600.000,00	*Dinas PUTR*
292	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Nongko II	01.01.11.07.03	00269	85,80	1	2003	Sumberejo		Saluran irigasi	Penilaian	1.544.400,00	*Dinas PUTR*
293	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Ojo Lali	01.01.11.07.03	00270	-	1	2003	Sidomulyo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
294	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Onggomanik	01.01.11.07.03	00271	-	1	2003	Jambe kumbu		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

295	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Pakel	01.01.11.07.03	00272	-	1	2003	Tanggung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
296	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Pakem	01.01.11.07.03	00273	-	1	2003	Randuagung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
297	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Pakis	01.01.11.07.03	00274	-	1	2003	Kebonsari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
298	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Parang	01.01.11.07.03	00275	-	1	2003	Merakan		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
299	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Penanggungan	01.01.11.07.03	00276	660,00	1	2003	Jambe kumbu		Saluran irigasi	Penilaian	2.310.000,00	*Dinas PUTR*
300	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Penggung	01.01.11.07.03	00277	662,50	1	2003	Jokarto		Saluran irigasi	Penilaian	3.527.812,50	*Dinas PUTR*
301	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Persam	01.01.11.07.03	00278	-	1	2003	Umbul		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
302	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Petung	01.01.11.07.03	00279	-	1	2003	Sumber petung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
303	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Petung Sumur	01.01.11.07.03	00280	-	1	2003	Kunir lor		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
304	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Poh	01.01.11.07.03	00281	-	1	2003	Kalisemut		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
305	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Pule	01.01.11.07.03	00282	401,40	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	4.014.000,00	*Dinas PUTR*
306	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Puring	01.01.11.07.03	00283	-	1	2003	Duren		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
307	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Putri	01.01.11.07.03	00284	-	1	2003	Tanggung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
308	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Rambak Pakis	01.01.11.07.03	00285	762,50	1	2003	Karanganom		Saluran irigasi	Penilaian	3.812.500,00	*Dinas PUTR*

309	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Rampal	01.01.11.07.03	00286	-	1	2003	Jatirejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
310	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Ranu Glabak	01.01.11.07.03	00287	-	1	2003	Ranu wurung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
311	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Ranu Wurung	01.01.11.07.03	00288	-	1	2003	Ranu wurung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
312	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Ranuyoso	01.01.11.07.03	00289	-	1	2003	Sumber petung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
313	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Rojo	01.01.11.07.03	00290	-	1	2003	Supit urang		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
314	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Rowo Baung	01.01.11.07.03	00291	-	1	2003	Pronojiwo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
315	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Rowo Kancu	01.01.11.07.03	00292	-	1	2003	Mojo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
316	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Rowosumo	01.01.11.07.03	00293	-	1	2003	Wonokerto		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
317	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Salak	01.01.11.07.03	00294	157,50	1	2003	Sumber wuluh		Saluran irigasi	Penilaian	2.205.000,00	*Dinas PUTR*
318	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Sari	01.01.11.07.03	00295	-	1	2003	Supiturang		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
319	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Sebono	01.01.11.07.03	00296	-	1	2003	Kalipenggung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
320	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Sengon	01.01.11.07.03	00297	615,00	1	2003	Kabuaran		Saluran irigasi	Penilaian	4.612.500,00	*Dinas PUTR*
321	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Sentul	01.01.11.07.03	00298	-	1	2003	Sentul		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
322	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Sepikul	01.01.11.07.03	00299	-	1	2003	Grobogan		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

323	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Sinonggo	01.01.11.07.03	00300	-	1	2003	Mangunsari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
324	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Sonok	01.01.11.07.03	00301	-	1	2003	Duren		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
325	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Suko	01.01.11.07.03	00302	1.125,00	1	2003	Kali semut		Saluran irigasi	Penilaian	5.625.000,00	*Dinas PUTR*
326	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Suko	01.01.11.07.03	00303	-	1	2003	Jambe arum		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
327	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Sukosari	01.01.11.07.03	00304	-	1	2003	Pundungsari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
328	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Sumberan	01.01.11.07.03	00305	-	1	2003	Kebon agung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
329	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Takir	01.01.11.07.03	00306	1.650,00	1	2003	Jokarto		Saluran irigasi	Penilaian	14.148.750,00	*Dinas PUTR*
330	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Tangis	01.01.11.07.03	00307	-	1	2003	Oro-oro ombo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
331	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Tangkil	01.01.11.07.03	00308	-	1	2003	Bence		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
332	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Tekik	01.01.11.07.03	00309	-	1	2003	Barat		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
333	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Tembok	01.01.11.07.03	00310	190,00	1	2003	Jarit		Saluran irigasi	Penilaian	1.900.000,00	*Dinas PUTR*
334	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Temo	01.01.11.07.03	00311	-	1	2003	Kabuaran		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
335	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Tempuran	01.01.11.07.03	00312	-	1	2003	Tempursari		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
336	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Tretes	01.01.11.07.03	00313	1.460,00	1	2003	Sentul		Saluran irigasi	Penilaian	4.380.000,00	*Dinas PUTR*

337	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Tumpuk/Tunjung	01.01.11.07.03	00314	-	1	2003	Tunjung		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
338	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Umbulan	01.01.11.07.03	00315	-	1	2003	Pronojiwo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
339	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Urang	01.01.11.07.03	00316	-	1	2003	Pasirian		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
340	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Urip	01.01.11.07.03	00317	-	1	2003	Sumber urip		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
341	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Wakap	01.01.11.07.03	00318	625,00	1	2003	Supit urang		Saluran irigasi	Penilaian	3.125.000,00	*Dinas PUTR*
342	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Wongso	01.01.11.07.03	00319	-	1	2003	Jatimulyo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
343	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumber Wringin	01.01.11.07.03	00320	-	1	2003	Sumber Wringin		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
344	Tanah di bawah Saluran D.I.Sumberan	01.01.11.07.03	00321	3.835,60	1	2003	Tegalrejo		Saluran irigasi	Penilaian	32.890.270,00	*Dinas PUTR*
345	Tanah di bawah Saluran D.I.Tabon	01.01.11.07.03	00322	412,00	1	2003	Bades		Saluran irigasi	Penilaian	11.124.000,00	*Dinas PUTR*
346	Tanah di bawah Saluran D.I.Talang	01.01.11.07.03	00323	2.307,84	1	2003	Pasirian		Saluran irigasi	Penilaian	16.501.056,00	*Dinas PUTR*
347	Tanah di bawah Saluran D.I.Tandak	01.01.11.07.03	00324	-	1	2003	Krai		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
348	Tanah di bawah Saluran D.I.Temari	01.01.11.07.03	00325	429,00	1	2003	Nguter		Saluran irigasi	Penilaian	4.290.000,00	*Dinas PUTR*
349	Tanah di bawah Saluran D.I.Tino	01.01.11.07.03	00326	-	1	2003	Madurejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
350	Tanah di bawah Saluran D.I.Tong Maling	01.01.11.07.03	00327	-	1	2003	Ranu Logong		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
351	Tanah di bawah Saluran D.I.Umbul Sari I	01.01.11.07.03	00328	-	1	2003	Bulurejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

352	Tanah di bawah Saluran D.I.Umbul sari II	01.01.11.07.03	00329	-	1	2003	Bulurejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
353	Tanah di bawah Saluran D.I.Wakap	01.01.11.07.03	00330	-	1	2003	Pasirian		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
354	Tanah di bawah Saluran D.I.Wareng	01.01.11.07.03	00331	-	1	2003	Purorejo		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
355	Tanah di bawah Saluran D.I.Wonokerto	01.01.11.07.03	00332	-	1	2003	Kaliboto Kidul		Saluran irigasi	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
356	Tanah Jalan Sumberwuluh - Gunung Sawur	01.01.11.08.01	00392	26700	1	2003	Kec. CANDIPURO		Konstruksi Jalan	Penilaian	65.415.000,00	*Dinas PUTR*
357	Tanah Jalan Kaliwungu - Sumberjati	01.01.11.08.01	00393	10750	1	2003	Kec. TEMPEH		Konstruksi Jalan	Penilaian	56.528.750,00	*Dinas PUTR*
358	Tanah Jalan Selok Awar-Awar - Selok Anyar	01.01.11.08.01	00394	31075	1	2003	Kec. PASIRIAN		Konstruksi Jalan	Penilaian	77.744.975,00	*Dinas PUTR*
359	Tanah Jalan Pasrujambe - Loji	01.01.11.08.01	00396	13000	1	2003	Kec. PASRUJAMBE		Konstruksi Jalan	Penilaian	208.000.000,00	*Dinas PUTR*
360	Tanah Jalan Gondoruso - Jugosari	01.01.11.08.01	00397	24300	1	2003	Kec. CANDIPURO		Konstruksi Jalan	Penilaian	298.524.960,00	*Dinas PUTR*
361	Tanah Jalan DPRD	01.01.11.08.01	00398	5665	1	2003	Kec. KEDUNGJAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	125.576.000,00	*Dinas PUTR*
362	Tanah Jalan Linduboyo	01.01.11.08.01	00399	3200	1	2003	Kec. KLAKAH		Konstruksi Jalan	Penilaian	48.800.000,00	*Dinas PUTR*
363	Tanah Jalan Olahraga	01.01.11.08.01	00400	4400	1	2003	Kec. KLAKAH		Konstruksi Jalan	Penilaian	44.000.000,00	*Dinas PUTR*
364	Tanah Jalan Provinsi	01.01.11.08.01	00402	10175	1	2003	Kec. TEMPURSARI		Konstruksi Jalan	Penilaian	69.276.515,00	*Dinas PUTR*
365	Tanah Jalan Sombo Teking	01.01.11.08.01	00403	10500	1	2003	Kec. GUCIALIT		Konstruksi Jalan	Penilaian	9.555.000,00	*Dinas PUTR*

366	Tanah Jalan Papringan - Gunung Lemongan	01.01.11.08.01	00404	12500	1	2003	Kec. KLAKAH		Konstruksi Jalan	Penilaian	37.500.000,00	*Dinas PUTR*
367	Tanah Jalan Lingkar Jarit	01.01.11.08.01	00405	3750	1	2003	Kec. CANDIPURO		Konstruksi Jalan	Penilaian	53.437.500,00	*Dinas PUTR*
368	Tanah Jalan Wates Kulon - Bringinan	01.01.11.08.01	00406	12750	1	2003	Kec.Ranuyoso		Konstruksi Jalan	Penilaian	38.250.000,00	*Dinas PUTR*
369	Tanah Jalan Bulurejo - Purorejo	01.01.11.08.01	00407	14100	1	2003	Kec.Tempursari		Konstruksi Jalan	Penilaian	57.268.200,00	*Dinas PUTR*
370	Tanah Jalan Pajarakan - Ledoktempuro	01.01.11.08.01	00408	20500	1	2003	Kec.Randuagung		Konstruksi Jalan	Penilaian	23.549.190,00	*Dinas PUTR*
371	Tanah Jalan Jarit - Candipuro	01.01.11.08.01	00409	14500	1	2003	Kec.Candipuro		Konstruksi Jalan	Penilaian	132.291.280,00	*Dinas PUTR*
372	Tanah Jalan Lingkar Argosari	01.01.11.08.01	00410	20400	1	2003	Kec.Senduro		Konstruksi Jalan	Penilaian	40.800.000,00	*Dinas PUTR*
373	Tanah Jalan JLT - Galingan	01.01.11.08.01	00411	4250	1	2003	Kec.Lumajang		Konstruksi Jalan	Penilaian	42.500.000,00	*Dinas PUTR*
374	Tanah Jalan Sumberejo - Sumberwuluh	01.01.11.08.01	00412	17000	1	2003	Kec.Candipuro		Konstruksi Jalan	Penilaian	106.750.510,00	*Dinas PUTR*
375	Tanah Jalan Tempeh - Cikalan	01.01.11.08.01	00413	8250	1	2003	Kec.Tempeh		Konstruksi Jalan	Penilaian	86.715.750,00	*Dinas PUTR*
376	Tanah Jalan Pasrujambe - Plambang	01.01.11.08.01	00414	7000	1	2003	Kec.Pasrujambe		Konstruksi Jalan	Penilaian	59.500.000,00	*Dinas PUTR*
377	Tanah Jalan Tegalbangsri - Tegalrandu	01.01.11.08.01	00415	13250	1	2003	Kec.Klakah		Konstruksi Jalan	Penilaian	85.150.000,00	*Dinas PUTR*
378	Tanah Jalan Ledoktempuro - Ranu Logong	01.01.11.08.01	00416	9750	1	2003	Kec.Randuagung		Konstruksi Jalan	Penilaian	15.564.780,00	*Dinas PUTR*
379	Tanah Jalan Banyuputih Lor - Karangtengah	01.01.11.08.01	00417	7750	1	2003	Kec.Randuagung		Konstruksi Jalan	Penilaian	27.125.000,00	*Dinas PUTR*

380	Tanah Jalan Kalilengkong - Oro oro Ombo	01.01.11.08.01	00418	8750	1	2003	Kec.Pronojiwo		Konstruksi Jalan	Penilaian	48.606.250,00	*Dinas PUTR*
381	Tanah Jalan Rowosumo - Wonokerto	01.01.11.08.01	00419	11550	1	2003	Kec.Tekung		Konstruksi Jalan	Penilaian	103.101.075,00	*Dinas PUTR*
382	Tanah Jalan Lingkar Rowokangkung	01.01.11.08.01	00420	8500	1	2003	Kec.Rowokangkung		Konstruksi Jalan	Penilaian	80.750.000,00	*Dinas PUTR*
383	Tanah Jalan Gesang - Jokarto	01.01.11.08.01	00421	8800	1	2003	Kec. TEMPEH		Konstruksi Jalan	Penilaian	39.957.500,00	*Dinas PUTR*
384	Tanah Jalan Tambakboyo	01.01.11.08.01	00422	3850	1	2003	Kec. KLAKAH		Konstruksi Jalan	Penilaian	47.162.500,00	*Dinas PUTR*
385	Tanah Jalan Pelita	01.01.11.08.01	00423	8580	1	2003	Kec. TEMPURSARI		Konstruksi Jalan	Penilaian	30.030.000,00	*Dinas PUTR*
386	Tanah Makam Peresan	0101110401	0006	3.000	1	2020	Rogotrunan	Hak Pakai	Kelurahan Rogotrunan	Pembelian	167.589.000,00	*Kelurahan Rogotrunan*
387	Tanah Jalan Lingkar Timur Kota (Selokgondang)	01.01.11.08.01	00226	8.034	1	2007	Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Pembelian	0,00	*Dinas PUTR*
388	Tanah Jalan Lingkar Timur Kota (Bondoyudo)	01.01.11.08.01	00226	20.990	1	2007	Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Pembelian	0,00	*Dinas PUTR*
389	Tanah Jalan Lingkar Timur (Kepuharjo)	01.01.11.08.01	00226	11.714	1	2007	Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Pembelian	0,00	*Dinas PUTR*
390	Tanah Jalan Lingkar Timur (Sumberejo)	01.01.11.08.01	00226	8.834	1	2007	Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Pembelian	0,00	*Dinas PUTR*
391	Tanah Jalan Lingkar Timur (Sumberejo)	01.01.11.08.01	00226	8.718	1	2007	Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Pembelian	0,00	*Dinas PUTR*
392	Tanah Jalan Lingkar Timur (Sumberejo)	01.01.11.08.01	00226	20.023	1	2007	Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Pembelian	0,00	*Dinas PUTR*
393	Tanah Jalan Lingkar Timur (Boreng)	01.01.11.08.01	00226	8.234	1	2007	Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Pembelian	0,00	*Dinas PUTR*

394	Tanah Jalan Lingkar Timur (Jogoyudan)	01.01.11.08.01	00226	7.958	1	2007	Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Pembelian	0,00	*Dinas PUTR*
395	Tanah Jalan Lingkar Timur (Jogoyudan)	01.01.11.08.01	00226	16.053	1	2007	Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Pembelian	0,00	*Dinas PUTR*
396	Tanah Jalan Lingkar Timur (Jogotrunan)	01.01.11.08.01	00226	17.075	1	2007	Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Pembelian	0,00	*Dinas PUTR*
397	Tanah Jalan Lingkar Timur (Rogotrunan)	01.01.11.08.01	00226	9.145	1	2007	Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Pembelian	0,00	*Dinas PUTR*
398	Tanah Jalan Rojopolo - Persil	01.01.11.08.01	00001	33.362	1	2020	Rowokangkung, KAB. LUMAJANG	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
399	Tanah Jalan Persil - Sumbersari	01.01.11.08.01	00001	28.357	1	2020	Rowokangkung, KAB. LUMAJANG	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
400	Tanah Jalan Sumbersari - Nogosari	01.01.11.08.01	00001	16.681	1	2020	Rowokangkung, KAB. LUMAJANG	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
401	Tanah Jalan Sarikemuning - Pagowan	01.01.11.08.01	00001	37.924	1	2020	Pasrujambe, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
402	Tanah Jalan Tanah Pagowan - Jambearum	01.01.11.08.01	00001	20.876	1	2020	Pasrujambe, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
403	Tanah Jalan Untung Suropati Barat	01.01.11.08.01	00001	2.149	1	2020	Lumajang, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
404	Tanah Jalan Untung Suropati Timur	01.01.11.08.01	00001	2.051	1	2020	Lumajang, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
405	Tanah Jalan Sumberpetung - Ranu Klakah	01.01.11.08.01	00001	9.195	1	2020	Klakah, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
406	Tanah Jalan Dapsulur - Sumberpetung	01.01.11.08.01	00001	16.005	1	2020	Klakah, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
407	Tanah Jalan Dawuhan Lor - Bodang	01.01.11.08.01	00001	48.985	1	2020	Padang, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

408	Tanah Jalan Bodang - Wonokerto	01.01.11.08.01	00001	59.170	1	2020	Padang, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
409	Tanah Jalan Wonorejo - Krasak	01.01.11.08.01	00001	17.926	1	2020	Kedungjajang, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
410	Tanah Jalan Krasak - Pandansari	01.01.11.08.01	00001	9.594	1	2020	Kedungjajang, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
411	Tanah Jalan Kedungjajang - Bence	01.01.11.08.01	00001	25.532	1	2020	Kedungjajang, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
412	Tanah Jalan Bence - Sawaran Kulon	01.01.11.08.01	00001	36.068	1	2020	Kedungjajang, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
413	Tanah Jalan Ranu Bedali - Alun-alun	01.01.11.08.01	00001	32.667	1	2020	Ranuyoso, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
414	Tanah Jalan Ranu Bedali - Gunung Rindang	01.01.11.08.01	00001	16.333	1	2020	Ranuyoso, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
415	Tanah Jalan Kedawung - Gucialit	01.01.11.08.01	00001	33.851	1	2020	Gucialit, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
416	Tanah Jalan Rowokancu - Kedawung	01.01.11.08.01	00001	35.049	1	2020	Gucialit, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
417	Tanah Jalan Pasirian - Bades	01.01.11.08.01	00001	5.122	1	2020	Pasirian, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
418	Tanah Jalan Bades - Gondoruso	01.01.11.08.01	00001	37.774	1	2020	Pasirian, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
419	Tanah Jalan Gondoruso - Dampar	01.01.11.08.01	00001	29.451	1	2020	Pasirian, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
420	Tanah Jalan Dampar - Kali Gede	01.01.11.08.01	00001	42.255	1	2020	Pasirian, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
421	Tanah Jalan Kali Gede - Karangmenjangan	01.01.11.08.01	00001	79.389	1	2020	Tempursari, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

422	Tanah Jalan Karangmenjangan - Tempursari	01.01.11.08.01	00001	25.609	1	2020	Tempursari, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
423	Tanah Jalan Jaksa Agung Suprapto Selatan	01.01.11.08.01	00001	434	1	2020	Lumajang, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
424	Tanah Jalan Jaksa Agung Suprapto Utara	01.01.11.08.01	00001	526	1	2020	Lumajang, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
425	Tanah Jalan Banyuputih Lor - Kalidilem	01.01.11.08.01	00001	11.376	1	2020	Randuagung, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
426	Tanah Jalan Kalidilem - Sukosari	01.01.11.08.01	00001	33.624	1	2020	Randuagung, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
427	Tanah Jalan JLS - Jatimulyo	01.01.11.08.01	00001	11.423	1	2020	Pasirian, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
428	Tanah Jalan Lingkar Wot Galih	01.01.11.08.01	00001	30.157	1	2020	Pasirian, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
429	Tanah Jalan Sumbermujur - Pasrujambe	01.01.11.08.01	00001	15.731	1	2020	Pasrujambe, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
430	Tanah Jalan Sumbermujur - Penanggal	01.01.11.08.01	00001	58.429	1	2020	Pasrujambe, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
431	Tanah Jalan Tukum - Kabuaran	01.01.11.08.01	00001	33.027	1	2020	Tekung, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
432	Tanah Jalan Kabuaran - Kunir	01.01.11.08.01	00001	31.848	1	2020	Tekung, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
433	Tanah Jalan Tempeh - Gesang	01.01.11.08.01	00001	44.866	1	2020	Tempeh, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
434	Tanah Jalan Gesang - Tumpeng	01.01.11.08.01	00001	57.684	1	2020	Tempeh, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
435	Tanah Jalan Penanggal - Kloposawit	01.01.11.08.01	00001	37.899	1	2020	Candipuro, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

436	Tanah Jalan Kloposawit - Tumpeng	01.01.11.08.01	00001	14.951	1	2020	Candipuro, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
437	Tanah Jalan Tempursari - Tempurejo	01.01.11.08.01	00001	7.721	1	2020	Tempursari, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
438	Tanah Jalan Tempurejo - Karangmenjangan	01.01.11.08.01	00001	8.729	1	2020	Tempursari, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
439	Tanah Jalan Krai - Kraton	01.01.11.08.01	00001	27.718	1	2020	Yosowilangun, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
440	Tanah Jalan Kraton - Wotgalih	01.01.11.08.01	00001	44.282	1	2020	Yosowilangun, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
441	Tanah Jalan Condro - Bago	01.01.11.08.01	00001	12.628	1	2020	Pasirian, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
442	Tanah Jalan Bago - JLS	01.01.11.08.01	00001	32.313	1	2020	Pasirian, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
443	Tanah Jalan JLS - Bambang	01.01.11.08.01	00001	18.199	1	2020	Pasirian, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
444	Tanah Jalan Grati - Dorogowok	01.01.11.08.01	00001	25.127	1	2020	Kunir, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
445	Tanah Jalan Dorogowok - Kunir	01.01.11.08.01	00001	37.873	1	2020	Kunir, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
446	Tanah Jalan Lingkar Wates Wetan Utara	01.01.11.08.01	00001	4.800	1	2020	Ranuyoso, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
447	Tanah Jalan Lingkar Wates Wetan Selatan	01.01.11.08.01	00001	6.000	1	2020	Ranuyoso, KAB. LUMAJANG		Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
450	Tanah Karanganom - Senduro	01.01.11.08.01	00149	77880	0	2017	Senduro, KAB. LUMAJANG	Milik Negara	Konstruksi Jalan	Penilaian	433.944.000,00	*Dinas PUTR*

451	Tanah B. Olah Raga Lapangan & Bangunan Kantor (Stadion Semeru Timur Lumajang)	0101110408	00001	26.250	0	1988	Jl. Gajah Mada 01	Pakai	Tanah Kantor & Tanah T. Olahraga	Pembelian	189.434.375,00	*Dinas Pemuda dan Olahraga*
452	Tanah B. Olah Raga (Lapangan Sepak Bola Suko Lumajang)	0101110408	00007	11.050	0	2016	Jl. Suko	Pakai	Tanah Kantor & Tanah T. Olahraga	Pembelian	177.076.200,00	*Dinas Pemuda dan Olahraga*
453	penambahan dari Realisasi Belanja Modal	-	-	-	0	-	-	-	-	-	71.793.860,00	*DPKP, Dinas Pendidikan, BPKD*
					447						**14.854.675.172,51**	

Lampiran
3b

Pengurangan Jumlah Bidang Tanah Tahun 2020

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Jumlah Bidang	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Penggunaan	Asal-usul	Harga Ribuan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Reg								
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
I.	**PENGHAPUSAN**										
1	Tanah Jalan. Apel 2	01.01.13.07.03	0162	2050	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	55.350.000,00	*DPKP*
2	Tanah Jalan. Apel 3	01.01.13.07.03	0163	1435	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	38.745.000,00	*DPKP*
3	Tanah Jalan. Apel 4	01.01.13.07.03	0164	1681	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	45.387.000,00	*DPKP*
4	Tanah Jalan. Apel 5	01.01.13.07.03	0165	1681	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	45.387.000,00	*DPKP*
5	Tanah Jalan. Apel 6	01.01.13.07.03	0166	2009	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	54.243.000,00	*DPKP*
6	Tanah Jalan. Apel 7	01.01.13.07.03	0167	1640	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	44.280.000,00	*DPKP*
7	Tanah Jalan. Apel 8	01.01.13.07.03	0168	1640	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	44.280.000,00	*DPKP*
8	Tanah Jalan. Apel 9	01.01.13.07.03	0169	902	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	24.354.000,00	*DPKP*
9	Tanah Jalan. Apel 10	01.01.13.07.03	0170	902	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi	Penilaian	24.354.000,00	*DPKP*

								Jalan			
10	Tanah Jalan. Apel 11	01.01.13.07.03	0171	861	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	23.247.000,00	*DPKP*
11	Tanah Jalan. Apel 12	01.01.13.07.03	0172	861	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	23.247.000,00	*DPKP*
12	Tanah Jalan. Apel 13	01.01.13.07.03	0173	1722	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	46.494.000,00	*DPKP*
13	Tanah Jalan. Apel 14	01.01.13.07.03	0174	1189	1	2017	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	32.103.000,00	*DPKP*
14	Tanah Jalan Apel	01.01.11.01.04	0834	1380	1	2003	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	37.260.000,00	*DPKP*
15	Tanah Jalan. Seroja 1	01.01.13.07.03	0194	952	1	2017	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	34.272.000,00	*DPKP*
16	Tanah Jalan. Seroja 2	01.01.13.07.03	0195	1036	1	2017	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	37.296.000,00	*DPKP*
17	Tanah Jalan. Seroja 3	01.01.13.07.03	0196	1484	1	2017	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	53.424.000,00	*DPKP*
18	Tanah Jalan Saroja	01.01.11.01.04	0831	850	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	22.950.000,00	*DPKP*
19	Tanah Jalan Moris	01.01.11.01.04	0833	660	1	2003	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	17.820.000,00	*DPKP*
20	Tanah Jalan Moris 2	01.01.11.01.04	0973	1500	1	2003	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	40.500.000,00	*DPKP*
21	Tanah Jalan Moris 3	01.01.11.01.04	0974	1350	1	2003	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	36.450.000,00	*DPKP*
22	Tanah Jalan Moris 4	01.01.11.01.04	0975	1020	1	2003	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	27.540.000,00	*DPKP*

23	Tanah Jalan dan Draenase Kavling Permata Indah I	0101110801	0011	744,08	1	2016	Jl. Raya Tukum / Desa Tukum	Fasum & Fasos	HIBAH	372.040.000,00	*DPKP*
24	Tanah Taman Kavling Permata Indah I	0101010101	0012	94,92	1	2016	Jl. Raya Tukum / Desa Tukum	Fasum & Fasos	HIBAH	47.460.000,00	*DPKP*
25	Tanah TPS Kavling Permata Indah I	0101010101	0013	25	1	2016	Jl. Raya Tukum / Desa Tukum	Fasum & Fasos	HIBAH	12.500.000,00	*DPKP*
26	Tanah Jalan dan Draenase Kavling JLT	0101110801	0043	2689,34	1	2015	Jl. Raya Lintas Timur / Desa Boreng	Fasum & Fasos	HIBAH	1.210.203.000,00	*DPKP*
27	Tanah Taman Kavling JLT	0101010101	0044	193	1	2015	Jl. Raya Lintas Timur / Desa Boreng	Fasum & Fasos	HIBAH	86.850.000,00	*DPKP*
28	Tanah Lapangan Kavling JLT	0101010101	0045	100	1	2015	Jl. Raya Lintas Timur / Desa Boreng	Fasum & Fasos	HIBAH	45.000.000,00	*DPKP*
29	Tanah Musholla Kavling JLT	0101010101	0046	140	1	2015	Jl. Raya Lintas Timur / Desa Boreng	Fasum & Fasos	HIBAH	63.000.000,00	*DPKP*
30	Tanah TPS Kavling JLT	0101010101	0047	20	1	2015	Jl. Raya Lintas Timur / Desa Boreng	Fasum & Fasos	HIBAH	9.000.000,00	*DPKP*
31	Tanah Jalan dan Draenase Kavling Ahmad Yani	0101110801	0056	1039,57	1	2015	Jl. Ahmad Yani / Kel. Kepuharjo	Fasum & Fasos	HIBAH	467.806.500,00	*DPKP*
32	Tanah Taman Kavling Ahmad Yani	0101010101	0057	52	1	2015	Jl. Ahmad Yani / Kel. Kepuharjo	Fasum & Fasos	HIBAH	23.400.000,00	*DPKP*
33	Tanah TPS Kavling Ahmad Yani	0101010101	0058	20	1	2015	Jl. Ahmad Yani / Kel. Kepuharjo	Fasum & Fasos	HIBAH	9.000.000,00	*DPKP*
34	Tanah Jalan. Kali Mas	01.01.13.07.03	0186	1.600,00	1	2017	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	76.800.000,00	*Dinas PUTR*
35	Tanah Jalan Tegal Bangsri - Tegal Ciut	01.01.13.07.03	0223	14400	1	2017	Ranuyoso, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	50.400.000,00	*Dinas PUTR*
36	Tanah Jalan Lingkar Timur	01.01.11.01.04	0832	163200	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	4.406.400.000,00	*Dinas PUTR*

37	Tanah Jalan Sarikemuning - Jambe Kumbu	01.01.11.01.04	0947	58800	1	2010	Senduro, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	1.587.600.000,00	*Dinas PUTR*
38	Tanah Sumbersari - Rojopolo A	01.01.11.01.04	0948	30400	1	2010	Jatiroto, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	425.600.000,00	*Dinas PUTR*
39	Tanah Sumbersari - Rojopolo B	01.01.11.01.04	0952	16000	1	2010	Jatiroto, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	224.000.000,00	*Dinas PUTR*
40	Tanah Jalan Ranuyoso - Ranubedali II	01.01.11.01.04	0949	21000	1	2010	Ranuyoso, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	73.500.000,00	*Dinas PUTR*
41	Tanah Jalan Ranu Klakah - Papringan	01.01.11.01.04	0951	37500	1	2010	Klakah, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	268.125.000,00	*Dinas PUTR*
42	Tanah Jalan Bago - P. Bambang	01.01.11.01.04	0953	13800	1	2010	Pasirian, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	98.670.000,00	*Dinas PUTR*
43	Tanah Jalan Banyuputih Lor - Sukosari	01.01.11.01.04	0954	48750	1	2010	Randuagung, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	487.500.000,00	*Dinas PUTR*
44	Tanah Jalan Nogosari - Sumbersari	01.01.11.01.04	0955	18500	1	2010	Jatiroto, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	370.000.000,00	*Dinas PUTR*
45	Tanah Jalan Selok Awar - awar - Pantai Pecak	01.01.11.01.04	0956	36.800	1	2010	Pasirian, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	368.000.000,00	*Dinas PUTR*
46	Tanah Jalan Klanting - Dawuhan Lor	01.01.11.01.04	0957	15.000,00	1	2010	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	52.500.000,00	*Dinas PUTR*
47	Tanah Jalan Krasak - Kertowono	01.01.11.01.04	0958	40.000,00	1	2010	Kedungjajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	200.000.000,00	*Dinas PUTR*
48	Tanah Jl. Kemundung Selatan	01.01.11.01.04	0966	9.480,00	1	2010	Sukodono, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	67.782.000,00	*Dinas PUTR*
49	Tanah Jalan Randuagung - Kalidilem	01.01.11.01.04	0959	31.500,00	1	2010	Randuagung, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	315.000.000,00	*Dinas PUTR*

II.	**KOREKSI LEBIH CATAT**										
50	Tanah Jalan Kandangtepus - Kandangan (Tanah Senduro - Kandangan)	01.01.11.01.04	0960	15000	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
51	Tanah Jalan Bakah - Sombo	01.01.11.01.04	0961	6660	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
52	Tanah Jalan Sawaran Kulon - Jeruk	01.01.11.01.04	0962	19500	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
53	Tanah Jalan. Ahmad Dahlan 2 (Tanah Ahmad Dahlan)	01.01.11.01.04	0963	1600	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
54	Tanah Jalan Kertowono - Tunjung (Tanah Kertowono - Jeruk)	01.01.11.01.04	0964	28925	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
55	Tanah Jalan Kebonsari - Curahjero (Tanah Grati - Kebonsari)	01.01.11.01.04	0965	12750	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
56	Tanah Jalan Pasirian - Madurejo (Tanah Gesang - Pasirian)	01.01.11.01.04	0966	17850	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
57	Tanah Jalan Pasirian - Nguter (Tanah Pasirian - Sememu)	01.01.11.01.04	0967	13125	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
58	Tanah Jalan Tunjungrejo - Pantai Meleman (Tanah Yosowilangun - Wotgalih)	01.01.11.01.04	0968	44250	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
59	Tanah Jalan Lingkar Wates Wetan	01.01.11.01.04	0969	10800	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
60	Tanah Jalan Jaksa Agung Suprapto	01.01.11.01.04	0970	960	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
61	Tanah Jalan Wonorejo - Krasak	01.01.11.01.04	0971	27520	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

62	Tanah Jalan Tempursari - Tegalbanteng	01.01.11.01.04	0972	16450	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
63	Tanah Jalan Ranu Klakah - Ranu Bedali	01.01.11.01.04	0973	25200	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
64	Tanah Jalan Kedungjajang - Tempursari	01.01.11.01.04	0974	61600	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
65	Tanah Jalan Ranu Bedali - Alun-alun	01.01.11.01.04	0975	49000	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
66	Tanah Jalan Dawuhan Lor - Wonokerto	01.01.11.01.04	0976	108155	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
67	Tanah Jalan Untung Suropati	01.01.11.01.04	0977	4200	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
68	Tanah Jalan Padang - Gucialit	01.01.11.01.04	0978	68900	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
69	Tanah Jalan Jatimulyo - Wotgalih	01.01.11.01.04	0979	41580	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
70	Tanah Jalan Banyuputih Lor - Sukosari	01.01.11.01.04	0980	45000	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
71	Tanah Jalan Penanggal - Tumpeng	01.01.11.01.04	0981	52850	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
72	Tanah Jalan Pasrujambe - Sumbermujur	01.01.11.01.04	0982	74160	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
73	Tanah Jalan Sarikemuning - Suco	01.01.11.01.04	0983	58800	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
74	Tanah Jalan Condro - Pantai Bambang	01.01.11.01.04	0984	63140	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
75	Tanah Jalan Tukum - Kunir	01.01.11.01.04	0985	64875	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*

76	Tanah Jalan Krai - Wotgalih	01.01.11.01.04	0986	72000	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
77	Tanah Jalan Nogosari - Rojopolo	01.01.11.01.04	0987	78400	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
78	Tanah Jalan Lumajang - Kunir	01.01.11.01.04	0988	63000	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
79	Tanah Jalan Pasirian - Tempursari	01.01.11.01.04	0989	219600	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
80	Tanah Jalan Tempeh - Kertosari	01.01.11.01.04	0990	102550	1	2010	Lumajang, KAB. LUMAJANG	Konstruksi Jalan	Penilaian	0,00	*Dinas PUTR*
81	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.02	0001	7.560	1	2003	Desa Kaliuling - Kec. Tempursari	SMPN 2 Tempursari	Pembelian	130.765.000,00	*Dinas Pendidikan*
	JUMLAH				**81**					**12.357.884.500,00**	

Lampiran 4

Jumlah Perkembangan Tanah Yang Bersertifikat Tahun 2020

No	Nama SKPD	Sertifikat Jadi Tahun 2020	Penyerahan dari Pengembang	Jumlah	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Bagian Umum	1	0	1	- Sertifikat peruntukan atas Tanah Rumah Sekretaris Daerah
2.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	3	0	3	- Sertifikat peruntukan atas Tanah Hutan Bambu
3.	Dinas Pendidikan	22	0	22	- Sertifikat peruntukan atas Tanah Sekolah Dasar (SD) 18 bidang, Taman Kanak-Kanak (TK) 1 bidang, Kantor UPT Pendidikan 1 bidang, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 bidang
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3	0	3	- Sertifikat peruntukan atas Tanah Pemandian Selokambang
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	0	1	- Sertifikat peruntukan atas Tanah Stadion 2
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3	0	3	- Sertifikat peruntukan atas Tanah Jalan Lintas Timur (JLT) Selokgondang dan Bondoyudo
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0	34	34	- Sertifikat peruntukan atas Tanah Perumahan dan Kavling
JUMLAH		**33**	**34**	**67**	

Lampiran 5

Daftar Pinjam Pakai Tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No	SKPD	Lembaga yang Pinjam	No. Reg	Jenis Aset	Lokasi / Tempat	Jml Bdg / Perjanjian	Ukuran	No. Sertifikat	No. Tanggal Perjanjian	Masa Berlaku	Penggunaan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A.	**DENGAN INSTANSI PEMERINTAH**											
I.	**TANAH**											
1.	Kecamatan Pasrujambe	Koramil Pasrujambe	00001	Tanah	Jalan Raya Pagowan, Desa Kertosari	1	-	1	136/02/427.96/2018	5 Tahun 02/01/2018 02/01/2023	Untuk Markas Koramil Pasrujambe	Ada Perjanjian
2.	Kecamatan Pasrujambe	KUA Pasrujambe	00001	Tanah	Jalan Raya Pagowan, Desa Kertosari	1	-	1	136/01/427.96/2018	5 Tahun 02/01/2018 02/01/2023	Untuk Kantor KUA Pasrujambe	Ada Perjanjian
3.	Kecamatan Gucialit	Polsek Gucialit	00001	Tanah	Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit	1	Luas Tanah : 832 m2	4	028/3264/427.73/2020 dan B/9/XII/LOG.1.7/2020 Sarpras	5 Tahun 10/12/2020 10/12/2025	Untuk Markas Kepolisian Gucialit	Ada Perjanjian
Jumlah Perjanjian Pinjam Pakai Tanah						**3**						
II.	**TANAH DAN BANGUNAN**											
1.	Dinas Pendidikan	Bawaslu	00001 00001	Tanah Bangunan	Jl. Kalimas, Lumajang Rogotrunan	1	Luas Tanah : 2485 m2 Luas Bangunan : 597 m2	12	028/786/427.73/2020	5 Tahun 18/02/2018 18/02/2024	Untuk Kantor Bawaslu	Ada Perjanjian

2.	BPKD	Kejaksaan Negeri Lumajang	00002	Tanah	Jl. Pisang Agung No. 4 Kelurahan Kepoharjo	1	Luas Tanah : 380 m2	38	028/1950/427.73/2020 dan	5 Tahun	Mengoptimalkan dan Mendayagunakan Aset milik Pemerintah Kab. Lumajang	Ada Perjanjian
			00001	Bangunan			Luas Bangunan : 305 m2	Tanggal 22/02/1994	B-320/M.5.28/Cpl/2020	01/06/2020 30/05/2025		
3.	BPKD	Komisi Pemilihan Umum	00007	Tanah	Jl. Veteran No. 70 kelurahan Rogotrunan	1	Luas Tanah : 345 m2	23	028/2945/427.73/2020 dan 107/RT.07-SPJ/3508/KPU-KAB/2020	5 Tahun	Mengoptimalkan dan Mendayagunakan Aset milik Pemerintah Kab. Lumajang	Ada Perjanjian
			00004	Bangunan			Luas Bangunan : 90 m2 dan 132 m2	Tanggal 22/02/1989		04/08/2020 03/08/2025		
4.	BPKD	AKNL	00005	Tanah	Jalan Lintas Timur Kelurahan Jogoyudan	1	Luas Tanah : 53.130 m2	16	028/1492/427.12/2018 dan	5 Tahun	Perkuliahan Prodi di Luar Domisili	Ada Perjanjian
			00003	Bangunan			Luas Bangunan : 360 m2		21351/Pl2/HK/2018	10/08/2018 09/08/2023		
5.	Kecamatan Candipuro	Polsek Candipuro	00001	Tanah	Jl. Jend. Sudirman 35 Sumberejo Kec. Candipuro Lumajang	1	Luas Tanah : 744 m2	3	028/3264/427.73/2020 dan	5 Tahun	Untuk Markas Kepolisian Candipuro	Ada Perjanjian
			00001	Bangunan			Luas Bangunan : 105 m2		B/9/XII/LOG.1.7/2020 Sarpras	10/12/2020 09/12/2025		
6.	Kecamatan Candipuro	Koramil Candipuro	00001	Tanah	Jl. Jend. Sudirman 35 Sumberejo Kec. Candipuro Lumajang	1	Luas Tanah : 544 m2	3	028/3262/427.73/2020 dan	5 Tahun	Untuk Markas Koramil Candipuro	Ada Perjanjian
			00001	Bangunan			Luas Bangunan : 258 m2		B/1646/XII/2020	10/12/2020 09/12/2025		

7.	BPKD	Polres Lumajang	00011 00001	Tanah Bangunan	Desa Sumbersuko	1	Luas Tanah : 4.832 m2	9	No. 23 Tahun 2015 dan B/2057/XI/2016	5 Tahun 02/09/2016 01/09/2021	Untuk Polsek Sumbersuko	Ada Perjanjian
Jumlah Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan						**7**						
III.	**TANAH (Perjanjian Ada dan Masa Berlaku Habis)**											
1.	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian Prov. Jatim	00001	Tanah Pertanian	Desa Labruk Kidul	1	Luas Tanah : 30.000 m2	-	No. 32 Tahun 2015	2 Tahun 03/08/2015 02/08/2017	-	Sebagai proses tukar guling dengan tanah KWT (punya Provinsi)
2.	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian Prov. Jatim	00002	Tanah Pertanian	Desa Wonokerto Kec. Tekung	1	Luas Tanah : 35.645 m2	-	No. 32 Tahun 2015	2 Tahun 03/08/2015 02/08/2017	-	Sebagai proses tukar guling dengan tanah KWT (punya Provinsi)
Jumlah Perjanjian Pinjam Pakai Tanah						**2**						
B.	**DENGAN NON INSTANSI PEMERINTAH**											
I	**TANAH**											
1.	BPKD	PKK Kab. Lumajang	00009	Tanah	Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro	1	Luas Tanah : 11.740 m2	15	028/270/427.12/2017 dan 340/Skr/PKK-Kab/2017	5 Tahun 27/12/2017 26/12/2022	Untuk PKK Desa Sumberwuluh	Ada Perjanjian
2.	BPKD	Kwartir Cab.Pramuka	00001	Tanah	Jl.Kol.Suwignyo	1	Luas Tanah : 458 m2	65	028/266/427.12/2017 dan 10/1308-A	5 Tahun 27/12/2017 26/12/2022	Untuk Cabang Pramuka	Ada Perjanjian
3.	Kecamatan Klakah	PEBABRI	00001	Tanah	Jalan Raya Klakah No. 166	1	Luas Tanah : 84 m2	2	130/21-PKS/427.11/2019 dan 08/PEP/Ancab Klakah/VIII/2019	5 Tahun 30/08/2019 30/08/2024	Untuk PEBABRI	Ada Perjanjian

4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PDAM Lumajang	00001	Tanah	Desa Purwosono Kec. Sumbersuko	1	Luas Tanah : 340 m2	-	028/269/427.12/2017 dan 028/692/427.81/2017	5 Tahun 27/12/2017 26/12/2022	Untuk Rumah Jaga & Tandon air Bersih PDAM Lumajang	Ada Perjanjian
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PDAM Lumajang	00001	Tanah	Desa Purwosono Kec. Sumbersuko	1	Luas Tanah : 3.600 m2	-	028/269/427.12/2017 dan 028/692/427.81/2017	5 Tahun 27/12/2017 26/12/2022	Untuk Rumah Pompa & Tandon Air Bersih PDAM Lumajang	Ada Perjanjian
Jumlah Perjanjian Pinjam Pakai Tanah						**5**						
II	**TANAH DAN BANGUNAN**											
1.	BPKD	Balai Desa Nogosari	00005 00001	Tanah Bangunan	Desa Nogosari Kec. Rowokangkung	1	Luas Tanah : 2.408 m2	84	028/265/427.12/2017 dan 141/880/427.911.05/17	5 Tahun 27/12/2017 26/12/2022	Untuk Balai Desa Nogosari	Ada Perjanjian
2.	BPKD	Palang Merah Indonesia	00009 00001	Tanah Bangunan	Jl. Imam Suja'I No. 3 Lmj	1	Luas Bangunan : 550 m2	17	028/1278/427.1/2018 dan 204/02.06.33/UM/XI/2018	5 Tahun 01/11/2018 31/10/2023	Untuk Tempat pelayanan transfusi darah	Ada Perjanjian
3.	BPKD	Palang Merah Indonesia	00012 00006	Tanah Bangunan	Jl. Kolonel Suwignya Kel. Tompokersan Lmj	1	Luas Tanah : 318 m2	56	028/1278/427.1/2018 dan 204/02.06.33/UM/XI/2018	5 Tahun 01/11/2018 31/10/2023	Untuk Tempat pelayanan transfusi darah	Ada Perjanjian
Jumlah Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan						**3**						
III	**TANAH (Tidak Ada Perjanjian Ada)**											
1.	Kecamatan Senduro	UPK DAPM	00001	Tanah	Jln. Raya Senduro No.97	1	8 x 17 m2	97	-	-	Untuk Kantor UPK Desa Senduro	Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Tanah
2.	Kecamatan Senduro	Desa Senduro	00001	Tanah	Jln. Raya Senduro No.97	1	15 x 20 m2	97	-	-	Untuk TK Dharma Wanita 01 dan Posyandau Anggrek Bulan	Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Tanah

3.	Kecamatan Senduro	KUA Kec. Senduro	00001	Tanah	Jln. Raya Senduro No.97	1	345 M2	-	-	-	Untuk KUA Kec. Senduro	Tgl Ijin Bupati Imj di tanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum tgl 11 Pebruari 1982
Jumlah Pinjam Pakai Tanah						**3**						
IV	**TANAH DAN BANGUNAN (Tidak Ada Perjanjian)**											
1.	Kecamatan Gucialit	Kantor UPK	1	Tanah	Jl. Jendral Sudirman No. 214 Kec. Gucialit	1	Luas Bangunan : 17 x 10 m2	-	-	-	Untuk Kanto UPK-DAPM	Tidak ada perjanjian
			1	Bangunan								
2.	Kecamatan Gucialit	Kantor Pos	1	Tanah	Desa Gucialit	1	Luas Bangunan : 48 m2	-	-	-	-	Tidak ada perjanjian
			1	Bangunan								
3.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Forum Lumajang Sehat	2	Tanah	Jl. Alun-Alun Barat No. 1	1	8 m2 x 7 m2	-	-	-	Untuk Kantor FLS Kab. Lumajang	SK Bupati
			2	Bangunan								
4.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Forum Paud	2	Tanah	Jl. Alun-Alun Barat No. 1	1	8 m2 x 7 m2	-	-	-	Untuk Kegiatan HIMPAUDI	SK Bupati
			2	Bangunan								
5.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	2	Tanah	Jl. Alun-Alun Barat No. 1	1	8 m2 x 7 m2	-	-	-	Untuk Kantor MUI	SK Bupati
			1	Bangunan								
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Badan Amil Zakat (BAZ)	2	Tanah	Jl. Alun-Alun Barat No. 1	1	8 m2 x 7 m2	-	-	-	Untuk Kantor BAZ	SK Bupati
			1	Bangunan								
Jumlah Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan						**6**						
Jumlah Total Perjanjian Pinjam Pakai						**29**						

Lampiran 6

Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2020

No	SKPD	Lembaga yang Pinjam	No. Reg	Jenis Aset	Lokasi / Tempat	Jml Bdg / Perjanjian	Ukuran	No. Sertifikat	No. Tanggal Perjanjian	Masa Berlaku	Biaya Sewa	Penggunaan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
I	**TANAH SEBAGIAN (Perjanjian Ada dan Masih Berlaku)**												
1.	RSUD Pasirian	RONI	00001	Tanah	Jl. Raya Pasirian No. 225 A	1	176 m2 dan 22,4 m2	12	445/159/427.78/2020	3 Tahun 02/01/2020 01/01/2023	3.600.000,00	Untuk Lahan Parkir	Ada Perjanjian
Jumlah						**1**					**3.600.000,00**		
	TANAH SEBAGIAN (Perjanjian Ada dan Masa Berlaku Habis)												
1.	Rsud dr. Haryoto	KPRI Pangudi Luhur	00001	Tanah	Jl. Basuki Rahmat No. 56	1	2000 m2	-	445/2278/427.77/2018 dan 10/KPRI-PL/VI/2018	2 Tahun 01/01/2019 01/01/2021	126.000.000,00	Untuk Lahan Parkir	Ada Perjanjian
Jumlah						**1**					**126.000.000,00**		
II	**TANAH KESELURUHAN (Perjanjian Ada dan Masih Berlaku)**												
1.	BPKD	KETANG	00018	Tanah Eks. Bengkok	Desa Bago	1	0,526 ha	-	593.1/2439/427.59/2020	1 Tahun 01/01/2021 20/12/2021	5.850.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
2.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Jogotrunan	NANANG RUDI HANDOKO	00001	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Jogotrunan	1	2,850 ha	-	593.1/2420/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	95.000.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
3.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Jogotrunan	SAIFUDIN	00001	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Jogotrunan	1	1,456 ha	-	593.1/2432/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	32.250.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian

4.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Jogoyudan	INDRA WIBOWO LEKSANA	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Jogoyudan	1	0,506 Ha	-	593.1/2415/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	10.500.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
5.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Jogoyudan	MAHMUDI	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Jogoyudan	1	0,549 Ha	-	593.1/2416/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	11.410.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
6.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Jogoyudan	BASORI	00002	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Jogoyudan	1	1,759 ha	-	593.1/2428/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	36.300.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
7.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Jogoyudan	BASORI	00004	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Jogoyudan	1	0,960 ha	-	593.1/2429/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	19.850.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
8.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Jogoyudan	PURNOMO	00003	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Jogoyudan	1	1,463 ha	-	593.1/2430/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	30.200.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
9.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Kepuharjo	YASIN BUNINGWAR	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Kepuharjo	1	0,867 ha	-	593.1/2431/427.59/2020	1 Tahun 01/04/2021 20/03/2022	17.500.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
10.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Kepuharjo	PURNOMO	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Kepuharjo	1	1,638 ha	-	593.1/2433/427.59/2020	1 Tahun 01/04/2021 20/03/2022	37.875.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
11.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Kepuharjo	YASIN BUNINGWAR	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Kepuharjo	1	1,665 ha	-	593.1/2434/427.59/2020	1 Tahun 01/04/2021 20/03/2022	45.125.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian

12.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Kepuharjo	PURNOMO	00003	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Kepuharjo	1	1,653 ha	-	593.1/2435/427.59/2020	1 Tahun 01/04/2021 20/03/2022	38.250.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
13.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Kepuharjo	SUNYONO	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Kepuharjo	1	0,532 ha	-	593.1/2436/427.59/2020	1 Tahun 01/04/2021 20/03/2022	11.410.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
14.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Kepuharjo	SUNYONO	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Kepuharjo	1	0,575 ha	-	593.1/2437/427.59/2020	1 Tahun 01/04/2021 20/03/2022	12.000.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
15.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Kepuharjo	SUNYONO	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Kepuharjo	1	0,629 ha	-	593.1/2438/427.59/2020	1 Tahun 01/04/2021 20/03/2022	13.050.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
16.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Ditotrunan	SUDIRMAN	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Ditotrunan	1	1,428 ha	-	593.1/2421/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	39.270.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
17.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Ditotrunan	SUBOWO	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Ditotrunan	1	1,215 ha	-	593.1/2422/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	25.050.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
18.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Ditotrunan	SUBOWO	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Ditotrunan	1	1,030 ha	-	593.1/2423/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	21.250.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
19.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Ditotrunan	BASORI	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Ditotrunan	1	0,600 ha	-	593.1/2424/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	12.550.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian

20.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Ditotrunan	BASORI	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Ditotrunan	1	0,700 ha	-	593.1/2425/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	14.650.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
21.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Ditotrunan	BASORI	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Ditotrunan	1	1,958 ha	-	593.1/2426/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	40.350.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
22.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Ditotrunan	BASORI	-	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Ditotrunan	1	1,272 ha	-	593.1/2427/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	26.350.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
23.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Citrodiwangsan	BASORI	00001	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Citrodiwangsan	1	2,499 Ha	-	593.1/2414/427.59/2020	1 Tahun 01/02/2021 20/01/2022	50.250.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
24.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Citrodiwangsan	M. USONY	00007	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Citrodiwangsan	1	1,150 Ha	-	593.1/2418/427.59/2020	1 Tahun 01/04/2021 20/03/2022	29.950.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
25.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Citrodiwangsan	PURNOMO	00010	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Citrodiwangsan	1	0,585 Ha	-	593.1/2417/427.59/2020	1 Tahun 01/04/2021 20/03/2022	13.425.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
26.	Tanah Eks. Bengkok Kel. Citrodiwangsan	PURNOMO	00008	Tanah Eks. Bengkok	Kel. Citrodiwangsan	1	1,728 ha	-	593.1/2419/427.59/2020	1 Tahun 01/04/2021 20/03/2022	46.125.000,00	Untuk Sawah	Ada Perjanjian
27.	Bagian Administrasi Pemerintahan	MARGARETHA IMANIA	-	Tanah Eks. Bengkok	Ds. Wonosari Kec. Tekung	1	4,895 ha	-	593.1/1505/427.59/2020	1 Tahun 01/09/2020 31/08/2021	94.000.000,00	Untuk Tanaman Tebu	Ada Perjanjian
28.	Bagian Administrasi Pemerintahan	H. SAMSUL HADI, SH	00001	Tanah Eks. Bengkok	Ds. Kebonan Kec. Klakah	1	4,000 ha	-	593.1/1504/427.59/2020	1 Tahun 01/09/2020 31/08/2021	48.750.000,00	Untuk Tanaman Tebu	Ada Perjanjian

29.	Bagian Administrasi Pemerintahan	ALIYUS	00001	Tanah Eks. Bengkok	Ds. Kebonan Kec. Klakah	1	2,969 ha	-	593.1/1503/427.59/2020	1 Tahun 01/09/2020 31/08/2021	40.000.000,00	Untuk Tanaman Tebu	Ada Perjanjian
30.	Dinas Pertanian	Prasetyo Adi Cahyono	00001	Tanah Pertanian /Kebun Dinas	Desa Duren Kec. Klakah	1	2,550 ha	-	593,1/1501/427.59/2020 tgl. 03 Agustus 2020	1 Tahun 03/08/2020 31/08/2021	30.000.000,00	Untuk Tanaman Tebu	Ada Perjanjian
31.	Dinas Pertanian	Bahtiar Rivai	00002	Tanah Kebun Dinas /Tegalan	Ds. Krai Kec. Yosowilangun	1	20,64 Ha	No. 1/11 Nop. 1986	593,1/1499/427.59/2020 tgl. 03 Agustus 2020	1 Tahun 03/08/2020 31/08/2021	30.000.000,00	Untuk Tanaman Tebu	Ada Perjanjian
32.	Dinas Pertanian	Nasrotul Muhajaroh	00001	Tanah Kebun Dinas	Ds.Wonorejo Kec. Kedungjajang	1	0,549 Ha	-	593,1/1500/427.59/2020 tgl. 03Agustus 2020	1 Tahun 03/08/2020 31/08/2021	4.600.000,00	Untuk Tanaman Tebu	Ada Perjanjian
33.	Dinas Pertanian	M. Abdul Mukid	00004	Tanah Pertanian /Kebun	Ds. Kebonan Kec. Klakah	1	6,500 ha	-	593,1/1502/427.59/2020 tgl. 03Agustus 2020	1 Tahun 03/08/2020 31/08/2021	78.750.000,00	Untuk Tanaman Tebu	Ada Perjanjian
Jumlah						**33**					**1.060.890.000,00**		
	TANAH KESELURUHAN (Perjanjian Ada dan Masa Berlaku Habis)												
1.	Dinas Pertanian	Ir. Sudjono	00006	Tanah Kantor UPT-BPP Kec. Yosowilangun	Ds. Kalipepe Kec. Yosowilangun	1	12,000 M2	No. 1/23 Sept. 1987	520/16/427.45/2020 tgl. 06 Januari 2020	1 Tahun 06/01/2020 31/12/2020	72.000.000,00	Kebun Dinas (Kebun Beni tanaman Pangan)	Ada Perjanjian
2.	Dinas Pertanian	Wilujeng	00016	Lahan Kebun Dinas	Ds. Sumber Urip Kec. Pronojiwo	1	2,500 M2	No. 3/ 22 Nopember 1987	520/16/427.45/2020 tgl. 06 Januari 2020	1 Tahun 06/01/2020 31/12/2020	3.000.000,00	Kebun Dinas (Tanaman Padi/jagung)	Ada Perjanjian
3.	Dinas Pertanian	Sugito	00005	Tanah Kantor UPT-BPP Kec. Pronojiwo	Ds. Sumberurip Kec. Pronojiwo	1	22,300 M2	No. 1/22 Sept. 1987 dan No.2/22 Sept. 1987	520/16/427.45/2020 tgl. 06 Januari 2020	1 Tahun 06/01/2020 31/12/2020	18.500.000,00	Kebun Dinas (Tanaman Salak Pondoh)	Ada Perjanjian

4.	Dinas Pertanian	Ir. Indrawati, M. Ma.	00011	Tanah Bangunan Scren House	Desa Argosari Kec. Senduro	1	11.600 M2	-	520/16/427.45/2020 tgl. 06 Januari 2020	1 Tahun 06/01/2020 31/12/2020	44.750.000,00	Kebun Dinas (Kebun benih Hortikultura)	Ada Perjanjian
Jumlah						**4**					**138.250.000,00**		
III	**TANAH SEBAGIAN DAN BANGUNAN MILIK PEMKAB (Ada Perjanjian dan Masih Berlaku)**												
1.	Dinas Perikanan	SUPRIYADI	00004 00009	Tanah Bangunan	Jl. Sidorejo, Rowokangkung	1	16.550 m2	12.33.18.04.2.000005	523/0281/427.58/2021	1 Tahun 04/01/2021 31/12/2021	30.000.000,00	Untuk Budidaya Ikan	Ada Perjanjian
2.	BPKD	Dewan Pimpinan PPPI	00010 00001	Tanah Bangunan	Jl. Iptu Jama'ari No.31	1	420 m2 121 m2	No. 68	593.33/4537/427.73/2020 tgl. 31 Desember 2020	1 Tahun 30/12/2020 30/12/2021	3.500.000,00	Untuk Kantor DPC PPP Cabang Lumajang	Ada Perjanjian
3.	BPKD	Bank Jatim Kas Pemda	00009 00001	Tanah Bangunan	Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Kel. Rogotrunan	1	16 m2	No. 03	593.33/519/427.73/202 tgl. 29 Januari 2021	2 Tahun 01/01/2021 31/12/2022	40.000.000,00	Untuk Kantor Kas Pemda Cabang Lumajang	Ada Perjanjian
Jumlah						**3**					**73.500.000,00**		
	TANAH SEBAGIAN DAN BANGUNAN MILIK PEMKAB (Ada Perjanjian dan Masa Berlaku Habis)												
1.	RSUD dr. Haryoto	KPRI Pangudi Luhur	00001	Tanah	Jl. Basuki Rahmat No. 56	1	90 m2	12.33.18.04.2.000005	445/2280/427.77/2018 dan 39/KPRI-PL/VI/2018	2 Tahun 01/01/2019 01/01/2019	16.200.000,00	Untuk Kantin	Ada Perjanjian
Jumlah						**1**					**16.200.000,00**		
IV	**TANAH SEBAGIAN DAN BANGUNAN MILIK PIHAK KETIGA (Ada Perjanjian dan Masih Berlaku)**												
1.	RSUD dr. Haryoto	PT. Dayamitra Telekomunikasi	00002	Tanah	Jl. Basuki Rahmat No. 56	1	6,25 m2	-	445/953/427.77/2017 dan Dmt.864/CL1/DBS-a100000000/VI/2017	5 Tahun 14/07/2017 14/07/2022	20.000.000,00	Untuk Menara Mico Cell Pole	Ada Perjanjian
2.	RSUD dr. Haryoto	Bank BNI	00002	Tanah	Jl. Basuki Rahmat No. 56	1	10 m2	-	LMJ/2/PKS/128/2018 dan 445/1129/427.77/2018	3 Tahun 08/07/2018 07/07/2021	14.400.000,00	Untuk ATM Bank BNI	Ada Perjanjian

3.	Kecamatan Pasrujambe	TK AL Hidayah	00001	Tanah	Dusun Kebonan Desa Kertosari	1	182 m2	No. 01	593.1/1412 /427.96/2020	3 Tahun 30/12/2020 30/12/2023	600.000,00	Untuk Tempat bermain dan belajar	Ada Perjanjian
4.	Kecamatan Pasrujambe	Posyandu Gerbangmas Siaga Sinar Abadi	00001	Tanah	Dusun Kebonan Desa Kertosari	1	185 m2	No. 01	593.1/1413/427.96/2020	3 Tahun 30/12/2020 30/12/2023	600.000,00	Untuk Posyandu balita dan lansia	Ada Perjanjian
5.	Dinas Perdagangan	Bank Jatim	00008	Tanah	Dusun Kp. Baru, Central Tempeh, Tempeh, Lumajang	1	3m x 2m	No. 03	180/528/427.51/2019	2 Tahun 05/07/2019 05/07/2021	7.000.000,00	Untuk ATM Bank Jatim	Ada Perjanjian
6.	Dinas Perdagangan	BCA	00011	Tanah	Pasar Plaza	1	10 m²	No. 37	180/532/427.51/2019	2 Tahun 01/11/2019 01/11/2021	15.000.000,00	Untuk ATM Bank BCA	Ada Perjanjian
7.	Dinas Perdagangan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	00002	Tanah	Jl. Ahmad Yani no. 209	1	4 m²	No. 39	503/840.2/427.51/2017 dan Dmt.858/CL1/DBS-a100000000/VI/2017	5 Tahun 14/07/2017 14/07/2021	20.000.000,00	Untuk Menara Micro Cell	Ada Perjanjian
8.	Dinas Kesehatan	Bank Jatim	00001	Tanah	Jalan Raya Randuagung No. 192	1	4 m²	No. 03	028/7316/427.55/2019, 058/119/LMJ/UM&AKT /PKS	3 Tahun 27/11/2019 27/11/2022	12.000.000,00	Untuk ATM Bank Jatim	Ada Perjanjian
9.	Dinas Kesehatan	BANK BNI CAB. LUMAJANG	00002	Tanah	Jalan Raya Soekarno Hatta no. 12 - Tempeh Pkm. Tempeh	1	6 m²	No. 17	028/3475/427.55/2019, LMJ/2/PKS/098/2019	3 Tahun 14/06/2019 14/06/2022	18.000.000,00	Untuk ATM Bank BNI	Ada Perjanjian
10.	Dinas Kesehatan	BANK BNI CAB. LUMAJANG	00001	Tanah	Jalan Stadion No.334 - Yosowilangun Pkm. Yosowilangun	1	6 m²	No. 06	028/3477/427.55/2019, LMJ/2/PKS/100/2019	3 Tahun 14/06/2019 14/06/2022	14.400.000,00	Untuk ATM Bank BNI	Ada Perjanjian
11.	Dinas Kesehatan	BANK BNI CAB. LUMAJANG	00001	Tanah	Jalan Raya Ranuyoso Pkm. Ranuyoso	1	8 m²	No. 36	028/3476/427.55/2019, LMJ/2/PKS/099/2019	3 Tahun 14/06/2019 14/06/2022	21.000.000,00	Untuk ATM Bank BNI	Ada Perjanjian

12.	RSUD Pasirian	BANK BNI CAB. LUMAJANG	00001	Tanah	Jl. Raya Pasirian No 225A	1	6,9 m²	No. 12	LMJ/2/PKS/23/2020	3 Tahun 01/04/2020 30/03/2023	15.000.000,00	Untuk ATM Bank BNI	Ada Perjanjian
13.	BPBD	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	00001	Tanah	BPBD	1	4 m²	-	050/803/427.76/2017 Tanggal 21 Juni 2017	5 Tahun 21/06/2017 20/05/2022	20.000.000,00	Untuk Tower Menara Micro Cell Pole	Ada Perjanjian
14.	Kecamatan Ranuyoso	Bank Jatim	00001	Tanah	Ds. Ranuyoso	1	4 m²	No. 02	N0.130/729/427.73/2020, 059/217/LMJ/UM&AKT/ PKS	2 Tahun 01/01/2020 31/12/2021	15.000.000,00	Untuk ATM Bank Jatim	Ada Perjanjian
15.	Kecamatan Padang	Bank Jatim	00001	Tanah	Ds. Padang	1	4 m²	No. 01	130/728/427.73/2020, 059/218/LMJ/UM&AKT/ PKS	2 Tahun 22/02/2020 21/02/2022	15.000.000,00	Untuk ATM Bank Jatim	Ada Perjanjian
16.	Kecamatan Pasirian	Bank Jatim	00001	Tanah	Ds. Pasirian	1	1.050 m2	No. 07	130/727/427.73/2020, 059/216/LMJ/UM&AKT/ PKS	2 Tahun 02/01/2020 31/12/2021	90.000.000,00	Untuk ATM Bank Jatim	Ada Perjanjian
Jumlah						**16**					**298.000.000,00**		
Jumlah Keseluruhan						**59**					**1.716.440.000,00**		

Lampiran 7

Daftar Tanah Milik TNI dan BUMN yang tercatat pada KIB Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No.	NAMA SKPD	PENGGUNAAN TANAH	LUAS (M^2)	Jumlah Bidang	Tanggal Pengadaan (Perolehan)	LETAK / ALAMAT	Harga berdasarkan Appraisal (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	UPT. Pend. Kec. Sukodono	UPT. Pendidikan Kec. Sukodono	757,00	1	-	Sukodono	117.713.500,00	Tanah PGRI
2	UPT. Pend. Kec. Gucialit	SDN Gucialit 02	2.015,00	1	01-01-1975	Desa Gucialit	20.888.833,33	Tanah PTP
3	UPT. Pend. Kec. Gucialit	SDN Kertowono 02	714,00	1	01-01-1982	Desa Kertowono	5.533.500,00	Tanah PTP
4	UPT. Pend. Kec. Gucialit	SDN Kertowono 04	4.443,00	1	01-01-1983	Desa Kertowono	34.169.720,00	Tanah PTP
5	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 04	3.167,00	1	31-12-1979	Kaliboto Lor	96.940.790,00	Tanah PG
6	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 05	1.095,00	1	30-12-1979	Kaliboto Lor	35.481.600,00	Tanah PG
7	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 09	300,00	1	01-01-1981	Nyeoran	918.000,00	Tanah PG
8	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 10	1.341,37	1	01-01-1973	Kaliboto Lor	70.645.223,33	Tanah PG
9	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 11	4.350,00	1	01-01-1982	Kaliboto Lor	172.890.000,00	Tanah PG
10	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 15	3.168,00	1	01-01-1980	Kaliboto Lor	9.694.080,00	Tanah PG
11	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Kidul 01	5.372,00	1	01-01-1925	Jl. Ranupakis Kaliboto Kidul	283.675.813,33	Tanah PG

12	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Kidul 04	2.500,00	1	02-01-1968	Kaliboto Kidul	132.479.521,00	Tanah PG
13	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Kidul 06	1.320,00	1	03-01-1968	Kaliboto Kidul	33.673.000,00	Tanah PG
14	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Rojopolo 02	329,00	1	01-01-1978	Desa Sukosari	25.161.920,00	Tanah PG
15	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Rojopolo 07	1.060,00	1	01-01-1986	Desa Sukosari	3.349.600,00	Tanah PG
16	UPT. Pend. Kec. Klakah	UPT. Pendidikan Kec. Klakah	390,00	1	-	Mlawang	26.041.600,00	Tanah PJKA
17	UPT. Pend. Kec. Randuagung	SDN Gedangmas 03	1.600,00	1	02-01-1976	Gedang Mas	163.200.000,00	Tanah PG
18	UPT. Pend. Kec. Randuagung	SDN Kalidilem 02	738,00	1	02-01-1982	Kalidilem	63.290.880,00	Tanah PG
19	UPT. Pend. Kec. Randuagung	SDN Kalidilem 03	517,00	1	03-01-1982	Kalidilem	84.374.400,00	Tanah PG
20	UPT. Pend. Kec. Randuagung	SDN Tunjung 02	2.156,00	1	02-01-1971	Desa Tunjung	53.725.000,00	Tanah PG
21	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Rowokangkung 02	3.500,00	1	12-11-1994	Rowokangkung	43.540.000,00	Tanah PG
22	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Rowokangkung 03	3.500,00	1	01-01-1972	Persil Banter	807.563.333,00	Tanah PG
23	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Rowokangkung 04	3.116,00	1	01-01-1964	Persil Blimbing	110.301.333,00	Tanah PG
24	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Rowokangkung 05	5.320,00	1	01-01-1972	Jl. Loji Persil Genitri	76.340.000,00	Tanah PG
25	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Sumbersari 02	1.366,00	1	01-01-1964	Sumbersari	25.489.560,00	Tanah PG
26	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Dawuhan Wetan 02	3.221,40	1	01-01-1972	Jl. Blukon persil	417.439.750,00	Tanah PG

27	UPT. Pend. Kec. Kunir	UPT. Pendidikan Kec. Kunir	310,00	1	-	Jl. PB. Sudirman 22	12.854.667,00	Tanah PGRI
28	UPT. Pend. Kec. Kunir	SDN Jatimulyo 02	690,00	1	31-12-1976	Jatimulyo	14.306.000,00	Tanah Perhutani
29	UPT. Pend. Kec. Pasirian	UPT. Pendidikan Kec. Pasirian	136,00	1	-	Pasirian	3.626.667,00	Tanah PGRI
30	UPT. Pend. Kec. Pasirian	SDN Gondoruso 01	1.633,00	1	01-01-1930	Desa Gondoruso	139.349.334,00	Tanah Perhutani
31	UPT. Pend. Kec. Pasirian	SDN Bades 06	2.960,00	1	01-01-1973	Dampar	62.357.333,33	Tanah PTP
32	UPT. Pend. Kec. Pasirian	SDN Bago 04	1.192,00	1	01-01-1982	Desa Bago	43.306.667,00	Tanah Perhutani
33	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Sumberwuluh 02	2.800,00	1	02-01-1958	Kajar Kuning	29.493.333,00	Tanah Perhutani
34	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Sumberwuluh 03	2.808,00	1	03-01-1958	Sumberwuluh	29.577.600,00	Tanah Perhutani
35	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Sumberwuluh 04	2.500,00	1	01-01-1988	Desa Sumberwuluh	65.833.333,00	Tanah Perhutani
36	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Penanggal 03	1.175,00	1	01-01-1983	Kamp. Baru Penanggal	61.883.333,00	Tanah Perhutani
37	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Kloposawit 02	600,00	1	01-01-1980	Desa Kloposawit	5.688.560,00	Tanah Perhutani
38	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Kloposawit 02	600,00	1	01-01-1980	Jl. Raya Kloposawit	682.000,00	Tanah Perhutani
39	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Kloposawit 03	924,00	1	01-01-1986	Kebonjati Kloposawit	9.640.400,00	Tanah Perhutani
40	Kecamatan Jatiroto	Kecamatan Jatiroto	1.172,00	1	04-07-1997	Desa Jatiroto	325.866.000,00	Tanah PG

Lampiran 8

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020

No	SKPD	Pengadaan dari Belanja Modal		Reklasifikasi dari Belanja Modal		Pengadaan dari Belanja Barang & Jasa		Koreksi Kurang Catat		Hibah		Jumlah		Keterangan
		Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Sekretariat DPRD	19	179.568.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	179.568.000,00	
2	Inspektorat Kabupaten	1	26.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	26.400.000,00	
3	Bappeda	35	334.658.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	334.658.500,00	
4	Badan Kepegawaian Daerah	201	680.845.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	201	680.845.000,00	
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	23	306.845.245,30	0	0,00	0	0,00	1	35.000.000,00	0	0,00	24	341.845.245,30	
6	Badan Pajak dan Restribusi Daerah	22	27.825.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	18.650.000,00	25	46.475.000,00	- **Hibah** dari Bank Jatim berupa 1 set komputer server Rp13.750.000 dan 2bh tenda kerucut @Rp 2.450.000
7	Badan Kesbangpol.	4	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	50.000.000,00	

8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	111.075.000,00	0	0,00	103	145.450.000,00	0	0,00	112	456.885.270,00	245	713.410.270,00	- **Pengadaan dari Dana BTT** berupa 'Wastafel Portabel 75 Bh @Rp1.500.000, Bilik Sico 2 Unit @Rp4.000.000, HT 5 bh @Rp1.750.000, Jet Sprayer 15 unit @12.750.000, dan tiang lampu tenda 6bh @Rp575.000 - Bantuan Dana dari BNPB yang direalisasi menjadi Barang terdiri dari senter, tabung SCBA, Helm Safety, HT dan megaphone senilai Rp111.AV19600.000, Hibah Barang dari BNPB berupa tenda dan Fleksibel tenk Rp309.145.000, Hibah dari Provinsi berupa Thermometer gun 14bh @Rp500.000, Hibah Barang AV19 Kemenkes berupa velbed 30bh @Rp708.009, dan Bantuan Barang dari

														Masyarakat berupa Chain Saw Kecil Rp3.250.000, Chain Saw Besar Rp4.650.000 - Mutasi Keluar berupa Wastafel Portabel @Rp1.500.000 ke Kec. Pasirian 1 bh, RSUD Pasirian 1 bh, DPKP 2bh, Dispora 1 bh, Bagian RTP 2 bh, dan Dinas Perdagangan 50bh

9	RSD. Dr. Haryoto	339	13.494.411.633,00	0	0,00	14	7.200.000,00	0	0,00	3	254.997.619,05	356	13.756.609.252,05	- **Pengadaan dari belanja Barjas** berupa Exhaust Fan 4 bh @550.000, Exhaust Fan 6 bh @500.000, Meja Komputer 4 bh @Rp500.000 - **Hibah** dari Prop Jawa Timur berupa Ventilator 1bh Rp250.797.619,05 dan HP 1bh Rp2.500.000, Hibah Uang dari Masyarakat yang direalisasi menjadi Hp 1 Rp1.700.000,00 - Penghapusan Aset SK Penghapusan Nomor 188/11/427.12/2020 tgl 10 Juni 2020 (Kursi Roda Rp1.980.000), SK Penghapusan Nomor 188/20/427.12/2020 tgl 18 September 2020 (Rp822.694.567,10), dan SK Penghapusan Nomor 188/27/427.12/2020 (Rp3.697.768.398)

10	RSUD. Pasirian	195	4.485.478.376,00	1	3.319.250.000,00	0	0,00	0	0,00	3	278.300.919,05	199	8.083.029.295,05	- **Hibah** dari Dinas Kesehatan Provinsi Jatim 1 unit Astopad System Patient Warning Rp250.797.619,05, PT Hazten Indonesia thermometer gun 1bh Rp. 1.103.300, dan Rumah amal Salman Ventilator 1 bh Rp26.400.000 - Mutasi masuk 1 unit Wastafel Portabel dari BPBD Rp1.500.000
11	Dinas Pendidikan	5.834	17.959.497.703,00	0	0,00	4	22.651.800,00	2	4.000.000,00	388	2.046.539.996,00	6.228	20.032.689.499,00	- **Pengadaan dari Barjas** 4bh barang senilai Rp22.651.800 - **Kurang catat** dari 1bh Lemari Rp2.600.000 dan 1bh Printer Rp1.400.000 - **Hibah** dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Senilai Rp2.046.539.996 berupa Laptop, Projektor, Router dan Wastafel Portabel
12	Dinas Sosial	80	135.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	135.500.000,00	

13	Dispenduk Capil	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	186.000.000,00	1	186.000.000,00	- **Hibah** mesin Anjungan dari ADM dari DP3AK Propinsi Jawa Timur senilai Rp186.000.000
14	Dinas Ketahanan Pangan	1	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.000.000,00	
15	Dinas Pertanian	11	28.642.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	28.642.100,00	
16	Satuan Polisi Pamong Praja	80	130.988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	130.988.000,00	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13	187.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	187.150.000,00	
18	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & PP	10	61.067.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	61.067.000,00	
19	Dinas Lingkungan Hidup	77	521.564.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	77	521.564.700,00	
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	122	652.630.500,00	10	190.331.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	132	842.961.500,00	- **BM Aset Tetap Lainnya** menjadi Peralatan dan Mesin berupa 2bh motoh ATV 150 dan 8bh Motoh ATV 100
21	Dinas Perdagangan	137	932.255.266,00	0	0,00	34	28.900.000,00	0	0,00	0	0,00	171	961.155.266,00	- **Belanja Barang dan Jasa** berupa Spray Disinfektan 34bh @Rp850.000

22	Dinas Pemuda dan Olahraga	97	461.461.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	97	461.461.899,00	
23	Dinas Komunikasi & Informatika	84	625.015.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	84	625.015.000,00	
24	Dinas Kesehatan	2.224	13.897.352.410,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000	2.225	13.898.352.410,00	- **Hibah** dari Masyarakat berupa bed ginek 2 bh Rp1.000.000
25	Dinas Perhubungan	128	1.429.434.674,60	3	28.753.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	131	1.458.188.174,60	- **Reklasifikasi BM** Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan mesin berupa Traffic Voice Rp25.503.500 - **Reklasifikasi BM** Jalan jaringan dan Irigasi menjadi Peralatan Mesin berupa safety belt 1bh Rp2.000.000 dan Full Body Hardness 1bh Rp1.250.000 - mutasi Masuk dari bagian umum Mobil 1 bh Rp198.572.500
26	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4	43.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	43.600.000,00	
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	103	1.277.925.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	103	1.277.925.000,00	

28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	11.264.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	11.264.900,00	
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	46	199.500.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	199.500.500,00	
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37	335.252.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	335.252.500,00	
31	Bagian Rumah Tangga dan Protokol	37	100.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	100.200.000,00	
32	Bagian Umum	104	932.668.975,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	104	932.668.975,00	
33	Kecamatan Lumajang (ditambah 7 Kelurahan)	81	226.736.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	81	226.736.000,00	
34	Kecamatan Padang	1	7.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.300.000,00	
35	Kecamatan Gucialit	10	32.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	32.490.000,00	
36	Kecamatan Pasrujambe	14	47.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	47.500.000,00	
37	Kecamatan Kedungjajang	10	48.195.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	48.195.000,00	

38	Kecamatan Jatiroto	1	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.000.000,00	
39	Kecamatan Klakah	7	34.064.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	34.064.000,00	
40	Kecamatan Randuagung	3	15.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	15.500.000,00	
41	Kecamatan Ranuyoso	6	23.423.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	23.423.000,00	
42	Kecamatan Tekung	10	51.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	51.100.000,00	
43	Kecamatan Yosowilangun	11	81.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	81.950.000,00	
44	Kecamatan Tempeh	28	80.234.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	80.234.000,00	
45	Kecamatan Pasirian	14	48.775.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	48.775.000,00	
46	Kecamatan Candipuro	6	5.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	5.200.000,00	
47	Kecamatan Pronojiwo	8	32.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	32.950.000,00	
48	Kecamatan Tempursari	13	47.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	47.550.000,00	
JUMLAH		**10.324**	**60.413.044.881,90**	**14**	**3.538.334.500,00**	**155**	**204.201.800,00**	**3**	**39.000.000,00**	**511**	**3.242.373.804,10**	**11.007**	**67.436.954.986,00**	

Lampiran 9

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020

No	SKPD	Penghapusan Aset		Keterangan
		Jumlah	Nilai	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Inspektorat Kabupaten	2	122.000.000,00	Penghapusan 2 Mobil berdasarkan SK No188/20/427.12/2020
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	15.960.500,00	Penghapusan Mobil sesuai SK Penghapusan No 188/11/427.11/2020 Rp15.960.500
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1	35.000.000,00	Penghapusan Mobil sesuai SK Penghapusan No 188/27/427.12/2020 senilai Rp35.000.000
4.	RSUD dr. Haryoto	833	4.522.442.965,10	Penghapusan Aset SK Penghapusan Nomor 188/11/427.12/2020 tgl 10 Juni 2020 (Kursi Roda Rp1.980.000), SK Penghapusan Nomor 188/20/427.12/2020 tgl 18 September 2020 (Rp822.694.567,10), dan SK Penghapusan Nomor 188/27/427.12/2020 (Rp3.697.768.398)
5.	Dinas Sosial	1	45.000.000,00	Penghapusan 1 unit mobil senilai Rp45.000.000 berdasarkan SK Penghapusan 188/11/427.12/2020
6.	Dinas Pertanian	1	14.984.627,45	Penghapusan Sepeda Motor berdasarkan SK 188/11/427.12/2020
7.	Dinas Kesehatan	2	44.995.000,00	Penghapusan berdasarkan SK No 188/20/427.12/2020 1bh mobil senilai Rp20.000.000 dan SK No 188/26/427.12/2020 1bh mobil senilai Rp24.995.000
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2	55.537.500,00	Penghapusan 1 bh mobil Pickup dengan nomor SK 188/20/427.12/2020 senilai Rp40.000.000, dan 1 bh sepeda motor dengan nomor SK 188/11/427.12/2020 senilai Rp15.537.500

9.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	18.111.500,00	Penghapusan 1bh Spd Motor dengan SK No 188/11/427.11/2020
10.	Bagian Rumah Tangga dan Protokol	1	16.356.300,00	Penghapusan Sepeda Motor dengan Nomor SK Penghapusan Rp188/11/427.12/2020 Rp16.356.300
11.	Bagian Umum	8	310.367.000,00	Penghapusan dengan SK No 188/11/427.12/2020 senilai Rp138.367.000, SK No 188/20/427.12/2020 senilai Rp152.000.000, SK No 188/26/427.12/2020 senilai Rp20.000.000
12.	Sekretariat Kecamatan Lumajang	1	2.400.000,00	Penghapusan 1bh sepeda motor dengan SK No 188/20/427.12/2020
JUMLAH		**854**	**5.203.155.392,55**	

Lampiran
10

Daftar Pinjam Pakai Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Reg	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JML	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	NOMOR			PENGGUNAAN	KET.
										RANGKA	MESIN	POLISI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
I	**INSTANSI PEMERINTAH**													
A	**PERJANJIAN ADA DAN MASA BERLAKU HABIS**													
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Datasemen Polisi Militer	00010	Kend.Toyota	Lumajang	1	232.650.000,00	**028/2430.3/427.12/2017**	**2 Tahun**	MHKG2CJ2J7K008175	DAF2968	N 30 YP	Operasional	belum diperbarui
				Toyota Vios					28-12-2017					
	JUMLAH					**1**	**232.650.000,00**							
II	**NON INSTANSI PEMERINTAH**													
A	**ADA PERJANJIAN DAN MASIH BERLAKU**													
1	Dinas Kesehatan	PMI LUMAJANG	00001	DAIHATSU GRAND MAX 1.3 DFF	Jl. Kolonel Suwignyo No. 10 Lumajang	1	151.129.230,00	028/0530.1/427.55/2020	**2 Tahun**	MHKV3BA6JEK00564	MD78740	N 9131 YP	Operasional PMI	ada perjanjian
				Th. 2014				20-Jan-20	20-Jan-20					
									20-Jan-25					
2	Bagian Umum	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	00001	Daihatsu F700RG TX MT	Jl. Jaksa Agung Suprapto Lumajang	1	147.000.000,00	028/146/427.18/2020	**5 Tahun**	MHKG2CJ2J7K008158	DAF2963	N 78 YP	Operasional	ada perjanjian
				Th. 2007					04-05-2020					
									04-05-2025					

3	Dinas Lingkungan Hidup	Bank Sampah Guessa	00006	Roda Tiga	Desa Gucialit	1	41.076.100,00	024/1272/427.11/2020	**5 Tahun**	MGZB3TMAHKJ000921	162FMJK1081039	N 4780 YP	Operasional Bank Sampah	perjanjian tanda tangan pengelola
				Th. 2019				01/GUESSA/VII/2020	08-Jul-20					
								08-Jul-20	08-Jul-25					
4	Dinas Lingkungan Hidup	Bank Sampah Citra Sehat	00004	Roda Tiga	Kelurahan Citrodiwangsan	1	41.076.100,00	024/1273/427.11/2020	**5 Tahun**	MGZB3TMAHKJ000844	162FMJK1081133	N 4776 YP	Operasional Bank Sampah	perjanjian tanda tangan pengelola
				Th. 2019				001//BSC-17/VII/2020	08-Jul-20					
								08-Jul-20	08-Jul-25					
5	Dinas Lingkungan Hidup	Bank Sampah Citra Sehat	00003	Roda Tiga	Kelurahan Citrodiwangsan	1	41.076.100,00	024/1274/427.11/2020	**5 Tahun**	MGZB3TMAHKJ000951	162FMJK1081063	N 4775 YP	Operasional Bank Sampah	perjanjian tanda tangan pengelola
				Th. 2019				07/Sekr/BS.CS.19/VII/2020	08-Jul-20					
								08-Jul-20	08-Jul-25					
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Penawungan Kec.Ranuyoso	00001	Truck Tangki	Desa Penawungan	1	356.700.936,00	02/122/42776/2020	**2 Tahun**	MHMFE74P5HK176124	4D34TR99952	N 9091 YP	Operasional	perjanjian tanda tangan kepala skpd
				Th. 2017					28-Jan-20					
									27-Jan-22					
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Wates Wetan Kec. Ranuyoso	00002	Truck Tangki	Desa Wates Wetan	1	356.700.936,00	02/122/42776/2020	**2 Tahun**	MHMFE74P5HK176125	4D34TR933353	N 9092 YP	Operasional	perjanjian tanda tangan kepala skpd
				Th. 2017					28-Jan-20					
									27-Jan-22					

8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Wates Kulon Kec.Ranuyoso	00003	Truck Tangki	Desa Wates Kulon	1	356.700.936,00	02/122/42776/2020	**2 Tahun**	MHMFE74P5HK 176128	4D34TR9Ol46	N 9093 YP	Operasional	perjanjian tanda tangan kepala skpd
				Th. 2017					28-Jan-20					
									27-Jan-22					
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Kedawung Kec. Padang	00004	Truck Tangki	Desa Kedawung	1	356.700.936,00	02/122/42776/2020	**2 Tahun**	MHMFE74P5HK 176129	4D34TR90144	N 9094 YP	Operasional	perjanjian tanda tangan kepala skpd
				Th. 2017					28-Jan-20					
									27-Jan-22					
	JUMLAH					**9**	**1.848.161.274,00**							
B	**TIDAK ADA PERJANJIAN**													
1	Dinas Lingkungan Hidup	Desa Ranupani	00001	Dump Truck	Desa Ranupani	1	368.857.006,00			MJEC1JG43J5166129	W04DTRR566129	N 9106 YP	Operasional Bank Sampah	ada BAST
				Th. 2018										
	JUMLAH					**1**	**368.857.006,00**							
C	**PERJANJIAN ADA DAN MASA BERLAKU HABIS**													
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Asosiasi Kepala Desa	00005	Kend.Toyota	Lumajang	1	141.825.000,00	**028/2430.2/427.12/2017**	**2 Tahun**	MHFM1BA2JBK037146	DH74641	N 521 YP	Operasional	Belum di perpanjang
				Toyota Avanza					28-12-2017					
				Th. 2011										

2	Dinas Kesehatan	DESA BANJARWARU	00001	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA BANJARWARU	1	215.007.047,40	028/4540/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401878	G15AID383264	N 9034 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
3		DESA SELOKBESUKI	00002	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA SELOKBESUKI	1	215.007.047,40	028/4540.1/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401879	G15AID383268	N 9035 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
4		DESA PANDANSARI	00003	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA PANDANSARI	1	215.007.047,40	028/4540.2/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401863	G15AID383287	N 9037 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
5		DESA TANGGUNG	00004	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA TANGGUNG	1	215.007.047,40	028/4540.3/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401854	G15AID383326	N 9038 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
6	-	DESA JAMBE ARUM	00005	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA JAMBE ARUM	1	215.007.047,40	028/4540.4/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401864	G15AID383273	N 9039 YP	Operasional	ada perjanjian
-	-		-		-				14-Nop-16					-
-	-		-		-									-
7		DESA GRATI	00006	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA GRATI	1	215.007.047,40	028/4540.5/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401875	G15AID383269	N 9040 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
8		DESA TEGAL BANGSRI	00007	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA TEGAL BANGSRI	1	215.007.047,40	028/4540.6/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401883	G15AID383296	N 9041 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					

9		DESA WONO AYU	00008	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA WONO AYU	1	215.007.047,40	028/4540.7/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401859	G15AID383249	N 9042 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
10		DESA RANU PAKIS	00009	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA RANU PAKIS	1	215.007.047,40	028/4540.8/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401862	G15AID383246	N 9043 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
11		DESA KALI DILEM	00010	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA KALI DILEM	1	215.007.047,40	028/4540.9/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401860	G15AID383320	N 9044 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
12		DESA BUWEK	00011	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA BUWEK	1	215.007.047,40	028/4540.10/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401894	G15AID383318	N 9046 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
13		DESA BANYU PUTIH KIDUL	00012	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA BANYU PUTIH KIDUL	1	215.007.047,40	028/4540.11/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401877	G15AID383247	N 9047 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
14		DESA PANDANSARI	00013	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA PANDANSARI	1	215.007.047,40	028/4540.12/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401856	G15AID383253	N 9048 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
15		DESA BENCE	00014	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA BENCE	1	215.007.047,40	028/4540.13/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401885	G15AID383297	N 9049 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					

16		DESA NOGOSARI	00015	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA NOGOSARI	1	215.007.047,40	028/4540.14/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401892	G15AID383327	N 9050 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
17		DESA KLAMPOK ARUM	00016	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA KLAMPOK ARUM	1	215.007.047,40	028/4540.15/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401857	G15AID383224	N 9051 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
18		DESA CONDRO	00017	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA CONDRO	1	215.007.047,40	028/4540.16/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401882	G15AID383242	N 9052 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
19		DESA KALI WUNGU	00018	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA KALI WUNGU	1	215.007.047,40	028/4540.17/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401904	G15AID383321	N 9053 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
20		DESA PENANGGAL	00019	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA PENANGGAL	1	215.007.047,40	028/4540.18/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401889	G15AID383322	N 9055 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
21		DESA SUKOSARI	00020	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA SUKOSARI	1	215.007.047,40	028/4540.19/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401886	G15AID383304	N 9056 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					
22		DESA YOSOWILANGUN LOR	00021	SUZUKI GC 415 V APV STD	DESA YOSOWILANGUN LOR	1	215.007.047,40	028/4540.20/427.35/2016	**2 Tahun**	MHYGDN41VGJ401898	G15AID383204	N 9057 YP	Operasional	ada perjanjian
									14-Nop-16					

23		DESA LABRUK LOR	00001	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA LABRUK LOR	1	224.491.666,50	028/671.1/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409315	G15AID389670	N 1005 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
24		DESA SELOK GONDANG	00002	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA SELOK GONDANG	1	224.491.666,50	028/671.2/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409433	G15AID391269	N 1006 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
25		DESA KLANTING	00003	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA KLANTING	1	224.491.666,50	028/671.3/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409357	G15AID389715	N 1007 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
26		DESA SARI KEMUNING	00004	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA SARI KEMUNING	1	224.491.666,50	028/671.4/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409102	G15AID389427	N 1009 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
27		DESA PADANG	00005	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA PADANG	1	224.491.666,50	028/671.5/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409115	G15AID389450	N 1011 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
28		DESA PASRUJAMBE	00006	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA PASRUJAMBE	1	224.491.666,50	028/671.6/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409122	G15AID389470	N 1012 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
29		DESA KEBONSARI	00007	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA KEBONSARI	1	224.491.666,50	028/671.7/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409141	G15AID389486	N 1013 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					

30		DESA RANUYOSO	00008	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA RANUYOSO	1	224.491.666,50	028/671.8/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409155	G15AID389494	N 1014 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
31		DESA MENINJO	00009	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA MENINJO	1	224.491.666,50	028/671.9/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409159	G15AID389499	N 1015 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
32		DESA TEGAL RANDU	00010	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA TEGAL RANDU	1	224.491.666,50	028/671.10/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409193	G15AID387774	N 1016 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
33		DESA BANYU PUTIH LOR	00011	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA BANYU PUTIH LOR	1	224.491.666,50	028/671.11/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409209	G15AID389601	N 1018 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
34		DESA KALIBOTO KIDUL	00012	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA KALIBOTO KIDUL	1	224.491.666,50	028/671.12/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409216	G15AID389465	N 1019 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
35		DESA GROBOGAN	00013	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA GROBOGAN	1	224.491.666,50	028/671.13/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409240	G15AID389548	N 1020 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
36		DESA SUMBER ANYAR	00014	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA SUMBER ANYAR	1	224.491.666,50	028/671.14/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409260	G15AID389600	N 1021 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					

37		DESA WONOKERTO	00015	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA WONOKERTO	1	224.491.666,50	028/671.15/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409279	G15AID389626	N 1022 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
38		DESA MADUREJO	00016	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA MADUREJO	1	224.491.666,50	028/671.16/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409282	G15AID389627	N 1023 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
39		DESA BADES	00017	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA BADES	1	224.491.666,50	028/671.17/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409313	G15AID389645	N 1024 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
40		DESA JATISARI	00018	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA JATISARI	1	224.491.666,50	028/671.18/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409327	G15AID389727	N 1025 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
41		DESA PULO	00019	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA PULO	1	224.491.666,50	028/671.19/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409398	G15AID389749	N 1027 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
42		DESA KEDUNGMORO	00020	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA KEDUNGMORO	1	224.491.666,50	028/671/427,55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409319	G15AID389662	N 1028 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					

43		DESA TUNJUNGREJO	00021	SUZUKI GC 415 V APV DLX	DESA TUNJUNGREJO	1	224.491.666,50	028/671.20/427.55/2017	**2 Tahun**	MHY GDN 42 VG J409262	G15AID389611	N 1029 YP	Operasional	ada perjanjian
									22-Jun-17					
	JUMLAH					**43**	**9.371.297.991,90**							
	JUMLAH II=A+B+C					**53**	**11.588.316.271,90**							
	JUMLAH TOTAL = I+II					**54**	**11.820.966.271,90**							

Lampiran 11

Daftar Hibah Barang yang belum ada Berita Acara Serah Terima

No	Kode		No Reg.	Spesifikasi Barang			Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Kondisi	Satuan	Kondisi Awal 01 Januari 2020		Mutasi Perubahan				Kondisi Akhir 30 Juni 2020		Ket
													Berkurang		Bertambah				
	Lokasi	Barang		Jenis Barang	Merk/Type	Bahan					Brg	Nilai	Brg	Nilai	Brg	Nilai	Brg	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	13.21.07.01	02.08.01.15.05	001	Pasient Monitor	Philips	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	149.719.955,00	1	149.719.955,00	Surat Hibah Belum
2	13.21.07.01	02.08.01.15.05	002	Pasient Monitor	Philips	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	149.719.955,00	1	149.719.955,00	Surat Hibah Belum
3	13.21.07.01	02.08.01.01.68	001	HFNC	Gerlink	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	65.450.000,00	1	65.450.000,00	Surat Hibah Belum
4	13.21.07.01	02.08.01.01.68	002	HFNC	Gerlink	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	65.450.000,00	1	65.450.000,00	Surat Hibah Belum
5	13.21.07.01	02.08.01.01.68	002	HFNC	Gerlink	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	65.450.000,00	1	65.450.000,00	Surat Hibah Belum
6	13.21.07.01	02.08.01.01.68	002	HFNC	Gerlink	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	65.450.000,00	1	65.450.000,00	Surat Hibah Belum
7	13.21.07.01	02.08.01.01.68	002	HFNC	Gerlink	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	65.450.000,00	1	65.450.000,00	Surat Hibah Belum
8	13.21.07.01	02.08.01.01.68	002	HFNC	Gerlink	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	65.450.000,00	1	65.450.000,00	Surat Hibah Belum

9	13.21.07.01	02.08.01.01.68	001	HFNC (O2 TERAPI)	Coment	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	114.400.000,00	1	114.400.000,00	Surat Hibah Belum
10	13.21.07.01	02.08.01.01.68	002	HFNC (O2 TERAPI)	Coment	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	114.400.000,00	1	114.400.000,00	Surat Hibah Belum
11	13.21.07.01	02.08.01.01.68	001	HFNC (O2 TERAPI)	Coment	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	114.400.000,00	1	114.400.000,00	Surat Hibah Belum
12	13.21.07.01	02.08.01.01.68	002	HFNC (O2 TERAPI)	Coment	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	114.400.000,00	1	114.400.000,00	Surat Hibah Belum
13	13.21.07.01	02.08.01.01.68	001	Apheresiss	Terumo	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	973.283.363,00	1	973.283.363,00	Surat Hibah Belum
14	13.21.07.01	02.08.01.15.05	001	Pasient Monitor	Philips	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	149.719.955,00	1	149.719.955,00	Surat Hibah Belum
15	13.21.07.01	02.08.01.15.05	002	Pasient Monitor	Philips	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	149.719.955,00	1	149.719.955,00	Surat Hibah Belum
16	13.21.07.01	02.08.01.15.05	003	Pasient Monitor	Philips	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	149.719.955,00	1	149.719.955,00	Surat Hibah Belum
17	13.21.07.01	02.08.01.15.05	004	Pasient Monitor	Philips	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	149.719.955,00	1	149.719.955,00	Surat Hibah Belum
18	13.21.07.01	02.08.01.15.05	005	Pasient Monitor	Philips	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	149.719.955,00	1	149.719.955,00	Surat Hibah Belum
19	13.21.07.01	02.08.01.01.68	001	HFNC	Gerlink	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	65.450.000,00	1	65.450.000,00	Surat Hibah Belum
20	13.21.07.01	02.08.01.01.68	002	HFNC	Gerlink	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	65.450.000,00	1	65.450.000,00	Surat Hibah Belum
21	13.21.07.01	02.08.01.08.47	001	Refrigered Centrifuge	Hettich	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	1.097.155.000,00	1	1.097.155.000,00	Surat Hibah Belum
22	13.21.07.01	02.08.01.01.68	001	HFNC (O2 TERAPI)	Coment	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	114.400.000,00	1	114.400.000,00	Surat Hibah Belum

23	13.21.07.01	02.08.01.01.68	002	HFNC (O2 TERAPI)	Coment	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	114.400.000,00	1	114.400.000,00	Surat Hibah Belum
24	13.21.07.01	02.08.01.08.47	001	Blood Bank Refrigerator	Kirsch	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	104.330.073,00	1	104.330.073,00	Surat Hibah Belum
25	13.21.07.01	02.08.01.01.68	001	Infuse Pump	TOP	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	16.525.600,00	1	16.525.600,00	Surat Hibah Belum
26	13.21.07.01	02.08.01.01.68	002	Infuse Pump	TOP	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	16.525.600,00	1	16.525.600,00	Surat Hibah Belum
27	13.21.07.01	02.08.01.01.68	003	Infuse Pump	TOP	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	16.525.600,00	1	16.525.600,00	Surat Hibah Belum
28	13.21.07.01	02.08.01.01.68	001	Syringe Pump	TOP	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	22.434.700,00	1	22.434.700,00	Surat Hibah Belum
29	13.21.07.01	02.08.01.01.68	002	Syringe Pump	TOP	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	22.434.700,00	1	22.434.700,00	Surat Hibah Belum
30	13.21.07.01	02.08.01.01.68	003	Syringe Pump	TOP	Campuran	Hibah Kemenkes	2020	B	Unit					1	22.434.700,00	1	22.434.700,00	Surat Hibah Belum
31	13.21.08.01	02.06.01.05.28	001	Projector	DX210	Campuran	Hibah Kemendikbud	2020	B	Unit					14	62.300.000,00	14	62.300.000,00	Surat Hibah Belum
32	13.21.08.01	02.06.02.061.2	002	Wireless router	DWR-920	Campuran	Hibah Kemendikbud	2020	B	Unit					14	13.790.000,00	14	13.790.000,00	Surat Hibah Belum
JUMLAH TOTAL MUTASI															**58**	**4.625.779.021,00**	**58**	**4.625.779.021,00**	

Lampiran 12

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020

No	SKPD	Pengadaan dari Belanja Modal		Reklasifikasi dari Belanja Modal		Koreksi Kurang Catat		Hibah		Reklasifikasi Antar Gol. Barang		Jumlah		Keterangan
		Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Bappeda	0	201.334.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	201.334.420,00	
2	Badan Kepegawaian Daerah	0	182.778.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	182.778.000,00	
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	0	105.057.512,29	0	0,00	0	1.683.084.800,00	0	0,00	0	0,00	9	1.788.142.312,29	-**Penilaian** Kembali 1 Gedung Kantor Dewan P3 Rp174.240.000, 1 gedung kantor Polsek Sumbersuko Rp213.840.000, 5 gedung kantor balai desa nogosari Rp1.203.344.000, 1 gedung mushola di balai desa nogosari Rp21.824.000 dan 1 gedung Posyandu di balai desa nogosari Rp69.836.800
4	RSUD dr. Haryoto	0	650.232.671,00	0	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	680.232.671,00	- **Biaya Rehab** Taman Alamanda di reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.000.000

5	RSUD Pasirian	0	187.313.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	187.313.250,00	
6	Dinas Pendidikan	19	7.046.278.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	7.046.278.000,00	
7	Dinas Sosial	0	0,00	0	0,00	6	913.223.000,00	0	0,00	0	0,00	6	913.223.000,00	-**Penilaian Kembali** atas gedung TMP sebanyak 6bh senilai Rp913.223.000
8	Dinas Kependudukan dan Capil	0	13.101.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.101.600,00	
9	Dinas Pertanian	1	198.882.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.900.000,00	1	208.782.500,00	- **Rekalsifikasi Aset** KDP ke KIB C sebab Pekerjaan Bangunan Gudang Dinas Pertanian yang sudah selesai dikerjakan Rp9.900.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	1	322.512.689,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	322.512.689,00	
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	18	2.337.812.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	2.337.812.605,00	
12	Dinas Perdagangan	4	1.202.231.252,00	0	0,00	0	0,00	24	4.021.777.609,00	0	0,00	28	5.224.008.861,00	- **Hibah** dari Masyarakat berupa Kios di Pasar Pasirian 24bh @Rp18.100.000,00 dan hibah dari Kementerian Perdagangan untuk Pembangunan Pasar Klojen
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	2	996.430.716,33	0	20.003.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.016.433.916,33	- **Reklasifikasi dari BM** Jalan jaringan Irigasi menjadi gedung dan bangunan berupa Jaringan Listrik Rp20.033.200
14	Dinas Komunikasi &	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	

	Informatika												
15	Dinas Kesehatan	12	5.356.456.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	5.356.456.300,00	
16	Dinas Perhubungan	2	501.816.250,00	8	503.279.787,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	1.005.096.037,28	- **BM tidak membentuk AT** Peralatan Mesin karena menjadi aset Gedung dan Bangunan berupa Tiang Monopole Tower Meninjo Rp45.754.683,77, Tiang Monopole Tower SMK Kedungjajang Rp41.625.704,49, Tiang Monopole Tower Jembatan Grobogan Utara Rp40.465.316,93, Tiang Monopole Tower simpang 3 pom klakah Rp40.528.816,93, Tiang Monopole Tower Wonoayu Rp40.121.476,01, Tiang 11 meter Wonoayu Rp20.809.415,59, Tiang Monopole Tower simpang 4 Toga Rp37.813.445,43, dan Tower CCTV 3 Leg 42M Rp236.160.928,13
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8	1.772.112.625,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	1.772.112.625,00	
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2	544.092.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	544.092.700,00	
19	Dinas Penanaman Modal dan	0	26.553.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	26.553.700,00	

	Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
20	Bagian Umum	0	195.335.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	195.335.000,00	
21	Kecamatan Lumajang (ditambah 7 Kelurahan)	3	578.089.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	578.089.000,00	
22	Kecamatan Gucialit	1	47.256.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	47.256.000,00	
23	Kecamatan Pasrujambe	0	35.503.423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	35.503.423,00	
24	Kecamatan Kedungjajang	0	41.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	41.200.000,00	
25	Kecamatan Candipuro	0	0,00	0	0,00	2	786.240.000,00	0	0,00	0	0,00	2	786.240.000,00	- Penilaian bangunan gedung kantor polsek candipuro Rp414.720.000, dan bangunan gedung kantor koramil candipuro Rp371.520.000
JUMLAH		**73**	**22.542.380.213,62**	**8**	**553.282.987,28**	**21**	**3.382.547.800,00**	**24**	**4.021.777.609,00**	**0**	**9.900.000,00**	**126**	**30.509.888.609,90**	

Lampiran
13

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020

No	SKPD	Penghapusan Aset		Reklas ke Aset Lain-lain		Jumlah		Keterangan
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Dinas Perikanan	4	884.801.500,00	0	0,00	4	884.801.500,00	- **Penghapusan** Gedung dengan SK No. 188/11/427.12/2020
2.	Dinas Perdagangan	0	0,00	0	109.712.220,00	0	109.712.220,00	- Pembongkaran pagar dan bangunan relokasi Pasar Candipuro
3.	Kecamatan Pasirian	1	36.280.000,00	0	0,00	1	36.280.000,00	- **Penghapusan** Gedung Mushola dengan SK No 188/11/427.12/2020
JUMLAH		**5**	**921.081.500,00**	**0**	**109.712.220,00**	**5**	**1.030.793.720,00**	

Lampiran 14

Daftar Bangunan Milik TNI dan BUMN yang tercatat pada KIB Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No.	NAMA SKPD	PENGGUNAAN TANAH	LUAS (M^2)	Jumlah Bidang	Tanggal Pengadaan (Perolehan)	LETAK / ALAMAT	Harga berdasarkan Appraisal (Rp .)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	UPT. Pend. Kec. Sukodono	UPT. Pendidikan Kec. Sukodono	757,00	1	-	Sukodono	117.713.500,00	Tanah PGRI
2	UPT. Pend. Kec. Gucialit	SDN Gucialit 02	2.015,00	1	01-01-1975	Desa Gucialit	20.888.833,33	Tanah PTP
3	UPT. Pend. Kec. Gucialit	SDN Kertowono 02	714,00	1	01-01-1982	Desa Kertowono	5.533.500,00	Tanah PTP
4	UPT. Pend. Kec. Gucialit	SDN Kertowono 04	4.443,00	1	01-01-1983	Desa Kertowono	34.169.720,00	Tanah PTP
5	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 04	3.167,00	1	31-12-1979	Kaliboto Lor	96.940.790,00	Tanah PG
6	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 05	1.095,00	1	30-12-1979	Kaliboto Lor	35.481.600,00	Tanah PG
7	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 09	300,00	1	01-01-1981	Nyeoran	918.000,00	Tanah PG
8	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 10	1.341,37	1	01-01-1973	Kaliboto Lor	70.645.223,33	Tanah PG
9	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 11	4.350,00	1	01-01-1982	Kaliboto Lor	172.890.000,00	Tanah PG
10	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 15	3.168,00	1	01-01-1980	Kaliboto Lor	9.694.080,00	Tanah PG
11	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Kidul 01	5.372,00	1	01-01-1925	Jl. Ranupakis Kaliboto Kidul	283.675.813,33	Tanah PG

12	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Kidul 04	2.500,00	1	02-01-1968	Kaliboto Kidul	132.479.521,00	Tanah PG
13	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Kidul 06	1.320,00	1	03-01-1968	Kaliboto Kidul	33.673.000,00	Tanah PG
14	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Rojopolo 02	329,00	1	01-01-1978	Desa Sukosari	25.161.920,00	Tanah PG
15	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Rojopolo 07	1.060,00	1	01-01-1986	Desa Sukosari	3.349.600,00	Tanah PG
16	UPT. Pend. Kec. Klakah	UPT. Pendidikan Kec. Klakah	390,00	1	-	Mlawang	26.041.600,00	Tanah PJKA
17	UPT. Pend. Kec. Randuagung	SDN Gedangmas 03	1.600,00	1	02-01-1976	Gedang Mas	163.200.000,00	Tanah PG
18	UPT. Pend. Kec. Randuagung	SDN Kalidilem 02	738,00	1	02-01-1982	Kalidilem	63.290.880,00	Tanah PG
19	UPT. Pend. Kec. Randuagung	SDN Kalidilem 03	517,00	1	03-01-1982	Kalidilem	84.374.400,00	Tanah PG
20	UPT. Pend. Kec. Randuagung	SDN Tunjung 02	2.156,00	1	02-01-1971	Desa Tunjung	53.725.000,00	Tanah PG
21	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Rowokangkung 02	3.500,00	1	12-11-1994	Rowokangkung	43.540.000,00	Tanah PG
22	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Rowokangkung 03	3.500,00	1	01-01-1972	Persil Banter	807.563.333,00	Tanah PG
23	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Rowokangkung 04	3.116,00	1	01-01-1964	Persil Blimbing	110.301.333,00	Tanah PG
24	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Rowokangkung 05	5.320,00	1	01-01-1972	Jl. Loji Persil Genitri	76.340.000,00	Tanah PG
25	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Sumbersari 02	1.366,00	1	01-01-1964	Sumbersari	25.489.560,00	Tanah PG
26	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Dawuhan Wetan 02	3.221,40	1	01-01-1972	Jl. Blukon persil	417.439.750,00	Tanah PG

27	UPT. Pend. Kec. Kunir	UPT. Pendidikan Kec. Kunir	310,00	1	-	Jl. PB. Sudirman 22	12.854.667,00	Tanah PGRI
28	UPT. Pend. Kec. Kunir	SDN Jatimulyo 02	690,00	1	31-12-1976	Jatimulyo	14.306.000,00	Tanah Perhutani
29	UPT. Pend. Kec. Pasirian	UPT. Pendidikan Kec. Pasirian	136,00	1	-	Pasirian	3.626.667,00	Tanah PGRI
30	UPT. Pend. Kec. Pasirian	SDN Gondoruso 01	1.633,00	1	01-01-1930	Desa Gondoruso	139.349.334,00	Tanah Perhutani
31	UPT. Pend. Kec. Pasirian	SDN Bades 06	2.960,00	1	01-01-1973	Dampar	62.357.333,33	Tanah PTP
32	UPT. Pend. Kec. Pasirian	SDN Bago 04	1.192,00	1	01-01-1982	Desa Bago	43.306.667,00	Tanah Perhutani
33	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Sumberwuluh 02	2.800,00	1	02-01-1958	Kajar Kuning	29.493.333,00	Tanah Perhutani
34	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Sumberwuluh 03	2.808,00	1	03-01-1958	Sumberwuluh	29.577.600,00	Tanah Perhutani
35	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Sumberwuluh 04	2.500,00	1	01-01-1988	Desa Sumberwuluh	65.833.333,00	Tanah Perhutani
36	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Penanggal 03	1.175,00	1	01-01-1983	Kamp. Baru Penanggal	61.883.333,00	Tanah Perhutani
37	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Kloposawit 02	600,00	1	01-01-1980	Desa Kloposawit	5.688.560,00	Tanah Perhutani
38	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Kloposawit 02	600,00	1	01-01-1980	Jl. Raya Kloposawit	682.000,00	Tanah Perhutani
39	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Kloposawit 03	924,00	1	01-01-1986	Kebonjati Kloposawit	9.640.400,00	Tanah Perhutani
40	Kecamatan Jatiroto	Kecamatan Jatiroto	1.172,00	1	04-07-1997	Desa Jatiroto	325.866.000,00	Tanah PG

Lampiran 15

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jembatan Tahun 2020

No	SKPD	Pengadaan dari Belanja Modal		Reklasifikasi dari Belanja Modal		Koreksi Kurang Catat		Reklasifikasi Antar Gol. Barang		Jumlah		Keterangan
		Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	Jml	Nilai Brg	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	RSUD Pasirian	1	299.795.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	299.795.870,00	
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0	0,00	1	210.690.250,00	0	0,00	0	0,00	1	210.690.250,00	
3	Dinas Sosial	0	0,00	0	0,00	2	66.048.000,00	0	0,00	2	66.048.000,00	- **Penilaian Kembali** atas Jalan TMP sebanyak 2bh senilai Rp66.048.000
4	Dinas Perhubungan	160	1.284.932.838,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	160	1.284.932.838,40	
5	Dinas Perikanan	0	364.117.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	364.117.000,00	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	109	95.412.580.586,94	0	0,00	92	13.163.618.507,00	0	645.051.820,00	201	109.221.250.913,94	- **Penilaian** Jalan sebanyak 26 jalan sebesar Rp12.062.174.507 dan Penilaian Irigasi sebanyak 16 irigasi sebesar Rp1.101.444.000
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	582.046.969,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	582.046.969,40	
JUMLAH		**271**	**97.943.473.264,74**	**1**	**210.690.250,00**	**94**	**13.229.666.507,00**	**0**	**645.051.820,00**	**366**	**112.028.881.841,74**	

Lampiran 16

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

No	SKPD	Penghapusan Aset		Koreksi Kurang Catat		Jumlah		Keterangan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Dinas Perikanan	8	1.550.661.900,00	0	0,00	8	1.550.661.900	- **Penghapusan** Jalan, Bangunan Irigasi dan Jaringan dengan SK No. 188/11/427.12/2020
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	15	30.441.704.047,42	32	0,00	47	30.441.704.047	- **Penghapusan** 8bh JALAN sesuai SK Penghapusan Nomor 188/29/427.12/2020 Tgl 21 desember 2020 sebesar Rp2.335.195.440, penghapusan Jembatan dengan SK Penghapusan Nomor 188/20/427.12/2020 tgl 18 September 2020 sebesar Rp4.458.184,47 (jembatan talang), dan Penghapusan 6bh irigasi sesuai SK Penghapusan Nomor 188/32/427.12/2020 Tgl 30 desember 2020
JUMLAH		**23**	**31.992.365.947,42**	**32**	**0,00**	**55**	**31.992.365.947,42**	

Lampiran 17

Daftar Jalan yang dibangun bukan diatas Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang

No	KODE RUAS	Nama Ruas	NAMA PENGENAL		Panjang (Km)	Kecamatan	Kepemilikan tanah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	066.00	Sumberwuluh - Gunung sawur	Sumberwuluh	Gunung Sawur	4,45	Candipuro	PERUM (PERHUTANI)
2	068.00	Penanggal - Kloposawit	Penanggal	Kloposawit	5,45	Candipuro	PERHUTANI AWAL RUAS
3	204.00	Candipuro - Penanggal	Candipuro	Penanggal	6,35	Candipuro	PERUM (PERHUTANI)
4	206.00	Sumbermujur - Penanggal	Sumbermujur	Penanggal	5,2	Candipuro	PERHUTANI AKHIR RUAS
5	209.00	Sumbermujur - Umbulrejo	Sumbermujur	Umbulrejo	1,35	Candipuro	PERUM (PERHUTANI)
6	017.00	Gondoruso - Dampar	Gondoruso	Dampar	4,6	Pasirian	PTPN AKHIR RUAS
7	018.00	Dampar - Kali Gede	Dampar		6,6	Pasirian	PTPN TENGAH RUAS
8	041.00	JLS - Bambang	Bago	Pantai Bambang	2,45	Pasirian	PERUM (PERHUTANI)
9	196.00	Lingkar Watu Udel	Watu Udel	Watu Udel	2,25	Pasirian	PERUM (PERHUTANI)
10	197.00	Dampar - Pantai	Dampar	Pantai Dampar	2,55	Pasirian	PTPN
11	005.00	Wonorejo - Curah Petung	Wanorejo	Curah Petung	2,3	Kedungjajang	PT. KAI
12	008.00	Karanganom - Senduro	Karanganom	Senduro	7,75	Kedungjajang	PERUM (PERHUTANI)
13	019.00	Kali Gede - Karangmenjangan	Kali Gede	Karangmenjangan	12,4	Tempursari	PERHUTANI
14	038.00	Pandanwangi - JLS	Pandanwangi	Jalan Lintas Selatan	0,7	Tempursari	TNI AU
15	064.00	Persil - Sumbersari	Persil	Sumbersari	3,4	Tempursari	PG. JATIROTO
16	132.00	Sumbersari - Nogosari	Sumbersari	Nogosari	2	Tempursari	PG. JATIROTO
17	032.00	Rojopolo - Persil	Rojopolo	Persil	4	Jatiroto	PG. JATIROTO
18	063.00	Jatiroto - Persil	Jatiroto	Persil	6,8	Jatiroto	PG. JATIROTO
19	129.00	Curahwedi - Kaliboto	Curahwedi	Kaliboto	2,55	Jatiroto	PT. KAI AWAL RUAS
20	263.00	Puskesmas	Jembatan Puskesmas	Alun alun Jatiroto	0,42	Jatiroto	PG. JATIROTO
21	264.00	Kecamatan Jatiroto	Polsek Jatiroto	Kecamatan Jatiroto	0,16	Jatiroto	PG. JATIROTO

22	265.00	Stasiun Jatiroto	Pertigaan Beringin	Perempatan Pabrik	1,13	Jatiroto	PG. JATIROTO
23	118.00	Umbul - Pajarakan	Umbul	Pajarakan	5,25	Randuagung	PERUM (PERHUTANI) Awal Ruas
24	122.00	Tunjung - Kalibanter	Tunjung	Kalibanter	9	Randuagung	PERHUTANI / PTP AKHIR RUAS
25	127.00	Kalidilem - Banyuputih Kidul	Kalidilem	Banyuputih Kidul	2,25	Randuagung	PG. JATIROTO AKHIR RUAS
26	097.00	Ranu Klakah - Ranu Pakis	Ranu Klakah	Ranu Pakis	2,55	Klakah	PERUM (PERHUTANI)
27	098.00	Papringan - Gunung Lemongan	Papringan	Gunung Lemongan	2,5	Klakah	Kehutanan
28	261.00	Stasiun Klakah	Kantor Telkom	Pasar Klakah	0,42	Klakah	PT. KAI
29	051.00	Senduro - Ranu Pane	Senduro	Ranu Pane	30,45	Senduro	TNBTS
30	053.00	Kayu Enak - Argosari	Kandangan	Argosari	15,25	Senduro	TNBTS
31	025.00	Kedawung - Gucialit	Kedawung	Gucialit	5,65	Gucialit	PTP
32	074.00	Wonokerto - Gucialit	Wonokerto	Gucialit	5,45	Gucialit	PERUM (PERHUTANI)
33	077.00	Jeruk - Sombo	Jeruk	Sombo	6,75	Gucialit	PERKEBUNAN
34	256.00	Wonokerto - Kenongo	Wonokerto	Kenongo	7,7	Gucialit	PERUM (PERHUTANI)
35	416.00	Brigjen Katamso	Simpang Lima Pasar Besar	Perempatan Toga	0,83	Dalam Kota	PT. KAI
36	417.00	Gajah Mada	Perempatan Toga	Perempatan LSC	1,46	Dalam Kota	PT. KAI
37	418.00	Hayam Wuruk	Perempatan LSC	Pertigaan Pasar Sukodono	0,39	Dalam Kota	PT. KAI
38	451.00	Demokrasi	Pertigaan Pasar Hewan	Pertigaan MKS	0,8	Dalam Kota	PT. KAI
39	466.00	Piere Tendean	Pertigaan Gedung Kematian	Simpang Lima Pasar Besar	0,47	Dalam Kota	PT. KAI
40	488.00	Iskandar Muda	Perempatan RSI	Pertigaan Warung Bu Kaji	0,33	Dalam Kota	PT. KAI

Lampiran
18

Daftar Jaringan Irigasi yang bernilai Rp. 0,00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Tahun Perolehan	Letak / Lokasi	Dokumen		Nomor Kode Tanah	Jumlah Barang	Harga	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang	Register			Tanggal	Nomor					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jaringan Irigasi. Curah Petung II	0414010303	0001	2003	Desa. Curah petung, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang			0101110703/00074	1	0,00	B	
2	Jaringan Irigasi Duk I	0414010303	0002	2003	Desa.Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang			0101110703/00083	1	0,00	B	
3	Jaringan IrigasiI Duk II	0414010303	0003	2003	Desa.Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang			0101110703/00084	1	0,00	B	
4	Jaringan Irigasi Jagalan II	0414010303	0004	2003	Desa. Candipuro, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00102	1	0,00	B	
5	Jaringan Irigasi Jombok III	0414010303	0005	2003	Desa. Jambe arum, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang			0101110703/00010	1	0,00	B	
6	Jaringan Irigasi. Pakel I	0414010303	0006	2003	Desa. Pasrujambe, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang			0101110703/00017	1	0,00	B	
7	Jaringan Irigasi Pancing III	0414010303	0007	2003	Desa. Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang			0101110703/00154	1	0,00	B	
8	Jaringan Irigasi.Pelus II	0414010303	0008	2003	Desa. Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00160	1	0,00	B	
9	Jaringan Irigasi.Pelus III	0414010303	0009	2003	Desa. Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00161	1	0,00	B	

10	Jaringan Irigasi. Poh II	0414010303	0010	2003	Desa. Tambah rejo, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00165	1	0,00	B	
11	Jaringan Irigasi. Poh III	0414010303	0011	2003	Desa. Tambah rejo, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00166	1	0,00	B	
12	Jaringan Irigasi. Poh V	0414010303	0012	2003	Desa. Kloposawit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00168	1	0,00	B	
13	Jaringan Irigasi Sumber Cabek II	0414010303	0013	2003	Desa. Ranuwurung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang			0101110703/00208	1	0,00	B	
14	Jaringan Irigasi. Sumber Gebang	0414010303	0014	2003	Desa. Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang			0101110703/00218	1	0,00	B	
15	Jaringan Irigasi Sumber Gentong	0414010303	0015	2003	Desa. Jatimulyo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang			0101110703/00222	1	0,00	B	
16	Jaringan Irigasi Sumber Gentong	0414010303	0016	2003	Desa. Supiturang, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00223	1	0,00	B	
17	Jaringan Irigasi. Sumber Nongko I	0414010303	0017	2003	Desa. Sumber wuluh, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00268	1	0,00	B	
18	Jaringan Irigasi Gedangan	0414010303	0018	2003	Desa.Tunjung, Kec. Randu agung, Kab. Lumajang			0101110703/00098	1	0,00	B	
19	Jaringan Irigasi Karang Kletak	0414010303	0019	2003	Desa. Nguter, Kec.Pasirian, Kab. Lumajang			0101110703/00117	1	0,00	B	
20	Jaringan Irigasi Kedung Klampok	0414010303	0020	2003	Desa.Kalipenggung, Kec. Randu agung, Kab. Lumajang			0101110703/00124	1	0,00	B	
21	Jaringan Irigasi Kuburan	0414010303	0021	2003	Desa. Nguter, Kec.Pasirian, Kab. Lumajang			0101110703/00134	1	0,00	B	
22	Jaringan Irigasi Lancing	0414010303	0022	2003	Desa. Salak, Kec. Randu agung, Kab. Lumajang			0101110703/00136	1	0,00	B	
23	Jaringan Irigasi Lombok	0414010303	0023	2003	Desa.Candipuro, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00144	1	0,00	B	

24	Jaringan Irigasi Mangun	0414010303	0024	2003	Desa. Kalibendo, Kec.Pasirian, Kab. Lumajang			0101110703/00145	1	0,00	B	
25	Jaringan Irigasi Petehan	0414010303	0025	2003	Desa.Kalipenggung, Kec. Randu agung, Kab. Lumajang			0101110703/00162	1	0,00	B	
26	Jaringan Irigasi Sumber Bening	0414010303	0026	2003	Desa. Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00197	1	0,00	B	
27	Jaringan Irigasi Sumber Bulus	0414010303	0027	2003	Desa. Oro-oro ombo, Kec.Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00203	1	0,00	B	
28	Jaringan Irigasi Sumber Bunting	0414010303	0028	2003	Desa. Kedungjajang, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang			0101110703/00204	1	0,00	B	
29	Jaringan Irigasi Sumber Buntung II	0414010303	0029	2003	Desa. Sentul, Kec.Pasrujambe, Kab. Lumajang			0101110703/00024	1	0,00	B	
30	Jaringan Irigasi Sumber Buntung III	0414010303	0030	2003	Desa. Karanganom, Kec.Pasrujambe, Kab. Lumajang			0101110703/00206	1	0,00	B	
31	Jaringan Irigasi Sumber Cilik	0414010303	0031	2003	Desa. Jatisari, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang			0101110703/00210	1	0,00	B	
32	Jaringan Irigasi Sumber Dadi	0414010303	0032	2003	Desa. Jambe arum, Kec.Pasrujambe, Kab. Lumajang			0101110703/00026	1	0,00	B	
33	Jaringan Irigasi Sumber Dongki	0414010303	0033	2003	Desa. Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00214	1	0,00	B	
34	Jaringan Irigasi Sumber Dukuh	0414010303	0034	2003	Desa.Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang			0101110703/00215	1	0,00	B	
35	Jaringan Irigasi Sumber Gendol	0414010303	0035	2003	Desa. Jugosari, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00220	1	0,00	B	

36	Jaringan Irigasi Sumber Gledek	0414010303	0036	2003	Desa. Pagowan, Kec.Pasrujambe, Kab. Lumajang			0101110703/00027	1	0,00	B	
37	Jaringan Irigasi Sumber Gotehan	0414010303	0037	2003	Desa. Sukorejo, Kec.Pasrujambe, Kab. Lumajang			0101110703/00028	1	0,00	B	
38	Jaringan Irigasi Sumber Guci	0414010303	0038	2003	Desa. Banyuputih Lor, Kec. Randu agung, Kab. Lumajang			0101110703/00227	1	0,00	B	
39	Jaringan Irigasi Sumber Gumuk Mas	0414010303	0039	2003	Desa. Supiturang, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00228	1	0,00	B	
40	Jaringan Irigasi Sumber Jebok	0414010303	0040	2003	Desa.Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00234	1	0,00	B	
41	Jaringan Irigasi Sumber Kajar Kuning	0414010303	0041	2003	Desa. Sumber wuluh, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00237	1	0,00	B	
42	Jaringan Irigasi Sumber Kamar A	0414010303	0042	2003	Desa. Supiturang, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00241	1	0,00	B	
43	Jaringan Irigasi Sumber Kecambil	0414010303	0043	2003	Desa.Jokarto, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang			0101110703/00242	1	0,00	B	
44	Jaringan Irigasi Sumber Kembar	0414010303	0044	2003	Desa. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang			0101110703/00245	1	0,00	B	
45	Jaringan Irigasi Sumber Kolbek	0414010303	0045	2003	Desa. Kaliboto lor, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang			0101110703/00252	1	0,00	B	
46	Jaringan Irigasi Sumber Lengkong I	0414010303	0046	2003	Desa. Oro-oro ombo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00257	1	0,00	B	
47	Jaringan Irigasi Sumber Lengkong II	0414010303	0047	2003	Desa. Oro-oro ombo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00258	1	0,00	B	
48	Jaringan Irigasi Sumber Manggarai	0414010303	0048	2003	Desa. Bandaran, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang			0101110703/00260	1	0,00	B	

49	Jaringan Irigasi Sumber Mijah	0414010303	0049	2003	Desa. Sukorejo, Kec.Pasrujambe, Kab. Lumajang			0101110703/00034	1	0,00	B	
50	Jaringan Irigasi Sumber Mojo	0414010303	0050	2003	Desa.Mojo, Kec. Padang, Kab. Lumajang			0101110703/00261	1	0,00	B	
51	Jaringan Irigasi Sumber Mualam	0414010303	0051	2003	Desa. Buwek, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang			0101110703/00262	1	0,00	B	
52	Jaringan Irigasi Sumber Munder	0414010303	0052	2003	Desa. Tukum, Kec. Tekung, Kab. Lumajang			0101110703/00264	1	0,00	B	
53	Jaringan Irigasi Sumber Nah	0414010303	0053	2003	Desa.Kalisemut, Kec. Padang, Kab. Lumajang			0101110703/00266	1	0,00	B	
54	Jaringan Irigasi Sumber Onggomanik	0414010303	0054	2003	Desa. Jambe kumbu, Kec.Pasrujambe, Kab. Lumajang			0101110703/00271	1	0,00	B	
55	Jaringan Irigasi Sumber Penanggungan	0414010303	0055	2003	Desa. Jambe kumbu, Kec.Pasrujambe, Kab. Lumajang			0101110703/00276	1	0,00	B	
56	Jaringan Irigasi Sumber Petung	0414010303	0056	2003	Desa. Sumber petung, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang			0101110703/00279	1	0,00	B	
57	Jaringan Irigasi Sumber Poh	0414010303	0057	2003	Desa. Kalisemut, Kec. Padang, Kab. Lumajang			0101110703/00281	1	0,00	B	
58	Jaringan Irigasi Sumber Ranuyoso	0414010303	0058	2003	Desa. Sumber petung, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang			0101110703/00289	1	0,00	B	
59	Jaringan Irigasi Sumber Rojo	0414010303	0059	2003	Desa. Supit urang, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00290	1	0,00	B	
60	Jaringan Irigasi Sumber Rowo Baung	0414010303	0060	2003	Desa. Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00291	1	0,00	B	

61	Jaringan Irigasi Sumber Salak	0414010303	0061	2003	Desa. Sumber wuluh, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00294	1	0,00	B	
62	Jaringan Irigasi Sumber Sari	0414010303	0062	2003	Desa. Supiturang, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00295	1	0,00	B	
63	Jaringan Irigasi Sumber Sayang	0414010303	0063	2003	Desa. Selok anyar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang			0101110703/00036	1	0,00	B	
64	Jaringan Irigasi Sumber Sentol	0414010303	0064	2003	Desa. Sentul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang			0101110703/00298	1	0,00	B	
65	Jaringan Irigasi Sumber Sepikul	0414010303	0065	2003	Desa. Grobogan, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang			0101110703/00299	1	0,00	B	
66	Jaringan Irigasi Sumber Sonok	0414010303	0066	2003	Desa. Duren, Kec. Klakah, Kab. Lumajang			0101110703/00301	1	0,00	B	
67	Jaringan Irigasi Sumber Sukosari	0414010303	0067	2003	Desa. Pundungsari, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang			0101110703/00304	1	0,00	B	
68	Jaringan Irigasi Sumber Tangis	0414010303	0068	2003	Desa. Oro-oro ombo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00307	1	0,00	B	
69	Jaringan Irigasi Sumber Tangkil	0414010303	0069	2003	Desa. Bence, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang			0101110703/00308	1	0,00	B	
70	Jaringan Irigasi Sumber Tempuran	0414010303	0070	2003	Desa. Tempursari, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang			0101110703/00312	1	0,00	B	
71	Jaringan Irigasi Sumber Urang	0414010303	0071	2003	Desa. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang			0101110703/00316	1	0,00	B	
72	Jaringan Irigasi Sumber Wakap	0414010303	0072	2003	Desa. Supit urang, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang			0101110703/00318	1	0,00	B	
73	Jaringan Irigasi Sumber Wringin	0414010303	0073	2003	Desa. Sumber Wringin, Kec. Klakah, Kab. Lumajang			0101110703/00320	1	0,00	B	
74	Jaringan Irigasi Pinus	0414010303	0074	2003	Desa.Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00163	1	0,00	B	

75	Jaringan Irigasi Prapatan	0414010303	0075	2003	Desa. Candipuro, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00171	1	0,00	B	
76	Jaringan Irigasi Sumber Dompyong I	0414010303	0076	2003	Desa. Jugosari, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00212	1	0,00	B	
77	Jaringan Irigasi Sumber Dompyong II	0414010303	0077	2003	Desa. Jugosari, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00213	1	0,00	B	
78	Jaringan Irigasi Sumber Kemanten	0414010303	0078	2003	Desa. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang			0101110703/00243	1	0,00	B	
79	Jaringan Irigasi Sumber Kemiri I	0414010303	0079	2003	Desa. Jugosari, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00246	1	0,00	B	
80	Jaringan Irigasi Sumber Kemiri II	0414010303	0080	2003	Desa. Jugosari, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang			0101110703/00247	1	0,00	B	
81	Jaringan Irigasi Sumber Kenek	0414010303	0081	2003	Desa. Kalipenggung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang			0101110703/00248	1	0,00	B	

Lampiran 19

Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020

No	SKPD	Pengadaan dari Belanja Modal		Reklasifikasi dari Belanja Modal		Jumlah		Keterangan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Dinas Pendidikan	110.146	4.843.941.172,00	145	11.190.000,00	110.291	4.855.131.172,00	- **Reklasifikasi** dari BM Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan Rp11.190.000
2	Dinas Lingkungan Hidup	50	199.650.000,00	0	0,00	50	199.650.000,00	
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21	543.488.000,00	0	0,00	21	543.488.000,00	
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	23	537.889.000,00	0	0,00	23	537.889.000,00	
5	Dinas Kesehatan	0	0,00	2	3.800.000,00	2	3.800.000,00	- **Reklasifikasi** dari BM Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Lainnya berupa prosotan anak 1bh Rp1.900.000 dan pagar mainan plastik 1bh Rp1.900.000
JUMLAH		**110.240**	**6.124.968.172,00**	**147**	**14.990.000,00**	**110.387**	**6.139.958.172,00**	

Lampiran 20

Penambahan Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2020

No	SKPD	Reklasifikasi dari Belanja Modal		Keterangan
		Jumlah	Nilai	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	RSUD dr. Haryoto	1	3.300.000,00	- **Biaya Perencanaan** gedung kantor belakang direklasifikasi dari BM Gedung bangunan menjadi KDP Perencanaan Rehab Ruang Berkas (Penambahan R. Atas) Rp3.300.000
2.	Dinas Ketahanan Pangan	1	9.130.000,00	**- Biaya Perencanaan** gedung kantor belakang direklasifikasi dari BM Gedung bangunan menjadi KDP senilai Rp9.130.000
3.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	4.000.000,00	- **Biaya Perencanaan** direklasifikasi dari BM Gedung bangunan menjadi KDP senilai Rp4.000.000
4.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & PP	1	6.000.000,00	
5.	Dinas Lingkungan Hidup	1	29.788.000,00	- **Biaya Perencanaan** direklasifikasi dari BM Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi KDP Perencanaan Instalasi PDU Sampah Rp29.788.000
6.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2	109.282.500,00	
7.	Dinas Perdagangan	6	153.599.887,00	- **Biaya Perencanaan** yang direklasifikasi dari BM Gedung bangunan menjadi KDP yaitu Biaya perencanaan Rehab 6 Bangunan Pasar, yaitu Pasar Ikan Higienis 1, Pasar Ikan Higienis 8, Pasar Tempeh, Pasar Wates Wetan, Pasar Sukodono, dan Pasar Baru
8.	Dinas Komunikasi & Informatika	3	113.168.140,00	- **Biaya Perencanaan** gedung kantor belakang direklasifikasi dari BM Gedung bangunan menjadi KDP meliputi Biaya Perencanaan Gedung Kantor Rp4.000.000, Biaya Perencanaan Gudang Rp9.845.000, Biaya Perencanaan Jaringan FO Rp99.323.140
9.	Dinas Kesehatan	15	206.105.150,00	- **Biaya Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi** 3 gedung puskesmas, 7 gedung pustu, dan 5 TPS direklasifikasi dari BM Gedung bangunan menjadi KDP

10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	19	681.257.887,00	- **Reklasifikasi BM** Gedung dan bangunan menjadi KDP berupa Perencanaan Stadion dan Penyusunan DED pembangunan Kampus UNEJ sebesar Rp199.287.000 dan Reklasifikasi Realisasi BM Jalan, irigasi dan jaringan menjadi KDP berupa Biaya Umum 6bh Irigasi dan 11bh Jalan sebesar Rp481.970.887
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	6.638.500,00	- **Reklasifikasi** dari belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi menjadi KDP berupa Biaya Perencanaan Jalan Diponegoro Rp6.638.500
12.	Kec. Jatiroto	1	1.000.000,00	- **Biaya Perencanaan** gedung kantor belakang direklasifikasi dari BM Gedung bangunan menjadi KDP senilai Rp1.000.000
13.	Kec. Tekung	1	7.800.000,00	- **Biaya Perencanaan** gedung kantor belakang direklasifikasi dari BM Gedung bangunan menjadi KDP senilai Rp9.130.000
JUMLAH		**53**	**1.331.070.064,00**	

Lampiran 21

Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020

No	SKPD	Penghapusan Aset		Reklasifikasi Antar Gol. Barang		Jumlah		Keterangan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	1	55.103.000,00	0	0,00	1	55.103.000,00	- **Penghapusan** Aset KDP berdasarkan SK No 188/29/427.12/2020 tanggal 20 Desember 2020
2	Dinas Pertanian	0	0,00	0	9.900.000,00	0	9.900.000,00	- **Rekalsifikasi Aset** KDP ke KIB C sebab Pekerjaan Bangunan Gudang Dinas Pertanian yang sudah selesai dikerjakan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	35	1.406.162.900,00	33	645.051.820,00	68	2.051.214.720,00	- **Reklasifikasi** Aset KDP menjadi Jalan, Jaringan dan irigasi disebabkan konstruksi yang sudah selesai sebanyak 32 Jalan dan 1 Jembatan sebesar Rp645.051.820
4	Bagian Umum	2	74.115.000,00	0	0,00	2	74.115.000,00	- **Penghapusan** Aset KDP berdasarkan SK No 188/29/427.12/2020 tanggal 20 Desember 2020
JUMLAH		**38**	**1.535.380.900,00**	**33**	**654.951.820,00**	**71**	**2.190.332.720,00**	